



PEMERINTAH KABUPATEN PESISIR SELATAN

LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH

**TAHUN ANGGARAN 2024
(AUDITED)**



PEMERINTAH KABUPATEN PESISIR SELATAN



**LAPORAN KEUANGAN
PEMERINTAH DAERAH**

TAHUN ANGGARAN 2024

AUDITED

KATA PENGANTAR

Syukur Alhamdulillah kami ucapkan kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan rahmat dan karunia-Nya sehingga Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2024 telah dapat disusun sesuai dengan ketentuan berlaku.

Sesuai dengan Undang-undang RI nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara dan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Bupati Pesisir Selatan selaku pemegang kuasa pengelolaan keuangan daerah dan mewakili Pemerintah Daerah dalam kepemilikan kekayaan daerah yang dipisahkan berkewajiban menyusun dan menyampaikan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah yang dipimpinnya. Berkaitan dengan hal tersebut Pemerintah Daerah Kabupaten Pesisir Selatan sebagai entitas pelaporan berkewajiban menyelenggarakan penatausahaan dan pengakuntansian atas pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2024 dengan menyusun Laporan Keuangan Pemerintah Daerah.

Penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2024 yang terdiri atas: 1) Laporan Realisasi Anggaran (LRA); 2) Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih (Laporan Perubahan SAL); 3) Neraca; 4) Laporan Operasional (LO); 5) Laporan Arus Kas (LAK); dan 6) Laporan Perubahan Ekuitas (LPE); dan 7) Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK), telah berpedoman kepada Peraturan Pemerintah Nomor 71 tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan dan Peraturan Bupati Nomor 55 Tahun 2024 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah Kabupaten Pesisir Selatan. Informasi yang disajikan didalamnya telah disusun sesuai dengan ketentuan yang berlaku sehingga diharapkan dapat memenuhi kebutuhan berbagai pihak yang berkepentingan.

Laporan Keuangan ini disusun dan disampaikan kepada kelompok utama pengguna Laporan Keuangan Pemerintah Daerah namun tidak terbatas pada masyarakat, para wakil rakyat, lembaga pengawas, lembaga pemeriksa, serta pihak yang memberi atau berperan dalam proses donasi, investasi, dan juga pemerintah yang lebih tinggi. Diharapkan melalui laporan ini dapat meningkatkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah.

BUPATI PESIR SELATAN



HENDRAJONI



BUPATI PESISIR SELATAN

PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB

Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2024 yang terdiri atas: 1) Laporan Realisasi Anggaran (LRA); 2) Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih (Laporan Perubahan SAL); 3) Neraca; 4) Laporan Operasional (LO); 5) Laporan Arus Kas (LAK); dan 6) Laporan Perubahan Ekuitas (LPE); dan 7) Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) sebagaimana terlampir adalah tanggungjawab kami.

Laporan Keuangan Pemerintah Daerah tersebut telah disusun berdasarkan Standar Akuntansi Pemerintahan, Sistem Pengendalian Intern yang memadai, dan bebas salah saji material.

Painan, 19 Mei 2025
BUPATI PESISIR SELATAN

HENDRA JONI

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
PERNYATAAN TANGGUNGJAWAB.....	li
DAFTAR ISI.....	lii
DAFTAR TABEL	Iv
DAFTAR LAMPIRAN	V
LAPORAN KEUANGAN	
I. LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH.....	Vi
II. LAPORAN PERUBAHAN SALDO ANGGARAN LEBIH.....	Vii
III. NERACA	Viii
IV. LAPORAN OPERASIONAL	X
V. LAPORAN ARUS KAS.....	Xi
VI. LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS	Xiii
VII. CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN	
A. BAB I Pendahuluan	1
B. BAB II Ekonomi Makro, Kebijakan Keuangan Dan Pencapaian Target Kinerja APBD	6
C. BAB III Ikhtisar Pencapaian Kinerja Keuangan	16
D. BAB IV Kebijakan Akuntansi.....	20
E. BAB V Penjelasan Pos-Pos Laporan Keuangan	59
F. BAB VI Informasi-Informasi Terkait Laporan Keuangan	142
G. BAB VII Penutup	154

INDEKS DAFTAR LAMPIRAN

LAMPIRAN	1	Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja Barang dan Jasa TA 2024
LAMPIRAN	2	Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja Modal Peralatan dan Mesin TA 2024
LAMPIRAN	3	Rincian Kas
LAMPIRAN	3.1	Rincian Kas Daerah
LAMPIRAN	3.2	Rincian Kas pada Bendahara Pengeluaran
LAMPIRAN	3.3	Rincian Kas pada Bendahara Penerimaan
LAMPIRAN	3.4	Rincian Kas di Bendahara BLUD
LAMPIRAN	3.4.1	Rincian Kas BLUD Puskesmas - RSUD M. Zein Painan
LAMPIRAN	3.4.2	Rincian Kas BLUD Puskesmas - Dinas Kesehatan
LAMPIRAN	3.5	Rincian Kas di Bendahara FKTP
LAMPIRAN	3.6	Rincian Kas di Bendahara BOK
LAMPIRAN	3.7	Rincian Kas di Bendahara BOS
LAMPIRAN	3.7.1	Rincian Kas di Bendahara BOS - SD
LAMPIRAN	3.7.2	Rincian Kas di Bendahara BOS - SMP
LAMPIRAN	3.8	Rincian Kas di Bendahara BOP Paud
LAMPIRAN	3.9	Rincian Kas Lainnya
LAMPIRAN	3.10	Rincian Setara Kas
LAMPIRAN	4	Daftar Piutang Netto
LAMPIRAN	4.1	Daftar Piutang Pajak
LAMPIRAN	4.2	Daftar Piutang Retribusi
LAMPIRAN	4.2.1	Rincian Piutang Retribusi Pelayanan Tempat Rekreasi dan Olahraga - Dinas Pariwisata
LAMPIRAN	4.2.2	Rincian Piutang Retribusi Pasar - Dinas Perdagangan
LAMPIRAN	4.2.3	Rincian Piutang Retribusi Retribusi Pelayanan Kesehatan - Dinas Kesehatan
LAMPIRAN	4.2.3.1	Piutang Retribusi Retribusi Pelayanan Kesehatan - Dinas Kesehatan
LAMPIRAN	4.2.3.2	Piutang Retribusi Retribusi Pelayanan Kesehatan - Rumah Sakit Umum Daerah
LAMPIRAN	4.3	Daftar Piutang Lain-Lain PAD yang Sah
LAMPIRAN	4.4	Daftar Piutang Dana Bagi Hasil / DBH Provinsi
LAMPIRAN	4.5	Daftar Piutang Lainnya
LAMPIRAN	4.6	Daftar Penyisihan Piutang Tak Tertagih
LAMPIRAN	5	Daftar Persediaan
LAMPIRAN	5.1	Rincian Persediaan
LAMPIRAN	6	Investasi Non Permanen (Dana Bergulir)
LAMPIRAN	7	Investasi Permanen
LAMPIRAN	7.1	Hibah Aset Tetap dari Pihak Ketiga
LAMPIRAN	8	Rekapitulasi Saldo Awal Aset Tetap TA 2024 dengan Hasil Mapping Aset sesuai Aplikasi per SKPD
LAMPIRAN	8.1	Rekapitulasi Mutasi Saldo Awal Aset Tetap TA 2024 dari KIB B ke KIB E Akibat Mapping
LAMPIRAN	9	Rekapitulasi Aset Tetap per SKPD
LAMPIRAN	9.1	Aset Tetap -Tanah
LAMPIRAN	9.2	Aset Tetap - Peralatan dan Mesin
LAMPIRAN	9.3	Aset Tetap - Gedung dan Bangunan
LAMPIRAN	9.4	Aset Tetap - Jalan Irigasi dan Jaringan
LAMPIRAN	9.5	Aset Tetap - Aset Tetap Lainnya
LAMPIRAN	9.6	Aset Tetap - Kontruksi Dalam Pengerjaan
LAMPIRAN	10	Rekapitulasi Akumulasi Penyusutan
LAMPIRAN	10.1	Rekapitulasi Akumulasi Penyusutan Aset Tetap Peralatan dan Mesin
LAMPIRAN	10.2	Rekapitulasi Akumulasi Penyusutan Aset Tetap Gedung dan Bangunan
LAMPIRAN	10.3	Rekapitulasi Akumulasi Penyusutan Aset Tetap Jalan Irigasi dan Jaringan
LAMPIRAN	10.4	Rekapitulasi Akumulasi Penyusutan Aset Tetap Lainnya
LAMPIRAN	11	Rekapitulasi Aset Lainnya
LAMPIRAN	11.1	Dana Bagi Hasil Treasury Deposit Facility (TDF)
LAMPIRAN	11.2	Rekapitulasi Aset Lainnya - Tagihan Tuntutan Ganti Rugi Daerah
LAMPIRAN	11.2.1	Rekapitulasi Aset Lainnya - Rincian Tagihan Tuntutan Ganti Rugi Daerah
LAMPIRAN	11.3	Rekapitulasi Aset Lainnya - Kemitraan Dengan Pihak Ketiga
LAMPIRAN	11.4	Rekapitulasi Aset Lainnya - Aset Tidak Berwujud
LAMPIRAN	11.5	Rekapitulasi Aset Lainnya - Rekapitulasi Akumulasi Amortisasi
LAMPIRAN	11.6	Rekapitulasi Aset Lainnya - Aset Lain-Lain
LAMPIRAN	11.7	Rekapitulasi Aset Lainnya - Akumulasi Amortisasi
LAMPIRAN	12	Daftar Kewajiban Jangka Pendek
LAMPIRAN	12.1	Utang Perhitungan Pihak Ketiga
LAMPIRAN	12.2	Utang Bunga
LAMPIRAN	12.3	Bagian Lancar Utang kepada Pemerintah Pusat
LAMPIRAN	12.4	Pendapatan Diterima Dimuka
LAMPIRAN	12.4.1	Rincian Pendapatan Diterima Dimuka
LAMPIRAN	12.5	Daftar Utang Belanja dan Transfer
LAMPIRAN	12.5.1	Rincian Utang Belanja dan Transfer - Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
LAMPIRAN	12.5.2	Rincian Utang Belanja dan Transfer - Dinas Kesehatan
LAMPIRAN	12.5.3	Rincian Utang Belanja dan Transfer - Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
LAMPIRAN	12.5.4	Rincian Utang Belanja - Badan Penanggulangan Bencana Daerah
LAMPIRAN	12.6	Rekapitulasi Utang Jangka Pendek Lainnya
LAMPIRAN	13	Rekapitulasi Penghapusan BMD per SKPD
LAMPIRAN	14	Rekapitulasi Penyusutan Ekstrakomtabel per SKPD
LAMPIRAN	15	Laporan Realisasi Anggaran Berdasarkan Rincian Objek Pendapatan dan Belanja
LAMPIRAN	16	Ringkasan Anggaran dan Realisasi Pendapatan per SKPD
LAMPIRAN	17	Rekapitulasi - Belanja per SKPD
LAMPIRAN	18	Rekapitulasi - Belanja Operasi per SKPD

LAMPIRAN	19	Rekapitulasi - Belanja Modal per SKPD
LAMPIRAN	20	Laporan Fungsional BLUD
LAMPIRAN	21	Rekapitulasi Beban - LO
LAMPIRAN	21.1	Rincian Beban - LO
LAMPIRAN	22	Laporan Keuangan Bank Nagari
LAMPIRAN	23	Laporan Keuangan Perusahaan Umum Daerah (Perumda) Air Minum Tirta Langkisau
LAMPIRAN	24	Laporan Keuangan BPR Samudera
LAMPIRAN	25	Laporan Keuangan Balairung Citra Jaya
LAMPIRAN	26	Laporan Ikhtisar Dana Desa
LAMPIRAN	27	Ikhtisar Laporan Kinerja Pemerintah



PEMERINTAHAN KAB. PESIR SELATAN

LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH (KONSOLIDASI)

TAHUN ANGGARAN 2024

01 Januari 2024 Sampai 31 Desember 2024

No	URAIAN	Ref Calk	ANGGARAN 2024	REALISASI TA 2024	%	REALISASI TA 2023
1	2		3	4		
1	PENDAPATAN DAERAH	5.1.1.	1,781,262,184,153.00	1,690,884,513,877.88	94.93	1,654,521,685,677.23
2	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	5.1.1.1.	208,403,292,963.00	161,576,001,454.88	77.53	153,573,933,599.23
3	Pajak Daerah	5.1.1.1.a.	31,807,541,550.00	27,736,938,804.00	87.20	28,395,740,407.08
4	Retribusi Daerah	5.1.1.1.b.	128,115,046,825.00	108,172,064,157.26	84.43	3,541,700,379.00
5	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	5.1.1.1.c.	41,785,995,944.00	11,899,367,428.00	28.48	11,016,313,390.00
6	Lain-lain PAD yang Sah	5.1.1.1.d.	6,694,708,644.00	13,767,631,065.62	205.65	110,620,179,423.15
7	JUMLAH PENDAPATAN ASLI DAERAH		208,403,292,963.00	161,576,001,454.88	77.53	153,573,933,599.23
8	PENDAPATAN TRANSFER	5.1.1.2.	1,562,806,865,776.00	1,518,538,134,126.00	97.17	1,493,284,233,498.00
9	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	5.1.1.2.1.	1,458,490,109,000.00	1,427,643,629,192.00	97.89	1,419,728,079,140.00
10	Dana Perimbangan	5.1.1.2.1.1.	1,290,840,183,000.00	1,259,993,703,192.00	97.61	1,243,062,407,140.00
11	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil (DBH)	5.1.1.2.1.1.a)	26,271,033,000.00	30,510,938,710.00	116.14	32,052,333,806.00
12	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum (DAU)	5.1.1.2.1.1.b)				
			912,330,440,000.00	905,022,519,052.00	99.20	827,284,251,074.00
	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus (DAK)	5.1.1.2.1.1.c)				
113	Fisik	5.1.1.2.1.1.d)	80,109,482,000.00	77,657,368,138.00	96.94	131,881,908,033.00
	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus (DAK)	5.1.1.2.1.1.d)				
14	Non Fisik		272,129,228,000.00	246,802,877,292.00	90.69	251,843,914,227.00
15	Dana Insentif Daerah (DID)	5.1.1.2.1.2.	0.00	0.00		12,766,111,000.00
16	Dana Desa	5.1.1.2.1.3.	167,649,926,000.00	167,649,926,000.00	100.00	163,899,561,000.00
17	Pendapatan Transfer Antar Daerah	5.1.1.2.2.	104,316,756,776.00	90,894,504,934.00	87.13	73,556,154,358.00
18	JUMLAH PENDAPATAN TRANSFER		1,562,806,865,776.00	1,518,538,134,126.00	97.17	1,493,284,233,498.00
19	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH		10,052,025,414.00	10,770,378,297.00	107.15	7,663,518,580.00
20	Pendapatan Hibah	5.1.1.2.2.a)	9,260,695,297.00	9,260,695,297.00	100.00	7,663,518,580.00
21	Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Un		791,330,117.00	1,509,683,000.00	190.78	0.00
22	JUMLAH LAIN LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH		10,052,025,414.00	10,770,378,297.00	107.15	7,663,518,580.00
23	JUMLAH PENDAPATAN	5.1.1.	1,781,262,184,153.00	1,690,884,513,877.88	94.93	1,654,521,685,677.23
24	BELANJA DAERAH	5.1.2.	1,903,284,139,168.00	1,741,084,667,241.16	91.48	
25	BELANJA OPERASI	5.1.2.1.	1,445,720,868,068.80	1,304,348,788,865.16	90.22	1,134,171,370,387.35
26	Belanja Pegawai	5.1.2.1.a.	922,792,472,735.00	822,241,704,070.00	89.10	684,928,343,746.35
27	Belanja Barang dan Jasa	5.1.2.1.b.	434,776,541,551.80	395,247,028,648.16	90.91	398,023,333,018.00
28	Belanja Hibah	5.1.2.1.c.	87,989,353,782.00	86,701,606,147.00	98.54	50,962,353,213.00
29	Belanja Bantuan Sosial	5.1.2.1.d.	162,500,000.00	-158,450,000.00	97.51	257,340,410.00
30	JUMLAH BELANJA OPERASI		1,445,720,868,068.80	1,304,348,788,865.16	90.22	1,134,171,370,387.35
31	BELANJA MODAL	5.1.2.2.	186,007,938,466.20	172,078,546,250.00	92.51	238,530,915,401.09
32	Belanja Modal Tanah	5.1.2.2.a.	1,785,114,920.00	722,013,920.00	40.45	1,175,433,993.00
33	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	5.1.2.2.b.	37,066,108,812.20	33,851,079,267.00	91.33	40,598,387,185.09
34	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	5.1.2.2.c.	50,695,911,189.00	48,036,104,682.00	94.75	46,658,123,353.90
35	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	5.1.2.2.d.	87,410,593,789.00	80,657,217,781.00	92.27	141,684,225,997.10
36	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	5.1.2.2.e.	9,050,209,756.00	8,812,130,600.00	97.37	8,414,744,872.00
37	JUMLAH BELANJA MODAL		186,007,938,466.20	172,078,546,250.00	92.51	238,530,915,401.09
38	BELANJA TIDAK TERDUGA	5.1.2.3.	6,500,000,000.00	2,135,045,328.00	32.85	4,583,826,001.00
39	Belanja Tidak Terduga		6,500,000,000.00	2,135,045,328.00	32.85	4,583,826,001.00
40	JUMLAH BELANJA TIDAK TERDUGA		6,500,000,000.00	2,135,045,328.00	32.85	4,583,826,001.00
41	BELANJA TRANSFER	5.1.2.4.	265,055,332,633.00	262,522,286,798.00	99.04	250,300,543,648.00
42	Belanja Bagi Hasil	5.1.2.4.a.	3,683,849,305.00	1,264,203,498.00	34.32	1,787,772,848.00
43	Belanja Bantuan Keuangan	5.1.2.4.b.	261,371,483,328.00	261,258,083,300.00	99.96	248,512,770,800.00
44	JUMLAH BELANJA TRANSFER		265,055,332,633.00	262,522,286,798.00	99.04	250,300,543,648.00
45	JUMLAH BELANJA		1,903,284,139,168.00	1,741,084,667,241.16	91.48	1,627,586,655,437.44
46	SURPLUS/DEFISIT		(122,021,955,015.00)	(50,200,153,363.28)	41.14	26,935,030,239.79
47	PEMBIAYAAN DAERAH		122,021,955,015.00	122,246,955,015.36	100.18	102,374,991,822.57
48	PENERIMAAN PEMBIAYAAN	5.1.4.a.	129,310,022,062.00	129,310,022,062.36	100.00	105,900,496,822.57
49	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya		129,310,022,062.00	129,310,022,062.36	100.00	105,900,496,822.57
50	JUMLAH PENERIMAAN PEMBIAYAAN		129,310,022,062.00	129,310,022,062.36	100.00	105,900,496,822.57
51	PENGELUARAN PEMBIAYAAN		7,288,067,047.00	7,063,067,047.00	96.91	3,525,505,000.00
52	Penyertaan Modal Daerah		7,288,067,047.00	7,063,067,047.00	96.91	3,525,505,000.00

53	JUMLAH PENGELUARAN PEMBIAYAAN	5.1.4.b.	7,288,067,047.00	7,063,067,047.00	96.91	3,525,505,000.00
54	PEMBIAYAAN NETTO		122,021,955,015.00	122,246,955,015.36	100.18	102,374,991,822.57
55	SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN	5.1.5.	0.00	77,046,801,652.08		129,310,022,062.36





**PEMERINTAH DAERAH
KABUPATEN PESISIR SELATAN
LAPORAN PERUBAHAN SALDO ANGGARAN LEBIH
PER 31 DESEMBER 2024 dan 2023**

(dalam rupiah)

No.	Uraian	Ref CaLK	TAHUN 2024	TAHUN 2023
1	Saldo Anggaran Lebih Awal	5.2.1	129,310,022,062.36	108,592,848,980.57
2	Penggunaan SAL sebagai Penerimaan Pembiayaan Tahun Berjalan	5.2.2	129,310,022,062.36	105,899,776,822.57
3	Subtotal (1 - 2)		-	2,693,072,158.00
4	Sisa Lebih/Kurang Pembiayaan Anggaran	5.2.3	72,046,801,652.08	129,310,022,062.36
5	(SiLPA/SiKPA) Subtotal (3+4)		72,046,801,652.08	132,003,094,220.36
6	Koreksi Kesalahan Pembukuan Tahun Sebelumnya	5.2.4	-	(2,693,072,158.00)
7	Saldo Anggaran Lebih Akhir (5+6+7)	5.2.5	72,046,801,652.08	129,310,022,062.36

Catatan atas Laporan Keuangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan secara keseluruhan.

Painan, 19 Mei 2025
BUPATI PESISIR SELATAN

HENDRAJONI



PEMERINTAH KABUPATEN PESIR SELATAN
NERACA
PER 31 DESEMBER TAHUN 2024 DAN 31 DESEMBER TAHUN 2023

URAIAN	CALK	TAHUN 2024	TAHUN 2023
1	2	3	4
ASET	5.3.1		
ASET LANCAR	5.3.1.1	145,826,547,250.71	194,214,155,651.90
Kas dan Setara Kas	5.3.1.1.a	72,046,801,652.08	129,310,022,062.36
Kas di Kas Daerah	5.3.1.1.a.1)	61,934,119,104.76	113,669,002,281.88
Kas di Bendahara Pengeluaran	5.3.1.1.a.2)	-	-
Kas di Bendahara Penerimaan	5.3.1.1.a.3)	-	-
Kas di Bendahara BLUD	5.3.1.1.a.4)	6,556,211,055.32	10,009,988,977.48
Kas di Bendahara FKTP	5.3.1.1.a.5)	-	-
Kas di Bendahara BOK	5.3.1.1.a.6)	3,478,962,217.00	5,549,681,610.00
Kas di Bendahara BOS	5.3.1.1.a.7)	47,985,275.00	81,349,193.00
Kas di Bendahara BOP PAUD	5.3.1.1.a.8)	29,524,000.00	-
Kas Lainnya	5.3.1.1.a.9)	-	-
Setara Kas	5.3.1.1.a.10)	-	-
Investasi Jangka Pendek	5.3.1.1.b	-	-
Piutang	5.3.1.1.c	43,539,286,081.27	34,123,651,908.80
Piutang Pajak	5.3.1.1.c.1)	10,420,820,248.00	9,690,086,977.00
Piutang Retribusi	5.3.1.1.c.2)	10,841,027,205.00	547,551,000.00
Piutang Lain-lain PAD yang Sah	5.3.1.1.c.3)	-	2,694,344,343.00
Piutang Dana Bagi Hasil	5.3.1.1.c.4)	33,124,642,460.00	28,729,702,466.00
Piutang Lainnya	5.3.1.1.c.5)	-	39,843,470.00
Penyisihan Piutang	5.3.1.1.c.6)	(10,847,203,831.73)	(7,577,876,347.20)
Beban Dibayar Dimuka	5.3.1.1.d	-	-
Persediaan	5.3.1.1.e	30,240,459,517.36	30,780,481,680.74
Aset Untuk dikonsolidasikan		-	-
Jumlah Aset Lancar	5.3.1.1	145,826,547,250.71	194,214,155,651.90
INVESTASI JANGKA PANJANG	5.3.1.2	-	-
Investasi Non Permanen	5.3.1.2.a	-	-
Dana Bergulir		1,772,867,927.00	1,773,307,927.00
Penyisihan Investasi Jangka Panjang Non Permanen		(1,772,867,927.00)	(1,773,307,927.00)
Jumlah Investasi Non Permanen		-	-
Investasi Permanen	5.3.1.2.b	-	-
Penyertaan Modal Pemerintah Daerah		128,233,426,287.08	121,130,236,098.99
Jumlah Investasi Permanen		128,233,426,287.08	121,130,236,098.99
Jumlah Investasi Jangka Panjang		128,233,426,287.08	121,130,236,098.99
ASET TETAP	5.3.1.3	-	-
Tanah	5.3.1.3.a	220,791,812,948.16	219,066,586,409.65
Peralatan dan Mesin	5.3.1.3.b	618,874,960,957.11	585,575,177,589.82
Gedung dan Bangunan	5.3.1.3.c	1,280,583,740,587.62	1,226,450,366,775.77
Jalan, Irigasi, dan Jaringan	5.3.1.3.d	2,480,701,856,637.11	2,449,241,401,381.36
Aset Tetap Lainnya	5.3.1.3.e	128,882,033,559.55	118,032,311,150.47
Konstruksi dalam Pengerjaan	5.3.1.3.f	102,248,910,147.53	101,097,077,446.53
Akumulasi Penyusutan	5.3.1.3.g	(2,266,374,185,459.22)	(2,087,188,010,447.27)
Jumlah Aset Tetap		2,565,709,129,377.86	2,612,274,910,306.33
DANA CADANGAN	5.3.1.4	-	-
Dana Cadangan		-	-
Jumlah Dana Cadangan		-	-
ASET LAINNYA		-	-
Dana Bagi Hasil Treasury Deposit Facility (TDF)	5.3.1.5.a	161,876,000.00	4,240,704,000.00
Tagihan Piutang Penjualan Angsuran		-	-
Tagihan Tuntutan Perbendaharaan		-	-
Tagihan Tuntutan Ganti Kerugian Daerah	5.3.1.5.b	12,130,858,192.53	93,000,000.00
Kemitraan dengan Pihak Ketiga	5.3.1.5.c	126,000,000.00	126,000,000.00
Aset Tidak Berwujud	5.3.1.5.e	5,782,821,784.34	4,252,153,218.34
Akumulasi Amortisasi Aset Tidak Berwujud	5.3.1.5.f	(4,177,961,156.23)	(4,084,837,454.00)
Aset Lain-lain	5.3.1.5.g	173,593,087,334.94	2,913,565,973.54
Akumulasi Penyusutan Aset Lainnya	5.3.1.5.h	(24,944,252,695.17)	(1,171,837,438.21)
Jumlah Aset Lainnya	5.3.1.5	162,672,429,460.41	6,368,748,299.67
TOTAL ASET	5.3.1	3,002,441,532,376.07	2,933,988,050,356.90
KEWAJIBAN	5.3.2	-	68,453,482,019.17
Kewajiban Jangka Pendek		-	-
Utang Perhitungan Pihak Ketiga	5.3.2.1.a)	-	-
Utang Bunga Denda dan Commitment Fee	5.3.2.1.b)	-	-
Bagian Lancar Utang kepada Pemerintah Pusat	5.3.2.1.c)	-	-
Pendapatan Diterima Dimuka	5.3.2.1.d)	108,001,108.00	109,224,788.00
Utang Belanja dan Transfer	5.3.2.1.e)	69,463,198,286.33	53,915,720,900.10
Utang Jangka Pendek Lainnya	5.3.2.1.f)	4,591,637,629.45	3,497,867,262.00
Jumlah Kewajiban Jangka Pendek	5.3.2.1)	74,162,837,023.78	57,522,812,950.10

URAIAN	CALK	TAHUN 2024	TAHUN 2023
1	2	3	4
Kewajiban Jangka Panjang			
Utang dalam Negeri-Pemerintah Daerah Lainnya		-	-
Jumlah Kewajiban Jangka Panjang	5.3.2.2)	-	-
TOTAL KEWAJIBAN	5.3.2	74,162,837,023.78	57,522,812,950.10
EKUITAS			
Ekuitas	5.3.3	2,928,278,695,352.29	2,876,465,237,406.80
TOTAL EKUITAS		2,928,278,695,352.29	2,876,465,237,406.80
TOTAL KEWAJIBAN DAN EKUITAS		3,002,441,532,376.07	2,933,988,050,356.90


 Palnan, 19 Mei 2025
 BUPATI PESISIR SELATAN
 HENDRAJONI



PEMERINTAH KABUPATEN PESISIR SELATAN
LAPORAN OPERASIONAL
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER TAHUN 2024 DAN 2023

(dalam rupiah)

NO	URAIAN	Ref CaLK	TAHUN 2024	TAHUN 2023	Kenaikan/Penurunan	%
1	2	3	4	5	6	7
	PENDAPATAN OPERASIONAL	5.4				
	PENDAPATAN ASLI DAERAH - LO					
	Pendapatan Pajak Daerah - LO	5.4.1.1.a	28,452,838,597.00	29,330,306,237.08	(877,667,640.08)	(2.99)
	Pendapatan Retribusi Daerah - LO	5.4.1.1.b	115,751,196,019.26	3,554,845,379.00	112,196,550,640.26	3,156.34
	Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan - LO	5.4.1.1.c	11,939,490,569.09	11,104,871,648.39	834,618,920.70	7.52
	Lain-Lain PAD yang Sah - LO	5.4.1.1.d	13,833,216,223.62	113,331,123,448.15	(99,497,907,224.53)	(87.73)
	Jumlah Pendapatan Asli Daerah - LO	5.4.1.1	169,976,541,408.97	157,326,946,712.62	12,655,594,696.35	8.04
	PENDAPATAN TRANSFER - LO					
	PENDAPATAN TRANSFER PEMERINTAH PUSAT - LO					
	Dana Perimbangan - LO		1,255,914,875,192.00	1,244,831,183,177.00	11,083,692,015.00	0.89
	Dana Insentif Daerah (DID) - LO		-	12,766,111,000.00	(12,766,111,000.00)	
	Dana Desa - LO		-	-	-	
	Jumlah Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat - LO		1,255,914,875,192.00	1,257,597,294,177.00	(1,682,418,985.00)	(0.13)
	PENDAPATAN TRANSFER ANTAR DAERAH - LO					
	Pendapatan Bagi Hasil - LO		95,289,444,928.00	88,380,924,322.00	6,908,520,606.00	7.82
	Bantuan Keuangan - LO		-	200,000,000.00	(200,000,000.00)	
	Jumlah Transfer Pendapatan Transfer Antar Daerah - LO		95,289,444,928.00	88,580,924,322.00	6,708,520,606.00	7.57
	Total Pendapatan Transfer - LO	5.4.1.2	1,351,204,320,120.00	1,346,178,218,499.00	5,026,101,621.00	0.37
	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH - LO					
	Pendapatan Hibah - LO		137,498,549,151.00	48,407,477,667.00	89,091,071,484.00	184.04
	Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan - LO		-	-	-	
	Pendapatan Lainnya		1,509,683,000.00	-	-	
	Jumlah Lain-lain Pendapatan yang Sah - LO	5.4.1.3	139,008,232,151.00	48,407,477,667.00	90,600,754,484.00	187.16
	JUMLAH PENDAPATAN OPERASIONAL	5.4.1	1,660,189,693,679.97	1,551,906,642,878.62	108,282,450,801.35	6.98
	BEBAN OPERASIONAL					
	Beban Pegawai	5.4.2.1	835,130,065,136.00	695,602,504,746.35	139,527,560,389.65	20.02
	Beban Persediaan	5.4.2.2	81,167,048,056.84	99,232,656,699.88	(18,065,608,643.04)	(18.21)
	Beban Jasa	5.4.2.3	213,196,500,135.64	192,667,743,103.35	20,330,757,032.49	10.54
	Beban Pemeliharaan	5.4.2.4	23,701,865,086.00	15,609,538,324.89	8,092,326,761.11	51.84
	Beban Perjalanan Dinas	5.4.2.5	71,684,665,797.00	65,827,686,304.00	5,856,979,493.00	8.90
	Beban Bunga	5.4.2.6	-	-	-	
	Beban Subsidi	5.4.2.7	-	-	-	
	Beban Hibah	5.4.2.8	87,356,306,628.00	49,736,631,683.00	37,619,674,945.00	75.64
	Beban Bantuan Sosial	5.4.2.9	158,450,000.00	257,340,410.00	(98,890,410.00)	(38.43)
	Beban Penyusutan dan Amortisasi	5.4.2.10	183,839,494,686.52	187,886,920,360.41	(4,047,425,873.90)	(2.15)
	Beban Penyisihan Piutang	5.4.2.11	3,778,495,318.73	1,013,986,257.30	2,764,509,061.43	272.64
	Beban Transfer	5.4.2.12	94,872,360,798.00	86,400,982,648.00	8,471,378,150.00	9.80
	Beban Lain-lain	5.4.2.13	-	-	-	
	JUMLAH BEBAN OPERASIONAL	5.4.2	1,594,887,251,642.92	1,394,636,988,537.18	200,251,263,105.74	14.36
	SURPLUS/DEFISIT DARI KEGIATAN OPERASIONAL	5.4.3	65,301,842,037.05	157,270,654,341.44	(91,968,812,304.39)	(58.48)
	SURPLUS/DEFISIT DARI KEGIATAN NON OPERASIONAL - LO					
	Surplus Penjualan Aset Non Lancar - LO		-	-	-	
	Surplus Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang - LO		-	-	-	
	Defisit Penjualan Aset Non Lancar - LO		-	-	-	
	Defisit Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang - LO		-	-	-	
	Surplus/Defisit dari Kegiatan Non Operasional Lainnya - LO		(408,741,384.14)	(7,487,701,106.87)	7,078,959,722.73	(94.54)
	JUMLAH SURPLUS/DEFISIT DARI KEGIATAN NON OPERASIONAL	5.4.4	(408,741,384.14)	(7,487,701,106.87)	7,078,959,722.73	(94.54)
	SURPLUS/DEFISIT SEBELUM POS LUAR BIASA		64,893,100,652.91	149,782,953,234.57	(84,889,852,581.66)	(56.68)
	POS LUAR BIASA					
	Pendapatan Luar Biasa - LO		-	-	-	
	Beban Luar Biasa - LO		2,135,045,326.00	4,583,826,001.00	(2,448,780,675.00)	(53.42)
	POS LUAR BIASA	5.4.5	(2,135,045,326.00)	(4,583,826,001.00)	2,448,780,675.00	(53.42)
	SURPLUS/DEFISIT - LO	5.4.6	62,758,055,324.91	145,198,127,233.57	(82,441,071,908.66)	(56.78)

Catatan atas Laporan Keuangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan secara keseluruhan

Pada 19 Mei 2025

BUPATI PESISIR SELATAN

HENDRI JONI



PEMERINTAH KABUPATEN PESIR SELATAN

LAPORAN ARUS KAS

Untuk Tahun Yang Berakhir Sampai dengan 31 Desember Tahun 2024 dan Tahun 2023

(dalam rupiah)

Uraian	Ref CaLK	2024	2023
1	2	3	4
ARUS KAS DARI AKTIVITAS OPERASI			
Arus Masuk Kas			
Penerimaan Pajak Daerah		27,736,938,804.00	28,395,740,407.08
Penerimaan Retribusi Daerah		108,172,064,157.26	3,541,700,379.00
Penerimaan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang		11,899,367,428.00	11,016,313,390.00
Penerimaan Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah		13,524,278,528.76	109,443,036,290.15
Transfer Pemerintah Pusat		1,427,643,629,192.00	1,419,728,079,140.00
Transfer Antar Daerah		90,894,504,934.00	73,556,154,358.00
Transfer Pemerintah Daerah Lainnya			-
Penerimaan Bantuan Keuangan			-
Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah/Pendapatan Hibah		9,260,695,297.00	7,663,518,580.00
Penerimaan Dana Darurat		-	-
Penerimaan Lainnya		1,509,683,000.00	-
Pendapatan Bagi Hasil Lainnya/ Bantuan Keuangan dari Pemerintah Provinsi		-	-
Jumlah Arus Masuk Kas		1,690,641,161,341.02	1,653,344,542,544.23
Arus Keluar Kas			
Pembayaran Pegawai		822,241,704,070.00	684,928,343,746.35
Pembayaran Barang dan Jasa		395,247,028,648.16	398,023,333,018.00
Pembayaran Bunga			-
Pembayaran Subsidi			-
Pembayaran Hibah		86,701,606,147.00	50,962,353,213.00
Pembayaran Bantuan Sosial		158,450,000.00	257,340,410.00
Pembayaran Tidak Terduga		2,135,045,328.00	4,583,826,001.00
Pembayaran Bagi Hasil Pendapatan		1,264,203,498.00	1,787,772,848.00
Transfer Bantuan Keuangan		261,258,083,300.00	248,512,770,800.00
Pembayaran Bagi Hasil Pendapatan Lainnya		-	-
Pembayaran Kejadian Luar Biasa		-	-
Jumlah Arus Keluar Kas		1,569,006,120,991.16	1,389,055,740,036.35
Arus Kas Bersih dari Aktivitas Operasi	5.5.1	121,635,040,349.86	264,288,802,507.88
ARUS KAS DARI AKTIVITAS INVESTASI			
Arus Masuk Kas			
Pencairan Dana Cadangan		-	-
Penjualan atas Tanah		-	-
Penjualan atas Peralatan dan Mesin			903,893,133.00
Penjualan atas Gedung dan Bangunan			273,250,000.00
Penjualan atas Jalan, Irigasi dan Jaringan		-	-
Penjualan Aset Tetap		-	-
Penjualan Aset Lainnya		243,352,536.86	-
Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan		-	-
Penerimaan Pengembalian Investasi No Permanen		-	-
Jumlah Arus Masuk Kas		243,352,536.86	1,177,143,133
Arus Keluar Kas			
Pembentukan Dana Cadangan		-	-
Perolehan Tanah		722,013,920.00	1,175,433,993.00
Perolehan Peralatan dan Mesin		33,851,079,267.00	40,598,387,185.09
Perolehan Gedung dan Bangunan		48,036,104,682.00	46,658,123,353.90
Perolehan Jalan, Irigasi dan Jaringan		80,657,217,781.00	141,684,225,997.10
Perolehan Aset Tetap Lainnya		8,812,130,600.00	8,414,744,872.00
Perolehan Aset Lainnya			-

Penyertaan Modal Pemerintah Daerah		7,063,067,047.00	3,525,505,000.00
Pengeluaran Pembelian Investasi Non Permanen		-	-
Jumlah Arus Keluar Kas		179,141,613,297.00	242,056,420,401.09
Arus Kas Bersih dari Aktivitas Investasi	5.5.2	(178,898,260,760.14)	(240,879,277,268.09)
ARUS KAS DARI AKTIVITAS PENDANAAN			
Arus Masuk Kas			
Pinjaman Dalam Negeri - Pemerintah Pusat		-	-
Pinjaman Dalam Negeri - Pemerintah Daerah lainnya		-	-
Pinjaman Dalam Negeri - Lembaga Keuangan Bank		-	-
Pinjaman Dalam Negeri - Lembaga Keuangan Bukan Bank		-	-
Pinjaman Dalam Negeri - Obligasi		-	-
Pinjaman Dalam Negeri - Lainnya		-	-
Penerimaan Kembali Pinjaman Kepada Perusahaan Negara		-	-
Penerimaan Kembali Pinjaman Kepada Perusahaan Daerah		-	-
Penerimaan Kembali Pinjaman Kepada Pemda Lainnya		-	-
Penerimaan Piutang		-	-
Jumlah Arus Masuk Kas		-	-
Arus Keluar Kas			
Pembayaran Pokok Pinjaman Dalam Negeri - Pemerintah Pusat		-	-
Pembayaran Pokok Pinjaman Dalam Negeri - Pemerintah Daerah lainnya		-	-
Pembayaran Pokok Pinjaman Dalam Negeri - Lembaga Keuangan Bank		-	-
Pembayaran Pokok Pinjaman Dalam Negeri - Lembaga Keuangan Bukan Bank		-	-
Pembayaran Pokok Pinjaman Dalam Negeri - Obligasi		-	-
Pembayaran Pokok Pinjaman Dalam Negeri - Lainnya		-	-
Pemberian Pinjaman Kepada Perusahaan Negara		-	-
Pemberian Pinjaman Kepada Perusahaan Daerah		-	-
Pemberian Pinjaman Kepada Pemda Lainnya		-	-
Jumlah Arus Keluar Kas		-	-
Arus Kas Bersih dari Aktivitas Pendanaan	5.5.3	-	-
ARUS KAS DARI AKTIVITAS TRANSITORIS			
Arus Masuk Kas			
Penerimaan Perhitungan Pihak Ketiga		42,031,936,397.53	116,829,942,054.00
Penerimaan UP Tahun Sebelumnya			-
Penerimaan Contra Post			-
Penerimaan Lainnya			-
Penerimaan Pajak Daerah yang masih di Bendahara Pengeluaran			-
Saldo Kas Dana BOS			720,000.00
Jumlah Arus Masuk Kas		42,031,936,397.53	116,830,662,054.00
Arus Keluar Kas			
Pengeluaran Perhitungan Pihak Ketiga		42,031,936,397.53	116,829,942,054.00
Pengeluaran UP yang masih ada di Bendahara Pengeluaran		-	-
Koreksi Saldo tahun sebelumnya			176,306,282.00
Koreksi Ekuitas			-
Sisa Dana BOSDA Tahun lalu yang belum disetor		-	-
Jumlah Arus Keluar Kas		42,031,936,397.53	117,006,248,336
Arus Kas Bersih dari Aktivitas Transitoris	5.5.4	-	(175,586,282.00)
Kenaikan/Penurunan Kas	5.5.5	(57,263,220,410.28)	23,233,938,957.79
Saldo Awal Kas		129,310,022,062.36	106,076,083,104.57
Saldo lainnya di Bendahara		-	-
Kas di Bendahara Pengeluaran TA 2023			

Saldo Akhir Kas	5.5.6	72,046,801,652.08	129,310,022,062.36

Catatan atas Laporan Keuangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan secara keseluruhan.





PEMERINTAH KABUPATEN PESISIR SELATAN
LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2023

URAIAN	CALK	TAHUN 2024	TAHUN 2023
EKUITAS AWAL	5.6.1	2,876,465,237,406.41	2,739,275,986,924.01
SURPLUS/DEFISIT-LO	5.6.2	62,758,055,324.91	145,199,127,233.56
RK PPKD	5.6.3	0.00	-
DAMPAK KUMULATIF PERUBAHAN KEBIJAKAN/KESALAHAN MENDASAR:	5.6.4	10,944,597,379.02	8,009,876,751.17
Koreksi Nilai Persediaan		-	-
Koreksi Nilai Investasi Jangka Panjang		-	126,454,730.44
Selisih Revaluasi Aset Tetap		-	-
Koreksi Ekuitas - Aset Tetap	-	134,697,493.62	603,015,201.43
Koreksi Ekuitas - Aset Lain-lain		12,037,858,192.53	27,000,000.00
Koreksi Ekuitas - Penyusutan	-	23,286,396,372.89	10,071,649,948.20
Koreksi Ekuitas - Piutang		-	15,594,500.00
Koreksi Ekuitas - Penyisihan Piutang		469,324,364.96	876,949.00
Koreksi Ekuitas - Penyisihan Piutang Dana Bergulir		-	-
Koreksi Ekuitas - Extra Comptable		-	-
Koreksi Ekuitas - Utang	-	686,010.00	3,000,000,000.00
Koreksi Ekuitas - Amortisasi		-	-
Koreksi Ekuitas - Setara Kas Lainnya		-	-
Koreksi Ekuitas - Kas Bendahara Penerimaan		-	-
Koreksi Ekuitas - Kas Bendahara Pengeluaran		-	-
Koreksi Ekuitas - Kas Bendahara FKTP	-	-	156,799,392.00
Koreksi Ekuitas - Kas Bendahara BOS	-	-	-
Koreksi Ekuitas - Kas Bendahara BOK	-	-	-
Koreksi Ekuitas - Kas Bendahara BOP PAUD	-	-	-
Koreksi Ekuitas - Kas BLUD	-	-	-
Koreksi Ekuitas - Lain-lain	-	30,000,060.00	64,239,928.10
EKUITAS AKHIR	5.6.5	2,928,278,695,352.29	2,876,465,237,406.41

Catatan atas Laporan Keuangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan secara keseluruhan

Painan, 19 Mei 2025
BUPATI PESISIR SELATAN

HENDRAJONI

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Informasi Umum

Secara geografis Kabupaten Pesisir Selatan berada pada 0°59'-2° 28,6' Lintang Selatan, 100°19'-101°18' Bujur Timur, dan memiliki batas-batas wilayah sebagai berikut:

Sebelah Selatan	: Kabupaten Muko-Muko (Provinsi Bengkulu)
Sebelah Utara	: Kota Padang
Sebelah Timur	: Kabupaten Solok, Kabupaten Solok Selatan, dan Kabupaten Kerinci (Provinsi Jambi)
Sebelah Barat	: Samudera Indonesia

Kabupaten Pesisir Selatan dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25) jo Undang-Undang Darurat Nomor 21 Tahun 1957 tentang Perubahan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 77) Jo Undang-Undang Nomor 58 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 21 Tahun 1957 tentang Perubahan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Swatantra Tingkat II dalam Lingkungan Daerah Swatantra Tingkat I Sumatera Tengah Sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1643).

Secara administratif, Kabupaten Pesisir Selatan terbagi kedalam 15 wilayah Kecamatan, yang terdiri dari:

1. Kecamatan Koto XI Tarusan;
2. Kecamatan Bayang;
3. Kecamatan IV Nagari Bayang Utara;
4. Kecamatan IV Jurai;
5. Kecamatan Batang Kapas;
6. Kecamatan Sutera;
7. Kecamatan Lengayang;
8. Kecamatan Ranah Pesisir;
9. Kecamatan Linggo Sari Baganti;
10. Kecamatan Airpura;
11. Kecamatan Pancung Soal;
12. Kecamatan Basa Ampek Balai Tapan;
13. Kecamatan Ranah Ampek Hulu Tapan;
14. Kecamatan Lunang;
15. Kecamatan Silaut.

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Pesisir Selatan periode 2024-2029 terdiri dari 45 orang Anggota, dengan susunan Pimpinan DPRD sebagai berikut:

Ketua	: Darmansyah
Wakil Ketua	: Hakimin, S.H
Wakil Ketua	: Ermizen, S.Pd
Wakil Ketua	: Dani Sopian, S.H

Dari jajaran eksekutif, sesuai dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2021 tanggal 19 Februari 2021 dan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 131.13.301 Tahun 2021 tentang Pengesahan Pengangkatan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Hasil Pilkada Serentak Tahun 2020 Kabupaten dan Kota pada Provinsi Sumatera Barat, dan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 131.13.360 Tahun 2021 tentang Perubahan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 131.13.301 Tahun 2021 tanggal 25 Februari 2021 tentang Pengesahan Pengangkatan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Hasil Pilkada Serentak Tahun 2020 Kabupaten dan Kota pada Provinsi Sumatera Barat, yang telah dilantik tanggal 27 Februari 2021, ditetapkan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Periode 2021-2024 sebagai berikut:

Bupati	: Drs. Rusma Yul Anwar, M.Pd.
Wakil Bupati	: -

Tahun 2024 merupakan tahun terakhir kepemimpinan Bupati periode 2021-2024, dengan visi “Mewujudkan Pesisir Selatan Lebih Sejahtera, Maju, dan Bermartabat didukung Pemerintahan yang Akuntabel dan Profesional”. Dalam melaksanakan tugas Bupati dan Wakil Bupati Pesisir Selatan dibantu oleh Sekretaris Daerah, Mawardi Roska, S.IP., dan 41 orang Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah yang ditetapkan pada tanggal 10 Agustus 2021.

1.2 Maksud dan Tujuan Penyusunan Laporan Keuangan

Penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran (TA) 2024 merupakan bentuk pertanggungjawaban Pemerintah Daerah atas pelaksanaan APBD TA 2024. Tujuan Penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah adalah:

1. Memenuhi tanggung jawab konstitusi sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara dan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara;
2. Untuk menyajikan informasi Pendapatan, Belanja, Surplus/Defisit, Pembiayaan, dan Sisa Lebih/Kurang Pembiayaan Anggaran yang akan tergambar dalam Laporan Realisasi Anggaran (LRA) TA 2024;
3. Untuk menyajikan informasi posisi Aset, Kewajiban, dan Ekuitas yang dapat dilihat pada Neraca per 31 Desember 2024;

4. Untuk menyajikan informasi mengenai sumber penggunaan, perubahan Kas dan Setara Kas selama TA 2024, dan saldo Kas dan setara Kas pada tanggal 31 Desember 2024;
5. Menyajikan informasi Pendapatan dan Beban berbasis akrual selama TA 2024;
6. Menyajikan informasi perubahan Ekuitas yang berakhir pada 31 Desember 2024;
7. Menyajikan informasi tentang kebijakan fiskal/keuangan, ekonomi makro, pencapaian target Peraturan Daerah tentang APBD, ikhtisar pencapaian kinerja keuangan selama TA 2024, dasar penyusunan laporan keuangan, kebijakan, asumsi dan prinsip akuntansi yang digunakan dalam menyusun laporan keuangan Kabupaten Pesisir Selatan serta penjelasan pos-pos Laporan Keuangan (LRA, LPSAL, LO, LPE, Neraca, dan LAK); dan
8. Memenuhi akuntabilitas publik, yaitu pertanggungjawaban terhadap pengelolaan sumber daya dan pelaksanaan mandat yang dipercayakan kepada Pemerintah Daerah Kabupaten Pesisir Selatan selama TA 2024.

1.3 Landasan Hukum Penyusunan Laporan Keuangan

Secara lebih lanjut dapat diuraikan penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2024 berdasarkan peraturan perundang-undangan yang mengatur keuangan pemerintah, antara lain:

1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara;
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;
7. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;

10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 108 Tahun 2019 tentang Kodifikasi Barang Milik Daerah.
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 47 Tahun 2021 tentang Tentang Tata Cara Pembukuan, Inventarisasi, dan Pelaporan Barang Milik Daerah;
14. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 19 Tahun 2024 tentang dana bagi hasil dan/atau dana alokasi umum yang disalurkan secara nontunai Pengelolaan Dana Bagi Hasil Dan/Atau Dana Alokasi Umum yang Disalurkan Secara Nontunai;
15. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Dana Bagi Hasil Dan/Atau Dana Alokasi Umum yang Disalurkan Secara Nontunai melalui Fasilitas Treasury Deposit Facility;
16. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 110 Tahun 2023 tentang Indikator Tingkat Kinerja Daerah dan Petunjuk Teknis Bagian Dana Alokasi Umum (DAU) yang ditentukan penggunaannya;
17. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 5 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 08 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
18. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 3 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
19. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 8 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2024;
20. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 2 Tahun 2024 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2024;
21. Peraturan Bupati Nomor 41 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024;
22. Peraturan Bupati Nomor 8 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 41 Tahun 2023 tentang Perubahan Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024;
23. Peraturan Bupati Nomor 48 Tahun 2024 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah; dan
24. Peraturan Bupati Nomor 55 Tahun 2024 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah Kabupaten Pesisir Selatan.

1.4 Sistematika Penulisan Catatan atas Laporan Keuangan

Catatan atas Laporan Keuangan merupakan penjelasan naratif atau daftar terinci atau analisis dari angka yang tertera dalam Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Perubahan SAL, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas, Neraca, dan Laporan Arus Kas. Catatan atas Laporan Keuangan mencakup informasi tentang kebijakan akuntansi yang digunakan dan informasi lain yang diharuskan dan dianjurkan untuk diungkapkan oleh Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan serta pengungkapan-pengungkapan yang diperlukan untuk menghasilkan penyajian laporan keuangan yang wajar. Adapun sistematika isi catatan atas laporan keuangan adalah sebagai berikut:

- Bab I. Pendahuluan
 - 1.1.Informasi Umum
 - 1.2.Maksud dan tujuan penyusunan laporan keuangan
 - 1.3.Landasan hukum penyusunan laporan keuangan
 - 1.4.Sistematika penulisan catatan atas laporan keuangan

- Bab II. Ekonomi Makro, Kebijakan Keuangan dan Pencapaian Target Kinerja APBD
 - 2.1. Ekonomi Makro
 - 2.2. Kebijakan Keuangan
 - 2.3. Pencapaian Target Kinerja APBD

- Bab III. Ikhtisar pencapaian kinerja keuangan
 - 3.1.Ikhtisar realisasi pencapaian target kinerja keuangan
 - 3.2.Hambatan dan Kendala dalam Pencapaian Kinerja yang Ditetapkan

- Bab IV. Kebijakan Akuntansi
 - 4.1.Entitas Akuntansi dan Entitas Pelaporan Keuangan Daerah
 - 4.2.Asumsi Dasar
 - 4.3.Prinsip Akuntansi dan Pelaporan Keuangan
 - 4.4.Basis akuntansi yang mendasari penyusunan laporan keuangan
 - 4.5.Basis pengukuran yang mendasari penyusunan laporan keuangan
 - 4.6.Proses Penyusunan Laporan Keuangan

- Bab V. Penjelasan Pos-pos Laporan Keuangan
 - 5.1.Penjelasan pos-pos Laporan Realisasi Anggaran
 - 5.2.Penjelasan pos-pos Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih
 - 5.3.Penjelasan pos-pos Laporan Operasional
 - 5.4.Penjelasan pos-pos Laporan Perubahan Ekuitas
 - 5.5.Penjelasan pos-pos Neraca
 - 5.6.Penjelasan pos-pos Laporan Arus Kas

- Bab VI. Informasi Tambahan
 - 6.1.Informasi Terkait Relokasi RSUD dr. M. Zein
 - 6.2.Revaluasi Aset Tetap

- Bab VII. Penutup

BAB II

EKONOMI MAKRO, KEBIJAKAN KEUANGAN DAN PENCAPAIAN TARGET KINERJA APBD

2.1 Ekonomi Makro

Pertumbuhan ekonomi Kabupaten Pesisir Selatan tahun 2024 berdasarkan angka sementara sebesar 4,33 persen naik sebesar 0,31 persen dibanding tahun 2023 sebesar 4,02 persen. Adapun perkembangan indikator makro pembangunan daerah dapat dilihat pada Tabel 2.1.

Tabel 2.1
Perkembangan Indikator Makro Ekonomi Kabupaten Pesisir Selatan

No	Indikator Makro Ekonomi	Realisasi			Perkiraan
		2021	2022	2023	2024
1.	PDRB Harga Konstan 2010 (Rp. 000.000)	9.790,36	9.795,35	10.183,46	10.608,29
2.	Tingkat Pertumbuhan ekonomi (%)	3,37	3,39	4,02	4,33
3.	Laju Inflasi (%)	1,56	1,56	1,56	1,56
4.	PDRB perkapita ADHB (juta/tahun)	29.29	29.29	29.29	29.29
5.	Tingkat Kemiskinan (%)	7,92	7,11	7,34	7,49
6.	Tingkat Pengangguran (%)	5,97	4,61	4,61	5,06

Sumber: BPS Kabupaten Pesisir Selatan, Tahun 2024.

Perkembangan indikator makro ekonomi Kabupaten Pesisir Selatan seperti terlihat pada tabel diatas menunjukkan peningkatan yang baik. Perkembangan PDRB Atas Dasar Harga Konstan 2023 memperlihatkan pertumbuhan ke arah yang positif yaitu dari sebesar Rp10.183,46 di tahun 2023 diperkirakan mengalami peningkatan menjadi Rp10.608,29 pada tahun 2024. Kemudian untuk laju inflasi diperkirakan sebesar 1,56% pada tahun 2024. Laju inflasi Kabupaten Pesisir Selatan mengacu pada laju inflasi Kota Padang. Tingkat kemiskinan Kabupaten Pesisir Selatan pada tahun 2023 sebesar 7,34% naik menjadi 7,49% pada tahun 2024. Tingkat pengangguran Tahun 2023 di Kabupaten Pesisir Selatan adalah sebesar 5,06% diperkirakan turun menjadi 4,61% pada tahun 2024.

2.2 Kebijakan Keuangan

Arah Kebijakan Keuangan Daerah adalah merupakan aspek yang sangat penting dalam manajemen pembangunan daerah dan pendapatan daerah, pembiayaan daerah dan belanja daerah. Melalui beberapa peraturan telah diupayakan perbaikan kebijakan pengelolaan keuangan daerah Kabupaten Pesisir Selatan yakni melalui Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah yang kemudian diturunkan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 3 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah. Implikasi perubahan peraturan ini berpengaruh pada sistem pengelolaan keuangan daerah Kabupaten Pesisir Selatan yang lebih efektif, efisien, transparan, partisipatif dan akuntabel.

Kebijakan Keuangan Daerah merupakan sasaran dan kebijakan daerah dalam satu tahun anggaran yang menjadi petunjuk dan ketentuan umum yang disepakati oleh Pemerintah Daerah dan DPRD sebagai pedoman dalam penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD). Penyusunan Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2024 diarahkan untuk mewujudkan perencanaan pembangunan yang telah diatur dalam rencana pembangunan jangka panjang, jangka menengah dan tahunan daerah Kabupaten Pesisir Selatan.

Ruang lingkup keuangan daerah meliputi:

- a) Hak daerah untuk memungut pajak dan retribusi daerah serta melakukan pinjaman;
- b) Kewajiban daerah untuk menyelenggarakan urusan pemerintahan daerah dan membayar tagihan pihak ketiga;
- c) Penerimaan daerah;
- d) Pengeluaran daerah;
- e) Kekayaan daerah yang dikelola sendiri atau oleh pihak lain berupa uang, surat berharga, piutang, barang, serta hak-hak lain yang dapat dinilai dengan uang, termasuk kekayaan yang dipisahkan pada perusahaan daerah; dan
- f) Kekayaan pihak lain yang dikuasai oleh pemerintah daerah dalam rangka penyelenggaraan tugas pemerintah daerah dan/atau kepentingan umum.

Secara umum, kebijakan keuangan tahun 2024 dilaksanakan dengan melakukan percepatan penggunaan alokasi anggaran kegiatan dan/atau perubahan alokasi anggaran (realokasi) yang digunakan secara memadai untuk meningkatkan kapasitas.

1. Penanganan kesehatan dan hal-hal lain terkait kesehatan;
2. Penanganan dampak ekonomi terutama menjaga agar dunia usaha daerah masing-masing tetap hidup; dan
3. Penyediaan jaring pengaman sosial/social safety net.

2.2.1 Kebijakan Pendapatan

Pengertian Pendapatan Daerah dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 dalam Bab II adalah semua Hak daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih dalam periode tahun berkenaan. Pendapatan Daerah dikelompokkan atas; Pendapatan Asli Daerah, Pendapatan Transfer dan Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah. Pajak dan Retribusi Daerah diatur dalam Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak dan Retribusi Daerah tanggal 29 Desember 2023.

Dalam rangka mempercepat dan memperlancar pencapaian dari kebijakan pendapatan daerah, upaya-upaya pemerintah daerah dalam mencapai target pendapatan daerah adalah melalui:

1. Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Kebijakan pengelolaan pendapatan daerah untuk tahun 2024 lebih difokuskan untuk mencari potensi pendapatan baru dengan target perolehannya serta meminimalisir kebocoran dalam pemungutan dengan berpedoman pada aturan perundangan serta evaluasi perolehan pendapatan tahun lalu. Untuk mendukung dari kebijakan tersebut, maka dilakukan melalui kegiatan intensifikasi dan ekstensifikasi objek penerimaan.

a. Intensifikasi dilakukan melalui beberapa kegiatan antara lain:

- 1) Melakukan sosialisasi atau penyuluhan kepada wajib pajak dan masyarakat dengan cara melakukan tatap muka, pertemuan dengan wajib pajak dan masyarakat, membuat selebaran, spanduk dan *billboard* dan sarana

lainnya, membuat edaran ke media masa baik cetak maupun elektronik; dan

- 2) Meningkatkan Pelayanan dengan cara meningkatkan keterampilan dan kemampuan sumber daya aparatur, berpenampilan yang simpatik dan ramah tamah kepada wajib pajak, melaksanakan pelayanan yang tertib, cepat dan lancar, menumbuhkan dan membina kejujuran petugas untuk menimbulkan kepercayaan masyarakat terhadap aparatur, serta menyediakan sarana dan prasarana operasional di kantor maupun sarana transportasi bagi petugas yang beroperasi di lapangan.
- b. Ekstensifikasi pendapatan daerah dilakukan melalui kegiatan:
 - 1) Melakukan pendataan dan penyingkapan wajib pajak baru;
 - 2) Melakukan kajian potensi pajak daerah dan retribusi daerah dengan bekerjasama dengan pihak ketiga;
 - 3) Melakukan penggalan wajib pajak/wajib retribusi daerah baru, sesuai dengan aturan yang berlaku;
 - 4) Melakukan penggalan wajib pajak/wajib retribusi daerah baru yang tidak memberatkan masyarakat dan dunia usaha;
 - 5) Melakukan pendataan terhadap potensi riil penerimaan dari objek pajak/retribusi sehingga terdapat database yang akurat;
 - 6) Mendata administrasi dan sistem pengelolaan pendapatan daerah;
 - 7) Melakukan koordinasi dan konsultasi kepada Pemerintah Provinsi, Pemerintah Pusat dan Unsur lainnya yang terkait; dan
 - 8) Melakukan koordinasi dengan pihak terkait dalam upaya pengelolaan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) serta Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB).
2. Pendapatan Transfer dan Lain-lain Pendapatan Yang Sah, upaya yang dilakukan untuk mencapai target yaitu dengan :
 - a. Meningkatkan kerja sama/koordinasi lintas sektoral baik dengan instansi pusat maupun provinsi dalam meningkatkan penggalan sumber-sumber pendapatan;
 - b. Meningkatkan koordinasi dengan pemerintah pusat sebagai upaya penambahan alokasi dana perimbangan dan dana lainnya seperti peningkatan dana alokasi khusus, peningkatan bantuan bencana alam, peningkatan dana alokasi umum, peningkatan bagi hasil pajak dan bukan pajak (bonus PBB, PPh Pasal 21, dll), peningkatan bagi hasil pajak dari Provinsi dan pemerintah daerah lainnya serta bantuan keuangan dari Provinsi dan pemerintah daerah lainnya; dan
 - c. Meningkatkan koordinasi dengan lembaga-lembaga pihak ketiga yang tidak mengikat terutama pendapatan yang berasal dari sumbangan pihak ketiga.

Perkembangan Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Pesisir Selatan selama kurun waktu 6 tahun (2019-2024) memiliki rata-rata kenaikan pertumbuhan per tahun sebesar 4,56% sebagaimana dapat dilihat pada Tabel 2.2.

Tabel 2.2
Perkembangan Pendapatan Asli Daerah (PAD)
Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2019-2024

TAHUN	PAD (Rp.)	PERTUMBUHAN (%)
2019	134.804.594.146,43	8,80
2020	132.752.560.092,45	(1,52)
2021	145.028.893.400,10	9,25
2022	145.637.815.190,01	0,42
2023	153.573.816.131,23	5,45
2024	161.576.001.454,88	5,21
Rata-rata pertahun		4,60

Sumber: BPKPAD, 2024

Jika memperhatikan kemampuan keuangan dari Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Pesisir Selatan dengan rata-rata kontribusi per-tahun terhadap APBD sebesar (4,60%), secara umum diketahui kemampuan fiskal berada dalam kategori rendah dari rata-rata nasional. Pendapatan Kabupaten Pesisir Selatan masih tergantung pada penerimaan transfer dana dari Pemerintah Pusat seperti yang terlihat pada tabel 2.3 berikut ini.

Tabel 2.3
Kontribusi Pendapatan Asli Daerah (PAD)
Terhadap APBD Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2019 – 2024

TAHUN	PAD (Rp.)	Pertumbuhan (%)	APBD (Rp)	Kontribusi PAD (%)
(1)	(2)	(3)	(4)	= (2):(4)*100
2019	134.804.594.146,43	8,80	1.772.707.595.258,00	7,60
2020	132.752.560.092,45	(1,52)	1.698.028.198.430,00	7,82
2021	145.028.893.400,10	9,25	1.738.176.920.827,00	8,34
2022	145.637.815.190,01	0,42	1.662.717.929.358,00	8,76
2023	153.573.816.131,23	5,45	1.709.234.477.510,00	8,98
2024	161.576.001.454,88	5,21	1.903.284.139.168,00	8,49
RATA-RATA PERTAHUN		4,60		8,33

Sumber: BPKPAD, 2024

Kebijakan pendapatan Kabupaten Pesisir Selatan berubah mengikuti kebijakan nasional. Dalam pelaksanaannya, dilakukan pergeseran anggaran sebanyak 1 (satu) kali dengan Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 41 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 yang dituangkan pada Peraturan Bupati Nomor 8 Tahun 2024 tanggal 22 April 2024. Pergeseran anggaran ini dilakukan berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 146 Tahun 2023 tentang Pengalokasian Dana Desa Tahun Anggaran 2024 tanggal 27 Desember 2023, penyempurnaan implementasi PMK 110 Tahun 2023 tentang Indikator Tingkat Kinerja Daerah dan Petunjuk Teknis Bagian Dana Alokasi Umum yang ditentukan penggunaannya dan kegiatan yang sifatnya mendesak yang mempengaruhi terhadap penyelenggaraan pemerintahan.

Tabel 2.4
Perubahan APBD TA. 2024

Uraian	APBD Awal	APBD Perubahan	Persentase Kontribusi (%)
PENDAPATAN ASLI DAERAH	73.803.259.908,00	208.403.292.963,00	100.00
Pendapatan Pajak Daerah	30.746.153.228,00	31.807.541.550,00	15,26
Pendapatan Retribusi Daerah	32.797.106.680,00	128.115.046.825,00	61,47
Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan	7.000.000.000,00	41.785.995.944,00	20,05
Lain-lain PAD yang sah	3.260.000.000,00	6.694.708.644,00	3,21
DANA PERIMBANGAN	1.541.253.620.958,00	1.562.806.865.776,00	100.00
Dana Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak	26.235.090.000,00	26.271.033.000,00	1.68
DANA ALOKASI UMUM (DAU)	912.330.440.000,00	912.330.440.000,00	58,38
DANA ALOKASI KHUSUS (DAK) FISIK	80.109.482.000,00	80.109.482.000,00	5,13
DANA ALOKASI KHUSUS (DAK) NON FISIK	272.129.228.000,00	272.129.228.000,00	17.41
DID	0,00	0,00	0,00
Dana Desa	163.194.016.000,00	167.649.926.000,00	17,41
Pendapatan Bagi Hasil	87.255.364.958,00	104.316.756.776,00	6.67
Bantuan Keuangan	0,00	0,00	0,00
LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	7.288.067.047,00	10.052.025.414,00	100,00
Pendapatan Hibah	7.288.067.047,00	9.260.695.297,00	92,13
Lain-lain Pendapatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan	0,00	791.330.117,00	7,87
JUMLAH PENDAPATAN	1.622.344.947.913	1.781.262.184.153,00	100,00

A. Pendapatan Asli Daerah (PAD)

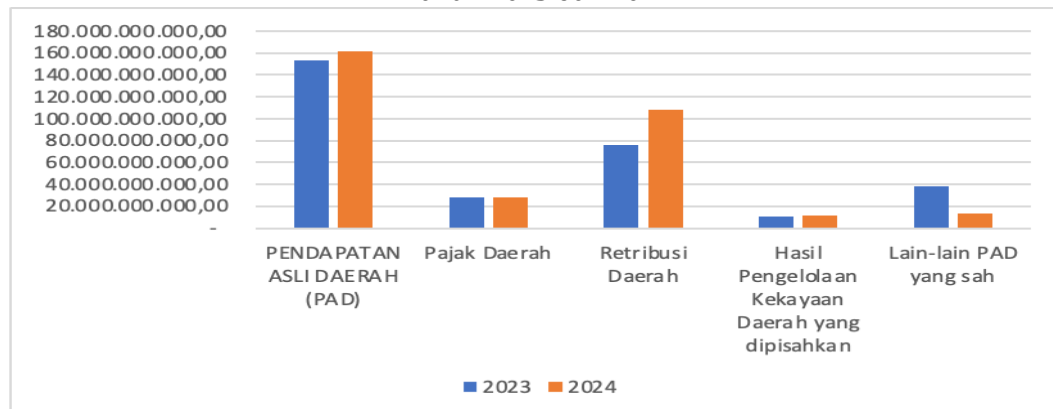
Realisasi Pendapatan Asli Daerah untuk tahun 2024 adalah sebesar Rp161.576.001.454,88 atau naik sebesar Rp8.002.185.324,14 di banding tahun 2023 yang berjumlah Rp153.573.816.131,23. Rincian dapat dilihat pada Tabel 2.5 di bawah ini:

Tabel 2.5
Pendapatan Asli Daerah T.A. 2023 dan 2024
Kabupaten Pesisir Selatan

Uraian	Realisasi (rupiah)		
	2023	2024	Bertambah/ berkurang
PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	153.573.816.130,74	161.576.001.454,88	8.002.185.324,14
Pajak Daerah	28.395.740.407,08	27.736.938.804,00	(658.801.603,08)
Retribusi Daerah	76.123.026.917,00	108.172.064.157,26	32.049.037.240,26
Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan	11.016.313.390,00	11.899.367.428,00	883.054.038,00
Lain-lain PAD yang sah	38.038.735.416,66	13.767.631.065,62	(24.271.104.351,04)

Sumber: BPKPAD, 2024

Gambar 2.1.
Grafik Perbandingan Realisasi Pendapatan Asli Daerah
Tahun 2023 dan 2024



Sumber : BPKPAD, 2024

B. Pendapatan Transfer

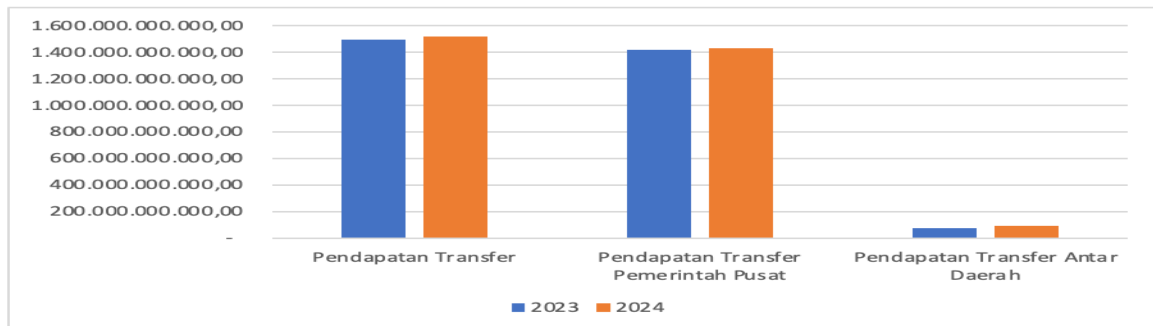
Realisasi Pendapatan Transfer tahun 2024 sebesar 1.518.538.134.126,00,- mengalami kenaikan sebesar Rp25.145.014.228,00,- dibanding tahun 2023. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel 2.6 di bawah ini:

Tabel 2.6
Pendapatan Transfer T.A. 2023 dan 2024
Kabupaten Pesisir Selatan

Uraian	Realisasi (rupiah)		
	2023	2024	Bertambah/ Berkurang
Pendapatan Transfer	1.493.393.119.898,00	1.518.538.134.126,00	25.145.014.228,00
Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	1.419.836.965.540,00	1.427.643.629.192,00	7.806.663.652,00
Pendapatan Transfer Antar Daerah	73.556.154.358,00	90.894.504.934,00	17.338.350.576,00

Sumber : BPKPAD, 2024

Gambar 2.2. Grafik
Perbandingan Realisasi Pendapatan Transfer
Tahun 2023 dan 2024



Sumber : BPKPAD, 2024

C. Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah

Realisasi Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah tahun 2024 sebesar Rp10.770.378.297,00 naik sebesar Rp3.106.859.717,00 dibanding tahun 2023. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel 2.7 berikut ini :

Tabel 2.7
Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah TA 2023 dan 2024
Kabupaten Pesisir Selatan

Uraian	Realisasi (rupiah)		
	2023	2024	Bertambah/ Berkurang
LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	7.663.518.580,00	10.770.378.297,00	3.106.859.717,00
Pendapatan Hibah	7.663.518.580,00	9.260.695.297,00	1.597.176.717,00
Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	0	1.509.683.000,00	1.509.683.000,00

Sumber: BPKPAD, 2024

2.2.2 Kebijakan Belanja Daerah

Penganggaran belanja daerah harus digunakan untuk pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten/kota yang terdiri dari urusan wajib dan urusan pilihan yang ditetapkan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Belanja penyelenggaraan urusan wajib diprioritaskan untuk melindungi dan meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat dalam upaya memenuhi kewajiban daerah yang diwujudkan dalam bentuk peningkatan pelayanan dasar, pendidikan, kesehatan, fasilitas sosial dan fasilitas umum yang layak serta mengembangkan sistem jaminan sosial. Pelaksanaan urusan wajib dimaksud berdasarkan Standar Pelayanan Minimal (SPM) yang telah ditetapkan.

Pada tahun 2024, total Anggaran Belanja sebesar Rp1.903.284.139.168,00 naik sebesar Rp91.221.812.677,00 dari total Anggaran Belanja pada tahun 2023 sebesar Rp1.812.062.326.491,00. Anggaran belanja terdiri dari Belanja Operasi sebesar Rp1.445.720.868.068,80 Belanja Modal sebesar Rp186.007.938.466,20 Belanja Tak Terduga sebesar Rp6.500.000.000,00 dan Belanja Transfer sebesar Rp265.055.332.633,00

Untuk lebih jelasnya tentang gambaran anggaran belanja tahun 2023 dan 2024, dapat dilihat pada Tabel 2.8.

Tabel 2.8
Anggaran Belanja Tahun 2023 dan 2024
Kabupaten Pesisir Selatan

Uraian	Tahun				Pertumbuhan (%) 2023-2024
	2023	%	2024	%	
BELANJA OPERASI	1.304.615.721.089,00	72,00	1.445.720.868.068,80	72,00	10,82
Belanja Pegawai	798.444.572.097,00	44,06	922.792.472.735,00	44,06	15,57
Belanja Barang dan Jasa	432.962.645.243,00	23,89	434.776.541.551,80	23,89	0,42
Belanja Bunga	0	0,00	0	0,00	-
Belanja Hibah	72.946.503.749,00	4,03	87.989.353.782,00	4,03	20,62
Belanja Bantuan Sosial	262.000.000,00	0,01	162.500.000,00	0,01	-37,98
BELANJA MODAL	252.497.150.315,00	13,93	186.007.938.466,20	13,93	-26,98
Belanja Tanah	2.528.508.993,00	0,14	1.785.114.920,00	0,14	-29,40
Belanja Peralatan dan Mesin	44.930.008.151,00	2,48	37.066.108.812,20	2,48	-17,50
Belanja Gedung dan Bangunan	50.157.286.572,00	2,77	50.695.911.189,00	2,77	1,07
Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan	145.094.628.849,00	8,01	87.410.593.789,00	8,01	-39,76
Belanja Aset Tetap Lainnya	9.786.717.750,00	0,54	9.050.209.756,00	0,54	-7,53

Uraian	Tahun				Pertumbuhan (%) 2023-2024
	2023	%	2024	%	
BELANJA TAK TERDUGA	6.132.953.296,00	0,34	6.500.000.000,00	0,34	5,98
Belanja Tak Terduga	6.132.953.296,00	0,34	6.500.000.000,00	0,34	5,98
BELANJA TRANSFER	248.816.501.791,00	13,73	265.055.332.633,00	13,73	6,53
Belanja Bagi Hasil	3.708.320.997,00	0,20	3.683.849.305,00	0,20	-0,66
Belanja Bantuan Keuangan	245.108.180.794,00	13,53	261.371.483.328,00	13,53	6,64
JUMLAH	1.812.062.326.491,00	100,00	1.903.284.139.168,00	100,00	5,03

Sumber: BPKPAD, 2024

Kebijakan belanja mempengaruhi struktur APBD secara signifikan, dimana Pemerintah Pusat melalui Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 146 Tahun 2023 tentang Pengalokasian Dana Desa Setiap Desa, Penyaluran, dan Penggunaan Dana Desa Tahun Anggaran 2024 tanggal 27 Desember 2023, penyempurnaan implementasi PMK 110 Tahun 2023 tentang Indikator Kinerja Daerah dan Petunjuk Teknis Bagian Dana Alokasi Umum yang Ditentukan Penggunaannya dan kegiatan yang sifatnya mendesak yang mempengaruhi terhadap penyelenggaraan pemerintahan. Menindaklanjuti kebijakan tersebut, Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan melakukan perubahan terhadap peraturan Bupati Nomor 41 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024. Terdapat empat lokus yang menjadi prioritas yaitu Pendidikan, Kesehatan, pegawai pemerintah dengan Perjanjian Kerja dan Pekerjaan Umum. untuk DAU Bidang Pendidikan dengan anggaran sebesar Rp101.903.411.000,- dan realisasi sebesar Rp 85.923.117.064,- atau 84,32%, Bidang Kesehatan dengan anggaran sebesar Rp28.706.509.000,- dan realisasi sebesar Rp27.192.581.448,- atau 94,73%, Bidang Pekerjaan Umum sebesar Rp62.836.588,- dan realisasi sebesar Rp53.602.128.004,- atau 85,30%. Sedangkan realisasi penyerapan pembayaran dukungan penggajian PPPK Daerah Pemerintah Daerah Kabupaten Pesisir Selatan untuk pembayaran gaji Tahun 2024 dengan anggaran sebesar Rp71.335.305.000,- dan realisasi sebesar Rp40.944.429.169,- atau 57,40%.

2.2.3 Kebijakan Umum pada Aspek Pembiayaan

A. Penerimaan Pembiayaan

Pada tahun anggaran 2024, anggaran penerimaan pembiayaan sebesar Rp129.310.022.062,- yang terdiri dari Penggunaan SiLPA sebesar Rp129.310.022.062,- dan terealisasi sebesar 97,52%. Sedangkan pada tahun 2023, penerimaan pembiayaan sebesar Rp108.592.848.981,- yang terdiri dari Penggunaan SiLPA sebesar 105.899.776.822,57 atau 97,52%.

B. Pengeluaran Pembiayaan

Pada tahun anggaran 2024, anggaran pengeluaran pembiayaan sebesar Rp7.288.067.047,- yang terdiri dari Penyertaan Modal Daerah sebesar Rp7.288.067.047,- dan terealisasi sebesar Rp7.063.067.047,- atau 96,91%. Untuk tahun anggaran 2023, anggaran pengeluaran pembiayaan sebesar Rp5.765.000.000,- yang terdiri dari Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah sebesar Rp5.765.000.000,- yang terealisasi sebesar Rp3.525.505.000,00 atau 61,15%.

2.3 Pencapaian Target Kinerja APBD

Dalam penyusunan APBD Tahun 2024, ditempuh pendekatan rencana kerja dan anggaran disusun secara terintegrasi atau pengalokasian anggaran disesuaikan dengan hasil yang akan dicapai.

BAB III

IKHTISAR PENCAPAIAN KINERJA KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH

3.1 Ikhtisar Realisasi Pencapaian Target Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah

Pada Tahun Anggaran 2024, Anggaran dan Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Pemerintah Daerah Kabupaten Pesisir Selatan merealisasikan Penerimaan Pendapatan Daerah sebesar Rp1.690.884.440.684,88 yang berasal dari Pendapatan Asli Daerah sebesar Rp161.575.928.261,88 Pendapatan Transfer Rp1.518.538.134.126,00 dan Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah Rp10.770.378.297,00.

Belanja Daerah pada Tahun Anggaran 2024 terealisasi sebesar Rp1.741.083.995.241,16 yang terdiri dari Belanja Operasi sebesar Rp1.304.348.116.865,16 Belanja Modal sebesar Rp172.078.546.250,00 Belanja Tidak Terduga sebesar Rp2.135.045.328,00 dan Belanja Transfer terealisasi sebesar Rp262.522.286.798,00 yang terdiri dari Transfer Bagi Hasil Pendapatan Rp1.195.762.581,00 dan Transfer Bantuan Keuangan Rp261.258.083.300,00.

Realisasi Penerimaan Pembiayaan pada Tahun Anggaran 2024 adalah sebesar Rp129.310.022.062,36 sedangkan realisasi Pengeluaran Pembiayaan adalah sebesar Rp7.063.067.047,00. Dalam hal ini Pembiayaan Neto adalah sebesar Rp122.246.955.015,36.

Ikhtisar realisasi pendapatan dan belanja Kabupaten Pesisir Selatan TA 2024 dapat dilihat pada Tabel 3.1 dibawah ini:

Tabel 3.1
Ikhtisar Realisasi Pendapatan dan Belanja Tahun Anggaran 2024

No	Uraian	Anggaran	Realisasi	Rasio
		Rp	Rp	%
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)=(4/3)x100
A.	PENDAPATAN:			
1	Pendapatan Asli Daerah	208.403.292.963,00	161.576.001.454,88	77,53
2	Pendapatan Transfer	1.562.806.865.776,00	1.518.538.134.126,00	97,17
3	Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah	10.052.025.414,00	10.770.378.297,00	107,15
	Jumlah Pendapatan (A)	1.781.262.184.153,00	1.690.884.440.684,88	94,93
B.	BELANJA			
1	Belanja Operasi	1.445.720.868.068,80	1.304.348.788.865,16	90,23
2	Belanja Modal	186.007.938.466,20	172.078.546.250,00	92,51
3	Belanja Tidak Terduga	6.500.000.000,00	2.135.045.328,00	32,85
4.	Belanja Transfer	265.055.332.633,00	262.522.286.798,00	99,04
	Jumlah Belanja (B)	1.903.284.139.168,00	1.741.084.667.241,16	91,48
	Surplus/(Defisit) (A-B)	(122.021.955.015,00)	(50.200.153.363,28)	41,14
C.	PEMBIAYAAN			
1	Penerimaan	129.310.022.062,00	122.246.955.015,36	100,18
2	Pengeluaran	7.288.067.047,00	7.063.067.047,00	96,91
	Pembiayaan Netto (D)	122.021.955.015,00	122.246.955.015,36	100,18
	SiLPA	0,00	72.046.801.652,08	0,00

Sumber: BPKPAD, 2024

Dari Tabel 3.1 terlihat bahwa kinerja Pemerintah Daerah secara keseluruhan cukup baik dimana realisasi pendapatan dan belanja memiliki rasio yang cukup tinggi, dimana rasio pendapatan sebesar 94,93% dari anggaran dan rasio belanja sebesar 91,48% dari anggaran.

3.2 Hambatan dan Kendala Dalam Pencapaian Kinerja yang ditetapkan.

a. Pendapatan

Secara umum capaian kinerja APBD Kabupaten Pesisir Selatan dari sisi pendapatan maupun sisi pengeluaran dapat berjalan dengan baik. Pendapatan pada APBD Perubahan TA 2024 ditargetkan sebesar Rp1.781.262.184.153,00 dapat direalisasikan Rp1.690.884.440.684,88 atau 94,93%, sedangkan Belanja dari alokasi sebesar Rp1.903.284.139.168,00 realisasinya per 31 Desember 2024 adalah sebesar Rp1.741.083.995.241,16 atau 91,48%. Walaupun secara umum capaian kinerja APBD Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2024 dapat tercapai namun dalam pelaksanaannya juga ditemui hambatan, antara lain terbatasnya potensi ekonomi yang dapat dijadikan sumber pendapatan.

Realisasi penerimaan pendapatan daerah tahun 2024 sebesar 94,93%, mengalami penurunan apabila dibandingkan dengan persentase capaian tahun 2023 sebesar 96,81%. Kalau dilihat capaian masing-masing sumber pendapatan tersebut terdiri dari PAD sebesar 77,53%, Pendapatan Transfer sebesar 97,17 dan Lain-lain PAD Yang Sah sebesar 107,15%. Capaian kinerja pendapatan tahun 2024 terlihat pada tabel 3.2 berikut:

Tabel 3.2
Komposisi Capaian Kinerja Pendapatan Pemerintah
Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2024

Uraian	Anggaran Perubahan	Realisasi	Persentase
<u>PENDAPATAN</u>	1.781.262.184.153,00	1.690.884.513.877,88	94,93
<u>PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)</u>	208.403.292.963,00	161.576.001.454,88	77,53
Pendapatan Pajak Daerah	31.807.541.550,00	27.736.938.804,00	87,20
Pendapatan Retribusi Daerah	128.115.046.825,00	108.172.064.157,26	84,43
Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	41.785.995.944,00	11.899.367.428,00	28,48
Lain-lain PAD Yang Sah	6.694.708.644	13.767.631.065,62	205,65
<u>PENDAPATAN TRANSFER</u>	1.562.806.865.776,00	1.518.538.134.126,00	97,17
Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	1.458.490.109.000,00	1.427.643.629.192,00	97,61
Pendapatan Transfer Antar Daerah	104.316.756.776,00	90.894.504.934,00	87,13
<u>LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH</u>	10.052.025.414,00	10.770.378.297,00	107,15
Pendapatan Hibah	9.260.695.297,00	9.260.695.297,00	100,00
Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-undangan	791.330.117,00	1.509.683.000,00	190,78

Sumber: BPKPAD, 2024

Berdasarkan tabel tersebut, kinerja pendapatan secara persentase yang tertinggi akan diuraikan sebagai berikut:

- 1) Kinerja tertinggi adalah Lain-lain PAD yang sah sebesar 205,65%;
- 2) Kinerja tertinggi kedua adalah Pendapatan Hibah sebesar 100%; dan
- 3) Kinerja tertinggi ketiga adalah Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat sebesar 97,61%.

Terkait dengan capaian kinerja di atas, Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan akan tetap terus berupaya untuk melakukan optimalisasi sumber-sumber PAD khususnya pajak dan retribusi daerah guna meningkatkan kemampuan keuangan Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan, disamping tetap mengusahakan secara optimal pemanfaatan pendapatan transfer yang berasal dari Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Provinsi Sumatera Barat.

Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan terus berupaya mendorong untuk peningkatan pendapatan terutama PAD, dengan menetapkan langkah-langkah strategis melalui optimalisasi pemungutan pajak daerah dan retribusi daerah, antara lain:

- 1) Ekstensifikasi penerimaan
Tindakan yang dilakukan antara lain yaitu: mengidentifikasi jumlah potensi/calon pembayar pajak, jumlah pembayar pajak baru dan jumlah yang telah membayar pajak, memperbaiki basis data objek pajak/retribusi daerah, menghitung potensi dari setiap jenis pajak dan retribusi daerah yang lebih akurat.
- 2) Menata proses pemungutan
Upaya yang dilakukan dalam menata proses pemungutan, antara lain mempercepat proses penyusunan Peraturan Daerah sebagai dasar hukum pemungutan pajak/retribusi daerah, menata pembukuan di wajib pajak, mengubah tarif khususnya tarif retribusi yang disesuaikan dengan kondisi kemampuan ekonomi masyarakat, dan peningkatan sumber daya manusia (SDM) pengelola PAD.
- 3) Meningkatkan pengawasan
Upaya yang dapat dilakukan antara lain: melakukan pemeriksaan secara dadakan dan berkala, memperbaiki proses pengawasan, menerapkan sanksi terhadap penunggak pajak maupun pihak fiskus yang bertindak tidak sesuai dengan ketentuan, serta meningkatkan pelayanan yang diberikan oleh daerah.
- 4) Penyederhanaan Mekanisme Penyetoran
Tindakan yang dapat dilakukan oleh Pemerintah Daerah antara lain; penyederhanaan administrasi pajak/retribusi daerah, meningkatkan efisiensi dari setiap jenis pemungutan.
- 5) Harmonisasi SKPD yang Berwenang
Hal ini dapat dilakukan dengan meningkatkan koordinasi seluruh SKPD yang terkait dengan kegiatan optimalisasi pengelolaan PAD.

b. Belanja

Pada tahun 2024, dari total Anggaran Belanja sebesar Rp1.903.284.139.168,00 terealisasi sebesar Rp1.741.083.995.241,16 Komposisi realisasi belanja di tahun 2024 secara garis besar dibagi empat, yaitu Belanja Operasi, Belanja Modal, Belanja Tidak Terduga, dan Belanja Transfer dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 3.3
Komposisi Realisasi Belanja
Tahun Anggaran 2024

Uraian	Anggaran Perubahan	Realisasi	Persentase
BELANJA	1.903.284.139.168,00	1.741.083.995.241,16	91,48
BELANJA OPERASI	1.445.720.868.068,80	1.304.348.116.865,16	90,22
Belanja Pegawai	922.792.472.735,00	822.241.704.070,00	89,10
Belanja Barang dan Jasa	434.776.541.551,80	395.246.356.648,16	90,91
Belanja Bunga	0,00	0,00	0,00
Belanja Hibah	87.989.353.782,00	86.701.606.147,00	98,54
Belanja Bantuan Sosial	162.500.000,00	158.450.000,00	97,51
BELANJA MODAL	186.007.938.466,20	172.078.546.250,00	92,51
Belanja Modal Tanah	1.785.114.920,00	722.013.920,00	40,45
Belanja Modal Peralatan dan Mesin	37.066.108.812,20	33.851.079.267,00	91,33
Belanja Modal Gedung dan Bangunan	50.695.911.189,00	48.036.104.682,00	94,75
Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan	87.410.593.789,00	80.657.217.781,00	92,27
Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	9.050.209.756,00	8.812.130.600,00	97,37
BELANJA TIDAK TERDUGA	6.500.000.000,00	2.135.045.328,00	32,85
Belanja Tidak Terduga	6.500.000.000,00	2.135.045.328,00	32,85
BELANJA TRANSFER	265.055.332.633,00	262.522.286.798,00	99,04
Belanja Bagi Hasil	3.683.849.305,00	1.264.203.498,00	34,32
Belanja Bantuan Keuangan	261.371.483.328,00	261.258.083.300,00	99,96

Sumber: BPKPAD, 2024

BAB IV KEBIJAKAN AKUNTANSI

Kebijakan akuntansi menjelaskan tentang definisi, dasar pengakuan, pengukuran dan pelaporan atas aset, kewajiban, ekuitas, beban, pendapatan, belanja dan pembiayaan serta penyajian laporan keuangan sesuai dengan Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 55 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 93 Tahun 2018 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah mengacu kepada ketentuan umum tentang penyajian laporan keuangan instansi pemerintah yang tertuang dalam Peraturan Pemerintah Nomor 71 tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan.

4.1 Entitas Akuntansi dan Entitas Pelaporan Keuangan Daerah

Entitas pelaporan adalah unit pemerintahan yang terdiri dari satu atau lebih entitas akuntansi yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban berupa laporan keuangan baik langsung maupun tidak langsung kepada wakil rakyat sebagai pihak yang menyetujui anggaran. Entitas pelaporan adalah Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan yang dibentuk berdasarkan Undang-Undang, yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD berupa Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Pesisir Selatan yang meliputi Neraca, Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Arus Kas, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas, Laporan Perubahan SAL dan Catatan atas Laporan Keuangan.

Penyusunan laporan keuangan entitas pelaporan dilaksanakan oleh Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah (SKPKD) dalam hal ini adalah Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah Kabupaten Pesisir Selatan.

Entitas Akuntansi adalah unit pemerintahan pengguna anggaran/pengguna barang dan oleh karenanya wajib menyelenggarakan akuntansi dan menyusun laporan keuangan untuk digabungkan pada entitas pelaporan. Pada tahun 2021 Pemerintah Daerah Kabupaten Pesisir Selatan menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 08 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, entitas akuntansi yang semula berjumlah 41 entitas akuntansi menjadi 40 Entitas akuntansi. Untuk Tahun 2024 terdapat penggabungan pelaporan entitas akuntansi, yakni Laporan Keuangan Dinas Kesehatan dan Laporan Keuangan RSUD dr. M. Zein Painan. Berikut daftar entitas akuntansi yang terdiri dari, 2 Sekretariat, 1 Inspektorat, 5 Badan, 17 Dinas, dan 15 Kecamatan, sebagai berikut:

- 1 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
- 2 Dinas Kesehatan
- 3 Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
- 4 Dinas Perdagangan dan Transmigrasi
- 5 Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman Pertanahan dan Lingkungan Hidup
- 6 Dinas Satuan Polisi, Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran
- 7 Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
- 8 Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah dan Tenaga Kerja
- 9 Dinas Perikanan dan Pangan

- 10 Dinas Pertanian
- 11 Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
- 12 Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
- 13 Dinas Perhubungan
- 14 Dinas Komunikasi dan Informatika
- 15 Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
- 16 Dinas Pariwisata, Kepemudaan dan Olahraga
- 17 Dinas Kearsipan dan Perpustakaan
- 18 Inspektorat Daerah
- 19 Badan Perencanaan Daerah, Penelitian dan Pengembangan
- 20 Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah
- 21 Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
- 22 Badan Penanggulangan Bencana Daerah
- 23 Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
- 24 Sekretariat Daerah
- 25 Sekretariat DPRD
- 26 Kecamatan Koto XI Tarusan
- 27 Kecamatan Bayang
- 28 Kecamatan Bayang Utara
- 29 Kecamatan IV Jurai
- 30 Kecamatan Batang Kapas
- 31 Kecamatan Sutera
- 32 Kecamatan Lengayang
- 33 Kecamatan Ranah Pesisir
- 34 Kecamatan Linggo Sari Baganti
- 35 Kecamatan Pancung Soal
- 36 Kecamatan Air Pura
- 37 Kecamatan Basa Ampek Balai Tapan
- 38 Kecamatan Ranah Ampek Hulu Tapan
- 39 Kecamatan Lunang
- 40 Kecamatan Silaut

Penetapan Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 08 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah berpengaruh terhadap pengelolaan keuangan daerah karena perubahan jumlah entitas akuntansi yang semula 46 entitas akuntansi menjadi 40 entitas akuntansi. SKPD yang baru dibentuk dan digabung mulai efektif melakukan pengelolaan keuangan pada tanggal 29 Oktober 2021 dengan dilantikannya pejabat pada masing-masing SKPD.

4.2 Asumsi Dasar

Asumsi dasar dalam pelaporan keuangan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan adalah anggapan yang diterima sebagai suatu kebenaran tanpa perlu dibuktikan agar standar akuntansi dapat diterapkan, yang terdiri dari:

a. Asumsi Kemandirian Entitas

Asumsi kemandirian entitas, baik entitas pelaporan maupun akuntansi, berarti bahwa setiap unit organisasi dianggap sebagai unit mandiri dan mempunyai

kewajiban untuk menyajikan laporan keuangan sehingga tidak terjadi kekacauan antar unit instansi pemerintah dalam pelaporan keuangan. Salah satu indikasi terpenuhinya asumsi ini adalah adanya kewenangan entitas untuk menyusun anggaran dan melaksanakannya dengan tanggung jawab penuh. Entitas bertanggung jawab atas pengelolaan aset dan sumber daya di luar neraca untuk kepentingan yurisdiksi tugas pokoknya, termasuk atas kehilangan atau kerusakan aset dan sumber daya dimaksud, utang-piutang yang terjadi akibat putusan entitas, serta terlaksana tidaknya program yang ditetapkan.

b. Asumsi Kesenambungan Entitas

Laporan keuangan disusun dengan asumsi bahwa entitas pelaporan akan berlanjut keberadaannya. Dengan demikian, pemerintah diasumsikan tidak bermaksud melakukan likuidasi atas entitas pelaporan dalam jangka pendek.

c. Asumsi Keterukuran dalam Satuan Uang (Monetary Measurement)

Laporan keuangan entitas pelaporan harus menyajikan setiap kegiatan yang diasumsikan dapat dinilai dengan satuan uang. Hal ini diperlukan agar memungkinkan dilakukannya analisis dan pengukuran dalam akuntansi.

4.3 Prinsip Akuntansi dan Pelaporan Keuangan

Prinsip akuntansi dan pelaporan keuangan dimaksudkan sebagai ketentuan yang harus dipahami dan ditaati oleh penyelenggara akuntansi dan pelaporan keuangan Pemerintah Daerah dalam melakukan kegiatannya, serta oleh pengguna laporan dalam memahami laporan keuangan yang disajikan. Prinsip-prinsip akuntansi dan pelaporan keuangan Pemerintah Daerah adalah sebagai berikut:

1. Basis akuntansi;

Basis akuntansi yang digunakan dalam Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan adalah Basis Akrua untuk pengakuan pada laporan Neraca, Operasional, Perubahan Ekuitas. Basis Akrua adalah pendapatan, beban dan kewajiban diakui pada saat terjadinya transaksi atau kondisi lingkungan berpengaruh pada keuangan pemerintah daerah bukan pada saat kas diterima/dibayar oleh kas daerah.

Basis akrua tercermin pada pendapatan-LO dan beban dalam laporan Operasional, pengakuan aset, kewajiban, dan ekuitas dalam neraca. Basis akrua mengandung arti bahwa pendapatan diakui pada saat hak untuk memperoleh pendapatan telah terpenuhi walaupun kas belum diterima di Rekening Kas Umum Daerah atau oleh entitas pelaporan dan beban diakui pada saat kewajiban yang mengakibatkan penurunan nilai kekayaan bersih telah terpenuhi walaupun kas belum dikeluarkan dari Rekening Kas Umum Daerah atau entitas pelaporan.

Dalam hal anggaran disusun dan dilaksanakan berdasar basis kas, maka Pemerintah Daerah diwajibkan menyusun LRA disusun berdasarkan basis kas. Artinya bahwa pendapatan dan penerimaan pembiayaan diakui pada saat kas diterima di Rekening Kas Umum Daerah atau oleh entitas pelaporan, demikian pula belanja, transfer dan pengeluaran pembiayaan diakui pada saat kas dikeluarkan dari Rekening Kas Umum Daerah.

Basis akrua untuk Neraca berarti bahwa aset, kewajiban, dan ekuitas diakui dan dicatat pada saat terjadinya transaksi, atau pada saat kejadian atau kondisi

lingkungan berpengaruh pada keuangan pemerintah, tanpa memperhatikan saat kas atau setara kas diterima atau dibayar.

Periode akuntansi yang digunakan adalah jangka waktu satu tahun anggaran dimulai 1 Januari sampai dengan 31 Desember 2024. Periode berkenaan adalah periode akuntansi selama tahun anggaran yang sedang berlangsung.

2. Prinsip nilai perolehan (*Historical Cost Principle*);

- a. Aset dicatat sebesar jumlah kas yang dibayarkan atau sebesar nilai wajar dari imbalan (*consideration*) untuk memperoleh aset tersebut pada saat perolehan. Kewajiban dicatat sebesar jumlah kas yang diharapkan akan dibayarkan untuk memenuhi kewajiban di masa yang akan datang dalam pelaksanaan kegiatan pemerintah daerah;
- b. Penggunaan nilai perolehan lebih dapat diandalkan daripada nilai yang lain, karena nilai perolehan lebih objektif dapat diverifikasi. Dalam hal tidak terdapat nilai historis, dapat digunakan nilai wajar aset atau kewajiban terkait.

3. Prinsip Realisasi (*Realization Principle*)

- a. Ketersediaan pendapatan daerah yang telah diotorisasikan melalui APBD selama satu tahun anggaran akan digunakan untuk membiayai belanja daerah dalam periode tahun anggaran dimaksud;
- b. Prinsip layak temu biaya-pendapatan (*matching-cost against revenue principle*) tidak ditekankan dalam akuntansi pemerintah daerah, sebagaimana dipraktikkan dalam akuntansi sektor swasta;

4. Prinsip substansi mengungguli formalitas (*Substance Over Form Principle*)

Informasi akuntansi dimaksudkan untuk menyajikan dengan jujur transaksi serta peristiwa lain yang seharusnya disajikan, maka transaksi atau peristiwa lain tersebut harus dicatat dan disajikan sesuai dengan substansi dan realitas ekonomi, bukan hanya mengikuti aspek formalitasnya. Apabila substansi transaksi atau peristiwa lain tidak konsisten/berbeda dengan aspek formalitasnya, maka hal tersebut harus diungkapkan dengan jelas dalam catatan atas laporan keuangan.

5. Prinsip periodisitas (*Periodicity Principle*)

- a. Kegiatan akuntansi dan pelaporan keuangan pemerintah daerah perlu dibagi menjadi periode-periode pelaporan sehingga kinerja pemerintah daerah dapat diukur dan posisi sumber daya dimilikinya dapat ditentukan;
- b. Periode utama untuk pelaporan keuangan yang digunakan adalah tahunan. Namun periode semesteran juga diperkenankan

6. Prinsip konsistensi (*Consistency Principle*)

- a. Perlakuan akuntansi yang sama harus diterapkan pada kejadian yang serupa dari periode ke periode oleh pemerintah daerah (Prinsip konsistensi internal). Hal ini tidak berarti bahwa tidak boleh terjadinya perubahan satu metode akuntansi ke metode akuntansi yang lain;
- b. Metode akuntansi yang dipakai dapat diubah dengan syarat bahwa metode yang baru diterapkan harus menunjukkan hasil yang lebih baik dari metode

yang lama. Pengaruh dan pertimbangan atas perubahan penerapan metode ini harus diungkapkan dalam laporan keuangan.

7. Prinsip pengungkapan lengkap (*Full Disclosure Principle*)

Laporan keuangan pemerintah daerah harus menyajikan secara lengkap informasi yang dibutuhkan oleh pengguna laporan. Informasi yang dibutuhkan oleh pengguna laporan dapat ditempatkan pada lembar muka (on the face) laporan keuangan atau catatan atas laporan keuangan.

8. Prinsip penyajian wajar

- a. Laporan keuangan pemerintah daerah harus menyajikan dengan wajar Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih, Neraca, Laporan Operasional, Laporan Arus Kas, Laporan Perubahan Ekuitas, dan Catatan atas Laporan Keuangan;
- b. Faktor pertimbangan sehat bagi penyusun laporan keuangan pemerintah daerah diperlukan Ketika menghadapi ketidakpastian peristiwa dan keadaan tertentu. Ketidakpastian seperti itu diakui dengan mengungkapkan hakikat serta tingkatnya dengan menggunakan pertimbangan sehat dalam penyusunan laporan keuangan pemerintah daerah. Pertimbangan sehat mengandung unsur kehati-hatian pada saat melakukan prakiraan dalam kondisi ketidakpastian sehingga aset atau pendapatan tidak dinyatakan terlalu tinggi serta kewajiban dan belanja tidak dinyatakan terlalu rendah. Namun demikian, penggunaan pertimbangan sehat tidak memperkenankan, misalnya pembentukan dana Cadangan tersembunyi, sengaja menetapkan aset atau pendapatan yang terlampau rendah atau sengaja mencatat kewajiban atau belanja yang terlampau tinggi, sehingga laporan keuangan pemerintah daerah tidak netral dan tidak andal.

4.4 Basis Akuntansi yang Mendasari Penyusunan Laporan Keuangan

Laporan Keuangan yang disajikan pada Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Pesisir Selatan Tahun 2024 terdiri dari:

1. Laporan Realisasi Anggaran (LRA)
2. Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih (LPSAL)
3. Neraca
4. Laporan Operasional (LO)
5. Laporan Arus Kas
6. Laporan Perubahan Ekuitas (LPE)
7. Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK)

Basis akuntansi yang mendasari penyusunan Laporan Keuangan dapat dijelaskan sebagai berikut:

4.4.1 Laporan Realisasi Anggaran

Laporan Realisasi Anggaran (LRA) Kabupaten Pesisir Selatan disusun berbasis kas. Basis kas adalah basis akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi dan peristiwa lainnya pada saat kas atau setara kas diterima atau dibayarkan pada kas umum daerah.

Rekening Kas Umum Daerah (RKUD/Kasda) adalah rekening tempat penyimpanan uang daerah yang ditentukan oleh Bupati untuk menampung

seluruh penerimaan daerah dan membayar seluruh pengeluaran daerah pada bank yang ditetapkan.

Pos-pos yang terdapat pada LRA terdiri dari:

1. Pendapatan

Pendapatan adalah penerimaan oleh Bendahara Umum Daerah atau oleh entitas pemerintah lainnya yang menambah Saldo Anggaran Lebih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan yang menjadi hak pemerintah, dan tidak perlu dibayar kembali oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Pesisir Selatan.

Pendapatan diakui saat kas diterima pada RKUD, atau diterima oleh Bendahara Penerima, atau Penerimaan kas atau pendapatan kas hibah yang masuk pada rekening koran SKPD yang digunakan langsung tanpa harus disetorkan pada RKUD dengan SKPD wajib melaporkan penerimaan ke BUD untuk dapat disahkan menjadi pendapatan daerah.

Pendapatan dilaksanakan berdasarkan azas bruto, dan pencatatan diklasifikasikan menurut jenis pendapatan yang terdiri dari Pendapatan Asli Daerah (PAD), Pendapatan Transfer, dan Lain-Lain Pendapatan yang Sah.

2. Belanja

Belanja adalah semua pengeluaran oleh Bendahara Umum Daerah yang mengurangi Saldo Anggaran Lebih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Pesisir Selatan.

Klasifikasi Belanja;

- Belanja Operasi
 - Belanja Pegawai;
 - Belanja Barang dan Jasa ;
 - Belanja Bunga;
 - Belanja Subsidi;
 - Belanja Hibah; dan
 - Belanja Bantuan Sosial.
- Belanja Modal
 - Belanja Modal Tanah;
 - Belanja Modal Peralatan dan Mesin;
 - Belanja Modal Gedung dan Bangunan;
 - Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan; dan
 - Belanja Modal Aset Tetap Lainnya.
- Belanja Tak terduga
- Belanja Transfer

Belanja diakui saat terjadinya pengeluaran dari rekening Kasda, khusus pengeluaran melalui bendahara pengeluaran pengakuannya terjadi pada saat pertanggungjawaban atas pengeluaran tersebut disahkan oleh unit yang mempunyai fungsi perbendaharaan dengan terbitnya Surat Perintah Penggunaan Dana (SP2D), atau kas yang digunakan langsung oleh entitas akuntansi yang berbentuk BLUD atau pengeluaran yang dikeluarkan entitas penerima hibah dengan syarat entas wajib melaporkan pengeluaran kepada BUD. Belanja dicatat berdasarkan azas bruto.

3. Transfer

Transfer adalah penerimaan atau pengeluaran oleh suatu entitas pelaporan dari/kepada entitas pelaporan lain, termasuk Dana Perimbangan dan Dana Bagi Hasil. Pengakuan pengeluaran transfer dilakukan saat kas atau SP2D keluar dari RKUD

4. Surplus/defisit

Surplus/defisit merupakan selisih lebih antara Pendapatan dan Belanja selama satu periode pelaporan.

5. Penerimaan Pembiayaan

Penerimaan Pembiayaan adalah semua penerimaan Rekening Kas Umum Daerah antara lain berasal dari penerimaan pinjaman, penjualan obligasi pemerintah, penerimaan kembali pinjaman yang diberikan kepada pihak ketiga, penjualan investasi permanen lainnya, dan pencairan dana cadangan. Penerimaan pembiayaan diakui saat diterima pada RKUD.

6. Pengeluaran Pembiayaan

Pengeluaran Pembiayaan adalah semua pengeluaran Rekening Kas Umum Daerah antara lain pemberian pinjaman kepada pihak ketiga, penyertaan modal pemerintah daerah, pembayaran kembali pokok pinjaman dalam periode tahun anggaran tertentu, dan pembentukan dana cadangan. Pengeluaran pembiayaan diakui saat dikeluarkan dari RKUD

7. Pembiayaan Neto

Pembiayaan Neto merupakan selisih antara Penerimaan Pembiayaan setelah dikurangi Pengeluaran Pembiayaan dalam periode tahun anggaran tertentu.

8. Sisa Lebih/Kurang Pembiayaan Anggaran (SiLPA/SiKPA)

SiLPA/SiKPA adalah selisih lebih atau selisih kurang antara realisasi penerimaan daerah dan pengeluaran daerah selama satu periode pelaporan.

4.4.2 Laporan Perubahan Sisa Anggaran Lebih (LPSAL)

Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih (LP-SAL) menyajikan secara komparatif dengan periode sebelumnya pos-pos berupa Saldo Anggaran Lebih awal, Penggunaan Saldo Anggaran Lebih, Sisa Lebih/Kurang Pembiayaan Anggaran Tahun Berjalan, Koreksi Kesalahan Pembukuan Tahun Sebelumnya, dan lain-lain.

4.4.3 Neraca

Neraca Kabupaten Pesisir Selatan disusun berdasarkan basis akrual. Basis akrual berarti bahwa Aset, Kewajiban, dan Ekuitas diakui dan dicatat pada saat terjadinya transaksi, atau pada saat kejadian atau kondisi lingkungan berpengaruh pada keuangan pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan, tanpa memperhatikan saat kas atau setara kas diterima atau dibayar. Berdasarkan definisi basis akrual maka pos-pos pada Neraca diakui yakni sebagai berikut:

1. pada saat potensi manfaat ekonomi masa depan diperoleh pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan dan mempunyai nilai atau biaya yang dapat diukur dengan andal;

2. pada saat diterima atau hak kepemilikannya dan/atau penguasaannya berpindah.

Pos-pos Neraca Kabupaten Pesisir Selatan dapat dikelompokkan sebagai berikut:

1. Aset

Aset adalah sumber daya ekonomi yang dikuasai dan/atau dimiliki oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Pesisir Selatan sebagai akibat dari peristiwa masa lalu dan dari mana manfaat ekonomi dan/atau sosial di masa depan diharapkan dapat diperoleh, baik oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Pesisir Selatan maupun masyarakat, serta dapat diukur dalam satuan uang, termasuk sumber daya nonkeuangan yang diperlukan untuk menyediakan jasa bagi masyarakat umum dan sumber-sumber daya yang dipelihara karena alasan sejarah dan budaya.

Aset dalam Neraca Kabupaten Pesisir Selatan terdiri dari:

- a. Aset Lancar

Aset diklasifikasikan sebagai Aset Lancar jika diharapkan segera untuk direalisasikan, dipakai, atau dimiliki untuk dijual dalam 12 (dua belas) bulan sejak tanggal pelaporan. Aset Lancar meliputi Kas dan setara kas, Investasi Jangka Pendek, Piutang, dan Persediaan.

1. Kas dan Setara Kas

Dicatat dan disajikan sebesar nilai nominalnya. Kas dicatat sebesar nilai nominal. Nilai nominal artinya disajikan sebesar nilai rupiahnya. Apabila terdapat kas dalam bentuk valuta asing, dikonversi menjadi rupiah menggunakan kurs tengah bank sentral pada tanggal neraca. Dalam Saldo Kas juga termasuk penerimaan yang harus disetorkan kepada ketiga berupa utang PFK.

2. Piutang

Dicatat dan disajikan sebesar nilai nominal/nilai rupiah piutang yang belum dilunasi setelah dikurangi dengan penyisihannya. Pengukuran piutang pendapatan diakui setelah diterbitkan surat tagihan dan dicatat sebesar nilai nominal yang tercantum dalam tagihan.

Pemberhentian pengakuan piutang selain pelunasan juga dikenal dengan dua cara yaitu: penghapusan-tagihan (write-off) dan penghapusan-bukuan (write down). Hapus tagih yang berkaitan dengan perdata dan hapus buku yang berkaitan dengan akuntansi untuk piutang, merupakan dua hal yang harus diperlakukan secara terpisah. Penghapusan-tagihan piutang berkonotasi terhadap penghapusan hak tagih atau upaya tagih secara perdata atas suatu piutang. Substansi hukum penghapusan-tagihan mempunyai konsekuensi menghapuskan catatan (penghapusan-bukuan). Sedangkan Penghapusan-bukuan piutang adalah kebijakan intern manajemen, merupakan proses dan keputusan akuntansi untuk pengalihan pencatatan dari intrakomptabel menjadi ekstrakomptabel agar nilai piutang dapat dipertahankan sesuai dengan net realizable value-nya. Tujuan hapus

buku adalah menampilkan aset yang lebih realistis dan ekuitas yang lebih tepat. Penghapus-bukuan piutang tidak secara otomatis menghapus kegiatan penagihan piutang.

Penyisihan Piutang

Piutang yang melebihi jatuh tempo dilakukan penyisihan piutang dengan besaran persentase sesuai dengan umur piutang tertentu sesuai dengan kebijakan akuntansi.

- Penyisihan Piutang Tidak Tertagih, ditetapkan sebesar:
 - a) Kualitas Lancar sebesar 0,5%;
 - b) Kualitas Kurang Lancar sebesar 10% (sepuluh perseratus) dari piutang kualitas kurang lancar setelah dikurangi dengan nilai agunan atau nilai barang sitaan (jika ada);
 - c) Kualitas Diragukan sebesar 50% (lima puluh perseratus) dari piutang dengan kualitas diragukan setelah dikurangi dengan nilai agunan atau nilai barang sitaan (jika ada); dan
 - d) Kualitas Macet 100% (seratus perseratus) dari piutang dengan kualitas macet setelah dikurangi dengan nilai agunan atau nilai barang sitaan (jika ada).
- Klasifikasi Penyisihan Piutang Tidak tertagih Tertagih untuk Pajak, ditetapkan sebesar;

No	Umur	Kualitas Piutang	Taksiran Piutang Tidak Tertagih
1	< 1 Tahun	Lancar	0,5%
2	1 – 2 Tahun	Kurang Lancar	10%
3	2 – 5 Tahun	Diragukan	50%
4	> 5 Tahun	Macet	100%

- Klasifikasi Penyisihan Piutang Tidak tertagih Tertagih untuk Retribusi, ditetapkan sebesar

No	Umur	Kualitas Piutang	Taksiran Piutang Tidak Tertagih
1	< 1 Bulan	Lancar	0,5%
2	1 – 3 Bulan	Kurang Lancar	10%
3	3 – 12 Bulan	Diragukan	50%
4	> 12 Bulan	Macet	100%

3. Persediaan

- Persediaan dicatat sebesar biaya perolehan apabila diperoleh dengan pembelian. Biaya perolehan persediaan meliputi harga pembelian, biaya pengangkutan, biaya penanganan dan biaya lainnya yang secara langsung dapat dibebankan pada perolehan persediaan. Pembebanan biaya dilakukan dengan metode Joint

Cost secara proporsional. Potongan harga, rabat, dan lainnya yang serupa mengurangi biaya perolehan.

- Persediaan dicatat sebesar harga pokok produksi apabila diperoleh dengan memproduksi sendiri. Harga pokok produksi persediaan meliputi biaya langsung yang terkait dengan persediaan yang diproduksi dan biaya tidak langsung yang dialokasikan secara sistematis
- Nilai wajar, apabila diperoleh dengan cara lainnya seperti donasi. Harga/ nilai wajar persediaan meliputi nilai tukar aset atau penyelesaian kewajiban antar pihak yang memahami dan berkeinginan melakukan transaksi wajar
- Persediaan dinilai dengan menggunakan Metode Masuk Pertama Keluar Pertama/ MPKP atau First In First Out/ FIFO, persediaan hewan dan tanaman yang dikembangkan dinilai dengan menggunakan nilai wajar

b. Investasi Jangka Panjang

Investasi adalah aset yang dimaksudkan untuk memperoleh manfaat ekonomi seperti bunga, dividend dan royalty, atau manfaat sosial, sehingga dapat meningkatkan kemampuan Pemerintah Daerah Kabupaten Pesisir Selatan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat. Investasi Jangka Panjang adalah investasi yang dimaksudkan untuk dimiliki lebih dari 12 (dua belas) bulan. Investasi Jangka Panjang dibagi menurut sifat penanaman investasinya, yaitu Permanen dan Nonpermanen.

Pengeluaran untuk investasi jangka Panjang diakui sebagai pengeluaran pembiayaan. Hasil Investasi Jangka Panjang dapat berupa:

- Deviden Tunai
- Deviden Saham
- Bagian Laba

➤ Pengakuan untuk hasil investasi untuk deviden dapat dilakukandengan cara sebagai berikut:

- (1). Hasil investasi berupa deviden tunai yang diperoleh dari penyertaan modal pemerintah yang pencatatannya menggunakan metode biaya, dicatat sebagai pendapatan hasil investasi (Lain-lain PAD yang Sah)
- (2). Sedangkan apabila menggunakan metode ekuitas, bagian laba berupa deviden tunai yang diperoleh oleh pemerintah dicatat sebagai pendapatan hasil investasi (dalam jurnal basis kas) dan mengurangi nilai investasi pemerintah (dalam jurnal berbasis akrual).

- Pengakuan hasil investasi untuk deviden dalam bentuk saham yang diterima baik dengan metode biaya maupun metode ekuitas akan menambah nilai investasi pemerintah.
- Pengakuan hasil investasi untuk bagian laba dapat dilakukan

dengan cara sebagai berikut:

- (1). Hasil investasi yang diperoleh dari penyertaan modal pemerintah berupa bagian laba dari investee yang pencatatannya menggunakan metode biaya tidak dilakukan pencatatan.
- (2). Apabila menggunakan metode ekuitas, bagian laba tersebut dicatat sebagai penambah investasi dan pendapatan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan investasi.

Pengukuran investasi jangka panjang:

- a. Investasi permanen dicatat sebesar biaya perolehannya meliputi harga transaksi investasi berkenaan ditambah biaya lain yang timbul dalam rangka perolehan investasi berkenaan.
- b. Investasi non permanen:
 - (1). Investasi yang dimaksudkan tidak untuk dimiliki berkelanjutan, dinilai sebesar nilai perolehannya.
 - (2). Investasi dalam bentuk dana talangan untuk penyehatan perbankan yang akan segera dicairkan dinilai sebesar nilai bersih yang dapat direalisasikan.
 - (3). Penanaman modal di proyek-proyek pembangunan pemerintah daerah dinilai sebesar biaya pembangunan termasuk biaya yang dikeluarkan untuk perencanaan dan biaya lain yang dikeluarkan dalam rangka penyelesaian proyek sampai proyek tersebut diserahkan ke pihak ketiga.
 - (4). Investasi non-permanen lainnya dalam bentuk dana bergulir merupakan dana yang dipinjamkan untuk dikelola dan digulirkan kepada masyarakat oleh Pengguna Anggaran atau Kuasa Pengguna Anggaran yang bertujuan meningkatkan ekonomi rakyat dan tujuan lainnya.

Karakteristik dari dana bergulir:

- a. Merupakan bagian dari keuangan daerah;
- b. Tercantum dalam APBD dan atau laporan keuangan;
- c. Harus dikuasai, dimiliki dan atau dikendalikan oleh pengguna anggaran/kuasa pengguna anggaran;
- d. Merupakan dana yang disalurkan kepada masyarakat dan ditagih kembali dari masyarakat dengan atau tanpa nilai tambah, selanjutnya dana disalurkan kembali kepada masyarakat/kelompok masyarakat demikian seterusnya (bergulir);
- e. Pemerintah Daerah dapat menarik kembali dana bergulir.
- f. Dinilai sebesar nilai bersih yang dapat

- direalisasikan (Net Realizable Value).
- g. Penyisihan investasi non-permanen dana bergulir yang kemungkinan tidak tertagih diprediksi berdasarkan pengalaman masa lalu dengan melakukan analisa terhadap saldo-saldo investasi non-permanen dana bergulir yang masih beredar (outstanding).
 - h. Penyisihan investasi non permanen dana bergulir diperhitungkan dan dibukukan dalam periode yang sama dengan periode timbulnya investasi non-permanen dana bergulir.
 - i. Penyisihan investasi non-permanen dana bergulir yang tidak tertagih dilakukan berdasarkan umur investasi non-permanen dana bergulir setelah periode jatuh tempo.
 - j. Nilai bersih yang dapat direalisasikan adalah selisih antara nilai nominal piutang dengan penyisihan piutang.
 - k. Tata Cara Penyisihan Piutang Dana Bergulir
 - 1) Kriteria kualitas dana bergulir
Penilaian kualitas dana bergulir dilakukan berdasarkan kondisi dana bergulir pada tanggal laporan keuangan.
 - 2) Besaran penyisihan dana bergulir tidak tertagih dilakukan berdasarkan umur investasi non permanen dana bergulir dengan persentase penyisihan sebagai berikut:
 - a) Kualitas lancar, pengembalian 1 s/d 3 bulan, sebesar 25% (dua puluh limapersen);
 - b) Kualitas kurang lancar, pengembalian 3 s/d 6 bulan sebesar 50% (lima puluh persen);
 - c) Kualitas diragukan, pengembalian 6 s/d 9 bulan, sebesar 75% (tujuh puluh lima persen); dan
 - d) Kualitas macet, pengembalian lebih dari 9 bulan, sebesar 100% (seratus persen) .
 - l. Penyisihan investasi non-permanen dana bergulir di Neraca disajikan sebagai pengurang dari investasi non-permanen dana bergulir yang bersangkutan dan tidak menghapus kewajiban bayar dari penerima dana bergulir.
 - m. Penyisihan investasi non-permanen dana bergulir bukan merupakan penghapusan piutang. Untuk penghapusan piutang akan mengacu pada ketentuan yang berlaku.

- n. Investasi non-permanen yang disisihkan tetap dicatat secara ekstrakomptabel.
- (4). Apabila investasi jangka panjang diperoleh dari pertukaran aset Pemerintah Daerah, maka nilai investasi yang diperoleh Pemerintah Daerah adalah sebesar biaya perolehan, atau nilai wajar investasi tersebut jika harga perolehannya tidak ada.
- (5). Penilaian investasi Pemerintah Daerah dilakukan dengan metode:
 - a). Metode Biaya, adalah metode akuntansi yang mencatat investasi sebesar biaya perolehan, digunakan jika kepemilikan investasi Pemerintah Daerah kurang dari 20 % (dua puluh persen). Penghasilan atas investasi tersebut diakui sebesar bagian hasil yang diterima
 - b). Metode Ekuitas, adalah metode akuntansi yang mencatat nilai awal investasi berdasarkan harga perolehan, nilai investasi tersebut kemudian disesuaikan dengan perubahan bagian investor atas kekayaan bersih/ekuitas dari badan usaha penerima investasi yang terjadi sesudah perolehan awal investasi; digunakan jika kepemilikan 20% (dua puluh persen) sampai 50% (lima puluh persen), atau kepemilikan kurang dari 20% (dua puluh persen) tetapi memiliki pengaruh yang signifikan, atau kepemilikan lebih dari 50% (lima puluh persen). Dengan menggunakan metode ekuitas pemerintah mencatat investasi awal sebesar biaya perolehan dan ditambah atau dikurangi sebesar bagian laba atau rugi pemerintah setelah tanggal perolehan. Bagian laba kecuali deviden dalam bentuk saham yang diterima pemerintah akan mengurangi nilai investasi pemerintah.
- (6). Harga perolehan investasi dalam mata uang asing harus dinyatakan dalam rupiah dengan menggunakan nilai kurs tengah Bank Indonesia pada tanggal transaksi.
- c. Aset Tetap

Aset Tetap adalah aset berwujud yang mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan untuk digunakan, atau dimaksudkan untuk digunakan, dalam kegiatan Pemerintah Daerah Kabupaten Pesisir Selatan atau dimanfaatkan oleh masyarakat umum. Aset Tetap diklasifikasikan berdasarkan kesamaan dalam sifat atau fungsinya dalam aktivitas operasi entitas. Klasifikasi asset tetap adalah sebagai berikut:

 - 1. Tanah
 - 2. Peralatan dan mesin
 - 3. Gedung dan Bangunan

4. Jalan, Irigasi, dan Jaringan
5. Aset Tetap Lainnya
6. Konstruksi dalam Pengerjaan

Semua biaya perolehan aset tetap dianggarkan dalam rekening/akun belanja modal, dengan kriteria sebagai berikut:

- a. Berwujud;
- b. Mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan;
- c. Tidak mudah rusak;
- d. Biaya perolehan aset dapat diukur secara andal;
- e. Diperoleh atau dibangun dengan maksud untuk digunakan;
- f. Nilai Rupiah pembelian barang material atau pengeluaran untuk pembelian barang tersebut memenuhi batasan minimal kapitalisasi aset tetap yang telah ditetapkan.
- g. Batas Minimum Kapitalisasi Aset Tetap dikecualikan terhadap pengeluaran untuk:
 - (1) Pengadaan/pembelian tanah;
 - (2) Pembelian/pembangunan jalan/irigasi/jaringan; atau
 - (3) Pengadaan/pembelian/pembuatan aset tetap lainnya berupa koleksi perpustakaan, barang bercorak kesenian, hewan/ternak, dan tumbuhan.

Kapitalisasi adalah penentuan nilai pembukuan terhadap semua pengeluaran untuk memperoleh aset tetap hingga siap pakai, untuk meningkatkan kapasitas/efisiensi dan memperpanjang umur teknisnya dalam rangka menambah nilai aset tersebut. Kapitalisasi memperhatikan batasan nilai minimum kapitalisasi aset.

Barang Milik Daerah yang memenuhi batasan nilai minimum kapitalisasi aset tetap dicatat secara intrakomptabel dan disajikan dalam neraca, barang milik daerah yang tidak memenuhi batasan nilai minimum kapitalisasi aset tetap yang diperoleh dari belanja modal dengan nilai dibawah satuan minimum kapitalisasi aset dicatat secara ekstrakomptabel.

Apabila terjadi penambahan nilai aset karena pemeliharaan (di atas batas kapitalisasi) yang mengakibatkan nilai aset tetap ekstrakomptabel menjadi diatas batas nilai kapitalisasi maka pencatatannya direklas ke aset tetap intrakomptabel dan penilaian penyusutan atas aset ekstra komptabel yang beralih menjadi intrakomptabel dihitung dari nilai buku.

Penghapusan barang milik daerah yang dicatat dalam pembukuan ekstrakomptabel dapat dilakukan oleh pengguna dan/atau kuasa pengguna.

Aset tetap dinilai dengan biaya perolehan. Jika tidak memungkinkan maka nilai aset tetap didasarkan pada nilai

wajar pada saat perolehan, terdiri dari harga belinya atau harga konstruksinya, termasuk bea impor dan setiap biaya yang dapat diatribusikan secara langsung secara proposional kesetiap unit sehingga membawa aset tersebut ke kondisi dan tempat yang membuat aset tersebut dapat bekerja untuk penggunaan yang dimaksudkan.

TANAH

Tanah yang termasuk aset tetap adalah tanah yang diperoleh dengan maksud untuk dipakai dalam kegiatan operasional Pemerintah Daerah dan dalam kondisi siap dipakai. Termasuk dalam klasifikasi Tanah ini adalah tanah yang digunakan untuk gedung, bangunan, jalan, irigasi dan jaringan.

Pengakuan

- a. Tanah dapat diakui sebagai aset tetap apabila memenuhi 4 (empat) kriteria:
 - a) Mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan;
 - b) Biaya perolehan aset dapat diukur secara andal;
 - c) Tidak dimaksudkan untuk dijual atau diserahkan kepada pihak lain; dan
 - d) Diperoleh dengan maksud digunakan.
- b. Tanah diakui sebagai aset tetap pada saat telah diterima atau diserahkan hak kepemilikannya dan/atau pada saat penguasaannya berpindah.
Hak kepemilikan tanah didasarkan pada bukti kepemilikan tanah yang sah berupa sertifikat, misalnya Sertifikat Hak Pakai/Hak Pengelolaan (SHP), Sertifikat Hak Guna Bangunan (SHGB), dan Sertifikat Pengelolaan Lahan (SPL).
- c. Pengadaan tanah Pemerintah Daerah yang sejak semula dimaksudkan untuk diserahkan kepada pihak lain tidak disajikan sebagai aset tetap, melainkan disajikan sebagai persediaan.
- d. Sedangkan untuk pengakuan aset tetap tanah dengan kasus tertentu diatur sebagai berikut:
 - Dalam hal tanah belum ada bukti kepemilikan yang sah, namun dikuasai dan/atau digunakan oleh pemerintah, maka tanah tersebut tetap harus dicatat dan disajikan sebagai aset tetap tanah pada neraca pemerintah, serta diungkapkan secara memadai dalam CaLK.
 - Dalam hal tanah dimiliki oleh pemerintah, namun dikuasai dan/atau digunakan oleh pihak lain, maka tanah tersebut tetap harus dicatat dan disajikan sebagai aset tetap tanah pada neraca pemerintah, serta diungkapkan secara memadai dalam CaLK, bahwa tanah tersebut dikuasai atau digunakan oleh pihak lain.
 - Dalam hal tanah dimiliki oleh suatu entitas pemerintah, namun dikuasai dan/atau digunakan oleh entitas pemerintah yang lain, maka tanah tersebut dicatat dan

disajikan pada neraca entitas pemerintah yang mempunyai bukti kepemilikan, serta diungkapkan secara memadai dalam CaLK. Entitas pemerintah yang menguasai dan/atau menggunakan tanah cukup mengungkapkan tanah tersebut secara memadai dalam CaLK.

- Perlakuan tanah yang masih dalam sengketa atau proses pengadilan:
 - Dalam hal belum ada bukti kepemilikan tanah yang sah, tanah tersebut dikuasai dan/atau digunakan oleh Pemerintah Daerah, maka tanah tersebut tetap harus dicatat dan disajikan sebagai aset tetap tanah pada neraca pemerintah, serta diungkapkan secara memadai dalam CaLK.
 - Dalam hal Pemerintah Daerah belum mempunyai bukti kepemilikan tanah yang sah, tanah tersebut dikuasai dan/atau digunakan oleh pihak lain, maka tanah tersebut dicatat dan disajikan sebagai aset tetap tanah pada neraca pemerintah, serta diungkapkan secara memadai dalam CaLK.
 - Dalam hal bukti kepemilikan tanah ganda, namun tanah tersebut dikuasai dan/atau digunakan oleh Pemerintah Daerah, maka tanah tersebut tetap harus dicatat dan disajikan sebagai aset tetap tanah pada neraca pemerintah, serta diungkapkan secara memadai dalam CaLK.
 - Dalam hal bukti kepemilikan tanah ganda, namun tanah tersebut dikuasai dan/atau digunakan oleh pihak lain, maka tanah tersebut tetap harus dicatat dan disajikan sebagai aset tetap tanah pada neraca pemerintah, namun adanya sertifikat ganda harus diungkapkan secara memadai dalam CaLK.
- Tanah dapat diperoleh melalui pembelian, pertukaran aset, hibah/donasi, dan lainnya. Tanah yang diperoleh melalui pembelian dilakukan melalui pelaksanaan kegiatan (belanja), sehingga nilai perolehan tanah diakui berdasarkan nilai perolehan yang telah dikeluarkan.
- Tanah yang digunakan/dipakai oleh Pemerintah Daerah yang berstatus tanah wakaf tidak disajikan dan dilaporkan sebagai aset tetap tanah pada neraca pemerintah, melainkan cukup diungkapkan secara memadai pada CaLK.

Pengukuran

- Tanah diakui sebesar biaya perolehan. Biaya perolehan mencakup harga pembelian atau biaya pembebasan tanah, biaya yang dikeluarkan dalam rangka memperoleh hak seperti biaya pengurusan sertifikat, biaya pematangan, pengukuran, penimbunan, dan biaya lainnya yang dikeluarkan sampai tanah tersebut siap pakai. Nilai tanah

juga meliputi nilai bangunan tua yang akan dimusnahkan yang terletak pada tanah yang dibeli tersebut.

- Apabila perolehan tanah Pemerintah Daerah dilakukan oleh panitia pengadaan, maka termasuk dalam harga perolehan tanah adalah honor panitia pengadaan/pembebasan tanah, belanja barang dan belanja perjalanan dinas dalam rangka perolehan tanah tersebut.
- Pemerintah Daerah tidak dibatasi satu periode tertentu untuk kepemilikan dan/atau penguasaan tanah yang dapat berbentuk hak pakai, hak pengelolaan, dan hak atas tanah lainnya yang dimungkinkan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku. Oleh karena itu, setelah perolehan awal tanah, pemerintah tidak memerlukan biaya untuk mempertahankan hak atas tanah tersebut. Biaya yang terkait dengan peningkatan bukti kepemilikan tanah, misalnya dari status tanah girik menjadi Sertifikat Hak Milik, dikapitalisasi sebagai biaya perolehan tanah.
- Biaya yang timbul atas penyelesaian sengketa tanah, seperti biaya pengadilan dan pengacara tidak dikapitalisasi sebagai biaya perolehan tanah.
- Untuk aset tetap berupa tanah tidak ada batas minimum kapitalisasi, berapapun nilai perolehannya seluruhnya dikapitalisasi sebagai nilai tanah.
- Aset tetap tanah tidak disusutkan.
- Aset tetap tanah disajikan dalam neraca sesuai dengan biaya perolehan atau sebesar nilai wajar pada saat tanah tersebut diperoleh.
- Nilai tanah dicatat dalam neraca awal sebesar nilai wajar pada tanggal neraca awal.
- Nilai wajar tanah yaitu:
 - 1) Harga perolehan jika tanah tersebut dibeli setahun atau kurang dari tanggal neraca awal.
 - 2) Jika tanah diperoleh lebih dari satu tahun sebelum tanggal neraca awal, nilai wajar tanah ditentukan dengan menggunakan rata-rata harga jual-beli tanah antar pihak-pihak independent disekitar tanggal neraca untuk jenis tanah yang sama diwilayah yang sama.
 - 3) Apabila tidak terdapat banyak transaksi jual beli tanah pada tanggal sekitar tanggal neraca, sebuah transaksi antar pihak independent dapat mewakili harga pasar.
 - 4) Apabila tidak terdapat nilai pasar, dapat digunakan Nilai jual Obyek Pajak (NJOP) terakhir.
 - 5) Jika terdapat alasan untuk tidak menggunakan NJOP maka dapat digunakan nilai appraisal dari perusahaan jasa penilai resmi atau tim penilai yang kompeten.

Penyajian dan Pengungkapan

- Tanah disajikan di neraca dalam kelompok Aset Tetap

sebesar biaya perolehan atau nilai wajar pada saat aset Tanah diperoleh.

➤ Dalam CaLK diungkapkan pula:

- (1) Dasar penilaian yang digunakan untuk nilai tercatat (carrying amount) Tanah.
- (2) Kebijakan akuntansi sebagai dasar kapitalisasi tanah, yang dalam hal tanah tidak ada nilai satuan minimum kapitalisasi tanah.
- (3) Rekonsiliasi nilai tercatat Tanah pada awal dan akhir periode yang menunjukkan:
 - Penambahan (pembelian, hibah/donasi, pertukaran aset, reklasifikasi, dan lainnya);
 - Perolehan yang berasal dari pembelian direkonsiliasi dengan total belanja modal untuk tanah;
 - Pengurangan (penjualan, penghapusan, reklasifikasi).

PERALATAN DAN MESIN

Pengakuan

- a. Peralatan dan mesin yang diperoleh dan yang dimaksudkan akan diserahkan kepada pihak lain, tidak dapat dikelompokkan dalam aset tetap Peralatan dan Mesin, tapi dikelompokkan kepada aset persediaan.
- b. Pengakuan peralatan dan mesin dapat dilakukan apabila terdapat bukti bahwa hak/kepemilikan telah berpindah, dalam hal ini misalnya ditandai dengan berita acara serah terima barang/pekerjaan, dan untuk kendaraan bermotor dilengkapi dengan bukti kepemilikan kendaraan.
- c. Perolehan peralatan dapat melalui pembelian, perakitan, atau pertukaran aset, hibah/donasi, dan lainnya. Perolehan melalui pembelian dapat dilakukan dengan pembelian tunai dan angsuran.

Pengukuran

- a. Peralatan dan mesin dinilai dengan biaya perolehan atau nilai wajar pada saat aset tetap tersebut diperoleh. Biaya perolehan peralatan dan mesin menggambarkan jumlah pengeluaran yang telah dilakukan untuk memperoleh peralatan dan mesin tersebut sampai siap pakai. Biaya ini antara lain meliputi harga pembelian, biaya pengangkutan, biaya instalasi, serta biaya langsung lainnya untuk memperoleh dan mempersiapkan sampai peralatan dan mesin tersebut siap digunakan.
- b. Nilai satuan minimum perolehan peralatan dan mesin adalah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah).
- c. Peralatan dan Mesin dicatat dalam Neraca awal sebesar Nilai wajar pada tanggal Neraca awal.

- d. Nilai wajar peralatan dan mesin adalah:
- Harga perolehan jika peralatan dan mesin tersebut dibeli setahun atau kurang dari tanggal neraca awal.
 - Harga pasar peralatan dan mesin sejenis dan dalam kondisi yang sama.
 - Bila Harga pasar tidak tersedia, digunakan nilai appraisal dari perusahaan jasa penilai resmi atau tim penilai yang kompeten dengan memperhitungkan faktor penyusutan.
 - Jika penilaian oleh appraisal terlalu mahal dan memakan waktu, digunakan standar harga yang dikeluarkan oleh instansi pemerintah yang berwenang dengan memakai perhitungan teknis.

Penyajian dan Pengungkapan

- a. Peralatan dan Mesin disajikan di Neraca dalam kelompok Aset Tetap sebesar biaya perolehannya atau nilai wajar pada saat perolehan.
- b. Dalam CaLK diungkapkan pula:
- 1) Dasar penilaian yang digunakan untuk menentukan nilaitercatat (carrying amount) Peralatan dan Mesin.
 - 2) Kebijakan akuntansi untuk kapitalisasi yang berkaitan dengan Peralatan dan Mesin.
 - 3) Rekonsiliasi nilai tercatat Peralatan dan Mesin pada awal dan akhir periode yang menunjukkan:
 - Penambahan (perolehan, reklasifikasi dari konstruksi dalam pengerjaan, dan penilaian);
 - Perolehan yang berasal dari pembelian/pembangunan direkonsiliasi dengan total belanja modal untuk Peralatan dan Mesin;
 - Pengurangan (penjualan, penghapusan, dan penilaian).

GEDUNG DAN BANGUNAN

- a. Gedung dan Bangunan adalah seluruh gedung dan bangunan yang diperoleh dengan maksud untuk dipakai dalam kegiatan operasional Pemerintah Daerah dan dalam kondisi siap dipakai.
- b. Termasuk dalam kelompok Gedung dan Bangunan adalah gedung perkantoran, rumah dinas, bangunan tempat ibadah, bangunan menara, monumen/bangunan bersejarah, gudang, gedung museum, dan rambu-rambu.

Pengakuan

- Untuk dapat diakui sebagai Gedung dan Bangunan, maka gedung dan bangunan harus berwujud dan mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan, biaya perolehannya dapat diukur secara handal, tidak dimaksudkan untuk dijual dalam kondisi normal entitas dan diperoleh atau dibangun dengan maksud untuk digunakan.

- Pengakuan Gedung dan Bangunan harus dipisahkan dengan tanah dimana gedung dan bangunan tersebut didirikan.
- Gedung dan bangunan yang dibangun oleh Pemerintah Daerah, namun dengan maksud akan diserahkan kepada masyarakat, tidak dapat dikelompokkan sebagai gedung dan bangunan, melainkan disajikan sebagai persediaan.
- Gedung dan Bangunan diakui pada saat gedung dan bangunan telah diterima atau diserahkan hak kepemilikannya dan/atau pada saat penguasaannya berpindah serta telah siap dipakai.
- Saat pengakuan Gedung dan Bangunan akan lebih dapat diandalkan apabila terdapat bukti bahwa telah terjadi perpindahan hak kepemilikan dan/atau penguasaan secara hukum, misalnya akte jual beli atau Berita Acara Serah Terima.
- Apabila perolehan Gedung dan Bangunan belum didukung dengan bukti secara hukum dikarenakan masih adanya suatu proses administrasi yang diharuskan, seperti pembelian gedung kantor yang masih harus diselesaikan proses jual beli (akta) dan bukti kepemilikannya di instansi berwenang, maka Gedung dan Bangunan tersebut harus diakui pada saat terdapat bukti bahwa penguasaan atas Gedung dan Bangunan tersebut telah berpindah, misalnya telah terjadi pembayaran dan penguasaan atas bangunan.
- Perolehan Gedung dan Bangunan dapat melalui pembelian, pembangunan, atau tukar menukar, dan lainnya. Perolehan melalui pembelian dapat dilakukan dengan pembelian tunai dan angsuran. Perolehan melalui pembangunan dapat dilakukan dengan membangun sendiri (swakelola) dan melalui kontrak konstruksi.

Pengukuran

- Gedung dan Bangunan dinilai dengan biaya perolehan, kecuali jika tidak memungkinkan dapat dinilai menggunakan nilai wajar pada saat perolehan.
- Biaya perolehan gedung dan bangunan meliputi seluruh biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh gedung dan bangunan sampai siap pakai. Biaya ini antara lain meliputi harga pembelian atau biaya konstruksi, termasuk biaya pengurusan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG), notaris, dan pajak.
- Biaya perolehan Gedung dan Bangunan yang dibangun dengan cara swakelola meliputi biaya langsung untuk tenaga kerja, bahan baku, dan biaya tidak langsung termasuk biaya perencanaan dan pengawasan, perlengkapan, tenaga listrik, sewa peralatan, dan semua biaya lainnya yang terjadi berkenaan dengan pembangunan aset tetap tersebut seperti pengurusan PBG, notaris, dan pajak. Sementara itu, gedung dan bangunan yang dibangun melalui kontrak konstruksi, biaya perolehan meliputi nilai kontrak, biaya perencanaan dan pengawasan, biaya perizinan, jasa konsultan, dan pajak.

Gedung dan Bangunan yang diperoleh dari sumbangan (donasi) dicatat sebesar nilai wajar pada saat perolehan.

- Nilai satuan minimum perolehan Gedung dan Bangunan adalah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah). Artinya, jika nilai perolehan gedung dan bangunan kurang dari Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) maka gedung dan bangunan tersebut tidak dapat diakui dan disajikan sebagai aset tetap, namun tetap diungkapkan dalam CaLK.
- Nilai Gedung dan Bangunan dicatat dalam Neraca awal sebesar Nilai wajar pada tanggal Neraca awal.
- Nilai wajar Gedung dan bangunan adalah:
 - a) Harga perolehan jika Gedung dan bangunan tersebut dibeli setahun atau kurang dari tanggal neraca awal.
 - b) Apabila Gedung dan bangunan tersebut dibeli lebih dari satu tahun sebelum tanggal neraca awal, Nilai wajar Gedung dan bangunan ditentukan dengan menggunakan NJOP terakhir.
 - c) Jika terdapat alasan untuk tidak menggunakan NJOP maka dapat digunakan nilai appraisal dari perusahaan jasa penilai resmi atau tim penilai yang kompeten

Pemeliharaan dan Perawatan

- a. Kerusakan Bangunan adalah tidak berfungsinya bangunan atau komponen bangunan akibat penyusutan/ berakhirnya umur bangunan, atau akibat ulah manusia atau perilaku alam seperti beban fungsi yang berlebih, kebakaran, gempa bumi atau sebab lain yang sejenis. Intensitas kerusakan bangunan gedung berdasarkan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 45/PRT/M/2007 dapat digolongkan atas tiga tingkat kerusakan, yaitu;
 - Kerusakan ringan, adalah kerusakan terutama pada komponen non-struktural, seperti penutup atap, langit-langit penutup lantai dan dinding pengisi;
 - Kerusakan sedang, adalah kerusakan pada sebagian komponen non-struktural, dan atau komponen struktural seperti struktur atap, lantai dan lain-lain;
 - Kerusakan berat, adalah kerusakan pada sebagian besar komponen bangunan, baik struktural maupun non-struktural yang apabila setelah diperbaiki masih dapat berfungsi dengan baik sebagaimana mestinya.
- b. Penentuan tingkat kerusakan adalah setelah berkonsultasi dengan instansi teknis terkait.
- c. Pemeliharaan bangunan adalah usaha mempertahankan kondisi bangunan agar tetap berfungsi sebagaimana mestinya atau dalam usaha meningkatkan wujud bangunan serta menjaga terhadap pengaruh yang merusak. Pemeliharaan bangunan juga merupakan upaya untuk menghindari kerusakan komponen/elemen bangunan akibat keusangan/kelusuan sebelum umurnya berakhir. Besarnya biaya pemeliharaan bangunan gedung tergantung pada fungsi dan klasifikasi bangunan.

- d. Perawatan bangunan adalah kegiatan memperbaiki kerusakan yang terjadi agar bangunan dapat berfungsi dengan baik sebagaimana semula/tetap maupun fungsi yang berubah/baru sesuai kategorinya. Biaya perawatan harus dianggarkan sesuai dengan komponen biaya pembangunan yang terdiri dari biaya konstruksi fisik, biaya perencanaan konstruksi, biaya pengawasan konstruksi dan biaya bantuan teknis/pengelola teknis. Perawatan bangunan dapat digolongkan sesuai dengan tingkat kerusakan pada bangunan yaitu :
- Perawatan untuk tingkat kerusakan ringan;
 - Perawatan untuk tingkat kerusakan sedang;
 - Perawatan untuk tingkat kerusakan berat;
- e. Besarnya biaya perawatan disesuaikan dengan tingkat kerusakan, yang ditentukan sebagai berikut:
- Perawatan untuk tingkat kerusakan ringan, biaya maksimum adalah sebesar 30% dari harga satuan tertinggi pembangunan bangunan Gedung baru yang berlaku, untuk tipe/kelas dan lokasi yang sama;
 - Perawatan untuk tingkat kerusakan sedang, biaya maksimum adalah sebesar 45% dari harga satuan tertinggi pembangunan bangunan gedung baru yang berlaku, untuk tipe/kelas dan lokasi yang sama;
 - Perawatan untuk tingkat kerusakan berat, biaya maksimum adalah sebesar 65% dari harga satuan tertinggi pembangunan bangunan gedung baru yang berlaku, untuk tipe/kelas dan lokasi yang sama.
- f. Perawatan bangunan dikategorikan dalam 3 (tiga) jenis yaitu; Rehabilitasi, Renovasi dan Restorasi.
- g. Rehabilitasi adalah memperbaiki bangunan yang telah rusak sebagian dengan maksud menggunakan sesuai dengan fungsi tertentu yang tetap, baik arsitektur maupun struktur bangunannya dipertahankan seperti semula (tetap) sedangkan utilitas bangunan dapat berubah.
- h. Renovasi adalah memperbaiki bangunan yang telah rusak sebagian dengan maksud menggunakan sesuai dengan fungsi tertentu yang dapat tetap atau berubah, baik arsitektur maupun struktur bangunannya maupun utilitas bangunan dapat berubah.
- i. Restorasi adalah memperbaiki bangunan yang telah rusak berat sebagian dengan maksud menggunakan sesuai fungsi tertentu yang tetap atau berubah, dengan tetap mempertahankan arsitektur bangunannya, sedang struktur bangunan dan utilitas bangunan dapat berubah.
- j. Rehabilitasi, Renovasi, dan Restorasi diukur dengan tingkat kerusakan dapat dikelompokkan dalam:
- Ringan untuk kerusakan ringan 0 sampai dengan 30%;
 - Sedang untuk kerusakan sedang 31 sampai dengan 45%;
 - Berat untuk kerusakan berat 46 sampai dengan 65%.
- k. Persentase bobot kerusakan untuk pekerjaan Rehabilitasi, Renovasi dan Restorasi di atas sebagai asumsi tingkat kerusakan yang dimaksud, sebagaimana hasil survey lapangan dengan rekomendasi dari SKPD terkait. Untuk perawatan yang memerlukan penanganan

khusus atau dalam usaha meningkatkan wujud bangunan, seperti melalui kegiatan Renovasi atau Restorasi (misal yang berkaitan dengan gedung bersejarah atau fungsi khusus), besarnya biaya perawatan dihitung sesuai dengan kebutuhan nyata (untuk prosentase bobot kerusakan >65%) dan dikonsultasikan terlebih dahulu kepada SKPD terkait.

Gedung dan Bangunan disajikan di Neraca dalam kelompok Aset Tetap sebesar nilai biaya perolehannya atau nilai wajar pada saat perolehan. Dalam CaLK diungkapkan pula:

- a) Dasar penilaian yang digunakan untuk mencatat Gedung dan Bangunan.
- b) Kebijakan akuntansi untuk kapitalisasi yang berkaitan dengan Gedung dan Bangunan.
- c) Rekonsiliasi nilai tercatat Gedung dan Bangunan pada awal dan akhir periode yang menunjukkan:
 - Penambahan (perolehan, reklasifikasi dari Konstruksi dalam Pengerjaan, dan penilaian);
 - Perolehan yang berasal dari pembelian/ pembangunan direkonsiliasi dengan total belanja modal untuk gedung dan bangunan;
 - Pengurangan (penjualan, penghapusan, dan penilaian).

JALAN, JARINGAN, Dan IRIGASI,

Merupakan jalan, irigasi, dan jaringan yang dibangun oleh pemerintah serta dimiliki dan/atau dikuasai oleh Pemerintah Daerah dan dalam kondisi siap dipakai. Termasuk dalam klasifikasi jalan, irigasi, dan jaringan adalah jalan raya, jembatan, bangunan air, instalasi air bersih, instalasi pembangkit listrik, jaringan air minum, jaringan listrik, dan jaringan telepon.

Pengakuan

- a. Untuk dapat diakui sebagai Jalan, Irigasi, dan Jaringan, maka Jalan, Irigasi, dan Jaringan harus berwujud dan mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (duabelas) bulan, biaya perolehannya dapat diukur secara handal, tidak dimaksudkan untuk dijual dalam kondisi normal entitas dan diperoleh dengan maksud untuk digunakan.
- b. Jalan, irigasi, dan jaringan diakui pada saat jalan, irigasi, dan jaringan telah diterima atau diserahkan hak kepemilikannya dan/atau pada saat penguasaannya berpindah serta telah siap dipakai.

Pengukuran

- a. Jalan, irigasi, dan jaringan dinilai dengan biaya perolehan. Biaya perolehan jalan, irigasi, dan jaringan meliputi seluruh biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh jalan, irigasi, dan jaringan sampai siap pakai. Biaya ini meliputi biaya perolehan atau biaya konstruksi dan biaya-biaya lain yang dikeluarkan sampai jalan, irigasi dan jaringan tersebut siap

- pakai.
- b. Biaya perolehan untuk jalan, irigasi dan jaringan yang diperoleh melalui kontrak meliputi biaya perencanaan dan pengawasan, biaya perizinan, jasa konsultan, biaya pengosongan, pajak, kontrak konstruksi, dan pembongkaran.
Biaya perolehan untuk jalan, irigasi dan jaringan yang dibangun secara swakelola meliputi biaya langsung dan tidak langsung, yang terdiri dari meliputi biaya bahan baku, tenaga kerja, sewa peralatan, biaya perencanaan dan pengawasan, biaya perizinan, biaya pengosongan, pajak dan pembongkaran. Jalan, Irigasi dan Jaringan yang diperoleh dari sumbangan (donasi) dicatat sebesar nilai wajar pada saat perolehan.
 - c. Untuk Jalan, Irigasi, dan Jaringan, tidak ada kebijakan Pemerintah mengenai nilai satuan minimum kapitalisasi, sehingga berapa pun nilai perolehan Jalan, Irigasi, dan Jaringan dikapitalisasi.
 - d. Nilai Jalan, Irigasi dan Jaringan dicatat dalam Neraca awal sebesar Nilai wajar yang ditentukan oleh perusahaan jasa penilai resmi atau tim penilai yang kompeten dengan menggunakan standar biaya atau perhitungan teknis dari instansi pemerintah yang berwenang.

Penyajian dan Pengungkapan

- a. Jalan, Irigasi, dan Jaringan disajikan di Neraca dalam kelompok Aset Tetap sebesar biaya perolehan atau nilai wajar pada saat aset tetap tersebut diperoleh.
- b. Dalam CaLK diungkapkan pula:
 - Dasar penilaian yang digunakan untuk mencatat Jalan, Irigasi, dan Jaringan;
 - Kebijakan akuntansi untuk kapitalisasi yang berkaitan dengan Jalan, Irigasi, dan Jaringan, yang dalam hal ini tidak ada nilai satuan minimum kapitalisasi.
 - Rekonsiliasi nilai tercatat Jalan, Irigasi, dan Jaringan pada awal dan akhir periode yang menunjukkan:
 - Penambahan (perolehan, reklasifikasi dari konstruksi dalam pengerjaan, dan penilaian);
 - Perolehan yang berasal dari pembelian/ pembangunan direkonsiliasi dengan total belanja modal untuk Jalan, Irigasi, dan Jaringan; dan
 - Pengurangan (penghapusan, reklasifikasi, dan penilaian/penyusutan).

ASET TETAP LAINNYA

- a. Merupakan aset tetap yang tidak dapat dikelompokkan kedalam kelompok tanah, peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, jalan, irigasi, dan jaringan yang diperoleh dan dimanfaatkan untuk kegiatan operasional Pemerintah

- Daerah dan dalam kondisi siap dipakai.
- b. Aset Tetap Lainnya antara lain adalah buku perpustakaan, hewan, dan tanaman. Aset Tetap lainnya termasuk didalamnya adalah Aset Tetap Renovasi, yaitu biaya renovasi atas aset tetap yang bukan miliknya, dan biaya partisi suatu ruangan kantor yang bukan miliknya.

Pengakuan

- Aset Tetap Lainnya diakui pada saat Aset Tetap Lainnya telah diterima atau diserahkan hak kepemilikannya dan/atau pada saat penguasaannya berpindah serta telah siap dipakai.
- Khusus mengenai pengakuan biaya renovasi atas aset tetap yangbukan milik, diatur sebagai berikut:
 - a) Apabila renovasi aset tetap tersebut meningkatkan manfaat ekonomis aset tetap misalnya perubahan fungsi gedung dari gudang menjadi ruangan kerja dan kapasitasnya naik, maka renovasi tersebut dikapitalisasi sebagai Aset Tetap-Renovasi. Apabila renovasi atas aset tetap yang disewa tidak menambah manfaat ekonomis, maka dianggap sebagai Belanja Operasional. Aset Tetap-Renovasi diklasifikasikan kedalam Aset Tetap Lainnya.
 - b) Apabila manfaat ekonomis renovasi tersebut lebih dari satu tahun buku, dan memenuhi butir (1) di atas, biaya renovasi dikapitalisasi sebagai Aset Tetap-Renovasi, sedangkan apabila manfaat ekonomis renovasi kurang dari 1 (satu) tahun buku, maka pengeluaran tersebut diperlakukan sebagai Belanja Operasional tahun berjalan.
 - c) Apabila jumlah nilai moneter biaya renovasi tersebut cukup material, dan memenuhi syarat angka 1 dan angka 2 di atas, maka pengeluaran tersebut dikapitalisasi sebagai Aset Tetap– Renovasi. Apabila tidak material, biaya renovasi dianggap sebagai Belanja Operasional.
 - d) Perolehan Aset Tetap Lainnya, selain Aset Tetap Renovasi, pada umumnya melalui pembelian atau perolehan lain seperti hibah/donasi.

Pengukuran

- Biaya perolehan Aset Tetap Lainnya menggambarkan seluruh biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh aset tersebut sampai siap pakai.
- Aset Tetap Lainnya dinilai dengan biaya perolehan. Biaya perolehan Aset Tetap Lainnya yang diperoleh melalui kontrak meliputi pengeluaran nilai kontrak, biaya perencanaan dan pengawasan, pajak, serta biaya perizinan.

- Biaya perolehan Aset Tetap Lainnya yang diadakan melalui swakelola, misalnya untuk Aset-Tetap Renovasi, meliputi biaya langsung dan tidak langsung, yang terdiri dari biaya bahan baku, tenaga kerja, sewa peralatan, biaya perencanaan dan pengawasan, biaya perizinan, pajak, dan jasa konsultan.

Pengeluaran setelah perolehan

Pengeluaran setelah perolehan awal aset tetap yang memperpanjang masa manfaat, atau yang kemungkinan besar memberi manfaat ekonomis di masa yang akan datang dalam bentuk peningkatan kapasitas, mutu produksi, atau peningkatan standar kinerja, harus ditambahkan/dikapitalisasi pada nilai tercatat aset yang bersangkutan.

- a) Nilai Satuan Minimum Kapitalisasi Aset Tetap adalah pengeluaran pengadaan baru dan penambahan nilai aset tetap dari hasil pengembangan, reklasifikasi, renovasi, perbaikan atau restorasi. Nilai Satuan Minimum Kapitalisasi Aset Tetap menentukan apakah perolehan suatu aset harus dikapitalisasi atau tidak.
- b) Nilai suatu minimum kapitalisasi aset tetap meliputi:
 - Pengeluaran untuk per satuan Peralatan dan Mesin dan alat olah raga yang sama dengan atau lebih dari Rp.500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);
 - Pengeluaran untuk Bangunan dan Gedung yang sama dengan atau lebih dari Rp.10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah).
 - Biaya pemeliharaan aset dengan nilai sama dengan atau lebih dari Rp.10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) apabila menambah volume aset, menambah massa manfaat maka diakui menambah aset yang bersangkutan.
 - Nilai Satuan Minimum Kapitalisasi Aset Tetap dikecualikan terhadap pengeluaran tanah, jalan/irigasi/jaringan dan aset tetap lainnya berupa koleksi perpustakaan dan barang bercorak kesenian.
 - Pengeluaran untuk pemasangan/ pembangunan bronjong yang ditujukan untuk pengamanan tebing sungai yang bersifat sementara, tidak dikapitalisir.
 - Pengeluaran untuk pembangunan saluran irigasi tertier tidak dikapitalisir.
- c) Pemeliharaan aset lainnya tidak menambah masa manfaat dan nilai perolehan.

Penyusutan

- 1) Penyusutan adalah alokasi yang sistematis atas nilai suatu aset tetap yang dapat disusutkan (depreciable assets) selama masa manfaat aset yang bersangkutan.

Nilai penyusutan untuk masing-masing periode diakui dan disajikan tersendiri dalam neraca sebagai pengurang nilai tercatat aset tetap dan beban penyusutan dalam laporan operasional.

- 2) Selain tanah dan konstruksi dalam pengerjaan, seluruh aset tetap disusutkan sesuai dengan sifat dan karakteristik aset tersebut.
- 3) Aset Tetap Lainnya berupa hewan, tanaman, dan buku perpustakaan tidak dilakukan penyusutan secara periodik, melainkan diterapkan penghapusan pada saat Aset Tetap Lainnya tersebut sudah tidak dapat digunakan atau mati.
- 4) Penyusutan aset tetap renovasi dilakukan sesuai dengan umur ekonomis mana yang lebih pendek antara masa manfaat aset dengan masa pinjaman/sewa.
- 5) Metode penyusutan yang digunakan adalah metode garis lurus (straight line method)
- 6) Penambahan masa manfaat akibat pemeliharaan yang menyebabkan jumlah masa manfaat baru melebihi masa manfaat awal, dianggap sama dengan masa manfaat awal. Masa manfaat aset tetap yang dapat disusutkan harus ditinjau secara periodik dan jika terdapat perbedaan besar dari estimasi sebelumnya, penyusutan periode sekarang dan yang akan datang harus dilakukan penyesuaian.
- 7) Untuk Aset Tetap yang dicatat secara intra komptabel dilakukan penyusutan dan tetap dicatat dalam catatan intrakomptabel walaupun nilai buku aset dibawah nilai kapitalisasi dan/atau nol.
- 8) Untuk Aset Tetap yang dicatat secara ekstrakomptabel tidak dilakukan penyusutan dengan pertimbangan tidak mempengaruhi nilai neraca.
- 9) Untuk perhitungan penyusutan digunakan pendekatan tahunan, yang berarti meskipun aset tetap baru diperoleh satu atau dua bulan atau bahkan dua hari, nilai penyusutan tetap dihitung untuk satu tahun.
- 10) Penyusutan dilakukan tanpa memperhitungkan adanya nilai residu. Nilai penyusutan untuk masing-masing periode diakui sebagai beban penyusutan dan dicatat pada akumulasi penyusutan aset tetap sebagai pengurang nilai aset tetap.
- 11) Aset Tetap berikut ini tidak disusutkan yaitu tanah, konstruksi dalam pengerjaan, buku-buku perpustakaan, hewan ternak, dan tanaman. Aset tetap yang direklasifikasikan sebagai Aset Lainnya dalam neraca berupa Aset Kemitraan Dengan Pihak Ketiga dan Aset Idle disusutkan sebagaimana layaknya Aset Tetap. Penyusutan tidak dilakukan terhadap Aset Tetap yang direklasifikasikan sebagai Aset Lainnya berupa :

- a. Aset Tetap yang dinyatakan hilang berdasarkan dokumen sumber yang sah dan telah diusulkan kepada Pengelola Barang untuk dilakukan penghapusannya; dan
 - b. Aset Tetap dalam kondisi rusak berat dan/atau usang yang telah diusulkan kepada Pengelola Barang untuk dilakukan penghapusan.
- 12) Perbaikan yang dilakukan atas suatu aset tetap dapat menambah masa manfaat atau menambah kapasitas aset tetap yang bersangkutan. Pengeluaran yang dilakukan semacam ini disebut dengan pengeluaran modal. Pengeluaran modal akan ditambah pada nilai buku aset yang bersangkutan dan mempengaruhi nilai yang dapat disusutkan, perkiraan output, dan bahkan masa manfaat aset tetap yang bersangkutan. Nilai buku aset ditambah dengan pengeluaran modal akan menjadi nilai baru yang dapat disusutkan selama sisa manfaat aset yang bersangkutan.

KONSTRUKSI DALAM Pengerjaan

Merupakan aset-aset tetap yang sedang dalam proses pembangunan namun pada tanggal Laporan Keuangan belum selesai seluruhnya, mencakup peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, jalan, irigasi dan jaringan, serta aset tetap lainnya yang proses perolehannya dan/atau pembangunannya membutuhkan suatu periode waktu tertentu dan belum selesai pada saat akhir tahun anggaran.

Suatu aset berwujud harus diakui sebagai Konstruksi Dalam Pengerjaan jika:

- a. Besar kemungkinan bahwa manfaat ekonomi masa yang akan datang berkaitan dengan aset tersebut akan diperoleh;
- b. Biaya perolehan tersebut dapat diukur secara andal; dan
- c. Aset tersebut masih dalam proses pengerjaan.

Apabila dalam konstruksi aset tetap pembangunan fisik proyek belum dilaksanakan, namun biaya-biaya yang dapat diatribusikan langsung ke dalam pembangunan proyek telah dikeluarkan, maka biaya-biaya tersebut harus diakui sebagai KDP aset yang bersangkutan.

Suatu KDP akan dipindahkan ke pos aset tetap yang bersangkutan jika konstruksi secara substansi telah selesai dikerjakan dan konstruksi tersebut telah dapat memberikan manfaat/jasa sesuai tujuan perolehan. Dokumen sumber untuk pengakuan penyelesaian suatu KDP adalah Berita Acara Penyelesaian Pekerjaan (BAPP). Pencatatan suatu transaksi perlu mengikuti system akuntansi yang ditetapkan dengan pohon putusan (decision tree) sebagai berikut:

- a) Atas dasar bukti transaksi yang obyektif (objective evidences); dan

- b) Dalam hal tidak dimungkinkan adanya bukti transaksi yang obyektif maka digunakan prinsip substansi mengungguli bentuk formal (substance over form).

Terkait dengan variasi penyelesaian KDP, Kebijakan Akuntansi ini memberikan pedoman sebagai berikut:

- a) Apabila aset telah selesai dibangun, Berita Acara Penyelesaian Pekerjaan sudah diperoleh, dan aset tetap tersebut sudah dimanfaatkan oleh Perangkat Daerah, maka aset tersebut dicatat sebagai Aset Tetap Definitifnya.
- b) Apabila aset tetap telah selesai dibangun, Berita Acara Penyelesaian Pekerjaan sudah diperoleh, namun aset tetap tersebut belum dimanfaatkan oleh Perangkat Daerah, maka aset tersebut dicatat sebagai Aset Tetap definitifnya.
- c) Apabila aset telah selesai dibangun, yang didukung dengan bukti yang sah (walaupun Berita Acara Penyelesaian Pekerjaan belum diperoleh) namun aset tetap tersebut sudah dimanfaatkan oleh Perangkat Daerah, maka aset tersebut masih dicatat sebagai KDP dan diungkapkan di dalam CaLK.
- d) Apabila sebagian dari aset tetap yang dibangun telah selesai, dan telah digunakan/ dimanfaatkan, maka bagian yang digunakan/ dimanfaatkan masih diakui sebagai KDP.
- e) Apabila suatu aset tetap telah selesai dibangun sebagian (konstruksi dalam pengerjaan), karena sebab tertentu (misalnya terkena bencana alam/force majeure) aset tersebut hilang, maka penanggung jawab aset tersebut membuat pernyataan hilang karena bencana alam/force majeure dan atas dasar pernyataan tersebut Konstruksi Dalam Pengerjaan dapat dihapus bukukan.
- f) Apabila BAST sudah ada, namun fisik pekerjaan belum selesai, akan diakui sebagai KDP.

Penghentian Konstruksi dalam Pengerjaan

Apabila suatu KDP dihentikan pembangunannya untuk sementara waktu, maka KDP tersebut tetap dicantumkan kedalam neraca dan kejadian ini diungkapkan secara memadai di dalam CaLK. Namun, apabila pembangunan KDP dengan sengaja dihentikan pembangunannya secara permanen karena diperkirakan tidak akan memberikan manfaat ekonomi di masa depan, ataupun oleh sebab lain yang dapat dipertanggungjawabkan, maka KDP tersebut harus dieliminasi dari neraca dan kejadian ini diungkapkan secara memadai dalam CaLK.

Penghentian semacam ini ditetapkan dengan Surat Keputusan Pengguna Anggaran/Pengguna Barang (Kepala SKPD) yang bersangkutan dengan persetujuan dari Pengelola Barang (Sekretaris Daerah). Untuk KDP yang masih berupa kegiatan

perencanaan (belum ada fisik aset), seperti Detail Engineering Design (DED), yang telah tercatat di neraca namun tidak ada kepastian kelanjutan pembangunannya, setelah melewati 2 tahun anggaran dapat dikeluarkan dari neraca yang ditetapkan dengan Surat Keputusan Pengguna Anggaran/Pengguna Barang (SKPD) yang bersanansuransigkutan.

Konstruksi Dalam Pengerjaan dicatat dengan biaya perolehan. Pengukuran biaya perolehan dipengaruhi oleh metode yang digunakan dalam proses konstruksi aset tetap tersebut, yaitu secara swakelola atau secara kontrak konstruksi.

Nilai konstruksi yang dikerjakan secara swakelola meliputi:

1. Biaya yang berhubungan langsung dengan kegiatan konstruksi;
 - biaya pekerja lapangan termasuk penyelia;
 - biaya bahan yang digunakan dalam konstruksi;
 - biaya pemindahan sarana, peralatan, dan bahan-bahan dari dan ke lokasi pelaksanaan konstruksi;
 - biaya penyewaan sarana dan peralatan; dan
 - biaya Biaya rancangan dan bantuan teknis yang secara langsung berhubungan dengan konstruksi
2. Biaya yang dapat diatribusikan pada kegiatan pada umumnya dan dapat dialokasikan ke konstruksi tersebut;
 - Asuransi;
 - biaya rancangan dan bantuan teknis yang tidak secara langsung berhubungan dengan konstruksi tertentu;
 - biaya-biaya lain yang dapat diidentifikasi untuk kegiatan konstruksi yang bersangkutan seperti biaya inspeksi; dan
3. Biaya lain yang secara khusus dibebankan sehubungan konstruksi yang bersangkutan.

Biaya tersebut dialokasikan dengan menggunakan metode yang sistematis dan rasional dan diterapkan secara konsisten pada semua biaya yang mempunyai karakteristik yang sama. Metode alokasi biaya yang digunakan adalah metode rata-rata tertimbang atas dasar proporsi biaya langsung.

Nilai konstruksi yang dikerjakan oleh kontraktor melalui kontrak konstruksi meliputi:

1. Termin yang telah dibayarkan kepada kontraktor sehubungan dengan tingkat penyelesaian pekerjaan;
2. Kewajiban yang masih harus dibayar kepada kontraktor berhubungan dengan pekerjaan yang telah diterima tetapi belum dibayar pada tanggal pelaporan;
3. Pembayaran klaim kepada kontraktor atau pihak ketiga sehubungan dengan pelaksanaan kontrak konstruksi.

Konstruksi Dalam Pengerjaan disajikan sebagai bagian dari aset tetap sebesar biaya perolehan atau nilai wajar pada saat perolehan

d. Dana Cadangan

Dana Cadangan adalah dana yang disisihkan untuk menampung kebutuhan yang memerlukan dana relatif besar yang tidak dapat dipenuhi dalam satu tahun anggaran.

Dana cadangan dianggarkan dalam pengeluaran pembiayaan, pencairannya dianggarkan pada penerimaan pembiayaan. Dana Cadangan diakui saat terjadi pemindahan dana dari Rekening Kas Daerah ke Rekening Dana Cadangan. Proses pemindahan ini harus melalui proses penatausahaan yang menggunakan mekanisme LS

e. Aset Lainnya

Yang termasuk dalam Aset Lainnya adalah Aset Tak Berwujud, Tagihan Penjualan Angsuran yang jatuh tempo lebih dari 12 (dua belas) bulan, Tagihan Tuntutan Ganti Kerugian Daerah, Kemitraan dengan Pihak Ketiga, dan Aset Lain-lain.

PENGAKUAN

1. Tagihan Jangka Panjang

Tagihan Penjualan Angsuran

Penilaian Tagihan Penjualan Angsuran diakui pada saat terbitnya berita acara penjualan angsuran atau dokumen yang dipersamakan, dinilai sebesar nilai nominal dari kontrak/berita acara penjualan aset yang bersangkutan setelah dikurangi dengan angsuran yang telah dibayarkan oleh pegawai Pemerintah Daerah/ Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah ke kas umum daerah atau daftar saldo tagihan penjualan angsuran.

2. Tagihan Tuntutan Ganti Kerugian Daerah

TPTGR diakui ketika terbit putusan TPTGR Surat Keputusan Pembebasan Penggantian Kerugian (SKP2K) atau Surat Keterangan Tanggungjawab Mutlak (SKTJM).

Tuntutan Perbendaharaan dinilai sebesar nilai nominal dalam Surat Keputusan Pembebanan setelah dikurangi dengan setoran yang telah dilakukan oleh bendahara yang bersangkutan ke kas umum daerah.

Tuntutan Ganti Rugi dinilai sebesar nilai nominal dalam Surat Keterangan Tanggungjawab Mutlak (SKTJM) setelah dikurangi dengan setoran yang telah dilakukan oleh pegawai yang bersangkutan ke kas umum daerah.

3. Kemitraan dengan Pihak Ketiga

Kemitraan dengan pihak ketiga berupa sewa diakui pada saat terjadi perjanjian kerjasama/kemitraan, yaitu dengan perubahan klasifikasi aset dari aset tetap menjadi aset lainnya kerjasama/kemitraan sewa.

Sewa dinilai sebesar nilai nominal dari kontrak/berita acara sewa.

- Kerjasama pemanfaatan (KSP) diakui pada saat terjadi perjanjian kerjasama/ kemitraan, yaitu dengan perubahan

klasifikasi aset dari aset tetap menjadi aset lainnya KSP, dinilai dari nilai bersih yang tercatat pada saat perjanjian atau nilai wajar pada saat perjanjian, dipilih yang paling obyektif atau yang paling berdaya uji.

- Bangun, Kelola/Guna, Serah adalah suatu bentuk kerjasama berupa pemanfaatan aset Pemerintah Daerah oleh pihak ketiga/ investor, dengan cara pihak ketiga/investor tersebut mendirikan bangunan dan/atau sarana lain berikut fasilitasnya serta mendayagunakannya dalam jangka waktu tertentu, untuk kemudian menyerahkannya kembali bangunan dan/atau sarana lain berikut fasilitasnya kepada Pemerintah Daerah setelah berakhirnya jangka waktu yang disepakati (masa konsesi). Bangun, Kelola/Guna, Serah dicatat sebesar nilai aset yang diserahkan oleh pemerintah kepada pihak ketiga/investor untuk membangun aset Bangun, Kelola/Guna, Serah tersebut. Aset yang berada dalam Bangun, Kelola/Guna, Serah ini disajikan terpisah dari Aset Tetap yang dicatat sebesar nilai buku aset tetap yang diserahkan oleh Pemerintah kepada pihak ketiga/investor untuk membangun aset Bangun, Kelola/Guna, Serah tersebut.
- Bangun, Serah, Kelola/Guna adalah pemanfaatan aset Pemerintah Daerah oleh pihak ketiga/investor, dengan cara pihak ketiga/investor tersebut mendirikan bangunan dan/atau sarana lain berikut fasilitasnya kemudian menyerahkan aset yang dibangun tersebut kepada Pemerintah Daerah untuk dikelola/digunakan sesuai dengan tujuan pembangunan aset tersebut oleh pihak ketiga/investor tersebut dalam jangka waktu tertentu yang disepakati. Pengakuan pada saat pengadaan/pembangunan Gedung dan/atau sarana berikut fasilitasnya selesai dan siap untuk digunakan/dioperasikan sebesar nilai perolehan aset yang dibangun.
- Aset Tidak Berwujud
Adalah aset yang secara fisik tidak dapat dinyatakan atau tidak mempunyai wujud fisik serta dimiliki untuk digunakan dalam menghasilkan barang atau jasa atau digunakan untuk tujuan lainnya termasuk hak atas kekayaan intelektual. Aset tidak berwujud dapat diperoleh melalui pembelian atau dapat dikembangkan sendiri oleh pemerintah daerah.
Aset tak berwujud terdiri atas:
 - a. Goodwill
Kelebihan nilai yang diakui oleh pemerintah daerah akibat adanya pembelian kepentingan z/saham di atas nilai buku. Goodwill dihitung berdasarkan selisih antara nilai entitas berdasarkan pengakuan dari suatu

- transaksi peralihan/penjualan kepentingan/saham dengan nilai buku kekayaan bersih perusahaan.
- b. Hak Paten atau Hak Cipta
Hak-hak ini pada dasarnya diperoleh karena adanya kepemilikan kekayaan intelektual atau atas suatu pengetahuan teknis atau suatu karya yang dapat menghasilkan manfaat bagi pemerintah daerah. Selain itu dengan adanya hak ini dapat mengendalikan pemanfaatan aset tersebut dan membatasi pihak lain yang tidak berhak untuk memanfaatkannya.
 - c. Royalti
Nilai manfaat ekonomi yang akan/dapat diterima atas kepemilikan hak cipta/hak paten/hak lainnya pada saat hak dimaksud akan dimanfaatkan oleh orang, instansi atau perusahaan lain.
 - d. Software
Software komputer yang masuk dipergunakan dalam jangka waktu lebih dari satu tahun, dan bukan merupakan bagian tak terpisahkan dari hardware komputer tertentu. Software yang diakui sebagai ATB memiliki karakteristik berupa adanya hak istimewa/eksklusif atas software berkenaan.
 - e. Lisensi
Merupakan izin yang diberikan pemilik hak paten atau hak cipta yang diberikan kepada pihak lain berdasarkan perjanjian pemberian hak untuk menikmati manfaat ekonomi dari suatu Hak Kekayaan Intelektual yang diberi perlindungan dalam jangka waktu dan syarat tertentu.
 - f. Hasil kajian/penelitian yang memberikan manfaat jangka panjang adalah suatu kajian atau pengembangan yang memberikan manfaat ekonomis dan/atau sosial dimasa yang akan datang yang dapat diidentifikasi sebagai aset.
 - g. Aset Tak Berwujud Lainnya
Aset tak berwujud lainnya merupakan jenis aset tak berwujud yang tidak dapat dikelompokkan ke dalam jenis aset tak berwujud yang ada.
 - h. Aset Tak Berwujud dalam Pengerjaan
Terdapat kemungkinan pengembangan suatu aset tak berwujud yang diperoleh secara internal yang jangka waktu penyelesaiannya melebihi satu tahun anggaran atau pelaksanaan pengembangannya melewati tanggal pelaporan. Dalam hal terjadi seperti ini, maka atas pengeluaran yang telah terjadi dalam rangka pengembangan tersebut sampai dengan tanggal pelaporan harus diakui sebagai aset tak berwujud dalam Pengerjaan (intangible asset – work in progress), dan setelah pekerjaan selesai kemudian

akan direklasifikasi menjadi aset tak berwujud yang bersangkutan.

i. Aset Tak Berwujud Yang Mempunyai Nilai sejarah/ Budaya.

Aset tak berwujud harus memenuhi kriteria:

- Dapat diidentifikasi;
- Dikendalikan oleh entitas;
- Mempunyai potensi manfaat ekonomi masa depan; dan
- Biaya yang dikeluarkan setelah perolehan awal dari aset tidak berwujud tidak menambah masa manfaat dan tidak dikapitalisasi.

Aset Tak Berwujud diakui jika :

- Dapat diidentifikasi;
- Dikendalikan, dikuasi, atau dimiliki entitas;
- Kemungkinan besar diperkirakan manfaat ekonomi dan sosial di masa datang yang diharapkan atau jasa potensial yang diakibatkan dari Aset Tak Berwujud tersebut akan mengalir kepada entitas pemerintah daerah atau dinikmati oleh entitas; dan
- Biaya perolehan atau nilai wajarnya dapat diukur dengan andal.

Aset tak berwujud dicatat sebesar harga perolehan, namun jika tidak dapat ditelusuri maka dapat dicatat sebesar nilai wajar.

Berdasarkan cara perolehan, Aset Tidak Berwujud dapat berasal dari :

- Pembelian;
- pengembangan secara internal;
- pertukaran;
- kerjasama;
- donasi/hibah;
- warisan budaya/sejarah (intangible heritage assets).

Aset Tidak berwujud dapat dibedakan menjadi :

- ATB dengan umur manfaat terbatas (finite life);
- ATB dengan umur manfaat yang tak terbatas (indefinite life).

Penghitungan masa manfaat aset tidak berwujud berupa software selama 5 tahun.

2. Kewajiban

Kewajiban adalah utang yang timbul dari peristiwa masa lalu yang penyelesaiannya mengakibatkan aliran keluar sumber daya ekonomi Pemerintah Daerah Kabupaten Pesisir Selatan.

Kewajiban terdiri dari:

➤ Kewajiban Jangka Pendek

Kewajiban diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka pendek jika diharapkan dibayar dalam waktu 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan.

Jenis Kewajiban jangka pendek;

- Utang Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)
Diakui disaat dilakukan pemotongan oeh BUD atas pengeluaran dari Kas Daerah, dicantumkan sebanyak pemotongan yang dilakukan BUD atau Bendahara Pengeluaran namun belum melakukan penyetoran
 - Utang Bunga
Diakui dan dicatat sebesar kewajiban bunga atau commitment fee yang telah terjadi dan belum dibayar
 - Pendapatan Diterima Dimuka
Timbul karena adanya penerimaan kas, namun sampai tanggal penyusunan neraca seluruh atau sebagian barang dan jasa belum diserahkan kepada pihak lain. Diakui dan dicatat sebesar seluruh atau sebagian barang dan jasa belum diserahkan kepada pihak lain
 - Bagian Lancar Utang Jangka Panjang
Merupakan reklasifikasi utang jangka Panjang yang akan jatuh tempo dalam waktu kurang dari 12 bulan setelah tanggal neraca setiap akhir periode akuntansi. Diakui dan dicatat sebesar utang jangka panjang yang akan jatuh tempo kurang dari 12 bulan setelah tanggal neraca.
 - Utang Belanja/Beban
Utang belanja diakui saat belanja yang telah terjadi tetapi belum dibayarkan, terdapat klaimpihak ketiga yang belum diselesaikan oleh pemerintah daerah pada akhir periode akuntansi, dan barang yang sudah dibeli dan terima namun belum dibayar saat diserahkan pada pemerintah daerah.
Utang dicatat sebesar belanja yang belum dibayarkan sampai dengan tanggal neraca.
 - Utang Jangka Pendek Lainnya
Diakui pada saat terdapat/timbul klaim kepada pemerintah daerah terkait kas yang telah diterima tetapi belum ada pembayaran/ pengakuan sampai dengan tanggal pelaporan, dengan besaran nilai sebesar kewajiban yang belum diselesaikan.
- Kewajiban Jangka Panjang
- Selain kewajiban jangka pendek maka semuanya diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka panjang. Suatu entitas pelaporan tetap mengklasifikasikan kewajiban jangka panjangnya, meskipun kewajiban tersebut jatuh tempo dan untuk diselesaikan dalam waktu 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan jika:
 - Jangka waktu aslinya adalah untuk periode lebih dari 12 (dua belas) bulan;
 - Entitas bermaksud mendanai kembali (refinance) kewajiban tersebut atas dasar jangka panjang;
 - Maksud tersebut didukung dengan adanya suatu perjanjian pendanaan kembali (refinancing), atau adanya penjadwalan kembali pembayaran, yang diselesaikan sebelum laporan keuangan disetujui.

3. Ekuitas

Ekuitas merupakan kekayaan bersih Pemerintah Daerah Kabupaten Pesisir Selatan yang merupakan selisih antara Aset dan Kewajiban Pemerintah Daerah Kabupaten Pesisir Selatan.

Saldo ekuitas di Neraca berasal dari saldo akhir ekuitas pada LPE, dan tidak mengakomodasi Ekuitas untuk dikonsolidasikan dan Ekuitas SAL (Saldo Anggaran Lebih). Ekuitas diakui dan diukur saat pengukuran aset dan kewajiban.

4.4.4 Laporan Operasional (LO)

Laporan Operasional menyajikan informasi mengenai seluruh kegiatan operasional keuangan entitas pelaporan yang tercerminkan dalam Pendapatan-LO, beban, dan surplus/defisit operasional dari suatu entitas akuntansi/pelaporan yang penyajiannya disandingkan dengan periode sebelumnya. Pos-pos laporan keuangan yang disajikan dalam Laporan Operasional meliputi Pendapatan-LO, Beban, Transfer, dan Pos Luar Biasa. Masing-masing unsur dijelaskan sebagai berikut:

1. Pendapatan-LO adalah hak Pemerintah Daerah yang diakui sebagai penambah ekuitas dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan dan tidak perlu dibayar kembali;

Pengakuan;

- Pendapatan – LO pada level SKPD yang berasal dari Pendapatan Pajak Daerah yang ditetapkan Kepala Daerah (Official Assesment) diakui pada saat terbitnya surat ketetapan pajak daerah. (Pajak Reklame, Air Tanah, PBB).
- Pendapatan – LO pada level SKPD yang berasal dari Pendapatan Pajak Daerah yang dibayar sendiri oleh Wajib Pajak (Self Assesment) diakui pada saat kas diterima.
- Pendapatan – LO pada level SKPD yang berasal dari Pendapatan Retribusi Daerah diakui pada saat terbitnya Surat Ketetapan Retribusi Daerah. Apabila pendapatan retribusi daerah dipungut selain menggunakan Surat Ketetapan Retribusi Daerah maka pendapatan diakui pada saat pembayaran diterima.
- Pendapatan – LO pada level SKPD yang berasal dari Lain lain PAD yang Sah diakui pada saat direalisasikannya pendapatan tersebut.
- Pendapatan – LO pada level SKPD yang berasal dari Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan untuk bagian laba atas penyertaan modal ke Badan Usaha Milik Daerah diakui pada saat Laporan Keuangan atau Laporan Kinerja Tahunan telah diaudit KAP.
- Pendapatan – LO berasal dari hibah berbentuk barang dan barang rampasan diakui pada saat barang tersebut diterima, dan diukur dengan nilai wajar barang tersebut.
- Pendapatan – LO berbentuk jasa diterima diakui pada saat jasa diterima atau dinikmati pemerintah, diukur dengan nilai wajar jasa tersebut.
- Pendapatan – LO dari dana-dana non APBD serta hibah barang yang diterima oleh sekolah sekolah dilingkungan Dinas

Pendidikan (tidak termasuk Dana Dekonsentrasi dan Dana Tugas Pembantuan) diakui setelah dilaporkan ke PPKD oleh Dinas Pendidikan

- Pendapatan-LO yang diperoleh berdasarkan peraturan perundang-undangan dan sebagai imbalan atas suatu pelayanan yang telah selesai diberikan diakui pada saat timbulnya hak untuk menagih pendapatan/imbalan;
 - Dalam hal badan layanan umum, pendapatan diakui dengan mengacu pada peraturan perundangan yang mengatur mengenai badan layanan umum.
 - Pencatatan dilaksanakan berdasarkan azas bruto
2. Beban adalah penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas, yang dapat berupa pengeluaran atau konsumsi aset atau timbulnya kewajiban.
- Beban Terdiri dari;
- a. Beban Operasi
 - Beban Pegawai;
 - Beban Barang;
 - Beban Bunga;
 - Beban Subsidi;
 - Beban Hibah;
 - Beban Bantuan Sosial;
 - Beban Penyisihan Piutang;
 - Beban Penyusutan dan Amortisasi
 - Beban Lain-Lain.
 - b. Beban Transfer
 - c. Beban Tak terduga
 - d. Beban Non Operasional
 - e. Beban Luar Biasa

Beban diakui saat timbulnya kewajiban, terjadinya konsumsi aset, dan terjadinya penurunan manfaat ekonomi.

Jika dikaitkan dengan pengeluaran kas, maka beban dapat diakui pada saat sebelum dilakukan pengeluaran kas, beban diakui bersamaan dengan pengeluaran kas, dan beban diakui setelah pengeluaran kas.

Beban-LO dari dana-dana non APBD serta hibah barang yang diterima oleh sekolah sekolah dilingkungan Dinas Pendidikan (tidak termasuk Dana Dekonsentrasi dan dana Tugas Pembantuan) diakui setelah dilaporkan ke PPKD oleh Dinas Pengampu.

3. Pos luar biasa adalah pendapatan atau beban luar biasa yang terjadi karena kejadian atau transaksi yang bukan merupakan operasi biasa, tidak diharapkan rutin atau sering terjadi, dan berada diluar kendali atau pengaruh entitas bersangkutan;
4. Surplus/defisit-LO adalah selisih antara Pendapatan-LO dan beban selama satu periode pelaporan, setelah diperhitungkan surplus/defisit dari kegiatan non operasional dan pos luar biasa.

4.4.5 Laporan Perubahan Ekuitas (LPE)

Laporan Perubahan Ekuitas menyajikan informasi kenaikan atau penurunan ekuitas tahun pelaporan dibandingkan dengan tahun sebelumnya. LPE menyajikan sekurang-kurangnya pos-pos berupa Ekuitas awal, Surplus/Defisit-LO pada periode bersangkutan, koreksi-koreksi yang langsung menambah/mengurangi ekuitas, yang antara lain berasal dari dampak kumulatif yang disebabkan oleh perubahan kebijakan akuntansi dan koreksi kesalahan mendasar, seperti koreksi kesalahan mendasar dari persediaan yang terjadi pada periode-periode sebelumnya dan perubahan nilai aset tetap karena revaluasi aset tetap. Unsur tersebut dijelaskan sebagai berikut:

1. Ekuitas awal adalah kekayaan bersih awal pemerintah Daerah yang merupakan selisih antara aset dan kewajiban pemerintah Daerah;
2. Surplus/defisit-LO adalah selisih antara Pendapatan-LO dan beban selama satu periode pelaporan, setelah diperhitungkan surplus/defisit dari kegiatan non operasional dan pos luar biasa;
3. Ekuitas akhir adalah kekayaan bersih akhir pemerintah daerah yang merupakan selisih antara aset dan kewajiban pemerintah daerah.

4.4.6 Laporan Arus Kas (LAK)

Laporan Arus Kas menyajikan informasi sumber, penggunaan, dan kenaikan atau penurunan kas selama satu periode akuntansi pada tanggal pelaporan serta saldo kas pada tanggal pelaporan. Unsur yang dicakup dalam Laporan Arus Kas terdiri dari penerimaan dan pengeluaran kas, yang masing-masing didefinisikan sebagai berikut:

1. Penerimaan kas adalah semua aliran kas dan setara kas yang masuk ke Bendahara Umum Daerah;
2. Pengeluaran kas adalah semua aliran kas dan setara kas yang keluar dari Bendahara Umum Daerah.

Arus masuk dan keluar kas diklasifikasikan berdasarkan aktivitas operasi, investasi, pendanaan, dan transitoris.

4.5 Basis Pengukuran yang Mendasari Penyusunan Laporan Keuangan

Pengukuran adalah proses penetapan nilai uang untuk mengakui dan memasukkan setiap pos dalam laporan keuangan Pemerintah Daerah. Pengukuran pos-pos dalam laporan keuangan Pemerintah Daerah menggunakan nilai perolehan historis. Aset dicatat sebesar pengeluaran kas dan setara kas atau sebesar nilai wajar dari imbalan yang diberikan untuk memperoleh aset tersebut. Kewajiban dicatat sebesar nilai wajar sumber ekonomi yang digunakan pemerintah untuk memenuhi kewajiban.

Pengukuran pos-pos laporan keuangan menggunakan mata uang rupiah. Jika terdapat transaksi yang menggunakan mata uang asing maka harus dikonversikan terlebih dahulu dan dinyatakan dalam mata uang Rupiah dengan menggunakan nilai tukar/kurs tengah bank sentral yang berlaku pada tanggal transaksi.

Kebijakan lebih terinci tentang perlakuan akuntansi pada Pemerintah Daerah Kabupaten Pesisir Selatan diatur melalui Peraturan Bupati Nomor 55 Tahun 2024 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah Kabupaten Pesisir Selatan.

4.6 Proses Penyusunan Laporan Keuangan

Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Kabupaten Pesisir Selatan merupakan laporan yang mencakup seluruh aspek keuangan yang dikelola oleh seluruh entitas Pemerintah Daerah Kabupaten Pesisir Selatan. LKPD disusun berdasarkan kompilasi data/laporan keuangan Bendahara Umum Daerah, SKPD, dan data serta catatan lainnya dari unit-unit yang terkait selaku entitas akuntansi.

Pejabat yang bertanggungjawab dalam penyusunan laporan keuangan adalah sebagai berikut:

1. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah Kabupaten Pesisir Selatan selaku Pejabat Pengelola Keuangan Daerah dan Bendahara Umum Daerah (BUD) Kabupaten Pesisir Selatan; dan
2. Seluruh Kepala SKPD selaku Pengguna Anggaran dan Pengguna Barang.

Proses penyusunan Laporan Keuangan dilakukan melalui proses konsolidasi/penggabungan dokumen/catatan/pembukuan yang disajikan oleh Pejabat Pengelola Keuangan Daerah dan Laporan Keuangan SKPD disertai dengan beberapa penyesuaian yang dilakukan maupun penelaahan terhadap buku besar, catatan, dokumen sumber maupun dokumen lainnya yang diperlukan. Hal ini dilakukan dengan maksud agar penyajian Laporan Keuangan sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan sebagaimana yang dimaksud dalam Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 dan Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah Kabupaten Pesisir Selatan yang diatur dalam Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 55 Tahun 2024.

Dalam proses konsolidasi ini juga dipertimbangkan beberapa unsur yang dapat mempengaruhi kewajaran penyajian laporan keuangan antara lain, jenis laporan, basis akuntansi, pengakuan, pengukuran, dan pengungkapan pos-pos laporan keuangan, struktur APBD, klasifikasi anggaran, aset, kewajiban, ekuitas, arus kas, serta catatan atas laporan keuangan.

Penyusunan laporan keuangan Pemerintah Daerah ini dilakukan secara terkomputerisasi dengan menggunakan aplikasi SIKD (Sistem Informasi Keuangan Daerah) dari Kementerian Dalam Negeri dan Microsoft Office Excel. Selain itu, dalam Laporan Keuangan ini juga telah dilampirkan Laporan Keuangan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dan Ikhtisar Laporan Dana Desa sebagai bagian dari Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan secara keseluruhan.

BAB V

PENJELASAN POS-POS LAPORAN KEUANGAN

5.1. PENJELASAN POS-POS LAPORAN REALISASI ANGGARAN

	Realisasi TA 2024	Realisasi TA 2023
5.1.1. Pendapatan Daerah	Rp. 1.690.884.513.877,88	Rp1.654.521.685.677,23

Pendapatan adalah semua penerimaan rekening kas umum daerah yang menambah ekuitas dana lancar dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan yang menjadi hak pemerintah dan tidak perlu dibayar kembali oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Pesisir Selatan. Jika dibandingkan dengan realisasi TA 2023, terjadi kenaikan realisasi pendapatan sebesar 2,20% atau Rp36.362.755.007,65. Pada TA 2024, Pendapatan Daerah dianggarkan sebesar Rp1.781.262.184.153,00 dan terealisasi sebesar Rp1.690.884.513.877,88 dengan rincian sebagai berikut.

Uraian	Anggaran 2024	Realisasi 2024	%
Pendapatan Asli Daerah	208.403.292.963,00	161.576.001.454,88	77,53
Pendapatan Transfer	1.562.806.865.776,00	1.518.538.134.126,00	97,17
Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah	10.052.025.414,00	10.770.378.297,00	107,15
Jumlah	1.781.262.184.153,00	1.690.884.513.877,88	94,93

	Realisasi TA 2024	Realisasi TA 2023
1. Pendapatan Asli Daerah	Rp161.576.001.454,88	Rp153.573.933.599,23

Pendapatan Asli Daerah (PAD) terdiri atas Pendapatan Pajak Daerah, Pendapatan Retribusi Daerah, Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan dan Lain-lain PAD yang Sah. Target PAD TA 2024 sebesar 208.403.292.963,00 dengan realisasi sebesar 161.576.001.454,88 atau 77,53. Jika dibandingkan dengan realisasi TA 2023 sebesar Rp153.573.933.599,23 realisasi TA 2024 mengalami peningkatan sebesar 5,21% atau sebesar 8.001.067.855,65. Pendapatan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dilaksanakan berdasarkan Peraturan Daerah sebagaimana dijelaskan dalam Bab II Ekonomi Makro, Kebijakan Keuangan, dan Pencapaian Target Kinerja APBD. Rincian realisasi dan kontribusi masing-masing PAD adalah sebagai berikut.

Perkiraan	Realisasi	Kontribusi (%)
Pajak Daerah	27.736.938.804,00	17,17
Retribusi Daerah	108.172.064.157,26	66,95

Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	11.899.367.428,00	7,36
Lain-lain PAD yang Sah Lainnya	13.767.631.065,62	8,52
Jumlah	161. 576.001.454,88	100,00

Uraian anggaran dan realisasi masing-masing komponen PAD diuraikan sebagai berikut.

	Realisasi TA 2024	Realisasi TA 2023
a. Pendapatan Pajak Daerah	Rp27.736.938.804,00	Rp28.395.740.407,08

Pendapatan Pajak Daerah ditargetkan sebesar Rp 31.807.541.550,00 terealisasi sebesar Rp27.736.938.804,00 atau 87,2%. Dalam hal ini, berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2024 tentang Perubahan APBD Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2024, dilakukan penyesuaian target Pendapatan Pajak Daerah TA 2024. Terjadi kenaikan target sebesar 3,45% dari target Pajak Daerah TA 2023 sebesar Rp28.395.740.407,08, namun dari segi realisasi Pendapatan Pajak Daerah TA 2024 mengalami Penurunan sebesar Rp658.801.603,08 atau 2,32% dibandingkan realisasi TA 2023 sebesar Rp28.395.740.407,08.

Adapun rincian anggaran dan realisasi Pendapatan Pajak Daerah TA 2024 sebagai berikut;

Perkiraan	Anggaran	Realisasi	%
Pajak Hotel	350.000.000,00	595.152.781,00	170,04
Pajak Restoran	2.250.000.000,00	2.272.514.814,00	101,00
Pajak Hiburan	50.000.000,00	38.048.000,00	76,10
Pajak Reklame	550.000.000,00	395.453.950,00	71,90
Pajak Penerangan Jalan	21.180.000.000,00	18.192.726.590,00	85,90
Pajak Air Tanah	18.000.000,00	29.975.383,00	166,53
Pajak Sarang Burung Walet	2.500.000,00	500.000,00	20,00
Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan	1.500.000.000,00	1.140.627.055,00	76,04
Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan (PBB-P2)	2.607.041.550,00	1.900.108.426,00	72,88
Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)	3.300.000.000,00	3.171.831.805,00	96,12
Jumlah	31.807.541.550,00	27.736.938.804,00	87,20

Realisasi Pendapatan Pajak Daerah yang tertinggi pada TA 2024 adalah pada Pajak Hotel sebesar 170,04%, sedangkan realisasi terendah pada Pajak Sarang Burung Walet sebesar 20,00%. Rendahnya realisasi Pajak Burung Walet ini disebabkan turunnya harga pemasaran Sarang Burung Walet di Kabupaten

Pesisir Selatan. Sedangkan untuk pajak yang terealisasi dibawah 80%, yakni Pajak Hiburan (76,10%,), Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan (76,04%) dan Pajak Bumi dan Bangunan sektor Pedesaan dan Perkotaan (72,88%) disebabkan seringnya terjadi bencana alam banjir di beberapa wilayah di Kabupaten Pesisir Selatan sehingga kurang optimalnya pemungutan pada Pajak Hiburan dan Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan, sedangkan penurunan Pajak Reklame (71,90%) terjadi karena Tahun 2024 merupakan pelaksanaan Pemilihan Umum dan Pemilihan Kepala Daerah menyebabkan beberapa pelaku pajak Reklame memilih untuk menyewakan Baliho untuk keperluan kampanye yang mengakibatkan turunnya Pendapatan Asli Daerah dari Reklame.

Untuk realisasi Pajak Bumi dan Bangunan sektor Perkotaan dan Pedesaan sebesar Rp1.900.108.426,00 terdiri dari realisasi pokok PBB-P2 2024 sebesar Rp1.777.484.660,00 realisasi pokok PBB-P2 tahun 2014-2024 sebesar Rp89.699.941,00, dan pembayaran denda administrasi karena keterlambatan pembayaran sebesar Rp32.923.825,00.

	Realisasi TA 2024	Realisasi TA 2023
b. Pendapatan Retribusi Daerah	Rp108.172.064.157,26	Rp3.541.700.379,00

Target Pendapatan Retribusi Daerah sebesar Rp128.115.046.825,00 dan direalisasikan sebesar Rp108.172.064.157,26 atau sebesar 84,43%. Pendapatan Retribusi Daerah terdiri dari Retribusi Jasa Umum, Retribusi Jasa Usaha, dan Retribusi Perizinan Tertentu. Kenaikan Retribusi Jasa Umum yang sangat signifikan berasal dari reklasifikasi penganggaran Lain-Lain PAD yang Sah pada BLUD RSUD dr. M. Zein Painan ke Retribusi Pelayanan Kesehatan. Penganggaran penerimaan Retribusi Pelayanan Kesehatan juga berada di 20 BLUD Puskesmas yang berada di bawah Dinas Kesehatan. Penerapan Pola Pengelolaan Keuangan BLUD pada puskesmas dilaksanakan sesuai dengan Keputusan Bupati Nomor 900/485/Kpts/BPT-PS/2019 tanggal 26 Desember 2019 tentang Penetapan Puskesmas se-Kabupaten Pesisir Selatan sebagai Puskesmas yang Menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan BLUD.

Adapun rincian dari Pendapatan Retribusi Daerah TA 2024 sebagai berikut

Perkiraan	Anggaran	Realisasi	%
A. Retribusi Jasa Umum	124.148.655.325,00	106.556.875.312,00	85,83
Retribusi Pelayanan Kesehatan	123.084.095.325,00	106.464.767.812,00	86,50
Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan	604.560.000,00	92.107.500,00	15,24
Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum	420.000.000,00	0,00	0,00
Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor	0,00	0,00	0,00

Perkiraan	Anggaran	Realisasi	%
Retribusi Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus	40.000.000,00	0,00	0,00
Retribusi Pengawasan dan Pengendalian Menara Telekomunikasi	0,00	0,00	0,00
B. Retribusi Jasa Usaha	3.466.391.500,00	1.136.378.955,26	32,78
Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah	250.000.000,00	429.423.955,26	171,77
Retribusi Pasar Grosir dan/ atau Pertokoan	586.391.500,00	226.907.000,00	38,70
Retribusi Tempat Khusus Parkir	120.000.000,00	46.688.000,00	38,91
Retribusi Rumah Potong Hewan	0,00	0,00	0,00
Retribusi Tempat Rekreasi dan Olah raga	2.500.000.000,00	429.860.000,00	17,19
Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah	10.000.000,00	3.500.000,00	35,00
C. Retribusi Perizinan Tertentu	500.000.000,00	478.809.890,00	71,41
Retribusi Persetujuan Bangunan Gedung	500.000.000,00	478.809.890,00	95,76
Jumlah	128.115.046.825,00	108.172.064.157,26	84,43

Realisasi Retribusi Daerah yang tertinggi pada TA 2024 adalah Retribusi Pelayanan kesehatan Jasa Umum sebesar 86,50%, sedangkan realisasi terendah adalah Retribusi Pelayanan Persampahan dan kebersihan sebesar 15,24%. Rendahnya Retribusi Pelayanan Persampahan ini diakibatkan dari perubahan tarif Retribusi sesuai amanat Undang-Undang Nomor 1 tentang Hubungan Keuangan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah yang dituangkan dalam Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, dimana ditentukan komponen yang menjadi formula penetapan tarif Retribusi Pelayanan Persampahan. Dari hasil penghitungan penetapan tarif retribusi tersebut terjadi kenaikan tarif yang cukup signifikan yang menyebabkan banyaknya masyarakat yang enggan membayar retribusi sampah. Saat ini Pemerintah Daerah melalui Dinas Perumahan Rakyat, Pemukiman, Pertanahan dan Lingkungan Hidup sebagai SKPD penanggungjawab pelaksanaan Retribusi Pelayanan Persampahan melakukan kajian ulang terhadap besaran tarif yang telah ditetapkan

	Realisasi TA 2024	Realisasi TA 2023
c. Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	Rp 11.899.367.428,00	Rp11.016.313.390,00

Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan merupakan realisasi dari bagian laba atau deviden atas penyertaan modal pada Badan Usaha

Milik Daerah yakni PT Bank Nagari sebesar Rp 11.785.995.944,00 yang disetorkan pada Kas Daerah tanggal 4 April 2024, dan PT. Bank Samudera sebesar Rp113.371.484,00 yang disetorkan ke Kas Daerah pada tanggal 21 Oktober 2024.

Bila dibandingkan dengan penerimaan tahun 2023 sebesar Rp11.016.313.390,00 penerimaan ini mengalami peningkatan sebesar Rp883.054.038,00 atau sebesar 8,02%. Penjelasan lebih lanjut mengenai penyertaan modal Pemerintah Daerah dapat dilihat pada Sub Bab 5.3. Penjelasan Pos-Pos Neraca, 5.3.1.2).b). Investasi Permanen.

	Realisasi TA 2024	Realisasi TA 2023
d. Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	Rp13.767.631.065,62	Rp110.620.179.423,15

Lain-lain PAD yang Sah TA 2024 ditargetkan sebesar Rp6.694.708.644,00 dan terealisasi sebesar Rp13.767.631.065,62 atau sebesar 205,65%. Jika dibandingkan dengan realisasi Tahun 2023 sebesar Rp110.620.179.423,15 terjadi penurunan sebesar Rp96.853.220.357,53 atau 87,55%. Rincian Lain-lain PAD yang Sah sebagai berikut.

Perkiraan	Anggaran	Realisasi	%
Hasil Penjualan Aset Tetap Lainnya	110.000.000	243.352.536,36	0,00
Hasil Pemanfaatan BMD yang Tidak Dipisahkan	550.796,00	3.070.532,25	557,47
Penerimaan Jasa Giro	650.000.000,00	1.009.714.288,00	155,34
Pendapatan Bunga	2.500.000.000,00	3.552.893.601,00	142,12
Penerimaan atas tuntutan ganti kerugian keuangan daerah	3.432.844.682,00	7.650.738.891,69	222,87
Pendapatan Denda Atas Keterlambatan Kegiatan	873.166,00	574.412.836,82	65.785,07
Pendapatan Dari Pengembalian	0,00	733.008.379,00	0,00
Pendapatan BLUD	0,00	0,00	0,00
Pendapatan Hasil Pengelolaan Dana Bergulir	440.000,00	440.000,00	0,00
Jumlah	6.694.708.644,00	13.767.631.065,02	205,65

Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan merupakan Hasil Penjualan Aset Tetap Lainnya berupa Peralatan Mesin seperti alat kantor dan kendaraan roda empat yang menjadi aset Kabupaten Pesisir Selatan. Penjualan dilakukan secara langsung oleh tim ke SKPD yang terkait seperti Dinas Pendidikan dengan Surat keputusan Bupati Nomor 000.2.3.2/1006/Kpts/Setda-PS/2024 tanggal 25

November 2024, sedangkan pada Dinas Pekerjaan umum dengan Nomor 953/793/Kpts/Setda-PS/2024 tanggal 7 November 2024 setra untuk Penjualan Kendaraan Roda 4 dengan surat Keputusan Nomor 000.2.3.2/1077/Kpts/Setda-Ps/2024 tanggal 7 Desember 2024

Untuk realisasi Hasil Pemanfaatan BMD yang Tidak Dipisahkan merupakan Hasil Sewa Barang Milik Daerah berupa pabrik es dari CV. Pincuran Boga. Penerimaan Jasa Giro dari penempatan dana Pemerintah Daerah berupa giro, dan tabungan deposito pada PT Bank Nagari Cabang Painan dan Tapan, BRI Cabang Painan, BSM Cabang Painan, dan BSI Cabang Pembantu Painan. Pendapatan Bunga merupakan penerimaan dari penempatan dana Pemerintah Daerah deposito pada PT Bank Nagari Cabang Painan. Selanjutnya Pendapatan Hasil Pengelolaan Dana Bergulir merupakan berasal dari pembayaran pokok Dana K-PER yang berada pada Bank Nagari Cabang Tapan dan Bank Nagari Cabang Painan (Dana K-PER 2002, 2003, dan 2006) serta pada PT. BPR Samudera Painan (Dana K-PER 2007 dan 2008). Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah diuraikan sebagai berikut :

- a. Hasil Penjualan Aset Tetap Lainnya sebesar Rp 243.352.536,36 dengan rincian sebagai berikut :
 - Penjualan Barang Milik Daerah Berupa Barang Inventaris Kantor pada Dinas Arsip An. SYAFRIATI FITRI (Pengurus Barang) Sebesar Rp. 645.000,00
 - Setoran Pembelian Seng Bekas 3 Kodi SMPN 2 Ranpes 2024 Sebesar Rp. 450.000,00.-
 - Seng Bekas 4 Kodi Sebesar Rp. 600.000,00.-
 - Penjualan BMD berupa Peralatan dan Mesin pada Sekretariat Daerah Sebesar Rp. 5.050.000.00,-
 - Penjualan Barang Milik Daerah berupa Peralatan dan Mesin pada Dinas Pertanian Sebesar Rp. 2.550.000.00,-
 - Belanja Barang Milik Daerah Berupa Peralatan dan Mesin pada Dinas Perikanan dan Pangan Sebesar Rp. 4.950.000.00,-
 - Pemindah bukuan hasil Lelang BMD Sebesar Rp. 5.822.937,00.-
 - Penjualan Seng Bekas Sebesar Rp. 900.000.00,-
 - Hasil Penjualan Seng Bekas Sebesar Rp. 1.500.000.00,-
- b. Hasil Pemanfaatan BMD yang tidak dipisahkan:
 - Hasil Sewa BMD CV Pincuran Boga Periode Januari – Agustus Sebesar Rp. 2.1027.98,81
 - BPKPAD/ hasil sewa Barang Milik Daerah / CV Pincuran Boga Periode Oktober sebesar Rp. 416.937,44
- c. Status pemantauan tindak lanjut Rekomendasi Hasil Pemeriksaan BPK atas Tuntutan Ganti Rugi sebesar Rp7.650.738.891,69
- d. Pendapatan Denda atas Keterlambatan Kegiatan yakni :
 - Pembayaran Denda Keterlambatan PT.Multi Sarana Laboratori Sebesar Rp8.316.250,00.-

- CV Flora Gezatirta P/Pembayaran Denda Sisa Persentase Pekerjaan Pembangunan Jl. Rimbo Panjang Punggasan Kec Linggo S Baganti Denda selama 45 hari sebesar Rp919.980,00.-
- Pembayaran Keterlambatan Kerja (Denda 3 Hari) Pekerjaan Rehab Jaringan Irigasi di Kecamatan PC.Soal CV Citra Perkasa Indah / Dinas PUPR sebesar Rp505.200,00.-
- Pembayaran Keterlambatan Kerja Denda 8 Hari pada Sub Kegiatan Reabilitas Jaringan Irigasi Permukaan PDAN CV Cakra Mandiri (Dinas PUPR) Lubuk sebesar Rp62.770,00.-
- PT.SATRIA LESTARI MULTI/ Pembayaran atas Jaminan pelaksanaan Pekerjaan Lanjutan Pembangunan Jembatan Wisata Cerocok Painan Kecamatan IV Jurai Dinas PUTR sebesar Rp227.353.041.00,-
- Pelunasan Denda Buana Mitra Raja Farma 9000030547872000000110010100 sebesar Rp19.813.500.00,-
- CV SUTAN PASISIE/ Pembayaran atas Keterlambatan Kerja (Denda 28 Hari) Pada Sub Kegiatan Jaringan Irigasi Permukaan di ULU KAPAU Lengayang sebesar Rp666.000.-
- Denda PT. METQUEST JAYA GLOBAL sebesar Rp. 8.800.358.00,-
- Penyetoran Denda Keterlambatan A.n. CV MARENATA PRATAMA Pekerjaan Pengaman Tebing Sungai batang Pungasan Muaro Kandis sebesar Rp1.375.617.82,-
- CV KAMSI BERSAUDARA / Pembayaran Keterlambatan Kerja Denda selama 9 hari Keg. Rehap jaringan Irigasi digantung Kecamatan Sutera sebesar Rp85.390.00,-
- Pembayaran Denda Keterlambatan Pekerjaan Pembangunan Ruang Kelas Baru SD 38 Padang XI Punggasan Sebesar Rp17.416.548,00.-
- CV TREMOR/ Pembayaran Denda Keterlambatan Kerja Selama 80 Hari Pada Sub Pekerjaan Peningkatan Jaringan Irigasi di SEI GEMURUH Kec.Pancung Soal sebesar Rp4.132.745.00,-
- Denda Atas Keterlambatan Pekerjaan Pembangunan Puskesmas Lumpo dan Kesehatan Pessel sebesar Rp130.480.00,-
- CV.UAN JAYA / Pembayaran Denda Keterlambatan Pekerjaan Pembangunan Rehap Jembatan Gantung Transad Air Betung Kec. Air Pura sebesar Rp9.559.755.00,-
- Pembayaran Denda Keterlambatan Pekerjaan Pembangunan Objek Wisata Air Terjun Timbulun Painan Kec IV Jurai Dinas Pariwisata An. CV TREMOR sebesar Rp274.402.036.00,-
- Pembayaran Denda Keterlambatan Pekerjaan Pembangunan Gedung PLUT pada Dinas Koperasi UKM sebesar Rp746.130.00,-
- e. Pendapatan Dari Pengembalian :
 - Pembayaran Setoran Keterlanjuran Tunjangan Anak. An. INARYATI SDN 34 Gunung Bungkok Kec.IV Jurai Rp22.745.98.-
 - Pengembalian Tunjangan Suami Dinkes sebesar Rp2.197.850.-
 - Transfer From Vivit Handayani Tunjangan Keluarga Sebesar Rp4.984.660.-

- Dinas Pendidikan /Pembayaran Kelebihan Belanja ATK Sub Kegiatan Penyediaan BY Personil Peserta Didik SMP an.Nelfianti Sebesar Rp3.551.100.-
- Dinas Pendidikan / Pengembalian Kelebihan Makan Minum Sertifikasi an. Jimmy Niko Satria SPD MPD Sebesar Rp427.500.-
- Pengembalian Kelebihan Gaji Agustus 2024 an. Ermalinda Solmodas Tunjangan Anak sebesar Rp136.492.-
- Tunjangan suami agustus Mimi Whulandari PPPK 2024 Diknas Sebesar Rp392.780.-
- Setor Tunjangan Anak Agustus an. Triyani Melina Roza sebesar Rp136.500.-
- Pengembalian Tunjangan Istri an Dodon Putra Guru P3K 2024 sebesar Rp392.780.-
- Pengembalian Tunjangan Suami an. Asma Indrayani Guru P3K 2024 sebesar Rp392.780.-
- Pengembalian Tunjangan Anak an. Yenni Triana PPPK 2024 Dinkes sebesar Rp259.192.-
- Kelebihan Gaji bulan Agustus an. Neliyanti sebesar Rp392.780.-
- Pengembalian Tunjangan Keluarga an. Neng Angraini PPPK 2024 RSUD M Zein Painan sebesar Rp617.492.-
- Pengembalian Keterlanjuran Pembayaran Pangkat Pengabdian Bulan Oktober 2024 an. Rahmayeti Sasra sebesar Rp242.600.-
- Tunjangan Suami an. Neda Wahyumi P3K Puskesmas IV Koto Mudik sebesar Rp1.433.200.-
- Taspen/ Induk Januari 24 susulan Desember 22 Non Dapem Desember 2023 Sebesar Rp500.000.-
- Kelebihan Pembayaran untuk Pembelian Sampel Laboratorium Sub Keg Pengawasan Peredaran Hewan dan Produk Hewan sebesar Rp112.707.-
- Pengembalian Keterlanjuran Pembayaran Gaji Juli- Oktober 2023 Guru SD 05 Koto Gunung Tuik Batang Kapas an. Yefrina Dafti sebesar Rp12.252.400.-
- Tarif From Vivit Handayani Tunjangan Keluarga Vivi sebesar Rp12.108.350.-
- Pengembalian Uang Tunjangan anak 1 orang bulan Agustus an. Yesti Susanti Guru P3K SDN 21 Koto Kandis Lengayang Sebesar Rp136.492.-
- Setor Tunjangan suami an. Silvina A Guru PPPK 2023 sebesar Rp392.780.-
- UTANG IURAN JKK JKM JAN S/D APRIL 2024 sebesar Rp213.879.-
- Setoran uang jasa pelayanan BPJS kesehatan Tahun 2023 dari rek Puskesmas Kayu Gadang ke Kas Daerah Sebesar Rp100.000.000.-
- Setoran jasa pelayanan BPJS Kesehatan Tahun 2023 dari Rek Puskesmas Kayu Gadang ke Kas Daerah sebesar Rp48.850.848.-
- Setoran jasa Pelayanan BPJS Kesehatan Tahun 2024 dari Rek Puskesmas Kayu Gadang Ke Kas Daerah Sebesar Rp417.553.692.-

- TRF DARI Lainnya UTANG IURAN JKK JKM SEPT DES 2023 04000101001444 Rp71.217.-
- Pengembalian dana BOP Kesetaraan Paket C Tahap I Rp104.400.000.-
- Pengembalian Dana BOP an. KB Asmaul husna Sebesar Rp4.800.000.-
- Pengembalian Ke Kasda an Paud Intan Jaelani sebesar Rp4.542.-
- TK Bunga Harapan/ Pengembalian Dana BOP PAUD Tahap 2 Tahun 2024 Sebesar Rp12.300.000.- dan Pengembalian Dana BOP PAUD Tahap 1 Sebesar Rp100.000
- Pengembalian Saldo MPN G3 Triwulan IV th 2023 an Puskesmas Salido sebesar Rp10.000.-
- Pengembalian Biaya Penginapan Perjalanan Dinas TA 2022 sebesar Rp1.000.000.-
- Pengembalian Kasda Sekolah ALAM SMP IT RABBANI sebesar Rp121.068.-
- f. Pendapatan Hasil Pengelolaan Dana Bergulir:
 - Pengembalian Pokok KPER Tahun 2006 PER 2023 sebesar Rp440.000.-

	Realisasi TA 2024	Realisasi TA 2023
2. Pendapatan Transfer	Rp1.518.538.134.126,00	Rp1.493.284.233.498,00

Merupakan realisasi Pendapatan Transfer dari Pemerintah Pusat dan Pendapatan Transfer Antar Daerah. Pendapatan Transfer TA 2024 dianggarkan sebesar Rp1.562.806.865.776,00 dan terealisasi sebesar Rp1.518.538.134.126,00 atau 97,17%. Jika dibandingkan dengan realisasi TA 2023 penerimaan Pendapatan Transfer naik 1,69% atau sebesar Rp25.253.900.628,00. Rincian realisasi penerimaan Pendapatan Transfer sebagai berikut.

	Realisasi TA 2024	Realisasi TA 2023
1) Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	Rp1.427.643.629.192,00	Rp1.419.728.079.140,00

Transfer Pemerintah Pusat TA 2024 dianggarkan sebesar Rp1.458.490.109.000,00 dengan realisasi 97,89% atau sebesar Rp1.427.643.629.192,00. Realisasi TA 2024 naik 0,56% atau sebesar Rp7.915.550.052,00 dibandingkan realisasi TA 2023 yang sebesar Rp1.419.728.079.140,00.

Penganggaran Pendapatan Transfer dari Pemerintah Pusat pada APBD awal berdasarkan surat dari Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan Kementerian Keuangan Republik Indonesia Nomor: S-128/PK/2023 Tanggal 21 September 2023 Hal Penyampaian Rincian Alokasi Transfer ke Daerah Tahun Anggaran 2024, sedangkan untuk Perubahan APBD 2024 Anggaran Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat mempertimbangkan Keputusan Kementerian Keuangan Republik Indonesia Nomor 423 Tahun 2024 Tentang Perubahan Rincian Dana Alokasi Khusus Non Fisik Dana Tunjangan Guru Aparatur Sipil Negara Daerah dan Dana Pelayanan Kepariwisata Tahun Anggaran 2024.

1. Dana Perimbangan

Realisasi TA 2024
Rp1.259.993.703.192,00

Realisasi TA 2023
Rp1.243.062.407.140,00

Dana Perimbangan TA 2024 dianggarkan sebesar Rp1.290.840.183.000,00 dengan realisasi sebesar 97,61% atau sebesar Rp1.259.993.703.192,00. Terjadi peningkatan realisasi pada TA 2024 sebesar Rp16.931.296.052,00 atau 1,36% dibandingkan realisasi TA 2023 yang sebesar Rp1.243.062.407.140,00. Rincian realisasi Dana Perimbangan TA 2024 sebagai berikut.

	Realisasi TA 2024	Realisasi TA 2023
a) Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil (DBH)	Rp30.510.938.710,00	Rp32.052.333.806,00

Realisasi Dana Tansfer Umum-Dana Bagi Hasil (DBH) TA 2024 turun sebesar 4,81% atau sebesar Rp1.541.395.096,00 jika dibandingkan dengan realisasi TA 2023. Persentase realisasi Pendapatan Dana Bagi Hasil Pajak TA 2024 yang terbesar adalah Dana Bagi Hasil sumber daya alam sebesar 258,19%, sedangkan yang terendah adalah Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (CHT) yakni 97,78%. Rincian anggaran dan realisasi masing-masing penerimaan Dana Tansfer Umum-Dana Bagi Hasil sebagai berikut.

Rincian	Anggaran	Realisasi	%
DBH Pajak Bumi dan Bangunan	6.766.525.000,00	8.159.447.000,00	120,59
DBH PPh Pasal 21	5.490.658.000,00	6.672.589.000,00	121,53
DBH PPh Pasal 25 dan Pasal 29/WPSKPDN	0,00	0,00	0,00
DBH Cukai Hasil Tembakau (CHT)	35.943.000,00	35.144.710,00	97,78
DBH Sumber Daya Alam (SDA) Pengusahaan Panas Bumi	825.045.000,00	1.339.539.000,00	162,36
DBH Sumber Daya Alam (SDA) Mineral dan Batubara-Landrent	727.830.000,00	1.879.187.000,00	258,19
Dana Bagi Hasil (DBH) Sumber Daya Alam (SDA) Mineral dan Batubara-Royalty	0,00	0,00	0,00
DBH Sumber Daya Alam (SDA) Kehutanan- Provisi Sumber Daya Hutan	74.069.000,00	74.069.000,00	100,00
DBH Sumber Daya Alam (SDA) Kehutanan-Iuran Izin Usaha Pemanfaatan Hutan (IIUPH)	0,00	0,00	0,00
DBH Sumber Daya Alam (SDA) Perikanan	3.101.006.000,00	3.101.006.000,00	100,00
DBH Sawit	9.249.957.000,00	9.249.957.000,00	100,00
Jumlah	26.271.033.000,00	30.510.938.710,00	116,14

Realisasi Dana Bagi Hasil termasuk pencairan Dana Bagi Hasil dalam bentuk Non Tunai atau *Treasury Deposit Facility* Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan di Bank Indonesia dalam bentuk *overnight* pada Rekening Lain BI TDF-TKD Pemerintah Daerah, sebesar Rp4.240.704.000,00 pada Nomor Rekening 519000220980.

			Realisasi TA 2024	Realisasi TA 2023
b) Dana Transfer Umum-			Rp905.022.519.052,00	Rp827.284.251.074,00
Dana Alokasi Umum				
(DAU)				

Pendapatan Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum (DAU) ditujukan untuk pelaksanaan kewenangan yang dilimpahkan kepada pemerintah daerah untuk pelaksanaan otonomi daerah. Pada TA 2024 ditetapkan anggaran DAU sebesar Rp912.330.440.000,00 dan terealisasi sebesar 99,20% atau 905.022.519.052,00. Jumlah realisasi DAU TA 2024 mengalami peningkatan sebesar Rp77.738.267.978,00 atau 9,39% dari jumlah realisasi TA 2023.

Semenjak Tahun 2023 DAU dibagi penyalurannya menjadi *DAU yang tidak ditentukan penggunaannya* dan *DAU yang ditentukan penggunaannya*, sesuai dengan Pasal 130 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah. Bagian DAU Yang Ditentukan Penggunaannya dimaksudkan untuk mendukung pembangunan sarana dan prasarana. Untuk Kabupaten Pesisir Selatan DAU yang ditentukan penggunaannya dibagi menjadi 4 (empat) bidang, yakni Formasi PPPK, DAU yang ditentukan penggunaannya Bidang Pendidikan, DAU yang ditentukan penggunaannya Bidang Kesehatan, dan DAU yang ditentukan penggunaannya Bidang Pekerjaan Umum. Rincian anggaran dan realisasi masing-masing DAU sebagai berikut.

Rincian	Anggaran	Realisasi	%
DAU yang tidak ditentukan penggunaannya	647.548.627.000,00	697.360.263.378,00	107,69
DAU yang ditentukan penggunaannya – Formasi PPPK	71.335.305.000,00	40.944.429.169,00	57,40
DAU yang ditentukan penggunaannya – Bidang Pendidikan	101.903.411.000,00	85.923.117.054,00	84,32
DAU yang ditentukan penggunaannya – Bidang Kesehatan	28.706.509.000,00	27.192.581.447,00	94,73
DAU yang ditentukan penggunaannya – Bidang Pekerjaan Umum	62.836.588.000,00	53.602.128.004,00	85,30
Jumlah	912.330.440.000,00	905.022.519.052,00	99,20

	Realisasi TA 2024	Realisasi TA 2023
c) Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik	Rp 77.657.368.138,00	Rp131.881.908.033,00

Dana Transfer Khusus-Dana Alakosi Khusus (DAK) Fisik bertujuan untuk mendanai kegiatan pembangunan dan pengadaan fisik sarana dan prasarana dasar di daerah yang menjadi prioritas nasional. Tahun 2024 Kabupaten Pesisir Selatan mendapatkan DAK Fisik dalam 13 Bidang. Realisasi DAK Fisik TA 2024 mengalami penurunan sebesar 41,12% atau sebesar Rp54.224.539.895,00 dibandingkan dengan realisasi TA 2023. Rincian anggaran dan realisasi DAK Fisik TA 2024 tersaji sebagai berikut.

Rincian	Anggaran	Realisasi	%
Bidang Pendidikan-Reguler-PAUD	1.376.104.000,00	1.369.428.200,00	99,51
Bidang Pendidikan-Reguler-SD	2.777.579.000,00	2.609.949.250,00	93,96
Bidang Pendidikan-Reguler-SMP	2.416.353.000,00	2.264.631.800,00	93,72
Bidang Kesehatan dan KB Penugasan-penurunan Stunting (KB)	2.984.456.000,00	2.693.925.000,00	90,27
Bidang Industri Kecil dan Menengah-Penugasan-Pemb. Sentra IKM dan Revitalisasi Sentra IKM	9.533.261.000,00	9.297.620.269,00	97,53
Bidang Pariwisata-Penugasan	11.485.144.000,00	12.245.555.198,00	106,62
Bidang Jalan-Reguler-Jalan	13.291.164.000,00	12.333.463.779,00	92,79
Bidang Lingkungan Hidup dan Kehutanan-Penugasan-Lingkungan Hidup	1.994.251.000,00	1.888.042.000,00	94,67
Bidang Kesehatan dan KB-Reguler-Penguatan Sistem Kesehatan	34.251.170.000,00	32.954.752.642,00	96,21
Bidang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah-Penugasan	0,00	0,00	0,00
Jumlah	80.109.482.000,00	77.657.368.138,00	96,94

	Realisasi TA 2024	Realisasi TA 2023
d) Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik	Rp 246.802.877.292,00	Rp251.843.914.227,00

Dana Transfer Khusus-Dana Alakosi Khusus (DAK) Non Fisik bertujuan untuk mendanai kegiatan khusus non fisik di daerah yang menjadi prioritas nasional. Realisasi DAK Non Fisik TA 2024 turun sebesar Rp5.041.036.935,00 atau

sebesar 2,00% dibandingkan dengan realisasi TA 2023. Berikut rincian anggaran dan realisasi DAK Non Fisik TA 2024.

Rincian	Anggaran	Realisasi	%
BOS Reguler	67.348.000.000,00	63.891.050.537,00	90,69
BOS Kinerja	2.912.500.000,00	2.855.000.000,00	98,03
TPG PNSD	143.607.771.000,00	133.439.377.900,00	92,92
Tamsil Guru PNSD	4.109.887.000,00	4.109.887.000,00	100,00
TKG PNSD	1.313.032.000,00	1.520.801.000,00	115,82
BOP PAUD	7.099.800.000,00	7.041.111.000,00	99,17
BOP Pendidikan Kesetaraan	7.198.700.000,00	7.047.020.000,00	97,89
BOKKB-BOK	0,00	0,00	0,00
BOKKB-Pengawasan Obat dan Makanan	372.331.000,00	0,00	0,00
BOKKB-BOKB	26.122.310.000,00	15.839.187.294,00	60,63
PK2UKM	619.615.000,00	607.138.000,00	97,99
Dana Pelayanan Kepariwisataa	1.123.000.000,00	1.059.931.650,00	94,38
Fasilitasi Penanaman Modal	830.945.000,00	646.304.950,00	77,78
BOKB-KB	6.779.196.000,00	6.114.922.427,00	90,20
Dana Pelayanan Perlindungan Perempuan dan Anak	406.000.000,00	406.000.000,00	100,00
Dana Penguatan Kapasitas Kelembagaan Sentra IKM	2.286.141.000,00	2.225.145.534,00	97,33
Jumlah	272.129.228.000,00	246.802.877.292,00	90,69

	Realisasi TA 2024	Realisasi TA 2023
2. Dana Insentif Daerah (DID)	Rp0.00	Rp12.766.111.000,00

DID merupakan pemberian insentif fiskal atas pencapaian kinerja berdasarkan kriteria tertentu, berupa perbaikan dan/atau pencapaian kinerja pemerintah daerah antara lain pengelolaan keuangan daerah, pelayanan umum pemerintah, dan pelayanan dasar. Pada TA 2024 Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan Tidak menganggarkan Dana DID .

	Realisasi TA 2024	Realisasi TA 2023
3. Dana Desa	Rp167.649.926.000,00	Rp163.899.561.000,00

Pendapatan Transfer Dana Desa merupakan transfer dana dari pemerintah pusat dalam rangka mendanai urusan yang telah diserahkan kepada Pemerintah Daerah dan Desa. Realisasi Dana Desa Tahun 2024 mengalami kenaikan sebesar 2,29%

atau sebesar Rp3.750.365.000,00 dari realisasi tahun 2023. Dana Desa pada TA 2024 terealisasi sebesar 100,00% dari anggaran sebesar Rp 167.649.926.000,00

	Realisasi TA 2024	Realisasi TA 2023
2) Pendapatan Transfer	Rp 90.894.504.934,00	Rp73.556.154.358,00
Antar Daerah		

Pendapatan Transfer Antar Daerah merupakan Pendapatan Bagi Hasil Pajak dan Bantuan Keuangan yang berasal dari Pemerintah Provinsi Sumatera barat untuk TA 2024. Realisasi pendapatan ini pada tahun 2024 naik sebesar Rp17.338.350.576,00 atau 23,57% dibandingkan dengan realisasi tahun 2023. Rincian realisasi Pendapatan Transfer Antar Daerah TA 2024 sebagai berikut.

	Realisasi TA 2024	Realisasi TA 2023
a) Pendapatan Bagi Hasil Pajak	Rp90,894,504,934,00	Rp73.356.154.358,00

Pada TA 2024 penganggaran Pendapatan Bagi Hasil Pajak sudah termasuk anggaran Kekurangan Salur Dana Bagi Hasil Pajak Provinsi Sumatera Barat Bagian Kabupaten/Kota Se Sumatera Barat Tahun Anggaran 2024. Realisasi pada TA 2024 naik sebesar Rp17.538.350.576,00 atau 23,91% dibandingkan dengan realisasi tahun 2024. Persentase realisasi Pendapatan Bagi Hasil Pajak tertinggi adalah pendapatan Bagi Hasil Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor sebesar 110,32% sedangkan yang terendah adalah Pendapatan Bagi Hasil Hasil Pajak Air Permukaan sebesar 66,72%. Pendapatan Bagi Hasil Pajak pada TA 2024 dapat dirinci sebagai berikut.

Perkiraan Pendapatan	Anggaran	Realisasi	%
DBH Pajak Kendaraan Bermotor	20.356.511.745,00	20.874.197.761,00	102,54
DBH Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor	9.845.875.274,00	10.862.157.652,00	110,32
DBH Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor	49.892.586.333,00	36.460.264.049,00	73,08
DBH Pajak Air Permukaan	528.184.195,00	352.381.857,00	66,72
DBH Pajak Rokok	23.693.599.229,00	22.345.503.615,00	94,31
Jumlah	104.316.756.776,00	90.894.504.934,00	87,14

Rendahnya realisasi Pendapatan Bagi Hasil Pajak dikarenakan adanya perubahan Perkiraan Dana Bagi Hasil Provinsi Sumatera Barat berdasarkan Keputusan Kepala Badan Pendapatan Daerah propinsi Sumatera barat No; 971.1/ 008/PPD-Bapenda/2025 tentang Penetapan Alokasi Defenitif dan kekurangan salur dana bagi hasil Provinsi Sumatera Barat Bagian Kabupaten/Kota se Sumatera Barat Tahun Anggaran 2024, semula Kabupaten Pesisir Selatan diperkirakan mendapatkan Bagi Hasil Pajak sebesar Rp1.137.456.024.500,00 menjadi Rp356.352.777,047,00 atau turun sebesar Rp781.103.247.453,00 atau 68,67%

	Realisasi TA 2024	Realisasi TA 2023
b) Bantuan Keuangan	Rp0,00	Rp200.000.000,00

Bantuan Keuangan terdiri atas Bantuan Keuangan dari Pemerintah Daerah Provinsi TA 2024 dan 2023. Pada tahun 2024 Bantuan Keuangan tidak dianggarkan .

	Realisasi TA 2024	Realisasi TA 2023
3. Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah	Rp 10.770.378.297,00	Rp7.663.518.580,00

Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah TA 2024 dianggarkan sebesar Rp10.052.025.414,00 dengan realisasi sebesar Rp10.770.378.297,00 atau 107,15%. Realisasi TA 2024 naik 40,54% atau sebesar Rp3.106.859.717,00 dibandingkan realisasi penerimaan TA 2023. Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah TA.2024 dapat dirinci sebagai berikut:

	Perkiraan	Anggaran	Realisasi	%
A	Pendapatan Hibah Dari Pemerintah Pusat	9.260.695.297,00	9.260.695.297,00	100,00
	Tagihan Hibah Air Minum Berbasis Kinerja Bantuan Pemerintah Australia (Hibah Luar Negeri) Rekomendasi Ke- 1	9.260.695.297,00	9.260.695.297,00	100,00
B	Pendapatan Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional	791.330.117,00	1.509.683.000,00	190,78
	Transfer Dari BPJS Kesehatan-Aset DJS KC Padang RITL BPL Nov 2023 (RSUD Tapan)		109.431.400,00	
	TRF Dari BPJS Kesehatan ASET DJS KC Padang RJTL BPL Okt Nov 2023 (RSUD Tapan)		31.432.300,00	
	TRF Dari BPJS Kesehatan - Aset DJS KC Padang RJTL Bpl Des 2023 (RSUD Tapan)		18.155.500,00	
	TRF Dari BPJS Kesehatan Aset DJS KC Padang RJTL RITL Bpl Des 2023 (RSUD Tapan)		105.733.800,00	
	TRF Dari BPJS Kesehatan Aset DJS KC Padang RJTL RITL (RSUD Tapan)		127.605.200,00	
	Trf Dari Bpjs Kesehatan Aset Djs Kc Padang Rjtl Bpl (RSUD Tapan)		20.747.500,00	
	Trf Dari Bpjs Kesehatan Aset Djs Kc Padang Rjtl Ritl Feb 2024 (RSUD Tapan)		102.470.800,00	
	Trf Dari Bpjs Kesehatan Aset Djs Kc Padang Rjtl Ritl Feb (RSUD Tapan)		20.017.900,00	
	Trf Dari Bpjs Kesehatan - Aset Djs Kc Padang Rjtl Ritl Bpl Mar 2024 & Ritl Bpl (RSUD Tapan)		92.896.500,00	
	Trf Dari Bpjs Kesehatan Aset Djs Kc Padang Rjtl Ritl Bpl Mar 2024 ((RSUD Tapan))		18.241.900,00	
	Trf Dari Bpjs Kesehatan Aset Djs Kc Padang Rjtl Ritl Bpl Apr 2024 ((RSUD Tapan))		26.684.300,00	
	Trf Dari Bpjs Kesehatan-Aset Djs Kc Padang Rjtl Ritl Bpl Apr 2024 & Ritl Bpl (RSUD Tapan)		117.841.800,00	
	Trf Dari Bpjs Kesehatan-Aset Djs Kc Padang Rjtl Ritl Bpl Mei-Juni 2024 (RSUD Tapan)		40.115.500,00	
	Trf Dari Bpjs Kesehatan - Aset Djs Kc Padang Rjtl Ritl Bpl Mei 2024 (RSUD Tapan)		160.760.500,00	
	Trf Dari Bpjs Kesehatan-Aset Djs Kc Padang Rjtl Ritl Bpl Jul 2024 (RSUD Tapan)		21.325.900,00	
	Trf Dari Bpjs Keseshatan-Aset Djs Kc Padang Rjtl Ritl		79.079.100,00	

Bpl Apr & Jun 2024 (RSUD Tapan)				
Trf Dari Bpjs Kesehatan Aset Dus Kc Padang Rjtl Ritl Bpl Jul 2024 (RSUD Tapan)			59.267.700,00	
Trf Dari Bpjs Kesehatan - Aset Djs Kc Padang Rjtl Ritl Bpl Sept 2024 (RSUD Tapan)			31.161.100,00	
Trf Dari Bpjs Kesehatan -Aset Dus Kc Padang Rjtl Ritl Bpl Agust 2024 (RSUD Tapan)			122.688.300,00	
Trf Dari Bpjs Kesehatan - Aset Djs Kc Padang Rjtl Ritl Bpl Sept 2024 (RSUD Tapan)			180.700.900,00	
Trf Dari Bpjs Kesehatan - Aset Djs Kc Padang Rjtl Ritl Bpl Okt 2024 (RSUD Tapan)			23.325.100,00	
JUMLAH A + B	10.052.025.414,00	10.770.378.297,00	107,15	

	Realisasi TA 2024	Realisasi TA 2023
5.1.2. Belanja Daerah	Rp1.741.084.667.241,16	Rp1.627.586.655.437,44

Pada TA 2024 Belanja Daerah dianggarkan sebesar Rp1.903.284.139.168,00 dan direalisasikan sebesar Rp1.741.084.667.241,16 atau 91,48%. Nilai realisasi tersebut naik sebesar Rp113.498.011.803,72 atau 6,97% dari realisasi TA 2023 sebesar Rp1.741.083.093.241,16, Rincian realisasi Belanja Daerah TA 2024 dan 2023 dapat diuraikan sebagai berikut.

	Realisasi TA 2024	Realisasi TA 2023
1. Belanja Operasi	Rp1.304.348.788.865,16	Rp1.134.171.370.387,35

Belanja Operasi untuk TA 2024 dianggarkan sebesar Rp1.445.720.868.068,80 dengan realisasi sebesar Rp1.304.348.788.865,16 atau 90,22 %. Jika dibandingkan dengan realisasi TA 2023 sebesar Rp1.134.171.370.387,35 realisasi Belanja Operasi TA 2024 meningkat sebesar Rp170.175.844.477,81 atau 15,00 %. Uraian dan rincian Belanja Operasi adalah sebagai berikut.

	Realisasi TA 2024	Realisasi TA 2023
a. Belanja Pegawai	Rp822.241.704.070,00	Rp684.928.343.746,35

Belanja Pegawai TA 2024 dianggarkan sebesar Rp922.792.472.735,00 dan terealisasi 89,10% atau sebesar Rp822.241.704.070,00. Nilai tersebut naik sebesar Rp137.313.360.323,65 atau 20,05% jika dibandingkan dengan realisasi TA 2023 sebesar Rp684.928.343.746,35

Jumlah tersebut merupakan realisasi untuk pembayaran Belanja Gaji dan Tunjangan ASN, Belanja Tambahan Penghasilan ASN, Belanja Tambahan Penghasilan Berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN, Belanja Gaji dan Tunjangan DPRD, Belanja Gaji dan Tunjangan KDH/WKDH, Belanja Penerimaan Lainnya Pimpinan DPRD serta KDH/WKDH, dan Belanja Pegawai BLUD. Pada tahun 2024, Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan menerapkan Tambahan Penghasilan Pegawai yang ditetapkan dengan Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 2 Tahun 2024 tanggal 29 Februari 2024.

Kenaikan realisasi Belanja Pegawai TA 2024 ini disebabkan karena pembayaran gaji pegawai PPPK Formasi 2023 sudah dapat direalisasikan sejak Bulan September 2024, sedangkan untuk penganggaran gaji pegawai PPPK terhitung sejak Bulan April 2024. Keterlambatan pencairan gaji tersebut terkendala pada pemberkasan atau kelengkapan dokumen sehingga pencairan gaji baru direalisasikan pada bulan September 2024. Adapun anggaran dan realisasi Belanja Pegawai TA 2024 dengan rincian sebagai berikut.

Perkiraan	Anggaran	Realisasi	%
Belanja Gaji dan Tunjangan ASN	638.485.048.780,00	555.216.687.450,00	86,96
Belanja Tambahan Penghasilan ASN	73.800.571.107,00	66.946.122.489,00	85,80
Tambahan Penghasilan Berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya	171.604.260.731,00	162.785.626.111,00	94,86
Belanja Gaji dan Tunjangan DPRD	18.249.340.000,00	18.112.420.461,00	99,25
Belanja Gaji dan Tunjangan KDH/WKDH	564.954.860,00	348.082.068,00	61,61
Belanja Penerimaan Lainnya Pimpinan DPRD serta KDH/WKDH	820.001.050,00	773.265.000,00	94,30
Belanja Pegawai BLUD	18.886.142.207,00	18.059.500.491,00	95,62
Jumlah	922.792.472.735,00	822.241.704.070,00	89,14

	Realisasi TA 2024	Realisasi TA 2023
b. Belanja Barang dan Jasa	Rp 395.247.028.648,16	Rp398.023.333.018,00

Belanja Barang dan Jasa TA 2024 dan 2023 merupakan pengeluaran anggaran untuk pengadaan barang dan jasa dalam melaksanakan program dan kegiatan Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan. Realisasi Belanja Barang dan Jasa TA 2024 dan 2023 masing-masing sebesar Rp395.247.028.648,16 dan Rp398.023.333.018,00 mencapai 93,48% dan 90,91% dari jumlah yang dianggarkan yaitu sebesar Rp434.776.541.551,80 dan Rp398.712.577.708,00. Realisasi TA 2024 mengalami penurunan sebesar 0,70% atau sebesar Rp2.776.304.369,84 dibandingkan nilai realisasi tahun sebelumnya. Berikut Rincian anggaran dan realisasi Belanja Barang dan Jasa TA 2024.

Perkiraan	Anggaran	Realisasi	%
Belanja Barang	48.998.217.493,80	43.290.128.317,00	88,35
Belanja Jasa	120.572.689.075,00	108.491.959.154,00	89,98
Belanja Pemeliharaan	24.066.797.954,00	21.406.429.242,00	88,95
Belanja Perjalanan Dinas	76.339.653.003,00	69.702.986.303,00	91,31
Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak	15.988.475.368,00	7.819.386.826,00	48,91

Perkiraan	Anggaran	Realisasi	%
Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat			
Belanja Barang dan Jasa BOS	55.508.539.856,00	54.451.967.647,00	98,10
Belanja Barang dan Jasa BLUD	93.302.168.802,00	90.084.171.159,16	96,55
Jumlah	434.776.541.551,80	395.247.028.648,16	90,91

	Realisasi TA 2024	Realisasi TA 2023
c. Belanja Hibah	Rp86.701.606.147,00	Rp50.962.353.213,00

Realisasi Belanja Hibah Tahun 2024 sebesar Rp86.701.606.147,00 atau 98,54% dari anggaran sebesar Rp87.989.353.782,00. Jika dibandingkan dengan realisasi TA 2023, realisasi TA 2024 naik sebesar 70,13% atau sebesar Rp35.739.252.934,00 Rincian anggaran dan realisasi Belanja Hibah TA 2024 adalah sebagai berikut.

	Perkiraan	Anggaran	Realisasi	%
1	Hibah kepada Pemerintah Pusat	49.706.263.085,00	49.706.263.085,00	100,00
	<i>Belanja Hibah Uang kepada Pemerintah Pusat</i>	49.706.263.085,00	49.706.263.085,00	100,00
	<i>Belanja Hibah Barang kepada Pemerintah Pusat</i>	0,00	0,00	0,00
2	Hibah Kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia	23.463.510.036,00	22.415.655.401,00	95,53
	<i>Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan</i>	5.567.024.000,00	5.301.684.000,00	95,23
	<i>Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Telah Memiliki Surat Keterangan Terdaftar</i>	1.216.500.000,00	1.207.500.000,00	99,26
	<i>Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela Bersifat Sosial Kemasyarakatan</i>	16.369.986.036,00	15.666.471.401,00	95,70
	<i>Belanja Hibah kepada Koperasi</i>	170.000.000,00	100.000.000,00	58,82
	<i>Belanja Hibah kepada Usaha Mikro dan Usaha Kecil</i>	140.000.000,00	140.000.000,00	100,00
3	Hibah Dana BOSP	13.761.500.000,00	13.521.607.000,00	98,25
	<i>Belanja Hibah BOS PAUD</i>	6.562.800.000,00	6.474.587.000,00	98,65
	<i>Belanja Hibah Kesehatan</i>	7.198.700.000,00	7.047.020.000,00	97,89

	Perkiraan	Anggaran	Realisasi	%
4	Hibah Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik	1.058.080.661,00	1.058.080.661,00	100,00
	Jumlah	87.989.353.782,00	86.701.606.147,00	98,59

Belanja Hibah Uang Kepada Pemerintah Pusat merupakan belanja hibah uang kepada KPU dan BAWASLU Kabupten Pesisir Selatan dengan Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) Nomor 200/530/900.1.5/531/BKPOL-PS/2023 dan Nomor 077/KU.01.01/K.SB-08/10/2023 dan Keputusan Bupati Pesisir Selatan Nomor 130/535/Kpts/BPT-PS/2023 Tentang Pemberian Hibah Uang Kepada Komisi Pemilihan Umum Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2023 Tanggal 6 November 2023 untuk hibah kepada KPU, serta NPHD Nomor 200/530/900.1.5/530/BKPOL-PS/2023 dan Nomor 077/KU.0101/K.SB-08/10/2023 dan Keputusan Bupati Pesisir Selatan Nomor 130/538/Kpts/BPT-PS/2023 Tentang Pemberian Hibah Uang Kepada Badan Pengawas Pemilu Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2023 Tanggal 6 November 2023 untuk hibah kepada Badan Pengawas Pemilu.

Sedangkan Hibah Uang kepada Kodim Kabupaten Pesisir Selatan, dengan Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) Nomor : 200/203/BKPol-PS/VIII/2024 dan Nomor : B/755/ VIII/2024 Tentang Pelaksanaan Dana Hibah Pengamanan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pesisir Selatan Tahun 2024. Serta NPHD Nomor : 200/03/BKPol-PS/VI/2024 dan Nomor : B/18 /KOREM 032/VI /2024 tentang Pelaksanaan Dana Hibah Pengamanan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pesisir Selatan Tahun 2024.

Untuk Belanja Hibah Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik tahun 2024 dapat dirinci sebagai berikut:

Perkiraan	Anggaran	Realisasi	%
Partai Gerindra	113.805.240,00	113.805.240,00	100,00
Partai Persatuan Pembangunan	83.873.414,00	83.873.414,00	100,00
Partai Golongan Karya (Golkar)	111.535.592,00	111.535.592,00	100,00
Partai Kebangkitan Bangsa	94.856.545,00	94.856.545,00	100,00
Partai Hanura	41.131.568,00	41.131.568,00	100,00
Partai Keadilan Sejahtera (PKS)	100.184.630,00	100.184.630,00	100,00
Partai Amanat Nasional (PAN)	115.577.635,00	115.577.635,00	100,00
Partai PERINDO	44.120.527,00	44.120.527,00	100,00
Partai Demokrat	105.994.982,00	105.994.982,00	100,00
Partai Berkarya	31.973.963,00	31.973.963,00	100,00
Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P)	67.363.296,00	67.363.296,00	100,00
Partai NASDEM	107.588.912,00	107.588.912,00	100,00
Partai Bulan Bintang	40.074.357,00	40.074.357,00	100,00

Perkiraan	Anggaran	Realisasi	%
Jumlah	1.058.080.661,00	1.058.080.661,00	100,00

		Realisasi TA 2024	Realisasi TA 2023
d. Belanja Bantuan Sosial		Rp158.450.000,00	Rp257.340.410,00

Belanja Bantuan Sosial TA 2024 dan 2023 direalisasikan sebesar Rp 158.450.000,00 dan Rp257.340.410,00 atau 97,51% dan 98,22% dari anggaran sebesar Rp 162.500.000,00 dan Rp262.000.000,00. Realisasi Belanja Bantuan Sosial TA 2024 turun drastis sebesar 38,43% atau Rp98.890.410,00 dibandingkan realisasi TA 2024. Rincian anggaran dan realisasi belanja bantuan sosial tersaji sebagai berikut.

Perkiraan	Anggaran	Realisasi	%
Belanja Bantuan Sosial kepada Individu	162.500.000,00	158.450.000,00	97,51
Belanja Bantuan Sosial kepada Keluarga	0,00	0,00	0,00
Jumlah	162.500.000,00	158.450.000,00	97,51

Belanja Bantuan Sosial Kepada Individu terdiri dari Bantuan Sosial Uang yang Direncanakan kepada Individu sebesar Rp.108.500.000.- merupakan pemberian bantuan bantuan Bonus Pemenang Peserta dan Pelatih MTQ ke 40 TK Propinsi Sumatera Barat Tahun 2023 di Kabupaten Solok Selatan Melalui Endrizal,S.Ag.MA serta pemenang pelatih MTQ ke-40 Tk. Provinsi Sumatera Barat Tahun 2023 di Kabupaten Solok Selatan melalui Jhon Harmen, S.Ag, MA dan pendidikan kepada mahasiswa putra putri Pesisir Selatan yang sedang menempuh Pendidikan di Universitas Negeri Padang Kampus Pesisir Selatan

Bantuan Sosial yang direncanakan kepada Individu sebanyak Rp 49.950.000.00 merupakan kegiatan pemberian alat bantu untuk penyandang cacat atau disabilitas sebesar Rp. 49.950.000,00 Adapun rincian pembelian alat bantu untuk penyandang cacat/ disabilitas sebagai berikut

Jenis Alat Bantu	Unit	Total (Rp)
Kursi Roda	15	44.250.000,00
Kursi roda Standar	3	5.700.000,00
Jumlah		49.950.000,00

	Realisasi TA 2024	Realisasi TA 2023
2. Belanja Modal	Rp172.078.546.250,00	Rp238.530.915.401,09

Belanja Modal merupakan pengeluaran anggaran untuk memperoleh aset tetap dan aset lainnya yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi (satu tahun). Pada TA 2024, sebagaimana tahun sebelumnya, Pemerintah Daerah menertibkan anggaran, khususnya Belanja Modal, sesuai dengan Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah. Dalam hal ini belanja yang merupakan penunjang pengadaan aset dianggarkan pada akun belanja modal. Belanja penunjang tersebut terutama terkait perencanaan dan pengawasan yang beratribusi terhadap pengadaan aset tetap sampai dapat dimanfaatkan oleh Pemerintah Daerah. Namun pada TA 2024 masih terdapat realisasi belanja modal yang tidak memenuhi kriteria aset tetap sehingga reklasifikasi dan/atau dicatat sebagai aset ekstrakomptabel.

Realisasi Belanja Modal TA 2024 juga mencatat realisasi yang berasal dari transaksi belanja modal non RKUD atau yang bukan melalui Rekening Kas Umum Daerah, yaitu Belanja Modal BLUD dan BOS SD dan SMP Negeri. Realisasi Belanja Modal TA 2024 sebesar Rp 172.078.546.250,00 atau 92,51% dari nilai anggaran sebesar Rp 186.007.938.466,20. Nilai tersebut turun 27,86% atau sebesar Rp66.452.369.151,09 jika dibandingkan dengan realisasi TA 2023 sebesar Rp238.530915.401,00. Rincian realisasi Belanja Modal dijelaskan sebagai berikut.

	Realisasi TA 2024	Realisasi TA 2023
a. Belanja Modal Tanah	Rp 722.013.920,00	Rp1.175.433.993,00

Pada TA 2024, Pemerintah Daerah menganggarkan Belanja Modal Tanah yakni belanja modal tanah persil sebesar Rp1.785.114.920,00 dengan realisasi sebesar Rp722.013.920,00 atau 40,45 %. Pengadaan tanah Tahun 2024 merupakan pengadaan tanah IPLT dengan rincian anggaran sebesar Rp. 950.000.000,00- realisasi sebesar Rp.355.749.000.00,- serta tanah Puskesmas Lumpo dengan Anggaran sebesar Rp. 366.264.920,00,- realisasi sebesar Rp.366.264.920,00,- yakni Saat Perencanaan baru ada zona rencana pembangunan IPLT (zona tengah Kecamatan Lengayang/Kecamatan Sutera) belum ada titik lokasi tanah yang akan dibebaskan, setelah Verifikasi DAK tahun Anggaran 2025 bersama Kementerian PU dan Bappenas, baru dilakukan rencana Pembebasan tanah IPLT dengan syarat minimal 2 Ha, setelah lokasi pasti ada baru dilakukan penilaian oleh Konsultan, appraisal harga lahan yang akan dibebaskan. Hasil appraisal keluar dilakukan pembayaran ke masyarakat.

	Realisasi TA 2024	Realisasi TA 2023
b. Belanja Modal Peralatan dan Mesin	Rp 33.851.079.267,00	Rp40.598.387.185,09

Pada TA 2024, Belanja Modal Peralatan dan Mesin dianggarkan sebesar Rp37.066.108.812,20 dan direalisasikan sebesar 33.851.079.267,00 atau 91,66 %. Jika dibandingkan dengan realisasi TA 2023 sebesar Rp40.598.387.185,09, Belanja Modal Peralatan dan Mesin mengalami penurunan sebesar 16,62% atau sebesar Rp6.747.307.918,09. Adapun rincian anggaran dan realisasi Modal Peralatan dan Mesin TA 2024 disajikan sebagai berikut.

Perkiraan	Anggaran	Realisasi	%
Alat Besar	5.145.810.000,00	5.091.891.000,00	98,95
Alat Angkutan	8.514.740.450,00	8.327.674.400,00	97,80
Alat Pertanian	3.552.000,00	0,00	0,00
Alat Kantor dan Rumah Tangga	4.366.665.156,00	4.202.868.487,00	96,25
Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar	53.132.012,00	40.059.500,00	75,40
Alat Kedokteran dan Kesehatan	3.489.791.971,00	3.354.395.052,00	96,12
Alat Laboratorium	4.557.651.318,00	4.480.465.890,00	98,31
Komputer	2.144.916.143,20	1.970.397.489,00	91,86
Alat Eksplorasi	181.220.116,00	167.317.324,00	92,33
Alat Pengeboran	0,00	0,00	0,00
Alat Produksi, Pengelolaan dan pemurnian	636.637.238,00	636.600.000,00	99,99
Alat Peraga	0,00	0,00	0,00
Rambu-Rambu	257.379.348,00	256.924.000,00	99,82
Peralatan Olahraga	0,00	0,00	0,00
Peralatan dan Mesin BOS	5.910.646.388,00	4.106.241.208,00	69,47
Peralatan dan Mesin BLUD	1.803.966.672,00	1.216.244.917,00	67,42
Jumlah	37.066.108.812,20	33.851.079.267,00	91,33

	Realisasi TA 2024	Realisasi TA 2023
c. Belanja Modal Gedung dan Bangunan	Rp 48.036.104.682,00	Rp46.658.123.353,90

Belanja Modal Gedung dan Bangunan TA 2024 dianggarkan sebesar Rp50.695.911.189,00 dengan realisasi sebesar Rp48.036.104.682,00 atau 94,75 %. Realisasi TA 2024 meningkat sebesar Rp1.377.981.328,10 atau 2,95% dibandingkan TA 2023 sebesar Rp46.658.123.353,90. Rincian anggaran dan realisasi Belanja Modal Gedung dan Bangunan TA 2024 disajikan sebagai berikut;

Perkiraan	Anggaran	Realisasi	%
Pengadaan Bangunan Gedung Tempat Kerja	50.555.827.339,00	48.036.104.682,00	95,02
Pengadaan Bangunan Modal Tugu/Tanda	140.083.850,00	0,00	0,00

Perkiraan	Anggaran	Realisasi	%
Batas			
Pengadaan Bangunan Gedung dan Bangunan BLUD	0,00	0,00	0,00
Jumlah	50.695.911.189,00	48.036.104.682,00	93,02

	Realisasi TA 2024	Realisasi TA 2023
d. Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan	Rp 80.657.217.781,00	Rp141.684.225.997,10

Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan TA 2024 dianggarkan sebesar Rp87.410.593.789,00 dan direalisasikan sebesar Rp80.534.784.781,00 atau 92,27 %. Jika dibandingkan dengan realisasi TA 2023 sebesar Rp141.684.225.997,10, realisasi TA 2024 turun 43,07% atau sebesar Rp61.027.008.216,10. Penjabaran anggaran dan realisasi Belanja Modal Jalan, Irigasi, dan Jaringan disajikan sebagai berikut.

Perkiraan	Anggaran	Realisasi	%
Pengadaan Jalan	59.782.448.243,00	58.864.979.714,00	98,47
Pengadaan Jembatan	11.470.447.491,00	9.314.959.057,00	81,21
Pengadaan Bangunan Air Irigasi	10.445.311.425,00	6.858.640.011,00	65,66
Bangunan Pengaman Sungai/Pantai dan Penanggulangan Bencana Alam	1.834.500.000,00	1.830.708.000,00	99,79
Pengadaan Bangunan Air Kotor	2.688.580.130,00	2.599.191.499,00	96,68
Pengadaan Instalasi Air Bersih/Air Baku	87.523.500,00	87.523.500,00	100,00
Belanja Modal Instalasi Pembangkit Listrik	978.783.000,00	978.783.000,00	100,0
Pengadaan Jaringan Listrik	0,00	0,00	0,00
Belanja modal jalan,jaringan dan irigasi BLUD	123.000.000,00	122.433.000,00	99,54
Jumlah	87.410.593.789,00	80.657.217.781,00	92,14

	Realisasi TA 2024	Realisasi TA 2023
e. Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	Rp 8.812.130.600,00	Rp8.414.744.872,00

Belanja Modal Aset Tetap Lainnya pada TA 2024 dianggarkan sebesar Rp9.050.209.756,00 dengan realisasi 97,37% atau sebesar Rp8.812.130.600,00. Realisasi Belanja Modal Aset Tetap Lainnya TA 2023 naik 4,72% atau sebesar Rp397.385.728,00 dibandingkan realisasi tahun sebelumnya yaitu sebesar

Rp8.414.744.872,00. Penjabaran anggaran dan realisasi Belanja Modal Aset Tetap Lainnya disajikan sebagai berikut.

Perkiraan	Anggaran	Realisasi	%
Pengadaan Bahan Perpustakaan	52.250.000,00	52.125.000,00	99,76
Pengadaan Biota Perairan	0,00	0,00	0,00
Pengadaan Aset Tetap Lainnya BOS	8.717.669.020,00	8.286.344.600,00	95,05
Pengadaan Aset Tetap Lainnya BOSP	278.490.736,00	471.861.000,00	169,44
Pengadaan Aset Tetap Lainnya BLUD	1.800.000,00	1.800.000,00	100,00
Jumlah	9.050.209.756,00	8.812.130.600,00	97,37

	Realisasi TA 2024	Realisasi TA 2023
3. Belanja Tak Terduga	Rp2.135.045.328,00	Rp4.583.826.001,00

Belanja Tak Terduga (BTT) digunakan untuk kegiatan yang tidak biasa dan tidak diharapkan berulang seperti penanggulangan bencana alam, bencana sosial dan pengeluaran tidak terduga lainnya yang sangat diperlukan dalam rangka penyelenggaraan kewenangan pemerintah daerah. Belanja Tak Terduga Tahun 2024 terealisasi sebesar Rp2.135.045.328,00 atau 32,85% dari anggaran sebesar Rp6.500.000.000,00. Jika dibandingkan dengan realisasi Tahun 2023 sebesar Rp4.583.826.001,00 Belanja Tidak Terduga mengalami penurunan sebesar Rp2.448.780.673,00 atau 53,42%

Penurunan realisasi Belanja Tak Terduga TA 2024 ini dikarenakan sifat darurat, mendesak, bencana serta mendapat dana earmark yang menunggu petunjuk dari pusat

Adapun rincian realisasi Belanja Tidak Terduga sebagai berikut;

No	Uraian	Jumlah
1	Pembuatan DED dan Pengawasan Dana Siap Pakai (DSP) BNPB tahun 2023	222,264.139,00
2	Pembayaran Biaya Operasional Pendistribusian Cadangan Pangan Pemerintah dengan Sistem Kerja sama Antara Pemerintah Daerah Kab. Pessel dengan Perum Bulog Devisi Regional Sumatera Barat Tahun 2024	154.457.689,00
3	Operasional Pemadam Kebakaran Tanggap Darurat Banjir dan Tanah Longsor Akibat Bencana Alam di Kabupaten Pesisir Selatan	104.720.000,00
4	Upaya Pencegahan dan Penanggulangan KLB Diare di Kabupaten Pesisir Selatan	205.285.900,00
5	Kegiatan TMMD DPM DPPKB ke-121 tahun 2024 diwilayah Komando Distrik Militer 0311/Pesisir Selatan	1.028.581.600,00
6	Pengembalian dana BOP Reguler kesetaraan tahap 1 tahun 2024	104.400.000,00

7	Operasional DSP Stimulan Rumah	18.791.000,00
8	Operasional DSP DID Tahun 2024	296.545.000,00
Jumlah		2.135.045.328,00

	Realisasi TA 2024	Realisasi TA 2023
4. Belanja Transfer	Rp262.522.286.798,00	Rp250.300.543.648,00

Jumlah tersebut merupakan realisasi Belanja Transfer TA 2024 dan 2023. Realisasi TA 2024 sebesar Rp 262.522.286.798,00 atau 99,04 % dari anggaran sebesar Rp 265.055.332.633,00. Realisasi Belanja Transfer meningkat sebesar 4,38% atau Rp12.221.743.150,00 dari realisasi tahun sebelumnya sebesar Rp250.300.543.648,00. Belanja Transfer terdiri dari Belanja Bagi Hasil dan Belanja Bantuan Keuangan dengan rincian sebagai berikut.

	Realisasi TA 2024	Realisasi TA 2023
a. Belanja Bagi Hasil	Rp 1.264.203.498,00	Rp1.787.772.848,00

Belanja Bagi Hasil terdiri atas Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Kabupaten/Kota Kepada 182 Nagari yang ada di Kabupaten Pesisir Selatan yang besarnya diatur berdasarkan Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 39 Tahun 2024 tentang Pengalokasian bagian dari hasil pajak daerah dan retribusi daerah kepada setiap nagari tahun yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Pesisir Selatan. Untuk TA 2024 anggaran dan realisasi sebagai berikut.

Perkiraan	Anggaran	Realisasi	%
Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah	3.180.754.155,00	1.195.762.581,00	37,59
Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah Kabupaten/Kota	503.095.150,00	68.440.917,00	13,60
Jumlah	3.683.849.305,00	1.264.203.498,00	32,32

	Realisasi TA 2024	Realisasi TA 2023
b. Belanja Bantuan Keuangan	Rp 261.258.083.300,00	Rp248.512.770.800,00

Belanja Bantuan Keuangan terdiri dari Dana Desa, Alokasi Dana Desa, dan Belanja Bantuan Keuangan Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota Kepada Desa atau Nagari dianggarkan sebesar Rp 261.371.483.328,00 dan terealisasi sebesar 99,96% atau Rp 261.258.083.300,00 dengan rincian sebagai berikut.

Perkiraan	Anggaran	Realisasi	%
Dana Desa	167.649.926.000,00	167.649.926.000,00	100,00

Perkiraan	Anggaran	Realisasi	%
Alokasi Dana Desa	92.931.557.328,00	92.923.157.300,00	99,99
Belanja Bantuan Keuangan Khusus Prov/Kab	790.000.000,00	685.000.000,00	86,71
Jumlah	261.371.483.328,00	261.258.083.300,00	99,96

5.1.3 Surplus/Defisit	Realisasi TA 2024 Rp(50.200.153.363,28)	Realisasi TA 2023 Rp26.935.030.239,79
------------------------------	--	--

Merupakan kondisi surplus pada TA 2024 dan 2023. Perhitungan selisih antara realisasi pendapatan dan belanja TA 2024 terdapat surplus sebesar (Rp50.200.153.363,28)

5.1.4 Pembiayaan	Realisasi TA 2024 Rp 122.246.955.015,36	Realisasi TA 2023 Rp102.374.991.822,57
-------------------------	--	---

Anggaran Pembiayaan pada TA 2024 adalah sebesar Rp122.021.955.015,00 dan teralisasi Rp 122.246.955.015,36 atau 100,18 %. Rincian Penerimaan Pembiayaan dan Pengeluaran Pembiayaan adalah sebagai berikut.

a. Penerimaan Pembiayaan	Realisasi TA 2024 Rp129.310.022.062,36	Realisasi TA 2023 Rp105.900.496.822,57
---------------------------------	---	---

Anggaran Penerimaan Pembiayaan TA 2024 sebesar Rp129.310.022.062,00 dan terelisasi sebesar 100,00% atau Rp129.310.022.062,36. Realisasi Penerimaan Pembiayaan tersebut berupa Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya. Selisih kurang dari realisasi penerimaan pembiayaan sebesar Rp129.310.022.062,36 dari anggaran berasal dari sisa lebih anggaran tahun sebelumnya, karena tidak tercapainya target kinerja dan sisa dana pengeluaran pembiayaan.

b. Pengeluaran Pembiayaan	Realisasi TA 2024 Rp 7.063.067.047,00	Realisasi TA 2023 Rp3.525.505.000,00
----------------------------------	--	---

Realisasi Pengeluaran Pembiayaan TA 2024 adalah sebesar Rp 7.063.067.047,00 atau 96,91% dari anggaran yang ditetapkan sebesar Rp 7.288.067.047,00. Nilai tersebut meningkat 100,34% atau sebesar Rp3.537.562.047,00 dibandingkan dengan realisasi TA 2023 sebesar Rp3.525.505.000,00. Pengeluaran Pembiayaan Daerah Tahun 2024 merupakan Penyertaan Modal pada PDAM.

5.1.5 Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA)	Realisasi TA 2024 Rp 72.046.801.652,08	Realisasi TA 2023 Rp129.310.022.062,36
--	---	---

Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA) pada Laporan Realisasi Anggaran (LRA) merupakan nilai dari pendapatan dikurang belanja dan transfer serta ditambah pembiayaan selama satu periode. Nilai tersebut merupakan SiLPA TA 2024 dan 2023. SiLPA 2024 terdapat pada Kas Daerah, Kas pada Bendahara BLUD, dan Kas pada Bendahara BOS dan Kas pada Bendahara BOK yang dapat dirinci sebagai berikut.

Perkiraan	Saldo
Kas di Kas Daerah	61.934.119.104,76
Kas di Bendahara Penerimaan	0,00
Kas di Bendahara Pengeluaran	0,00
Kas di BLUD	6.556.211.055,32
Kas di Bendahara FKTP	0,00
Kas di Bendahara BOS	47.985.275,00
Kas di Bendahara BOK	3.478.962.217,00
Sisa BOP PAUD	29.524.000
Jumlah	72,046.801.652,08

Adapun uraian komponen SiLPA tersebut sesuai dengan sumber dan peruntukan pendanaannya dapat dijelaskan sebagai berikut.

Komponen SiLPA	Saldo
SiLPA BLUD	6.556.211.055,00
SiLPA BOS	47.985.275,00
SiLPA BOK	3.478.962.217,00
SILPA BOP PAUD	29.524.000,00
SiLPA DAK Fisik	7.058.866.683,00
SiLPA DAK Non Fisik	6.602.397.226,00
SiLPA DBH CHT	38.185.298,00
SiLPA DBH Sawit	1.411.610.250,00
SiLPA DAU TPG	23.058.359.000,00
SiLPA PPPK	24.595.883,00
SiLPA DAU Bidang Pendidikan	15.980.293.939,00
SiLPA DAU Bidang Kesehatan	2.583.407.692,00
SiLPA DAU Bidang Pekerjaan Umum	11.361.694.990,00
SiLPA Murni Pemerintah Daerah	0,00
Jumlah	78.232.093.505,00

SiLPA Dana Transfer dari Pemerintah Pusat merupakan hasil verifikasi dari Kemnterian Keuangan pada aplikasi onspam yang dituangkan dalam Lampiran 7 ND Nomor 136/ND/XV/03/2025

Terdapat selisih antara jumlah sisa anggaran yang ada pada komponen kas dengan jumlah pada total rincian Sisa Lebih Perhitungan Anggaran dari masing-masing penerimaan sebesar Rp6.185.291.853,00. Selisih kurang ini disebabkan pembayaran Alokasi Dana Desa (ADD) yang dianggarkan sebesar 10% dari Total DAU sedangkan 10% dari DAU yang Sudah Ditentukan Penggunaannya tidak dapat dianggarkan untuk Belanja ADD, yakni sebesar Rp26.478.181.300,00 merupakan 10% total anggaran DAU yang Sudah Ditentukan Penggunaannya sebesar Rp264.781.813.000,00 yang direlisasikan per triwulan dan belum tentu terealisasi 100%.

Untuk Tahun 2024 total DAU hanya terealisasi 99,19% dari total anggaran. Terdapat selisih realisasi pada DAU untuk Formasi PPPK yang terealisasi sebesar 57,43% atau sebesar Rp40.969.025.052,00, sehingga terjadi kekurangan sebesar Rp30.366.279.948,00, sedangkan tidak ada pengurangan terhadap realisasi ADD. Konsekuensi perhitungan ADD seperti ini menyebabkan realisasi ADD akan memakai SiLPA dari komponen dana transfer yang ada.

5.2. PENJELASAN POS-POS LAPORAN PERUBAHAN SALDO ANGGARAN LEBIH

	Tahun 2024	Tahun 2023
5.2.1. Saldo Anggaran Lebih Awal	Rp129.310.022.062,36	Rp108.592.848.980,57

Saldo Anggaran Lebih (SAL) Awal Tahun 2024 merupakan SAL akhir per 31 Desember 2024. SAL Awal yang tercatat pada Laporan Keuangan Tahun Anggaran 2024 sebagai berikut.

Perkiraan	Saldo
Kas di Kas Daerah	113.669.002.281,88
Kas di Bendahara Penerimaan	0,00
Kas di Bendahara Pengeluaran	0,00
Kas di BLUD	10.009.988.977,48
Kas di Bendahara FKTP	0,00
Kas di Bendahara BOS	81.349.193,00
Kas di Bendahara BOK	5.549.681.610,00
TDF – DBH	0,00
Jumlah	129.310.022.062,36

	Tahun 2024	Tahun 2023
5.2.2. Penggunaan SAL sebagai Penerimaan Pembiayaan Tahun Berjalan	Rp 129.310.022.062,36	Rp105.899.776.822,57

Penggunaan SAL sebagai Penerimaan Pembiayaan Tahun Berjalan merupakan penggunaan SiLPA TA 2024 pada TA 2023. Nilai Penggunaan SiLPA sebagai Penerimaan Pembiayaan TA 2024 adalah sebesar Rp 129.310.022.062,36 atau terealisasi 100.00%.

	<u>Tahun 2024</u>	<u>Tahun 2023</u>
5.2.3. Sisa Lebih/Kurang Pembiayaan Anggaran	Rp72.046.801.652,08	Rp129.310.022.062,36

Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran merupakan Surplus Pendapatan dan Belanja Tahun 2024 sebesar Rp72.046.801.652,08 dengan Pembiayaan Netto sebesar Rp122.246.955.015,36.

	<u>Tahun 2024</u>	<u>Tahun 2023</u>
5.2.4. Koreksi Kesalahan Pembukuan Tahun Sebelumnya	Rp0,00	(Rp2.693.072.158,00)

Koreksi Kesalahan Pembukuan Tahun Sebelumnya merupakan Koreksi atas pembukuan SiLPA TA 2024 pada TA 2023.

	<u>Tahun 2024</u>	<u>Tahun 2023</u>
5.2.5. Saldo Anggaran Lebih Akhir	Rp72.046.801.652,08	Rp129.310.022.062,36

Saldo Anggaran Lebih Akhir merupakan Sisa Lebih/Kurang Pembiayaan Anggaran (SiLPA) Tahun 2024 dan 2023. Nilai SiLPA Tahun 2024 sebesar Rp72.046.801.652,08. Rincian Sisa Anggaran Lebih Akhir tersebut sebagaimana telah dijelaskan pada Catatan atas Laporan Keuangan Sub Bab 5.1.5 Sisa Lebih Perhitungan Anggaran.

5.3. PENJELASAN POS-POS NERACA

Neraca Daerah Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan menggambarkan posisi keuangan per 31 Desember 2024 dengan nilai asset sebesar Rp3.000.617.668.763,84, nilai kewajiban sebesar Rp74.162.837.023,78 dan ekuitas sebesar Rp2.929.454.831.739,95. Rincian atas masing-masing pos di neraca per 31 Desember 2024 adalah sebagai berikut:

	<u>Per 31 Des 2024</u>	<u>Per 31 Des 2023</u>
5.3.1. Aset	Rp3.002.441.532.376,07	Rp2.933.988.050.356,89

Jumlah tersebut merupakan Jumlah Aset Per 31 Desember 2024 dan 2023. Jumlah Aset per 31 Desember 2024 meningkat sebesar Rp68.453.482.019,16 meningkat

2,33% dari jumlah Aset per 31 Desember 2023. Adapun rincian dari komponen Aset sebagai berikut.

	Per 31 Des 2024	Per 31 Des 2023
1. Aset Lancar	Rp145.826.547.250,71	Rp194.214.155.651,90

Aset Lancar adalah aset yang diharapkan dapat segera direalisasikan, dipakai atau dimiliki untuk dijual dalam waktu 12 bulan (satu tahun) sejak tanggal perolehan. Aset Lancar terdiri dari Kas dan Setara Kas, Investasi Jangka Pendek, Piutang, Beban Dibayar Di Muka, dan Persediaan. Per 31 Desember 2024 jumlah Aset Lancar menurun sebesar Rp48.387.608.401,19 atau 24,91% dibandingkan kondisi Per 31 Desember 2023. Rincian saldo Aset Lancar per 31 Desember 2024 dan 2023 adalah sebagai berikut.

Aset Lancar	Per 31 Des 2024	Per 31 Des 2023
Kas dan Setara Kas	72.046.801.652,08	129.310.022.062,36
Piutang	43.539.286.081,27	34.123.651.908,80
Persediaan	30.240.459.517,36	30.780.481.680,74
Jumlah	145.826.547.250,71	194.214.155.651,90

	Per 31 Des 2024	Per 31 Des 2023
a. Kas dan Setara Kas	Rp72.046.801.652,08	Rp129.310.022.062,36

Kas dan Setara Kas merupakan aset paling lancar berupa uang tunai, tabungan, giro dan deposito berjangka kurang dari tiga bulan yang dikelola oleh Bendahara Umum Daerah, Bendahara Penerimaan beserta Pembantu, Bendahara Pengeluaran beserta Pembantu, dan Bendahara BLUD dalam lingkup pemerintah daerah.

Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan menyajikan rincian, komponen dan saldo Kas dan Setara Kas per 31 Desember 2024 dan 2023 sebagai berikut.

Perkiraan	Saldo Per 31 Des 2024	Saldo Per 31 Des 2023
Kas di Kas Daerah	61.934.119.104,76	113.669.002.281,88
Kas di Bendahara Pengeluaran	0,00	0,00
Kas di Bendahara Penerimaan	0,00	0,00
Kas di Bendahara BLUD	6.556.211.055,32	10.009.988.977,48
Kas di Bendahara FKTP	0,00	0,00
Kas di Bendahara BOS	47.985.275,00	81.349.193,00
Kas di Bendahara BOP PAUD	3.478.962.217,00	0,00
Kas di Bendahara BOK	29.524.000	5.549.681.610,00
Kas Lainnya	0,00	0,00

Perkiraan	Saldo Per 31 Des 2024	Saldo Per 31 Des 2023
Setara Kas	0,00	0,00
Jumlah	72,046.801.652,08	129.310.022.062,36

Uraian masing-masing komponen Kas dan Setara Kas dapat dijelaskan sebagai berikut.

	Per 31 Des 2024	Per 31 Des 2023
1) Kas di Kas Daerah	Rp61.934.119.104,76	Rp113.669.002.281,88

Kas di Kas Daerah merupakan saldo kas yang dikelola oleh Bendahara Umum Daerah (BUD) Per 31 Desember 2024 dan 2023. yang terdiri dari lima Rekening Giro dengan rincian sebagai berikut. Saldo kas di kas daerah per 31 Desember 2024 disajikan pada **Lampiran 3.1**.

Kas pada Rekening Giro:	Saldo Per 31 Des 2024	Saldo Per 31 Des 2023
Bank Nagari 0400.0101.00144-4	61.934.119.104,76	113.037.212.028,88
Bank Nagari 0400.0101.00883-1 (Kas Penampung Lelang BMD)	0,00	631.790.253,00
Bank Rakyat Indonesia 00270.01.000271-30-3	0,00	0,00
Bank Syariah Indonesia 7027480025	0,00	0,00
Bank Negara Indonesia 8126643000	0,00	0,00
Jumlah	61.934.119.104,76	113.669.002.281,88

	Per 31 Des 2024	Per 31 Des 2023
2) Kas di Bendahara Pengeluaran	Rp0,00	Rp0,00

Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan tidak memiliki Kas di Bendahara Pengeluaran per 31 Desember 2024 dan 2023.

	Per 31 Des 2024	Per 31 Des 2023
3) Kas di Bendahara Penerimaan	Rp0,00	Rp0,00

Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan tidak memiliki Kas di Bendahara Penerimaan per 31 Desember 2024 dan 2023.

	Per 31 Des 2024	Per 31 Des 2024
4) Kas di BLUD	6.556.211.055,32	10.009.988.977,48

Jumlah tersebut merupakan Saldo Kas pada BLUD per 31 Desember 2024 dan 2023, yang terdiri atas saldo kas BLUD RSUD M. Zein sebesar Rp3.591.800.616,13 dan BLUD Puskesmas se-Kabupaten Pesisir Selatan

sebesar Rp2.964.337.246,19 pada 20 puskesmas. Saldo kas di BLUD per 31 Desember 2024 diuraikan sebagai berikut:

No	SKPD	Saldo per 31 Desember 2024	Keterangan
1.	BLUD RSUD M. Zein Painan	3.591.873.809,13	
2.	BLUD Puskesmas-Dinas Kesehatan	2.964.337.246,19	20 Puskesmas

Pembentukan BLUD Puskesmas dilakukan melalui Keputusan Bupati Nomor 900/485/Kpts/BPT-PS/2019 tentang Penetapan Puskesmas se-Kabupaten Pesisir Selatan sebagai Puskesmas yang Menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan BLUD, tanggal 26 Desember 2019, yang berlaku efektif mulai TA 2020. Saldo kas masing-masing BLUD per 31 Desember 2024 disajikan pada **Lampiran 3.4**.

	Per 31 Des 2024	Per 31 Des 2023
5) Kas di Bendahara FKTP	Rp0,00	Rp0,00

Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan tidak memiliki Kas di Bendahara Penerimaan per 31 Desember 2024.

	Per 31 Des 2024	Per 31 Des 2023
6) Kas di Bendahara BOK	Rp3.478.962.217,00	Rp5.549.681.610,00

Kas di Bendahara BOK merupakan saldo Kas di Bendahara BOK per 31 Desember 2024 dan 2023. Saldo Kas di Bendahara BOK merupakan saldo sisa Dana BOK yang ada di puskesmas se-Kabupaten Pesisir Selatan yang penerimaannya langsung ke rekening puskesmas dan tidak melalui rekening Kas Daerah (non RKUD) Pembentukan rekening penerimaan dana BOK berdasarkan Keputusan Bupati Pesisir Selatan Nomor 900/698/Kpts/BPT-PS/2023 tentang Penetapan Rekening Bantuan Operasional Kesehatan Pada Puskesmas Tahun Anggaran 2024. Untuk rincian jumlah dana BOK yang disalurkan per Puskesmas dan rekapan penggunaan dana BOK ada pada **Lampiran 3.6**. Adapun rincian saldo Kas Di Bendahara BOK sebagai berikut.

No	PUSKESMAS	Saldo Per 31 Des 2024
1	Barung-Barung Belantai	127.790.376,00
2	Tarusan	158.476.606,00
3	Pasar baru	66.483.583,00
4	Koto Berapak	101.854.775,00
5	Asam Kumbang	254.999.480,00
6	Lumpo	49.047.274,00
7	Salido	71.834.415,00
8	IV Koto Mudik	110.211.430,00
9	Pasar Kuok	213.914.554,00
10	Surantih	259.830.921,00

No	PUSKESMAS	Saldo Per 31 Des 2024
11	Kambang	99.843.251,00
12	Koto Baru	152.357.733,00
13	Balai Selasa	274.853.170,00
14	Air Haji	169.713.833,00
15	Air Pura	177.482.932,00
16	Indrapura	166.593.054,00
17	Tapan	108.734.196,00
18	Ranah Ampek Hulu	202.006.366,00
19	Tanjung Beringin	244.642.130,00
20	Tanjung Makmur	184.018.806,00
21	Kayu Gadang	284.273.332,00
J U M L A H		3.478.962.217,00

	Per 31 Des 2024	Per 31 Des 2023
7) Kas di Bendahara BOS	Rp47.985.275,00	Rp81.349.193,00

Kas di Bendahara BOS merupakan saldo Kas di Bendahara BOS per 31 Desember 2024 dan 2023. Saldo Kas di Bendahara BOS merupakan saldo sisa Dana BOS pada SD dan SMP Negeri se-Kabupaten Pesisir Selatan yang penerimaannya langsung ke rekening sekolah dan tidak melalui rekening Kas Daerah (non RKUD). Penerimaan atas Kas di Bendahara BOS bersumber dari Pendapatan DAK Non Fisik-BOS Reguler dan DAK Non Fisik-BOS Reguler. Saldo tersebut tersebar pada 459 SD dan SMP Negeri yang berada di bawah Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pesisir Selatan, dengan rincian sebagai berikut.

Kas di Bendahara BOS SD (385 sekolah)	38.648.246,00
Kas di Bendahara BOS SMP (74 sekolah)	9.337.029,00
Jumlah	47.985.275,00

Selisih sebesar Rp720.000,00 merupakan selisih antara Saldo Kas Bos SD dengan Saldo rekening Koran Bos pada SDN 04 Pancung Soal namun hingga laporan ini disusun belum diterima bukti setoran pengembalian kelebihan saldo kas tersebut.

Rincian saldo Kas di Bendahara BOS per masing-masing sekolah tersaji pada **Lampiran 3.7, Kas Bos SD pada Lampiran 3.7.1 dan Kas Bos SMP pada Lampiran 3.7.2**

	Per 31 Des 2024	Per 31 Des 2023
8) Kas di Bendahara BOP	Rp29.524.000,00	Rp0,00

PAUD

Kas di Bendahara BOP PAUD merupakan saldo kas yang dikelola oleh Bendahara BOP PAUD Per 31 Desember 2024 dan 2023.

Rincian saldo kas di bendahara BOP PAUD dapat dilihat pada **Lampiran 3.8**.

	Per 31 Des 2024	Per 31 Des 2023
9) Kas Lainnya	Rp0,00	0,00

Kas Lainnya merupakan saldo kas pada rekening daerah diluar Rekening yang sudah ditetapkan penggunaannya. Per 31 Desember 2024 dan 2023 Pemerintah Daerah Pesisir Selatan tidak memiliki saldo di Kas Lainnya

	Per 31 Des 2024	Per 31 Des 2023
10) Setara Kas	Rp0,00	Rp0,00

Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan tidak memiliki Setara Kas per 31 Desember 2024 dan 2023.

	Per 31 Des 2024	Per 31 Des 2023
b. Investasi Jangka Pendek	0,00	Rp0,00

Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan tidak memiliki Setara Kas per 31 Desember 2024 dan 2023

	Per 31 Des 2024	Per 31 Des 2023
c. Piutang	Rp43.539.286.081,27	Rp34.123.651.908,80

Saldo tersebut merupakan Piutang Daerah per 31 Desember 2024 dan 2023. Nilai tersebut telah disajikan sebesar *Net Realizable Value* (NRV) atau nilai bersih yang dapat direalisasikan dengan memperhitungkan nilai Penyisihan Piutang Tidak Tertagih sesuai dengan Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah Kabupaten Pesisir Selatan No. 03 Akun Piutang dan Penyisihan Piutang Tidak Tertagih. Rincian komponen nilai Piutang per 31 Desember 2024 adalah sebagai berikut.

Piutang	Per 31 Des 2024	Per 31 Des 2023
Piutang Pajak	10.420.820.248,00	9.690.086.977,00
Piutang Retribusi	10.841.027.205,00	547.551.000,00
Piutang Lain-lain PAD yang Sah	0,00	2.694.344.343,00
Piutang Dana Bagi Hasil	33.124.642.460,00	28.729.702.466,00
Piutang Lainnya	0,00	39.843.470,00
Penyisihan Piutang Tak Tertagih	(10.847.203.831,74)	(7.577.876.347,20)
Piutang	43.539.286.081,27	34.123.651.908,80

Per 31 Des 2024**Per 31 Des 2023**

1) Piutang Pajak**Rp10.420.820.248,00****Rp9.690.086.977,00**

Saldo tersebut merupakan Piutang Pajak per 31 Desember 2024 dan 2023. Penambahan piutang pajak pada Tahun berdasarkan Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang (SPPT) Pajak Bumi dan Bangunan sektor Perkotaan dan Perdesaan dan Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKPD) untuk pajak daerah lainnya yang dikeluarkan oleh Badan Pengelolaan Keuangan Pendapatan dan Aset Daerah tetapi belum terdapat penerimaan atas ketetapan pajak pada akhrit tahun berjalan. Pencatatan piutang pajak dengan nilai bruto dengan perhitungan penyisihan sebagai berikut.

Uraian	Piutang Bruto	% Penyisihan	Penyisihan Piutang	Piutang Netto
Pajak Restoran 2011	33.670.000,00	100%	(33.670.000,00)	0,00
Pajak Reklame 2019	150.432.875,00	100%	(150.432.875,00)	0,00
Pajak Reklame 2016	315.500,00	100%	(315.500,00)	0,00
PBB P2 2024	820.433.212,00	0,5%	(4.102.166,06)	816.331.045,94
PBB P2 2023	744.326.097,00	10%	(74.432.609,70)	699.893.487,30
PBB P2 2022	593.897.111,00	10%	(59.389.711,10)	534.507.399,90
PBB P2 2021	685.611.173,00	50%	(342.805.586,50)	342.805.586,50
PBB P2 2020	734.097.539,00	50%	(367.048.769,50)	367.048.769,50
PBB P2 2019	372.427.606,00	50%	(186.213.803,00)	186.213.803,00
PBB P2 2018	790.798.296,00	100%	(790.798.296,00)	0,00
PBB P2 2017	882.328.412,00	100%	(882.328.412,00)	0,00
PBB P2 2016	1.486.738.805,00	100%	(1.486.738.805,00)	0,00
PBB P2 2015	1.510.757.459,00	100%	(1.510.757.459,00)	0,00
PBB P2 2014	1.439.087.296,00	100%	(1.439.087.296,00)	0,00
BPHTB 2023	175.898.867,00	0,50%	(17.589.886,70)	158.308.980,30
JUMLAH	10.420.820.248,00		(7.345.711.175,56)	3.075.109.072,44

Terdapat penambahan jumlah piutang pajak sebesar 8,47% atau Rp820.433.212,00 dari Tahun 2023. Penambahan piutang pajak berasal dari Pajak Bumi dan Bangunan sektor Perkotaan dan Pedesaan dan Bea Perolehan Atas Bumi dan Bangunan (BPHTB) Tahun Pajak 2024. Per tanggal 31 Desember 2024 jumlah SPPT PBB-P2 dikeluarkan sebanyak 159.852 lembar dengan jumlah perkiraan penerimaan pajak Rp3.550.072.883,00. Pada Tanggal 7-8 Maret 2024 terjadi bencana banjir yang merendam hampir 75% wilayah Kabupaten pesisir Selatan. Dengan peristiwa bencana alam tersebut Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan mengeluarkan Surat Edaran Bupati Pesisir Selatan Nomor 100.3.4.2/71.a/BPKD-PS/2024 tentang Pembebasan Pembayaran Atas Pokok Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) Tahun 2024 Pada Objek Pajak Yang Terdampak Bencana Alam, dan setelah

ditindaklanjuti terdapat 58.499 NOP dari Wajib Pajak yang masuk kategori bebas dari pembayaran PBB-P2 dengan nominal Rp952.155.011,00. Jika dikurangi dengan NOP yang dibebaskan dari pembayaran atas PBB-P2 Tahun Pajak 2024, maka jumlah SPPT PBB-P2 yang dapat dipungu per 31 Desember 2024 sebanyak 101.353 SPPT dengan nominal Rp2.597.917.872,00. Sampai tanggal 31 Desember 2024 jumlah penerimaan PBB-P2 terealisasi hanya sebesar Rp1.777.484.660,00,00, sehingga muncul piutang PBB-P2 untuk tahun 2024 sebesar Rp820.433.212,00.

Piutang Pajak Restoran Tahun 2011 sebesar Rp33.670.000,00 sudah tidak dapat ditelusuri subjek pajaknya namun masih dicatat dalam laporan keuangan karena Pemerintah Daerah belum menetapkan berita acara atau surat keputusan untuk penghapusan piutang tidak tertagih. Piutang ini telah dikelompokkan kedalam golongan kualitas macet dan dilakukan penyisihan 100%, sehingga saldo piutang pajak restoran netto adalah Rp0,00 atau nihil.

	Per 31 Des 2024	Per 31 Des 2023
2) Piutang Retribusi	Rp10.841.027.205,00	Rp547.551.000,00

Saldo tersebut merupakan Piutang Retribusi per 31 Desember 2024 dan 2023. Piutang Retribusi per 31 Desember 2024 terdapat pada Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan serta Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga dan Dinas Kesehatan. Untuk Dinas Kesehatan merupakan gabungan dari retribusi pelayanan Kesehatan di Dinas Kesehatan, Puskesmas dan RSUD Pratama Tapan, dan RSUD dr. M. Zein Painan. Penambahan Piutang Retribusi Pelayanan Kesehatan di RSUD dr. M. Zein Painan berasal saldo Piutang Lain-Lain PAD yang sah Tahun 2023, karena entitas akuntansi RSUD dr. M. Zein digabungkan pelaporannya dengan Dinas Kesehatan sehingga dilakukan reklasifikasi pencatatan saldo piutang dari Piutang Lain-Lain PAD yang sah menjadi Retribusi Pelayanan Kesehatan. Pencatatan nilai piutang dengan nilai bruto, dan perhitungan penyisihan piutang dirinci pada **Lampiran 4.2**.

	Per 31 Des 2024	Per 31 Des 2023
3) Piutang Lain-lain PAD yang Sah	Rp0,00	Rp2.694.344.343,00

Saldo Piutang Lain-Lain PAD yang Sah merupakan Saldo per 31 Desember 2024 dan 2023. Tidak ada saldo Piutang Lain-lain PAD yang Sah per 31 Desember 2024, sedangkan saldo Piutang Lain-Lain PAD yang sah per 31 Desember 2023 dilakukan reklasifikasi ke Retribusi Pelayanan Kesehatan disebabkan pada Tahun 2024 dilakukan penggabungan pelaporan dari entitas akuntansi RSUD dr. M. Zein Painan ke entitas akuntansi Dinas Kesehatan.

	Per 31 Des 2024	Per 31 Des 2023
4) Piutang Dana Bagi Hasil	Rp33.124.642.460,00	Rp28.729.702.466,00

Saldo di atas merupakan saldo Piutang Dana Bagi Hasil per 31 Desember 2024 dan 2023. Per 31 Desember 2024 terdapat saldo Piutang Dana Bagi Hasil Pajak dari Pemerintah Provinsi Sumatera Barat, sesuai dengan Surat Keputusan yang dikeluarkan oleh Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor: 971.1/008/PPD-Bapenda/2025 tentang Penetapan Alokasi Definitif dan Kekurangan Salur Dana Bagi Hasil Pajak Provinsi Sumatera Barat Bagian Kabupaten/Kota Se Sumatera Barat Tahun Anggaran 2024. Tidak ada penyisihan piutang untuk Dana Bagi Hasil Provinsi sesuai dengan Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah. Berikut rincian Piutang Dana Bagi Hasil Pajak Provinsi.

Uraian Piutang	Piutang
DBH PKB	5.932.976.454,00
DBH BBNKB	2.366.777.559,00
DBH PBBKB	24.609.925.410,00
DBH Pajak Air Permukaan	214.963.037,00
JUMLAH	33.124.642.460,00

	Per 31 Des 2024	Per 31 Des 2023
5) Piutang Lainnya	Rp0.00	Rp39.843.470,00

Jumlah ini merupakan Piutang Lainnya per 31 Desember 2024 dan 2023. Tidak ada saldo Piutang Lainnya Per 31 Desember 2024.

Saldo Awal 2024 Piutang Lainnya berasal dari bunga rekening BOS TA 2018 yang masuk ke Rekening Kas Daerah Provinsi Sumatera Barat dan saldo keterlanjutan Gaji Pegawai Pensiun tahun 2023. Terhadap saldo bunga rekening BOS TA 2018, Pemerintah Provinsi Sumatera Barat berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Sumatera Barat Nomor 903-907-2019 tentang Penetapan Besaran Belanja Tidak Terduga Untuk Pembayaran Pengembalian Penyetoran Bunga/Jasa Giro Rekening BOS SD/SMP Negeri Tahun 2018 telah melakukan penyaluran dengan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor 13.00/04.0/000134/LS/ 5.02.0.00.0.00.01.0000/P2/8/2024 Tanggal 27 Agustus 2024 sebesar Rp39.343.470,00. Daftar Piutang Lainnya dapat dilihat pada **Lampiran 4.5**.

	Per 31 Des 2024	Per 31 Des 2023
6) Penyisihan Piutang Tak Tertagih	(Rp10.847.203.831,73)	(Rp7.577.876.347,20)

Saldo tersebut adalah nilai Penyisihan Piutang Tak Tertagih atas seluruh nilai Piutang Daerah Tahun 2024. Rincian Penyisihan Piutang Tak Tertagih per jenis Piutang disajikan sebagai berikut.

Uraian	Piutang Bruto	Penyisihan Piutang	Piutang Netto
---------------	----------------------	---------------------------	----------------------

Piutang Pajak	10.420.820.248,00	(7.345.711.175,56)	3.075.109.072,44
Piutang Retribusi	10.841.027.205,00	(3.501.492.656,17))	7.339.534.548,82
Piutang Lain-lain PAD yang Sah	-	-	-
Piutang Dana Bagi Hasil	33.124.642.460,00	-	33.124.642.460,00
Piutang Lainnya	-	-	-
JUMLAH	54.386.509.913,00	(10.847.203.831,73)	43.539.286.081,27

Terjadi peningkatan jumlah penyisihan piutang tak tertagih sebesar Rp3.269.327.484,53 atau 43,13%. Hal ini karena adanya peningkatan jumlah piutang Tahun 2024 dan bertambahnya umur piutang sehingga merubah kriteria piutang, dari piutang lancar menjadi piutang kurang lancar, dari piutang kurang lancar menjadi piutang ragu-ragu atau piutang macet. Selain itu terdapat pengurangan yang berasal dari tertagihnya piutang PBB-P2 Tahun Pajak 2014 – 2024 sebesar Rp89.699.941,00 dan pengurangan dari penyisihan piutang pajak lainnya dan piutang retribusi sebesar Rp 121.913.416,00. Daftar penyisihan Piutang Tak Tertagih dapat dilihat pada **Lampiran 4.6**.

	Per 31 Des 2024	Per 31 Des 2023
d. Beban Dibayar Di Muka	Rp0,00	Rp0,00

Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan tidak memiliki Beban Dibayar Di Muka per 31 Desember 2024 dan 2023.

	Per 31 Des 2024	Per 31 Des 2023
e. Persediaan	Rp30.240.459.517,36	Rp30.780.481.680,74

Jumlah tersebut merupakan saldo Persediaan per 31 Desember 2024 dan 2023. Pencatatan saldo persediaan dilakukan berdasarkan laporan setiap SKPD dan Laporan Hasil Pemeriksaan Persediaan per 31 Desember 2024 oleh Inspektorat. Persediaan per 31 Desember 2024 terdiri dari persediaan ATK, obat-obatan, alat kesehatan habis pakai, dan BMD yang dibangun dengan tujuan untuk dihibahkan kepada masyarakat atau pihak ketiga namun belum diserahterimakan per 31 Desember 2024. Ringkasan item dan nilai Persediaan per 31 Desember 2024 adalah sebagai berikut.

Rincian	Per 31 Des 2024	Per 31 Des 2023
ATK	30.212.700,00	90.899.640,00
Cetak	319.743.319,00	340.896.013,00
Alat Listrik dan Elektronik	295.441.249,00	559.261.200,00
Bahan Laboratorium	0,00	11.716.050,00
Alat Kesehatan Lainnya	0,00	48.442.740,00
Persediaan Hibah	9.464.726.106,00	11.746.822.935,00
Materai	413.000,00	703.000,00

Alat Kebersihan	38.200.000,00	58.724.600,00
BBM	54.713.749,00	131.212.225,00
Souvenir/Cendramata	13.357.500,00	13.357.500,00
Obat dan BHP	18.010.362.145,48	15.352.951.943,14
Bahan Makanan	178.678.748,88	590.882.834,60
Bahan Material	1.834.611.000,00	1.834.611.000,00
Jumlah	Rp30.240.459.517,36	30.780.481.680,74

Persediaan dari Bahan Material merupakan pengadaan lapak-lapak pasar darurat di Pasar Painan karena dilakukan revitalisasi Pasar Painan oleh pemerintah pusat, sehingga para pedagang ditampung sementara pada lapak pasar yang bersifat bangunan non permanen. Rincian saldo Persediaan per 31 Desember 2024 dan 2023 masing-masing SKPD disajikan pada **Lampiran 5**, dan rincian persediaan disajikan pada **Lampiran 5.1**.

	Per 31 Des 2024	Per 31 Des 2023
2. Investasi Jangka Panjang	Rp128.233.426.287,08	Rp121.130.236.098,99

Investasi Jangka Panjang merupakan investasi yang diadakan dengan maksud untuk mendapatkan manfaat ekonomis dalam jangka waktu lebih dari satu periode akuntansi. Investasi Jangka Panjang terdiri atas Investasi Non Permanen dan Investasi Permanen. Uraian dan rincian Investasi Jangka Panjang per 31 Desember 2024 dan 2023 sebagai berikut.

	Per 31 Des 2024	Per 31 Des 2023
a. Investasi Non Permanen	Rp0,00	Rp0,00

Merupakan saldo Investasi Dana Bergulir yang dapat direalisasikan oleh Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan per 31 Desember 2024 dan 2023. Program Dana Bergulir ini disebut Kredit Modal Penguatan Ekonomi Rakyat (K-PER) yang dilaksanakan pada Tahun 2002, 2003, 2006, 2007, dan 2008. Penyaluran Program K-PER dilaksanakan berdasarkan perjanjian kerjasama antara Pemerintah Daerah dengan pihak penyelenggara, yaitu Bank Nagari Cabang Painan, Bank Nagari Cabang Tapan dan BPR Samudera serta koperasi-koperasi.

Penyaluran K-PER pada Bank Nagari Cabang Painan dan Tapan dilaksanakan berdasarkan perjanjian kerjasama Nomor 500/26/Perek/2007, PKS/001/PN/PD/06-2007 dan PKS/001/TP/PD/06-2007 tanggal 29 Mei 2007. Perjanjian kerjasama ini berlaku selama tiga tahun dan berakhir pada Tahun 2010. Pengembalian pokok investasi Dana K-PER dan setoran bunga dari rekening penampungan K-PER dicatat sebagai Lain-lain PAD yang Sah.

Sesuai dengan Peraturan Bupati Nomor 27 Tahun 2014 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan, Kebijakan Nomor 07 tentang Akuntansi Investasi Jangka Panjang khususnya paragraf 13 menyatakan bahwa Penyisihan Investasi Non Permanen Dana Bergulir Tidak Tertagih dilakukan

berdasarkan umur Investasi Non Permanen Dana Bergulir dengan persentase penyisihan 100% untuk investasi yang berumur lebih dari 9 bulan. Pada TA 2024 terdapat realisasi pengembalian pokok dana K-PER sebesar Rp440.000,00 ke Rekening Kas Daerah. Dalam hal ini atas seluruh saldo Investasi Non Permanen per 31 Desember 2023 telah disisihkan dan pengembalian pokok dilakukan pada tahun 2024 sebesar Rp440.000,00. Rincian penyaluran dana K-PER sebagai berikut.

Alokasi K-PER	Saldo Per 31 Des 2023	Setoran 2024	Saldo Per 31 Des 2024
Bank Nagari Painan 2002	161.041.237,00		161.041.237,00
Bank Nagari Painan 2003	229.451.970,00		229.451.970,00
Bank Nagari Painan 2006	469.441.777,00	440.000,00	469.001.777,00
Bank Nagari Tapan	722.263.000,00		722.113.000,00
Koperasi	107.554.943,00		107.554.943,00
BPR Samudera 2007	33.888.000,00		33.888.000,00
BPR Samudera 2008	49.817.000,00		49.817.000,00
Jumlah	1.773.307.927,00	440.000,00	1.772.867.927,00

	Per 31 Des 2024	Per 31 Des 2023
b. Investasi Permanen	128.233.426.287,08	121.130.236.098,96

Investasi Permanen merupakan saldo Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan pada perusahaan daerah dan lembaga keuangan posisi per 31 Desember 2024 dan 2023. Rincian saldo Investasi Permanen untuk masing-masing badan usaha atau perusahaan sebagai berikut.

Uraian	Saldo Per 31 Des 2024	Saldo Per 31 Des 2023
PT Bank Pembangunan Daerah Sumatera Barat (Bank Nagari)	58.608.000.000,00	58.608.000.000,00
Perusahaan Umum Daerah (Perumda) Air Minum Tirta Langkisau	63.736.254.915,06	56.640.041.433,69
Perusda Kabupaten Pesisir Selatan	259.000.000,00	259.000.000,00
PT Bank Perkreditan Rakyat Samudera	4.630.171.372,02	4.623.194.665,28
PT Balairung Citrajaya Sumbar (Perseroda)	1.000.000.000,00	1.000.000.000,00
Jumlah	128.233.426.287,08	121.130.236.098,99

Uraian Investasi Permanen disajikan sebagai berikut.

	Per 31 Des 2024	Per 31 Des 2023
1) Bank Nagari	Rp58.608.000.000,00	Rp58.608.000.000,00

Pencatatan dan pelaporan penyertaan modal Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan pada Bank Nagari menggunakan metode biaya karena hanya memiliki hak minoritas dengan persentase kepemilikan kurang dari 20% serta tidak memiliki pengaruh yang signifikan atas manajemen perusahaan. Nilai penyertaan modal Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan pada Bank Nagari per 31 Desember 2024 adalah sebesar nilai rupiah APBD yang telah dicairkan. Penyertaan modal PT Bank Nagari dapat dijelaskan sebagai berikut.

No	Tahun Penyetoran	Nomor Seri	Jumlah saham (Lembar)	Nominal (Rp)
1	20-Sep-07	184.093 – 187.576	3.484	3.484.000.000,00
2	03-Sep-09	352.984 – 353.326	343	343.000.000,00
3	06-Sep-10	392.445 – 397.100	4.656	4.656.000.000,00
4	2012 dan 2013	511.416 – 513.811	6.637	6.637.000.000,00
		573.557 – 573.656		
		683.948 – 687.263		
		739.672 – 740.496		
5	2014	858.921 – 863.746	4.826	4.826.000.000,00
6	2015	998.701 – 1.005.189	6.489	6.489.000.000,00
7	2016	1.241.829 – 1.250.912	9785	9.785.000.000,00
		1.294.393 – 1.295.093		
8	2017	1.449.715 – 1.460.102	10.388	10.388.000.000,00
9	2018	1.562.986 – 1.574.985	12.000	12.000.000.000,00
Jumlah				58.608.000.000,00

Laporan Keuangan PT Bank Pembangunan Daerah Sumatera Barat (Bank Nagari) disajikan pada **Lampiran 22**.

		Per 31 Des 2024	Per 31 Des 2023
2) Perumda Air Minum Tirta Langkisau		Rp63.736.254.915,05	Rp56.640.041.433,40

Pada Tahun 2024, sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 6 Tahun 2023 Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Tirta Langkisau berubah menjadi Perusahaan Umum Daerah (Perumda) Air Minum Tirta Langkisau. Untuk Tahun 2024 Pemerintah Daerah melakukan penambahan investasi permanen pada Perumda Air Minum Tirta Langkisau sebesar Rp7.063.067.047,00, merupakan dana hibah dari Pemerintah Pusat.

Lebih lanjut, dalam laporan keuangan ini dilampirkan Laporan Keuangan Perusahaan Umum Daerah (Perumda) Air Minum Tirta Langkisau tahun buku 2024 pada **Lampiran 23**.

	Per 31 Des 2024	Per 31 Des 2023
3) Perusda Pessel	Rp259.000.000,00	Rp259.000.000,00
Penyertaan modal Pemerintah Daerah Kabupaten Pesisir Selatan pada Perusahaan Daerah seharusnya dicatat dan dilaporkan menggunakan metode ekuitas karena Pemerintah Daerah merupakan investor mayoritas, namun sampai dengan laporan keuangan ini terbit perusahaan tersebut tidak/belum menyusun laporan keuangan yang dapat dijadikan dasar penghitungan penyertaan. Sesuai dengan Hasil Kerja/Rumusan Tim Koordinasi Cek Fisik Perusahaan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2007, diketahui perusahaan ini sudah tidak beroperasi lagi sejak Tahun 1999. Dengan keterbatasan hal tersebut, maka pelaporan nilai penyertaan pada Perusahaan Daerah hanya berdasarkan jumlah realisasi rupiah/setoran tunai dana APBD yang disalurkan dan nilai sarana yang diserahkan pada saat pendirian perusahaan sebesar Rp259.000.000,00. Penyajian nilai penyertaan modal sebesar Rp259.000.000,00 pada Perusahaan Daerah ini telah menjadi temuan BPK pada pemeriksaan laporan keuangan pemerintah daerah Tahun 2010 dan laporan keuangan pemerintah daerah Tahun 2011. Namun nilai ini tetap disajikan karena belum ada peraturan yang menyatakan tentang pelepasan investasi tersebut. Pada Pemeriksaan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Tahun Anggaran 2013, BPK merekomendasikan agar Sekretaris Daerah memerintahkan Inspektorat Daerah untuk melakukan Pemeriksaan Khusus untuk menentukan kelangsungan hidup (<i>going concern</i>) Perusda. Menindaklanjuti rekomendasi tersebut maka telah dilakukan Pemeriksaan Khusus oleh Inspektorat dengan hasil pemeriksaan tertuang dalam LHP Nomor 304/LHP.KS/IDK-PS/XII/2014 tanggal 17 Desember 2014. Pada Tahun 2015, Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan telah menyampaikan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan tentang pencabutan Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2007 tentang Perusda sesuai Surat Bupati Nomor 180/Huk-IV/2015 tanggal 13 April 2015 dan Bupati telah menyampaikan Nota Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan tentang Pencabutan Perusahaan Daerah pada Sidang Paripurna DPRD Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2015.		
4) BPR Samudera	Per 31 Des 2024	Per 31 Des 2023
	Rp4.630.171.372,02	Rp4.617.736.888,97
Jumlah tersebut merupakan saldo Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan pada PT BPR Samudera dalam bentuk kepemilikan saham posisi per 31 Desember 2024 dan 2023. Pemerintah Daerah memiliki 88.913 lembar saham PT BPR Samudra dari total sebanyak 120.000 lembar. Per 31 Desember 2024, total investasi permanen Pemerintah Daerah pada BPR Samudera adalah Rp4.630.171.372,02 dengan porsi kepemilikan 74,09%. Laporan Keuangan PT Bank Perkreditan Rakyat Samudera disajikan pada Lampiran 24.		

	Per 31 Des 2024	Per 31 Des 2023
5) Balairung	Rp1.000.000.000,00	Rp1.000.000.000,00

Jumlah tersebut merupakan saldo Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan pada PT Balairung Citrajaya Sumbar posisi per 31 Desember 2024 dan 2023. Laporan Keuangan PT Balairung Citrajaya Sumbar Tahun Buku 2024 disajikan pada **Lampiran 25**.

	Per 31 Des 2024	Per 31 Des 2023
3. Aset Tetap	Rp2.565.709.129.377,86	Rp2.612.274.910.306,33

Aset Tetap adalah aset berwujud yang mempunyai masa manfaat lebih dari satu periode akuntansi untuk digunakan dalam kegiatan pemerintah atau dimanfaatkan oleh masyarakat umum. Jumlah tersebut merupakan saldo Aset Tetap Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan per 31 Desember 2024 dan 2023. Sesuai Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah, Aset Tetap dicatat sebesar biaya perolehan. Biaya perolehan adalah jumlah kas atau setara kas yang dibayarkan atau nilai wajar imbalan lain yang diberikan untuk memperoleh suatu aset pada saat perencanaan, perolehan atau konstruksi, sampai dengan aset tersebut dalam kondisi dan tempat yang siap untuk dipergunakan.

Pada Tahun 2024 Pemerintah Daerah Kabupaten Pesisir Selatan melakukan penggolongan dan kodefikasi (Mapping) Aset Tetap sesuai dengan Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah Nomor 55 Tahun 2024. Akibat dari dilakukannya mapping ini terdapat perbedaan saldo awal aset tetap pada Saldo Awal Peralatan dan Mesin dan Aset Tetap Lainnya.

Jenis dan saldo Aset Tetap per 31 Desember 2024 dan 2023 adalah sebagai berikut.

	Perkiraan	Per 31 Desember 2024	Per 31 Desember 2023
1	Tanah	220.791.812.948,16	219.066.586.409,65
2	Peralatan dan Mesin	618.874.960.957,11	585.575.177.589,82
3	Gedung dan Bangunan	1.280.583.740.587,62	1.226.450.366.775,77
4	Jalan, Irigasi dan Jaringan	2.480.701.856.637,11	2.449.241.401.381,36
5	Aset Tetap Lainnya	128.882.033.559,55	118.032.311.150,47
6	Konstruksi Dalam Pengerjaan	102.248.910.147,53	101.097.077.446,53
7	Akumulasi Penyusutan Aset Tetap	(2.266.374.185.461,97)	(2.087.188.010.447,27)
	JUMLAH	2.565.709.129.375,11	2.612.274.910.306,33

Rincian Aset Tetap per komponen masing-masing SKPD per 31 Desember 2024 disajikan pada **Lampiran 9**.

Daftar Aset Tetap per 31 Desember 2024 per kelompok aset dapat dilihat pada Buku Inventaris Pemerintah Daerah Pesisir Selatan, pada aplikasi SIPKD Modul Aset, dalam bentuk Kartu Inventaris Barang (KIB) sebagaimana dibawah ini.

Kelompok Aset	Kartu Inventaris Barang
Tanah	KIB A
Peralatan dan Mesin	KIB B
Gedung dan Bangunan	KIB C
Jalan, Irigasi dan Jaringan	KIB D
Aset Tetap Lainnya	KIB E
Konstruksi dalam Pengerjaan	KIB F

	Per 31 Des 2024	Per 31 Des 2023
a) Tanah	Rp220.791.812.948,16	Rp219.066.586.409,65

Jumlah tersebut merupakan nilai tanah yang dimiliki atau dikuasai Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan per 31 Desember 2024 dan 2023. Mutasi saldo Aset Tetap Tanah selama tahun 2024 dapat dijelaskan sebagai berikut.

Saldo awal	219.066.586.409,65
Realisasi Belanja Modal (+)	722.013.920,00
Biaya Penunjang (+)	0,00
Hibah (+)	1.208.480.000,00
Mutasi antar SKPD (+)	0,00
Reklasifikasi (+)	0,00
Lain-lain (+)	0,00
Hibah (-)	654.945,00
Mutasi antar SKPD (-)	0,00
Reklasifikasi (-)	204.612.436,49
Penghapusan (-)	0,00
Lain-Lain	0,00
Saldo Per 31 Des 2024	220.791.812.948,16

Mutasi tambah Aset Tetap Tanah berasal dari pengadaan tanah, baik yang berasal dari rekening belanja modal maupun dari penerimaan hibah. Pengakuan dan pencatatan Aset Tetap Tanah berpedoman pada Peraturan Bupati Nomor 93 Tahun 2018 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah Kabupaten Pesisir Selatan, khususnya Kebijakan Akuntansi Nomor 07 Akuntansi Aset Tetap.

Penambahan dan pengurangan asset tanah dapat diuraikan sebagai berikut:

- Belanja Modal Tanah sebesar Rp722.013.320,00 merupakan Realisasi Belanja Modal Tanah TA. 2024 pada Dinas Kesehatan sebesar Rp366.264.920,00 dan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang sebesar Rp355.749.000,00
- Hibah Masuk sebesar Rp1.208.480.000,00 dengan rincian sebagai berikut:

Rincian	Nilai	Keterangan
Dinas Perdagangan dan Transmigrasi	500.480.000,00	Hibah dari masyarakat Pasa Baruang-Baruang Balantai Kecamatan Koto XI Tarusan dan masyarakat pasa Sungai Sirah Kecamatan Lunang
Dinas Perumahan Permukiman Rakyat Pertanahan dan Lingkungan Hidup	708.000.000,00	Hibah dari Kerapatan Adat Nagari (KAN) Ampang Pulau Kecamatan Koto XI Tarusan
Jumlah	1.208.480.000,00	

ar SKPD sebesar Rp32.432.220,00 dengan rincian sebagai berikut:

No	SKPD	Jenis Barang	Nilai	Ket
1.	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	Tanah SMP 9 Koto XI Tarusan sebesar Rp5.978.840,00 Tanah Akademi Komunitas sebesar Rp7.799.183,00 Tanah SDN 30 Koto Baru Rawang sebesar Rp401.508,00 Tanah SDN 25 Air Tambang sebesar Rp805.021,00	Rp14.984.552,00	Mutasi dari Sekretariat Daerah
2.	Rumah Sakit Umum Daerah	Tanah RSUD M. Zein Painan (tanah relokasi)	Rp17.408.360,00	Mutasi dari Sekretariat Daerah
3.	Dinas Pertanian	Tanah BPP Bayang Utara	Rp39.308,00	Mutasi dari Sekretariat Daerah
Jumlah			Rp32.432.220,00	

- d. Reklasifikasi Aset Tetap sebesar Rp204.612.436,00 dengan rincian sebagai berikut:

No	SKPD	Jenis Barang	Nilai	Ket
1.	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	Tanah SMK 1 Sutera sebesar Rp3.900.000,00 dan Tanah SMK Lunang sebesar Rp11.725.280,00	Rp15.625.280,00	Reklas ke Aset Lain-lain
2.	Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga	Reklasifikasi pavin blok ke tanah	Rp188.987.156,00	Reklas ke Gedung dan Bangunan
Jumlah			Rp204.612.436,00	

- e. Hibah Keluar sebesar Rp654.945,49 merupakan hibah ke Masyarakat (tanah pangkalan ikan) Tarusan.

Nilai dan rincian penambahan dan pengurangan Aset Tetap Tanah per SKPD disajikan pada **Lampiran 9.1**.

	Per 31 Des 2024	Per 31 Des 2023
b) Peralatan dan Mesin	Rp618.874.960.957,11	Rp585.575.177.589,82

Jumlah tersebut merupakan nilai Peralatan dan Mesin yang dimiliki atau dikuasai Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan per 31 Desember 2024 dan 2023. Ringkasan penambahan dan pengurangan Peralatan dan Mesin Tahun 2024 dapat dijelaskan sebagai berikut.

Saldo awal	585.575.177.589,82
Realisasi Belanja Modal (+)	33.851.079.267,00
Biaya Penunjang (+)	226.858.753,00
Hibah/Bantuan Diterima (+)	11.613.815.227,00
Mutasi antar SKPD (+)	1.521.829.676,00
Reklasifikasi (+)	847.932.181,17
Lain-lain (+)	0,00
Hibah/Bantuan diberikan (-)	53.320.000,00
Mutasi Antar SKPD (-)	1.521.829.676,00
Reklasifikasi (-)	6.937.110.579,09
Ekstracom (-)	800.553.673,78
Lain-lain (-)	1.151.267.836,00
Penghapusan (-)	4.297.649.972,00
Saldo Per 31 Des 2024	Rp618.874.960.957,11

Berikut uraian mutasi Aset Tetap Peralatan dan Mesin Tahun Anggaran 2024.

1. Penambahan Aset Tetap Peralatan dan Mesin

- a. Belanja Modal sebesar Rp33.851.079.267,00 pada 36 SKPD
- b. Kapitalisasi Aset/Biaya penunjang sebesar Rp226.858.753,00
- c. Hibah/Bantuan diterima merupakan hibah masuk yang belum dicatat sebesar Rp11.553.309.156,00
- d. Mutasi antar SKPD sebesar Rp1.521.829.676,00
- e. Reklasifikasi Aset Peralatan dan Mesin sebesar Rp847.932.181,17

II. Pengurangan Aset Tetap Peralatan dan Mesin

- a. Hibah/Bantuan yang diterima sebesar Rp53.320.000,00 adalah hibah yang diberikan oleh Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang kepada Kejaksaan Negeri Pesisir Selatan berupa 1 paket kanopi rumah dinas kejaksaan negeri Painan tanggal 26 April 2024.
- b. Mutasi antar SKPD sebesar Rp1.521.829.676,00
- c. Reklasifikasi Pengurangan Aset Rp6.937.110.579,09
- d. Penghapusan sebesar Rp4.297.649.972,00
- e. Ekstrakom sebesar Rp800.553.673,78
- f. Lain-lain sebesar Rp1.151.267.836,00

Rekapitulasi penambahan dan pengurangan Aset Tetap Peralatan dan Mesin per SKPD disajikan pada **Lampiran 9.2**.

	Per 31 Des 2024	Per 31 Des 2023
c) Gedung dan Bangunan	Rp1.280.583.740.587,62	Rp1.226.450.366.775,77

Jumlah tersebut merupakan nilai Gedung dan Bangunan yang dimiliki atau dikuasai Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan per 31 Desember 2024 dan 2023. Ringkasan mutasi Aset Tetap Gedung dan Bangunan Tahun 2024 dapat dijelaskan sebagai berikut.

Saldo awal	1.226.450.366.775,77
Realisasi Belanja Modal (+)	48.036.104.682,47
Biaya Penunjang (+)	9.667.615.190,00
Hibah/Bantuan Diterima (+)	29.316.733.156,00
Mutasi antar SKPD (+)	26.652.318.566,00
Lain-lain (+)	0,00
Reklasifikasi (+)	3.151.423.235,00
Mutasi Antar SKPD (-)	26.652.318.566,00
Hibah/Bantuan diberikan (-)	600.725.536,00
Reklasifikasi (-)	35.179.628.050,62
Ekstrakomtabel (-)	0,00
Penghapusan (-)	28.725.000,00
Lain-lain (-)	229.423.865,00

Saldo awal	1.226.450.366.775,77
Saldo Per 31 Des 2024	1.280.583.740.587,62

Berikut uraian perhitungan mutasi Gedung dan Bangunan Tahun Anggaran 2024:

1. Penambahan Aset Tetap Gedung dan Bangunan

- a. Belanja Modal Sebesar Rp48.036.104.682,47 pada 6 SKPD
- b. Belanja barang dan jasa dikapitalisir/biaya penunjang belanja modal sebesar Rp2.143.344.502,00 pada 11 SKPD
- c. Hibah/bantuan diterima sebesar Rp26.201.023.113,00 pada 4 SKPD
- d. Mutasi antar SKPD sebesar Rp26.652.318.566,00

No	SKPD	Jenis Barang	Nilai	Ket
1.	Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah	Bangunan Gedung Painan Convension Center sebesar Rp25.442.067.447,00 dan Bangunan Taman PCC sebesar Rp198.256.256,00	Rp25.640.323.703,00	Mutasi dari Sekretariat Daerah
2.	Sekretariat Daerah	Rehap rumah dinas bupati	Rp102.397.000,00	Mutasi dari Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
3.	Kecamatan Bayang Utara	Tugu dan rehap kantor camat IV Nagari Bayang Utara	Rp319.112.544,00	Mutasi dari Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
4.	Kecamatan IV Jurai	Rehab Gedung Kantor Camat IV Jurai	Rp395.169.842,00	Mutasi dari Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
5.	Kecamatan Lunang	Rehab Gedung Kantor Camat Lunang	Rp195.315.477,00	Mutasi dari Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
Jumlah			Rp1.521.829.676,00	

- e. Reklasifikasi Aset sebesar Rp3.151.423.235,00 dengan rincian sebagai berikut:
 - Reklasifikasi aset Peralatan dan Mesin ke Gedung dan Bangunan berupa pintu rolling pembatas ruang kelas sebanyak 2 paket @ Rp8.143.500,00 sebesar Rp16.287.000,00
 - Reklasifikasi aset sebesar Rp3.127.636.235,00 merupakan reklasifikasi pavin blok tanah ke Gedung dan bangunan sebesar Rp188.987.156,00 dan reklasifikasi bangunan fasilitas Pariwisata

Timbulun Painan Timur ke aset Gedung dan Bangunan sebesar Rp2.938.649.079,00

- Reklasifikasi konstruksi dalam pengerjaan Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Pertokoan/Koperasi/Pasar ke Bangunan Gedung Tempat Kerja Lainnya sebesar Rp7.500.000,00 pada Dinas Pertanian

2. Pengurangan Aset Tetap Gedung dan Bangunan

- a. Mutasi antar SKPD sebesar Rp26.652.318.566,00 dengan rincian sebagai berikut :

No	SKPD	Jenis Barang	Nilai	Ket
1.	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	- Rehab Bangunan Gedung Kantor Permanen Kantor Camat IV Jurai sebesar Rp395.169.842,00 - Rehab Bangunan Gedung Kantor Kantor Camat IV Nagari Bayang Utara sebesar Rp195.315.477,00 - Rehab Bangunan Gedung Kantor Permanen Kantor Camat IV Nagari Bayang Utara sebesar Rp185.981.000,00 - Pembangunan tugu batas dan gerbang Kacamatan Bayang Utara sebesar Rp128.481.544,00 - Rehab rumah dinas Bupati sebesar Rp102.397.000,00 - DED Penataan dan Pembangunan Parkir Objek Wisata Carocok sebesar Rp.4.650.000,00	Rp1.011.994.863,00	- Mutasi ke Kantor Camat IV Jurai - Mutasi Ke Kantor Camat IV Nagari Bayang Utara - Mutasi ke Kantor Camat IV Nagari Bayang Utara - Mutasi ke Kantor Camat IV Jurai - Mutasi ke Sekretariat Daerah - Mutasi ke Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga
2.	Sekretariat Daerah	- Bangunan Gedung Painan Convension Center (PCC) sebesar Rp25.442.067.447,00 - Bangunan taman Painan Convension Center (PCC) sebesar Rp198.256.256,00	Rp25.640.323.703,00	Mutasi ke Badan Pengelolaan keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah
Jumlah			Rp26.652.318.566,00	

- b. Hibah/bantuan diberikan sebesar Rp600.725.536,00 merupakan hibah yang diberikan oleh Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang kepada Pengadilan Negeri Painan berupa penataan taman dan ruang pelayanan Pengadilan Negeri Painan sebesar Rp202.258.594,00, revitalisasi halaman kantor pengadilan negeri Painan sebesar Rp 197.273.000,00 dan

hibah yang diberikan kepada Kejaksaan Negeri Painan berupa Pembangunan pos jaga rumah Dinas Kejaksaan Negeri Painan dan pembuatan kanopi sebesar Rp201.193.942,00

c. Reklasifikasi pengurangan Aset sebesar Rp35.179.628.050,62

Nilai dan rincian penambahan dan pengurangan Aset Tetap Gedung dan Bangunan per SKPD disajikan pada **Lampiran 9.3**.

	Per 31 Des 2024	Per 31 Des 2023
d) Jalan, Irigasi dan Jaringan	Rp2.480.701.856.637,11	Rp2.449.241.401.381,36

Jumlah tersebut merupakan nilai Jalan, Irigasi, dan Jaringan yang dimiliki atau dikuasai Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan posisi 31 Desember 2024 dan 2023. Ringkasan penambahan dan pengurangan aset tetap Jalan, Irigasi, dan Jaringan Tahun 2024 dapat dijelaskan sebagai berikut.

Saldo awal	2.449.241.401.381,36
Realisasi Belanja Modal (+)	80.657.217.781,00
Biaya Penunjang (+)	270.230.000,00
Mutasi Antar SKPD (+)	198.010.000,00
Hibah/Bantuan Diterima (+)	16.637.130.620,00
Reklasifikasi (+)	7.086.769.154,75
Mutasi Antar SKPD (-)	198.010.000,00
Reklasifikasi (-)	72.737.756.286,00
Penghapusan (-)	0,00
Lain-lain (-)	453.136.014,00
Saldo Per 31 Des 2024	2.480.701.856.637,11

Nilai dan rincian penambahan dan pengurangan Aset Tetap Jalan, Irigasi, dan Jaringan per SKPD disajikan pada **Lampiran 9.4**.

Uraian perhitungan penambahan dan pengurangan Jalan, Irigasi dan Jaringan Tahun Anggaran 2024 dapat digambarkan sebagai berikut:

1. Penambahan Aset Tetap Jalan, Irigasi dan Jaringan
 - a. Belanja Modal sebesar Rp80.657.217.781,00 dengan rincian belanja modal Jalan, Irigasi dan Jaringan pada Dinas Kesehatan sebesar Rp1.188.739.500,00 dan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang sebesar Rp79.468.478.281,00
 - b. Biaya penunjang aset tetap sebesar Rp270.230.000,00 yang terdiri dari:

- 1) Biaya penunjang aset/belanja barang dan jasa yang dikapitalisir sebesar Rp260.230.000,00 pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang berupa honorarium pengadaan barang dan jasa rehabilitasi jalan sebesar Rp39.900.000,00, honorarium pengadaan barang/jasa Pembangunan jembatan sebesar Rp21.870.000,00 dan honorarium pengadaan barang dan jasa sebesar Rp6.360.000,00
- 2) Biaya penunjang aset/belanja barang dan jasa yang dikapitalisir sebesar Rp10.000.00,00 pada Dinas Perhubungan berupa jasa konsultasi perencanaan arsitektur jasa desain arsitektural sebesar Rp5.000.000,00 dan jasa konsultasi pengawasan arsitektur sebesar Rp5.000.000,00
- c. Mutasi antar SKPD sebesar Rp198.010.000,00 yaitu mutasi ke Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga berupa jembatan asmara pada carocok Painan dari Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang.
- d. Hibah/bantuan dari Dirjen Cipta Karya yang diterima oleh Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman, Pertanahan dan Lingkungan Hidup sebesar Rp16.637.130.620,00 berupa instalasi pengolahan sampah non organik.
- e. Reklasifikasi Aset sebesar Rp7.086.769.154,75 pada 5 SKPD antara lain Dinas Kesehatan, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Dinas Perhubungan, Dinas Perdagangan dan Transmigrasi, Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga.
2. Pengurangan Aset Tetap Jalan, Irigasi dan Jaringan
 - a. Mutasi antar SKPD
Mutasi Jalan, Irigasi dan Jaringan antar SKPD sebesar Rp198.010.000,00 mutasi dari Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang ke Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga berupa jembatan asmara pada carocok Painan
 - b. Reklasifikasi Aset sebesar Rp72.737.756.266,00
 - 1) Reklasifikasi Jalan, Irigasi dan Jaringan sebesar Rp418.107.410 merupakan aset yang direklasifikasi ke dalam Konstruksi Dalam Pengerjaan (KDP) pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang dengan rincian sebagai berikut:

No	Uraian	Jumlah
1	2	3
1.	DED Rehabilitasi Jaringan Irigasi di Bukik Kaciak	Rp4.831.410,00
2.	Review Desain Perencanaan DED Pembangunan Jembatan Gantung Talang Medan Pondok Parian Lunang Utara Kecamatan Lunang	Rp94.635.000,00

3.	Perencanaan DED penyusunan dokumen lingkungan usulan Inpres Jalan Daerah TA. 2024 tersebar di Kabupaten Pesisir Selatan	Rp94.677.000
4.	Perencanaan DED jembatan rangka Muara Sakai	Rp94.524.000,00
5.	Rehabilitasi Jembatan Silaut Kecamatan Silaut	Rp4.800.000,00
6.	Landscape Kawasan jembatan wisata Carocok Painan Kecamatan IV Jurai	Rp49.830.000,00
7.	DED Pembangunan jembatan pasar Baru Lumpo (Depan SMA 2 Bayang) Kecamatan Bayang	Rp74.810.000,00
	Jumlah	Rp418.107.410,00

- 2) Reklasifikasi Jalan, Irigasi dan Jaringan sebesar Rp72.319.648.876 merupakan aset yang direklasifikasi ke dalam Aset lain-lain pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang merupakan Aset Investasi PDAM berupa hibah Provinsi Sumatera Barat sebesar Rp22.193.154.123,00 dan Hibah Kementerian PUPR sebesar Rp50.126.494.753,00

	Per 31 Des 2024	Per 31 Des 2023
e) Aset Tetap Lainnya	Rp128.882.033.559,55	Rp118.032.311.150,47

Jumlah tersebut merupakan nilai Aset Tetap Lainnya yang dimiliki atau dikuasai Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan posisi 31 Desember 2024 dan 2023. Ringkasan penambahan dan pengurangan aset tetap Lainnya Tahun 2024 dapat dijelaskan sebagai berikut.

Saldo awal	118.032.311.150,47
Realisasi Belanja Modal (+)	8.812.130.600,00
Biaya Penunjang (+)	1.889.999,00
Mutasi Antar SKPD (+)	0,00
Hibah (+)	0,00
Reklasifikasi (+)	2.627.154.362,08
Mutasi Antar SKPD (-)	0,00
Reklasifikasi (-)	385.264.000,00
Penghapusan (-)	190.044.052,00
Lain-lain (-)	16.144.500,00
Saldo Per 31 Des 2024	128.882.033.559,55

Nilai dan rincian penambahan dan pengurangan Aset Tetap Lainnya per SKPD disajikan pada **Lampiran 9.5**.

Berikut uraian perhitungan mutasi Aset Tetap Lainnya Tahun Anggaran 2024 :

1. Penambahan Aset Tetap Lainnya
 - a. Belanja Modal Aset Tetap Lainnya sebesar Rp8.812.130.600,00 dengan rincian Belanja Modal Aset Tetap Lainnya pada Dinas Pendidikan dan

Kebudayaan sebesar Rp8.788.205.600,00, Dinas Kesehatan sebesar Rp12.800.000,00 dan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik sebesar Rp11.125.000,00

- b. Kapitalisasi Aset merupakan belanja barang dan jasa yang dikapitalisasi pada Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Tenaga Kerja berupa marawa besar sebesar Rp1.899.999,00
 - c. Reklasifikasi Aset Tetap lainnya sebesar Rp2.627.154.362,08
2. Pengurangan Aset Tetap Lainnya
- a. Reklasifikasi aset sebesar Rp385.264.000,00 dengan rincian sebagai berikut:
 - Reklasifikasi Aset Tetap Lainnya Rp9.715.000,00 ke Aset Tetap Peralatan dan Mesin berupa sound system sebanyak 1 unit sebesar Rp4.440.000,00, papan nama Instansi sebanyak 1 paket sebesar Rp2.500.000,00, Sound System sebanyak 1 paket sebesar Rp2.775.000,00 pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
 - Reklasifikasi Aset Tetap Lainnya berupa pagar dermaga kondisi rusak berat ke Aset Lain-lain sebesar Rp361.424.000,00 pada Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga
 - Reklasifikasi Aset Tetap Lainnya ke Peralatan dan Mesin berupa sound system sebanyak 1 paket sebesar Rp11.125.000,00 pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
 - Reklasifikasi Aset Tetap Lainnya ke Peralatan dan Mesin sebesar Rp3.000.000,00 pada Kecamatan Bayang Utara

	Per 31 Des 2024	Per 31 Des 2023
f) Konstruksi Dalam Pengerjaan	Rp102.248.910.147,53	Rp101.097.077.446,53

Jumlah tersebut merupakan nilai Aset Tetap Konstruksi Dalam Pengerjaan Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan posisi 31 Desember 2024 dan 2023. Ringkasan penambahan dan pengurangan Aset Tetap Konstruksi Dalam Pengerjaan Tahun 2024 dapat dijelaskan sebagai berikut.

Saldo awal	101.097.077.446,53
Mutasi Tambah	5.924.888.119,00
Mutasi Kurang	4.773.055.418,00
Saldo Per 31 Des 2024	102.248.910.147,53

Nilai dan rincian penambahan dan pengurangan Aset Tetap Konstruksi Dalam Pengerjaan per SKPD disajikan pada **Lampiran 9.6** dan Rincian Aset Tetap Konstruksi Dalam Pengerjaan pada **Lampiran 9.6.1**.

Berikut uraian perhitungan mutasi Konstruksi Dalam Pengerjaan Tahun Anggaran 2024 :

1. Penambahan Konstruksi Dalam Pengerjaan sebesar Rp5.924.888.119,00 dengan rincian sebagai berikut :
 - a. Konstruksi Dalam Pengerjaan sebesar Rp4.176.796.709,00 berupa Pembangunan Puskesmas Pasar Kuok pada Dinas Kesehatan
 - b. Konstruksi Dalam Pengerjaan sebesar Rp1.748.091.410,00 pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang dengan rincian sebagai berikut:

No	Uraian	Jumlah
1.	DED penataan dan Pembangunan parkir objek wisata Carocok Painan	Rp4.650.000,00
2.	DED Rehabilitasi Jaringan Irigasi di Bukik Kaciak	Rp4.831.410,00
3.	Review Desain Perencanaan DED Pembangunan Jembatan Gantung Talang Medan Pondok Parian Lunang Utara Kecamatan Lunang	Rp94.635.000,00
4.	Perencanaan DED penyusunan dokumen lingkungan usulan Inpres Jalan Daerah TA. 2024 tersebar di Kabupaten Pesisir Selatan	Rp94.677.000,00
5.	Perencanaan DED jembatan rangka Muara Sakai	Rp94.524.000,00
6.	Rehabilitasi Jembatan Silaut Kecamatan Silaut	Rp4.800.000,00
7.	DED Pembangunan Jembatan Pasar Baru Lumpo (Depan SMA 2 Bayang) Kecamatan Bayang	Rp74.810.000,00
8.	DED Rehabilitasi Jaringan Irigasi di Dwikora	Rp11.933.000,00
9.	DED Rehabilitasi Jaringan Irigasi Sungai Baramah Ampuan	Rp11.933.000,00
10.	DED Rehabilitasi Jaringan Irigasi D.I Banda Gadang Pancung Taba	Rp24.855.000,00
11.	DED Rehabilitasi Jaringan Irigasi D.I Kayu Jao	Rp21.908.000,00
12.	DED Rehabilitasi Jaringan Irigasi D.I Lumpo II	Rp41.594.000,00
13.	DED Rehabilitasi Jaringan Irigasi D.I Sawah Rumah Gadang	Rp24.356.000,00
14.	Penyusunan Grand Desain Timbulun	1.188.755.000,00
15.	Landscape Kawasan Jembatan Wisata Carocok Painan Kec. IV Jurai	49.830.000,00
Jumlah		Rp1.748.091.410,00

2. Pengurangan Konstruksi Dalam Pengerjaan sebesar Rp4.773.055.418,00 dengan uraian sebagai berikut:

- a. Pengurangan Konstruksi Dalam Pengerjaan pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang sebesar Rp1.826.906.339,00 merupakan reklasifikasi ke Jalan Irigasi dan Jaringan dengan rincian sebagai berikut:

No	Uraian	Jumlah
1.	Pekerjaan Survey Inventory Jalan (PKRMS) untuk Usulan DAK TA.2024	Rp99.795.000,00
2.	Peningkatan jaringan irigasi DI. Sungai Gemuruh Kec. Pancung Soal	Rp1.471.920.823,00
3.	Penyusunan Dokumen Lingkungan Usulan DAK TA.2024 Tematik Pariwisata	Rp72.939.000,00
4.	DED Jalan Usulan DAK 2024 Tematik Pariwisata tersebar di Kabupaten Pesisir Selatan	Rp72.824.000,00
5.	DED Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan Non Tematik Usulan DAK TA.2024	Rp76.682.000,00
6.	DED Rehabilitasi Saluran Irigasi DI Sarasah, DI Sungai Tawa dan DI Sarasah Sungai Putih	Rp32.745.516,00
	Jumlah	Rp1.826.906.339,00

- b. Pengurangan Konstruksi Dalam Pengerjaan Pada Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga sebesar Rp2.938.649.079,00 berupa UKL/UPL Sarana dan Prasarana Objek Wisata Air Terjun Timbulun dan pengerjaan penataan Kawasan timbulun
- c. Reklasifikasi Konstruksi Dalam Pengerjaan ke Gedung dan Bangunan pada Dinas Pertanian sebesar Rp7.500.000,00 berupa DED Rehab Balai Penyuluhan Kecamatan (BPP) Kecamatan Ranah Ampek Hulu Tapan.

	Per 31 Des 2024	Per 31 Des 2023
g) Akumulasi	(Rp2.266.374.185.459,22)	(Rp2.087.188.010.447,27)

Penyusutan Aset Tetap

Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan mengatur tentang Penyusutan Aset Tetap dengan Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 55 Tahun 2024 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah Kabupaten Pesisir Selatan. Akumulasi penyusutan merupakan kumpulan penyusutan pada aset tetap milik Pemerintah Daerah yang terakumulasi sampai Tahun pelaporan. Dalam hal ini penghitungan penyusutan dilakukan secara tahunan. Ringkasan penyusutan per kelompok aset yang disusutkan adalah sebagai berikut.

Rincian	Saldo per 31 Des 2023	Beban Penyusutan 2024	Koreksi Akumulasi	Koreksi Akumulasi	Akumulasi Penyusutan
---------	-----------------------	-----------------------	-------------------	-------------------	----------------------

			Penyusutan Bertambah	Penyusutan Berkurang	31 Des 2024
Peralatan dan Mesin	477.030.415.656,45	48.486.652.684,29	6.336.625.715,54	11.813.222.010,68	520.040.472.045,60
Gedung dan Bangunan	262.848.435.983,74	24.497.314.291,61	3.336.109.244,11	4.259.394.725,49	286.422.464.793,97
Jalan, Irigasi dan Jaringan	1.347.309.158.805,64	110.003.315.285,84	4.991.139.186,00	10.347.091.385,08	1.451.956.521.892,39
Aset Tetap lainnya	0,00	663.242.839,50	7.291.483.887,75	0,00	7.954.726.727,25
Jumlah	2.087.188.010.433,99	183.650.525.101,24	21.955.358.033,39	26.419.708.121,25	2.266.374.185.459,22

Nilai dan rincian Penyusutan Aset Tetap per SKPD disajikan pada **Lampiran 10** serta Rekapitulasi Penghapusan BMD Tahun 2024 disajikan pada **Lampiran 13**.

	Per 31 Des 2024	Per 31 Des 2023
4. Dana Cadangan	Rp0,00	Rp0,00

Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan tidak memiliki saldo Dana Cadangan per 31 Desember 2024 dan 2023.

	Per 31 Des 2024	Per 31 Des 2023
5. Aset Lainnya	Rp162.672.429.460,41	Rp6.368.748.299,67

Saldo tersebut merupakan saldo Aset Lainnya per 31 Desember 2024 dan 2023. Aset Lainnya adalah aset yang tidak dapat dikelompokkan ke dalam aktiva lancar, aktiva tetap dan Investasi Jangka Panjang. Saldo Aset Lainnya per 31 Desember 2024 terdiri dari Dana Bagi Hasil Pemerintah Pusat yang disimpan pada Treasury Depocit Facility (TDF), Sisa Tuntutan Ganti Rugi temuan dari hasil temuan pemeriksaan yang lakukan oleh BPK RI, Kemitraan dengan Pihak Ketiga, Aset Tidak Berwujud dan Aset Lain-Lain. Aset Lain-Lain merupakan barang atau aset yang akan dihibahkan ke Perusda Air Minum Tirta Langkisau dan instansi Pendidikan Provinsi Sumatera Barat, Barang Milik Daerah dalam kondisi rusak berat dan tidak dapat digunakan lagi untuk operasional instansi. Ringkasan Aset Lainnya Tahun 2024 disajikan sebagai berikut.

Rincian	Per 31 Des 2024	Per 31 Des 2023
Dana Bagi Hasil – TDF	161.876.000,00	4.240.704.000,00
Tagihan Jangka Panjang	12.130.858.192,53	93.000.000,00
Kemitraan dengan Pihak Ketiga	126.000.000,00	126.000.000,00
Aset Tidak Berwujud	5.782.821.784,34	4.252.153.218,34
Akumulasi Amortisasi Aset Tidak Berwujud	(4.177.961.156,23)	(4.084.837.454,00)
Aset Lain-lain	173.593.087.334,94	2.913.565.973,54

Rincian	Per 31 Des 2024	Per 31 Des 2023
Akumulasi Penyusutan Aset Lain-lain	(24.944.252.695,17)	(1.171.837.438,21)
Jumlah	162.672.429.460,41	6.368.748.299,67

Rincian Aset Lainnya untuk masing-masing SKPD pe 31 Desember 2024 disajikan pada mutasi tambah kurang Aset Lainnya untuk Tahun 2024 disajikan pada **Lampiran 11**. Lebih lanjut komponen Aset Lainnya diuraikan sebagai berikut.

	Per 31 Des 2024	Per 31 Des 2023
a) Dana Bagi Hasil Treasury Depocit Facility (DBH – TDF)	Rp161.876.000,00	Rp4.240.704.000,00

Treasury Depocit Facility (TDF) merupakan fasilitas yang disediakan oleh Bendahara Umum Negara (BUN) bagi pemerintah daerah sebagai sarana penyaluran transfer ke daerah dalam bentuk nontunai berupa penyimpanan di Bank Indonesia (BI) sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 19 Tahun 2023. Berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 10/KM.5/2022 tentang Pembentukan dan Pengelolaan *Treasury Deposit Facility* dalam Rangka Penyaluran Dana Bagi Hasil Tahun Anggaran 2022 dalam Bentuk Non Tunai, untuk Kabupaten Pesisir Selatan disalurkan pada Nomor Rekening 519000220980. Informasi tentang dana DBH-TDF Tahun 2024 diperoleh dari aplikasi omspan berdasarkan Lampiran 7 ND Nomor 136/ND/XV/03/2025.

	Per 31 Des 2024	Per 31 Des 2023
b) Tagihan Jangka Panjang	Rp12.130.858.192,53	Rp93.000.000,00

Tagihan Jangka Panjang berupa Tuntutan Ganti Rugi (TGR) 2024 adalah sisa saldo TGR 2013 sebesar Rp116.725.546,00. Saldo tersebut merupakan TGR yang ditetapkan berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan BPK Nomor 06.C/LHP/XVIII.PDG/04/2013 tanggal 25 April 2013 terdapat ketekoran kas sebesar Rp273.390.413,00 pada sekretariat DPRD yang dianggap sebagai TGR sehingga masing-masing pihak terkait harus menyetorkan ke Kas Daerah.

Status Penyelesaian Kerugian Negara/ Daerah		Sisa
		Nilai
A. Informasi		11.532.307.279,53
Total Keseluruhan Kasus		
	1. LHP BPK	9.368.029.384,50
	2. Selain LHP BPK	2.164.277.895,03
B. Proses		380.632.500,00
Total Keseluruhan Kasus		

1. LHP BPK	
a. Bendahara	91.299.500,00
2. Selain LHP BPK	289.333.000,00
C. Penetapan	217.918.413,00
Total Keseluruhan Kasus	
1. LHP BPK	
2. Selain LHP BPK	217.918.413,00
TOTAL	12.130.858.192,53
TOTAL KESELURUHAN KASUS	

	Per 31 Des 2024	Per 31 Des 2023
c) Kemitraan dengan Pihak Ketiga	Rp126.000.000,00	Rp126.000.000,00

Kemitraan dengan Pihak Ketiga merupakan kerja sama Bangun Guna Serah (BGS) antara Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan dengan CV Pincuran Boga. Kerja sama tersebut berdasarkan Perjanjian Kerja Sama Nomor 13 Tahun 2005 dengan CV Pincuran Boga untuk Pembangunan Pabrik Es Balok dan Lokasi Bongkar Muat Es. Jangka waktu perjanjian 25 tahun dan akan berakhir pada Tahun 2030. Dalam hal ini CV Pincuran Boga menggunakan tanah Pemerintah Daerah untuk mendirikan dan mengoperasikan pabrik pembuatan es balok. Nilai Kemitraan dengan Pihak Ketiga yang dicatat adalah sebesar harga perolehan tanah tersebut.

	Per 31 Des 2024	Per 31 Des 2023
d) Aset Tidak Berwujud	Rp5.782.821.784,34	Rp4.252.153.218,34

Aset Tidak Berwujud (ATB) adalah aset non-moneter yang tidak mempunyai wujud fisik, dan merupakan salah satu jenis aset yang dimiliki oleh Pemerintah Daerah. Terdapat penambahan saldo Aset Tidak Berwujud disebabkan perubahan kebijakan akuntansi yang berasal dari reklasifikasi dari Aset Tetap Peralatan dan Mesin Sebesar Rp1.530.668.556,00 pada Dinas Pendidikan.

Mutasi Aset Tidak Berwujud Tahun 2024 disajikan sebagai berikut.

Saldo Awal	4.252.153.218,34
Saldo Awal Karena Perubahan Kebijakan	0,00
Mutasi Tambah	1.530.668.556,00
Mutasi Kurang	0,00
Saldo Akhir	5.782.821.784,34

Rincian mutasi Aset Tidak Berwujud untuk masing-masing SKPD Tahun 2024 disajikan pada **Lampiran 10.5**.

	Per 31 Des 2024	Per 31 Des 2023
e) Akumulasi Amortisasi	(Rp4.177.961.156,23)	(Rp4.084.837.454,00)

Aset Tidak Berwujud

Jumlah tersebut merupakan saldo Akumulasi Amortisasi Aset Tidak Berwujud per 31 Desember 2024 dan 2023. Amortisasi Aset Tidak Berwujud dilakukan sesuai dengan Peraturan Bupati Nomor 55 Tahun 2024 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah Kabupaten Pesisir Selatan. Pada saat penyusunan laporan keuangan ini belum didapatkan penambahan amortisasi Aset Tak Berwujud baik penambahan beban amortisasi maupun koreksi amortisasi akibat perubahann kebijakan. Mutasi Akumulasi Amortisasi Aset Tidak Berwujud per SKPD disajikan pada **Lampiran 11.5**

		Per 31 Des 2024	Per 31 Des 2023
f) Aset Lain-lain		Rp173.593.087.334,94	Rp2.913.565.973,54
Aset	Saldo awal	2.913.565.973,54	
	Realisasi Belanja Modal (+)	0,00	
	Biaya Penunjang (+)	0,00	
	Mutasi Antar SKPD (+)	0,00	
	Hibah (+)	71.129.126.910,40	
	Reklasifikasi (+)	99.550.394.451,00	
	Mutasi Antar SKPD (-)	0,00	Tetap yang
	Reklasifikasi (-)	0,00	
	Penghapusan (-)	0,00	
	Lain-lain (-)	0,00	
Saldo Per 31 Des 2024		173.593.087.334,94	

dimaksudkan untuk dihentikan dari penggunaan aktif pemerintah direklasifikasi ke dalam Aset Lain-Lain. Terdapat penambahan saldo Aset Lain-Lain sebesar Rp99.550.394.451,00 dikarenakan adanya Reklasifikasi dari Aset Tetap Jalan, Irigasi dan Jaringan pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang yang merupakan aset yang dikelola oleh Perusahaan Umum Daerah (Perumda Air Minum) sebesar Rp72.700.849.876,00, Aset Tetap yang akan dihibahkan ke Universitas Negeri Padang berupa Bangunan Asrama Mahasiswa sebesar Rp14.438.691.500,00, Hibah ke Dinas Pendidikan Sumatera Barat berupa Bangunan Asrama Siswa SMA Negeri 3 Painan sebesar Rp11.137.134.935,00 dan Peralatan dan Mesin berupa meubiler di Asrama Siswa SMA Negeri 3 Painan sebesar Rp1.273.718.140,00. Selain itu Aset Lain-Lain per 31 Desember 2024 merupakan Aset yang sudah rusak berat dan menunggu proses penghapusan. Berikut Ringkasan Penambahan dan Pengurangan Aset lain-Lain Tahun 2024;

Rincian mutasi tambah dan kurang Aset lain-lain per SKPD disajikan pada **Lampiran 11.6**.

	Per 31 Des 2024	Per 31 Des 2023
g) Akumulasi Penyusutan Aset Lain-lain	(Rp24.944.252.695,17)	(Rp1.171.837.438,21)

Terdapat penambahan beban penyusutan atas Aset Lain-lain. Hal tersebut sesuai dengan Buletin Teknis Nomor 18 tentang Akumulasi Penyusutan Berbasis Akrua dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2019 tentang Penyusutan. Penyusutan berasal dari aset Tetap yang akan dihibahkan kepada Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Barat sebesar Rp26.849.544.575,00. Terhadap BMD dalam kondisi rusak berat tidak dilakukan penyusutan.

	Per 31 Des 2024	Per 31 Des 2023
5.3.2. Kewajiban	Rp74.162.837.023,78	Rp56.830.251.407,00

Kewajiban merupakan utang akibat peristiwa masa lalu yang menyebabkan adanya aliran keluar sumber daya ekonomi di masa yang akan datang.

	Per 31 Des 2024	Per 31 Des 2023
1) Kewajiban Jangka Pendek	Rp74.162.837.023,78	Rp57.522.812.950,10

Kewajiban Jangka Pendek merupakan utang yang harus dibayar kembali atau jatuh tempo dalam 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan. Rincian Kewajiban Jangka Pendek Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan per 31 Desember 2024 dan 2023 adalah sebagai berikut.

Perkiraan	Per 31 Des 2024	Per 31 Des 2023
Utang Perhitungan Pihak Ketiga	0,00	0,00
Utang Bunga	0,00	0,00
Bagian Lancar Utang Jangka Panjang	0,00	0,00
Pendapatan Diterima Dimuka	108.001.108,00	109.224.788,00
Utang Belanja dan Transfer	69.463.198.286,33	53.915.720.900,10
Utang Jangka Pendek Lainnya	4.591.637.629,45	3.497.867.262,00
JUMLAH	74.162.837.023,78	57.522.812.950,10

Lebih lanjut, Kewajiban Jangka Pendek diuraikan sebagai berikut.

	Per 31 Des 2024	Per 31 Des 2023
a) Utang Perhitungan Pihak Ketiga	Rp0,00	Rp0,00

Jumlah tersebut merupakan saldo Utang Perhitungan Pihak Ketiga (PFK) per 31 Desember 2024 dan 2023. Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan tidak memiliki saldo Utang Bunga per 31 Desember 2024 dan 2023.

	Per 31 Des 2024	Per 31 Des 2023
b) Bagian Lancar Utang Jangka	Rp0,00	Rp0,00

Panjang

Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan tidak memiliki saldo Utang Bunga per 31 Desember 2024 dan 2023.

	Per 31 Des 2024	Per 31 Des 2023
c) Pendapatan Diterima Dimuka	Rp108.001.108,00	Rp109.224.788,00

Jumlah tersebut merupakan Pendapatan Diterima Dimuka per 31 Desember 2024 dan 2023. Saldo per 31 Desember 2023 merupakan Pendapatan Diterima Dimuka yang berasal dari Pajak Reklame yang dikelola Badan Pengelolaan Keuangan Pendapatan dan Aset Daerah dengan jangka waktu kontrak sewa melewati 31 Desember 2024 atau jatuh tempo pada Tahun 2024 sebesar Rp91.334.441,00, Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah Dinas Kesehatan – RSUD dr. M. Zein Painan berupa sewa bangunan ATM Bank Nagari dan Bank BRI untuk Tahun 2025. Rincian Pendapatan Diterima Dimuka disajikan pada **Lampiran 12.4.**

	Per 31 Des 2024	Per 31 Des 2023
d) Utang Belanja dan Transfer	Rp69.463.198.286,33	Rp53.915.720.900,10

Jumlah tersebut merupakan Utang Belanja dan Transfer per 31 Desember 2024 dan 2023. Pengakuan Utang dilakukan berdasarkan perbandingan persentase pembayaran kegiatan dengan persentase penyelesaian fisik kegiatan, serta tagihan pembayaran dari pihak ketiga. Utang Belanja dan Transfer per 31 Desember 2024 dapat dirinci sebagai berikut.

Perkiraan	Saldo
Utang Belanja Pegawai	23.501.470.300,00
Utang Belanja Barang dan Jasa	15.349.530.430,23
Utang Belanja Modal	30.612.197.556,10
Utang Belanja	69.463.198.286,33

Utang belanja pegawai merupakan utang pembayaran Tunjangan Profesi Guru THR dan Tunjangan Profesi Guru Gaji Ke 13 Guru PNS dan PPPK (TK, SD, SMP dan Pegawai Sekolah), Tunjangan Profesi Guru Triwulan III dan IV, Tunjangan Guru Daerah Khusus Triwulan IV Tahun 2024. 50% TPG sebagai salah satu elemen pembayaran THR Tahun 2024 untuk 2.333 orang guru PNSD dan 345 guru PPPK sebanyak Rp11.633.654.300,00 dan Gaji ke 13 Tahun 2024 untuk 2.298 orang guru PNSD dan 345 guru PPPK sebanyak Rp11.447.431.500,00 yang belum dibayarkan sampai akhir tahun 2024. Kekurangan Penundaan pembayaran disebabkan karena pencairan 50% TPG yang berasal dari DAU tambahan yang baru disalurkan dan masuk ke Kas

Daerah tanggal 31 Desember 2024 sebanyak Rp23.058.359.000,00. Utang Pegawai ini telah direalisasikan pada tanggal 20 Januari 2025 sebanyak Rp23.081.085.800,00 dengan pencairan SP2D Nomor:13.01/14.0/00004/LS/1.01.2.22.0.00.02.0000/M/1/2025 sebesar Rp11.447.431.500,00 untuk pembayaran TPGF Guru Tunjangan Gaji Ketiga Belas Tahun 2024 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan dan pencairan SP2D Nomor 13.01/14.0/00005/LS/ 1.01.2.22.0.00.02.0000/M/1/2025 sebesar Rp.11.633.654.300,00. Utang belanja pegawai yang belum dibayarkan adalah Tunjangan Khusus Guru PNSD sebesar Rp137.975.900,- dan Tunjangan Profesi Guru Triwulan 3 dan Triwulan 4 Tahun 2024 sebesar Rp282.408.600,00.

Utang Belanja dan Transfer per 31 Desember 2024 merupakan Utang Belanja Barang dan Jasa pada RSUD dr. M. Zein Painan dengan rincian sebagai berikut.

Perkiraan	Saldo
Utang Obat	5.871.840.214,53
Utang BMHP	4.276.929.771,70
Utang Jasa Pelayanan BPJS	5.016.722.418,00
Utang Jasa Kerja Sama dengan Pihak Ketiga	162.108.166,00
Utang Kegiatan Ambulance Rujukan (Jasa Supir-Perawat Merujuk)	21.929.860,00
Utang Barang dan Jasa	15.349.530.430,23

Untuk Utang Belanja Modal merupakan utang pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang dan Badan Penanggulangan Bencana Daerah. Diantara Utang Belanja Modal Pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang terdapat Utang kepada PT Waskita Karya sebesar Rp30.256.453.168,00 yang merupakan sisa pembayaran atas pekerjaan Relokasi RSUD dr. M. Zein Painan. Rincian Utang Belanja dan Transfer per SKPD disajikan pada **Lampiran 12.5**.

	Per 31 Des 2024	Per 31 Des 2023
e) Utang Jangka Pendek Lainnya	Rp4.591.637.629,45	Rp3.497.867.262,00

Jumlah tersebut merupakan Utang Jangka Pendek lainnya per 31 Desember 2024 dan 2023. Utang Jangka Pendek Lainnya per 31 Desember 2024 terdiri atas Utang Jasa Pelayanan, Utang Gaji dan Honorarium, Utang tagihan listrik, air dan telepon SKPD untuk bulan Desember 2023. Utang Jangka Pendek Lainnya per 31 Desember 2024 dapat dirinci sebagai berikut.

Perkiraan Utang	Saldo
Gaji dan Honorarium	769.107.700,00
Utang Barang dan Jasa	3.708.905.227,45
Tagihan BPJS Non ASN	615.312,00

Listrik, Air, Telepon	113.009.390,00
Utang Belanja	4.591.637.629,45

Pada TA 2024 telah dilakukan pembayaran atas Utang Jangka Pendek Lainnya yang terdiri dari tagihan listrik, air dan telepon SKPD untuk bulan Desember 2024. Rincian Utang Jangka Pendek Lainnya per SKPD disajikan dalam **Lampiran 12.6**.

	Per 31 Des 2024	Per 31 Des 2023
2) Kewajiban Jangka Panjang	Rp0,00	Rp0,00

Kewajiban Jangka Panjang merupakan kewajiban yang harus dibayar kembali dengan jatuh tempo atau periode pelunasan lebih dari satu periode akuntansi atau satu tahun. Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan tidak memiliki Kewajiban Jangka Panjang per 31 Desember 2024 dan 2023.

	Per 31 Des 2024	Per 31 Des 2023
5.3.3. Ekuitas	Rp2.928.278.695.352,29	Rp2.876.465.237.406,79

Ekuitas merupakan gambaran kekayaan bersih Pemerintah Daerah atas aset setelah dikurangi dengan kewajibannya. Saldo tersebut di atas merupakan saldo Ekuitas Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan per 31 Desember 2024 dan 2023.

5.4. PENJELASAN POS-POS LAPORAN OPERASIONAL

Laporan Operasional menyajikan informasi mengenai seluruh kegiatan operasional keuangan yang tercermin dalam Pendapatan-LO, Beban-LO, dan Surplus/Defisit Operasional dan penyajiannya disandingkan dengan periode sebelumnya. Laporan Operasional memiliki keterkaitan dengan Laporan Perubahan Ekuitas dan Neraca daerah disebabkan Laporan Operasional merupakan laporan berbasis akrual yang semua akun-akunnya mempengaruhi ekuitas entitas akuntansi. Untuk mendapatkan gambaran secara keseluruhan mengenai kegiatan operasional baik berupa pendapatan maupun beban operasional dapat diuraikan sebagai berikut

	Tahun 2024	Tahun 2023
5.4.1. Pendapatan Operasional	Rp1.660.189.093.679,97	Rp1.551.906.642.878,62

Jumlah tersebut merupakan Pendapatan Operasional Tahun 2024 dan 2023. Pendapatan Operasional Tahun 2024 adalah sebesar Rp1.660.189.099.679,97, mengalami peningkatan sebesar Rp108.282.450.801,35 atau 6,52% dibanding periode sebelumnya yaitu sebesar Rp1.551.906.642.878,62. Jika dibandingkan dengan realisasi Pendapatan Daerah pada LRA TA 2024 sebesar Rp1.690.884.513.877,88, Pendapatan Daerah-LO lebih rendah sebesar Rp30.695.420.197,91 atau 1,82%. Rincian Perbedaan Pendapatan-LO dan Pendapatan-LRA dapat diringkas sebagai berikut.

Rincian	Pendapatan-LO	Pendapatan-LRA	Varians
Pendapatan Asli Daerah	169.976.541.408,97	161.576.001.454,88	8.400.539.954,09
Pendapatan Transfer	1.351.204.320.120,00	1.518.538.134.126,00	(167.333.814.006,00)
Lain-Lain Pendapatan yang Sah	139.008.232.151,00	10.770.378.297,00	128.237.853.854,00
Total	1.660.189.093.679,97	1.690.884.513.877,88	(30.695.420.197,91)

	Tahun 2024	Tahun 2023
1. Pendapatan Asli Daerah – LO	Rp169.976.541.408,97	Rp157.320.946.712,62

Pendapatan Asli Daerah-LO pada Tahun 2024 sebesar Rp169.976.541.408,97. Nilai tersebut meningkat 7,45% atau sebesar Rp12.655.594.696,35 dibanding periode Tahun 2023 yaitu sebesar Rp157.320.946.712,62. Jika dibandingkan dengan Realisasi Pendapatan Asli Daerah pada LRA TA 2024 sebesar Rp161.576.001.454,88, penerimaan Pendapatan Asli Daerah-LO lebih tinggi sebesar 4,94% atau Rp8.400.539.954,09. Hal ini disebabkan karena perbedaan pengakuan pendapatan, dimana pengakuan pendapatan pada-LO berbasis akrual, sedangkan pada LRA berbasis kas. Rincian Perbedaan Pendapatan Asli Daerah-LO dan LRA dapat diringkas sebagai berikut.

Uraian	LRA	Mutasi +	Mutasi -	LO
Pendapatan Pajak Daerah	27.736.938.804,00	807.034.234,00	92.819.807,00	28.452.638.597,00
Pendapatan Retribusi Daerah	108.172.064.157,26	8.360.922.678,00	79.418.416,00	115.751.196.019,26
Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	11.899.367.428,00	40.123.141,09	0,00	11.939.490.569,09
Lain-lain PAD yang Sah	13.767.631.065,62	32.923.825,00	672.000,00	13.833.216.223,62
Jumlah	161.576.001.454,88	9.241.003.878,09	172.910.223,00	169.976.541.408,97

	Tahun 2024	Tahun 2023
a. Pendapatan Pajak Daerah-LO	Rp28.452.638.597,00	Rp29.330.306.237,08

Pendapatan Pajak Daerah-LO Tahun 2024 sebesar Rp28.452.638.597,00. Nilai tersebut lebih rendah Rp877.667.640,08 atau 3,08% dibanding Tahun 2023 sebesar Rp29.330.306.237,08. Untuk realisasi Pendapatan Pajak Daerah-LRA

TA 2024 sebesar Rp27.736.938.804,00 sehingga Pendapatan Pajak Daerah-LO lebih tinggi 2,52% atau sebesar Rp715.699.793,00 dari Pendapatan Pajak Daerah-LRA.

Perbedaan antara Pendapatan Pajak Daerah-LO dengan Pendapatan Pajak Daerah-LRA disebabkan karena penambahan jumlah PBB-LO sebesar Rp820.433.212,00 yang berasal dari jumlah piutang PBB-P2, Pendapatan Diterima Dimuka Pajak Reklame yang dibayarkan pada Tahun 2023 yang sudah menjadi hak pemerintah daerah Tahun 2024 sebesar Rp109.224.778,00. Sedangkan pengurangan jumlah Pendapatan Pajak Daerah-LO disebabkan pelunasan piutang PBB-P2 Tahun 2014-2023 yang diterima tahun 2024 sebesar Rp89.699.941,00, reklasifikasi penerimaan denda PBB-P2 ke Lain-Lain PAD yang sah-LO sebesar Rp32.923.825,00, dan pengakuan Pendapatan Diterima Dimuka Pajak Reklame karena merupakan pembayaran Pajak Reklame untuk Tahun 2025 sebesar Rp91.334.441,00.

Perbandingan Pendapatan-LO tahun 2024 dengan Tahun 2023 tergambar dalam tabel berikut

No	Jenis Pajak Daerah	Saldo 2024 (Rp)	Saldo 2023 (Rp)	Kenaikan/ Penurunan (Rp)
1	Pajak Hotel	595.152.781,00	465.535.162,00	129.617.619,00
2	Pajak Restoran	2.272.514.814,00	2.248.694.247,00	23.820.567,00
3	Pajak Hiburan	38.048.000,00	58.804.750,00	(20.756.750,00)
4	Pajak Reklame	413.344.297,00	389.457.924,00	23.886.373,00
5	Pajak Penerangan Jalan	18.192.726.590,00	17.669.834.509,00	522.892.081,00
6	Pajak Air Tanah	29.975.383,00	31.393.861,00	1.418.478,00
7	Pajak Sarang Burung Walet	500.000,00	800.000,00	(300.000,00)
8	Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan	1.140.627.055,00	2.329.526.953,00	(1.188.899.898,00)
9	Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2)	2.597.917.872,00	3.398.791.159,08	(800.873.287,08)
10	Pajak BPHTB	3.171.831.805,00	2.737.467.666,00	434.364.139
Jumlah		28.452.638.597,00	29.330.306.237,08	65.817.991.709,00

	Tahun 2024	Tahun 2023
b. Pendapatan Retribusi Daerah-LO	Rp115.751.196.019,26	Rp3.554.645.379,00

Pendapatan Retribusi Daerah-LO Tahun 2024 sebesar Rp115.751.196.019,26. Nilai tersebut lebih tinggi 96,93% atau sebesar Rp112.196.550.640,26 dibanding pengakuan Tahun 2023 yaitu sebesar Rp3.554.645.379,00. Berikut perbandingan Pendapatan Retribusi Daerah-LO Tahun 2024 dan Tahun 2023.

Untuk perbandingan Pendapatan Retribusi Daerah-LO dengan jumlah Pendapatan Retribusi-LRA yaitu sebesar Rp.108.172.064.157,26, pengakuan

Pendapatan Retribusi-LO lebih tinggi sebesar 6,55% atau Rp7.579.131.862,00. Perbedaan tersebut disebabkan oleh adanya penambahan jumlah pencatatan Retribusi, yakni dari Retribusi Pelayanan Kesehatan sebesar Rp8.219.268.678,00 dan dari Retribusi Pasar Rp141.654.000,00, merupakan piutang dari masing-masing retribusi yang merupakan hak pemerintah daerah tetapi belum diselesaikan pembayarannya oleh pihak lain.

Pengurangan pencatatan realisasi Pendapatan Retribusi-LO berasal dari pelunasan piutang Retribusi Pelayanan Kesehatan Rp73.538.416,00 pada Dinas Kesehatan - RSUD dr. M. Zein Painan yang terdiri dari Pelunasan Klaim Jasaraharja Tahun 2023 sebesar Rp28.601.714,00, Pelunasan Klaim Taspen 2023 sebesar Rp19.014.041,00, Pelunasan Klaim PT Dempo 2023 sebesar Rp7.804.198,00, dan Pelunasan Klaim BPJS Ketenagakerjaan 2023 sebesar Rp18.118.463,00. Pengurangan Retribusi lainnya yakni Pelunasan Piutang Retribusi Pasar Tahun 2023 yang telah diakui pencatatannya pada Tahun 2023 sebesar Rp5.880.000,00.

	Tahun 2024	Tahun 2023
c. Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan- LO	Rp11.939.490.569,09	Rp11.104.871.648,39

Jumlah tersebut merupakan Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan-LO Tahun 2024 dan Tahun 2023. Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan-LO Tahun 2024 naik sebesar Rp834.618.920,70 atau 6,99% dibanding Tahun 2023 sebesar Rp11.104.871.648,39.

Realisasi Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan-LRA TA 2024 sebesar Rp11.939.490.569,09, sedangkan Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan-LO lebih tinggi 0,34% atau sebesar Rp40.123.141,09. Perbedaan pencatatan lebih Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan-LO disebabkan penerimaan pencatatan deviden dari Perusahaan Umum Daerah (Perumda) Air Minum Tirta Langkisau yang dihitung dari persentase jumlah kepemilikan saham Pemerintah Daerah yang dikalikan dengan jumlah laba yang tidak dibagikan tahun 2024. Tahun 2024 jumlah deviden yang tidak dibagikan Perusahaan Umum Daerah (Perumda) Air Minum Tirta Langkisau yang menjadi hak Pemerintah Daerah sebesar Rp33.150.996,81, dan juga penerimaan pencatatan deviden dari laba yang ditahan PT. Bank Samudera Painan sebesar Rp6.976.706,73. Pendapatan ini merupakan Bagian Laba atas penyertaan modal Pemerintah Daerah Kabupaten Pesisir Selatan pada BUMD.

	Tahun 2024	Tahun 2023
d. Lain-Lain PAD Yang	Rp13.833.216.223,62	Rp113.331.123.448,15

Sah-LO

Lain-lain PAD Yang Sah-LO Tahun 2024 diakui sebesar Rp13.833.216.223,62. Nilai tersebut lebih rendah 87,79% atau sebesar Rp99.497.907.224,53 dibanding pengakuan Tahun 2023 sebesar Rp113.331.123.448,15. Rendahnya pengakuan Lain-Lain PAD yang sah LO Tahun 2024 disebabkan adanya pemindah pencatatan penerimaan Pendapatan BLUD ke Retribusi Pelayanan Kesehatan-LO. Perbedaan Pengakuan pendapatan ini disebabkan pada tahun 2023 BLUD RSUD dr. M. Zein Painan merupakan entitas akuntansi yang membuat Laporan Keuangan sendiri, sehingga Pendapatan BLUD dicatat pada rekening Lain-Lain PAD yang Sah. Sedangkan untuk tahun 2024 pencatatan Laporan Keuangan RSUD dr. M. Zein merupakan bagian atau unit dari Laporan Keuangan Dinas Kesehatan, sehingga pencatatan penerimaan BLUD dicatat dalam rekening Retribusi Pelayanan Kesehatan, sesuai amanat dari Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Pusat dan Daerah.

Realisasi Lain-Lain PAD Yang Sah pada LRA TA 2024 sebesar Rp13.833.216.223,62, sedangkan Lain-Lain PAD Yang Sah-LO lebih tinggi 0,23% atau sebesar Rp32.251.825,00. Terdapat penambahan Lain-Lain PAD yang sah yang berasal dari penerimaan denda PBB-P2 tahun 2024 sebesar Rp32.923.825,00, dan mutasi kurang disebabkan reklasifikasi pencatatan pengembalian penerimaan TU dari Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang sebesar Rp670.000,00.

	Tahun 2024	Tahun 2023
2. Pendapatan Transfer – LO	Rp1.351.204.320.120,00	1.346.178.218.499,00

Pendapatan Transfer-LO Tahun 2024 sebesar Rp1.351.204.320.120,00. Nilai tersebut sedikit meningkat sebesar 0,37% atau sebesar Rp5.026.101.621,00 dibanding Tahun 2023 yaitu sebesar Rp1.346.178.218.499,00. Jika dibandingkan dengan Pendapatan Transfer-LRA sebesar Rp1.518.538.134.126,00, pengakuan Pendapatan Transfer-LO lebih kecil sebesar Rp167.495.690.006,00 atau 11,03%. Rincian Perbedaan Pendapatan Transfer-LO dan LRA dapat diringkas sebagai berikut.

Rincian	Pendapatan-LO	Pendapatan-LRA	Varians
Transfer Pemerintah Pusat	1.255.914.875.192,00	1.427.643.629.129,00	(171.728.753.937,00)
Transfer Pemerintah Antar Daerah	95.289.444.928,00	90.894.504.934,00	4.394.939.994,00
Jumlah	1.351.204.320.120,00	1.518.538.134.126,00	(171.289.259.938,00)

Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat-LO Tahun 2024 sebesar Rp1.255.914.875.192,00, lebih tinggi 0,13% atau sebesar Rp1.682.418.985,00 dibanding Tahun 2023 yaitu sebesar Rp1.257.597.294.177,00. Jika dibandingkan dengan Pendapatan Transfer Pusat-LRA sebesar Rp1.427.643.629.192,00, Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat-LO lebih rendah 12,03% atau sebesar Rp171.728.754.000,00.

Untuk Pendapatan Transfer Pemerintah Antar Daerah-LO Tahun 2024 sebesar Rp95.289.444.928,00, lebih tinggi 7,04% atau sebesar Rp6.708.520.606,00 dibanding Tahun 2023 yaitu sebesar Rp88.580.924.322,00. Jika dibandingkan dengan Pendapatan Transfer Pemerintah Antar Daerah-LRA sebesar Rp90.894.504.934,00, Pendapatan Transfer Pemerintah Atar Daerah-LO lebih tinggi 4,61% atau sebesar Rp4.394.939.994,00.

Rincian Perbedaan Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat-LO dan Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat-LRA dapat diringkas sebagai berikut;

Uraian	LRA	Mutasi +	Mutasi -	LO
Dana Bagi Hasil (DBH)	30.510.938.710,00	161.876.000,00	4.240.704.000,00	26.432.110.710,00
Dana Alokasi Umum (DAU)	905.022.519.052,00	0,00	0,00	905.022.519.052,00
Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik	77.657.368.138,00	0,00	0,00	77.657.368.138,00
Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik	246.802.877.292,00	0,00	0,00	246.802.877.292,00
Jumlah	1.259.993.703.192,00	161.876.000,00	4.240.704.000,00	1.255.914.875.192,00

Terdapat mutasi kurang pada Dana Bagi Hasil-LO yang merupakan Dana Bagi Hasil Pajak dan Bukan Pajak yang merupakan Pendapatan DBH-LO pada Tahun 2023, namun baru direalisasikan pada tahun 2024 karena pada tahun 2023 pendapatan DBH tersebut disimpan pada Dana Bagi Hasil Treasury Depocit Facility (TDF). Faktor pengurangan lainnya berasal dari penerimaan dana desa yang tidak merupakan pendapatan operasional bagi Pemerintah Daerah sehingga dikeluarkan pencatatannya pada Pendapatan Transfer Pusat -LO

Sedangkan untuk rincian Perbedaan Pendapatan Transfer Pemerintah Antar Daerah-LO dengan LRA dapat diringkas sebagai berikut;

Uraian	LRA	Mutasi +	Mutasi -	LO
DBH PKB	20.874.197.761,00	5.932.976.454,00	6.532.428.803,00	20.274.745.412,00
DBH BBNKB	10.862.157.652,00	2.366.777.559,00	3.118.596.721,00	10.110.338.490,00

Uraian	LRA	Mutasi +	Mutasi -	LO
DBH BBKB	36.460.264.049,00	24.609.925.410,00	18.981.977.437,00	42.088.212.022,00
Pajak Air Permukaan	352.381.857,00	214.963.037,00	9.669.9505,00	470.645.389,00
Pajak Rokok	22.345.503.615,00	0,00	0,00	22.345.503.615,00
Jumlah	90.894.504.934,00	33.124.642.460,00	28.729.702.466,00	95.289.444.928,00

Penambahan Pendapatan Transfer Pemerintah Antar Daerah berasal dari Piutang DBH Pajak yang berasal dari Pemerintah Provinsi Sumatera Barat yang merupakan hak Pemerintah Daerah namun belum dibayarkan pada akhir tahun akuntansi. Pencatatan Piutang DBH ini berdasarkan Surat Keputusan Kepala Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 971.1/008/PPD-Bapenda/2025 tentang Penetapan Alokasi Defenitif dan Kurang Salur Dana Bagi Hasil Pajak Provinsi Sumatera Barat Bagian Kabupaten/Kota se Sumatera Barat Tahun Anggaran 2024. Untuk mutasi kurang berasal dari realisasi penerimaan Dana Bagi Hasil Pajak Provinsi Sumatera Barat yang sudah diakui pendapatannya pada Pendapatan Transfer Pemerintah Antar Daerah-LO Tahun 2023.

	Tahun 2024	Tahun 2023
3. Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah – LO	Rp139.008.232.151,00	Rp48.407.477.667,00

Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah-LO Tahun 2024 sebesar Rp139.008.232.151,00. Nilai tersebut lebih tinggi 65,18% atau sebesar Rp90.600.754.484,00 dibanding periode Tahun 2023 yaitu sebesar Rp.48.407.477.667,00. Realisasi Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah pada LRA TA 2024 sebesar Rp10.770.378.297,00, sehingga Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah-LO lebih tinggi sebesar Rp128.237.853.854,00. Perbedaan ini dikarenakan adanya penerimaan Hibah Aset Tetap oleh Pemerintah Daerah yang diakui sebagai Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah-LO yang diterima dari Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi Sumatera Barat, dan hibah dari Masyarakat.

Rincian perbedaan Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah-LO dan Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah -LRA dapat diringkas sebagai berikut.

Rincian	Pendapatan-LO	Pendapatan-LRA	Varians
Pendapatan Hibah	137.498.549.151,00	9.260.695.297,00	128.237.853.854,00
Pendapatan Lainnya	1.509.683.000,00	1.509.683.000,00	-

Total	139.008.232.151,00	10.770.378.297,00	128.237.853.854,00
--------------	---------------------------	--------------------------	---------------------------

	Tahun 2024	Tahun 2023
1. Pendapatan Hibah – LO	Rp137.498.549.151,00	Rp48.407.477.667,00

Pendapatan Hibah-LO pada Tahun 2024 sebesar Rp137.498.549.151,00. Nilai tersebut meningkat 64,79% atau sebesar Rp89.091.071.484,00 dibanding periode Tahun 2023 yaitu sebesar Rp48.407.477.667,00. Jika dibandingkan dengan Realisasi Pendapatan Hibah pada LRA TA 2024 sebesar Rp9.260.695.297,00, penerimaan Pendapatan Hibah-LO lebih tinggi sebesar 93,26% atau Rp128.237.853.854,00. Adapun Rincian Pendapatan Hibah-LO Tahun 2024 sebagai berikut.

SKPD Penerima Hibah	Pemberi Hibah	Jenis Hibah	Dokumen Pendukung	Nominal
Dinas Perdagangan dan Transmigrasi	Kementerian Perdagangan Republik Indonesia	Pasar Rakyat Lunang	145/M-DAG/BAST/09/2024	2.779.345.000,00
	Masyarakat Nagari Sungai Sirah Kecamatan Silaut	Tanah Kampung Pasar Melintang dengan Luas 5890,5 M	-	471.240.000,00
	Nagarian Barung-Barung Balantai	Tanah Pasar Nagari Kenagarian Barung-Barung Balantai dengan Luas 182,75 M2	-	29.240.000,00
J U M L A H				3.279.825.000,00
J U M L A H				2.779.345.000,00
Dinas Koperasi, UKM dan Tenaga Kerja	Kemetrian Ketenaga Kerjaan RI	Peralatan dan Mesin	Nomor : 2/1234/UM.03.03/VI/2024 dan Nomor 560.2/108Diskopnaker.PS/2024	6.914.469.031,00
J U M L A H				6.914.469.031,00
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Dirjen Cipta Karya	Jaringan Perpipaan SPAM IKK Batang Sako (2021)	922.1/BA/DC/2023	6.045.421.620,00
	Dirjen Cipta Karya	Pembangunan IPA Kap. 30L/Detik SPAM IKK Batang Sako Tapan (2021)	405.1/BA/DC/2024	16.950.962.520,00

SKPD Penerima Hibah	Pemberi Hibah	Jenis Hibah	Dokumen Pendukung	Nominal
	Dirjen Cipta Karya	Banpro penyehatan PDAM Paket 07 (2010)	405.1/BA/DC/2024	1.150.448.950,00
	Dirjen Cipta Karya	SPAM IKK Inderapura Pancung Soal (2011)	405.1/BA/DC/2024	6.773.897.490,00
	Dirjen Cipta Karya	Optimalisasi SPAM IKK kws RSH/RUSUNA Surantih (2011)	405.1/BA/DC/2024	1.182.851.400,00
	Dirjen Cipta Karya	SPAM Perdesaan kws Kapuah Kec. Koto XI Tarusan	405.1/BA/DC/2024	785.755.000,00
	Dirjen Cipta Karya	SPAM Kws. PPI Surantih (2012)	405.1/BA/DC/2024	1.062.275.000,00
	Dirjen Cipta Karya	Optimalisasi SPAM Kws. Khusus Punggasan (2012)	405.1/BA/DC/2024	2.141.063.000,00
	Dirjen Cipta Karya	SPAM Kws. PPI dan TPI Kws. PPI Carocok (2013)	405.1/BA/DC/2024	2.384.302.870,00
	Dirjen Cipta Karya	Pembangunan SPAM IKK Saalido ketek dan Optimalisasi SPAM IKK untuk MBR , IKK Salido Ketek (2013)	405.1/BA/DC/2024	18.255.857.221,00
	Dirjen Cipta Karya	SPAM Kws. PPI dan TPI Kws. PPI Muaro Gadang (2013)	405.1/BA/DC/2024	863.396.300
	Dirjen Cipta Karya	SPAM Kws. PPI dan TPI Kws. PPI (2013)	405.1/BA/DC/2024	2.172.357.500,00
	Dirjen Cipta Karya	Pengembangan SPAM di Kws. RSH/RUSUNAWA Kec. Air Haji Punggasan dan Pengembangan SPAM di Kws. Belum memiliki SPAM IKK Punggasan (2012 dan 2013)	405.1/BA/DC/2024	8.293.523.080,00
	Dirjen Cipta Karya	Pembangunan SPAM Kws. PPI Kambang dan	405.1/BA/DC/2024	1.203.697.900,00

SKPD Penerima Hibah	Pemberi Hibah	Jenis Hibah	Dokumen Pendukung	Nominal
		(2013)		
	Dirjen Cipta Karya	Optimalisasi SPAM kws. MBR Sago (2012)	405.1/BA/DC/2024	196.085.000,00
J U M L A H				69.461.894.851,00
Dinas Perumahan Kawasan Permukiman Pertanahan dan Lingkungan Hidup	Direktur Jenderal Perumahan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat	Rumah Khusus Pesisir Selatan A	2322/PKS/DR/2023	5.087.250.560,00
		Rumah Khusus Pesisir Selatan B		103.821.456,00
	Direktur Jenderal Perumahan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat	Rumah Susun Mahasiswa Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan	113/PKS/DR/2024	14.438.691.500,00
	Direktur Jenderal Perumahan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat	Almari sedang 2 Pintu sebanyak 86 unit	113/PKS/DR/2024	272.158.094,00
		Tempat Tidur Susun A sebanyak 82 unit		317.384.526,00
		Tempat Tidur Susun B sebanyak 4 unit		15.482.176,00
		Kursi Belajar sebanyak 172 unit		338.910.004,00
		Meja Belajar 172 unit		329.783.340,00
	Direktur Jenderal Perumahan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat	Rumah Khusus sebanyak 31 unit	169/PKS/DR/2024	1.200.233.289,00
	Direktorat Jenderal Cipta Karya Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat	Pembangunan TPA Tapan Kabupaten Pesisir Selatan (Jalan, Irigasi dan Jaringan) sebanyak 1 unit	405/BA/DC/2024	16.637.130.620,00

SKPD Penerima Hibah	Pemberi Hibah	Jenis Hibah	Dokumen Pendukung	Nominal
	Kerapatan Adat Nagari (KAN) Ampang Pulai Kecamatan Koto XI Tarusan Kabupaten Pesisir Selatan	Hak Atas Tanah Ulayat seluas 3.540 m2	005/SK/V/KAN/APL/II/2018	708.000.000,00
J U M L A H				39.448.845.565,00
RSUD M Zein	PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Kantor Cabang	PC Dekstop Asus S500TE- 38200013W Intel 13-13100, Ram 8 Gb, SSD 256 Gb Win11 home, Led 21,5 Inch sebanyak 16 Unit	BAST No. B.976.KC.III/LOG/05/2024	150.000.000,00
J U M L A H				150.000.000,00
Dinas Kesehatan	Direktorat Jenderal Perumahan Kementrian PUPR	Rumah Khusus Nagari Bukit Buai Tapan 25 unit	BAST No. 2516/BA/DR/2023	2.542.013.328,00
	Direktorat Jenderal Cipta Karya Kementrian PUPR	Pembangunan Fisik Sarana Cuci Tangan Pakai Sabun (CPTS) Kabupaten Pesisir Selatan 1 Paket	Nomor : 405/BA/DC/2024	49.668.000,00
	Ditjen Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Kementrian Kesehatan		Nomor : KN.01.08/C.I/4861.543/2024	2.754.171.985,00
J U M L A H				5.345.853.313,00
BPBD	Hibah dari BNPB	Rambu-Rambu Tsunami		460.950.000,00
J U M L A H				460.950.000,00
Badan Pengelolaan		Penambahan Modal Tahun Berjalan		7.061.067.047,00

SKPD Penerima Hibah	Pemberi Hibah	Jenis Hibah	Dokumen Pendukung	Nominal
Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah		2024		
	Hibah Hibah Luar Negeri	Pembayaran Tagihan Hibah Air Minum Berkas Kinerja Bantuan Pemerintah Australia		2.199.628.250,00
				9.260.695.297,00
Dinas Pendidikan		Hibah Peralatan dan Mesin	000.2.3.2/81.a/NPKPHD/BPKPAD- PS/2024	3.176.016.094,00
J U M L A H				3.176.016.094,00
JUMLAH PENDAPATAN HIBAH				137.498.549.151,00

	Tahun 2024	Tahun 2023
2. Pendapatan Lainnya – LO	Rp1.509.683.000,00	Rp0,00

Pendapatan Lainnya-LO pada Tahun 2024 sebesar Rp1.509.683.000,00. Nilai tersebut meningkat 100% atau sebesar 1.509.683.000,00 dibanding periode Tahun 2023 yaitu sebesar Rp0,00. Pendapatan lainnya ini merupakan Pendapatan Dana Kapitasi JKN pada FKTP (Pendapatan Dana Kapitasi JKN pada Rumah Sakit Non BLUD).

	Tahun 2024	Tahun 2023
5.4.2. Beban Operasional	Rp1.594.887.251.642,92	Rp1.394.635.988.537,18

Beban Operasional Tahun 2024 adalah sebesar Rp1.594.887.251.642,92. Nilai tersebut lebih tinggi 14,36% atau sebesar Rp200.251.263.105,74 dibandingkan Beban Operasional Tahun 2023 sebesar Rp1.394.635.988.537,18. Rincian perbedaan Beban-LO dan Belanja LRA dapat diringkas sebagai berikut.

Rincian	Beban-LO	Belanja-LRA	Varians
Beban Pegawai	835.130.065.136,00	822.241.704.070,00	12.888.361.066,00
Beban Persediaan	81.167.048.056,84	43.290.128.317,00	37.876.919.739,84
Beban Jasa	213.198.500.135,84	116.311.345.980,00	96.887.154.155,84
Beban Pemeliharaan	23.701.865.086,00	21.406.429.242,00	2.295.435.844,00
Beban Perjalanan Dinas	71.684.665.797,00	69.702.986.303,00	1.981.679.494,00
Beban Bunga	0,00	0,00	0,00
Beban Subsidi	0,00	0,00	0,00

Rincian	Beban-LO	Belanja-LRA	Varians
Beban Hibah	87.356.306.628,00	86.701.606.147,00	654.700.481,00
Beban Bantuan Sosial	158.450.000,00	158.450.000,00	0,00
Beban Penyusutan dan Amortisasi	183.839.494.686,52	0,00	183.839.494.686,52
Beban Penyisihan Piutang	3.778.495.318,73	0,00	3.778.495.318,73
Beban Transfer	94.872.360.798,00	262.522.286.798,00	(167.649.926.000,00)
Beban Lain-Lain	0,00	0,00	0,00
Total	1.594.887.251.642,92	1.422.334.936.857,00	172.552.314.785,92

	Tahun 2024	Tahun 2023
1. Beban Pegawai	Rp835.130.065.136,00	Rp695.802.504.746,35

Jumlah tersebut merupakan Beban Pegawai-LO Tahun 2024 dan 2023. Beban Pegawai-LO Tahun 2024 naik sebesar Rp139.327.560.389,65 atau 20,02% dibandingkan Tahun 2023.. Rincian perbandingan Beban Pegawai Tahun 2024 dengan Tahun 2023 dapat disajikan dalam tabel sebagai berikut :

Nilai Beban Pegawai-LO TA 2024 diakui lebih tinggi dari Belanja Pegawai LRA TA 2023 sebesar Rp12.888.361.066,00 atau 1,54%. Kelebihan Beban Pegawai ini berasal dari penambahan pengakuan belanja pegawai tambahan penghasilan guru tahun 2024 yang belum dibayarkan sebesar Rp23.501.470.300,00 sampai akhir tahun 2024 dikarenakan terlambatnya penyaluran Dana DAU dari Pemerintah Pusat, sedangkan pada Beban Pegawai tetap dicatat karena sudah menjadi beban atau hak dari penerima tambahan penghasilan tersebut. Untuk pembayaran Tambahan Penghasilan Guru ini telah direalisasikan pada Bulan Januari 2025. Selain itu juga terdapat penambahan beban pegawai dari Dinas Kesehatan sebesar Rp345.556.250,00 merupakan beban atas jasa pelayanan medis, dan dari Sekretariat DPRD sebesar Rp52.551.450,00 yang berasal dari beberapa tunjangan anggota DPRD yang belum dapat dibayarkan karena kekurangan anggaran.

Mutasi kurang dari beban pegawai berasal dari pengurangan realisasi Tambahan Penghasilan Guru Tahun 2024 sebesar Rp10.691.581.000,00 yang sudah diakui pencatatannya pada Beban Pegawai Tahun 2023, dan pembayaran belanja pegawai dari beberapa SKPD yang beban pegawainya sudah diakui pada Tahun 2023.

	Tahun 2024	Tahun 2023
2. Beban Persediaan	Rp81.167.048.056,84	Rp99.232.656.699,88

Jumlah tersebut merupakan Beban Persediaan-LO Tahun 2024 dan 2023. Beban Persediaan-LO Tahun 2024 mengalami penurunan sebesar Rp18.065.608.643,04 atau 18,21% dibandingkan Tahun 2023. Berikut perbandingan realisasi Beban Persediaan 2024 dan 2023.

Nilai Beban Persediaan-LO TA 2024 diakui lebih tinggi dari Belanja Persediaan LRA TA 2024 sebesar Rp43.290.128.317,00. Terdapat mutasi tambah yang berasal dari reklasifikasi belanja barang dan jasa BLUD, pemakaian persediaan tahun 2023, reklasifikasi belanja modal yang tidak dapat dikategorikan sebagai aset tetap dengan total penambahan sebesar Rp31.275.454.834,14. Untuk mutasi kurang disebabkan adanya beberapa belanja modal yang tidak dikapitalisir sebagai aset tetap dan dicatat sebagai beban persediaan, belanja barang habis pakai yang masih belum digunakan dan dijadikan persediaan akhir tahun 2023 dengan total mutasi kurang sebesar Rp83.202.757.358,46. Untuk lebih rincinya dapat dilihat pada **Lampiran 21.1**.

	Tahun 2024	Tahun 2023
3. Beban Jasa	Rp213.198.500.135,84	Rp192.867.743.103,35

Jumlah tersebut merupakan Beban Jasa-LO Tahun 2024 dan 2023. Beban Jasa-LO Tahun 2024 naik 10,54% atau sebesar Rp20.330.757.032,49 dibandingkan Tahun 2023.

Nilai Beban Jasa-LO TA 2024 diakui lebih tinggi dari Belanja Jasa LRA TA 2024 sebesar Rp80.315.865.830,84 atau 83,30%. Perbedaan ini disebabkan karena pembayaran Belanja jasa, Listrik, Air dan Telepon bulan Desember TA 2023 yang dibayarkan TA 2024 dan pengakuan Utang Belanja jasa, Listrik, Air dan Telepon bulan Desember TA 2024, serta Belanja Barang dan Jasa yang direklasifikasi ke Belanja Modal Aset Tetap karena memenuhi kriteria kapitalisasi aset tetap, dan Koreksi Penyesuaian Pencatatan Belanja Barang dan Jasa BLUD ke Beban Persediaan. Untuk lebih rincinya dapat mutasi tambah dan kurang beban jasa disajikan pada **Lampiran 21.1**.

	Tahun 2024	Tahun 2023
4. Beban Pemeliharaan	Rp23.701.865.086,00	Rp15.609.536.324,89

Jumlah tersebut merupakan Beban Pemeliharaan-LO Tahun 2024 dan 2023. Beban Pemeliharaan-LO Tahun 2024 naik 51,84% atau sebesar Rp8.092.328.761,11 dibandingkan Tahun 2023. Nilai Beban Pemeliharaan-LO TA 2024 diakui lebih tinggi 10,72% dari Belanja Pemeliharaan LRA TA 2024 sebesar Rp21.406.429.242,00. Perbedaan ini disebabkan karena beberapa belanja pemeliharaan yang dikapitalisasi ke Aset Tetap dan Belanja Modal Aset Tetap yang direklasifikasi ke Belanja Pemeliharaan karena tidak memenuhi kriteria aset tetap. Untuk lebih rincinya dapat dilihat pada **Lampiran 21.1**.

	Tahun 2024	Tahun 2023
--	-------------------	-------------------

5. Beban Perjalanan Dinas	Rp71.684.665.797,00	Rp65.827.686.304,00
----------------------------------	----------------------------	----------------------------

Jumlah tersebut merupakan Beban Perjalanan Dinas-LO Tahun 2024 dan 2023. Beban Perjalanan Dinas-LO Tahun 2024 naik 8,90% atau sebesar Rp5.856.979.493,00 dibandingkan Tahun 2023. Nilai Beban Perjalanan Dinas-LO TA 2024 diakui lebih tinggi dari Belanja Perjalanan Dinas LRA TA 2024 sebesar Rp1.981.679.494,00 atau 2,84%. Perbedaan ini disebabkan karena Belanja Barang dan Jasa BLUD yang direklasifikasi ke Beban Perjalanan Dinas dan adanya Reklasifikasi Belanja Perjalanan Dinas-LRA yang dicatat sebagai perolehan Aset Tetap, dan adanya koreksi Pencatatan Belanja Barang dan Jasa BLUD yang dicatat pada Beban Persediaan. Untuk lebih rincinya dapat dilihat pada **Lampiran 21.1**.

6. Beban Bunga	Tahun 2024 Rp0,00	Tahun 2023 Rp0,00
-----------------------	------------------------------------	------------------------------------

Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan tidak memiliki Beban Bunga Tahun 2024 dan 2023.

7. Beban Subsidi	Tahun 2024 Rp0,00	Tahun 2023 Rp0,00
-------------------------	------------------------------------	------------------------------------

Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan tidak memiliki Beban Subsidi Tahun 2024 dan 2023.

8. Beban Hibah	Tahun 2024 Rp87.356.306.628,00	Tahun 2023 Rp 49.736.631.683,00
-----------------------	---	--

Jumlah tersebut merupakan Beban Hibah-LO Tahun 2024 dan 2023. Beban Hibah-LO Tahun 2024 naik sebesar Rp37.619.674.945,00 atau 75,64% dibandingkan Tahun 2023. Nilai Beban Hibah-LO TA 2024 diakui lebih tinggi dari Belanja Hibah LRA TA 2024 sebesar Rp654.700.481,00. Jumlah ini merupakan koreksi pencatatan dari beban hibah ke beban jasa, hibah ke masyarakat (Tanah Pangkalan Pendaratan ikan) Tarusan dan Hibah ke Kejaksaan Negeri Painan berupa Bangunan Gedung untuk Pos Jaga dan Taman. Untuk lebih rincinya dapat dilihat pada **Lampiran 21.1**.

9. Beban Bantuan Sosial	Tahun 2024 Rp158.450.000,00	Tahun 2023 Rp257.340.410,00
--------------------------------	--	--

Jumlah tersebut merupakan Beban Bantuan Sosial-LO Tahun 2024 dan 2023. Beban Bantuan Sosial-LO Tahun 2024 turun 38,43% atau sebesar Rp98.890.410,00 dibandingkan Tahun 2023. Tidak terdapat perbedaan antara Beban Bantuan Sosial-LO dengan Belanja Bantuan Sosial LRA.

10. Beban Penyusutan dan Amortisasi	Tahun 2024 Rp183.839.494.686,52	Tahun 2023 Rp187.886.920.360,41
--	--	--

Jumlah tersebut merupakan Beban Penyusutan dan Amortisasi-LO Tahun 2024 dan 2023. Beban penyusutan dan amortisasi Tahun 2024 turun sebesar Rp4.047.425.673,90 atau sebesar 2,15%.

	Tahun 2024	Tahun 2023
11. Beban Penyisihan Piutang	Rp3.778.495.318,73	Rp1.013.986.257,30

Jumlah tersebut merupakan Beban Penyisihan Piutang-LO Tahun 2024 dan 2023. Beban Penyisihan Piutang-LO Tahun 2024 naik 272,64% atau sebesar Rp2.764.509.061,44 dibandingkan Tahun 2023. Beban Penyisihan Piutang merupakan estimasi ketidaktertagihan piutang berdasarkan jatuh tempo dan umur piutang. Beban Penyisihan Piutang tidak terdapat pada LRA. . Jumlah ini merupakan koreksi tambah akumulasi penyisihan piutang pajak dan piutang retribusi. Untuk lebih rincinya dapat dilihat pada **Lampiran 21.1.**

	Tahun 2024	Tahun 2023
12. Beban Transfer Bagi Hasil Pendapatan	Rp94.872.360.798,00	Rp86.400.982.648,00

Jumlah tersebut merupakan Beban Transfer-LO Tahun 2024 dan 2023. Beban transfer-LO tahun 2024 naik 9,80% atau sebesar Rp8.471.378.150,00 dibandingkan tahun 2023. Nilai Beban Tranfer Bagi Hasil Pendapatan-LO TA 2024 diakui lebih rendah dari Belanja Transfer Bagi Hasil LRA TA 2024 sebesar Rp.1.264.203.498.00 Perbedaan ini disebabkan karena koreksi atas Beban Transfer berupa Dana Desa/Nagari. Sesuai dengan Bultek 21 Akuntansi Akruial, Pendapatan dan Beban yang terkait dengan Dana Desa/Nagari bukan sebagai kinerja Pemerintah Kabupaten.

	Tahun 2024	Tahun 2023
13. Beban Lain-lain	Rp0,00	Rp0,00

Beban Lain-lain adalah beban operasi yang tidak termasuk kedalam kategori beban diatas.

	Tahun 2024	Tahun 2023
5.4.3. Surplus/Defisit Kegiatan Operasional	Rp65.301.842.037,05	Rp157.270.654.341,44

Jumlah tersebut merupakan Surplus/Defisit dari Kegiatan Operasional Tahun 2024 dan 2023. Surplus/Defisit dari Kegiatan Operasional Tahun 2024 menurun 58,48% atau sebesar Rp91.968.812.304,39 dibandingkan Tahun 2023. Surplus/Defisit dari Kegiatan Operasional merupakan selisih Pendapatan dan Beban Operasional.

	Tahun 2024	Tahun 2023
5.4.4. Surplus/Defisit Kegiatan Non Operasional	(Rp408.741.384,14)	(Rp7.487.701.106,87)

Saldo tersebut merupakan Surplus/Defisit dari Kegiatan Non Operasional Tahun 2024 dan 2023 berupa Surplus/Defisit dari Kegiatan Non Operasional Lainnya. Defisit Non Operasional Tahun 2024 merupakan defisit atas Penghapusan Aset Tetap dari beberapa SKPD yang masih mempunyai nilai buku sebesar Rp408.741.384,14.

	Tahun 2024	Tahun 2023
5.4.5. Pos Luar Biasa	(Rp2.135.045.328,00)	(Rp4.583.826.001,00)

Jumlah tersebut merupakan saldo Pos Luar Biasa berupa Beban Luar Biasa Tahun 2024 dan 2023. Terdapat kenaikan Beban Luar Biasa Tahun 2024 dibandingkan Tahun 2023 sebesar Rp2.448.780.673,00 atau 53,42%. Jumlah Beban Luar Biasa-LO Tahun 2024 sama dengan Belanja Tak Terduga LRA Tahun 2024 sebesar Rp2.135.045.328,00.

	Tahun 2024	Tahun 2023
5.4.6. Surplus/Defisit Laporan Operasional	Rp62.758.055.324,90	Rp145.199.127.233,57

Surplus/Defisit Laporan Operasional merupakan akumulasi dari Surplus/Defisit dari Kegiatan Operasional, Kegiatan Non Operasional dan Pos Luar Biasa. Surplus Laporan Operasional Tahun 2024 turun sebesar Rp82.441.071.908,66 atau 56,78 dibandingkan Surplus Tahun 2024.

5.5. PENJELASAN POS-POS LAPORAN ARUS KAS

	Tahun 2024	Tahun 2023
5.5.1. Arus Kas dari Aktivitas Operasi	Rp121.635.040.349,86	Rp264.288.802.507,88

Arus Kas Aktivitas Operasi menggambarkan aliran kas masuk dari sumber-sumber penerimaan yang berhubungan langsung dengan operasional Pemerintah Daerah, seperti penerimaan PAD, dan aliran kas keluar dari pengeluaran/belanja yang berhubungan langsung dengan operasional Pemerintah Daerah, seperti belanja daerah.

Jumlah tersebut merupakan selisih lebih arus masuk kas dengan arus keluar kas dari aktivitas operasi Tahun 2024 dan 2023. Arus kas bersih sejumlah tersebut merupakan indikator yang menunjukkan kemampuan operasi Pemerintah dalam menghasilkan kas yang cukup untuk membiayai aktivitas operasional tanpa mengandalkan sumber dana dari luar. Arus Kas Bersih dari Aktivitas Operasi dapat diringkaskan sebagai berikut.

Rincian	2024	2023
Arus Masuk Kas	1.690.641.161.341,02	1.653.344.542.544,23
Arus Keluar Kas	1.569.006.120.991,16	1.389.055.740.036,35
Arus Kas Bersih dari Aktivitas	121.635.040.349,86	264.288.802.507,88

Rincian	2024	2023
---------	------	------

Operasi

Rincian arus kas masuk dan arus kas keluar dari aktivitas operasi sebagaimana tersaji pada Laporan Arus Kas.

	Tahun 2024	Tahun 2023
5.5.2. Arus Kas dari Aktivitas Investasi	(Rp178.898.260.760,14)	(Rp240.879.277.268,09)

Arus Kas Aktivitas Investasi menggambarkan aliran kas masuk dari sumber-sumber penerimaan yang berhubungan dengan investasi Pemerintah Daerah, seperti penjualan aset daerah, dan aliran kas keluar dari pengeluaran/belanja yang berhubungan dengan investasi Pemerintah Daerah, seperti perolehan Aset Tetap.

Jumlah tersebut merupakan selisih surplus antara arus masuk kas dengan arus keluar kas dari aktivitas investasi Tahun 2023 dan 2022. Arus kas bersih sejumlah tersebut bertujuan untuk meningkatkan dan mendukung pelayanan pemerintah kepada masyarakat dimasa yang akan datang. Arus Kas Bersih dari Aktivitas Investasi dapat diringkaskan sebagai berikut.

Rincian	2024	2023
Arus Masuk Kas	243.352.536,86	1.177.143.133,00
Arus Keluar Kas	179.141.613.297,00	242.056.420.401,09
Arus Kas Bersih dari Aktivitas Investasi	(178.898.260.760,14)	(240.879.277.268,09)

Rincian arus kas masuk dan arus kas keluar dari aktivitas investasi sebagaimana tersaji pada Laporan Arus Kas.

	Tahun 2024	Tahun 2023
5.5.3. Arus Kas dari Aktivitas Pendanaan	Rp0,00	Rp0,00

Arus Kas Aktivitas Pendanaan menggambarkan aliran kas masuk dari sumber-sumber penerimaan yang berhubungan dengan Pendanaan Pemerintah Daerah, seperti pinjaman daerah, dan aliran kas keluar dari pengeluaran/belanja yang berhubungan dengan Pendanaan Pemerintah Daerah, seperti pembayaran pokok pinjaman.

Jumlah tersebut merupakan selisih surplus antara arus kas masuk dengan arus keluar kas dari aktivitas Pendanaan Tahun 2024 dan 2023 yang dapat diringkaskan sebagai berikut.

Rincian	Tahun 2024	2023
Arus Masuk Kas	-	-
Arus Keluar Kas	-	-
Arus Kas Bersih dari Aktivitas	0,00	0,00

Pendanaan

Rincian arus kas masuk dan arus kas keluar dari aktivitas pendanaan sebagaimana tersaji pada Laporan Arus Kas.

	Tahun 2024	Tahun 2023
5.5.4. Arus Kas dari Aktivitas Transitoris	(Rp0,00)	(Rp175.586.282,00)

Arus kas masuk mencerminkan penerimaan kas bruto yang tidak mempengaruhi anggaran pendapatan dan belanja serta pembiayaan pemerintah daerah Tahun 2024 dan Tahun 2023. Jumlah tersebut merupakan selisih surplus antara arus masuk kas dengan arus keluar kas dari aktivitas Pendanaan Tahun 2023 dan 2022 yang dapat diringkaskan sebagai berikut.

Rincian	2024	2023
Arus Masuk Kas	42.031.936.397,53	116.830.662.054,00
Arus Keluar Kas	42.031.936.397,53	117.006.248.336,00
Arus Kas Bersih dari Aktivitas Transitoris	(0,00)	(175.586.282,00)

Rincian arus kas masuk dan arus kas keluar dari aktivitas transitoris sebagaimana tersaji pada Laporan Arus Kas.

	Tahun 2024	Tahun 2023
5.5.5. Kenaikan/Penurunan Kas	(Rp57.263.220.410,28)	Rp23.233.938.957,79

Merupakan perhitungan atas kenaikan/penurunan arus kas dari aktivitas operasi, investasi, pendanaan, dan transitoris Tahun 2024 dan 2023 dengan uraian sebagai berikut.

Uraian	Tahun 2024	Tahun 2023
Arus Kas Bersih dari Aktivitas Operasi	121.635.040.349,86	264.288.802.507,88
Arus Kas Bersih dari Aktivitas Investasi	(178.898.260.760,14)	(240.879.277.268,09)
Arus Kas Bersih dari Aktivitas Pendanaan	0	0
Arus Kas Bersih dari Aktivitas Transitoris	(0,00)	(175.586.282,00)
Kenaikan (Penurunan) Kas	(57,263,220.410,28)	23,233,938.957,79

	Tahun 2024	Tahun 2023
5.5.6. Saldo Kas Akhir	Rp72.046.801.652,08	Rp129.310.022.062,36

Saldo akhir diperoleh dengan menjumlahkan saldo awal kas dengan kenaikan/penurunan arus kas Tahun 2023, dengan perhitungan sebagai berikut.

Saldo Awal Kas	129.310.022.062,36	106.076.083.104,57
Kenaikan/Penurunan Kas	(57.263.220.410,28)	23.233.938.957,79
Saldo Lainnya terkait PFK	0,00	0,00
Saldo Akhir Kas	72.046.801.652,08	129.310.022.062,36

Jika dibandingkan dengan SiLPA LRA, tidak terdapat perbedaan Saldo Akhir Kas pada Kas dan Setara Kas pada Neraca LAK dengan SiLPA TA 2024.

5.6. PENJELASAN POS-POS LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

Laporan perubahan ekuitas merupakan laporan penghubung antara Laporan Operasional dengan Neraca dan menggambarkan pergerakan kenaikan atau penurunan Ekuitas atas aktifitas Operasional pada Tahun Pelaporan.

	Tahun 2024	Tahun 2023
5.6.1. Ekuitas Awal	Rp2.876.465.237.404,97	Rp2.739.275.986.924,01

Jumlah tersebut merupakan ekuitas awal Tahun 2024 dan 2023.

	Tahun 2024	Tahun 2023
5.6.2. Surplus/Defisit Laporan Operasional	Rp58.832.220.329,33	Rp145.199.127.233,56

Saldo tersebut merupakan Surplus/Defisit laporan Operasional Tahun 2024 dan 2023.

	Tahun 2024	Tahun 2023
5.6.3. RK PPKD	Rp0,00	Rp0,00

Jumlah tersebut merupakan nilai RK PPKD Tahun 2024 dan 2023.

	Tahun 2024	Tahun 2023
5.6.4. Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan /Kesalahan Mendasar	(Rp8.515.337.411,65)	(Rp8.009.876.751,17)

Saldo dan rincian dampak kumulatif perubahan kebijakan/kesalahan mendasar Tahun 2024 dan 2023 adalah sebagai berikut.

Uraian	Tahun 2024	Tahun 2023
---------------	-------------------	-------------------

Uraian	Tahun 2024	Tahun 2023
Koreksi Nilai Persediaan	0,00	0,00
Koreksi Ekuitas – Investasi Jangka Panjang	0,00	(126.454.730,44)
Selisih Revaluasi Aset Tetap	0,00	0,00
Koreksi Ekuitas – Aset Tetap	(146.996.461,76)	(603.015.201,43)
Koreksi Ekuitas – Aset Lainnya	0,00	27.000.000,00
Koreksi Ekuitas – Penyusutan	(8.387.439.996,98)	(10.071.649.948,20)
Koreksi Ekuitas – Piutang	0,00	(15.594.500,00)
Koreksi Ekuitas – Penyisihan Piutang	19.785.117,76	876.949,00
Koreksi Ekuitas – Penyisihan Piutang Dana Bergulir	0,00	0,00
Koreksi Ekuitas – Extra Comptable	0,00	0,00
Koreksi Ekuitas – Utang	(686.010,00)	3.000.000.000,00
Koreksi Ekuitas – Amortisasi	0,00	0,00
Koreksi Ekuitas – Kas di Bendahara FKTP	0,00	(156.799.392,00)
Koreksi Ekuitas – Kas di Bendahara BOS	0,00	0,00
Koreksi Ekuitas – Kas di Bendahara BOK	0,00	0,00
Koreksi Ekuitas – Kas di Bendahara BOP PAUD	0,00	0,00
Koreksi Ekuitas – Lain-Lain	60,67	(64.239.928,10)
Jumlah	(8.515.337.411,65)	(8.009.876.751,17)

	Tahun 2024	Tahun 2023
5.6.5. Ekuitas Akhir	Rp2.926.782.120.322,64	Rp2.876.465.237.406,41

Jumlah tersebut merupakan ekuitas akhir 2024 dan 2023. Ekuitas akhir merupakan penjumlahan dari ekuitas awal dengan surplus/defisit LO dan Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan/Kesalahan Mendasar.

BAB VI

INFORMASI-INFORMASI TAMBAHAN TERKAIT LAPORAN KEUANGAN

6.1 Perubahan Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah

Perbaikan dalam pengelolaan keuangan baik dari Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Daerah terus ditingkatkan, salah satunya dengan berubahnya peraturan perundang-undangan yang terkait dengan pengelolaan keuangan daerah. Salah satunya dengan lahirnya Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah. Pemerintah Daerah Kabupaten Pesisir Selatan telah menindaklanjuti perubahan peraturan perundang-undangan tersebut dengan mengundang Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.

Berdasarkan amanat dalam Pasal 189 Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 3 Tahun 2022 bahwa Pemerintah Daerah perlu menetapkan Peraturan Kepala Daerah tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah sebagai pedoman dalam penyusunan laporan keuangan, Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan telah menetapkan Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah dengan Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 55 Tahun 2024.

Perubahan Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah ini juga dilakukan karena adanya penambahan Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintah yang ditetapkan dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 157/PMK.05/2020 tentang Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual Nomor 15 tentang Peristiwa Setelah Tanggal Pelaporan, Peraturan Menteri Keuangan Nomor 84/PMK.05/2021 tentang Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual Nomor 16 Perjanjian Konsesi Jasa Pemberi Konsesi, dan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 85/PMK.05/2021 tentang Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual Nomor 17 Properti Investasi.

Perubahan Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah Kabupaten Pesisir Selatan ini juga terkait dengan perubahan penggolongan dan kodifikasi Barang Milik Daerah yang merujuk pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 108 Tahun 2016 tentang Penggolongan dan Kodifikasi Barang Milik Daerah, dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2019 tentang Penyusutan Barang Milik Daerah. Terdapat perubahan masa manfaat Barang Milik Daerah karena perubahan penggolongan Barang Milik Daerah. Berikut disajikan Barang Milik Daerah mengalami perubahan penggolongan dan masa manfaat, serta penambahan masa manfaat karena pengeluaran setelah perolehan.

Tabel 6.1. Perubahan Penggolongan dan Masa Manfaat Aset Tetap

URAIAN	UMUR/ MASA MANFAAT Tahun	
	Kebijakan Akuntansi Lama	Kebijakan Akuntansi Baru
ALAT KANTOR & RUMAH TANGGA		

URAIAN	UMUR/ MASA MANFAAT Tahun	
	Kebijakan Akuntansi Lama	Kebijakan Akuntansi Baru
ALAT KANTOR	5	5
ALAT RUMAH TANGGA	5	5
PERALATAN KOMPUTER	4	-
MEJA DAN KURSI KERJA/RAPAT PEJABAT	5	5
ALAT LABORATORIUM		
UNIT ALAT LABORATORIUM	8	8
ALAT PERAGA/PRAKTEK SEKOLAH	10	-
UNIT ALAT LABORATORIUM KIMIA NUKLIR	15	15
ALAT LABORATORIUM FISIKA NUKLIR/ ELEKTRONIKA	15	15
ALAT PROTEKSI RADIASI/ PROTEKSI LINGKUNGAN	10	10
RADIATION APPLICATION & NON DESTRUCTIVE TESTING LABORATORY	10	10
ALAT LABORATORIUM LINGKUNGAN HIDUP	7	7
PERALATAN LABORATORIUM HYDRODINAMICA	15	15
ALAT LABORATORIUM STANDARISASI KALIBRASI & INSTRUM	10	10
ALAT PERSENJATAAN		
SENJATA API	10	10
PERSENJATAAN NON SENJATA API	3	3
SENJATA SINAR	5	5
ALAT KHUSUS KEPOLISIAN	-	4
KOMPUTER		
KOMPUTER UNIT	-	4
PERALATAN KOMPUTER	-	4
ALAT EKSPLORASI		
ALAT EKSPLORASI TOPOGRAFI	-	5
ALAT EKSPLORASI GEOFISIKA	-	10
ALAT PENGEBORAN		
ALAT PENGEBORAN MESIN	-	10
ALAT PENGEBORAN NON MESIN	-	10
ALAT PRODUKSI, PENGOLAHAN DAN PEMURNIAN		
SUMUR	-	10
PRODUKSI	-	10
PENGOLAHAN DAN PEMURNIAN	-	15
ALAT BANTU EKSPLORASI		
ALAT BANTU EKSPLORASI	-	10

URAIAN	UMUR/ MASA MANFAAT Tahun	
	Kebijakan Akuntansi Lama	Kebijakan Akuntansi Baru
ALAT BANTU PRODUKSI	-	10
ALAT KESELAMATAN KERJA		
ALAT DETEKSI	-	5
ALAT PELINDUNG	-	5
ALAT SAR	-	2
ALAT KERJA PENERBANGAN	-	10
ALAT PERAGA		
ALAT PERAGA PELATIHAN DAN PERCONTOHAN	-	10
PERALATAN PROSES/PRODUKSI		
UNIT PERALATAN PROSES/PRODUKSI		8
RAMBU - RAMBU		
RAMBU-RAMBU LALU LINTAS DARAT	-	7
RAMBU-RAMBU LALU LINTAS UDARA	-	5
RAMBU-RAMBU LALU LINTAS LAUT	-	15
PERALATAN OLAH RAGA		
PERALATAN OLAH RAGA	-	3
RAMBU - RAMBU		
RAMBU-RAMBU LALU LINTAS DARAT	50	-
RAMBU-RAMBU LALU LINTAS UDARA	50	-
INSTALASI		
INSTALASI AIR BERSIH/AIR BAKU	30	30
INSTALASI AIR KOTOR	30	30
INSTALASI PENGOLAHAN SAMPAH	10	10
INSTALASI PENGOLAHAN BAHAN BANGUNAN	10	10
INSTALASI PEMBANGKIT LISTRIK	40	40
INSTALASI GARDU LISTRIK	40	40
INSTALASI PERTAHANAN	30	30
INSTALASI GAS	30	30
INSTALASI PENGAMAN	20	20
INSTALASI LAIN	-	5
BARANG BERCORAK KESENIAN/KEBUDAYAAN/OLAHRAGA		
BARANG BERCORAK KESENIAN	-	4

Tabel 6.2. Perubahan Penambahan Masa Manfaat Aset Tetap Karena Pengeluaran Setelah Perolehan

URAIAN	JENIS	PERSENTASE RENOVASI/RESTORASI/ OVERHAUL DARI NILAI ASET (DI LUAR PENYUSUTAN)	PENAMBAHAN MASA MANFAAT	
			TAHUN	
			Kebijakan Akuntansi Lama	Kebijakan Akuntansi Baru
JALAN DAN JEMBATAN				
JALAN	Renovasi	> 0% s.d. 30%	2	2
		> 30% s.d. 45%	5	5
		> 45% s.d. 65%	10	10
JEMBATAN	Renovasi	> 0% s.d. 30%	5	5
		> 30% s.d. 45%	10	10
		> 45% s.d. 65%	15	15
		> 65% s.d. 100%	-	15

Berdasarkan Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 55 Tahun 2024, Bidang Barang Milik Daerah BPKPAD melakukan penyesuaian Aset Tetap Daerah sesuai dengan penggolongan (Mapping) Aset Daerah, dan juga melakukan upgrade penggunaan aplikasi pencatatan Barang Milik Daerah dari aplikasi SIPKD Modul Aset versi 1 dengan SIPKD Modul Aset Versi 6. Dari hasil Mapping Aset Tetap tersebut, terdapat perubahan penggolongan aset tetap. Berikut disajikan Rekapitulasi Perubahan Saldo Awal Aset Tetap hasil Mapping dan Daftar SKPD dan Data Aset Tetap yang mengalami perubahan setelah Mapping Aset Tetap.

Tabel 6.3 Rekapitulasi Perubahan Saldo Awal Aset Tetap Karena Perubahan Penggolongan Aset Tetap

Uraian	Saldo Awal 2024	Saldo Setelah Mapping	Selisih
Peralatan dan Mesin	189.876.743.450	186.162.485.522	(3.714.257.928)
Aset Tetap Lainnya	118.032.311.150	120.215.600.512	2.183.289.362
Aset Lainnya (ATB)	-	1.530.668.566	1.530.668.566
Extracomptabel	-	300.000	300.000

Tabel 6.4 Rekapitulasi Perubahan Saldo Awal Aset Tetap Karena Perubahan Penggolongan Aset Tetap Per SKPD

Uraian	Saldo Awal 2024	Saldo Setelah Mapping	Selisih
DINAS PENDIDIKAN			
Peralatan dan Mesin	158.100.075.419	154.433.517.299	(3.666.558.120)
Aset Tetap Lainnya	114.937.973.750	117.073.563.304	2.135.589.554
Aset Lainnya (ATB)		1.530.668.566	1.530.668.566
Extracomptabel		300.000	300.000
DINAS ARSIP DAN PERPUSTAKAAN			
Peralatan dan Mesin	3.490.767.266	3.489.117.266	(1.650.000)
Aset Tetap Lainnya	968.683.204	970.333.204	1.650.000
BAPEDALITBANG			
Peralatan dan Mesin	3.542.150.572	3.539.603.348	(2.547.224)
Aset Tetap Lainnya	93.251.400	95.798.624	2.547.224
SEKRETARIAT DAERAH			
Peralatan dan Mesin	24.050.645.055	24.005.642.471	(45.002.584)
Aset Tetap Lainnya	106.599.250	151.601.834	45.002.584
KECAMATAN BAYANG UTARA			
Peralatan dan Mesin	693.105.138	694.605.138	1.500.000
Aset Tetap Lainnya	3.629.167	2.129.167	(1.500.000)

Perubahan terhadap penggolongan Aset Tetap berdampak pada perubahan jumlah akumulasi penyusutan karena perubahan masa manfaat dan besaran akumulasi penyusutan. Untuk perubahan akumulasi penyusutan disajikan pada Bab V tentang Akumulasi Penyusutan.

6.2 Kegiatan Relokasi RSUD dr. M. Zein Painan

Kegiatan Relokasi RSUD dr. M. Zein Painan dilaksanakan dengan beberapa pertimbangan. Pertama, lokasi eksisting RSUD dr. M. Zein Painan yang berada pada zona merah rawan tsunami. Kondisi geografis Sumatera Barat yang berada diantara pertemuan dua lempeng benua besar (lempeng Eurasia dan lempeng Indo Australia), patahan (sesar) Semangko, serta dilalui oleh Sirkum Mediterania dengan daratan yang berbukit-bukit atau bergunung-gunung, beresiko menimbulkan terjadinya gempa bumi dan berpotensi untuk terjadi tsunami. Kedua, lokasi eksisting yang berada di jalan Dr. A. Rivai terletak ditengah pemukiman penduduk dan fasilitas umum/sosial yang cukup padatsehinggatidak memungkinkan untuk dilakukan pengembangan.

Untuk pelaksanaan kegiatan relokasi RSUD telah ditempuh sejumlah tahapan, diantaranya studi kelayakan oleh Lembaga Teknologi Fakultas Teknik Universitas Indonesia (UI) Jakarta untuk meneliti kelayakan relokasi. Studi Kelayakan yang dilakukan meliputi aspek geografis, sosio-ekonomi, derajat kesehatan, sarana dan prasarana kesehatan yang telah ada, peraturan dan perundang-undangan, reviu rencana proyek dan kelayakan keuangan daerah. Dalam Laporan Akhir SKB, Lembaga Teknologi Fakultas Teknik UI menyampaikan bahwa pemecahan masalah terkait lokasi dan intensitas bangunan eksisting yang sudah tidak memadai adalah dengan melakukan relokasi rumah sakit untuk mengantisipasi terjadinya bencana (gempa bumi, tsunami, dan kebakaran) serta memudahkan rumah sakit untuk melakukan pengembangan.

Pemerintah Daerah juga telah melalui tahap dengar pendapat dan pencapaian kesepakatan dengan pihak-pihak terkait. Dari Tokoh Adat dan Tokoh Kenagarian Painan telah memberikan dukungan dan persetujuan terkait upaya relokasi RSUD sebagaimana dituangkan dalam Surat Bupati Pesisir Selatan Nomor 007/315/PEMB/BPT-PS/2014 tanggal 21 Maret 2014. Dukungan terhadap upaya relokasi RSUD dari internal pemerintah daerah, dalam hal ini jajaran Satuan Kerja Perangkat Daerah Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan dinyatakan dalam Pakta Integritas antara Bupati Pesisir Selatan dengan Pejabat Eselon II yang dilakukan pada bulan Maret 2014. Pakta Integritas ini menyatakan dukungan sepenuhnya terhadap pelaksanaan program Relokasi RSUD dr. M Zein dari lokasi eksisting ke lokasi Bukit Kabun Taranak (lokasi yang baru yang telah diuji kelayakannya oleh Lemtek UI).

Untuk pembiayaan relokasi RSUD, Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menyepakati untuk melakukan pinjaman daerah yang kemudian ditetapkan dengan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2014 tentang Pinjaman Daerah kepada Pusat Investasi Pemerintah (PIP) Kementerian Keuangan RI. Saat Laporan Akhir SKB diterbitkan, Lembaga Teknologi Fakultas Teknik UI juga menyatakan bahwa berdasarkan perhitungan *cashflow*, angka *net present value*, *internal rate of return*, dan *payback period*, proyek relokasi RSUD dengan dana yang berasal dari pinjaman daerah layak untuk dijalankan (asumsi proyeksi perhitungan 10 tahun).

Telah dibentuk tim khusus yang ditetapkan dengan Surat Keputusan Bupati Pesisir Selatan Nomor 007/463/Kpts/BPT-PS/2014 tanggal 17 Juli 2014 tentang Pembentukan Tim Pelaksana Pinjaman Daerah Kabupaten Pesisir Selatan dengan koordinator Sekretaris Daerah Kabupaten Pesisir Selatan. Sebelum menyetujui permohonan pinjaman dari Pemerintah Daerah Kabupaten Pesisir Selatan, PIP telah melakukan verifikasi tersendiri berupa kunjungan lapangan, wawancara dengan pasien dan pengunjung RSUD serta rencana Pemda dalam penanganan pasien saat relokasi berjalan.

Jumlah pinjaman daerah untuk proyek relokasi ini adalah sebesar Rp99.000.000.000,00 (Sembilan puluh sembilan milyar rupiah) yang dibagi atas pekerjaan konstruksi Rp96.000.000.000,00 (Sembilan puluh enam milyar rupiah) dan Pengadaan Alat Kesehatan senilai Rp3.000.000.000,00 (Tiga milyar rupiah) dengan jangka waktu 5 (lima) tahun dan tingkat bunga 9,5% pertahun. Pinjaman daerah ini disahkan melalui akta notaris Ujang Iskandar Nomor 147 tanggal 23 Juli 2014. Proyek pembangunan fisik RSUD dimulai dengan lelang proyek yang prosesnya didampingi

secara hukum oleh Kejaksaan Negeri Painan, sebagaimana tertuang dalam Surat Kajari Painan Nomor B-1279/N.3.19/Gp.1/09/2014 tanggal 30 September 2014 tentang Pemenuhan atas Permohonan Bupati Pesisir Selatan untuk Permintaan Tenaga Pendampingan Hukum (*legal assistance*) dalam Proses Lelang Pekerjaan Pembangunan Relokasi RSUD Tipe C dr. M. Zein Painan. Berdasarkan hasil lelang, pekerjaan konstruksi dilaksanakan oleh PT. Waskita Karya (Persero) Tbk, yang ditetapkan dalam kontrak Nomor 08/PPK-PB1/Perkim/T-DAU/Pjtarkim-PS/V/2015 tanggal 18 Mei 2015 dengan nilai pekerjaan Rp94.178.900.000,00 (Sembilan puluh empat milyar seratus tujuh puluh delapan juta sembilan ratus ribu rupiah) dengan jangka waktu 390 (tiga ratus sembilan puluh) hari kalender dan target penyelesaian tanggal 10 Juni 2016.

Pencairan pinjaman daerah tahap I terealisasi pada 05 Agustus 2015 senilai Rp14.126.835.000,00 (15% dari kontrak/uang muka). Realisasi pencairan pinjaman tahap II adalah sebesar Rp18.835.780.000,00 (25% dari kontrak dikurangi pengembalian uang muka) pada tanggal 10 Januari 2016. Keseluruhan pencairan pinjaman telah dibayarkan kepada PT. Waskita Karya (Persero) Tbk sesuai kontrak kerja dengan pemerintah daerah.

Pada tanggal 10 Mei 2016, Bupati Pesisir Selatan menyampaikan surat perintah Penghentian Sementara Pelaksanaan Konstruksi Fisik Pembangunan RSUD kepada Direktur PT Sarana Multi Infrastruktur (SMI) yang dinyatakan dalam Surat Bupati Nomor 900/199/DPPKAD-PS/2016 tanggal 10 Mei 2016. Dalam hal ini PT SMI merupakan persero yang mengambil alih seluruh aset PIP Kementerian Keuangan sesuai PP Nomor 95 Tahun 2015. Perintah penghentian sementara ini terutama disebabkan oleh belum selesainya dokumen Analisa Dampak Lingkungan (AMDAL) serta pertimbangan pelaksanaan pekerjaan yang sifatnya tahun jamak. Surat Bupati ini ditindaklanjuti oleh Kepala Dinas Prasarana Jalan Tata Ruang dan Pemukiman dengan mengeluarkan Nota Pemberitahuan Perintah Penghentian Sementara Pelaksanaan Pekerjaan Konstruksi Pembangunan Relokasi RSUD pada tanggal 16 Mei 2016 yang ditujukan kepada PPK Dinas Prasarana Jalan Tata Ruang dan Pemukiman.

Penghentian sementara seluruh kegiatan konstruksi dilapangan efektif dilaksanakan sejak tanggal 19 Mei 2016. Kemajuan kerja fisik pembangunan pada saat penghentian lebih kurang 70,3%. Realisasi keuangan adalah sebesar Rp32.962.615.000,00 (35%) dari total kontrak sehingga terdapat kekurangan pembayaran sebesar Rp33.256.453.168,00 kepada PT. Waskita Karya (Persero) Tbk. Kekurangan pembayaran ini diakui sebagai Utang Jangka Pendek kepada PT Waskita Karya (Persero) Tbk, sedangkan untuk realisasi pinjaman daerah dari PT SMI diakui sebagai Utang Jangka Panjang.

Rincian pencatatan dan pengakuan transaksi keuangan terkait pekerjaan konstruksi pembangunan relokasi RSUD dalam Neraca TA 2022 adalah sebagai berikut.

Tabel 6.2.1 Transaksi Pekerjaan Konstruksi RSUD dalam Neraca TS 2022

No	Rincian	Nilai (Rp)
1.	Konstruksi dalam Pengerjaan, terdiri atas:	Rp83.336.044.659,74
	- Pematangan Lahan	4.037.875.104,00

LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH KABUPATEN PESISIR SELATAN T.A. 2024

No	Rincian	Nilai (Rp)
	- Pembangunan I (PT Waskita Karya)	14.125.245.483,00
	- Pembangunan I (koreksi kurang catat KDP 2015)	1.589.517,00
	- Pembangunan II (PT Waskita Karya)	18.835.780.000,00
	- Manajemen Konstruksi	844.836.884,00
	- Operasional pembangunan	1.698.760.200,00
	- Pembuatan amdal	260.193.000,00
	- Pembuatan animasi	46.540.000,00
	- Pembuatan RTBL	317.369.425,00
	- Pembangunan III (PT Waskita Karya), dengan progress fisik saat perintah penghentian sementara 70,3%	33.256.453.168,00
	- Biaya Penunjang pembangunan III	118.292.150,00
	- Manajemen konstruksi	385.590.195,00
	- Pembayaran Bunga Pinjaman kepada PT SMI	6.241.135.767,74
	- Dokumen Evaluasi Lingkungan Hidup	49.847.000,00
	- Bunga pinjaman kepada PT SMI TA 2018	1.926.710.628,00
	- Bunga pinjaman kepada PT SMI TA 2019	1.019.584.696,00
	- Bunga pinjaman kepada PT SMI TA 2020	170.241.442,00
2	Utang kepada Pihak Ketiga (Utang Jangka Pendek) kepada PT Waskita Karya)	33.256.453.168,00
3	Utang Jangka Panjang (kepada PT SMI), yang dapat dirinci sbb:	0,00
	Nilai pinjaman yang telah dicairkan	32.962.615.000,00
	Pembayaran Pokok Pinjaman selama tahun 2017	(9.417.890.000,00)
	Pembayaran Pokok Pinjaman selama tahun 2018	(9.417.890.000,00)
	Pembayaran Pokok Pinjaman selama tahun 2019	(9.417.890.000,00)
	Pembayaran pokok pinjaman selama TA 2020	(4.708.945.000,00)
4	Pembayaran bunga pinjaman kepada PT SMI	9.357.672.533,74
	Realisasi belanja bunga 2015	326.798.951,74
	Realisasi belanja bunga 2016	2.810.847.752,00
	Realisasi belanja bunga 2017	3.103.489.064,00
	Realisasi belanja bunga 2018	1.926.710.628,00
	Realisasi belanja bunga 2019	1.019.584.696,00
	Realisasi belanja bunga 2020	170.241.442,00
5	Utang bunga kepada PT SMI per 31 Desember 2020	0,00

Akibat permintaan penghentian sementara proyek relokasi, terdapat sisa pinjaman daerah yang belum dicairkan oleh PT SMI sebesar Rp66.037.385.000,00. Nilai tersebut tidak dicatat sebagai piutang daerah.

Untuk kewajiban pembayaran pinjaman kepada PT SMI, dari total Rp32.962.615.000,00 yang telah dicairkan, dapat dirinci dalam Tabel sebagai berikut.

Tabel 6.2.2 Rincian Kewajiban Pembayaran kepada PT SMI

Uraian	Periode				
	Tahun 1	Tahun 2	Tahun 3	Tahun 4	Tahun 5
Grace period 18 bulan	06 Agustus 2016 s.d 05 Februari 2017				
Pembayaran Pokok tahun 2017		9.417.890.000,00			
Pembayaran Pokok tahun 2018			9.417.890.000,00		
Pembayaran Pokok 2019				9.417.890.000,00	
Pembayaran Pokok 2020 (Lunas)					4.708.945.000,00

*Lunas pada TA 2020 sebesar Rp.32.962.615.000,00, atau senilai yang telah diterima Pemerintah Daerah

Lebih lanjut terkait pinjaman daerah kepada PT SMI, pemerintah daerah melalui surat Bupati Nomor: 650/017/BPKD-PS/I/2017 tanggal 16 Januari 2017, mengajukan

permohonan amandemen perjanjian investasi Nomor 127 tanggal 23 Juli 2014 antara PT SMI dengan Pemerintah Daerah Kabupaten Pesisir Selatan agar masa penarikan dan jangka waktu pinjaman dapat diperpanjang sedangkan tingkat suku bunga pinjaman diturunkan. Permohonan ini disetujui sebagian oleh PT SMI melalui surat Nomor: S-478/SMI/DPI/0517 tanggal 31 Mei 2017. Perpanjangan masa penarikan pinjaman dari sebelumnya 18 (delapan belas) bulan disetujui menjadi 30 (tiga puluh) bulan terhitung sejak pencairan pinjaman tahap pertama, namun permohonan perpanjangan jangka waktu pinjaman, penurunan tingkat suku bunga dan perpanjangan masa tenggang yang juga diajukan oleh Pemerintah Daerah dengan tujuan untuk meringankan beban keuangan daerah tidak disetujui oleh PT. SMI. Meskipun kegiatan relokasi dihentikan sementara, pemerintah daerah tetap melaksanakan kewajiban pembayaran pokok hutang dan bunga sebagaimana disepakati dalam perjanjian pinjaman.

Untuk menindaklanjuti persetujuan sebagaimana diatas, PT SMI dan Pemerintah Daerah Kabupaten Pesisir Selatan telah melakukan penandatanganan Addendum Perjanjian Pinjaman Pembiayaan pada tanggal 25 September 2017. Akta perubahan perjanjian pinjaman dibuat dihadapan notaris Pratiwi Handayani, S.H, dengan akta Nomor 13 tanggal 25 September 2017. Pada saat penandatanganan perjanjian, Bupati Pesisir Selatan sekaligus menyampaikan kepada Direktur Pembiayaan dan Investasi PT SMI bahwa terdapat gugatan dari PT Waskita Karya (Persero) Tbk selaku kontraktor pekerjaan kepada PT Katama selaku pelaksana pekerjaan pondasi terkait pemegang hak cipta pondasi laba-laba. Gugatan tersebut akan diinvestigasi lebih lanjut oleh BPKP selaku auditor terkait pengaruhnya terhadap keberlanjutan pelaksanaan proyek relokasi RSUD.

Dalam rangka pelaksanaan tindak lanjut pemeriksaan keuangan terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2016 serta rekomendasi dari BPK RI, Inspektorat Daerah Kabupaten Pesisir Selatan telah melaksanakan Pemeriksaan Khusus terkait Perencanaan dan Pembangunan Gedung Baru RSUD dr. M.Zein Painan pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang. Hasil Pemeriksaan Inspektorat Nomor 443/LHP.KS/Insp/I/2018 tanggal 15 Januari 2018 diketahui adanya indikasi penyimpangan baik dalam perencanaan maupun dalam pelaksanaan fisik. Untuk menindak lanjuti hal tersebut, Bupati Pesisir Selatan mengajukan permohonan audit investigative kepada BPKP Provinsi Sumatera Barat terhadap Perencanaan dan Pembangunan RSUD dr. M. Zein Painan melalui surat Nomor 700/070/Insp/I/2018 tanggal 16 Januari 2018. Surat ini ditembuskan kepada Kepala Cabang Sumbar Divisi Regional I PT Waskita Karya (Persero) Tbk dan Direktur PT SMI Jakarta.

Pelaksanaan Audit Investigatif oleh BPKP Perwakilan Sumatera Barat dilakukan melalui Surat Tugas Nomor ST-063/PW03/5/2018 tanggal 31 Januari 2018 selama 25 hari kerja (30 Januari 2018 s.d. 16 Maret 2018). Kemudian di Tahun 2019 BPKP Sumbar melakukan perpanjangan masa Audit Investigatif melalui Surat Tugas Nomor ST-55/PW03/5/2019 tanggal 21 Januari 2019 yaitu selama 25 hari kerja (21 Januari 2019 s.d. 29 Maret 2019). Terkait pelaksanaan audit investigatif, BPKP telah menerbitkan Laporan Hasil Audit Investigatif dengan Nomor LAINV-316/PW03/5/2019 tanggal 3 September 2019. Atas hal tersebut Bupati Pesisir Selatan melalui Surat Nomor 700/1581/Insp-PS/VI/2020 tanggal 2 Juni 2020 telah

menyampaikan laporan hasil audit tersebut kepada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Penghentian sementara pekerjaan pembangunan Relokasi RSUD dr. M. Zein Painan juga menjadi perhatian aparat penegak hukum. Pada Tahun 2020 berdasarkan Surat Pemberitahuan dimulainya Penyidikan Nomor SPDP/45/VIII/RES.5.3.3/2020/Ditreskimsus tanggal 4 Agustus 2020, Kepolisian Daerah Sumatera Barat melakukan penyidikan dugaan tindak pidana lingkungan hidup pada pembangunan Relokasi RSUD dr. M. Zein Painan. Pada tanggal 19 Maret 2021 berdasarkan Surat Ketetapan Nomor S.Tap/45/III/RES.5.3/2021/Ditreskimsus tentang Penghentian Penyidikan, Kepolisian Daerah Sumatera Barat menghentikan penyidikan dengan alasan tidak cukup bukti. Pada tahun 2021, Kejaksaan Tinggi Sumatera Barat melalui Satuan Tugas Tindak Pidana Korupsi juga melakukan penyidikan terhadap pembangunan Relokasi RSUD dr. M. Zein Painan. Atas hal tersebut Bupati Pesisir Selatan telah mengirimkan Surat kepada Kejaksaan Tinggi Sumatera Barat Nomor 944/243/BPKPAD-PS/2022 tanggal 5 April 2022 perihal permintaan arahan dari aspek hukum pekerjaan pembangunan Relokasi RSUD. dr. M. Zein Painan dengan penekanan pada :

1. Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan akan melanjutkan Pekerjaan Pembangunan Relokasi RSUD dr. M. Zein Painan dengan melengkapi dokumen yang dibutuhkan dan melakukan kajian teknis konstruksi bangunan.
2. Berdasarkan poin 1 (satu) diatas, kami minta kepada Bapak untuk memberikan arahan dari aspek hukum pelaksanaan kelanjutan Pekerjaan Pembangunan Relokasi RSUD dr. M. Zein Painan.

Sampai dengan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah selesai disusun, belum ada jawaban resmi dari Kejaksaan Tinggi Sumatera Barat.

Pada tahun 2021, Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan telah membentuk Tim Penyelesaian Kegiatan Relokasi RSUD dengan Surat Keputusan Bupati Pesisir Selatan Nomor 944/368/Kpts/BPT-PS/2021 tentang Pembentukan Tim Penyelesaian Kegiatan Relokasi Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) dr. Muhammad Zein Painan tanggal 25 Juni 2021 yang beberapa kali diubah terakhir dengan dengan Surat Keputusan Bupati Pesisir Selatan Nomor 944/720/Kpts/BPT-PS/2021 tentang Perubahan Kedua Atas Lampiran Keputusan Bupati Pesisir Selatan Nomor 944/368/Kpts/BPT-PS/2021 tentang Pembentukan Tim Penyelesaian Kegiatan Relokasi Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) dr. Muhammad Zein Painan tanggal 29 November 2021 dengan Ketua Sekretaris Daerah. Tugas Tim Penyelesaian Kegiatan Relokasi Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) dr. Muhammad Zein Painan adalah memberikan rekomendasi kepada Kepala Daerah terkait aspek hukum dan kelanjutan kegiatan relokasi RSUD, aspek perencanaan kegiatan relokasi RSUD, kondisi fisik *existing* bangunan dan barang milik daerah kegiatan relokasi RSUD, sumber pembiayaan untuk pembangunan dan pembayaran hutang kegiatan relokasi RSUD, dan jadwal serta jangka waktu penyelesaian kegiatan relokasi RSUD.

Tim Penyelesaian Kegiatan Relokasi Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) dr. Muhammad Zein Painan telah melaksanakan beberapa kali rapat yaitu tanggal 26 Juli 2021 dengan hasil rapat bahwa untuk tahap persiapan kelanjutan pembangunan harus

segera diselesaikan sampai akhir tahun 2021 dan pembangunan dapat dilaksanakan pada Tahun Anggaran 2022. Kemudian tanggal 30 Juli 2021 rapat dilanjutkan dengan agenda ekspos hasil audit investigatif BPKP oleh Inspektur Kabupaten Pesisir Selatan terkait kegiatan Relokasi RSUD, dimana Plt. Inspektur menyatakan belum menerima hasil audit investigatif BPKP dan menyarankan untuk dilakukan audiensi dengan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) untuk mendapatkan penjelasan kelanjutan Kegiatan Relokasi RSUD. Tanggal 9 Agustus 2021, Tim melakukan audiensi dengan BPK Perwakilan Provinsi Sumatera Barat *Via Zoom Meeting* yang diikuti oleh Kepala BPK Perwakilan Provinsi Sumatera Barat dan Bupati Pesisir Selatan, dengan hasil bahwa BPK meminta Bupati Pesisir Selatan dan Dinas PUPR agar menindaklanjuti rekomendasi LHP BPK tahun-tahun sebelumnya sesuai peraturan perundang-undangan dan mengambil langkah konkret terkait dengan kewajiban kepada PT. Waskita Karya dan kelanjutan Kegiatan Pembangunan RSUD dengan memastikan bahwa kondisi bangunan layak untuk dilanjutkan pembangunannya setelah dilakukan kajian teknis oleh lembaga yang berkompeten.

Selanjutnya tanggal 16 Agustus 2021 dilakukan pembahasan *Via Zoom Meeting* dengan PT. Waskita Karya terkait koordinasi fisik bangunan dan hutang pihak ketiga dengan hasil bahwa PT. Waskita Karya menyambut baik rencana Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan untuk melanjutkan pelaksanaan Kegiatan Relokasi RSUD, serta penyelesaian tagihan. Tanggal 26 Agustus 2021 Pj. Sekretaris Daerah selaku Ketua Tim menyampaikan telaahan staf kepada Bupati Pesisir Selatan dengan saran bahwa kelanjutan pembangunan Kegiatan Relokasi RSUD dapat dilanjutkan dengan pertimbangan bahwa konstruksi gedung layak dan aman, memenuhi kaidah lingkungan hidup, dan terkait konstruksi gedung tidak menjadi objek penyidikan dari aparat hukum. Tanggal 10 September 2021 Tim kembali melakukan *Zoom Meeting* dengan PT. Waskita Karya terkait pembahasan teknis kelanjutan Kegiatan Relokasi RSUD dengan hasil PT. Waskita Karya bersedia melanjutkan pembangunan dan melakukan audit teknis kelayakan bangunan.

Berkaitan dengan Dokumen Lingkungan, pada tanggal 24 September 2021 Kepala Dinas PUTR menyampaikan Surat Nomor 600/930/PUTR-PS/IX/2021 perihal Penapisan Jenis Dokumen Lingkungan dan Pembahasan Dokumen Evaluasi Lingkungan Hidup (DELH) RSUD dr. M. Zein Painan yang ditujukan ke Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Pesisir Selatan. Pada tanggal 5 Januari 2022, Kepala Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman, Pertanahan dan Lingkungan Hidup menyampaikan Surat Nomor 660/06/PERKIMTANLH-PS/2022 perihal Tindak Lanjut Permohonan Penapisan Dokumen Kegiatan Pengembangan RSUD dr. M. Zein Painan kepada Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Pesisir Selatan dengan penekanan bahwa pekerjaan pembangunan Relokasi RSUD dr. M. Zein sedang dalam proses pemeriksaan Satuan Tugas Tindak Pidana Korupsi Kejaksanaan Tinggi Sumatera Barat, sehingga untuk proses penapisan dan pembahasan dokumen lingkungan harus melampirkan rekomendasi dari Tugas Tindak Pidana Korupsi Kejaksanaan Tinggi Sumatera Barat.

Untuk tahun 2023 Pemerintah Daerah telah dilakukan pembayaran cicilan pokok hutang sebesar Rp3.000.000.000 (Tiga milyar rupiah) melalui mekanisme Belanja Tidak Terduga pada tanggal 2 Oktober 2023 dengan Surat Perintah Pengeluaran Dana Nomor: 04035/SP2D-LS/5.02.0.00.0.00.04.0000/Sep/2023, sesuai dengan Surat

Somasi yang dilayangkan oleh PT. Waskita Karya (Persero), Tbk Buiding Division melalui Soengkar 7 Partners Law Offices. Untuk tahun 2024 Pemerintah Daerah tidak melakukan pembayaran cicilan pokok utang kepada PT Waskita Karya walaupun telah dianggarkan dalam APBD TA 2024 dikarenakan terjadinya musibah bencana alam pada tanggal 7 Maret 2024 sehingga alokasi dana untuk pembayaran cicilan pokok utang dialihkan kepada penanganan bencana alam.

Walapun Pemerintah Daerah Kabupaten Pesisir Selatan mengalami keterbatasan pembiayaan, namun tetap berupaya dalam melanjutkan Relokasi Pembangunan RSUD dr. M. Zein, dengan cara mengajukan proposal lanjutan relokasi kepada Kementerian Pekerjaan Umum oleh Pj. Bupati Pesisir Selatan dengan Nomor 600/1080/PUTR-PS/X/2024 tanggal 25 Oktober 2024 untuk dapat dianggarkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Tahun Anggaran 2025. Namun sampai saat laporan keuangan ini disusun, pemerintah daerah belum mendapatkan jawaban atas usulan proposal tersebut dari Kementerian Pekerjaan Umum.

6.3 Revaluasi Aset Tetap

Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 75 Tahun 2017 tentang Penilaian Kembali Barang Milik Negara/Daerah mengamanatkan Pengelola Barang dapat melakukan penilaian Kembali atas nilai Barang Milik Daerah yang telah ditetapkan dalam neraca daerah sehingga sesuai dengan nilai wajarnya. Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan belum melaksanakan penilaian Kembali Barang Milik Daerah sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Presiden tersebut dikarenakan belum adanya petunjuk teknis tentang pelaksanaan penilaian Barang Milik Daerah.

Namun saat ini Bidang Barang Milik Daerah Badan Pengelolaan Keuangan Pendapatan dan Aset Daerah sedang melakukan rekonsiliasi tentang panjang jalan kabupaten antara yang tercatat dalam aplikasi SIPKD BMD dengan Surat Keputusan Penetapan Ruas Jalan Kabupaten dengan Bidang Bina Marga Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang. Rekonsiliasi ini bertujuan untuk mengklasifikasi ruas jalan utama dengan penambahan biaya pemeliharaan, dimana sebelumnya pencatatan pemeliharaan dan penambahan nilai ruas jalan menjadi aset baru, sehingga menimbulkan kesalahan penyajian jumlah aset jalan yang sesungguhnya. Selain itu rekonsiliasi ini juga menginventarisir jumlah aset tanah yang berada dibawah jalan dan disandingkan dengan catatan aset tanah yang ada pada aset tetap Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan.

BAB VII

PENUTUP

Demikianlah beberapa catatan penting yang dituangkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan untuk membantu mempermudah pemahaman pembaca laporan dalam mengevaluasi pencapaian kinerja Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan, yang diharapkan dapat memperjelas Laporan Keuangan Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2024.



L A M P I R A N

INDEKS DAFTAR LAMPIRAN

LAMPIRAN	1	Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja Barang dan Jasa TA 2024
LAMPIRAN	2	Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja Modal Peralatan dan Mesin TA 2024
LAMPIRAN	3	Rincian Kas
LAMPIRAN	3.1	Rincian Kas Daerah
LAMPIRAN	3.2	Rincian Kas pada Bendahara Pengeluaran
LAMPIRAN	3.3	Rincian Kas pada Bendahara Penerimaan
LAMPIRAN	3.4	Rincian Kas di Bendahara BLUD
LAMPIRAN	3.4.1	Rincian Kas BLUD Puskesmas - RSUD M. Zein Painan
LAMPIRAN	3.4.2	Rincian Kas BLUD Puskesmas - Dinas Kesehatan
LAMPIRAN	3.5	Rincian Kas di Bendahara FKTP
LAMPIRAN	3.6	Rincian Kas di Bendahara BOK
LAMPIRAN	3.7	Rincian Kas di Bendahara BOS
LAMPIRAN	3.7.1	Rincian Kas di Bendahara BOS - SD
LAMPIRAN	3.7.2	Rincian Kas di Bendahara BOS - SMP
LAMPIRAN	3.8	Rincian Kas di Bendahara BOP Paud
LAMPIRAN	3.9	Rincian Kas Lainnya
LAMPIRAN	3.10	Rincian Setara Kas
LAMPIRAN	4	Daftar Piutang Netto
LAMPIRAN	4.1	Daftar Piutang Pajak
LAMPIRAN	4.2	Daftar Piutang Retribusi
LAMPIRAN	4.2.1	Rincian Piutang Retribusi Pelayanan Tempat Rekreasi dan Olahraga - Dinas Pariwisata
LAMPIRAN	4.2.2	Rincian Piutang Retribusi Pasar - Dinas Perdagangan
LAMPIRAN	4.2.3	Rincian Piutang Retribusi Retribusi Pelayanan Kesehatan - Dinas Kesehatan
LAMPIRAN	4.2.3.1	Piutang Retribusi Retribusi Pelayanan Kesehatan - Dinas Kesehatan
LAMPIRAN	4.2.3.2	Piutang Retribusi Retribusi Pelayanan Kesehatan - Rumah Sakit Umum Daerah
LAMPIRAN	4.3	Daftar Piutang Lain-Lain PAD yang Sah
LAMPIRAN	4.4	Daftar Piutang Dana Bagi Hasil / DBH Provinsi
LAMPIRAN	4.5	Daftar Piutang Lainnya
LAMPIRAN	4.6	Daftar Penyisihan Piutang Tak Tertagih
LAMPIRAN	5	Daftar Persediaan
LAMPIRAN	5.1	Rincian Persediaan
LAMPIRAN	6	Investasi Non Permanen (Dana Bergulir)
LAMPIRAN	7	Investasi Permanen
LAMPIRAN	7.1	Hibah Aset Tetap dari Pihak Ketiga
LAMPIRAN	8	Rekapitulasi Saldo Awal Aset Tetap TA 2024 dengan Hasil Mapping Aset sesuai Aplikasi per SKPD
LAMPIRAN	8.1	Rekapitulasi Mutasi Saldo Awal Aset Tetap TA 2024 dari KIB B ke KIB E Akibat Mapping
LAMPIRAN	9	Rekapitulasi Aset Tetap per SKPD
LAMPIRAN	9.1	Aset Tetap -Tanah
LAMPIRAN	9.2	Aset Tetap - Peralatan dan Mesin
LAMPIRAN	9.3	Aset Tetap - Gedung dan Bangunan
LAMPIRAN	9.4	Aset Tetap - Jalan Irigasi dan Jaringan
LAMPIRAN	9.5	Aset Tetap - Aset Tetap Lainnya
LAMPIRAN	9.6	Aset Tetap - Kontruksi Dalam Pengerjaan
LAMPIRAN	10	Rekapitulasi Akumulasi Penyusutan
LAMPIRAN	10.1	Rekapitulasi Akumulasi Penyusutan Aset Tetap Peralatan dan Mesin
LAMPIRAN	10.2	Rekapitulasi Akumulasi Penyusutan Aset Tetap Gedung dan Bangunan
LAMPIRAN	10.3	Rekapitulasi Akumulasi Penyusutan Aset Tetap Jalan Irigasi dan Jaringan
LAMPIRAN	10.4	Rekapitulasi Akumulasi Penyusutan Aset Tetap Lainnya
LAMPIRAN	11	Rekapitulasi Aset Lainnya
LAMPIRAN	11.1	Dana Bagi Hasil Treasury Deposit Facility (TDF)
LAMPIRAN	11.2	Rekapitulasi Aset Lainnya - Tagihan Tuntutan Ganti Rugi Daerah
LAMPIRAN	11.2.1	Rekapitulasi Aset Lainnya - Rincian Tagihan Tuntutan Ganti Rugi Daerah
LAMPIRAN	11.3	Rekapitulasi Aset Lainnya - Kemitraan Dengan Pihak Ketiga
LAMPIRAN	11.4	Rekapitulasi Aset Lainnya - Aset Tidak Berwujud
LAMPIRAN	11.5	Rekapitulasi Aset Lainnya - Rekapitulasi Akumulasi Amortisasi
LAMPIRAN	11.6	Rekapitulasi Aset Lainnya - Aset Lain-Lain
LAMPIRAN	11.7	Rekapitulasi Aset Lainnya - Akumulasi Amortisasi
LAMPIRAN	12	Daftar Kewajiban Jangka Pendek
LAMPIRAN	12.1	Utang Perhitungan Pihak Ketiga
LAMPIRAN	12.2	Utang Bunga
LAMPIRAN	12.3	Bagian Lancar Utang kepada Pemerintah Pusat
LAMPIRAN	12.4	Pendapatan Diterima Dimuka
LAMPIRAN	12.4.1	Rincian Pendapatan Diterima Dimuka
LAMPIRAN	12.5	Daftar Utang Belanja dan Transfer
LAMPIRAN	12.5.1	Rincian Utang Belanja dan Transfer - Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
LAMPIRAN	12.5.2	Rincian Utang Belanja dan Transfer - Dinas Kesehatan
LAMPIRAN	12.5.3	Rincian Utang Belanja dan Transfer - Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
LAMPIRAN	12.5.4	Rincian Utang Belanja - Badan Penanggulangan Bencana Daerah
LAMPIRAN	12.6	Rekapitulasi Utang Jangka Pendek Lainnya
LAMPIRAN	13	Rekapitulasi Penghapusan BMD per SKPD
LAMPIRAN	14	Rekapitulasi Penyusutan Ekstrakomtabel per SKPD
LAMPIRAN	15	Laporan Realisasi Anggaran Berdasarkan Rincian Objek Pendapatan dan Belanja
LAMPIRAN	16	Ringkasan Anggaran dan Realisasi Pendapatan per SKPD
LAMPIRAN	17	Rekapitulasi - Belanja per SKPD
LAMPIRAN	18	Rekapitulasi - Belanja Operasi per SKPD

LAMPIRAN	19	Rekapitulasi - Belanja Modal per SKPD
LAMPIRAN	20	Laporan Fungsional BLUD
LAMPIRAN	21	Rekapitulasi Beban - LO
LAMPIRAN	21.1	Rincian Beban - LO
LAMPIRAN	22	Laporan Keuangan Bank Nagari
LAMPIRAN	23	Laporan Keuangan Perusahaan Umum Daerah (Perumda) Air Minum Tirta Langkisau
LAMPIRAN	24	Laporan Keuangan BPR Samudera
LAMPIRAN	25	Laporan Keuangan Balairung Citra Jaya
LAMPIRAN	26	Laporan Ikhtisar Dana Desa
LAMPIRAN	27	Ikhtisar Laporan Kinerja Pemerintah

Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja Barang dan Jasa TA 2024

No.	Perkiraan	Anggaran	Realisasi	%
1	2	3	4	5
1	Belanja Barang Pakai Habis	48,646,588,332.80	42,942,912,167.00	88.28%
2	Belanja Barang Tak Habis Pakai	42,636,577.00	41,574,500.00	97.51%
3	Belanja Aset Tetap yang Tidak Memenuhi Kriteria Kapitalisasi	308,992,584.00	305,641,650.00	98.92%
4	Belanja Jasa Kantor	76,529,314,673.00	67,306,431,925.00	87.95%
5	Belanja Iuran Jaminan/Asuransi	37,119,796,999.00	35,469,702,879.00	95.55%
6	Belanja Sewa Tanah	-	-	-
7	Belanja Sewa Peralatan dan Mesin	256,000,000.00	245,565,000.00	95.92%
8	Belanja Sewa Gedung dan Bangunan	148,100,410.00	136,100,000.00	91.90%
9	Belanja Sewa Aset Tetap Lainnya	132,750,000.00	105,125,000.00	79.19%
10	Belanja Jasa Konsultansi Konstruksi	6,146,957,943.00	5,006,004,977.00	81.44%
11	Belanja Jasa Konsultansi Non Konstruksi	100,000,000.00	99,295,000.00	99.30%
12	Belanja Jasa Ketersediaan Layanan (Availability Payment)	5,000,000.00	2,479,858.00	49.60%
13	Belanja Beasiswa Pendidikan PNS	-	-	-
14	Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan	134,769,050.00	121,254,515.00	89.97%
15	Belanja Pemeliharaan Tanah	-	-	-
16	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	6,864,746,610.00	6,073,987,514.00	88.48%
17	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	8,376,651,971.00	7,777,325,763.00	92.85%
18	Belanja Pemeliharaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi	8,825,399,373.00	7,555,115,965.00	85.61%
19	Belanja Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	-	-	-
20	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	76,339,653,003.00	69,702,986,303.00	91.31%
21	Belanja Uang yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	13,453,429,968.00	5,494,116,980.00	40.84%
22	Belanja Jasa yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	2,535,045,400.00	2,325,269,846.00	91.72%
23	Belanja Barang dan Jasa BOS	55,508,539,856.00	54,451,967,647.00	98.10%
24	Belanja Barang dan Jasa BLUD	93,302,168,802.00	90,084,171,159.16	96.55%
	Total	434,776,541,551.80	395,247,028,648.16	90.91%

Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja Modal Peralatan dan Mesin TA 2024

No.	Perkiraan	Anggaran	Realisasi	%
1	2	3	4	5
1	Belanja Modal Alat Besar Darat	5,145,810,000.00	5,091,891,000.00	98.95
2	Belanja Modal Alat Bantu	-	-	-
3	Belanja Modal Alat Angkutan Darat Bermotor	8,202,889,450.00	8,016,574,400.00	97.73
4	Belanja Modal Alat Angkutan Darat Tak Bermotor	311,851,000.00	311,100,000.00	99.76
5	Belanja Modal Alat Angkutan Apung Bermotor	-	-	-
6	Belanja Modal Alat Ukur	-	-	-
7	Belanja Modal Alat Pengolahan	3,552,000.00	-	-
8	Belanja Modal Alat Kantor	581,223,554.00	552,879,000.00	95.12
9	Belanja Modal Alat Rumah Tangga	3,785,441,602.00	3,649,989,487.00	96.42
10	Belanja Modal Meja dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat	-	-	-
11	Belanja Modal Alat Studio	40,146,455.00	40,059,500.00	99.78
12	Belanja Modal Alat Komunikasi	12,985,557.00	-	-
13	Belanja Modal Alat Kedokteran	3,460,709,971.00	3,354,395,052.00	96.93
14	Belanja Modal Alat Kesehatan Umum	29,082,000.00	-	-
15	Belanja Modal Alat Peraga Praktek Sekolah	3,736,100,000.00	3,724,049,000.00	99.68
16	Belanja Modal Unit Alat Laboratorium	45,888,638.00	42,791,890.00	93.25
17	Belanja Modal Alat Laboratorium Lingkungan Hidup	725,007,760.00	708,797,000.00	97.76
18	Belanja Modal Alat Laboratorium Stardarisasi Kalibrasi dan Instrumentasi	50,654,920.00	4,828,000.00	9.53
19	Belanja Modal Komputer Unit	1,509,084,117.00	1,421,393,228.00	94.19
20	Belanja Modal Peralatan Komputer	635,832,026.20	549,004,261.00	86.34
21	Belanja Modal Alat Eksplorasi	181,220,116.00	167,317,324.00	92.33
22	Belanja Modal Alat Pengeboran	-	-	-
23	Belanja Modal Alat Pengeboran Produksi, Pengolahan dan Pemurnian	636,637,238.00	636,600,000.00	99.99
24	Belanja Modal Alat Peraga Pelatihan dan Percontohan	-	-	-
25	Belanja Modal Rambu-Rambu Lalu Lintas Darat	257,379,348.00	256,924,000.00	99.82
26	Belanja Modal Peralatan Olahraga	-	-	-
27	Belanja Modal Peralatan dan Mesin BOS	5,910,646,388.00	4,106,241,208.00	69.47
28	Belanja Modal Peralatan dan Mesin BLUD	1,803,966,672.00	1,216,244,917.00	67.42
	Total	37,066,108,812.20	33,851,079,267.00	91.33%

KABUPATEN PESISIR SELATAN
REKAPITULASI ASET LANCAR
RINCIAN K A S
PER 31 DESEMBER 2024

NO	JENIS KAS	SALDO PER 31 DESEMBER 2023	SALDO PER 31 DESEMBER 2024
		(Rp)	(Rp)
1.1	Kas Daerah	113,669,002,281.88	61,934,119,104.76
1.2	Kas Bendahara Pengeluaran	-	-
1.3	Kas Bendahara Penerimaan	-	-
1.4	Kas di BLUD	10,009,988,977.48	6,556,211,055.32
1.5	Kas di Bendahara FKTP	-	-
1.6	Kas di Bendahara BOK	5,549,681,610.00	3,478,962,217.00
1.7	Kas BOS	81,349,193.00	47,985,275.00
1.8	Kas di Bendahara BOP PAUD	-	29,524,000.00
1.9	Kas Lainnya	-	-
	JUMLAH	129,310,022,062.36	72,046,801,652.08

PEMERINTAH KABUPATEN PESISIR SELATAN
RINCIAN KAS DAERAH
PER 31 DESEMBER 2024

NO	JENIS KAS	SALDO PER 31 DESEMBER 2024 (Rp)
1.1	Kas Daerah	
1.1.1	Kas Daerah Bank Nagari	61,934,119,104.76
1.1.2	Kas Daerah BRI	-
1.1.3	Kas Daerah BSI	-
1.1.4	Kas Daerah BNI	-
	JUMLAH KASDA	61,934,119,104.76

PEMERINTAH KABUPATEN PESISIR SELATAN
RINCIAN KAS DI BENDAHARA PENGELUARAN
PER 31 DESEMBER 2024

NO	SKPD	Saldo	Keterangan
1	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	-	
2	Dinas Kesehatan	-	
3	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	-	
4	Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman, Pertanahan dan Lingkungan Hidup	-	
5	Dinas Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran	-	
6	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	-	
7	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	-	
8	Dinas Koperasi, UKM, dan Tenaga Kerja	-	
9	Dinas Perikanan dan Pangan	-	
10	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	-	
11	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	-	
12	Dinas Perhubungan	-	
13	Dinas Komunikasi dan Informatika	-	
14	Dinas Perdagangan dan Transmigrasi	-	
15	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Satu Pintu	-	
16	Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga	-	
17	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan	-	
18	Dinas Pertanian	-	
19	Inspektorat Daerah	-	
20	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan	-	
21	Badan Pengelola Keuangan Pendapatan dan Aset Daerah	-	
22	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	-	
23	Sekretariat Daerah	-	
24	Sekretariat DPRD	-	
25	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	-	
26	Kecamatan Koto IX Tarusan	-	
27	Kecamatan Bayang	-	
28	Kecamatan Bayang Utara	-	
29	Kecamatan IV Jurai	-	
30	Kecamatan Batang Kapas	-	
31	Kecamatan Sutera	-	
32	Kecamatan Lengayang	-	
33	Kecamatan Ranah Pesisir	-	
34	Kecamatan Linggo Sari Baganti	-	
35	Kecamatan Pancung Soal	-	
36	Kecamatan Air Pura	-	
37	Kecamatan Basa IV Balai Tapan	-	
38	Kecamatan Ranah Ampek Hulu Tapan	-	
39	Kecamatan Lunang	-	
40	Kecamatan Silaut	-	
	Total	-	

PEMERINTAH KABUPATEN PESISIR SELATAN
RINCIAN KAS PADA BENDAHARA PENERIMAAN
PER 31 DESEMBER 2024

NO	SKPD	Saldo	Keterangan
1	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	-	
2	Dinas Kesehatan	-	
3	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	-	
4	Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman, Pertanahan dan Lingkungan Hidup	-	
5	Dinas Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran	-	
6	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	-	
7	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	-	
8	Dinas Koperasi, UKM, dan Tenaga Kerja	-	
9	Dinas Perikanan dan Pangan	-	
10	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	-	
11	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	-	
12	Dinas Perhubungan	-	
13	Dinas Komunikasi dan Informatika	-	
14	Dinas Perdagangan dan Transmigrasi	-	
15	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu	-	
16	Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga	-	
17	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan	-	
18	Dinas Pertanian	-	
19	Inspektorat Daerah	-	
20	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan	-	
21	Badan Pengelola Keuangan Pendapatan dan Aset Daerah	-	
22	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	-	
23	Sekretariat Daerah	-	
24	Sekretariat DPRD	-	
25	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	-	
26	Kecamatan Koto IX Tarusan	-	
27	Kecamatan Bayang	-	
28	Kecamatan Bayang Utara	-	
29	Kecamatan IV Jurai	-	
30	Kecamatan Batang Kapas	-	
31	Kecamatan Sutera	-	
32	Kecamatan Lengayang	-	
33	Kecamatan Ranah Pesisir	-	
34	Kecamatan Linggo Sari Baganti	-	
35	Kecamatan Pancung Soal	-	
36	Kecamatan Air Pura	-	
37	Kecamatan Basa IV Balai Tapan	-	
38	Kecamatan Ranah Ampek Hulu Tapan	-	
39	Kecamatan Lunang	-	
40	Kecamatan Silaut	-	
Total		-	

PEMERINTAH KABUPATEN PESISIR SELATAN
RINCIAN KAS DI BENDAHARA BLUD
PER 31 DESEMBER 2024

NO	SKPD	SALDO PER 31 DESEMBER 2024 (Rp)	Keterangan
1	BLUD RSUD M. Zein Painan	3,591,873,809.13	
2	BLUD Puskesmas - Dinas Kesehatan	2,964,337,246.19	20 Puskesmas
	JUMLAH	6,556,211,055.32	

KABUPATEN PESISIR SELATAN
REKAPITULASI ASET LANCAR
RINCIAN KAS BLUD RSUD M. Zein Painan
PER 31 DESEMBER 2024

Saldo Awal	Pendapatan	Belanja	SALDO DIAKUI	SALDO DI BANK		SELISIH
6,690,790,962.13	75,973,149,208.00	79,072,139,554.00	3,591,800,616.13	Bank BRI:	3,194,748,167.13	
				Bank Nagari:	397,125,642.00	
6,690,790,962.13	75,973,149,208.00	79,072,139,554.00	3,591,800,616.13		3,591,873,809.13	

KABUPATEN PESIR SELATAN
REKAPITULASI ASET LANCAR
RINCIAN KAS BLUD PUSKESMAS - DINAS KESEHATAN
PER 31 DESEMBER 2024

NO	PUSKESMAS	PENDAPATAN TA 2024	SILPA 2023	TOTAL PENERIMAAN	TOTAL BELANJA	SALDO KAS per 31 DES 2024	SALDO di REKENING KORAN/ SILPA Per 31 Des 2024	SELISIH REKENING KORAN DAN SALDO KAS	KETERANGAN SELISIH	
									KAS DI REKENING BENDAHARA PENGELUARAN	KAS TUNAI DI BENDAHARA PENERIMA
1	Puskesmas Air Haji	3,037,135,688.00	326,902,720.00	3,364,038,408.00	2,805,422,765.00	558,615,643.00	558,615,643.00	0.00	0.00	0.00
2	Puskesmas Air Pura	827,524,143.00	142,664,485.00	970,188,628.00	878,301,135.00	91,887,493.00	91,887,493.00	0.00	0.00	0.00
3	Puskesmas Asam Kumbang	623,798,725.00	127,440,882.00	751,239,607.00	697,194,723.00	54,044,884.00	54,044,884.00	0.00	0.00	0.00
4	Puskesmas Balai Selasa	2,552,107,270.00	459,972,639.00	3,012,079,909.00	2,658,719,942.00	353,359,967.00	353,359,967.00	0.00	0.00	0.00
5	Puskesmas Barung Barung Belantai	745,695,334.00	42,558,463.00	788,253,797.00	745,149,157.00	43,104,640.00	43,104,640.00	0.00	0.00	0.00
6	Puskesmas Inderapura	1,744,825,100.00	215,303,565.00	1,960,128,665.00	1,841,779,705.00	118,348,960.00	118,348,960.00	0.00	0.00	0.00
7	Puskesmas Kambang	3,010,910,192.00	346,961,615.00	3,357,871,807.00	3,167,779,329.00	190,092,478.00	190,092,478.00	0.00	0.00	0.00
8	Puskesmas Koto Baru	928,708,498.00	31,252,300.00	959,960,798.00	879,154,010.00	80,806,788.00	80,806,788.00	0.00	0.00	0.00
9	Puskesmas Koto Berapak	1,282,241,672.00	110,695,603.00	1,392,937,275.00	1,324,402,195.00	68,535,080.00	68,535,080.00	0.00	0.00	0.00
10	Puskesmas IV Koto Mudik	604,091,814.00	115,878,767.00	719,970,581.00	698,048,759.00	21,921,822.00	21,921,822.00	0.00	0.00	0.00
11	Puskesmas Lumpo	741,281,623.00	85,965,969.00	827,247,592.00	793,515,990.00	33,731,602.00	33,731,602.00	0.00	0.00	0.00
12	Puskesmas Pasar Baru	1,456,562,890.00	148,914,851.00	1,605,477,741.00	1,391,759,433.00	213,718,308.00	213,718,308.00	0.00	0.00	0.00
13	Puskesmas Pasar Kuok	1,572,387,050.00	232,562,105.00	1,804,949,155.00	1,660,090,761.00	144,858,394.00	144,858,394.00	0.00	0.00	0.00
14	Puskesmas Ranah Ampek Hulu	647,840,195.00	131,396,815.00	779,237,010.00	623,210,575.00	156,026,435.00	156,026,435.00	0.00	0.00	0.00
15	Puskesmas Salido	1,843,359,673.00	30,419,667.00	1,873,779,340.00	1,734,453,318.00	139,326,022.00	139,326,022.00	0.00	0.00	0.00
16	Puskesmas Surantih	2,877,153,150.00	316,219,432.40	3,193,372,582.40	3,061,402,332.16	131,970,250.24	131,970,250.24	0.00	0.00	0.00
17	Puskesmas Tanjung Beringin	1,325,731,370.00	44,980,176.00	1,370,711,546.00	1,085,646,332.00	285,065,214.00	285,065,214.00	0.00	0.00	0.00
18	Puskesmas Tanjung Makmur	1,204,207,903.00	97,237,518.40	1,301,445,421.40	1,196,536,041.00	104,909,380.40	104,909,380.40	0.00	0.00	0.00
19	Puskesmas Tapan	1,103,272,167.00	125,450,292.00	1,228,722,459.00	1,125,023,853.00	103,698,606.00	103,698,606.00	0.00	0.00	0.00
20	Puskesmas Tarusan	1,928,432,255.00	186,302,682.55	2,114,734,937.55	2,044,419,658.00	70,315,279.55	70,315,279.55	0.00	0.00	0.00
		30,057,266,712.00	3,319,080,547.35	33,376,347,259.35	30,412,010,013.16	2,964,337,246.19	2,964,337,246.19	0.00	0.00	0.00

PEMERINTAH KABUPATEN PESISIR SELATAN
RINCIAN KAS DI BENDAHARA FKTP
PER 31 DESEMBER 2024

NO	PUSKESMAS	NO REKENING	SALDO
	NIHIL		
	Total		-

PEMERINTAH KABUPATEN PESISIR SELATAN
RINCIAN KAS DI BENDAHARA BOK
DINAS KESEHATAN TAHUN ANGGARAN 2024

NO	PUSKESMAS	JUMLAH DANA SALUR	REALISASI BELANJA SAMPAI BULAN DESEMBER 2024	SALDO PER 31 DESEMBER 2024	KETERANGAN
1	Br Br Belantai	619,979,000	492,188,624	127,790,376	
2	Tarusan	841,780,000	683,303,394	158,476,606	
3	Pasar baru	788,267,000	721,783,417	66,483,583	
4	Koto Berapak	809,541,000	707,686,225	101,854,775	
5	Asam Kumbang	708,000,000	453,000,520	254,999,480	
6	Lumpo	673,000,000	623,952,726	49,047,274	
7	Salido	650,000,000	578,165,585	71,834,415	
8	IV Kt Mudik	748,035,000	637,823,570	110,211,430	
9	Pasar Kuok	798,000,000	584,085,446	213,914,554	
10	Surantih	798,000,000	538,169,079	259,830,921	
11	Kambang	768,000,000	668,156,749	99,843,251	
12	Koto Baru	778,000,000	625,642,267	152,357,733	
13	Balai Selasa	803,000,000	528,146,830	274,853,170	
14	Air Haji	838,000,000	668,286,167	169,713,833	
15	Air Pura	775,000,000	597,517,068	177,482,932	
16	Indrapura	678,000,000	511,406,946	166,593,054	
17	Tapan	681,238,000	572,503,804	108,734,196	
18	Ranah Ampek Hulu	793,000,000	590,993,634	202,006,366	
19	Tanjung Beringin	787,000,000	542,357,870	244,642,130	
20	Tanjung Makmur	772,000,000	587,981,194	184,018,806	
21	Kayu Gadang	783,000,000	498,726,668	284,273,332	
		15,890,840,000	12,411,877,783	3,478,962,217	

Lampiran : 3.7

**KABUPATEN PESISIR SELATAN
REKAPITULASI KAS DIBENDAHARA BOS
PER 31 DESEMBER 2024**

NO	URAIAN	SALDO KAS BOS	SALDO REKENING KORAN BOS	SELISIH	KET
1	2	3	4	5	6
1	Kas di Bendahara BOS SD	38,648,246.00	37,721,990.00	926,256.00	
2	Kas di Bendahara BOS SMP	9,337,029.00	9,533,393.00	(196,364.00)	
	JUMLAH	47,985,275.00	47,255,383.00	729,892.00	

**RINCIAN KAS DIBENDAHARA BOS SD
PER 31 DESEMBER 2024**

No	NPSN	Nama Sekolah	Kecamatan	SALDO KAS BOS	SALDO REKENING KORAN BOS	Selisih	Keterangan
1	10307573	SDN 01 BARUNG BELANTAI	Koto Xi Tarusan	50,000	50,000	0-	
2	10307574	SDN 02 GURUN PANJANG	Koto Xi Tarusan	51,800	51,800	0-	
3	10307571	SDN 03 SIMPANG	Koto Xi Tarusan	37,442	37,442	0-	
4	10302042	SDN 04 NANGGALO	Koto Xi Tarusan	6,011,900	6,011,900	0-	
5	10302077	SDN 05 NANGGALO	Koto Xi Tarusan	25,000	25,000	0-	
6	10302084	SDN 06 KAMPUNG PANSUR	Koto Xi Tarusan	25,038	25,038	0-	
7	10302070	SDN 07 SUNGAI TAWAR	Koto Xi Tarusan	25,000	25,000	0-	
8	10302088	SDN 08 MANDEH	Koto Xi Tarusan	25,000	25,000	0-	
9	10302218	SDN 09 KOTO PULAI	Koto Xi Tarusan	25,000	25,000	0-	
10	10302205	SDN 10 SEI LUNDANG	Koto Xi Tarusan	25,138	25,138	0-	
11	10307577	SDN 11 KAMPUNG TARANDAM	Koto Xi Tarusan	25,000	25,000	0-	
12	10307578	SDN 12 DUSUN	Koto Xi Tarusan	25,000	25,000	0-	
13	10307579	SDN 13 SUNGAI PINANG	Koto Xi Tarusan	25,000	25,000	0-	
14	10307580	SDN 14 SIGUNTUR MUDA	Koto Xi Tarusan	25,708	25,708	0-	
15	10308061	SDN 15 SUNGAI NYALO	Koto Xi Tarusan	25,000	25,000	0-	
16	10307582	SDN 16 PULAU KARAM	Koto Xi Tarusan	28,000	28,000	0-	
17	10307583	SDN 17 SIMAUNG CUMATEH	Koto Xi Tarusan	260,000	260,000	0-	
18	10302185	SDN 18 KAMPUNG PANSUR	Koto Xi Tarusan	33,896	33,896	0-	
19	10302172	SDN 19 SUNGAI TALANG	Koto Xi Tarusan	49,463	49,463	0-	
20	10302181	SDN 20 TALAWI	Koto Xi Tarusan	25,000	25,000	0-	
21	10301871	SDN 21 KAPUH	Koto Xi Tarusan	25,000	25,000	0-	
22	10301892	SDN 22 DUKU	Koto Xi Tarusan	25,000	25,000	0-	
23	10301878	SDN 23 SAWAH LIAT	Koto Xi Tarusan	25,000	25,000	0-	
24	10301881	SDN 24 BARUNG-BARUNG BELANTAI	Koto Xi Tarusan	37,950	37,950	0-	
25	10301917	SDN 25 CAROCOK ANAU	Koto Xi Tarusan	25,000	25,000	0-	
26	10301912	SDN 26 NANGGALO	Koto Xi Tarusan	25,000	25,000	0-	
27	10301904	SDN 27 KOTO	Koto Xi Tarusan	54,650	54,650	0-	
28	10301837	SDN 28 SIMPANG	Koto Xi Tarusan	25,000	25,000	0-	
29	10301841	SDN 29 SIGUNTUR MUDA	Koto Xi Tarusan	25,000	25,000	0-	
30	10301822	SDN 30 DESA BARU	Koto Xi Tarusan	25,000	25,000	0-	
31	10301826	SDN 31 KAMPUNG TANJUNG	Koto Xi Tarusan	25,000	25,000	0-	
32	10301863	SDN 32 TELUK RAYA	Koto Xi Tarusan	25,000	25,000	0-	
33	10301864	SDN 33 GURUN PANJANG KAPUH	Koto Xi Tarusan	25,900	25,900	0-	
34	10301849	SDN 34 SIGUNTUR TUA	Koto Xi Tarusan	25,000	25,000	0-	
35	10301852	SDN 35 KAMPUNG SAWAH	Koto Xi Tarusan	50,440	50,440	0-	
36	10301856	SDN 36 DUSUN	Koto Xi Tarusan	25,000	25,000	0-	
37	10308228	SDN 37 KOTO PULAI	Koto Xi Tarusan	25,000	25,000	0-	
38	10302002	SDN 38 CUMATEH	Koto Xi Tarusan	50,386	50,386	0-	
39	10302005	SDN 39 KAMPUNG PANSUR	Koto Xi Tarusan	25,000	25,000	0-	
40	10301980	SDN 40 KOTO PANJANG	Koto Xi Tarusan	25,000	25,000	0-	
41	10301982	SDN 41 KAPUH	Koto Xi Tarusan	53,655	53,655	0-	
42	10301987	SDN 42 TALAWI	Koto Xi Tarusan	25,000	25,000	0-	
43	10301989	SDN 43 SIGUNTUR MUDA	Koto Xi Tarusan	25,500	25,500	0-	
44	10302007	SDN 44 TARATAK	Koto Xi Tarusan	25,000	25,000	0-	
45	10302024	SDN 45 PULAU KARAM	Koto Xi Tarusan	25,000	25,000	0-	
46	10302053	SDN 02 PASAR BARU	Bayang	215,510	215,510	0-	
47	10302058	SDN 03 KAMPUNG TENGAH	Bayang	69,198	69,198	0-	
48	10302047	SDN 04 TALAOK	Bayang	52,700	52,700	0-	
49	10302078	SDN 05 PASAR BARU	Bayang	904,102	904,102	0-	
50	10302073	SDN 08 KOTO BERAPAK	Bayang	69,200	69,200	0-	
51	10302209	SDN 09 TELUK BAKUNG	Bayang	65,029	65,029	0-	
52	10302201	SDN 10 KOTO JUA	Bayang	81,571	81,571	0-	
53	10302235	SDN 11 KAPUJAN	Bayang	37,600	37,600	0-	
54	10302255	SDN 12 API-API	Bayang	57,415	57,415	0-	
55	10302236	SDN 13 KUBANG	Bayang	25,000	25,000	0-	
56	10302246	SDN 14 LUBUK AUR	Bayang	29,000	29,000	0-	
57	10302147	SDN 16 SEI PUTIH	Bayang	45,800	45,800	0-	
58	10302152	SDN 17 KAPENCONG	Bayang	71,200	71,200	0-	
59	10302171	SDN 18 KAMPUNG TENGAH	Bayang	53,350	53,350	0-	
60	10302173	SDN 19 TANJUNG DURIAN	Bayang	58,296	58,296	0-	
61	10302177	SDN 20 KOTO BARU	Bayang	357,600	357,600	0-	
62	10301884	SDN 22 TANAH KERAS	Bayang	123,850	123,850	0-	
63	10301873	SDN 23 APA JAYA	Bayang	44,900	44,900	0-	
64	10301898	SDN 24 KOTO BERAPAK	Bayang	33,600	33,600	0-	
65	10301907	SDN 27 LIMAU ASAM	Bayang	139,912	139,912	0-	
66	10301843	SDN 28 KARANG PAUH	Bayang	25,080	25,080	0-	
67	10301838	SDN 29 GANTING	Bayang	61,528	61,528	0-	
68	10301821	SDN 30 KOTO BARU	Bayang	74,002	74,002	0-	
69	10301825	SDN 31 AMBACANG	Bayang	25,900	25,900	0-	
70	10301845	SDN 32 GURUN PANJANG	Bayang	24,192	74,192	50,000	Uang masuk ke rekening sekolah karena ditetapkan sebagai undian simpeda sebanyak Rp. 50.000,-
71	10301865	SDN 33 KAPUJAN	Bayang	41,200	41,200	0-	
72	10301848	SDN 34 PASAR BARU	Bayang	57,135	57,135	0-	
73	10301851	SDN 35 AMBACANG KAMBA	Bayang	39,926	39,926	0-	
74	10301993	SDN 36 LUBUK PASING	Bayang	43,700	43,700	0-	
75	10301995	SDN 37 LUBUK GAMBIR	Bayang	90,750	90,750	0-	
76	10302001	SDN 38 API-API	Bayang	137,295	137,295	0-	
77	10301991	SDN 39 TANJUNG SABA	Bayang	26,468	26,468	0-	
78	10308062	SDN 40 LERENG BUKIT	Bayang	78,600	78,600	0-	
79	10301984	SDN 41 KOTO BERAPAK	Bayang	48,600	48,600	0-	

80	10301986	SDN 42 KUBANG	Bayang	139,400	139,400	0	-
81	10302006	SDN 44 LUBUK ANAU	Bayang	57,130	57,130	0	-
82	10302023	SDN 45 JAMBAK	Bayang	39,400	39,400	0	-
83	10302026	SDN 46 GURUN PANJANG	Bayang	96,150	96,150	0	-
84	10308197	SDN 01 ASAM KUMBANG	Bayang Utara	26,942	26,942	0	-
85	10307575	SDN 02 TERATAK TELENG	Bayang Utara	52,000	52,000	0	-
86	10307576	SDN 03 PANCUNG TEBAL	Bayang Utara	25,060	25,060	0	-
87	10307581	SDN 04 KOTO RANAH	Bayang Utara	25,000	25,000	0	-
88	10308199	SDN 05 MUARA AIR	Bayang Utara	35,000	35,000	0	-
89	10307586	SDN 06 PULUT-PULUT	Bayang Utara	25,000	25,000	0	-
90	10307585	SDN 07 NGALAU GADANG	Bayang Utara	35,200	35,200	0	-
91	10308198	SDN 08 LIMAU-LIMAU	Bayang Utara	25,000	25,000	0	-
92	10302143	SDN 01 TAMBANG	IV Jurai	102,300	102,300	0	-
93	10302056	SDN 02 TERATAK TENGAH	IV Jurai	27,000	27,000	0	-
94	10302038	SDN 03 SUNGAI GAYO	IV Jurai	26,752	26,752	0	-
95	10302046	SDN 04 SAGO	IV Jurai	51,128	51,128	0	-
96	10302080	SDN 05 SALIDO KECIL	IV Jurai	27,127	27,127	0	-
97	10302083	SDN 06 EMPANG TERAS	IV Jurai	117,992	117,992	0	-
98	10302069	SDN 07 PASAR SALIDO	IV Jurai	111,123	111,123	0	-
99	10302212	SDN 08 PAINAN SELATAN	IV Jurai	46,466	46,466	0	-
100	10302203	SDN 10 PAINAN TIMUR	IV Jurai	57,701	61,451	3,750	Pajak Jasa perbaikan saluran air belum di bayarkan sebanyak Rp. 3.750,-
101	10302233	SDN 11 KOTO RANGGO	IV Jurai	43,800	43,800	0	-
102	10302256	SDN 12 LIMAU GADANG	IV Jurai	34,996	34,996	0	-
103	10302239	SDN 13 PAINAN UTARA	IV Jurai	137,832	137,832	0	-
104	10302245	SDN 14 LABAN	IV Jurai	151,100	151,100	0	-
105	10302160	SDN 15 BUNGA PASANG	IV Jurai	28,335	28,335	0	-
106	10302167	SDN 16 BUKIT SJAYAH	IV Jurai	131,069	131,069	0	-
107	10302150	SDN 17 BATU KUNIT	IV Jurai	28,949	28,949	0	-
108	10302170	SDN 18 BUKIT KECIL	IV Jurai	45,400	45,400	0	-
109	10302195	SDN 19 PAINAN SELATAN	IV Jurai	28,060	28,060	0	-
110	10302182	SDN 20 TAMBANG	IV Jurai	74,400	74,400	0	-
111	10302035	SDN 21 BUNGA PASANG	IV Jurai	39,402	39,402	0	-
112	10301893	SDN 22 KAMPUNG LUAR SALIDO	IV Jurai	84,083	84,083	0	-
113	10301876	SDN 23 PAINAN UTARA	IV Jurai	105,643	105,643	0	-
114	10301915	SDN 24 SALIDO KECIL	IV Jurai	54,860	54,860	0	-
115	10301918	SDN 25 BUKIT KECIL	IV Jurai	36,750	36,750	0	-
116	10301901	SDN 26 PAINAN SELATAN	IV Jurai	65,950	65,700	-250	Pengembalian uang ke rekening sekolah karena kesalahan belanja p. 250,-
117	10301910	SDN 27 SAGO	IV Jurai	123,559	123,559	0	-
118	10301834	SDN 28 PAINAN TIMUR	IV Jurai	85,500	85,500	0	-
119	10301842	SDN 29 SUNGAI NIPAH	IV Jurai	25,641	25,641	0	-
120	10301824	SDN 30 TARATAK TENGAH	IV Jurai	27,661	27,661	0	-
121	10301844	SDN 31 SUNGAI SARIK	IV Jurai	66,281	66,281	0	-
122	10301861	SDN 32 KOTO SALIDO	IV Jurai	123,366	123,366	0	-
123	10301866	SDN 33 KOTO RAWANG	IV Jurai	68,700	68,700	0	-
124	10301857	SDN 34 GUNUNG BUNGKUK	IV Jurai	25,400	25,400	0	-
125	10302127	SDN 01 PASAR KUOK	Batang Kapas	30,556	30,556	0	-
126	10302055	SDN 02 SUNGAI NYALO	Batang Kapas	77,848	77,848	0	-
127	10302057	SDN 03 BUKIT TAMBUN TULANG	Batang Kapas	134,520	134,520	0	-
128	10302044	SDN 04 PASAR TALUK	Batang Kapas	27,789	27,789	0	-
129	10302081	SDN 05 SUNGAI BUNGIN	Batang Kapas	31,088	31,088	0	-
130	10302082	SDN 06 ANAKAN	Batang Kapas	30,123	30,123	0	-
131	10302071	SDN 07 TUIK	Batang Kapas	25,385	25,385	0	-
132	10302074	SDN 08 KOTO GUNUNG	Batang Kapas	34,600	34,600	0	-
133	10302230	SDN 09 LUBUK NYIUR	Batang Kapas	25,750	25,750	0	-
134	10302207	SDN 10 TERATAK TEMPATIH	Batang Kapas	25,610	25,610	0	-
135	10302253	SDN 11 TELUK BETUNG	Batang Kapas	33,534	33,534	0	-
136	10302257	SDN 12 LIMAU SUNDAL	Batang Kapas	539,000	539,000	0	-
137	10302237	SDN 13 LUBUK NYIUR	Batang Kapas	25,000	25,000	0	-
138	10302244	SDN 14 KOTO NAN TIGO	Batang Kapas	30,700	30,700	0	-
139	10302164	SDN 15 KOTO PANJANG	Batang Kapas	28,000	28,000	0	-
140	10302148	SDN 16 TELUK KASAI	Batang Kapas	68,543	68,543	0	-
141	10302155	SDN 17 SAPAN	Batang Kapas	42,150	42,150	0	-
142	10302190	SDN 18 TANJUNG KANDIS	Batang Kapas	42,031	42,031	0	-
143	10302192	SDN 19 KAMPUNG BARU	Batang Kapas	116,522	116,522	0	-
144	10302175	SDN 20 JALAMU	Batang Kapas	75,000	75,000	0	-
145	10301889	SDN 21 LIMAU SUNDAL	Batang Kapas	93,540	93,540	0	-
146	10301896	SDN 22 PASAR TALUK	Batang Kapas	66,600	66,600	0	-
147	10301877	SDN 23 PASAR KUOK	Batang Kapas	25,000	25,000	0	-
148	10301880	SDN 24 ANAKAN	Batang Kapas	68,000	68,000	0	-
149	10301921	SDN 25 SUNGAI NYALO	Batang Kapas	26,000	26,000	0	-
150	10301923	SDN 26 BUKIT TAMBUN TULANG	Batang Kapas	26,966	26,966	0	-
151	10301908	SDN 27 LUBUK NYIUR	Batang Kapas	68,760	68,760	0	-
152	10301925	SDN 28 JORONG NAN TIGO	Batang Kapas	432,584	432,584	0	-
153	10301830	SDN 29 TERATAK TEMPATIH	Batang Kapas	41,398	41,398	0	-
154	10301819	SDN 30 KOTO TUO	Batang Kapas	50,000	50,000	0	-
155	10301829	SDN 31 LIMAU MANIS	Batang Kapas	31,950	31,950	0	-
156	10301860	SDN 32 KOTO KEDUDUK	Batang Kapas	96,655	96,655	0	-
157	10308031	SDN 01 KOTO MERAPAK	Sutera	29,118	29,118	0	-
158	10308033	SDN 02 AMPALU	Sutera	30,148	30,148	0	-
159	10308189	SDN 03 PASAR AMPING PARAK	Sutera	84,999	84,999	0	-
160	10308190	SDN 04 PASAR SURANTIH	Sutera	184,192	184,192	0	-
161	10308034	SDN 05 TIMBULUN	Sutera	55,247	55,247	0	-
162	10308035	SDN 06 PASAR TERATAK	Sutera	73,805	73,805	0	-
163	10308036	SDN 07 SIKABU MUNTO	Sutera	28,930	28,930	0	-
164	10308037	SDN 08 PASAR SURANTIH	Sutera	25,008	25,008	0	-
165	10308038	SDN 09 UJUNG AIR	Sutera	26,540	26,540	0	-

166	10308039	SDN 10 KAYU GADANG	Sutera	69,745	69,745	0	-
167	10308040	SDN 11 RAWANG	Sutera	77,398	77,398	0	-
168	10308041	SDN 12 GUNUNG MALELO	Sutera	112,220	112,220	0	-
169	10308042	SDN 13 LANGGAI	Sutera	26,500	26,500	0	-
170	10308043	SDN 14 SUNGAI SIRAH	Sutera	55,050	55,050	0	-
171	10308191	SDN 15 LANSANO	Sutera	117,700	117,700	0	-
172	10308044	SDN 16 PADANG LAWAS	Sutera	64,723	64,723	0	-
173	10308045	SDN 17 PASAR SURANTH	Sutera	124,300	124,300	0	-
174	10308046	SDN 18 TIMBULUN	Sutera	128,589	128,589	0	-
175	10308047	SDN 19 KOTO TERATAK	Sutera	70,386	70,386	0	-
176	10308048	SDN 20 KAYU GADANG	Sutera	52,900	52,900	0	-
177	10308049	SDN 21 KAYU ARO	Sutera	29,950	29,950	0	-
178	10308050	SDN 22 ALAI	Sutera	25,816	25,816	0	-
179	10308051	SDN 23 TANJUNG GADANG	Sutera	50,625	50,625	0	-
180	10308052	SDN 24 SURANTIH	Sutera	89,409	89,409	0	-
181	10308053	SDN 25 AMPING PARAK	Sutera	78,560	78,560	0	-
182	10308192	SDN 26 PADANG TAE	Sutera	50,923	50,923	0	-
183	10308054	SDN 27 RAWANG	Sutera	57,200	57,200	0	-
184	10301836	SDN 28 PASAR SURANTIH	Sutera	39,920	39,920	0	-
185	10308055	SDN 29 TERATAK PANAS	Sutera	61,500	61,500	0	-
186	10308056	SDN 30 TIMBULUN	Sutera	32,900	32,900	0	-
187	10308193	SDN 31 KOTO MERAPAK	Sutera	249,270	249,270	0	-
188	10308057	SDN 32 LANGGAI	Sutera	55,400	55,400	0	-
189	10301867	SDN 33 KOTO TARATAK	Sutera	70,900	70,900	0	-
190	10301858	SDN 34 BATU BALU	Sutera	48,500	48,500	0	-
191	10301855	SDN 35 TANJUNG GADANG	Sutera	35,700	35,700	0	-
192	10301979	SDN 36 LUBUK BATU	Sutera	25,160	25,160	0	-
193	69787912	SDN 37 LANGGAI	Sutera	25,900	25,900	0	-
194	10302126	SDN 01 KOTO PULAI	Lengayang	25,000	25,000	0	-
195	10302052	SDN 02 MEDAN BAIK	Lengayang	25,696	25,696	0	-
196	10302060	SDN 03 PADANG MARAPALAM	Lengayang	81,913	81,913	0	-
197	10302041	SDN 04 LUBUK SARIK	Lengayang	607,096	607,096	0	-
198	10302079	SDN 05 PASAR KAMBANG	Lengayang	116,110	116,110	0	-
199	10302076	SDN 06 PULAI	Lengayang	32,227	32,227	0	-
200	10302065	SDN 07 KOTO BARU	Lengayang	50,100	50,100	0	-
201	10302211	SDN 08 PADANG PANJANG	Lengayang	25,000	25,000	0	-
202	10302217	SDN 09 KAMPUNG AKAT	Lengayang	66,594	66,594	0	-
203	10302199	SDN 10 GANTING	Lengayang	190,000	190,000	0	-
204	10302208	SDN 11 AIR KALAM	Lengayang	61,115	61,115	0	-
205	10302258	SDN 12 PADANG CUPAK	Lengayang	30,550	30,550	0	-
206	10302240	SDN 13 PASAR KAMBANG	Lengayang	50,000	50,000	0	-
207	10302243	SDN 14 KOTO BARU	Lengayang	29,695	29,695	0	-
208	10302165	SDN 15 PASAR LAKITAN	Lengayang	84,250	84,250	0	-
209	10302156	SDN 16 LUBUK BEGALUNG	Lengayang	152,450	152,450	0	-
210	10302154	SDN 17 PASIE LAWEH	Lengayang	30,550	30,550	0	-
211	10302189	SDN 18 TEBING TINGGI	Lengayang	30,000	30,000	0	-
212	10302174	SDN 19 TALANG SAN SAIDI	Lengayang	50,100	50,100	0	-
213	10302176	SDN 20 KAMPUNG BARU	Lengayang	67,528	67,528	0	-
214	10301886	SDN 21 KOTO KANDIS	Lengayang	25,000	25,000	0	-
215	10301897	SDN 22 SUMBARU	Lengayang	30,000	30,000	0	-
216	10301879	SDN 23 TAMPUNIK	Lengayang	87,141	87,141	0	-
217	10301900	SDN 24 KOTO RAYA	Lengayang	48,545	48,545	0	-
218	10301920	SDN 25 PADANG PANJANG	Lengayang	25,000	25,000	0	-
219	10301903	SDN 26 TAROK	Lengayang	25,000	25,000	0	-
220	10301909	SDN 27 PASAR KAMBANG	Lengayang	40,399	40,399	0	-
221	10301835	SDN 28 PASAR GOMPONG	Lengayang	134,080	134,080	0	-
222	10301831	SDN 29 TALANG	Lengayang	47,150	47,150	0	-
223	10301818	SDN 30 PASAR LAKITAN	Lengayang	118,158	118,158	0	-
224	10301827	SDN 31 KOTO PULAI	Lengayang	59,150	59,150	0	-
225	10301859	SDN 32 KAYU KALEK	Lengayang	31,800	31,800	0	-
226	10301868	SDN 33 PADANG MANDIANGIN	Lengayang	40,000	40,000	0	-
227	10301847	SDN 34 KOTO RAWANG	Lengayang	58,654	58,654	0	-
228	10301854	SDN 35 LUBUK SARIK	Lengayang	48,692	48,692	0	-
229	10301994	SDN 36 RANGEH	Lengayang	76,818	76,818	0	-
230	10301997	SDN 37 TAMPUNIK	Lengayang	35,160	35,160	0	-
231	10302004	SDN 38 SEBERANG TAROK	Lengayang	31,547	31,547	0	-
232	10301992	SDN 39 PASAR GOMPONG	Lengayang	50,000	50,000	0	-
233	10301981	SDN 40 PASAR BARU LAKITAN	Lengayang	68,312	68,312	0	-
234	10301983	SDN 41 KARANG TANGAH	Lengayang	39,300	39,300	0	-
235	10301985	SDN 42 KAMBANG HARAPAN	Lengayang	25,000	25,000	0	-
236	10301988	SDN 43 GANTING KUBANG	Lengayang	66,728	66,728	0	-
237	10301990	SDN 44 KAPAU	Lengayang	58,718	58,718	0	-
238	10302008	SDN 45 GANTING	Lengayang	27,800	27,800	0	-
239	10310794	SDN 46 GURUN PANJANG	Lengayang	53,900	53,900	0	-
240	10308220	SDN 47 KOTO LAMO	Lengayang	51,800	51,800	0	-
241	10302028	SDN 48 DARATAN MERANTIH	Lengayang	70,812	70,812	0	-
242	10302029	SDN 49 LIMA MANIS KULAM	Lengayang	25,000	25,000	0	-
243	10302030	SDN 50 PULAI	Lengayang	247,507	247,507	0	-
244	10302125	SDN 01 KOTO NAN IV	Ranah Pesisir	298	298	0	-
245	10302050	SDN 02 KOTO NAN IV	Ranah Pesisir	200,821	200,821	0	-
246	10302037	SDN 03 PELANGAI GADANG	Ranah Pesisir	19,965	19,965	0	-
247	10302039	SDN 04 KOTO VIII HILIR	Ranah Pesisir	61,300	61,300	0	-
248	10302063	SDN 05 KOTO VIII MUDIK	Ranah Pesisir	39,724	39,724	0	-
249	10302085	SDN 06 KOTO VIII HILIR	Ranah Pesisir	36,518	36,518	0	-
250	10302067	SDN 07 LABUHAN	Ranah Pesisir	54,091	54,091	0	-
251	10302197	SDN 08 PADANG LABAN	Ranah Pesisir	25,000	25,000	0	-
252	10302215	SDN 09 AIR TAMBANG	Ranah Pesisir	36,344	36,344	0	-

253	10302204	SDN 10 SUMEDANG	Ranah Pesisir	25,000	25,000	0	-
254	10302249	SDN 12 SUNGAI UKU	Ranah Pesisir	50,912	50,912	0	-
255	10302241	SDN 13 PELANGAI KECIL	Ranah Pesisir	25,000	25,000	0	-
256	10302158	SDN 14 PELANGAI KECIL	Ranah Pesisir	30,421	30,421	0	-
257	10302162	SDN 15 KOTO KABUN	Ranah Pesisir	53,000	53,000	0	-
258	10302146	SDN 16 PASAR SUNGAI TUNU	Ranah Pesisir	0	0	0	-
259	10302153	SDN 17 PADANG LABAN	Ranah Pesisir	37,532	37,532	0	-
260	10302188	SDN 18 SUMEDANG	Ranah Pesisir	146,950	146,950	0	-
261	10302194	SDN 19 PADANG SIRIH	Ranah Pesisir	6,864,584	6,864,584	0	-
262	10302178	SDN 20 KOTO LANGANG	Ranah Pesisir	63,800	63,800	0	-
263	10301885	SDN 21 KOTO GADANG	Ranah Pesisir	37,900	37,900	0	-
264	10301872	SDN 22 PELANGAI GADANG	Ranah Pesisir	41,056	41,056	0	-
265	10308221	SDN 23 AMPALU	Ranah Pesisir	37,710	37,710	0	-
266	10301914	SDN 24 KOTO VIII MUDIK	Ranah Pesisir	30,000	30,000	0	-
267	10301916	SDN 25 AIR TAMBANG	Ranah Pesisir	602,250	602,250	0	-
268	10301902	SDN 26 PELANGAI KECIL	Ranah Pesisir	93,400	93,400	0	-
269	10301905	SDN 27 KOTO BARU	Ranah Pesisir	64,000	64,000	0	-
270	10301833	SDN 28 KOTO NAN IV	Ranah Pesisir	11,200	11,200	0	-
271	10301839	SDN 29 KOTO PANJANG	Ranah Pesisir	28,200	28,200	0	-
272	10301820	SDN 30 KOTO BARU RAWANG	Ranah Pesisir	565,528	565,528	0	-
273	10302129	SDN 01 RANTAU BATU AMBACANG	Linggo Saribaganti	25,000	25,000	0	-
274	10302036	SDN 02 BUKIT PUTUS LUAR	Linggo Saribaganti	39,300	39,300	0	-
275	10302059	SDN 03 LAGAN GADANG HILIR	Linggo Saribaganti	25,750	25,750	0	-
276	10302040	SDN 04 LAGAN GADANG HILIR	Linggo Saribaganti	44,100	44,100	0	-
277	10308224	SDN 05 MUARA KANDIS	Linggo Saribaganti	25,896	25,896	0	-
278	10302075	SDN 06 TENGAH PADANG	Linggo Saribaganti	25,470	25,470	0	-
279	10302066	SDN 07 KOTO PANAI	Linggo Saribaganti	0	0	0	-
280	10302213	SDN 08 TANJUNG MEDAN	Linggo Saribaganti	25,000	25,000	0	-
281	10302219	SDN 09 LABUHAN TANIAK	Linggo Saribaganti	50,000	50,000	0	-
282	10302202	SDN 10 LUBUK BUAYA	Linggo Saribaganti	25,000	25,000	0	-
283	10302252	SDN 11 TANJUNG MEDAN	Linggo Saribaganti	25,320	25,320	0	-
284	10302254	SDN 12 AIR SIKAMBIING	Linggo Saribaganti	25,000	25,000	0	-
285	10302248	SDN 13 BUKIT KACIAK	Linggo Saribaganti	25,000	25,000	0	-
286	10302159	SDN 14 RANTAU BATU AMBACANG	Linggo Saribaganti	27,000	27,000	0	-
287	10302163	SDN 15 KOTO MERAPAK	Linggo Saribaganti	25,000	25,000	0	-
288	10302157	SDN 16 KOTO LANGANG	Linggo Saribaganti	27,090	27,090	0	-
289	10302149	SDN 17 ALANG SUNGKAI	Linggo Saribaganti	48,505	48,505	0	-
290	10302186	SDN 18 LAGAN GADANG MUDIK	Linggo Saribaganti	31,600	31,600	0	-
291	10302184	SDN 19 PASAR LAMA	Linggo Saribaganti	0	0	0	-
292	10302180	SDN 20 MUARO JAMBU	Linggo Saribaganti	25,200	25,200	0	-
293	10301891	SDN 21 RANTAU SIMALENANG	Linggo Saribaganti	25,350	25,350	0	-
294	10301895	SDN 22 MUARA KANDIS	Linggo Saribaganti	25,000	25,000	0	-
295	10301874	SDN 23 BALIK GUNUNG	Linggo Saribaganti	25,000	25,000	0	-
296	10301899	SDN 24 KOTO PANJANG	Linggo Saribaganti	28,019	28,019	0	-
297	10301922	SDN 25 SUNGAI SIRAH HILIR	Linggo Saribaganti	31,116	31,116	0	-
298	10301924	SDN 26 BUKIT PUTUS DALAM	Linggo Saribaganti	26,100	26,100	0	-
299	10301906	SDN 27 LAGAN KECIL MUDIK	Linggo Saribaganti	139,000	139,000	0	-
300	10301832	SDN 28 KOTO MERAPAK	Linggo Saribaganti	50,382	50,382	0	-
301	10301840	SDN 29 RANTAU BATU PASAR	Linggo Saribaganti	25,000	25,000	0	-
302	10301823	SDN 30 TANJUNG MUDIK	Linggo Saribaganti	25,000	25,000	0	-
303	10301828	SDN 31 KUMPULAN BANANG	Linggo Saribaganti	20,500	20,500	0	-
304	10301862	SDN 32 MUARA AIR HAJI	Linggo Saribaganti	25,452	25,452	0	-
305	10301869	SDN 33 PADANG KAYU DADIH	Linggo Saribaganti	25,301	25,301	0	-
306	10301846	SDN 34 KOTO PANAI	Linggo Saribaganti	37,268	37,268	0	-
307	10301853	SDN 35 LABUHAN TANIAK	Linggo Saribaganti	25,390	25,390	0	-
308	10301870	SDN 36 LABUHAN TANIAK	Linggo Saribaganti	27,700	27,700	0	-
309	10301996	SDN 37 PASAR BUKIT	Linggo Saribaganti	301,600	301,600	0	-
310	10302003	SDN 38 PADANG XI PUNGASAN	Linggo Saribaganti	25,000	25,000	0	-
311	69896218	SDN 39 TANJUNG BUNGO	Linggo Saribaganti	25,000	25,000	0	-
312	10302051	SDN 01 AIR PURA	Air Pura	43,764	43,764	0	-
313	10302045	SDN 02 AIRPURA	Air Pura	63,900	63,900	0	-
314	10302061	SDN 03 AIR PURA	Air Pura	83,700	83,700	0	-
315	10302064	SDN 04 AIR PURA	Air Pura	127,124	127,124	0	-
316	10302072	SDN 05 AIRPURA	Air Pura	29,828	29,828	0	-
317	10302247	SDN 06 AIRPURA	Air Pura	72,800	72,800	0	-
318	10302168	SDN 07 AIRPURA	Air Pura	30,040	30,040	0	-
319	10302151	SDN 08 AIRPURA	Air Pura	63,511	63,511	0	-
320	10308225	SDN 09 AIRPURA	Air Pura	58,340	58,340	0	-
321	10302179	SDN 10 AIRPURA	Air Pura	179,974	179,974	0	-
322	10301919	SDN 11 AIRPURA	Air Pura	99,578	99,578	0	-
323	10301911	SDN 12 AIRPURA	Air Pura	27,400	27,400	0	-
324	10302124	SDN 01 PANCUNG SOAL	Pancung Soal	0	0	0	-
325	10310639	SDN 02 PANCUNG SOAL	Pancung Soal	0	0	0	-
326	10302086	SDN 03 PANCUNG SOAL	Pancung Soal	66	66	0	-
327	10302210	SDN 04 PANCUNG SOAL	Pancung Soal	745,322	25,322	-720,000	-
328	10302200	SDN 05 PANCUNG SOAL	Pancung Soal	68,091	68,091	0	-
329	10302250	SDN 06 PANCUNG SOAL	Pancung Soal	52,907	52,907	0	-
330	10302260	SDN 07 PANCUNG SOAL	Pancung Soal	110,250	537,750	427,500	Uang bosda masuk ke rekening sekolah dan harus di keluarkan sebanyak Rp. 427.500,-
331	10302144	SDN 08 PANCUNG SOAL	Pancung Soal	0	0	0	-
332	10302161	SDN 09 PANCUNG SOAL	Pancung Soal	86,100	86,100	0	-
333	10302193	SDN 10 PANCUNG SOAL	Pancung Soal	36,759	33,540	-3,219	Pengembalian uang ke rekening sekolah sebanyak Rp. 475.000,- karena bunga bank terbelanjakan dan
334	10301887	SDN 11 PANCUNG SOAL	Pancung Soal	165,400	165,400	0	-
335	10301883	SDN 12 PANCUNG SOAL	Pancung Soal	30,700	30,700	0	-
336	10301875	SDN 13 PANCUNG SOAL	Pancung Soal	7,700	7,700	0	-
337	10301882	SDN 14 PANCUNG SOAL	Pancung Soal	29,200	29,200	0	-
338	10301913	SDN 15 PANCUNG SOAL	Pancung Soal	25,000	25,000	0	-

339	10302128	SDN 01 PENGGANTINGAN	Basa Ampek Balai Tapan	33,015	33,015	0	-
340	10302049	SDN 02 PASAR BUKIT	Basa Ampek Balai Tapan	50,000	50,000	0	-
341	10302068	SDN 03 MALEPANG	Basa Ampek Balai Tapan	33,000	33,000	0	-
342	10302216	SDN 06 BAKIR TAPAN	Basa Ampek Balai Tapan	26,000	26,000	0	-
343	10302232	SDN 05 ALANG RAMBAH	Basa Ampek Balai Tapan	51,007	66,336	15,329	Uang yang di kembalikan ke rekening sekolah karena temuan dari inspektorat dan di kembalikan tanggal
344	10302238	SDN 06 MALEPANG	Basa Ampek Balai Tapan	50,000	50,000	0	-
345	10302166	SDN 07 TANJUNG PONDOK	Basa Ampek Balai Tapan	50,002	50,002	0	-
346	10302145	SDN 08 PASAR 60 TAPAN	Basa Ampek Balai Tapan	467,760	467,760	0	-
347	10302187	SDN 09 NILAU TAPAN	Basa Ampek Balai Tapan	96,971	96,971	0	-
348	10302196	SDN 10 TANJUNG PONDOK	Basa Ampek Balai Tapan	25,000	25,000	0	-
349	70006481	SDN 11 TAPAN	Basa Ampek Balai Tapan	175,000	175,000	0	-
350	10302054	SDN 01 SUNGAI GAMBIR	Ranah Ampek Hulu Tapan	818,850	119,484	-699,366	Pengembalian Uang ke rekening sekolah Rp. 699.366, karena salah dalam pembayaran pajak
351	10302043	SDN 02 PADANG KEJAI	Ranah Ampek Hulu Tapan	30,000	30,000	0	-
352	10302062	SDN 03 KOTO PULAI	Ranah Ampek Hulu Tapan	32,111	32,111	0	-
353	10302087	SDN 04 MUARO SAKO	Ranah Ampek Hulu Tapan	26,000	26,000	0	-
354	10302214	SDN 05 TALANG KUBU	Ranah Ampek Hulu Tapan	54,400	54,400	0	-
355	10302206	SDN 06 TALANG	Ranah Ampek Hulu Tapan	55,056	55,056	0	-
356	10302259	SDN 07 PADANG LABAN	Ranah Ampek Hulu Tapan	41,200	41,200	0	-
357	10302242	SDN 08 BINJAI	Ranah Ampek Hulu Tapan	45,000	45,000	0	-
358	10302169	SDN 09 SUNGAI GAMBIR	Ranah Ampek Hulu Tapan	57,000	57,000	0	-
359	10302183	SDN 10 PASAR MELINTANG	Ranah Ampek Hulu Tapan	53,150	53,150	0	-
360	69954909	SDN 11 KUBU TAPAN	Ranah Ampek Hulu Tapan	66,800	66,800	0	-
361	10308195	SDN 01 LUNANG	Lunang	117,450	117,450	0	-
362	10308196	SDN 02 LUNANG	Lunang	25,900	25,900	0	-
363	10308201	SDN 03 LUNANG	Lunang	25,000	25,000	0	-
364	10308202	SDN 04 LUNANG	Lunang	45,000	45,000	0	-
365	10308136	SDN 05 LUNANG	Lunang	90,696	90,696	0	-
366	10308203	SDN 06 LUNANG	Lunang	25,600	25,600	0	-
367	10308204	SDN 07 LUNANG	Lunang	25,300	25,300	0	-
368	10302198	SDN 08 LUNANG	Lunang	52,600	52,600	0	-
369	10308205	SDN 09 LUNANG	Lunang	25,000	25,000	0	-
370	10308206	SDN 10 LUNANG	Lunang	25,000	25,000	0	-
371	10308207	SDN 11 LUNANG	Lunang	20,000	20,000	0	-
372	10308208	SDN 12 LUNANG	Lunang	70,000	70,000	0	-
373	10308210	SDN 13 LUNANG	Lunang	137,000	137,000	0	-
374	10308217	SDN 14 LUNANG	Lunang	25,000	25,000	0	-
375	10302048	SDN 01 SILAUT	Silaut	40,000	40,000	0	-
376	10308232	SDN 02 SILAUT	Silaut	50,000	50,000	0	-
377	10308211	SDN 03 SILAUT	Silaut	50,000	50,000	0	-
378	10308212	SDN 04 SILAUT	Silaut	25,000	25,000	0	-
379	10302191	SDN 05 SILAUT	Silaut	114,300	114,300	0	-
380	10308213	SDN 06 SILAUT	Silaut	25,000	25,000	0	-
381	10308214	SDN 07 SILAUT	Silaut	25,000	25,000	0	-
382	10308215	SDN 08 SILAUT	Silaut	50,550	50,550	0	-
383	10308216	SDN 09 SILAUT	Silaut	37,000	37,000	0	-
384	10308218	SDN 10 SILAUT	Silaut	0	0	0	-
385	10308219	SDN 11 SILAUT	Silaut	50,000	50,000	0	-
		JUMLAH TOTAL		38,648,246	37,721,990	(926,256)	

**RINCIAN KAS DIBENDAHARA BOS SMP
PER 31 DESEMBER 2024**

No	NPSN	Nama Sekolah	Kecamatan	SALDO KAS BOS	SALDO REKENING KORAN BOS	Selisih	Keterangan
1	10301928	SMPN 1 KOTO XI TARUSAN	Koto XI Tarusan	79,280	79,280	0	-
2	10301952	SMPN 2 KOTO XI TARUSAN	Koto XI Tarusan	450,000	450,000	0	-
3	10301975	SMPN 3 KOTO XI TARUSAN	Koto XI Tarusan	748,835	748,835	0	-
4	10301959	SMPN 4 KOTO XI TARUSAN	Koto XI Tarusan	34,400	34,400	0	-
5	10301964	SMPN 5 KOTO XI TARUSAN	Koto XI Tarusan	81,037	81,037	0	-
6	10301978	SMPN 6 KOTO XI TARUSAN	Koto XI Tarusan	112,000	112,000	0	-
7	10308175	SMPN 7 TARUSAN	Koto XI Tarusan	547,800	547,800	0	-
8	10308238	SMPN 8 TARUSAN	Koto XI Tarusan	55,353	55,353	0	-
9	10310578	SMPN 9 KOTO XI TARUSAN	Koto XI Tarusan	55,400	55,400	0	-
10	10301927	SMPN 1 BAYANG	Bayang	120,010	120,010	0	-
11	10301951	SMPN 2 BAYANG	Bayang	93,457	93,457	0	-
12	10301957	SMPN 3 BAYANG	Bayang	160,009	160,009	0	-
13	10301963	SMPN 4 BAYANG	Bayang	38,190	38,190	0	-
14	10301974	SMPN 1 BAYANG UTARA	Bayang Utara	578,891	578,891	0	-
15	10308317	SMPN 2 SATAP BAYANG UTARA	Bayang Utara	25,750	25,750	0	-
16	10301932	SMPN 1 PAINAN	IV Jurai	85,998	85,998	0	-
17	10301969	SMPN 2 PAINAN	IV Jurai	84,019	84,019	0	-
18	10301965	SMPN 3 PAINAN	IV Jurai	102,200	102,200	0	-
19	10308110	SMPN 4 PAINAN	IV Jurai	152,462	152,462	0	-
20	10308177	SMPN 1 IV JURAI	IV Jurai	120,000	120,000	0	-
21	10308318	SMPN 2 SATAP IV JURAI	IV Jurai	51,550	51,550	0	-
22	10310574	SMPN 3 SATAP IV JURAI	IV Jurai	25,000	25,000	0	-
23	10301938	SMPN 1 BATANG KAPAS	Batang Kapas	38,686	38,686	0	-
24	10301937	SMPN 2 BATANG KAPAS	Batang Kapas	48,016	48,016	0	-
25	10301973	SMPN 3 BATANG KAPAS	Batang Kapas	33,372	33,372	0	-
26	10308174	SMPN 4 BATANG KAPAS	Batang Kapas	120,006	120,006	0	-
27	10310575	SMPN 5 SATAP BATANG KAPAS	Batang Kapas	63,341	63,341	0	-
28	10301935	SMPN 1 SUTERA	Sutera	272,307	272,307	0	-
29	10301972	SMPN 2 SUTERA	Sutera	487,900	487,900	0	-
30	10301956	SMPN 3 SUTERA	Sutera	30,000	30,000	0	-
31	10301962	SMPN 4 SUTERA	Sutera	31,900	31,900	0	-
32	10308242	SMPN 5 SATAP SUTERA	Sutera	87,100	87,100	0	-
33	10308243	SMPN 6 SATU ATAP SUTERA	Sutera	100,000	100,000	0	-
34	69894397	SMPN 7 SUTERA	Sutera	65,600	65,600	0	-
35	69966734	SMPN 8 SUTERA	Sutera	120,000	120,000	0	-
36	10301929	SMPN 1 LENGAYANG	Lengayang	69,669	69,669	0	-
37	10301953	SMPN 2 LENGAYANG	Lengayang	63,339	63,339	0	-
38	10301960	SMPN 4 LENGAYANG	Lengayang	43,881	43,881	0	-
39	10301976	SMPN 3 LENGAYANG	Lengayang	67,998	67,998	0	-
40	10308247	SMPN 5 SATU ATAP LENGAYANG	Lengayang	55,000	55,000	0	-
41	10308319	SMPN 6 SATAP LENGAYANG	Lengayang	104,800	104,800	0	-

42	10301934	SMPN 1 RANAH PESISIR	Ranah Pesisir	25,746	25,746	0	-
43	10301971	SMPN 2 RANAH PESISIR	Ranah Pesisir	55,360	55,360	0	-
44	10301955	SMPN 3 RANAH PESISIR	Ranah Pesisir	58,251	58,251	0	-
45	10308251	SMPN 4 SATU ATAP RANAH PESISIR	Ranah Pesisir	125,280	125,280	0	-
46	10310833	SMPN 5 RANAH PESISIR	Ranah Pesisir	97,920	97,920	0	-
47	10301930	SMPN 1 LINGGO SARI BAGANTI	Linggo Sari Baganti	938,576	938,576	0	-
48	10301967	SMPN 2 LINGGO SARI BAGANTI	Linggo Sari Baganti	145,852	145,852	0	-
49	10301977	SMPN 3 LINGGO SARI BAGANTI	Linggo Sari Baganti	58,910	58,910	0	-
50	10308344	SMPN 4 SATAP LINGGO SARI BAGANTI	Linggo Sari Baganti	162,777	162,777	0	-
51	10308306	SMPN 5 SATAP LINGGO SARI BAGANTI	Linggo Sari Baganti	80,000	80,000	0	-
52	10308320	SMPN 6 LINGGO SARI BAGANTI	Linggo Sari Baganti	53,000	53,000	0	-
53	69893853	SMPN 7 LINGGO SARI BAGANTI	Linggo Sari Baganti	57,700	57,700	0	-
54	69966688	SMPN 8 LINGGO SARI BAGANTI	Linggo Sari Baganti	54,500	54,500	0	-
55	10301970	SMPN 1 AIRPURA	Airpura	51,612	51,612	0	-
56	10301961	SMPN 2 AIRPURA	Airpura	118,429	118,429	0	-
57	10308253	SMPN 3 AIRPURA	Airpura	86,700	86,700	0	-
58	10310576	SMPN 4 AIR PURA	Airpura	208,000	208,000	0	-
59	10310783	SMPN 5 AIR PURA	Airpura	104,500	104,500	0	-
60	10301933	SMPN 1 PANCUNG SOAL	Pancung Soal	50,913	50,913	0	-
61	10301954	SMPN 2 PANCUNG SOAL	Pancung Soal	125,000	125,000	0	-
62	10308185	SMPN 3 PANCUNG SOAL	Pancung Soal	50,000	50,000	0	-
63	10301939	SMPN 1 BASA IV BALAI TAPAN	Basa IV Balai Tapan	54,803	54,803	0	-
64	10301936	SMPN 1 RANAH AMPEK HULU TAPAN	Ranah Ampek Hulu Tapan	80,200	80,200	0	-
65	10308267	SMPN 2 RANAH AMPEK HULU TAPAN	Ranah Ampek Hulu Tapan	60,600	60,600	0	-
66	69787562	SMPN 3 RANAH AMPEK HULU TAPAN	Ranah Ampek Hulu Tapan	153,722	153,722	0	-
67	10301931	SMPN 1 LUNANG	Lunang	50,000	50,000	0	-
68	10308254	SMPN 2 LUNANG	Lunang	0	0	0	-
69	10308321	SMPN 3 LUNANG	Lunang	60,000	60,000	0	-
70	10310577	SMPN 4 LUNANG	Lunang	34,000	230,364	196,364	Penyetoran Oleh KPN Rp.196,364,-
71	10301968	SMPN 1 SILAUT	Silaut	55,400	55,400	0	-
72	10301966	SMPN 2 SILAUT	Silaut	50,322	50,322	0	-
73	10308255	SMPN 3 SILAUT	Silaut	69,000	69,000	0	-
74	10308256	SMPN 4 SILAUT	Silaut	255,400	255,400	0	-
JUMLAH TOTAL				9,337,029	9,533,393	196,364	

**RINCIAN KAS DI BENDAHARA BOP PAUD
TAHUN ANGGARAN 2024**

NO	NAMA SEKOLAH	NPSN	KECAMATAN	SALDO KAS BOS	SALDO REKENING KORAN BOS	SELISIH	KET
1	KB NUR BAHARI RAHMAN	70030115	Kec. Koto XI Terusan	-	-	-	
2	KB KASIH IBU	69818792	Kec. Koto XI Terusan	-	-	-	
3	KB BAITUR RAHIM	69771863	Kec. Koto XI Terusan	-	-	-	
4	KB YA RAHIM	69903391	Kec. Koto XI Terusan	-	-	-	
5	KB KASIH BUNDA	69818787	Kec. Koto XI Terusan	-	-	-	
6	KB HARAPAN BANGSA	69903385	Kec. Koto XI Terusan	-	-	-	
7	KB ANAK MANDE	69938810	Kec. Koto XI Terusan	-	-	-	
8	KB TABITA AL AZHAR	70039684	Kec. Koto XI Terusan	-	-	-	
9	KB CAHAYA ILLAHI	69771858	Kec. Koto XI Terusan	-	-	-	
10	KB KHALIFAH	69771859	Kec. Koto XI Terusan	-	-	-	
11	KB HARAPAN BANGSA	69875516	Kec. Koto XI Terusan	-	-	-	
12	KB AL MARDHIYAH	69875513	Kec. Koto XI Terusan	100,000	100,000	-	
13	KB AL JANNAH TARUSAN	69771860	Kec. Koto XI Terusan	-	-	-	
14	KB AL MIRZA	69771862	Kec. Koto XI Terusan	-	-	-	
15	KB GENERASI BANGSA	69862640	Kec. Koto XI Terusan	-	-	-	
16	KB AL IKHLAS	69913009	Kec. Koto XI Terusan	-	-	-	
17	KB HARAPAN BANGSA	69875515	Kec. Koto XI Terusan	-	-	-	
18	TK PERTIWI	69942131	Kec. Koto XI Terusan	-	-	-	
19	TK AL JABBAR	69911247	Kec. Koto XI Terusan	-	-	-	
20	TK KHALIFAH	69940678	Kec. Koto XI Terusan	-	-	-	
21	TKN PEMBINA 01 KOTO XI TARUSAN	69902377	Kec. Koto XI Terusan	-	-	-	
22	SPS AMANAH	69862648	Kec. Koto XI Terusan	-	-	-	
23	TK BERLANTAI SAIYO	69931786	Kec. Koto XI Terusan	-	-	-	
24	TK ZANAJFI	69952815	Kec. Koto XI Terusan	-	-	-	
25	TK BUAH MANGGIS	69846259	Kec. Koto XI Terusan	-	-	-	
26	TK DHARMAWANITA SIMPANG	69940098	Kec. Koto XI Terusan	-	-	-	
27	TK AL JANNAH TARUSAN	69771757	Kec. Koto XI Terusan	-	-	-	
28	TK NURUL IBADAH	69862612	Kec. Koto XI Terusan	-	-	-	
29	SPS POS PAUD INTAN JAELANI	69771888	Kec. Koto XI Terusan	-	-	-	
30	KB AL HIDAYAH	69771847	Kec. Bayang	-	-	-	
31	KB IT NISABILA	69966701	Kec. Bayang	-	-	-	
32	KB CIPTA KARYA ASAM KAMBA	69801886	Kec. Bayang	-	-	-	
33	KB LUBUK ANAU	69962782	Kec. Bayang	-	-	-	
34	KB BUNGA ANGGREK	69909917	Kec. Bayang	-	-	-	
35	KB MELATI	69801884	Kec. Bayang	-	-	-	
36	KB MUTIARA BUNDA	69909682	Kec. Bayang	-	-	-	
37	KB UMMI	69771849	Kec. Bayang	-	-	-	
38	KB PELANGI	69971330	Kec. Bayang	-	-	-	
39	KB DAHLIA KAPUJAN	69801883	Kec. Bayang	150,000	150,000	-	
40	KB KAPELGAM SAKATO	69801885	Kec. Bayang	-	-	-	
41	KB ANUGRAH	69771850	Kec. Bayang	-	-	-	
42	KB NURUL YAQIN	69966834	Kec. Bayang	-	-	-	
43	KB TANJUNG MEKAR	70003965	Kec. Bayang	-	-	-	
44	KB LESTARI	69846263	Kec. Bayang	-	-	-	

45	KB BINTANG BUNDA	69966702	Kec. Bayang	-	-	-	
46	KB BAITURRAHIM	69926670	Kec. Bayang	-	-	-	
47	KB PERMATA BUNDA	69771886	Kec. Bayang	-	-	-	
48	KB CENDIKIA INSANI	69771852	Kec. Bayang	-	-	-	
49	KB NAGARI GURUN PANJANG	69965240	Kec. Bayang	-	-	-	
50	KB AL HUDA	69818789	Kec. Bayang	-	-	-	
51	KB BINA UMMAT	69771853	Kec. Bayang	-	-	-	
52	KB BUNGA MAWAR GANTING	69870749	Kec. Bayang	-	-	-	
53	KB BIDAR ALAM SAKATO	69923261	Kec. Bayang	-	-	-	
54	TK AISIYIAH	69862607	Kec. Bayang	-	-	-	
55	TK BUNDO KANDUANG	69862609	Kec. Bayang	-	-	-	
56	TK BA KOTO BARU	10310634	Kec. Bayang	-	-	-	
57	TK RAMAH ANAK NAGARI GURUN PANJANG	69986961	Kec. Bayang	-	-	-	
58	SPS POS PAUD AISIYIAH KUBANG	69771884	Kec. Bayang	-	-	-	
59	TK DHARMAWANITA	10309728	Kec. Bayang	-	-	-	
60	TK MELATI	69940670	Kec. Bayang	-	-	-	
61	TK TA LIFUL QULUUB	69919530	Kec. Bayang	-	-	-	
62	TK ISLAM MA LUBUK PASING	10310583	Kec. Bayang	-	-	-	
63	SPS HARAPAN BUNDA	69862646	Kec. Bayang	-	-	-	
64	TK PERTIWI PASAR BARU	69771750	Kec. Bayang	-	-	-	
65	TK AISIYIAH KUBANG	69771755	Kec. Bayang	-	-	-	
66	SPS POS PAUD IQRA	69771885	Kec. Bayang	-	-	-	
67	TK FATIZA	69949826	Kec. Bayang	-	-	-	
68	POS PAUD MELATI	69862638	Kec. Bayang Utara	-	-	-	
69	KB PERMATA BUNDA	69909633	Kec. Bayang Utara	100,000	100,000	-	
70	KB ASMAAUL HUSNA	69904997	Kec. Bayang Utara	4,800,000	4,800,000	-	Mengembalikan ke Kasda
71	KB KASIH BUNDA	69771857	Kec. Bayang Utara	900,000	900,000	-	Mengembalikan ke Kasda dan belum setor
72	KB PAUTAN HATI	70015678	Kec. Bayang Utara	100,000	100,000	-	
73	KB PELITA HATI	69872399	Kec. Bayang Utara	-	-	-	
74	KB PERMATA HATI	69905152	Kec. Bayang Utara	-	-	-	
75	KB PELITA HATI	69909692	Kec. Bayang Utara	-	-	-	
76	KB KASIH BUNDA	69917813	Kec. Bayang Utara	-	-	-	
77	KB BAYU SAIYO	69771856	Kec. Bayang Utara	-	-	-	
78	KB MUTIARA HATI	69872400	Kec. Bayang Utara	-	-	-	
79	TK TUNAS HARAPAN	69771756	Kec. Bayang Utara	-	-	-	
80	TK PERMATA BUNDA	10309753	Kec. Bayang Utara	-	-	-	
81	TK ISLAM AL QALAM	69725267	Kec. Bayang Utara	-	-	-	
82	KB KASAI	69919289	Kec. IV Jurai	-	-	-	
83	KB MELATI PUTIH	69916013	Kec. IV Jurai	-	-	-	
84	KB ASSYFA	69818786	Kec. IV Jurai	-	-	-	
85	KB QLC	69818791	Kec. IV Jurai	-	-	-	
86	KB ANAK SALIDO	69771832	Kec. IV Jurai	-	-	-	
87	KB KASIH BUNDA I	69771839	Kec. IV Jurai	-	-	-	
88	KB NURUL HIDAYAH	69923965	Kec. IV Jurai	-	-	-	
89	KB PAUD PELITA HATI BUNGA PASANG	69771837	Kec. IV Jurai	-	-	-	
90	KB BIMBINGAN BUNDA	69771843	Kec. IV Jurai	-	-	-	
91	KB ISLAM TERPADU AL FIKRI	69771844	Kec. IV Jurai	-	-	-	
92	KB UMMI SAGO	69771840	Kec. IV Jurai	-	-	-	

93	KB TIARA BUNDA	69771834	Kec. IV Jurai	-	-	-	
94	KB AL KAUTSAR	69870748	Kec. IV Jurai	-	-	-	
95	KB MUTIARA HATI	70007269	Kec. IV Jurai	-	-	-	
96	KB TIMBULAN PERMAI	69771845	Kec. IV Jurai	-	-	-	
97	KB AL GHANNIY	69916314	Kec. IV Jurai	-	-	-	
98	KB AL JAMILAH	69846262	Kec. IV Jurai	50,000	50,000	-	
99	KB CAHAYA BARU	69818782	Kec. IV Jurai	-	-	-	
100	KB ANANDA	69771838	Kec. IV Jurai	-	-	-	
101	KB AISIYAH TAMBANG	69771836	Kec. IV Jurai	120,000	120,000	-	
102	KB CERIA BERSAMA	69920532	Kec. IV Jurai	-	-	-	
103	KB KASIH BUNDA	69771841	Kec. IV Jurai	-	-	-	
104	TPA TIMBULUN PERMAI	69961113	Kec. IV Jurai	-	-	-	
105	KB PERMATA BUNDA	69971327	Kec. IV Jurai	-	-	-	
106	KB SINAR BULAN	69862636	Kec. IV Jurai	-	-	-	
107	KB PIARA BUNDA	69818790	Kec. IV Jurai	-	-	-	
108	KB MAJU BERSAMA	69846261	Kec. IV Jurai	-	-	-	
109	TPA TIARA BUNDA	69771870	Kec. IV Jurai	-	-	-	
110	TK KEMALA BHAYANGKARI 06 SALIDO	69919273	Kec. IV Jurai	-	-	-	
111	TK BUNGA HARAPAN	69895893	Kec. IV Jurai	12,400,000	12,400,000	-	Mengembalikan ke Kasda
112	TK BHAYANGKARI 05 PAINAN	10309779	Kec. IV Jurai	-	-	-	
113	TK N PEMBINA	10309747	Kec. IV Jurai	-	-	-	
114	TKN PEMBINA 02 PAINAN	69919271	Kec. IV Jurai	-	-	-	
115	TK PERMATA BUNDA	69771745	Kec. IV Jurai	-	-	-	
116	TK TIARA BUNDA	10309782	Kec. IV Jurai	-	-	-	
117	TK ISLAM TERPADU AL FIKRI	69771748	Kec. IV Jurai	-	-	-	
118	KB DELIMA	69771827	Kec. Batang Kapas	-	-	-	
119	KB SUNGAI NYALO SAIYO	69969155	Kec. Batang Kapas	-	-	-	
120	KB SUNGAI BUNGIN	69771828	Kec. Batang Kapas	-	-	-	
121	KB PUTRI BUNGSU	69966153	Kec. Batang Kapas	-	-	-	
122	KB KARYA BAKTI BUNGA BANGSA	69862635	Kec. Batang Kapas	-	-	-	
123	KB AR RAHIM	69771825	Kec. Batang Kapas	-	-	-	
124	KB NUR-HIDAYAH	69771824	Kec. Batang Kapas	-	-	-	
125	KB NURUL FIKRI	69966150	Kec. Batang Kapas	-	-	-	
126	KB ASYIAH	69904913	Kec. Batang Kapas	-	-	-	
127	KB NURUL FIKHRI	69923957	Kec. Batang Kapas	-	-	-	
128	TK IT NURRIYAH ISLAM	70040581	Kec. Batang Kapas	-	-	-	
129	TK DHARMAWANITA	10309731	Kec. Batang Kapas	-	-	-	
130	TK DELIMA	69950355	Kec. Batang Kapas	-	-	-	
131	TKIT IZZATUL QUR AN	69991699	Kec. Batang Kapas	-	-	-	
132	TK AL AMIN TERATAK TEMPATIH	69912093	Kec. Batang Kapas	-	-	-	
133	TK TUNAS HARAPAN	70013124	Kec. Batang Kapas	-	-	-	
134	SPS POS PAUD PERMATA BUNDA	69771877	Kec. Batang Kapas	-	-	-	
135	KB KASIH IBU	69771813	Kec. Sutera	-	-	-	
136	KB HABIBUL UMMI II	69846260	Kec. Sutera	-	-	-	
137	KB AR-RASYIDAH	69902354	Kec. Sutera	-	-	-	
138	KB KARYA BUNDA	69771811	Kec. Sutera	-	-	-	
139	KB MIFTAHUL JANNAH	69913029	Kec. Sutera	-	-	-	
140	KB ISLAM TERPADU WAHDAH ISLAMIAH	69870747	Kec. Sutera	-	-	-	

141	KB ISTIQAMAH	69950859	Kec. Sutera	-	-	-	
142	KB TRI SAKTI	69950843	Kec. Sutera	-	-	-	
143	KB HIDAYAH TURRAHMA	69909687	Kec. Sutera	-	-	-	
144	KB ADINDA	69862627	Kec. Sutera	-	-	-	
145	KB JABAL NUR KOTO TAROK	69862644	Kec. Sutera	-	-	-	
146	KB HABIBAH TUSSHOLEHA	69862632	Kec. Sutera	-	-	-	
147	TK ARDIATUL JANNAH	69862605	Kec. Sutera	-	-	-	
148	TK AWALIDIL JANNAH	69730474	Kec. Sutera	-	-	-	
149	TK IT AT TAQWA	70027354	Kec. Sutera	-	-	-	
150	TK AISIYAH BUSTANUL ATHFAL SIKABU MUNTO	69862606	Kec. Sutera	-	-	-	
151	TK HABIBUL UMMI I	69771820	Kec. Sutera	-	-	-	
152	TK AISIYAH BUSTANUL ATHFAL KOTO TARATAK	69730461	Kec. Sutera	-	-	-	
153	TK IT MIFTAHUL JANNAH	70013025	Kec. Sutera	-	-	-	
154	TK SUARA HATI	69771815	Kec. Sutera	-	-	-	
155	TK HARAPAN BUNDO AMPALU	69771742	Kec. Sutera	-	-	-	
156	TK MELATI INDAH	69862633	Kec. Sutera	-	-	-	
157	TK KASIH UMMI	69771807	Kec. Sutera	-	-	-	
158	TK AISIYAH BUSTANUL ATHFAL SAYANG AMAI	69862602	Kec. Sutera	-	-	-	
159	TKN PEMBINA 01 SUTERA	69862603	Kec. Sutera	-	-	-	
160	TK CAHAYA MURNI	69928366	Kec. Sutera	-	-	-	
161	TK AISIYAH BUSTANUL ATHFAL	69730460	Kec. Sutera	-	-	-	
162	KB INTEGRASI PERMATA BUNDA	69862620	Kec. Lengayang	100,000	100,000	-	
163	KB AL-HAFIZH	69771800	Kec. Lengayang	-	-	-	
164	KB RESTU ILLAHI	69903410	Kec. Lengayang	-	-	-	
165	KB AL AMANAH	69862623	Kec. Lengayang	-	-	-	
166	KB AL MAJID	69771799	Kec. Lengayang	-	-	-	
167	KB BERKAH ILAHI	69862625	Kec. Lengayang	-	-	-	
168	KB BUAH HATI	69909889	Kec. Lengayang	-	-	-	
169	KB AMANAH	69931776	Kec. Lengayang	-	-	-	
170	KB TERATAI INDAH	69862624	Kec. Lengayang	-	-	-	
171	KB KURNIA ILAHI	69872395	Kec. Lengayang	-	-	-	
172	KB CEMPAKA BIRU	69872394	Kec. Lengayang	7,500,000	7,500,000	-	Mengembalikan ke Kasda dan belum setor
173	KB ASMAUL HUSNA	69771803	Kec. Lengayang	-	-	-	
174	KB SAYANG BUNDA	69862619	Kec. Lengayang	-	-	-	
175	KB RANAH BUNDO	69862626	Kec. Lengayang	-	-	-	
176	KB KAPAU	69917807	Kec. Lengayang	-	-	-	
177	KB KHAIRUL ATHFAL	69931777	Kec. Lengayang	-	-	-	
178	KB MUTIARA HATI	69862621	Kec. Lengayang	-	-	-	
179	KB SETULUS HATI	69954246	Kec. Lengayang	-	-	-	
180	KB UMMI	69771802	Kec. Lengayang	-	-	-	
181	TK TERPADU AMANAH BUNDA	69971233	Kec. Lengayang	-	-	-	
182	TK PKK PADANG MANDIANGIN	10309750	Kec. Lengayang	-	-	-	
183	TK AISIYAH KOTO RAWANG	69730442	Kec. Lengayang	-	-	-	
184	TK HALIMATUSSADIYAH	10309733	Kec. Lengayang	-	-	-	
185	TK PERTIWI PADANG CUPAK	10309757	Kec. Lengayang	-	-	-	
186	TK DHARMAWANITA	10309732	Kec. Lengayang	-	-	-	
187	TK ISLAM DINDA	10309738	Kec. Lengayang	-	-	-	
188	TK IT MEDINAH	70008368	Kec. Lengayang	-	-	-	

189	TK AISIYIAH LUBUK SARIK	69730443	Kec. Lengayang	-	-	-	-
190	TK RESTU BUNDO	69862622	Kec. Lengayang	-	-	-	-
191	TK N PEMBINA LENGAYANG	10309784	Kec. Lengayang	-	-	-	-
192	TK PERTIWI LAKITAN	10309756	Kec. Lengayang	-	-	-	-
193	TK PERTIWI II PADANG PANJANG	10309754	Kec. Lengayang	-	-	-	-
194	TK IT PELITA CENDIKIA	70000271	Kec. Lengayang	-	-	-	-
195	TK BERKAH AL QUDSYIAH	70039484	Kec. Lengayang	-	-	-	-
196	TK DINA TEBING TINGGI	69958483	Kec. Lengayang	-	-	-	-
197	TK TALANG SERUMPUN	10309761	Kec. Lengayang	-	-	-	-
198	TK MAKMUR LUBUAK TANAH	70007794	Kec. Lengayang	-	-	-	-
199	TK TUNAS ANDALAS KAPAU	10309764	Kec. Lengayang	-	-	-	-
200	TK PKK PASAR GOMPONG	10309751	Kec. Lengayang	-	-	-	-
201	TK TUNAS HARAPAN	10309766	Kec. Lengayang	-	-	-	-
202	TK ABA NURUL ISLAM	10308951	Kec. Lengayang	-	-	-	-
203	TK AISIYIAH PASAR BARU LAKITAN	69730439	Kec. Lengayang	-	-	-	-
204	TK AISIYIAH KOTO BARU	69730441	Kec. Lengayang	-	-	-	-
205	TK IDHATA TALANG TAN SAIDI	10309739	Kec. Lengayang	-	-	-	-
206	KB BOBO YENA	69771791	Kec. Ranah Pesisir	-	-	-	-
207	KB HAYATI	69771789	Kec. Ranah Pesisir	-	-	-	-
208	KB HIDAYATULLAH	69771790	Kec. Ranah Pesisir	-	-	-	-
209	KB HANIFAH KUALIVAH	69950838	Kec. Ranah Pesisir	-	-	-	-
210	TK CAHAYA HATI	69771797	Kec. Ranah Pesisir	-	-	-	-
211	TK PELANGI	69893619	Kec. Ranah Pesisir	-	-	-	-
212	TK KEMALA BHAYANGKARI 07	69913014	Kec. Ranah Pesisir	-	-	-	-
213	TKN PEMBINA 01 RANAH PESISIR	10309726	Kec. Ranah Pesisir	-	-	-	-
214	TK HARAPAN KITA	10309737	Kec. Ranah Pesisir	-	-	-	-
215	SPS POS PAUD NURUL AZMI	69771875	Kec. Ranah Pesisir	34,000	34,000	-	-
216	TK PUTIH ASRI KAMBOJA	69897164	Kec. Ranah Pesisir	-	-	-	-
217	TK HARAPAN IBU	69913019	Kec. Ranah Pesisir	-	-	-	-
218	TK LESTARI	69919292	Kec. Ranah Pesisir	-	-	-	-
219	TK TUNAS HARAPAN	69771740	Kec. Ranah Pesisir	-	-	-	-
220	TK PUTIH ASRI	10309758	Kec. Ranah Pesisir	-	-	-	-
221	TK TUNAS BANGSA	10309765	Kec. Ranah Pesisir	-	-	-	-
222	TK BHAKTI BUNDA	69897157	Kec. Ranah Pesisir	-	-	-	-
223	PAUD BUNDA SEJATI	69771778	Kec. Air Pura	-	-	-	-
224	KB RESTU IBU	69887019	Kec. Air Pura	-	-	-	-
225	KB PERMATA IBU	69771785	Kec. Air Pura	-	-	-	-
226	PAUD SAPTA MARGA I	69771784	Kec. Air Pura	-	-	-	-
227	KB PAUS	69771872	Kec. Air Pura	-	-	-	-
228	KB HARAPAN BANGSA	69982226	Kec. Air Pura	-	-	-	-
229	TK KEMUNING	69886781	Kec. Air Pura	-	-	-	-
230	TK SAPTA MARGA II	69771738	Kec. Air Pura	-	-	-	-
231	TK AMINAH	10309759	Kec. Air Pura	-	-	-	-
232	TK AL FURQON	69917816	Kec. Air Pura	-	-	-	-
233	TK LENTERA	69923263	Kec. Air Pura	-	-	-	-
234	TK AMANAH BUNDA	70005359	Kec. Air Pura	100,000	100,000	-	-
235	TK RESTU IBU	69917811	Kec. Air Pura	-	-	-	-
236	TK BUNDA SEJATI	69917815	Kec. Air Pura	-	-	-	-

237	TK HABIBULLAH	69969179	Kec. Air Pura	-	-	-	
238	TK KOTO PANDAN	69926643	Kec. Air Pura	-	-	-	
239	TK LUL AIBAH	69971329	Kec. Air Pura	-	-	-	
240	TK NEGERI SAPTA MARGA I	10309760	Kec. Air Pura	-	-	-	
241	KB MIFTAHUL ILMI	69971331	Kec. Pancung Soal	-	-	-	
242	KB HARAPAN BUNDA	69771777	Kec. Pancung Soal	-	-	-	
243	KB KASIH SUCI	69771776	Kec. Pancung Soal	-	-	-	
244	TK DHARMA WANITA	69915465	Kec. Pancung Soal	-	-	-	
245	TK ISLAM HARAPAN BUNDA	69923262	Kec. Pancung Soal	-	-	-	
246	TK HARAPAN BANGSA	69893633	Kec. Pancung Soal	-	-	-	
247	TK HIDAYATULLAH	70011573	Kec. Pancung Soal	-	-	-	
248	TK TUNAS BANGSA	69862598	Kec. Pancung Soal	-	-	-	
249	TK BINTANG	69931784	Kec. Pancung Soal	-	-	-	
250	TK HARAPAN BUNDA	69945793	Kec. Pancung Soal	-	-	-	
251	TK AL IKHLAS	70006306	Kec. Pancung Soal	-	-	-	
252	TK AISIYAH PANCUNG SOAL	69946196	Kec. Pancung Soal	-	-	-	
253	TKN PEMBINA 01 PANCUNG SOAL	69923264	Kec. Pancung Soal	-	-	-	
254	TK AMANAH PANCUNG SOAL	69946198	Kec. Pancung Soal	-	-	-	
255	TK HARAPAN IBU	69862597	Kec. Pancung Soal	-	-	-	
256	TK TUNAS HARAPAN	69981223	Kec. Pancung Soal	-	-	-	
257	TK MEKAR MELATI	69771782	Kec. Pancung Soal	-	-	-	
258	TK BUNDO KANDUANG	69912084	Kec. Pancung Soal	-	-	-	
259	TK INSAN BANGSA	69976682	Kec. Pancung Soal	-	-	-	
260	TK ASAH BUNDO	69962736	Kec. Pancung Soal	-	-	-	
261	TK IRMA INCASI RAYA	69905393	Kec. Pancung Soal	-	-	-	
262	KB DARUL HIDAYAH I	69895389	Kec. Lunang	-	-	-	
263	KB DARUL HIDAYAH II	69895390	Kec. Lunang	-	-	-	
264	KB AMANAH	70006112	Kec. Lunang	-	-	-	
265	KB ANINDIYA	69771763	Kec. Lunang	-	-	-	
266	KB CAHAYA BUNDA	69978127	Kec. Lunang	-	-	-	
267	KB MEKAR JAYA II	69914654	Kec. Lunang	-	-	-	
268	TK HARAPAN IBU	69920533	Kec. Lunang	-	-	-	
269	TK PELANGI	69771760	Kec. Lunang	-	-	-	
270	TK SUKA MENANTI	69895432	Kec. Lunang	-	-	-	
271	TK TUNAS HARAPAN	69771764	Kec. Lunang	-	-	-	
272	TK MELATI	69894377	Kec. Lunang	100,000	100,000	-	
273	TK KASIH BUNDA	69771736	Kec. Lunang	-	-	-	
274	TK ISLAM BAKTI VII	10309741	Kec. Lunang	-	-	-	
275	TK MEKAR JAYA	69895391	Kec. Lunang	-	-	-	
276	TKN PEMBINA 01 LUNANG	69903415	Kec. Lunang	-	-	-	
277	TK RESTU IBU	69963843	Kec. Lunang	-	-	-	
278	TK BIL ALAMIN	69952822	Kec. Lunang	-	-	-	
279	TK NURUL QOMARIAH	69771762	Kec. Lunang	-	-	-	
280	TK DAHLIA	69895421	Kec. Lunang	-	-	-	
281	KB NAHDATUL ISLAM	69886782	Kec. Silaut	-	-	-	
282	KB SUKA MAJU	69895429	Kec. Silaut	-	-	-	
283	KB KENANGA II	69771767	Kec. Silaut	-	-	-	
284	KB NURUL HIKMAH	69886784	Kec. Silaut	-	-	-	

285	TK BAKTI NAGARI	69967668	Kec. Silaut	-	-	-	
286	TK TANJUNG MAKMUR	10309763	Kec. Silaut	-	-	-	
287	TK NURUL HIKMAH	69955530	Kec. Silaut	-	-	-	
288	TK M MUKTI TAMA	10309746	Kec. Silaut	-	-	-	
289	TK ANAK SHALEH	69771765	Kec. Silaut	-	-	-	
290	TKN PEMBINA 01 SILAUT	10309723	Kec. Silaut	-	-	-	
291	TK BAKTI UTAMA	10309724	Kec. Silaut	-	-	-	
292	KB AUR BERDURI	69904999	Kec. Basa Ampek Balai Tapan	-	-	-	
293	KB TPK.I NUSA INDAH	69862613	Kec. Basa Ampek Balai Tapan	-	-	-	
294	KB TPK I BELAS KASIH	69771769	Kec. Basa Ampek Balai Tapan	200,000	200,000	-	
295	KB AL HADID	69909732	Kec. Basa Ampek Balai Tapan	-	-	-	
296	KB MUARA KASIH BUNDA	69923265	Kec. Basa Ampek Balai Tapan	-	-	-	
297	TK JAMIATUL MUBARAK	69994970	Kec. Basa Ampek Balai Tapan	-	-	-	
298	TK TPK II DUSUN BARU	69955146	Kec. Basa Ampek Balai Tapan	-	-	-	
299	TK NAGARI KOTO ANAU TAPAN	69959710	Kec. Basa Ampek Balai Tapan	-	-	-	
300	TK BAITUL MAKMUR	69923268	Kec. Basa Ampek Balai Tapan	-	-	-	
301	TK CAHAYA BUNDA	70036906	Kec. Basa Ampek Balai Tapan	-	-	-	
302	TKN PEMBINA 01 BASA AMPEK BALAI	69985083	Kec. Basa Ampek Balai Tapan	-	-	-	
303	TK AISYIAH BUSTANUL ATHFAL TAPAN	69919527	Kec. Basa Ampek Balai Tapan	-	-	-	
304	TPA NURHIDAYAH	69771867	Kec. Linggo Saribaganti	-	-	-	
305	KB KASIH SAYANG	69870742	Kec. Linggo Saribaganti	-	-	-	
306	KB TPK I SAYANG MANDE	69926667	Kec. Linggo Saribaganti	-	-	-	
307	PAUD SARAI INDAH	69870740	Kec. Linggo Saribaganti	-	-	-	
308	KB CAHAYA LINGGO	69771787	Kec. Linggo Saribaganti	-	-	-	
309	KB AN NUR MUSLIMIN	69905379	Kec. Linggo Saribaganti	-	-	-	
310	KB KASIH IBU I	69870745	Kec. Linggo Saribaganti	-	-	-	
311	KB HARAPAN BUNDA	70002249	Kec. Linggo Saribaganti	-	-	-	
312	KB ADAM DAN HAWA	69870738	Kec. Linggo Saribaganti	2,700,000	2,700,000	-	Sekolah Tutup dan Mengembalikan ke Kasda belum setor
313	TK HARAPAN IBU	69771866	Kec. Linggo Saribaganti	-	-	-	
314	TK PERMATA BUNDA	70000415	Kec. Linggo Saribaganti	-	-	-	
315	TK RESTU BUNDA	69870741	Kec. Linggo Saribaganti	-	-	-	
316	TK TUNAS MUDA	69870739	Kec. Linggo Saribaganti	20,000	20,000	-	
317	TK KASIAH BUNDO II	69967666	Kec. Linggo Saribaganti	-	-	-	
318	TK KARYA BAKTI MUARA GADANG	10309775	Kec. Linggo Saribaganti	-	-	-	
319	TK BAITUL SAKINAH	10309769	Kec. Linggo Saribaganti	-	-	-	
320	TK NUSA INDAH	10310458	Kec. Linggo Saribaganti	-	-	-	
321	TK BUNGA TANJUNG	10309772	Kec. Linggo Saribaganti	-	-	-	
322	TK KASIH BUNDA TAKWA	10309744	Kec. Linggo Saribaganti	-	-	-	
323	TK MIFTAHUL JANNAH	10310459	Kec. Linggo Saribaganti	-	-	-	
324	TK N PEMBINA	10309783	Kec. Linggo Saribaganti	-	-	-	
325	TK TUNAS NUSA	70000413	Kec. Linggo Saribaganti	50,000	50,000	-	
326	TK TUNAS BANGSA	69900089	Kec. Linggo Saribaganti	-	-	-	
327	TK RESTU ILAHI	69862616	Kec. Linggo Saribaganti	-	-	-	
328	TKN PEMBINA 02 LINGGO SARI BAGANTI	10309774	Kec. Linggo Saribaganti	-	-	-	
329	TK BUNGA SETANGKAI	10309771	Kec. Linggo Saribaganti	-	-	-	
330	TK BUNGA MAWAR	10309770	Kec. Linggo Saribaganti	-	-	-	
331	TK RESTU IBU	69954532	Kec. Linggo Saribaganti	-	-	-	
332	KB PERMATA BUNDA	69988264	Kec. Ranah Ampek Hulu Tapan	-	-	-	

333	KB IBU MANDIRI	69933493	Kec. Ranah Ampek Hulu Tapan	-	-	-	
334	KB HARAPAN BUNDA	69886975	Kec. Ranah Ampek Hulu Tapan	-	-	-	
335	KB SETIA BAKTI	69966703	Kec. Ranah Ampek Hulu Tapan	-	-	-	
336	KB BUNDA	69916015	Kec. Ranah Ampek Hulu Tapan	-	-	-	
337	KB PERMATA BUNDA	69959964	Kec. Ranah Ampek Hulu Tapan	-	-	-	
338	KB PERMATA MAS	69917817	Kec. Ranah Ampek Hulu Tapan	-	-	-	
339	KB PELITA HATI	69959963	Kec. Ranah Ampek Hulu Tapan	-	-	-	
340	TKN PEMBINA 01 RANAH AMPEK HULU	10309730	Kec. Ranah Ampek Hulu Tapan	-	-	-	
341	TK KHASANAH KALBU	69771737	Kec. Ranah Ampek Hulu Tapan	-	-	-	
342	SKB PESISIR SELATAN	P9970002	Kec. Bayang	-	-	-	
			T O T A L	29,524,000	29,524,000	-	

PEMERINTAH KABUPATEN PESISIR SELATAN
RINCIAN KAS LAINNYA
PER 31 DESEMBER 2024

NO	OPD	SALDO PER 31 DESEMBER 2024	Keterangan
1	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	-	
2	Dinas Kesehatan	-	
3	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	-	
4	Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman, Pertanahan dan Lingkungan Hidup	-	
5	Dinas Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran	-	
6	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	-	
7	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	-	
8	Dinas Koperasi, UKM, dan Tenaga Kerja	-	
9	Dinas Perikanan dan Pangan	-	
10	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	-	
11	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	-	
12	Dinas Perhubungan	-	
13	Dinas Komunikasi dan Informatika	-	
14	Dinas Perdagangan dan Transmigrasi	-	
15	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Satu Pintu	-	
16	Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga	-	
17	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan	-	
18	Dinas Pertanian	-	
19	Inspektorat Daerah	-	
20	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan	-	
21	Badan Pengelola Keuangan Pendapatan dan Aset Daerah	-	
22	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	-	
23	Sekretariat Daerah	-	
24	Sekretariat DPRD	-	
25	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	-	
26	Kecamatan Koto IX Tarusan	-	
27	Kecamatan Bayang	-	
28	Kecamatan Bayang Utara	-	
29	Kecamatan IV Jurai	-	
30	Kecamatan Batang Kapas	-	
31	Kecamatan Sutera	-	
32	Kecamatan Lengayang	-	
33	Kecamatan Ranah Pesisir	-	
34	Kecamatan Linggo Sari Baganti	-	
35	Kecamatan Pancung Soal	-	
36	Kecamatan Air Pura	-	
37	Kecamatan Basa IV Balai Tapan	-	
38	Kecamatan Ranah Ampek Hulu Tapan	-	
39	Kecamatan Lunang	-	
40	Kecamatan Silaut	-	
	Total	-	

**PEMERINTAH KABUPATEN PESISIR SELATAN
RINCIAN SETARA KAS
PER 31 DESEMBER 2024**

NO	PUSKESMAS	NO REKENING	SALDO
	NIHIL		
	Total		-

KABUPATEN PESISIR SELATAN
REKAPITULASI ASET LANCAR
DAFTAR PIUTANG NETTO
PER 31 DESEMBER 2024

NO	JENIS	SALDO PER 31 DESEMBER 2024	SALDO PER 31 DESEMBER 2023
		(Rp)	(Rp)
1	Piutang Pajak	10,420,820,248.00	9,690,086,977.00
	Penyisihan Piutang Pajak	(7,345,711,175.56)	(6,902,376,162.15)
	Piutang Pajak Netto	3,075,109,072.44	2,787,710,814.85
2	Piutang Retribusi	10,841,027,205.00	547,551,000.00
	Penyisihan Piutang Retribusi	(3,501,492,656.17)	(498,708,900.00)
	Piutang Retribusi Netto	7,339,534,548.83	48,842,100.00
3	Piutang Lain-Lain PAD yang Sah	-	2,694,344,343.00
	Penyisihan Piutang Lain-Lain PAD yang Sah	-	(13,468,537.72)
	Piutang Lain-Lain PAD yang Sah Netto	-	2,680,875,805.28
4	Piutang DBH Prop	33,124,642,460.00	28,729,702,466.00
	Penyisihan Piutang DBH Prop	-	(143,648,512.33)
	Piutang DBH Prop Netto	33,124,642,460.00	28,586,053,953.67
5	Piutang Lain-lain	-	39,843,470.00
	Penyisihan Piutang Lain-lain	-	(19,674,235.00)
	Piutang Lain-lain Netto	-	20,169,235.00
	JUMLAH PIUTANG BRUTO	54,386,489,913.00	41,701,528,256.00
	JUMLAH PENYISIHAN PIUTANG	(10,847,203,831.73)	(7,577,876,347.20)
	JUMLAH PIUTANG NETTO	43,539,286,081.28	34,123,651,908.80

KABUPATEN PESISIR SELATAN
DAFTAR PIUTANG PAJAK
PER 31 DESEMBER 2024

NO	SKPD	URAIAN	Saldo Awal	Penambahan Piutang Tahun 2024	Pengurangan Piutang Tahun 2024	PIUTANG BRUTO	% PENYISIHAN PIUTANG	PENYISIHAN PIUTANG	PIUTANG NETTO
1	2	3				4	5	6	7
1	BPKPAD	Pajak restoran	33,670,000.00	-	-	33,670,000.00		(33,670,000.00)	-
		Pajak restoran 2011	33,670,000.00			33,670,000.00	100%	(33,670,000.00)	
		Pajak restoran 2021	-			-	-	-	-
		PBB P2	9,329,769,735.00	820,433,212.00	89,699,941.00	10,060,503,006.00		(7,143,702,913.86)	2,916,800,092.14
		-2024		820,433,212.00		820,433,212.00	0,5 %	(4,102,166.06)	816,331,045.94
		-2023	770,651,463.00		26,325,366.00	744,326,097.00	10%	(74,432,609.70)	669,893,487.30
		-2022	605,420,718.00		11,523,607.00	593,897,111.00	10%	(59,389,711.10)	534,507,399.90
		-2021	698,164,823.00		12,553,650.00	685,611,173.00	50%	(342,805,586.50)	342,805,586.50
		-2020	747,406,944.00		13,309,405.00	734,097,539.00	50%	(367,048,769.50)	367,048,769.50
		-2019	379,499,228.00		7,071,622.00	372,427,606.00	50%	(186,213,803.00)	186,213,803.00
		-2018	792,905,643.00		2,107,347.00	790,798,296.00	100%	(790,798,296.00)	-
		-2017	884,917,556.00		2,589,144.00	882,328,412.00	100%	(882,328,412.00)	-
		-2016	1,491,556,148.00		4,817,343.00	1,486,738,805.00	100%	(1,486,738,805.00)	-
		-2015	1,515,471,543.00		4,714,084.00	1,510,757,459.00	100%	(1,510,757,459.00)	-
		-2014	1,443,775,669.00		4,688,373.00	1,439,087,296.00	100%	(1,439,087,296.00)	-
		Pajak Reklame	150,748,375.00	-	-	150,748,375.00		(150,748,375.00)	-
		Pajak reklame-2016	315,500.00			315,500.00	100%	(315,500.00)	-
		Pajak reklame-2019	150,432,875.00			150,432,875.00	100%	(150,432,875.00)	-
		BPHTB	175,898,867.00	-	-	175,898,867.00		(17,589,886.70)	158,308,980.30
		BPHTB 2023	175,898,867.00			175,898,867.00	10%	(17,589,886.70)	158,308,980.30
			-			-	-	-	-
TOTAL			9,690,086,977.00	820,433,212.00	89,699,941.00	10,420,820,248.00		(7,345,711,175.56)	3,075,109,072.44

KABUPATEN PESISIR SELATAN
DAFTAR PIUTANG RETRIBUSI
PER 31 DESEMBER 2024

141,654,000

No	URAIAN	SALDO AWAL	Penambahan Piutang Tahun 2024	Pengurangan Piutang Tahun 2024	PIUTANG BRUTO	% PENYISIHAN	PENYISIHAN PIUTANG	PIUTANG NETTO
1	2	3				4	5	6
A	DINAS PARIWISATA							
1	Objek wisata Jembatan akar	34,000,000	-	-	34,000,000	100%	(34,000,000)	-
2	Objek wisata bayang sani	10,000,000	-	-	10,000,000	100%	(10,000,000)	-
	Jumlah A	44,000,000	-	-	44,000,000		(44,000,000)	-
B	DINAS PERDAGANGAN TK							
	Retribusi Pasar:							
1	2024	-	184,149,000	42,495,000	141,654,000		(23,978,471)	117,675,529
	Desember		27,639,250		27,639,250	0.5%	(138,196)	27,501,054
	November		27,639,250		27,639,250	10.0%	(2,763,925)	24,875,325
	Oktober		27,639,250		27,639,250	10.0%	(2,763,925)	24,875,325
	September		27,639,250		27,639,250	10.0%	(2,763,925)	24,875,325
	Agustus		27,639,250		27,639,250	50%	(13,819,625)	13,819,625
	Juli		27,639,250	24,181,500.00	3,457,750	50%	(1,728,875)	1,728,875
	Juni		18,313,500	18,313,500.00	-			
2	2023	49,689,000		5,880,000.00	43,809,000	100%	(43,809,000)	-
3	2022	8,244,000.00			8,244,000	100%	(8,244,000)	-
4	2021	45,146,000.00			45,146,000	100%	(45,146,000)	-
5	2020	57,008,000.00			57,008,000	100%	(57,008,000)	-
6	2019	194,268,000.00			194,268,000	100%	(194,268,000)	-
7	2018	49,818,000.00			49,818,000	100%	(49,818,000)	-
8	2017	30,075,000.00			30,075,000	100%	(30,075,000)	-
9	2016	38,241,000.00			38,241,000	100%	(38,241,000)	-
10	2015	31,062,000.00			31,062,000	100%	(31,062,000)	-
	Jumlah B	503,551,000.00	184,149,000.00	48,375,000.00	639,325,000.00		(521,649,471)	117,675,528.75
C	DINAS KESEHATAN							
1	Dinas Kesehatan							
	Retribusi Pelayanan Kesehatan - Dinkes	-	2,554,674,584.00	-	2,554,674,584		(285,417,381.60)	2,269,257,202.40
2	RSUD M.Zein Painan							
	Retribusi Pelayanan Kesehatan RSUD	2,694,344,343.00	4,982,221,694.00	73,538,416.00	7,603,027,621.00		(2,650,425,803.33)	4,952,601,817.67
	Jumlah C	2,694,344,343.00	7,536,896,278.00	73,538,416.00	10,157,702,205.00		(2,935,843,184.93)	7,221,859,020.07
	Jumlah A+B+C	3,241,895,343.00	7,721,045,278.00	121,913,416.00	10,841,027,205.00	-	(3,501,492,656.17)	7,339,534,548.82

KABUPATEN PESISIR SELATAN
DAFTAR PIUTANG RETRIBUSI
PER 31 DESEMBER 2024

Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga

No	URAIAN	SALDO AWAL	Penambahan Piutang Tahun 2024	Pengurangan Piutang Tahun 2024	PIUTANG BRUTO	% PENYISIHAN	PENYISIHAN PIUTANG	PIUTANG NETTO
1	2	3				4	5	6
	Retribusi Pelayanan Tempat Rekreasi dan Olahraga							
1	Objek wisata Jembatan akar	34,000,000	-	-	34,000,000	100%	(34,000,000)	-
2	Objek wisata bayang sani	10,000,000	-	-	10,000,000	100%	(10,000,000)	-
	JUMLAH	44,000,000.00	-	-	44,000,000.00	-	(44,000,000)	-

KABUPATEN PESISIR SELATAN
DAFTAR PIUTANG RETRIBUSI
PER 31 DESEMBER 2024

Dinas Perdagangan dan Transmigrasi

NO	URAIAN	Tahun Pengakuan Hutang	Saldo Awal	Penambahan Piutang Tahun 2024	Pengurangan Piutang Tahun 2024	PIUTANG BRUTO	Kategori	% PENYISIHAN PIUTANG	PENYISIHAN PIUTANG	PIUTANG NETTO
1	2	3				4		5	6	7
1	Retribusi Pasar									
		2024		184,149,000.00	42,495,000.00	141,654,000.00			(23,978,471.25)	117,675,528.75
		Desember		27,639,250.00		27,639,250.00	lancar	0.5%	(138,196.25)	27,501,053.75
		November		27,639,250.00		27,639,250.00	kurang lancar	10.0%	(2,763,925.00)	24,875,325.00
		Oktober		27,639,250.00		27,639,250.00	kurang lancar	10.0%	(2,763,925.00)	24,875,325.00
		September		27,639,250.00		27,639,250.00	kualitas diragukan	10.0%	(2,763,925.00)	24,875,325.00
		Agustus		27,639,250.00		27,639,250.00	kualitas diragukan	50%	(13,819,625.00)	13,819,625.00
		Juli		27,639,250.00	24,181,500.00	3,457,750.00	kualitas diragukan	50%	(1,728,875.00)	1,728,875.00
		Juni		18,313,500.00	18,313,500.00	-			-	-
		2023	49,689,000.00		5,880,000.00	43,809,000.00	Macet	100%	(43,809,000.00)	-
		2022	8,244,000.00			8,244,000.00	Macet	100%	(8,244,000.00)	-
		2021	45,146,000.00			45,146,000.00	Macet	100%	(45,146,000.00)	-
		2020	57,008,000.00			57,008,000.00	Macet	100%	(57,008,000.00)	-
		2019	194,268,000.00			194,268,000.00	Macet	100%	(194,268,000.00)	-
		2018	49,818,000.00			49,818,000.00	Macet	100%	(49,818,000.00)	-
		2017	30,075,000.00			30,075,000.00	Macet	100%	(30,075,000.00)	-
		2016	38,241,000.00			38,241,000.00	Macet	100%	(38,241,000.00)	-
		2015	31,062,000.00			31,062,000.00	Macet	100%	(31,062,000.00)	-
	TOTAL		503,551,000.00	184,149,000.00	48,375,000.00	639,325,000.00		-	(521,649,471.25)	117,675,528.75

KABUPATEN PESISIR SELATAN
DAFTAR PIUTANG
RETRIBUSI PELAYANAN KESEHATAN
PER 31 DESEMBER 2024

Dinas Kesehatan				
NO	URAIAN	PIUTANG BRUTO	PENYISIHAN PIUTANG	PIUTANG NETTO
1	Retribusi Pelayanan Kesehatan - Dinkes	2,554,674,584.00	(285,417,381.60)	2,269,257,202.40
2	Retribusi Pelayanan Kesehatan - RSUD M.Zein Painan	7,603,027,621.00	(2,650,425,803.33)	4,952,601,817.67
TOTAL		10,157,702,205.00	(2,935,843,184.93)	7,221,859,020.07

KABUPATEN PESISIR SELATAN
DAFTAR PIUTANG RETRIBUSI PELAYANAN KESEHATAN
PER 31 DESEMBER 2024

DINAS KESEHATAN

NO	URAIAN	KATEGORI	PIUTANG BRUTO	% PENYISIHAN PIUTANG	PENYISIHAN PIUTANG	PIUTANG NETTO
1	Piutang Retribusi Pelayanan Kesehatan	Kualitas Lancar	683,269,440.00	0.50%	(3,416,347.20)	679,853,092.80
		Kualitas Kurang Lancar	1,634,253,844.00	10.00%	(163,425,384.40)	1,470,828,459.60
		Kualitas Diragukan	237,151,300.00	50.00%	(118,575,650.00)	118,575,650.00
		Kualitas Macet	-	-	-	-
TOTAL PIUTANG DINKES			2,554,674,584.00		(285,417,381.60)	2,269,257,202.40

DAFTAR PIUTANG RETRIBUSI PELAYANAN KESEHATAN
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH
PER 31 DESEMBER 2024

RSUD dr M. Zein Painan

No.	Uraian Piutang	Tahun Pengakuan Piutang	Saldo Awal Piutang	Penambahan Piutang	Pengurangan Piutang	Saldo Akhir Piutang (Bruto)	% Penyisihan Piutang	Jumlah Penyisihan Piutang	Jumlah Piutang Netto
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Klaim covid kemenkes 2020		549,195,800.00	-	-	549,195,800.00		549,195,800.00	-
		2023	549,195,800.00	-	-	549,195,800.00	100.00%	549,195,800.00	-
2	Klaim Pasien Bermasalah ke Baznas		1,150,744,882.00	436,440,200.00	-	1,587,185,082.00		1,152,927,083.00	434,257,999.00
		2023	1,150,744,882.00	-	-	1,150,744,882.00	100.00%	1,150,744,882.00	-
		Des 2024	-	436,440,200.00	-	436,440,200.00	0.50%	2,182,201.00	434,257,999.00
3	Klaim Jasaraharja		28,601,714.00	10,912,439.00	28,601,714.00	10,912,439.00		54,562.20	10,857,876.81
		Des 2024	28,601,714.00	10,912,439.00	28,601,714.00	10,912,439.00	0.50%	54,562.20	10,857,876.81
4	Klaim Taspen		19,014,041.00	-	19,014,041.00	-		-	-
		2023	19,014,041.00	-	19,014,041.00	-		-	-
5	Klaim PT Waskita Karya		11,798,484.00	-	-	11,798,484.00		11,798,484.00	-
		2023	11,798,484.00	-	-	11,798,484.00	100.00%	11,798,484.00	-
6	Klaim PT Dempo		7,804,198.00	-	7,804,198.00	-		-	-
		2023	7,804,198.00	-	7,804,198.00	-		-	-
7	Klaim BPJS Ketenagakerjaan		18,118,463.00	16,163,934.00	18,118,463.00	16,163,934.00		1,616,393.40	14,547,540.60
		Okt 2024	18,118,463.00	16,163,934.00	18,118,463.00	16,163,934.00	10.00%	1,616,393.40	14,547,540.60
8	Pelayanan Pasien Miskin di RSUD Dr M Zein Painan		909,066,761.00	37,005,221.00	-	946,071,982.00		912,424,981.24	33,647,000.77
		2023	909,066,761.00	-	-	909,066,761.00	100.00%	909,066,761.00	-
		Feb - Mar 2024	-	3,867,875.00	-	3,867,875.00	50.00%	1,933,937.50	1,933,937.50
		Sept - Nov 2024	-	13,248,379.00	-	13,248,379.00	10.00%	1,324,837.90	11,923,541.10
		Des 2024	-	19,888,967.00	-	19,888,967.00	0.50%	99,444.84	19,789,522.17
9	Klaim BPJS Bulan Desember 2024 (Januari 2025)		-	4,481,699,900.00	-	4,481,699,900.00		22,408,499.50	4,459,291,400.50
		Des 2024	-	4,481,699,900.00	-	4,481,699,900.00	0.50%	22,408,499.50	4,459,291,400.50
Jumlah			2,694,344,343.00	4,982,221,694.00	73,538,416.00	7,603,027,621.00		2,650,425,803.33	4,952,601,817.67

KABUPATEN PESISIR SELATAN
DAFTAR PIUTANG LAIN-LAIN PAD YANG SAH
PER 31 DESEMBER 2024

NO	SKPD	URAIAN	PIUTANG BRUTO	% Penyisihan	PENYISIHAN PIUTANG	PIUTANG NETTO
		N I H I L				
TOTAL			0.00		-	0.00

Lampiran 4.4.

**KABUPATEN PESISIR SELATAN
DAFTAR PIUTANG DANA BAGI HASIL / DBH PROVINSI
PER 31 DESEMBER 2024**

No	SKPD	Uraian	Tahun Pengakuan Piutang	Piutang Bruto	% Penyisihan	Penyisihan Piutang	Piutang Netto
1	BPKPAD	DBH PKB	2024	5,932,976,454			5,932,976,454.00
		DBH BBNKB	2024	2,366,777,559			2,366,777,559.00
		DBH PBBKB	2024	24,609,925,410			24,609,925,410.00
		DBH PAP	2024	214,963,037			214,963,037.00
TOTAL				33,124,642,460.00		-	33,124,642,460.00

KABUPATEN PESISIR SELATAN
DAFTAR PIUTANG LAINNYA
PER 31 DESEMBER 2024

NO	SKPD	URAIAN	PIUTANG BRUTO	% Penyisihan	PENYISIHAN PIUTANG	PIUTANG NETTO
		N I H I L				
TOTAL			0.00		-	0.00

KABUPATEN PESISIR SELATAN
REKAPITULASI ASET LANCAR
RINCIAN PENYISIHAN PIUTANG TAK TERTAGIH
PER 31 DESEMBER 2024

NO	JENIS	SALDO PER 31 DESEMBER 2024	SALDO PER 31 DESEMBER 2023
		(Rp)	(Rp)
1	Penyisihan Piutang Pajak	(7,345,711,175.56)	(6,902,376,162.15)
2	Penyisihan Piutang Retribusi	(3,501,492,656.17)	(498,708,900.00)
3	Penyisihan Piutang Lain-Lain PAD yang Sah	-	(13,468,537.72)
4	Penyisihan Piutang DBH Prop	-	(143,648,512.33)
5	Penyisihan Piutang Lain-lain	-	(19,674,235.00)
	JUMLAH PENYISIHAN PIUTANG	(10,847,203,831.73)	(7,577,876,347.20)

KABUPATEN PESISIR SELATAN
DAFTAR PERSEDIAAN
PER 31 DESEMBER 2024

NO	SKPD	2024	2023
1	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	932,000.00	814,000.00
2	Dinas Kesehatan	17,762,586,590.56	10,116,443,796.00
3	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	9,464,726,106.00	11,746,822,935.00
4	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan dan Lingkungan Hidup	97,390,664.00	642,387,325.00
5	Dinas Satuan Polisi, Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran	13,357,500.00	13,357,500.00
6	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	-	-
7	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	-	-
8	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	136,450,000.00	201,253,000.00
9	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	54,332,386.00	23,532,887.00
10	Dinas Perhubungan	351,091,249.00	603,853,000.00
11	Dinas Komunikasi dan Informatika	-	-
12	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu	-	-
13	Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga	-	-
14	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan	-	-
15	Dinas Perikanan dan Pangan	178,071,248.88	590,882,830.25
16	Dinas Pertanian	194,107,453.92	175,412,402.40
17	Inspektorat Daerah	-	-
18	Badan Perencanaan Daerah, Penelitian dan Pengembangan	1,394,000.00	2,698,200.00
19	Badan Kepegawaian Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	-	-
20	Badan Pengelolaan Keuangan Pendapatan dan Aset Daerah	149,213,319.00	129,099,175.00
21	Dinas Koperasi, Usaha Kecil Mikro dan Tenaga Kerja	-	-
22	Dinas Perdagangan dan Transmigrasi	1,834,611,000.00	1,834,611,000.00
23	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	-	-
24	Sekretariat Daerah	1,900,000.00	11,433,000.00
25	Sekretariat DPRD	-	2,700,000.00
26	Kecamatan Koto XI Tarusan	-	27,000.00
27	Kecamatan Bayang	-	-
28	Kecamatan Bayang Utara	-	-
29	Kecamatan IV Jurai	-	-
30	Kecamatan Batang Kapas	-	-
31	Kecamatan Sutera	293,000.00	852,000.00
32	Kecamatan Lengayang	-	-
33	Kecamatan Ranah Pesisir	3,000.00	3,000.00
34	Kecamatan Linggo Sari Baganti	-	-
35	Kecamatan Pancung Soal	-	-
36	Kecamatan Air Pura	-	-
37	Kecamatan Basa Ampek Balai Tapan	-	-
38	Kecamatan Ranah Ampek Hulu Tapan	-	-
39	Kecamatan Lunang	-	-
40	Kecamatan Silaut	-	-
		-	-
	TOTAL	30,240,459,517.36	26,096,183,050.65

RINCIAN PERSEDIAN
PER 31 DESEMBER 2024

NO	OPD	ATK	Cetak	Alat Listrik & Elektronik	Bahan Laboratorium	Alat Kesehatan lainnya	Persediaan hibah	Materai & benda pos lainnya	Alat Kebersihan	BBM	Soffenir/ Cendra mata	Obat dan BHP	Bahan Makanan	Bahan Material	Komponen Instalasi Listrik	TOTAL
1	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	932.000													-	932,000.00
2	Dinas Kesehatan	2,745,200.00										17,759,233,890.56	607,500.00		-	17,762,586,590.56
3	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang						9,464,726,106.00								-	9,464,726,106.00
4	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan dan Lingkungan Hidup	448,500.00	930,000.00					410,000.00	38,200,000.00	54,713,749.00		2,688,415.00			-	97,390,664.00
5	Dinas Satuan Polisi, Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran										13,357,500.00				-	13,357,500.00
6	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak														-	-
7	Badan Penanggulangan Bencana Daerah														-	-
8	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	22,500,000.00	113,950,000.00												-	136,450,000.00
9	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana											54,332,386.00			-	54,332,386.00
10	Dinas Perhubungan		55,650,000.00	295,441,249.00											-	351,091,249.00
11	Dinas Komunikasi dan Informatika														-	-
12	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu														-	-
13	Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga														-	-
14	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan														-	-
15	Dinas Perikanan dan Pangan												178,071,248.88		-	178,071,248.88
16	Dinas Pertanian											194,107,453.92			-	194,107,453.92
17	Inspektorat Daerah														-	-
18	Badan Perencanaan Daerah, Penelitian dan Pengembangan	1,394,000.00													-	1,394,000.00
19	Badan Kepegawaian Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia														-	-
20	Badan Pengelolaan Keuangan Pendapatan dan Aset Daerah		149,213,319.00													149,213,319.00
21	Dinas Koperasi, Usaha Kecil Mikro dan Tenaga Kerja															-
22	Dinas Perdagangan dan Transmigrasi													1,834,611,000		1,834,611,000.00
23	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	-	-	-			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
24	Sekretariat Daerah	1,900,000.00													-	1,900,000.00
25	Sekretariat DPRD														-	-
26	Kecamatan Koto XI Tarusan														-	-
27	Kecamatan Bayang														-	-
28	Kecamatan Bayang Utara														-	-
29	Kecamatan IV Jurai														-	-
30	Kecamatan Batang Kapas														-	-
31	Kecamatan Sutura	293,000.00													-	293,000.00
32	Kecamatan Lengayang														-	-
33	Kecamatan Ranah Pesisir							3,000.00							-	3,000.00
34	Kecamatan Linggo Sari Baganti														-	-
35	Kecamatan Pancung Soal														-	-
36	Kecamatan Air Pura	-	-	-			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
37	Kecamatan Basa Ampek Balai Tapan														-	-
38	Kecamatan Ranah Ampek Hulu Tapan														-	-
39	Kecamatan Lunang														-	-
40	Kecamatan Silaut														-	-
							-								-	-
	TOTAL	30,212,700.00	319,743,319.00	295,441,249.00	-	-	9,464,726,106.00	413,000.00	38,200,000.00	54,713,749.00	13,357,500.00	18,010,362,145.48	178,678,748.88	1,834,611,000.00	-	30,240,459,517.36

KABUPATEN PESISIR SELATAN
INVESTASI NON PERMANEN (DANA BERGULIR)
PER 31 DESEMBER 2024

Program	Tunggakan Per 31 Des 2023	Pengembalian Pokok TA 2024 (-)	Saldo Per 31 Des 2024	Penyisihan Tak Tertagih	Investasi Non Permanen Netto
BPD Painan K-PER 2002	161,041,237	-	161,041,237	-	-
BPD Painan K-PER 2003	229,451,970	-	229,451,970	-	-
BPD Painan K-PER 2006	469,441,777	440,000	469,001,777	-	-
BPD Tapan	722,113,000	-	722,113,000	-	-
Dinas Koperasi	107,554,943	-	107,554,943	-	-
BPR Samudera K-PER 2007	33,888,000	-	33,888,000	-	-
BPR Samudera K-PER 2008	49,817,000	-	49,817,000	-	-
Jumlah	1,773,307,927	440,000	1,772,867,927	- 1,772,867,927	-

KABUPATEN PESISIR SELATAN
INVESTASI PERMANEN
PER 31 DESEMBER 2024

No	Rincian	Jumlah	Keterangan
1	2	3	4
1	PT Bank Pembangunan Daerah Sumatera Barat (Bank Nagari)	3,484,000,000.00	2007
		343,000,000.00	2009
		4,656,000,000.00	2010
		6,637,000,000.00	2012, 2013
		4,826,000,000.00	2014
		6,489,000,000.00	2015
		9,785,000,000.00	2016
		10,388,000,000.00	2017
		12,000,000,000.00	2018
		58,608,000,000.00	
2	PDAM Pesisir Selatan	10,236,497,910.00	Penyertaan Modal s/d Tahun 2014
		9,000,000,000.00	Penyertaan Modal Tahun 2015
		(294,793,194.93)	Bagian Rugi 2015
		9,000,000,000.00	Penyertaan Modal Tahun 2016
		38,218,167.56	Bagian Laba 2016
		9,000,000,000.00	Penyertaan Modal Tahun 2017
		222,818,926.96	Bagian Laba 2017
		4,500,000,000.00	Penyertaan Modal Tahun 2018
		(42,000,000.00)	Koreksi Penyertaan Modal Tahun 2018
		(299,745,280.76)	Bagian Rugi 2018
		4,329,000,000.00	Penyertaan Modal Tahun 2019
		(155,070,370.00)	Koreksi Bagian Laba Tahun- Tahun Sebelumnya
		159,156,070.00	Bagian Laba 2019 LK Audited
		6,000,000,000.00	Penyertaan Modal Tahun 2020
		4,500,000,000.00	Penyertaan Modal Tahun 2021
		(1,605,157,190.02)	Koreksi Bagian Rugi Tahun 2019
		(1,251,632,837.85)	Koreksi Bagian Rugi Tahun 2020
		(1,981,337,063.63)	Bagian Rugi Tahun 2021
		3,032,000,000.00	Penyertaan Modal Tahun 2022
		(1,356,519,185.92)	Bagian Rugi Tahun 2022
		3,525,505,000.00	Penyertaan Modal Tahun 2023
		83,095,919.83	Bagian Laba Tahun 2023
		7,063,067,047.00	Penyertaan Modal Tahun 2024
		33,150,996.81	Bagian Laba Tahun 2024
		63,736,254,915.05	
3	PERUSDA PESSEL	259,000,000.00	
4	PT BPR Samudra	500,000,000.00	Penyertaan Modal Tahun 2006
		85,000,000.00	Bunga Deposito 2006 yang tidak disetorkan
		2,000,000,000.00	Penyertaan Modal Tahun 2016
		-	Bagian Laba Tahun 2016 yang tidak dibagikan
		1,945,650,000.00	Penyertaan Modal Tahun 2017
		11,527,015.00	Bagian Laba 2017 yang tidak dibagikan
		11,928,490.00	Bagian Laba 2018 yang tidak dibagikan

		19,650,998.30	Bagian Laba 2019 yang tidak dibagikan
		18,522,500.00	Bagian Laba 2020 yang tidak dibagikan
		15,469,992.00	Bagian Laba 2021 yang tidak dibagikan
		9,987,893.67	Bagian Laba 2022 yang tidak dibagikan
		5,457,776.32	Bagian Laba 2023 yang tidak dibagikan
		6,976,706.73	Bagian Laba 2024 yang tidak dibagikan
		4,630,171,372.02	
5	PT Balairung Citra Jaya	1,000,000,000.00	
	Jumlah	128,233,426,287.08	

Lampiran : 7.1

**DAFTAR : HIBAH ASET TETAP DARI PIHAK KETIGA
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG KAB. PESSEL
Per 31 Desember 2024**

NO	ASAL USUL BARANG	DOKUMEN	TANGGAL	NOMOR	PENEMPATAN	NAMA BARANG	Lokasi	Tahun Perolehan	VOL	HARGA SATUAN	JUMLAH
	KIB D										
1	Hubah Provinsi Sumbar		14/Mei/2020	030/233/BAST/BAP2B MD-III-2020	PUTR	Pembangunan Sistem Air Bersih Kecamatan Lunang Kab. Pesisir Selatan	Kec. Lunang	2006	1	621,470,900	621,470,900
2	Hubah Provinsi Sumbar		14/Mei/2020	030/233/BAST/BAP2B MD-III-2020	PUTR	Konstruksi Jaringan Air Bersih/Air Minum PSAM Kab. Pesisir Selatan 30L/detik	Kab. Pesisir Selatan	2010	1	207,668,000	207,668,000
3	Hubah Provinsi Sumbar		14/Mei/2020	030/233/BAST/BAP2B MD-III-2020	PUTR	Pembangunan PSAM Kawasan Lakitan Kab. Pesisir Selatan	Lakitan	2011	1	352,155,000	352,155,000
4	Hubah Provinsi Sumbar		14/Mei/2020	030/233/BAST/BAP2B MD-III-2020	PUTR	Paket Peningkatan SPAM Kawasan Lakitan	Lakitan	2012	1	2,078,431,000	2,078,431,000
5	Hubah Provinsi Sumbar		14/Mei/2020	030/233/BAST/BAP2B MD-III-2020	PUTR	PSAM PSAB Hilalang Panjang Kec. Inderapura	Air Pura	2010	1	405,983,000	405,983,000
6	Hubah Provinsi Sumbar		14/Mei/2020	030/233/BAST/BAP2B MD-III-2020	PUTR	Peningkatan PSAM Hilalang Panjang	Air Pura	2010	1	286,163,000	286,163,000
7	Hubah Provinsi Sumbar		14/Mei/2020	030/233/BAST/BAP2B MD-III-2020	PUTR	Konstruksi Jaringan Air Bersih/Air Minum PSAM Kawasan Kota Painan Kab. Pesisir Selatan 30L/detik	Kec.IV Jurai	2009	1	500,000,000	500,000,000
8	Hubah Provinsi Sumbar		14/Mei/2020	030/233/BAST/BAP2B MD-III-2020	PUTR	SPAM Kawasan Painan	Kec. IV Jurai	2013	1	629,476,000	629,476,000
9	Hubah Provinsi Sumbar		14/Mei/2020	030/233/BAST/BAP2B MD-III-2020	PUTR	SPAM Kawasan Kambang Kapasitas 20 L/detik	Kec. Lengayang	2010	1	597,796,000	597,796,000
10	Hubah Provinsi Sumbar		14/Mei/2020	030/233/BAST/BAP2B MD-III-2020	PUTR	SPAM Kawasan Kambang	Kec. Lengayang	2013	1	1,879,090,223	1,879,090,223
11	Hubah Provinsi Sumbar		14/Mei/2020	030/233/BAST/BAP2B MD-III-2020	PUTR	Peningkatan PSAM Kawasan Bayang Utara	Bayang Utara	2010	1	437,287,000	437,287,000

12	Hubah Provinsi Sumbar		14/Mei/2020	030/233/BAST/BAP2B MD-III-2020	PUTR	Peningkatan PSAM Kawasan Bayang Utara	Bayang Utara	2010	1	120,000,000	120,000,000
13	Hubah Provinsi Sumbar		14/Mei/2020	030/233/BAST/BAP2B MD-III-2020	PUTR	Pembangunan PSAM Kawasan Bayang Utara	Bayang Utara	2011	1	3,827,785,464	3,827,785,464
14	Hubah Provinsi Sumbar		14/Mei/2020	030/233/BAST/BAP2B MD-III-2020	PUTR	Peningkatan PSAM Kawasan Bayang Utara (Tahun Jamak)	Bayang Utara	2012	1	634,067,536	634,067,536
15	Hubah Provinsi Sumbar		14/Mei/2020	030/233/BAST/BAP2B MD-III-2020	PUTR	SPAM Kawasan Bayang Utara	Bayang Utara	2013	1	700,419,000	700,419,000
16	Hubah Provinsi Sumbar		14/Mei/2020	030/233/BAST/BAP2B MD-III-2020	PUTR	Peningkatan PSAM Kawasan Bayang Utara	Bayang Utara	2015	1	937,341,000	937,341,000
17	Hubah Provinsi Sumbar		14/Mei/2020	030/233/BAST/BAP2B MD-III-2020	PUTR	PSAM Kawasan Lumpo (Bencana Alam) Kps 20 L/Detik	Kec. IV Jurai	2009	1	610,511,000	610,511,000
18	Hubah Provinsi Sumbar		14/Mei/2020	030/233/BAST/BAP2B MD-III-2020	PUTR	Peningkatan PSAM Kawasan Lumpo	Kec. IV Jurai	2010	1	546,898,000	546,898,000
19	Hubah Provinsi Sumbar		14/Mei/2020	030/233/BAST/BAP2B MD-III-2020	PUTR	Peningkatan PSAM Kawasan Lumpo Pasar Baru	Kec. IV Jurai	2016	1	2,780,458,000	2,780,458,000
20	Hubah Provinsi Sumbar		14/Mei/2020	030/233/BAST/BAP2B MD-III-2020	PUTR	Paket Peningkatan SPAM Kawasan Ampiang Parak	Sutera	2012	1	464,200,000	464,200,000
21	Hubah Provinsi Sumbar		14/Mei/2020	207/BAST/BAP2BMD-III/2020	PUTR	Konstruksi Jaringan Air Bersih/Air Minum Kawasan Tuik Kec. Batang Kapas	Batang Kapas	2007	1	820,930,000	820,930,000
22	Hubah Provinsi Sumbar		14/Mei/2020	207/BAST/BAP2BMD-III/2020	PUTR	PSAM Kawasan Tuik	Batang Kapas	2008	1	549,044,000	549,044,000
23	Hubah Provinsi Sumbar		14/Mei/2020	207/BAST/BAP2BMD-III/2020	PUTR	Konstruksi Jaringan Air Bersih/Air Minum Kawasan Surantih	Sutera	2007	1	1,328,440,000	1,328,440,000
24	Hubah Provinsi Sumbar		14/Mei/2020	207/BAST/BAP2BMD-III/2020	PUTR	PSAM Kawasan Surantih	Sutera	2008	1	617,259,000	617,259,000
25	Hubah Provinsi Sumbar		14/Mei/2020	030/233/BAST/BAP2B MD-III-2020	PUTR	Penyusunan DED Kawasan Bungo Pasang Salido Kecil Kab. Pesisir Selatan	Kec. IV Jurai	2011	1	97,308,000	97,308,000
26	Hubah Provinsi Sumbar		14/Mei/2020	030/233/BAST/BAP2B MD-III-2020	PUTR	Pembuatan DED PSAB Kawasan Asam Kumbang Bayang Utara	Bayang Utara	2008	1	65,743,000	65,743,000

[illegible]

REKAPITULASI SALDO AWAL ASET TETAP TA 2024 DENGAN HASIL MAPPING ASET SESUAI APLIKASI PER SKPD
PER 31 DESEMBER 2024

No	SKPD	Tanah			Peralatan & Mesin			Gedung & Bangunan		
		2023	APLIKASI	SELISIH	2023	APLIKASI	SELISIH	2023	APLIKASI	SELISIH
1	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	17,809,533,833	17,809,533,833	-	158,100,075,419	154,433,517,299	- 3,666,558,120	494,795,117,212	494,795,117,212	-
2	Dinas Kesehatan	5,282,345,729	5,282,345,729	-	90,870,215,552	90,870,215,552	-	140,606,819,198	140,606,819,198	-
3	Rumah Sakit Umum Daerah	1,087,914,020	1,087,914,020	-	129,450,212,174	129,450,212,174	-	34,661,868,867	34,661,868,867	-
4	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	130,008,600,159	130,008,600,159	-	16,586,161,467	16,586,161,467	-	79,290,779,492	79,290,779,492	-
5	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman, Pertanahan dan Lingkungan Hidup	10,252,781,213	10,252,781,213	-	21,101,595,562	21,101,595,562	-	70,366,148,875	70,366,148,875	-
6	Dinas Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran	210,034,180	210,034,180	-	9,603,379,262	9,603,379,262	-	3,206,547,964	3,206,547,964	-
7	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	961,296,327	961,296,327	-	1,628,327,480	1,628,327,480	-	1,261,591,683	1,261,591,683	-
8	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	1,121,699,770	1,121,699,770	-	5,586,895,877	5,586,895,877	-	8,998,799,985	8,998,799,985	-
9	Dinas Koperasi, UMKM, dan Tenaga Kerja	559,542,842	559,542,842	-	3,016,498,876	3,016,498,876	-	8,416,232,028	8,416,232,028	-
10	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	-	-	-	5,689,890,750	5,689,890,750	-	47,223,400	47,223,400	-
11	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	82,500,000	82,500,000	-	9,709,100,085	9,709,100,085	-	3,353,257,909	3,353,257,909	-
12	Dinas Perhubungan	497,467,844	497,467,844	-	10,463,350,749	10,463,350,749	-	3,239,163,996	3,239,163,996	-
13	Dinas Komunikasi dan Informatika	128,456,000	128,456,000	-	6,612,427,698	6,612,427,698	-	1,335,415,833	1,335,415,833	-
14	Dinas Perdagangan dan Transmigrasi	11,959,122,147	11,959,122,147	-	21,373,186,121	21,373,186,121	-	137,441,754,147	137,441,754,147	-
15	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu	291,730,000	291,730,000	-	1,651,576,054	1,651,576,054	-	12,535,679,034	12,535,679,034	-
16	Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga	11,668,107,260	11,668,107,260	-	4,141,452,918	4,141,452,918	-	54,085,366,600	54,085,366,600	-
17	Dinas Kearsifan dan Perpustakaan	295,562,536	295,562,536	-	3,490,767,266	3,489,117,266	- 1,650,000	10,839,291,340	10,839,291,340	-
18	Dinas Perikanan dan Pangan	1,084,196,500	1,084,196,500	-	9,740,034,224	9,740,034,224	-	12,714,440,178	12,714,440,178	-
19	Dinas Pertanian	2,312,961,482	2,312,961,482	-	15,718,092,680	15,718,092,680	-	31,007,419,137	31,007,419,137	-
20	Inspektorat Daerah	302,800,000	302,800,000	-	2,514,693,415	2,514,693,415	-	2,062,427,852	2,062,427,852	-
21	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan	546,031,812	546,031,812	-	3,542,150,572	3,539,603,348	- 2,547,224	5,776,436,511	5,776,436,511	-
22	Badan Pengelola Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah	-	-	-	6,718,762,687	6,718,762,687	-	9,104,393,534	9,104,393,534	-
23	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	-	-	-	2,264,362,747	2,264,362,747	-	1,350,115,924	1,350,115,924	-
24	Sekretariat Daerah	16,620,423,185	16,620,423,185	-	24,050,645,055	24,005,642,471	- 45,002,584	55,036,606,153	55,036,606,153	-
25	Sekretariat DPRD	546,020,882	546,020,882	-	9,156,470,995	9,156,470,995	-	17,222,537,385	17,222,537,385	-
26	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	96,000,000	96,000,000	-	1,062,951,321	1,062,951,321	-	786,102,682	786,102,682	-
27	Kecamatan Koto IX Terasan	739,865,089	739,865,089	-	489,890,524	489,890,524	-	1,134,387,280	1,134,387,280	-
28	Kecamatan Bayang	270,912,748	270,912,748	-	703,606,183	703,606,183	-	2,282,011,223	2,282,011,223	-
29	Kecamatan Bayang Utara	265,000,000	265,000,000	-	693,105,138	694,605,138	- 1,500,000	1,643,089,749	1,643,089,749	-
30	Kecamatan IV Jural	83,000,000	83,000,000	-	514,380,109	514,380,109	-	2,129,485,339	2,129,485,339	-
31	Kecamatan Batang Kapas	220,000,000	220,000,000	-	642,827,246	642,827,246	-	1,935,417,425	1,935,417,425	-
32	Kecamatan Sutra	180,000,000	180,000,000	-	586,401,809	586,401,809	-	1,472,285,025	1,472,285,025	-
33	Kecamatan Lengayang	302,076,157	302,076,157	-	565,030,134	565,030,134	-	2,612,341,213	2,612,341,213	-
34	Kecamatan Ranah Pesisir	211,039,850	211,039,850	-	600,671,576	600,671,576	-	1,275,202,980	1,275,202,980	-
35	Kecamatan Linggo Sari Baganti	304,333,168	304,333,168	-	657,584,436	657,584,436	-	696,700,000	696,700,000	-
36	Kecamatan Pancung Soal	161,570,882	161,570,882	-	634,264,148	634,264,148	-	2,071,761,706	2,071,761,706	-
37	Kecamatan Air Pura	48,520,000	48,520,000	-	576,828,505	576,828,505	-	1,492,303,010	1,492,303,010	-
38	Kecamatan Basa IV Balai Tapan	250,000,000	250,000,000	-	596,187,749	596,187,749	-	694,899,737	694,899,737	-
39	Kecamatan Ranah Ampel Hulu Tapan	76,590,000	76,590,000	-	716,095,494	716,095,494	-	2,793,800,819	2,793,800,819	-
40	Kecamatan Lunang	87,664,416	87,664,416	-	527,968,552	527,968,552	-	1,725,793,327	1,725,793,327	-
41	Kecamatan Silaut	18,180,000	18,180,000	-	575,829,302	575,829,302	-	2,313,574,049	2,313,574,049	-
42	Pengelola Barang Milik Daerah	2,122,706,379	2,122,706,379	-	2,862,590,929	2,862,590,929	-	424,415,725	424,415,725	-
Total		219,066,586,410.00	219,066,586,410.00	-	585,786,538,840.00	582,072,280,912.00	- 3,714,257,928.00	1,226,239,005,526.00	1,226,239,005,526.00	-

No	SKPD	Jalan, Irigasi, dan Jaringan			Aset Tetap Lainnya			Konstruksi dalam Pengerjaan			Akumulasi Penyusutan 2023	JUMLAH
		2023	APLIKASI	SELISIH	2023	APLIKASI	SELISIH	2023	APLIKASI	SELISIH		
1	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	524,682,624	524,682,624	-	114,937,973,750	117,073,563,304	2,135,589,554	137,566,809	137,566,809	-	253,425,822,694	1,315,984,572,659
2	Dinas Kesehatan	24,127,340,701	24,127,340,701	-	17,490,000	17,490,000	-	743,762,000	743,762,000	-	101,919,948,863	420,632,235,497
3	Rumah Sakit Umum Daerah	5,266,975,179	5,266,975,179	-	30,664,369	30,664,369	-	211,939,550	211,939,550	-	120,250,788,157	220,956,420,611
4	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	2,233,118,476,368	2,233,118,476,368	-	291,390,542	291,390,542	-	91,250,048,768	91,250,048,768	-	1,279,806,408,789	3,730,034,456,035
5	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman, Pertanahan dan Lingkungan Hidup	37,146,430,239	37,146,430,239	-	579,679,852	579,679,852	-	349,999,864	349,999,864	-	34,608,154,218	244,635,117,128
6	Dinas Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran	60,850,000	60,850,000	-	-	-	-	-	-	-	10,231,814,057	15,929,808,755
7	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	77,944,915	77,944,915	-	-	-	-	-	-	-	1,861,515,359	5,996,805,451
8	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	45,838,731,742	45,838,731,742	-	4,790,500	4,790,500	-	-	-	-	39,515,366,224	83,586,469,524
9	Dinas Koperasi, UMKM, dan Tenaga Kerja	585,715,974	585,715,974	-	-	-	-	-	-	-	2,481,860,597	22,674,118,843
10	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	70,048,500	70,048,500	-	-	-	-	-	-	-	5,599,434,307	6,014,890,993
11	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	42,897,000	42,897,000	-	215,246,400	215,246,400	-	-	-	-	9,872,820,440	16,933,182,348
12	Dinas Perhubungan	24,565,639,815	24,565,639,815	-	-	-	-	-	-	-	26,132,022,788	51,399,222,020
13	Dinas Komunikasi dan Informatika	1,982,803,288	1,982,803,288	-	21,522,500	21,522,500	-	-	-	-	7,034,943,172	13,126,307,466
14	Dinas Perdagangan dan Transmigrasi	51,275,864,692	51,275,864,692	-	8,750,000	8,750,000	-	4,558,957,675	4,558,957,675	-	52,802,038,883	395,874,273,006
15	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu	94,422,389	94,422,389	-	3,000,000	3,000,000	-	-	-	-	3,080,367,628	26,072,447,326
16	Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga	7,805,125,394	7,805,125,394	-	7,773,000	7,773,000	-	3,540,672,780	3,540,672,780	-	14,982,234,445	143,974,088,679
17	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan	97,752,027	97,752,027	-	968,683,204	970,333,204	1,650,000	-	-	-	3,745,418,599	27,638,694,147
18	Dinas Perikanan dan Pangan	3,995,653,887	3,995,653,887	-	57,383,500	57,383,500	-	-	-	-	13,733,935,604	41,449,480,974
19	Dinas Pertanian	8,380,625,806	8,380,625,806	-	59,084,000	59,084,000	-	304,130,000	304,130,000	-	21,394,512,741	93,865,983,469
20	Inspektorat Daerah	12,980,000	12,980,000	-	56,997,500	56,997,500	-	-	-	-	3,193,283,527	6,706,514,007
21	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan	516,549,937	516,549,937	-	93,251,400	95,798,624	2,547,224	-	-	-	5,037,218,901	15,911,621,563
22	Badan Pengelola Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah	258,375,881	258,375,881	-	-	-	-	-	-	-	8,595,237,313	23,567,826,891
23	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	76,952,650	76,952,650	-	49,725,248	49,725,248	-	-	-	-	2,560,270,048	4,922,043,090
24	Sekretariat Daerah	186,668,590	186,668,590	-	106,599,250	151,601,834	45,002,584	-	-	-	34,340,244,539	157,661,639,927
25	Sekretariat DPRD	57,895,104	57,895,104	-	59,853,229	59,853,229	-	-	-	-	11,866,293,452	42,219,261,738
26	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	35,996,500	35,996,500	-	-	-	-	-	-	-	1,048,107,977	2,913,993,029
27	Kecamatan Koto IX Tarusan	15,996,500	15,996,500	-	22,229,167	22,229,167	-	-	-	-	821,467,898	3,983,269,222
28	Kecamatan Bayang	13,496,500	13,496,500	-	629,167	629,167	-	-	-	-	940,680,046	5,600,631,596
29	Kecamatan Bayang Utara	22,254,500	22,254,500	-	3,629,167	2,129,167	1,500,000	-	-	-	1,180,298,229	4,073,858,879
30	Kecamatan IV Jural	13,000,000	13,000,000	-	629,167	629,167	-	-	-	-	919,581,040	4,561,408,190
31	Kecamatan Batang Kapas	25,088,400	25,088,400	-	-	-	-	-	-	-	935,189,570	4,711,476,572
32	Kecamatan Sutea	13,396,500	13,396,500	-	5,604,167	5,604,167	-	-	-	-	866,937,089	3,648,437,913
33	Kecamatan Lengayang	13,199,302	13,199,302	-	629,167	629,167	-	-	-	-	1,012,829,667	5,973,722,279
34	Kecamatan Ranah Peisir	161,600,000	161,600,000	-	629,167	629,167	-	-	-	-	919,431,146	3,578,856,000
35	Kecamatan Linggo Sari Baganti	13,000,000	13,000,000	-	629,167	629,167	-	-	-	-	945,664,031	2,398,829,511
36	Kecamatan Pancung Soal	17,496,500	17,496,500	-	629,167	629,167	-	-	-	-	879,204,569	4,892,240,237
37	Kecamatan Air Pura	32,064,397	32,064,397	-	337,083	337,083	-	-	-	-	844,610,349	3,455,495,641
38	Kecamatan Basa IV Balai Tapan	21,893,500	21,893,500	-	629,167	629,167	-	-	-	-	802,129,159	2,325,091,147
39	Kecamatan Ranah Ampek Hulu Tapan	167,288,700	167,288,700	-	337,083	337,083	-	-	-	-	1,024,898,463	6,483,325,729
40	Kecamatan Lunang	13,000,000	13,000,000	-	629,167	629,167	-	-	-	-	986,957,118	3,723,153,806
41	Kecamatan Silaut	12,900,000	12,900,000	-	337,083	337,083	-	-	-	-	900,498,277	4,941,142,591
42	Pengelola Barang Milik Daerah	2,482,327,380	2,482,327,380	-	63,521,823	63,521,823	-	-	-	-	4,087,570,464	11,823,554,008
Total		2,449,241,401,381.00	2,449,241,401,381.00	-	117,670,887,153.00	119,854,176,515.00	2,183,289,362.00	101,097,077,446.00	101,097,077,446.00	-	2,087,188,010,434	7,206,855,968,500

REKAPITULASI MUTASI SALDO AWAL ASET TETAP TA 2024 DARI KIB B DAN KIB E AKIBAT MAPPING
PER 31 DESEMBER 2024

		Peralatan & Mesin			Aset Tetap Lainnya		
		2023	APLIKASI	SELISIH	2023	APLIKASI	SELISIH
1	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	158,100,075,419	154,433,517,299	- 3,666,558,120	114,937,973,750	117,073,563,304	2,135,589,554
2	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan	3,490,767,266	3,489,117,266	- 1,650,000	968,683,204	970,333,204	1,650,000
3	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan	3,542,150,572	3,539,603,348	- 2,547,224	93,251,400	95,798,624	2,547,224
4	Sekretariat Daerah	24,050,645,055	24,005,642,471	- 45,002,584	106,599,250	151,601,834	45,002,584
5	Kecamatan Bayang Utara	693,105,138	694,605,138	1,500,000	3,629,167	2,129,167	- 1,500,000
	Total	189,876,743,450	186,162,485,522	- 3,714,257,928	116,110,136,771	118,293,426,133	2,183,289,362

KABUPATEN PESIRIS SELATAN
REKAPITULASI ASET TETAP PER SKPD
PER 31 DESEMBER 2024

No	SKPD	SALDO PER 31 DESEMBER 2023							
		Tanah	Peralatan & Mesin	Gedung & Bangunan	Jalan, Irigasi, dan Jaringan	Aset Tetap Lainnya	Konstruksi dalam Pengerjaan	Akumulasi Penyusutan	JUMLAH
1	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	17,824,518,384.99	162,548,524,207.00	520,115,531,517.89	524,682,624.00	126,289,574,404.85	137,566,809.29	284,585,083.585	1,112,025,481,532.82
2	Dinas Kesehatan	6,753,933,029.18	235,688,523,511.04	195,918,380,790.33	33,248,110,914.00	48,154,368.85	5,132,498,259.72	247,706,394,395	724,495,995,267.72
3	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	130,364,349,159.00	16,277,370,481.00	79,193,075,592.13	2,241,285,188,688.07	141,196,490.22	91,171,233,837.61	1,375,509,872,945	3,933,942,287,192.66
4	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman, Pertanahan dan Lingkungan Hidup	10,960,781,211.95	23,017,958,352.00	65,651,402,994.97	53,783,560,859.00	579,679,852.12	349,999,864.74	44,999,050,626	199,342,433,760.51
5	Dinas Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran	210,034,180.00	9,603,379,262.00	3,206,547,964.00	60,850,000.00	-	-	10,317,443,659	23,398,255,064.60
6	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	961,296,327.00	2,001,516,880.00	1,261,591,682.98	77,944,915.10	-	-	2,012,265,672	6,314,615,477.39
7	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	1,121,699,770.38	6,047,845,877.00	8,998,799,984.81	45,838,731,742.48	4,790,500.00	-	40,801,798,211	102,813,666,085.47
8	Dinas Koperasi, UMKM, dan Tenaga Kerja	559,542,842.00	10,023,486,667.00	8,416,232,028.00	585,715,973.72	1,889,999.00	-	7,856,095,157	27,442,962,666.79
9	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	-	5,756,982,750.00	47,223,400.00	70,048,500.00	-	-	5,623,245,224	11,497,499,873.80
10	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	82,500,000.00	9,793,320,085.00	3,353,257,909.34	42,897,000.00	215,246,400.00	-	10,469,090,464	23,956,311,858.12
11	Dinas Perhubungan	497,467,844.00	10,521,750,749.00	3,210,438,996.00	24,747,163,814.90	-	-	16,790,197,159	55,767,018,562.82
12	Dinas Komunikasi dan Informatika	128,456,000.00	6,703,967,508.00	1,393,942,383.00	1,982,803,288.00	21,522,500.00	-	6,990,008,107	17,220,699,785.85
13	Dinas Perdagangan dan Transmigrasi	12,459,602,147.00	26,462,959,508.00	143,765,051,269.94	52,117,931,669.55	8,750,000.00	4,558,957,675.17	65,263,870,010	304,637,122,279.73
14	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu	291,730,000.00	1,684,092,404.00	12,535,679,034.00	94,422,389.40	3,000,000.00	-	3,381,556,178	17,990,480,005.50
15	Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga	11,479,120,104.00	4,417,410,660.00	59,303,467,010.00	9,584,351,697.58	7,773,000.00	602,023,701.00	17,316,983,451	102,711,129,623.90
16	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan	295,562,536.00	3,136,218,986.00	10,839,291,340.00	97,752,026.92	970,333,204.00	-	3,901,187,797	19,240,345,889.52
17	Dinas Perikanan dan Pangan	1,083,541,555.00	9,243,660,862.00	12,714,440,178.87	3,995,653,887.05	17,533,500.00	-	13,425,512,259	40,480,342,242.13
18	Dinas Pertanian	2,313,000,790.00	15,645,432,543.00	31,430,316,136.64	8,380,625,806.48	59,084,000.00	296,630,000.00	23,448,606,041	81,573,695,317.51
19	Inspektorat Daerah	302,800,000.00	2,532,898,605.00	2,062,427,852.00	12,980,000.00	56,997,500.00	-	3,252,318,496	8,220,422,453.28
20	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan	546,031,812.00	3,598,820,128.00	5,776,436,511.01	516,549,937.23	95,798,624.00	-	5,173,632,549	15,707,269,561.13
21	Badan Pengelola Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah	-	7,337,822,590.00	34,744,717,236.66	258,375,881.00	-	-	11,847,778,472	54,188,694,179.97
22	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	-	2,265,440,747.00	1,363,715,924.00	76,952,650.00	49,725,248.02	-	2,573,251,764	6,329,086,333.36
23	Sekretariat Daerah	16,572,365,685.00	23,230,348,279.00	29,498,679,450.16	186,668,590.00	151,601,834.00	-	32,071,978,515	101,711,642,353.55
24	Sekretariat DPRD	546,020,882.00	7,740,410,907.00	17,222,537,384.54	57,895,104.02	59,853,228.82	-	11,088,450,755	36,715,168,261.69
25	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	96,000,000.00	1,204,605,912.00	786,102,682.00	35,996,500.00	-	-	1,139,367,965	3,262,073,059.20
26	Kecamatan Koto IX Tarusan	739,865,088.67	530,918,024.00	1,284,274,142.77	15,996,500.00	22,229,166.67	-	881,428,134	3,474,711,056.42
27	Kecamatan Bayang	270,912,748.00	720,778,583.00	2,282,011,223.00	13,496,500.00	629,166.67	-	1,017,201,978	4,305,030,198.32
28	Kecamatan Bayang Utara	265,000,000.00	600,269,058.28	1,962,202,293.00	22,254,500.00	2,129,166.67	-	1,091,557,106	3,943,412,123.66
29	Kecamatan IV Jurai	83,000,000.00	563,252,757.00	2,524,655,181.00	13,000,000.00	629,166.67	-	974,811,227	4,159,348,331.32
30	Kecamatan Batang Kapas	220,000,000.00	665,627,246.00	1,935,417,425.00	25,088,400.00	-	-	977,909,085	3,824,042,155.70
31	Kecamatan Sutera	180,000,000.00	639,051,809.00	1,472,285,025.00	13,396,500.00	5,604,166.67	-	906,112,401	3,216,449,901.71
32	Kecamatan Lengayang	302,076,157.00	565,030,134.00	2,612,341,215.00	13,199,301.59	629,166.67	-	1,061,005,470	4,554,281,444.28
33	Kecamatan Ranah Pesisir	211,039,850.00	675,353,302.00	1,275,202,979.57	161,600,000.00	629,166.67	-	987,602,744	3,311,428,042.14
34	Kecamatan Linggo Sari Baganti	304,333,168.00	696,705,086.00	696,700,000.00	13,000,000.00	629,167.00	-	972,810,474	2,677,777,894.69
35	Kecamatan Pancung Soal	161,570,882.00	668,961,672.00	2,071,761,706.00	17,496,500.00	629,166.63	-	941,045,603	3,861,465,529.58
36	Kecamatan Air Pura	48,520,000.00	608,378,505.00	1,492,303,010.00	32,064,397.00	337,083.00	-	871,898,041	3,053,501,035.70
37	Kecamatan Basa IV Balai Tapan	250,000,000.00	630,937,749.00	712,399,737.00	21,893,500.00	629,166.67	-	825,147,937	2,441,008,089.47
38	Kecamatan Ranah Ampek Hulu Tapan	76,590,000.00	737,595,494.00	2,793,800,819.00	167,288,700.00	337,083.00	-	1,101,857,039	4,877,469,134.62
39	Kecamatan Lunang	87,664,416.00	576,482,552.25	1,921,108,804.00	13,000,000.00	629,166.67	-	1,031,601,511	3,630,486,450.12
40	Kecamatan Silaut	18,180,000.00	654,679,597.00	2,313,574,049.00	12,900,000.00	337,083.00	-	963,236,147	3,962,906,876.20
41	Pengelola Barang Milik Daerah	2,122,706,379.00	2,862,590,928.46	424,415,725.00	2,482,327,380.00	63,521,823.00	-	4,223,921,108	12,179,483,343.35
	Total	220,791,812,948.16	618,874,960,957.11	1,280,583,740,588.34	2,480,701,856,637.11	128,882,033,559.55	102,248,910,147.53	2,266,374,185,459.22	2,565,709,129,378.57

PEMERINTAH KABUPATEN PESISIR SELATAN
ASET TETAP - TANAH
PER 31 DESEMBER 2024

No	SKPD	Saldo Awala 2024	Saldo Mapping	selisih	Mutasi Tambah						Mutasi Kurang						Saldo per 31 Des 2024
					Belanja Modal	Pegawai/Barjas Dikapitalisir	Hibah	Mutasi Antar SKPD	Reklasifikasi	Lain-lain	Jumlah Mutasi Tambah	Hibah	Mutasi Antar SKPD	Reklasifikasi	Lain-lain	Jumlah Mutasi Kurang	
1	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	17,809,533,832.99	17,809,533,833.00	(0.01)					14,984,552	-	14,984,552.00	-	-		-	-	17,824,518,384.99
2	Dinas Kesehatan	6,370,259,748.72	6,370,259,749.18	(0.46)	366,264,920.00				17,408,360.00	-	383,673,280.00	-	-		-	-	6,753,933,029.18
3	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	130,008,600,159.11	130,008,600,159.00	0.11	355,749,000.00		-		-	-	355,749,000.00	-	-		-	-	130,364,349,159.00
4	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman, Pertanahan dan	10,252,781,211.95	10,252,781,213.00	(1.05)			708,000,000.00		-	-	708,000,000.00	-	-		-	-	10,960,781,211.95
5	Dinas Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran	210,034,180.00	210,034,180.00	-	-				-	-	-		-		-	-	210,034,180.00
6	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	961,296,327.00	961,296,327.00	-	-		-		-	-	-		-		-	-	961,296,327.00
7	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	1,121,699,770.50	1,121,699,770.38	0.12	-		-		-	-	-		-		-	-	1,121,699,770.38
8	Dinas Koperasi, UMKM, dan Tenaga Kerja	559,542,842.00	559,542,842.00	-	-						-		-			-	559,542,842.00
9	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	-	-	-	-		-		-	-	-		-		-	-	-
10	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	82,500,000.00	82,500,000.00	-	-		-		-	-	-		-		-	-	-
11	Dinas Perhubungan	497,467,844.00	497,467,844.00	-	-		-		-	-	-		-		-	-	82,500,000.00
12	Dinas Komunikasi dan Informatika	128,456,000.00	128,456,000.00	-	-		-		-	-	-		-		-	-	497,467,844.00
13	Dinas Perdagangan dan Transmigrasi	11,959,122,147.38	11,959,122,147.00	0.38	-		500,480,000.00			-	500,480,000.00	-	-		-	-	12,459,602,147.00
14	Dinas Penanaman Modal	291,730,000.00	291,730,000.00	-	-		-		-	-	-		-		-	-	291,730,000.00
15	Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga	11,668,107,260.19	11,668,107,260.00	0.19	-		-		-	-	-		-	188,987,156	-	188,987,156.00	11,479,120,104.00
16	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan	295,562,536.00	295,562,536.00	-	-		-		-	-	-		-		-	-	295,562,536.00
17	Dinas Perikanan dan Pangan	1,084,196,500.00	1,084,196,500.00	-	-		-		-	-	-	654,945.00	-		-	654,945.00	1,083,541,555.00
18	Dinas Pertanian	2,312,961,482.00	2,312,961,482.00	-	-		-		39,308.00	-	39,308.00	-			-	-	2,313,000,790.00
19	Inspektorat Daerah	302,800,000.00	302,800,000.00	-	-		-		-	-	-		-		-	-	302,800,000.00
20	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan	546,031,812.00	546,031,812.00	-	-		-		-	-	-		-		-	-	546,031,812.00
21	Badan Pengelola Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah	-	-	-	-		-		-	-	-		-		-	-	-
22	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	-	-	-	-		-		-	-	-		-		-	-	-
23	Sekretariat Daerah	16,620,423,184.66	16,620,423,185.00	(0.34)			-		-	-	-		-	32,432,220	15,625,280.00	48,057,500.00	16,572,365,685.00
24	Sekretariat DPRD	546,020,882.00	546,020,882.00	-	-		-		-	-	-		-		-	-	546,020,882.00
25	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	96,000,000.00	96,000,000.00	-	-		-		-	-	-		-		-	-	96,000,000.00
26	Kecamatan Koto IX Tarusan	739,865,088.67	739,865,088.67	-	-		-		-	-	-		-		-	-	739,865,088.67
27	Kecamatan Bayang	270,912,748.49	270,912,748.00	0.49	-		-		-	-	-		-		-	-	270,912,748.00
28	Kecamatan Bayang Utara	265,000,000.00	265,000,000.00	-	-		-		-	-	-		-		-	-	265,000,000.00
29	Kecamatan IV Jurai	83,000,000.00	83,000,000.00	-	-		-		-	-	-		-		-	-	83,000,000.00
30	Kecamatan Batang Kapas	220,000,000.00	220,000,000.00	-	-		-		-	-	-		-		-	-	220,000,000.00
31	Kecamatan Sutera	180,000,000.00	180,000,000.00	-	-		-		-	-	-		-		-	-	180,000,000.00
32	Kecamatan Lengayang	302,076,157.00	302,076,157.00	-	-		-		-	-	-		-		-	-	302,076,157.00
33	Kecamatan Ranah Pesisir	211,039,850.00	211,039,850.00	-	-		-		-	-	-		-		-	-	211,039,850.00
34	Kecamatan Linggo Sari Baganti	304,333,168.00	304,333,168.00	-	-		-		-	-	-		-		-	-	304,333,168.00
35	Kecamatan Pancung Soal	161,570,882.00	161,570,882.00	-	-		-		-	-	-		-		-	-	161,570,882.00
36	Kecamatan Air Pura	48,520,000.00	48,520,000.00	-	-		-		-	-	-		-		-	-	48,520,000.00
37	Kecamatan Basa IV Balai Tapan	250,000,000.00	250,000,000.00	-	-		-		-	-	-		-		-	-	250,000,000.00
38	Kecamatan Ranah Ampek Hulu Tapan	76,590,000.00	76,590,000.00	-	-		-		-	-	-		-		-	-	76,590,000.00
39	Kecamatan Lunang	87,664,416.00	87,664,416.00	-	-		-		-	-	-		-		-	-	87,664,416.00
40	Kecamatan Silaut	18,180,000.00	18,180,000.00	-	-		-		-	-	-		-		-	-	18,180,000.00
41	Pengelola Barang Midik Daerah	2,122,706,379.00	2,122,706,379.00	-	-		-		-	-	-		-		-	-	2,122,706,379.00
Total		219,066,586,409.65	219,066,586,409.65	- 0.58	722,013,920.00	-	1,208,480,000.00	-	32,432,220.00	-	1,962,926,140.00	654,945.00	-	221,419,376	15,625,280.00	237,699,601.00	220,791,812,948.16

PEMERINTAH KABUPATEN PESIRIS SELATAN
ASSET TETAP - PERALATAN MESIN
PER 31 DESEMBER 2024

Lampiran : 9.2

No	SKPD	Saldo Aw ala 2024	Saldo Mapping	Selisih	Mutasi Tambah							Mutasi Kurang						
					Belanja Modal	Belanja Pegawai al/Berjas Dikapitalisir	Hibah/Bantuan Diterima	Mutasi Antar SKPD	Reklasifikasi	Lain-lain	Jumlah Mutasi Tambah	Hibah/ Bantuan Diberikan	Mutasi Antar SKPD	Reklasifikasi	Penghapusan	Ekstracom	Lain-lain	Jumlah Mutasi Kurang
1	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	158.100.075,419.03	154.433.517.299.00	3.666.558.120.02	-	10.621.682.298	-	60.506.071	-	9.715.000.00	-	10.691.903.279.00	-	4.249.015.516.02	387.955.825	720.268.150.00	886.215.000.00	6.243.454.491.02
2	Dinas Kesehatan	230.320.427.724.04	230.320.427.724.04	0.00	-	13.425.768.969.00	5.156.500	2.904.171.985	-	367.138.189.00	-	16.702.235.643.00	-	1.229.522.397	-	-	104.617.459.00	1.334.139.856.00
3	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	16,374,800,216,83	16,586,161,467.00	(211,361,250.17)	-	273,934,920.00	-	-	-	211,361,250.17	-	485,295,750.17	53,320,000.00	-	529,405,486.00	-	-	582,725,486.00
4	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman, Pertanahan dan Lingkungan Hidup	21.101.595.562.00	21.101.595.562.00	-	-	1.952.088.890.00	-	-	-	1.273.718.140.00	-	3.225.807.030.00	-	1.273.718.140.00	-	35.726.100.00	1.309.444.240.00	-
5	Dinas Sektoral Puli Pemang Puja dan Pemadam Kebakaran	9.603.379.262.00	9.603.379.262.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	1,628,327,480.00	1,628,327,480.00	-	-	380,029,400.00	-	-	-	-	-	380,029,400.00	-	-	-	6,840,000.00	6,840,000.00	-
7	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	5,586,895,877.00	5,586,895,877.00	-	-	-	460,950,000.00	-	-	-	-	460,950,000.00	-	-	-	-	-	-
8	Dinas Koperasi, UKM, dan Tenaga Kerja	3,016,498,876.00	3,016,498,876.00	-	-	123,645,000.00	-	6,914,469,031.00	-	7,038,114,031.00	-	-	9,133,300.00	-	21,992,940.00	-	31,126,240.00	-
9	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	5,689,890,750.00	5,689,890,750.00	-	-	67,082,000.00	-	-	-	-	-	67,082,000.00	-	-	-	-	-	-
10	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	9,709,100,085.00	9,709,100,085.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11	Dinas Perhubungan	10,463,350,749.00	10,463,350,749.00	-	-	256,924,000.00	-	-	-	-	-	256,924,000.00	171,524,000.00	-	-	27,000,000,000.00	198,524,000.00	-
12	Dinas Komunikasi dan Informatika	6,612,427,698.00	6,612,427,698.00	-	-	84,070.000	-	7,469,810.00	-	-	-	91,539,810.00	-	-	-	-	-	-
13	Dinas Perdagangan dan Transmigrasi	21,373,186,121.00	21,373,186,121.00	-	-	5,117,591,000.00	5,340,000.00	-	-	-	5,122,931,000.00	-	-	-	-	33,157,613.00	33,157,613.00	-
14	Dinas Perencanaan Modal	1,651,576,054.00	1,651,576,054.00	-	-	32,516,300.00	-	-	-	-	-	32,516,300.00	-	-	-	-	-	-
15	Dinas Pemuda, Pemuda dan Olahraga	4,141,452,918.00	4,141,452,918.00	-	-	30,360,000.00	-	-	-	245,992,742.00	-	275,957,742.00	-	-	-	-	-	-
16	Dinas Keagamaan dan Perpustakaan	3,490,767,266.00	3,489,117,266.00	1,600.000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	1,600,000.00	352,898,280	-	-	354,548,280.00	-
17	Dinas Perlindungan dan Pangan	9,740,034,224.00	9,740,034,224.00	-	-	22,800,000.00	-	-	-	-	-	22,800,000.00	-	-	519,173,360.00	-	519,173,360.00	-
18	Dinas Pertanian	15,718,092,680.00	15,718,092,680.00	-	-	120,140,000.00	-	-	-	-	-	120,140,000.00	-	-	192,800,137.00	-	192,800,137.00	-
19	Inspektoral Daerah	2,514,693,415.00	2,514,693,415.00	-	-	15,860,000.00	-	9,875,000	-	-	-	25,675,000.00	7,469,810	-	-	-	7,469,810.00	-
20	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan	3,542,150,572.09	3,539,603,348.09	2,547,224.00	-	99,216,780.00	-	-	-	-	-	99,216,780.00	-	2,547,224.00	-	-	2,547,224.00	-
21	Badan Pengelola Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah	6,718,762,687.00	6,718,762,687.00	-	-	225,425,000.00	-	393,634,903.00	-	-	-	619,059,903.00	-	-	-	-	-	-
22	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	2,264,362,747.00	2,264,362,747.00	-	-	10,953,000.00	-	-	-	-	-	10,953,000.00	9,875,000.00	-	-	-	9,875,000.00	-
23	Sekretariat Daerah	24,050,645,054.78	24,005,642,471.00	45,002,983.78	-	100,906,602.00	40,199,000.00	1,110,849,963.00	-	-	-	1,251,955,565.00	393,634,903.00	1,621,132,952.00	45,002,983.78	12,481,952.00	2,072,252,340.78	-
24	Sekretariat DPRD	9,156,470,995.00	9,156,470,995.00	-	-	257,487,487.00	-	-	-	-	-	257,487,487.00	1,110,849,963	-	636,717,600.00	25,979,712.38	1,673,547,975.00	-
25	Badan Kestaraan Bangsa dan Politik	1,062,951,321.00	1,062,951,321.00	-	-	130,529,391.00	-	-	11,125,000.00	-	-	141,654,391.00	-	-	-	-	-	-
26	Kecamatan Kota IX Tarusan	489,890,524.00	489,890,524.00	-	-	41,027,300.00	-	-	-	-	-	41,027,300.00	-	-	-	-	-	-
27	Kecamatan Bayung	703,606,183.00	703,606,183.00	-	-	17,172,400.00	-	-	-	-	-	17,172,400.00	-	-	-	-	-	-
28	Kecamatan Bayung Utena	690,105,138.28	694,005,138.28	(1,300,000.00)	-	9,460,000.00	52,270,000.00	-	3,000,000.00	-	-	64,730,000.00	-	137,566,080	-	-	157,566,080.00	-
29	Kecamatan IV Juni	514,380,109.00	514,380,109.00	-	-	30,382,648.00	18,490,000.00	-	-	-	-	48,872,648.00	-	-	-	-	-	-
30	Kecamatan Baling Kapan	642,827,246.00	642,827,246.00	-	-	22,800,000.00	-	-	-	-	-	22,800,000.00	-	-	-	-	-	-
31	Kecamatan Sutura	586,401,809.00	586,401,809.00	-	-	63,650,000.00	8,250,000.00	-	-	-	-	71,900,000.00	-	-	-	19,250,000.00	19,250,000.00	-
32	Kecamatan Lengayang	565,030,134.00	565,030,134.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
33	Kecamatan Ranah Penjar	600,671,276.00	600,671,276.00	-	-	54,222,538.00	20,459,188.00	-	-	-	-	74,681,726.00	-	-	-	-	-	-
34	Kecamatan Lengg Sari Baganti	657,584,436.00	657,584,436.00	-	-	7,360,000.00	25,360,650.00	-	-	-	-	32,720,650.00	-	-	-	-	-	-
35	Kecamatan Puncung Sud	634,264,148.00	634,264,148.00	-	-	21,958,109.00	12,739,415.00	-	-	-	-	34,697,524.00	-	-	-	-	-	-
36	Kecamatan Air Pura	576,828,905.00	576,828,905.00	-	-	31,550,000.00	-	-	-	-	-	31,550,000.00	-	-	-	-	-	-
37	Kecamatan Bana IV Balai Tapan	596,187,749.00	596,187,749.00	-	-	18,800,000.00	15,950,000.00	-	-	-	-	34,750,000.00	-	-	-	-	-	-
38	Kecamatan Ranah Ampek Hulu Tapan	716,095,494.00	716,095,494.00	-	-	34,790,000.00	-	-	-	-	-	34,790,000.00	-	-	13,290,000.00	-	13,290,000.00	-
39	Kecamatan Lumbang	527,968,552.25	527,968,552.25	-	-	40,300,000.00	8,214,000.00	-	-	-	-	48,514,000.00	-	-	-	-	-	-
40	Kecamatan Silaut	575,829,302.00	575,829,302.00	-	-	64,420,295.00	14,430,000.00	-	-	-	-	78,850,295.00	-	-	-	-	-	-
41	Pengelola Barang Milik Daerah	2,862,590,928.46	2,862,590,928.46	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Total	585,575,177,589.82	582,072,280,910.11	3,502,896,677.64	33,851,679,267.00	226,858,753.00	11,613,815,227.00	1,521,829,676.00	847,932,181.17	-	48,061,515,104.17	53,320,000.00	1,821,829,676.00	6,937,110,579.00	4,297,649,972.00	800,583,673.74	1,151,267,836.00	14,761,731,734.81

PEMERINTAH KABUPATEN PESISIR SELATAN
ASET TETAP - GEDUNG BANGUNAN
PER 31 DESEMBER 2024

No	SKPD	Saldo Aw al 2024	Saldo Aw al Mapping	selisih	Mutasi Tambah						Mutasi Kurang						Saldo per 31 Des 2024		
					Belanja Modal	Pegaw ai/Berupa Dikapitalisir	Hibah Diterima	Mutasi Antar SKPD	Reklasifikasi	Lain-lain	Jumlah Mutasi Tambah	Mutasi Antar SKPD	Hibah di berikan	Reklasifikasi	Ekstrakr mabel	Penghapusan		Lain-lain	Jumlah Mutasi Kurang
1	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	494,795,117,211.89	494,795,117,212.00	(0.11)	14,876,175,110.00	7,534,270,688.00	3,115,710,023.00	-	-	16,287,000.00	25,532,442,821.00	-	-	-	-	-	212,038,515.00	212,038,515.00	520,115,531,517.89
2	Dinas Kesehatan	175,268,688,064.33	175,268,688,064.00	0.33	22,818,989,401.00	1,576,735,339.00	2,391,681,328.00	-	-	-	26,987,406,068.00	-	6,337,713,342.00	-	-	-	-	6,337,713,342.00	195,918,380,790.33
3	Dinas Pekerjaan Umum dan Berasana Ruas	79,502,140,741.13	79,502,140,741.13	-	1,731,644,100.00	170,142,800.00	-	-	-	1,901,790,100.00	1,011,994,863.00	600,725,536.00	587,212,250.00	-	-	922,600.00	2,210,855,249.00	79,193,075,592.13	
4	Dinas Perumahan, Kesenian Perumukiman, Pertanahan dan Urdukunan, Bidang	70,366,148,874.97	70,366,148,875.00	(0.03)	-	31,083,750.00	20,829,996,805.00	-	-	-	20,861,080,555.00	-	25,575,826,435.00	-	-	-	25,575,826,435.00	65,651,402,994.97	
5	Dinas Satuan Polisi Pemang Bais dan Pemadam	3,206,547,964.00	3,206,547,964.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3,206,547,964.00
6	Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat dan	1,261,591,682.98	1,261,591,683.00	(0.02)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,261,591,682.98
7	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	8,998,799,984.81	8,998,799,985.00	(0.19)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8,998,799,984.81
8	Dinas Koperasi, UMKM, dan Transan Kecil	8,416,232,028.00	8,416,232,028.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8,416,232,028.00
9	Dinas Kependidikan dan Bawabatan Sili	47,223,400.00	47,223,400.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	47,223,400.00
10	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Bawabatan Pendidikan dan	3,353,257,909.34	3,353,257,909.14	0.20	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3,353,257,909.34
11	Dinas Perhubungan	3,239,163,996.00	3,239,163,996.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3,239,163,996.00
12	Dinas Komunikasi dan Informatika	1,335,415,833.00	1,335,415,833.00	-	-	58,526,550.00	-	-	-	58,526,550.00	-	-	-	-	28,725,000.00	-	28,725,000.00	3,210,438,996.00	
13	Dinas Perdagangan dan Transmigrasi	137,441,754,147.59	137,441,754,147.00	0.09	4,395,119,350.47	4,560,000.00	2,779,345,000.00	-	-	7,179,024,350.47	-	-	842,066,977.62	-	13,660,250.00	855,727,227.62	143,765,051,269.94	143,765,051,269.94	
14	Dinas Penanaman Modal	12,535,679,034.00	12,535,679,034.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	12,535,679,034.00
15	Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga	54,085,266,400	54,085,266,400	-	3,801,325,721.00	118,760,000.00	-	-	3,127,636,235.00	7,047,721,996.00	-	1,628,809,046.00	-	-	2,812,300.00	1,829,621,346.00	59,303,467,010.00	59,303,467,010.00	
16	Dinas Kearsifan dan Bawabatan	10,839,291,340.00	10,839,291,340.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	10,839,291,340.00
17	Dinas Perikanan dan Pangen	12,714,440,178.87	12,714,440,178.00	0.87	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	12,714,440,178.87
18	Dinas Pertanian	31,007,419,136.64	31,007,419,137.00	(0.36)	412,847,000.00	2,550,000.00	-	-	7,500,000.00	-	422,897,000.00	-	-	-	-	-	-	-	31,430,316,136.64
19	Inspektorat Daerah	2,062,427,852.00	2,062,427,852.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,062,427,852.00
20	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	5,776,436,511.01	5,776,436,511.01	0.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5,776,436,511.01
21	Badan Pengkisa Kearsifan, Bawabatan dan Asa Daerah	9,104,303,533.66	9,104,303,534.00	(0.34)	-	-	-	25,640,323,703.00	-	-	25,640,323,703.00	-	-	-	-	-	-	-	34,744,717,236.66
22	Badan Kearsifan dan Bawabatan Dunder	1,350,115,924.00	1,350,115,924.00	-	-	13,600,000.00	-	-	-	-	13,600,000.00	-	-	-	-	-	-	-	1,363,715,924.00
23	Sekretariat Daerah	55,036,606,153.16	55,036,606,153.00	0.16	-	-	-	102,397,000.00	-	-	102,397,000.00	25,640,323,703.00	-	-	-	-	-	25,640,323,703.00	29,498,679,450.16
24	Sekretariat DPRD	17,222,537,384.54	17,222,537,385.00	(0.46)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	17,222,537,384.54
25	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	786,102,682.00	786,102,682.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	786,102,682.00
26	Recomatan Kota IX Tarusan	1,134,387,279.77	1,134,387,279.77	-	-	149,886,863.00	-	-	-	149,886,863.00	-	-	-	-	-	-	-	-	1,284,274,142.77
27	Recomatan Bayang	2,282,011,223.00	2,282,011,223.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,282,011,223.00
28	Recomatan Bayang Utara	1,643,089,749.00	1,643,089,749.00	-	-	-	-	319,112,544.00	-	-	319,112,544.00	-	-	-	-	-	-	-	1,962,202,293.00
29	Recomatan IV Jura	2,129,485,339.00	2,129,485,339.00	-	-	-	-	-	-	395,169,842.00	-	-	-	-	-	-	-	-	2,524,655,181.00
30	Recomatan Batang Rupas	1,935,417,425.00	1,935,417,425.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,935,417,425.00
31	Recomatan Suters	1,472,285,025.00	1,472,285,025.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,472,285,025.00
32	Recomatan Lengayang	2,612,341,215.00	2,612,341,215.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,612,341,215.00
33	Recomatan Ranah Pesir	1,275,202,979.57	1,275,202,979.57	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,275,202,979.57
34	Recomatan Linggo Sari Bagami	696,700,000.00	696,700,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	696,700,000.00
35	Recomatan Pancung Soal	2,071,761,706.00	2,071,761,706.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,071,761,706.00
36	Recomatan Air Pura	1,492,303,010.00	1,492,303,010.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,492,303,010.00
37	Recomatan Bsa IV Balai Pasa	694,899,737.00	694,899,737.00	-	-	17,500,000.00	-	-	-	17,500,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	712,399,737.00
38	Recomatan Ranah Ampek Bala Tama	2,793,800,819.00	2,793,800,819.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,793,800,819.00
39	Recomatan Lunang	1,921,108,804.00	1,921,108,804.00	-	-	-	-	195,315,477.00	-	-	195,315,477.00	-	-	-	-	-	-	-	2,116,423,281.00
40	Recomatin Silaut	2,313,574,049.00	2,313,574,049.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,313,574,049.00
41	Pengkisa Harang Milk	424,415,725.00	424,415,725.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	424,415,725.00
Total		1,226,450,366,775.77	1,226,450,366,775.62	0.15	48,036,104,682.47	9,667,615,190.00	29,316,733,156.00	26,652,318,566.00	3,151,423,235.00	-	116,824,194,829.47	26,652,318,566.00	600,725,536.00	35,179,628,650.62	-	28,725,000.00	229,423,865.00	62,690,831,017.62	1,289,583,740,587.62

PEMERINTAH KABUPATEN PESISIR SELATAN
ASET TETAP - JALAN IRIGASI DAN JARINGAN
PER 31 DESEMBER 2024

No	SKPD	Saldo Awal 2024	Saldo Mapping	selisih	Mutasi Tambah						Mutasi Kurang						Saldo Per 31 Desember 2024
					Belanja Modal	Belanja Pegawai s/d/Barang Ekspenditair	Mutasi antar SKPD	Hibah/Bantuan Diterima	Reklasifikasi	Lain-Lain	Jumlah Mutasi Tambah	Mutasi antar SKPD	Reklasifikasi	Penghapusan	Lain - lain	Jumlah Mutasi Kurang	
1	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	524,682,624.00	524,682,624.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	524,682,624.00
2	Dinas Kesehatan	29,394,315,880.00	29,394,315,880.00	-	1,188,739,500.00	-	-	-	2,665,055,534	-	3,853,795,034.00	-	-	-	-	-	33,248,110,914.00
3	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	2,233,118,476,368.07	2,233,118,476,368.07	-	-	260,230,000.00	-	-	1,826,906,339.00	-	81,555,614,620.00	198,010,000.00	72,737,756,286.00	-	453,136,014.00	73,388,902,300.00	2,241,285,188,688.07
4	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman, Pertanahan dan Lingkungan Hidup	37,146,430,239.00	37,146,430,239.00	-	-	-	-	16,637,130,620.00	-	-	16,637,130,620.00	-	-	-	-	-	53,783,560,859.00
5	Dinas Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran	60,850,000.00	60,850,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	60,850,000.00
6	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	77,944,915.10	77,944,915.10	0.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	77,944,915.10
7	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	45,838,731,742.48	45,838,731,742.48	0.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	45,838,731,742.48
8	Dinas Koperasi, UKM, dan Tenaga Kerja	585,715,973.72	585,715,974.00	(0.28)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	585,715,973.72
9	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	70,048,500.00	70,048,500.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	70,048,500.00
10	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	42,897,000.00	42,897,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	42,897,000.00
11	Dinas Perhubungan	24,565,639,814.90	24,565,639,814.90	-	-	10,000,000.00	-	-	171,524,000.00	-	181,524,000.00	-	-	-	-	-	24,747,163,814.90
12	Dinas Komunikasi dan Informatika	1,982,803,288.00	1,982,803,288.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,982,803,288.00
13	Dinas Perdagangan dan Transmigrasi	51,275,864,691.80	51,275,864,692.00	(0.20)	-	-	-	-	842,066,977.75	-	842,066,977.75	-	-	-	-	-	52,117,931,669.55
14	Dinas Penanaman Modal	94,422,389.40	94,422,389.40	0.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	94,422,389.40
15	Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga	7,805,125,393.58	7,805,125,393.58	-	-	-	198,010,000.00	-	1,581,216,304.00	-	1,779,226,304.00	-	-	-	-	-	9,584,351,697.58
16	Dinas Kearsifan dan Perpustakaan	97,752,026.92	97,752,027.00	(0.08)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	97,752,026.92
17	Dinas Perikanan dan Pangan	3,995,653,887.05	3,995,653,887.05	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3,995,653,887.05
18	Dinas Pertanian	8,380,625,806.48	8,380,625,806.48	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8,380,625,806.48
19	Inspektorat Daerah	12,980,000.00	12,980,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	12,980,000.00
20	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan	516,549,937.23	516,549,937.23	0.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	516,549,937.23
21	Badan Pengelola Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah	258,375,881.00	258,375,881.00	0.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	258,375,881.00
22	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	76,952,650.00	76,952,650.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	76,952,650.00
23	Sekretariat Daerah	186,668,590.00	186,668,590.00	0.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	186,668,590.00
24	Sekretariat DPRD	57,895,104.02	57,895,104.00	0.02	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	57,895,104.02
25	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	35,996,500.00	35,996,500.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	35,996,500.00
26	Recamatan Koto IX Tarusan	15,996,500.00	15,996,500.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	15,996,500.00
27	Recamatan Bayang	13,496,500.00	13,496,500.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	13,496,500.00
28	Recamatan Bayang Utara	22,254,500.00	22,254,500.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	22,254,500.00
29	Recamatan IV Juru	13,000,000.00	13,000,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	13,000,000.00
30	Recamatan Batang Kapas	25,088,400.00	25,088,400.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	25,088,400.00
31	Recamatan Sitera	13,396,500.00	13,396,500.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	13,396,500.00
32	Recamatan Lengayang	13,199,301.59	13,199,301.59	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	13,199,301.59
33	Recamatan Ranah Pesisir	161,600,000.00	161,600,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	161,600,000.00
34	Recamatan Linggo Sari Baganti	13,000,000.00	13,000,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	13,000,000.00
35	Recamatan Pancung Soal	17,496,500.00	17,496,500.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	17,496,500.00
36	Recamatan Air Pua	32,064,397.00	32,064,397.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	32,064,397.00
37	Recamatan Bua IV Batu Tapan	21,893,500.00	21,893,500.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	21,893,500.00
38	Recamatan Ranah Ampek Hulu Tapan	167,288,700.00	167,288,700.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	167,288,700.00
39	Recamatan Lintang	13,000,000.00	13,000,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	13,000,000.00
40	Recamatan Silaut	12,900,000.00	12,900,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	12,900,000.00
41	Pengelola Barang Milik Daerah	2,482,327,380.00	2,482,327,380.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,482,327,380.00
Total		2,449,241,401,381.36	2,449,241,401,381.88	(0.52)	80,657,217,781.00	270,230,000.00	198,010,000.00	16,637,130,620.00	7,086,769,154.75	-	104,849,357,555.75	198,010,000.00	72,737,756,286.00	-	453,136,014.00	73,388,902,300.00	2,480,701,856,637.11

PEMERINTAH KABUPATEN PESISIR SELATAN
ASET TETAP - ASET TETAP LAINNYA
PER 31 DESEMBER 2024

Per 31 Desember 2024																					
No	SKPD	Saldo Awal 2024	Saldo Mapping	selisih	Mutasi Tambah							Mutasi Kurang							Saldo per 31 Desember 2024		
					Belanja Modal	Belanja Pegawai/ Raguas Dikapitalisir	Lain-lain	Mutasi Antar SKPD	Hibah/ Bantuan Diterima	Reklasifikasi	Jumlah Mutasi Tambah	Hibah/ Bantuan Diberikan	Mutasi Antar SKPD	Reklasifikasi	Penghapusan	Reklasifikasi	Penghapusan	Extracom		Lain-lain	Jumlah Mutasi Kurang
1	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	114,937,973,750.77	117,073,563,304.77	(2,135,589,554.00)	8,788,205,600.00	-	-	-	-	2,576,454,554.08	11,364,660,154.08	-	-	9,715,000.00	-	-	-	-	3,344,500.00	13,059,500.00	126,289,574,404.85
2	Dinas Kesehatan	48,154,368.85	48,154,368.85	-	12,800,000	-	-	-	-	-	12,800,000	-	-	-	-	-	-	-	12,800,000	-	48,154,368.85
3	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	291,390,542.22	291,390,542.22	0.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	150,194,052	-	-	-	141,196,490.22
4	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman, Pertanahan dan Tata Ruang	579,679,852.12	579,679,852.12	(0.00)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	579,679,852.12
5	Dinas Sistem Politik Pemangku Raja dan Domestik Kehakisan	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6	Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat dan Perhubungan Anak Daerah	4,790,500.00	4,790,500.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4,790,500.00
7	Dinas Koperasi, UKM, dan Koperasi Kecil	-	-	-	-	1,889,999	-	-	-	-	1,889,999	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,889,999.00
8	Dinas Kependudukan dan Kependudukan dan Kependudukan	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
9	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	215,246,400.00	215,246,400.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	215,246,400.00
10	Dinas Perhubungan	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11	Dinas Komunikasi dan Informatika	21,522,500.00	21,522,500.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	21,522,500.00
12	Dinas Perdagangan dan Koperasi	8,750,000.00	8,750,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8,750,000.00
13	Dinas Penanaman Modal	3,000,000.00	3,000,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3,000,000.00
14	Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga	369,197,000.00	369,197,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	361,424,000	-	-	-	-	-	-	361,424,000
15	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan	968,683,204.00	970,333,204.00	(1,650,000.00)	-	-	-	-	-	1,650,000	1,650,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	970,333,204.00
16	Dinas Perikanan dan Pangan	57,383,500.00	57,383,500.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	39,850,000	-	-	-	17,533,500.00
17	Dinas Pertanian	59,084,000.00	59,084,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	59,084,000.00
18	Inspektorat Daerah	56,997,500.00	56,997,500.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	56,997,500.00
19	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan dan Jasa Daerah	93,251,400	95,798,624.00	(2,547,224.00)	-	-	-	-	-	2,547,224	2,547,224	-	-	-	-	-	-	-	-	-	95,798,624.00
20	Badan Pengelola Keuangan, Pengelolaan dan Jasa Daerah	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
21	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya	49,725,248.02	49,725,247.77	0.25	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	49,725,248.02
22	Sekretariat Daerah	106,599,250	151,601,834	(45,002,584.00)	-	-	-	-	-	45,002,584.00	45,002,584	-	-	-	-	-	-	-	-	-	151,601,834.00
23	Sekretariat DPRD	59,853,228.82	59,853,228.82	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	59,853,228.82
24	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	-	-	-	11,125,000.00	-	-	-	-	-	11,125,000	-	-	11,125,000	-	-	-	-	-	-	11,125,000.00
25	Kecamatan Koto IX Tarusan	22,229,166.67	22,229,166.67	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	22,229,166.67
26	Kecamatan Bayang	629,166.67	629,166.67	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	629,166.67
27	Kecamatan Bayang Utara	3,629,167	5,129,166.67	(1,500,000.00)	-	-	-	-	-	1,500,000	1,500,000	-	-	3,000,000	-	-	-	-	-	-	2,129,166.67
28	Kecamatan IV Jurai	629,166.67	629,166.67	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	629,166.67
29	Kecamatan Batang Kapas	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
30	Kecamatan Sutura	5,604,166.67	5,604,166.67	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5,604,166.67
31	Kecamatan Lengayang	629,166.67	629,166.67	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	629,166.67
32	Kecamatan Rambah Pesar	629,166.67	629,166.67	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	629,166.67
33	Kecamatan Linggo Sari Baganti	629,167.00	629,167.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	629,167.00
34	Kecamatan Puncung Soal	629,166.63	629,166.63	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	629,166.63
35	Kecamatan Air Pura	337,083.00	337,083.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	337,083.00
36	Kecamatan Hias IV Balai Tapan	629,166.67	629,167.00	(0.33)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	629,166.67
37	Kecamatan Rambah Aspek Hulu Tapan	337,083.00	337,083.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	337,083.00
38	Kecamatan Lunsang	629,166.67	629,166.67	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	629,166.67
39	Kecamatan Silaut	337,083.00	337,083.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	337,083.00
40	Pengelola Barang Milik Daerah	63,521,823.00	63,521,823.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	63,521,823.00
41	Total	118,032,311,150.47	120,218,600,512.55	(2,186,289,362.08)	8,812,130,600.00	1,889,999.00	-	-	-	2,627,154,362.08	11,441,174,961.08	-	-	385,264,000.00	-	-	190,044,052.00	-	16,144,500.00	591,482,862.00	128,882,033,559.55

PEMERINTAH KABUPATEN PESISIR SELATAN
ASET TETAP - KDP
PER 31 DESEMBER 2024

No	SKPD	Saldo Awal 2024	Saldo per 31 Desember 2024	Mutasi		Saldo per 31 Desember 2024
				Tambah	Kurang	
1	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	137,566,809.29	137,566,809.30			137,566,809.29
2	Dinas Kesehatan	955,701,550.72	955,701,550.72	4,176,796,709.00	-	5,132,498,259.72
3	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	91,250,048,766.61	91,250,048,767.71	1,748,091,410.00	1,826,906,339.00	91,171,233,837.61
4	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman, Pertanahan dan Lingkungan Hidup	349,999,864.74	349,999,864.74	-		349,999,864.74
5	Dinas Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran	-	-	-	-	-
6	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	-	-	-	-	-
7	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	-	-	-		-
8	Dinas Koperasi, UMKM, dan Tenaga Kerja	-	-	-	-	-
9	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	-	-	-	-	-
10	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	-	-	-	-	-
11	Dinas Perhubungan	-	-	-	-	-
12	Dinas Komunikasi dan Informatika	-	-	-	-	-
13	Dinas Perdagangan dan Transmigrasi	4,558,957,675.17	4,558,957,675.17			4,558,957,675.17
14	Dinas Penanaman Modal	-	-	-	-	-
15	Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga	3,540,672,780.00	3,540,672,780.00		2,938,649,079.00	602,023,701.00
16	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan	-	-	-	-	-
17	Dinas Perikanan dan Pangan	-	-	-		-
18	Dinas Pertanian	304,130,000.00	304,130,000.00		7,500,000.00	296,630,000.00
19	Inspektorat Daerah	-	-	-	-	-
20	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan	-	-	-	-	-
21	Badan Pengelola Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah	-	-	-	-	-

22	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	-	-	-	-	-
23	Sekretariat Daerah	-	-	-	-	-
24	Sekretariat DPRD	-	-	-	-	-
25	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	-	-	-	-	-
26	Kecamatan Koto IX Tarusan	-	-	-	-	-
27	Kecamatan Bayang	-	-	-	-	-
28	Kecamatan Bayang Utara	-	-	-	-	-
29	Kecamatan IV Jurai	-	-	-	-	-
30	Kecamatan Batang Kapas	-	-	-	-	-
31	Kecamatan Sutera	-	-	-	-	-
32	Kecamatan Lengayang	-	-	-	-	-
33	Kecamatan Ranah Pesisir	-	-	-	-	-
34	Kecamatan Linggo Sari Baganti	-	-	-	-	-
35	Kecamatan Pancung Soal	-	-	-	-	-
36	Kecamatan Air Pura	-	-	-	-	-
37	Kecamatan Basa IV Balai Tapan	-	-	-	-	-
38	Kecamatan Ranah Ampek Hulu Tapan	-	-	-	-	-
39	Kecamatan Lunang	-	-	-	-	-
40	Kecamatan Silaut	-	-	-	-	-
41	Pengelola Barang Milik Daerah	-	-	-	-	-
	Total	101,097,077,446.53	101,097,077,447.64	5,924,888,119.00	4,773,055,418.00	102,248,910,147.53

**REKAPITULASI AKUMULASI PENYUSUTAN
BARANG MILIK DAERAH KABUPATEN PESISIR SELATAN
TAHUN ANGGARAN 2024**

NO	PERANGKAT DAERAH	JUMLAH AKUMULASI PENYUSUTAN				JUMLAH AKUMULASI PENYUSUTAN 2024
		AKUMULASI S.D 2023	BEBAN PENYUSUTAN 2024	KOREKSI AKUMULASI BERTAMBAH	KOREKSI AKUMULASI BERKURANG	
1	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	253,425,822,693.32	28,667,981,691.16	6,992,220,450.75	4,500,941,250.34	284,585,083,584.89
2	Dinas Kesehatan	101,919,948,862.99	14,897,268,244.27	1,121,255,353.34	(556,164,152.23)	118,494,636,612.83
3	Rumah Sakit Umum Daerah	120,250,788,156.06	9,719,646,733.08	13,011,600.00	771,688,707.31	129,211,757,781.83
4	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	1,279,806,408,790.24	100,167,398,652.31	-	4,463,934,497.93	1,375,509,872,944.63
5	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman, Pertanahan dan Lingkungan Hidup	34,608,154,217.83	6,002,575,289.46	5,950,133,148.84	1,561,812,030.39	44,999,050,625.74
6	Dinas Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran	10,231,814,057.10	126,082,443.55	-	40,452,841.97	10,317,443,658.68
7	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	1,861,515,359.32	157,221,195.03	-	6,470,882.17	2,012,265,672.18
8	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	39,515,366,223.73	1,305,917,312.92	65,850,000.00	85,335,325.64	40,801,798,211.02
9	Dinas Koperasi, UMKM, dan Tenaga Kerja	2,481,860,596.71	1,269,448,839.75	4,130,005,674.60	25,219,953.98	7,856,095,157.08
10	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	5,599,434,306.79	122,709,582.74	-	98,898,665.71	5,623,245,223.81
11	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	9,872,820,440.41	424,000,273.37	187,651,400.00	15,381,650.00	10,469,090,463.78
12	Dinas Perhubungan	26,132,022,787.99	923,105,099.91	25,694,800.00	10,290,625,528.98	16,790,197,158.93
13	Dinas Komunikasi dan Informatika	7,034,943,171.65	429,295,754.92	7,469,810.00	481,700,629.92	6,990,008,106.65
14	Dinas Perdagangan dan Transmigrasi	52,802,038,883.21	9,641,688,568.93	-	(2,820,142,557.91)	65,263,870,010.05
15	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu	3,080,367,627.77	345,300,941.50	-	44,112,391.17	3,381,556,178.10
16	Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga	14,982,234,444.75	2,004,598,899.29	-	(330,150,107.31)	17,316,983,451.34
17	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan	3,745,418,598.57	547,991,217.44	825,000.00	393,047,019.36	3,901,187,796.65
18	Dinas Perikanan dan Pangan	13,733,935,603.53	447,431,085.05	-	755,854,429.34	13,425,512,259.24
19	Dinas Pertanian	21,394,512,741.49	2,136,792,669.87	8,457,940.00	91,157,310.16	23,448,606,041.20
20	Inspektorat Daerah	3,193,283,527.40	69,172,249.23	9,875,000.00	20,012,280.35	3,252,318,496.28
21	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan	5,037,218,900.65	274,305,798.65	2,547,224.00	140,439,374.51	5,173,632,548.79
22	Badan Pengelola Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah	8,595,237,313.26	1,030,474,856.63	2,366,133,818.64	144,067,516.22	11,847,778,472.31
23	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	2,560,270,047.55	94,991,146.91	-	82,009,430.12	2,573,251,764.35
24	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	1,048,107,976.54	101,988,212.62	-	10,728,223.67	1,139,367,965.50
25	Sekretariat Daerah	34,340,244,538.89	1,250,055,816.49	1,010,609,695.14	4,528,931,535.54	32,071,978,514.98
26	Sekretariat DPRD	11,866,293,452.12	456,954,174.98	28,187,229.00	1,262,984,100.14	11,088,450,755.97
27	Kecamatan Koto IX Tarusan	821,467,898.30	41,052,786.07	21,600,000.00	2,692,550.00	881,428,134.37
28	Kecamatan Bayang	940,680,045.86	86,652,067.16	-	10,130,135.20	1,017,201,977.82
29	Kecamatan Bayang Utara	1,180,298,228.68	71,942,197.14	6,639,261.77	167,322,581.87	1,091,557,105.72
30	Kecamatan IV Jurai	919,581,039.68	60,078,719.28	5,284,052.90	10,132,585.20	974,811,226.66
31	Kecamatan Batang Kapas	935,189,570.12	58,539,270.12	-	15,819,755.47	977,909,084.78
32	Kecamatan Sutera	866,937,089.43	49,645,449.21	-	10,470,137.60	906,112,401.04
33	Kecamatan Lengayang	1,012,829,667.35	58,447,899.39	-	10,272,096.60	1,061,005,470.14
34	Kecamatan Ranah Pesisir	919,431,145.90	78,304,183.20	-	10,132,585.20	987,602,743.90
35	Kecamatan Linggo Sari Baganti	945,664,030.64	37,279,028.38	-	10,132,585.33	972,810,473.69
36	Kecamatan Pancung Soal	879,204,568.65	73,313,584.30	-	11,472,550.00	941,045,602.95
37	Kecamatan Air Pura	844,610,349.15	39,966,102.79	-	12,678,411.23	871,898,040.71
38	Kecamatan Basa IV Balai Tapan	802,129,158.59	42,894,629.55	-	19,875,851.33	825,147,936.81
39	Kecamatan Ranah Ampek Hulu Tapan	1,024,898,462.66	81,342,965.96	-	4,384,390.00	1,101,857,038.62
40	Kecamatan Lunang	986,957,117.78	53,587,649.37	1,906,574.43	10,849,830.27	1,031,601,511.30
41	Kecamatan Silaut	900,498,276.74	72,594,537.85	-	9,856,666.67	963,236,147.92
42	Pengelola Barang Milik Daerah	4,087,570,463.60	130,487,281.38	-	(5,863,362.90)	4,223,921,107.88
	JUMLAH	2,087,188,010,432.99	183,650,525,101.24	21,955,358,033.40	26,419,708,106.51	2,266,374,185,461.97

REKAPITULASI AKUMULASI PENYUSUTAN PERALATAN DAN MESIN
BARANG MILIK DAERAH KABUPATEN PESISIR SELATAN
TAHUN ANGGARAN 2024
80,207,282,820.35

NO	PERANGKAT DAERAH	PERALATAN DAN MESIN				
		AKUMULASI PENYUSUTAN s.d 2023	BEBAN PENYUSUTAN 2024	KOREKSI AKUMULASI PENYUSUTAN BERTAMBAH	KOREKSI AKUMULASI PENYUSUTAN BERKURANG	AKUMULASI PENYUSUTAN 2024
1	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	121,268,134,399.06	18,156,861,814.59		4,495,357,322.11	134,929,638,891.55
2	Dinas Kesehatan	70,634,972,932.56	10,330,449,758.93	816,153,797.39	1,574,293,668.53	80,207,282,820.35
3	Rumah Sakit Umum Daerah	110,469,069,976.62	8,739,689,918.87	13,011,600.00	1,944,654,191.35	117,277,117,304.15
4	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	13,827,962,148.35	961,188,104.26		816,467,213.49	13,972,683,039.13
5	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman, Pertanahan dan Lingkungan Hidup	15,902,299,398.42	1,488,060,519.13		267,691,573.75	17,122,668,343.81
6	Dinas Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran	9,501,181,274.57	60,583,798.21		31,352,841.97	9,530,412,230.82
7	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	1,461,627,789.37	129,838,572.02			1,591,466,361.40
8	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	5,203,174,175.94	190,972,935.83	65,850,000.00	76,237,775.64	5,383,759,336.14
9	Dinas Koperasi, UMKM, dan Tenaga Kerja	1,574,919,581.20	1,092,205,171.06	4,130,005,674.60	11,843,626.97	6,785,286,799.90
10	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	5,527,849,344.29	120,590,295.23		86,088,865.71	5,562,350,773.81
11	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	9,042,875,905.94	355,431,647.90		(14,410,000.00)	9,412,717,553.84
12	Dinas Perhubungan	8,927,766,146.37	171,860,610.56	25,694,800.00	(1,138,315,095.20)	10,263,636,652.14
13	Dinas Komunikasi dan Informatika	6,007,908,119.43	313,231,506.41	7,469,810.00	239,425,037.29	6,089,184,398.55
14	Dinas Perdagangan dan Transmigrasi	11,848,306,176.33	2,200,713,333.39		(1,706,857,921.06)	15,755,877,430.79
15	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu	1,465,684,805.27	94,361,530.12		13,888,142.67	1,546,158,192.73
16	Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga	3,098,396,280.50	340,066,377.14		(36,782,227.33)	3,475,244,884.98
17	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan	2,580,289,308.75	330,936,717.43		360,901,900.46	2,550,324,125.73
18	Dinas Perikanan dan Pangan	9,502,863,646.86	99,364,342.22		563,221,137.92	9,039,006,851.16
19	Dinas Pertanian	11,384,775,416.09	1,385,177,004.99		195,181,434.30	12,574,770,986.79
20	Inspektorat Daerah	2,435,400,280.00	27,227,859.66	9,875,000.00	10,396,976.67	2,462,106,163.00
21	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan	3,303,072,337.71	163,719,131.86		112,507,925.31	3,354,283,544.27
22	Badan Pengelola Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah	6,254,171,404.14	349,441,230.56	314,907,922.40	75,087,657.87	6,843,432,899.24
23	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	2,125,355,747.00	66,072,191.61		24,944,767.62	2,166,483,171.00
24	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	897,881,521.00	87,004,082.48		1,630,673.67	983,254,929.82
25	Sekretariat Daerah	22,781,200,466.49	695,024,309.79	952,157,111.14	2,358,881,882.40	22,069,500,005.02
26	Sekretariat DPRD	8,638,717,052.25	127,687,822.26		1,251,707,527.34	7,514,697,347.18
27	Kecamatan Koto IX Tarusan	470,623,006.00	15,870,224.00		(6,405,000.00)	492,898,230.00
28	Kecamatan Bayang	567,464,583.00	41,806,792.60		1,032,585.20	608,238,790.40
29	Kecamatan Bayang Utara	642,362,541.14	31,894,629.31	1,500,000.00	156,114,665.20	519,642,505.26
30	Kecamatan IV Jurai	511,980,109.00	13,434,954.60		1,032,585.20	524,382,478.40
31	Kecamatan Batang Kapas	608,045,085.20	22,678,290.20		562,500.00	630,160,875.40
32	Kecamatan Sutera	568,391,809.00	20,482,960.47		1,372,587.60	587,502,181.80
33	Kecamatan Lengayang	551,590,134.00	7,786,292.60		1,032,585.20	558,343,841.40
34	Kecamatan Ranah Pesisir	549,246,817.40	39,691,617.20		1,032,585.20	587,905,849.40
35	Kecamatan Linggo Sari Baganti	635,360,173.50	22,985,742.66		1,032,585.33	657,313,330.13
36	Kecamatan Pancung Soal	571,375,140.55	32,212,437.68		2,375,000.00	601,212,578.23
37	Kecamatan Air Pura	568,946,153.00	10,262,254.67		2,833,333.33	576,375,074.00
38	Kecamatan Basa IV Balai Tapan	557,552,749.00	29,044,792.60		2,452,585.20	584,144,956.40
39	Kecamatan Ranah Ampek Hulu Tapan	686,111,696.50	21,248,898.75			707,360,595.51
40	Kecamatan Lunang	519,676,552.00	16,840,208.40		1,749,830.27	534,766,930.13
41	Kecamatan Silaut	557,588,977.20	26,000,556.70		826,666.67	582,762,867.40
42	Pengelola Barang Milik Daerah	2,798,244,482.60	56,651,445.35		30,780,002.10	2,824,115,926.37
	JUMLAH	477,030,415,643.61	48,486,652,684.29	6,336,625,715.54	11,813,221,995.93	520,040,472,047.51

**REKAPITULASI AKUMULASI PENYUSUTAN GEDUNG DAN BANGUNAN
BARANG MILIK DAERAH KABUPATEN PESISIR SELATAN
TAHUN ANGGARAN 2024**

NO	PERANGKAT DAERAH	GEDUNG DAN BANGUNAN				
		AKUMULASI PENYUSUTAN s.d 2023	BEBAN PENYUSUTAN 2024	KOREKSI AKUMULASI PENYUSUTAN BERTAMBAH	KOREKSI AKUMULASI PENYUSUTAN BERKURANG	AKUMULASI PENYUSUTAN 2024
1	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	132,053,513,607.71	9,818,381,854.02			141,871,895,461.72
2	Dinas Kesehatan	27,640,690,995.50	3,076,429,455.89	305,101,555.95		31,022,222,007.34
3	Rumah Sakit Umum Daerah	8,245,036,200.53	659,935,804.86			8,904,972,005.39
4	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	14,895,208,318.60	1,463,577,872.62		39,377,908.91	16,319,408,282.31
5	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman, Pertanahan dan Lingkungan Hidup	10,782,117,453.01	1,295,502,716.53	958,993,962.84	2,004,684,288.30	11,031,929,844.08
6	Dinas Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran	707,295,282.53	63,977,395.34			771,272,677.86
7	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	373,176,327.65	25,634,000.13			398,810,327.78
8	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	2,293,488,755.64	173,358,346.67			2,466,847,102.31
9	Dinas Koperasi, UMKM, dan Tenaga Kerja	845,582,983.65	163,059,222.22			1,008,642,205.87
10	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	43,947,400.00	327,600.00			44,275,000.00
11	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	788,777,534.47	67,419,325.46			856,196,859.94
12	Dinas Perhubungan	917,242,242.24	65,398,844.27		9,192,000.00	973,449,086.51
13	Dinas Komunikasi dan Informatika	323,225,721.00	26,711,366.95			349,937,087.95
14	Dinas Perdagangan dan Transmigrasi	18,446,789,609.95	2,855,818,808.35			21,302,608,418.30
15	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu	1,573,668,336.34	248,528,831.75		1,799,781.84	1,820,397,386.24
16	Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga	9,074,174,322.64	1,153,050,854.99		56,820,296.70	10,170,404,880.94
17	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan	1,114,226,741.19	214,198,199.33			1,328,424,940.52
18	Dinas Perikanan dan Pangan	2,479,194,624.72	248,550,209.53			2,727,744,834.24
19	Dinas Pertanian	5,570,152,109.08	603,272,905.48	8,457,940.00		6,181,882,954.56
20	Inspektorat Daerah	746,525,747.40	41,619,889.57		529,303.68	787,616,333.28
21	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan	1,242,395,317.52	104,290,038.47		10,973,842.99	1,335,711,512.99
22	Badan Pengelola Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah	2,173,313,240.62	670,816,861.18	2,051,225,896.24		4,895,355,998.04
23	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	359,586,213.05	26,995,139.04			386,581,352.10
24	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	138,279,518.04	14,084,217.64			152,363,735.68
25	Sekretariat Daerah	11,406,774,528.54	551,889,294.50		2,122,618,028.14	9,836,045,794.90
26	Sekretariat DPRD	3,207,293,183.87	327,818,975.12			3,535,112,158.99
27	Kecamatan Koto IX Tarusan	338,672,954.80	24,757,649.57			363,430,604.37
28	Kecamatan Bayang	361,618,525.36	44,495,362.06			406,113,887.42
29	Kecamatan Bayang Utara	522,549,083.37	39,491,205.33	5,139,261.76		567,179,550.46
30	Kecamatan IV Jurai	396,225,930.68	46,318,764.68	5,284,052.90		447,828,748.26
31	Kecamatan Batang Kapas	314,004,634.92	35,192,103.26		6,278,708.80	342,918,029.38
32	Kecamatan Sutura	286,813,342.93	28,817,576.24			315,630,919.18
33	Kecamatan Lengayang	449,690,144.10	50,331,624.24			500,021,768.34
34	Kecamatan Ranah Pesisir	284,509,328.50	23,427,566.00			307,936,894.50
35	Kecamatan Linggo Sari Baganti	298,928,857.14	13,968,285.71			312,897,142.86
36	Kecamatan Pancung Soal	293,957,490.60	40,651,234.12			334,608,724.72
37	Kecamatan Air Pura	260,779,723.78	28,911,613.20			289,691,336.98
38	Kecamatan Basa IV Balai Tapan	230,169,922.09	13,245,024.45		7,120,566.13	236,294,380.41
39	Kecamatan Ranah Ampek Hulu Tapan	308,769,103.66	55,876,016.38			364,645,120.04
40	Kecamatan Lunang	455,905,565.78	36,422,440.97	1,906,574.43		494,234,581.17
41	Kecamatan Silaut	331,621,799.54	46,271,480.98			377,893,280.52
42	Pengelola Barang Milik Daerah	272,543,261.00	8,488,314.50			281,031,575.50
	JUMLAH	262,848,435,983.74	24,497,314,291.61	3,336,109,244.11	4,259,394,725.49	286,422,464,793.97

**REKAPITULASI AKUMULASI PENYUSUTAN JALAN, INSTALASI DAN JARINGAN
BARANG MILIK DAERAH KABUPATEN PESISIR SELATAN
TAHUN ANGGARAN 2024**

NO	PERANGKAT DAERAH	JALAN, INSTALASI DAN JARINGAN				
		AKUMULASI PENYUSUTAN s.d 2023	BEBAN PENYUSUTAN 2024	KOREKSI AKUMULASI PENYUSUTAN BERTAMBAH	KOREKSI AKUMULASI PENYUSUTAN BERKURANG	AKUMULASI PENYUSUTAN 2024
1	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	104,174,686.56	29,907,683.05		5,583,928.23	128,498,441.38
2	Dinas Kesehatan	3,644,284,934.93	1,490,389,030.30		(2,130,457,820.77)	7,265,131,785.99
3	Rumah Sakit Umum Daerah	1,536,681,978.90	320,021,009.35		(1,172,965,484.04)	3,029,668,472.29
4	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	1,251,083,238,323.29	97,742,632,675.42		3,608,089,375.53	1,345,217,781,623.19
5	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman, Pertanahan dan Lingkungan Hidup	7,923,737,366.40	3,219,012,053.79	4,991,139,186.00	(710,563,831.66)	16,844,452,437.85
6	Dinas Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran	23,337,500.00	1,521,250.00		9,100,000.00	15,758,750.00
7	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	26,711,242.29	1,748,622.88		6,470,882.17	21,988,983.00
8	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	32,018,703,292.15	941,586,030.41		9,097,550.00	32,951,191,772.57
9	Dinas Koperasi, UMKM, dan Tenaga Kerja	61,358,031.85	14,184,446.46		13,376,327.02	62,166,151.30
10	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	27,637,562.50	1,791,687.50		12,809,800.00	16,619,450.00
11	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	41,167,000.00	1,149,300.00		29,791,650.00	12,524,650.00
12	Dinas Perhubungan	16,287,014,399.38	685,845,645.08		11,419,748,624.18	5,553,111,420.28
13	Dinas Komunikasi dan Informatika	703,809,331.22	89,352,881.56		242,275,592.63	550,886,620.15
14	Dinas Perdagangan dan Transmigrasi	22,506,943,096.93	4,585,156,427.19		(1,113,284,636.85)	28,205,384,160.96
15	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu	41,014,486.17	2,410,579.63		28,424,466.67	15,000,599.13
16	Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga	2,809,663,841.61	511,481,667.15		(350,188,176.67)	3,671,333,685.42
17	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan	50,902,548.63	2,443,800.68		32,145,118.90	21,201,230.40
18	Dinas Perikanan dan Pangan	1,751,877,331.96	99,516,533.29		192,633,291.42	1,658,760,573.83
19	Dinas Pertanian	4,439,585,216.32	148,342,759.40		(104,024,124.13)	4,691,952,099.85
20	Inspektorat Daerah	11,357,500.00	324,500.00		9,086,000.00	2,596,000.00
21	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan	491,751,245.42	6,296,628.32		16,957,606.20	481,090,267.53
22	Badan Pengelola Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah	167,752,668.50	10,216,764.88		68,979,858.35	108,989,575.03
23	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	75,328,087.50	1,923,816.25		57,064,662.50	20,187,241.25
24	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	11,946,937.50	899,912.50		9,097,550.00	3,749,300.00
25	Sekretariat Daerah	152,269,543.87	3,142,212.19		47,431,625.00	107,980,131.06
26	Sekretariat DPRD	20,283,216.00	1,447,377.60		11,276,572.80	10,454,020.80
27	Kecamatan Koto IX Tarusan	12,171,937.50	424,912.50		9,097,550.00	3,499,300.00
28	Kecamatan Bayang	11,596,937.50	349,912.50		9,097,550.00	2,849,300.00
29	Kecamatan Bayang Utara	15,386,604.17	556,362.50		11,207,916.67	4,735,050.00
30	Kecamatan IV Jurai	11,375,000.00	325,000.00		9,100,000.00	2,600,000.00
31	Kecamatan Batang Kapas	13,139,850.00	668,876.67		8,978,546.67	4,830,180.00
32	Kecamatan Sutera	11,731,937.50	344,912.50		9,097,550.00	2,979,300.00
33	Kecamatan Lengayang	11,549,389.25	329,982.55		9,239,511.40	2,639,860.40
34	Kecamatan Ranah Pesisir	85,675,000.00	15,185,000.00		9,100,000.00	91,760,000.00
35	Kecamatan Linggo Sari Baganti	11,375,000.00	325,000.00		9,100,000.00	2,600,000.00
36	Kecamatan Pancung Soal	13,871,937.50	449,912.50		9,097,550.00	5,224,300.00
37	Kecamatan Air Pura	14,884,472.38	792,234.93		9,845,077.90	5,831,629.40
38	Kecamatan Basa IV Balai Tapan	14,406,487.50	604,812.50		10,302,700.00	4,708,600.00
39	Kecamatan Ranah Ampek Hulu Tapan	30,017,662.50	4,218,050.83		4,384,390.00	29,851,323.33
40	Kecamatan Lunang	11,375,000.00	325,000.00		9,100,000.00	2,600,000.00
41	Kecamatan Silaut	11,287,500.00	322,500.00		9,030,000.00	2,580,000.00
42	Pengelola Barang Milik Daerah	1,016,782,720.00	65,347,521.00		(36,643,365.00)	1,118,773,606.00
	JUMLAH	1,347,309,158,805.64	110,003,315,285.84	4,991,139,186.00	10,347,091,385.08	1,451,956,521,892.39

REKAPITULASI AKUMULASI PENYUSUTAN ASET TETAP LAINNYA
BARANG MILIK DAERAH KABUPATEN PESIR SELATAN
TAHUN ANGGARAN 2024

NO	PERANGKAT DAERAH	ASET TETAP LAINNYA			
		AKUMULASI PENYUSUTAN s.d 2023	BEBAH PENYUSUTAN 2024	KOREKSI AKUMULASI PENYUSUTAN BERTAMBAH	KOREKSI AKUMULASI PENYUSUTAN BERKURANG
1	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan		662,830,339.50	6,992,220,450.75	7,655,050,790.25
2	Dinas Kesehatan				-
3	Rumah Sakit Umum Daerah				-
4	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang				-
5	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman, Pertanahan dan Lingkungan Hidup				-
6	Dinas Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran				-
7	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak				-
8	Badan Penanggulangan Bencana Daerah				-
9	Dinas Koperasi, UMKM, dan Tenaga Kerja				-
10	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil				-
11	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana			187,651,400.00	187,651,400.00
12	Dinas Perhubungan				-
13	Dinas Komunikasi dan Informatika				-
14	Dinas Perdagangan dan Transmigrasi				-
15	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu				-
16	Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga				-
17	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan		412,500.00	825,000.00	1,237,500.00
18	Dinas Perikanan dan Pangan				-
19	Dinas Pertanian				-
20	Inspektorat Daerah				-
21	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan			2,547,224.00	2,547,224.00
22	Badan Pengelola Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah				-
23	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia				-
24	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik				-
25	Sekretariat Daerah			58,452,584.00	58,452,584.00
26	Sekretariat DPRD			28,187,229.00	28,187,229.00
27	Kecamatan Koto IX Tarusan			21,600,000.00	21,600,000.00
28	Kecamatan Bayang				-
29	Kecamatan Bayang Utara				-
30	Kecamatan IV Jurai				-
31	Kecamatan Batang Kapas				-
32	Kecamatan Sutera				-
33	Kecamatan Lengayang				-
34	Kecamatan Ranah Pesisir				-
35	Kecamatan Linggo Sari Baganti				-
36	Kecamatan Pancung Soal				-
37	Kecamatan Air Pura				-
38	Kecamatan Basa IV Balai Tapan				-
39	Kecamatan Ranah Ampek Hulu Tapan				-
40	Kecamatan Lunang				-
41	Kecamatan Silaut				-
42	Pengelola Barang Milik Daerah				-
	JUMLAH	-	663,242,839.50	7,291,483,887.75	7,954,726,727.25

PEMERINTAH KABUPATEN PESISIR SELATAN
REKAPITULASI ASET LAINNYA
PER 31 DESEMBER 2024

No	SKPD	DBH TDF	Tagihan Tuntutan Ganti Kerugian Daerah	Kemitraan Pihak Ketiga	Aset Tidak Berwujud	Akumulasi Amortisasi	Aset Lain-Lain	Akumulasi Penyusutan Aset Lainnya TA 2024	Jumlah Aset Lainnya
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan				2,182,374,131.61	(651,705,566.00)	467,249,216.00	(321,488,219.90)	1,676,429,561.71
2	Dinas Kesehatan				97,208,250.00	(72,906,187.50)	1,787,640,554.40	(686,434,518.07)	1,125,508,098.83
3	Rumah Sakit Umum Daerah				1,595,912,245.00	(1,595,912,245.00)	-	-	-
4	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang				241,523,416.49	(241,523,416.00)	143,135,524,997.54	(21,145,727,383.15)	121,989,797,614.88
5	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman, Pertanahan dan Lingkungan Hidup				-	-	27,307,396,575.00	(2,272,375,862.05)	25,035,020,712.95
6	Dinas Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran				-	-	70,000,000.00	(70,000,000.00)	-
7	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak				-	-	-	-	-
8	Badan Penanggulangan Bencana Daerah				-	-	-	-	-
9	Dinas Koperasi, UMKM, dan Tenaga Kerja				-	-	-	-	-
10	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil				39,400,000.00	(39,400,000.00)	-	-	-
11	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana				-	-	-	-	-
12	Dinas Perhubungan				244,812,000.00	(219,909,000.00)	-	-	24,903,000.00
13	Dinas Komunikasi dan Informatika				3,500,000.00	(3,500,000.00)	-	-	-
14	Dinas Perdagangan dan Transmigrasi				-	-	-	-	-
15	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu				-	-	-	-	-
16	Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga				-	-	591,060,200.00	(229,636,200.00)	361,424,000.00
17	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan				49,974,000.00	(24,987,000.00)	-	-	24,987,000.00
18	Dinas Perikanan dan Pangan				-	-	16,543,079.00	(16,543,079.00)	-
19	Dinas Pertanian				58,813,046.00	(58,813,046.00)	71,164,800.00	(71,164,800.00)	-
20	Inspektorat Daerah				-	-	-	-	-
21	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan				390,248,602.24	(390,248,602.24)	-	-	-
22	Badan Pengelola Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah	161,876,000.00		126,000,000.00	646,378,738.00	(646,378,738.00)	-	-	287,876,000.00
23	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia				98,377,355.00	(98,377,355.00)	43,835,631.00	(43,835,631.00)	-
24	Sekretariat Daerah				134,300,000.00	(134,300,000.00)	102,672,282.00	(87,047,002.00)	15,625,280.00
25	Sekretariat DPRD		93,000,000.00		-	-	-	-	93,000,000.00
26	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik				-	-	-	-	-
27	Kecamatan Koto IX Tarusan				-	-	-	-	-
28	Kecamatan Bayang				-	-	-	-	-
29	Kecamatan Bayang Utara				-	-	-	-	-
30	Kecamatan IV Jurai				-	-	-	-	-
31	Kecamatan Batang Kapas				-	-	-	-	-
32	Kecamatan Sutera				-	-	-	-	-
33	Kecamatan Lengayang				-	-	-	-	-
34	Kecamatan Ranah Pesisir				-	-	-	-	-
35	Kecamatan Linggo Sari Baganti				-	-	-	-	-
36	Kecamatan Pancung Soal				-	-	-	-	-
37	Kecamatan Air Pura				-	-	-	-	-
38	Kecamatan Basa IV Balai Tapan				-	-	-	-	-
39	Kecamatan Ranah Ampek Hulu Tapan				-	-	-	-	-
40	Kecamatan Lunang				-	-	-	-	-
41	Kecamatan Silaut				-	-	-	-	-
42	PPKD		12,037,858,192.53		-	-	-	-	12,037,858,192.53
Total		161,876,000.00	12,130,858,192.53	126,000,000.00	5,782,821,784.34	(4,177,961,155.74)	173,593,087,334.94	(24,944,252,695.17)	162,672,429,460.90

Lampiran : 11.1

PEMERINTAH KABUPATEN PESISIR SELATAN
DANA BAGI HASIL TREASURY DEPOSIT FACILITY (TDF)
PER 31 DESEMBER 2024

Jenis TKD	Jumlah Salur (Rp)
Penerimaan DBH TDF 2024	161,876,000.00
Jumlah	161,876,000.00

PEMERINTAH KABUPATEN PESISIR SELATAN
TUNTUTAN GANTI RUGI
PER 31 DESEMBER 2024

No	SKPD	Saldo per 31 Desember 2023	Mutasi		Saldo per 31 Desember 2024
			Tambah	Kurang	
1	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	-	-	-	-
2	Dinas Kesehatan	-	-	-	-
3	Rumah Sakit Umum Daerah	-	-	-	-
4	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	-	-	-	-
5	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman, Pertanahan dan Lingkungan Hidup	-	-	-	-
6	Dinas Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran	-	-	-	-
7	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	-	-	-	-
8	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	-	-	-	-
9	Dinas Koperasi, UMKM, dan Tenaga Kerja	-	-	-	-
10	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	-	-	-	-
11	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	-	-	-	-
12	Dinas Perhubungan	-	-	-	-
13	Dinas Komunikasi dan Informatika	-	-	-	-
14	Dinas Perdagangan dan Transmigrasi	-	-	-	-
15	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu	-	-	-	-
16	Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga	-	-	-	-
17	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan	-	-	-	-
18	Dinas Perikanan dan Pangan	-	-	-	-
19	Dinas Pertanian	-	-	-	-
20	Inspektorat Daerah	-	-	-	-
21	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan	-	-	-	-
22	Badan Pengelola Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah	-	-	-	-
23	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	-	-	-	-
24	Sekretariat Daerah	-	-	-	-
25	Sekretariat DPRD	93,000,000	-	-	93,000,000.00
26	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	-	-	-	-
27	Kecamatan Koto IX Tarusan	-	-	-	-
28	Kecamatan Bayang	-	-	-	-
29	Kecamatan Bayang Utara	-	-	-	-
30	Kecamatan IV Jurai	-	-	-	-
31	Kecamatan Batang Kapas	-	-	-	-
32	Kecamatan Sutera	-	-	-	-
33	Kecamatan Lengayang	-	-	-	-
34	Kecamatan Ranah Pesisir	-	-	-	-
35	Kecamatan Linggo Sari Baganti	-	-	-	-
36	Kecamatan Pancung Soal	-	-	-	-
37	Kecamatan Air Pura	-	-	-	-
38	Kecamatan Basa IV Balai Tapan	-	-	-	-
39	Kecamatan Ranah Ampek Hulu Tapan	-	-	-	-
40	Kecamatan Lunang	-	-	-	-
41	Kecamatan Silaut	-	-	-	-
42	PPKD	-	12,037,858,192.53	-	12,037,858,192.53
Total		93,000,000.00	12,037,858,192.53	-	12,130,858,192.53

Lampiran : 11.2.1

PEMERINTAH KABUPATEN PESISIR SELATAN
RINCIAN TUNTUTAN GANTI RUGI
PER 31 DESEMBER 2024

NO	Nomor SKTJM	Tanggal SKTJM	PANJAR & PINJAMAN PRIBADI YANG BELUM DIPERTANGGUNG JAWABKAN		
			TEMUAN (Rp)	Setor (Rp)	SISA (Rp)
I	SEKRETARIAT DPRD				
	001/SKTJM/TPKND/2012	30-Apr-14			
A	ANGGOTA DPRD				
1			80,400,000	3,500,000	76,900,000
2			2,500,000	1,500,000	1,000,000
3			675,000	675,000	0
4			1,000,000	1,000,000	0
5			6,600,000	3,600,000	3,000,000
6			2,681,000	2,681,000	0
7			36,683,400	36,683,400	0
8			17,875,000	17,875,000	0
9			7,600,000	2,000,000	5,600,000
10			1,400,000	1,400,000	0
11			10,000,000	10,000,000	0
12			3,600,000	3,600,000	0
13			1,500,000	1,500,000	0
14			10,000,000	10,000,000	0
15			1,500,000	1,500,000	0
16			6,600,000	6,600,000	0
17			8,000,000	1,500,000	6,500,000
	JUMLAH A		198,614,400	105,614,400	93,000,000
B	PEGAWAI SEKRETARIAT				
1			4,000,000	4,000,000	0
2			3,000,000	3,000,000	0
3			11,500,000	11,500,000	0
4			3,075,000	3,075,000	0
5			500,000	500,000	0
6			975,000	975,000	0
7			3,000,000	3,000,000	0
8			30,000,000	30,000,000	0
	JUMLAH B		56,050,000	56,050,000	0
C	PERTANGGUNG JAWABAN BENDAHARA				
1			13,050,000	13,050,000	-
2			5,676,013	5,676,013	-
	JUMLAH C		18,726,013	18,726,013	-
	TOTAL I (A+B+C)		273,390,413	180,390,413	93,000,000
II	PPKD				12,037,858,193
JUMLAH TGR					12,130,858,193

PEMERINTAH KABUPATEN PESISIR SELATAN
ASET LAINNYA - KEMITRAAN DENGAN PIHAK KETIGA
PER 31 DESEMBER 2024

No	SKPD	Saldo per 31 Desember 2023	Mutasi		Saldo per 31 Desember 2024
			Tambah	Kurang	
1	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	-	-	-	-
2	Dinas Kesehatan	-	-	-	-
3	Rumah Sakit Umum Daerah	-	-	-	-
4	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	-	-	-	-
5	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman, Pertanahan dan Lingkungan Hidup	-	-	-	-
6	Dinas Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran	-	-	-	-
7	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	-	-	-	-
8	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	-	-	-	-
9	Dinas Koperasi, UMKM, dan Tenaga Kerja	-	-	-	-
10	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	-	-	-	-
11	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	-	-	-	-
12	Dinas Perhubungan	-	-	-	-
13	Dinas Komunikasi dan Informatika	-	-	-	-
14	Dinas Perdagangan dan Transmigrasi	-	-	-	-
15	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu	-	-	-	-
16	Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga	-	-	-	-
17	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan	-	-	-	-
18	Dinas Perikanan dan Pangan	-	-	-	-
19	Dinas Pertanian	-	-	-	-
20	Inspektorat Daerah	-	-	-	-
21	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan	-	-	-	-
22	Badan Pengelola Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah	126,000,000	-	-	126,000,000.00
23	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	-	-	-	-
24	Sekretariat Daerah	-	-	-	-
25	Sekretariat DPRD	-	-	-	-
26	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	-	-	-	-
27	Kecamatan Koto IX Tarusan	-	-	-	-
28	Kecamatan Bayang	-	-	-	-
29	Kecamatan Bayang Utara	-	-	-	-
30	Kecamatan IV Jurai	-	-	-	-
31	Kecamatan Batang Kapas	-	-	-	-
32	Kecamatan Sutera	-	-	-	-
33	Kecamatan Lengayang	-	-	-	-
34	Kecamatan Ranah Pesisir	-	-	-	-
35	Kecamatan Linggo Sari Baganti	-	-	-	-
36	Kecamatan Pancung Soal	-	-	-	-
37	Kecamatan Air Pura	-	-	-	-
38	Kecamatan Basa IV Balai Tapan	-	-	-	-
39	Kecamatan Ranah Ampek Hulu Tapan	-	-	-	-
40	Kecamatan Lunang	-	-	-	-
41	Kecamatan Silaut	-	-	-	-
42	Pengelola Barang Milik Daerah	-	-	-	-
Total		126,000,000.00	-	-	126,000,000.00

PEMERINTAH KABUPATEN PESISIR SELATAN
ASET LAINNYA - ASET TIDAK BERWUJUD
PER 31 DESEMBER 2024

No	SKPD	Saldo per 31 Desember 2023	Mutasi		Saldo per 31 Desember 2024
			Tambah	Kurang	
1	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	651,705,565.61	1,530,668,566.00	-	2,182,374,131.61
2	Dinas Kesehatan	97,208,250.00	-	-	97,208,250.00
3	Rumah Sakit Umum Daerah	1,595,912,245.00	-	-	1,595,912,245.00
4	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	241,523,416.49	-	-	241,523,416.49
5	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman, Pertanahan dan Lingkungan Hidup	-	-	-	-
6	Dinas Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran	-	-	-	-
7	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	-	-	-	-
8	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	-	-	-	-
9	Dinas Koperasi, UMKM, dan Tenaga Kerja	-	-	-	-
10	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	39,400,000.00	-	-	39,400,000.00
11	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	-	-	-	-
12	Dinas Perhubungan	244,812,000.00	-	-	244,812,000.00
13	Dinas Komunikasi dan Informatika	3,500,000.00	-	-	3,500,000.00
14	Dinas Perdagangan dan Transmigrasi	-	-	-	-
15	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu	-	-	-	-
16	Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga	-	-	-	-
17	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan	49,974,000.00	-	-	49,974,000.00
18	Dinas Perikanan dan Pangan	-	-	-	-
19	Dinas Pertanian	58,813,046.00	-	-	58,813,046.00
20	Inspektorat Daerah	-	-	-	-
21	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan	390,248,602.24	-	-	390,248,602.24
22	Badan Pengelola Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah	646,378,738.00	-	-	646,378,738.00
23	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	98,377,355.00	-	-	98,377,355.00
24	Sekretariat Daerah	134,300,000.00	-	-	134,300,000.00
25	Sekretariat DPRD	-	-	-	-
26	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	-	-	-	-
27	Kecamatan Koto IX Tarusan	-	-	-	-
28	Kecamatan Bayang	-	-	-	-
29	Kecamatan Bayang Utara	-	-	-	-
30	Kecamatan IV Jurai	-	-	-	-
31	Kecamatan Batang Kapas	-	-	-	-
32	Kecamatan Sutera	-	-	-	-
33	Kecamatan Lengayang	-	-	-	-
34	Kecamatan Ranah Pesisir	-	-	-	-
35	Kecamatan Linggo Sari Baganti	-	-	-	-
36	Kecamatan Pancung Soal	-	-	-	-
37	Kecamatan Air Pura	-	-	-	-
38	Kecamatan Basa IV Balai Tapan	-	-	-	-
39	Kecamatan Ranah Ampek Hulu Tapan	-	-	-	-
40	Kecamatan Lunang	-	-	-	-
41	Kecamatan Silaut	-	-	-	-
42	Pengelola Barang Milik Daerah	-	-	-	-
Total		4,252,153,218.34	1,530,668,566.00	-	5,782,821,784.34

PEMERINTAH KABUPATEN PESISIR SELATAN
ASET LAINNYA - AKUMULASI AMORTISASI
PER 31 DESEMBER 2024

No	SKPD	Saldo per 31 Desember 2023	Mutasi		Saldo per 31 Desember 2024
			Tambah	Kurang	
1	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	(651,705,566.00)			(651,705,566.00)
2	Dinas Kesehatan	(48,604,125.00)	(24,302,062.50)		(72,906,187.50)
3	Rumah Sakit Umum Daerah	(1,595,912,245.00)			(1,595,912,245.00)
4	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	(241,523,416.00)			(241,523,416.00)
5	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman, Pertanahan dan Lingkungan Hidup	-			-
6	Dinas Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran	-			-
7	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	-			-
8	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	-			-
9	Dinas Koperasi, UMKM, dan Tenaga Kerja	-			-
10	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	(39,400,000.00)			(39,400,000.00)
11	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	-			-
12	Dinas Perhubungan	(167,368,500.00)	(52,540,500.00)		(219,909,000.00)
13	Dinas Komunikasi dan Informatika	(3,500,000.00)			(3,500,000.00)
14	Dinas Perdagangan dan Transmigrasi	-			-
15	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu	-			-
16	Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga	-			-
17	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan	(12,493,500.00)	(12,493,500.00)		(24,987,000.00)
18	Dinas Perikanan dan Pangan	-			-
19	Dinas Pertanian	(55,025,407.00)	(3,787,639.00)		(58,813,046.00)
20	Inspektorat Daerah	-			-
21	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan	(390,248,602.00)			(390,248,602.00)
22	Badan Pengelola Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah	(646,378,738.00)			(646,378,738.00)
23	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	(98,377,355.00)			(98,377,355.00)
24	Sekretariat Daerah	(134,300,000.00)			(134,300,000.00)
25	Sekretariat DPRD	-			-
26	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	-			-
27	Kecamatan Koto IX Tarusan	-			-
28	Kecamatan Bayang	-			-
29	Kecamatan Bayang Utara	-			-
30	Kecamatan IV Jurai	-			-
31	Kecamatan Batang Kapas				
32	Kecamatan Sutera				
33	Kecamatan Lengayang				
34	Kecamatan Ranah Pesisir				
35	Kecamatan Linggo Sari Baganti				
36	Kecamatan Pancung Soal				
37	Kecamatan Air Pura				
38	Kecamatan Basa IV Balai Tapan				
39	Kecamatan Ranah Ampek Hulu Tapan	-			-
40	Kecamatan Lunang	-			-
41	Kecamatan Silaut	-			-
42	Pengelola Barang Milik Daerah	-			-
Total		(4,084,837,454.73)	(93,123,701.50)	-	(4,177,961,156.23)

PEMERINTAH KABUPATEN PESIRIS SELATAN
ASET LAINNYA : ASET LAIN-LAIN
PER 31 DESEMBER 2024

No	SKPD	Saldo per 31 Desember 2023	Mutasi		Saldo per 31 Desember 2024
			Tambah	Kurang	
1	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	341,943,820.00	125,305,396.00	-	467,249,216.00
2	Dinas Kesehatan	622,763,171.00	1,164,877,383.40	-	1,787,640,554.40
3	Rumah Sakit Umum Daerah	-	-	-	-
4	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	972,780,270.54	142,162,744,727.00	-	143,135,524,997.54
5	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman, Pertanahan dan Lingkungan Hidup	457,852,000.00	26,849,544,575.00	-	27,307,396,575.00
6	Dinas Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran	70,000,000.00	-	-	70,000,000.00
7	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	-	-	-	-
8	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	-	-	-	-
9	Dinas Koperasi, UMKM, dan Tenaga Kerja	-	-	-	-
10	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	-	-	-	-
11	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	-	-	-	-
12	Dinas Perhubungan	-	-	-	-
13	Dinas Komunikasi dan Informatika	-	-	-	-
14	Dinas Perdagangan dan Transmigrasi	-	-	-	-
15	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu	-	-	-	-
16	Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga	229,636,200.00	361,424,000.00	-	591,060,200.00
17	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan	-	-	-	-
18	Dinas Perikanan dan Pangan	16,543,079.00	-	-	16,543,079.00
19	Dinas Pertanian	71,164,800.00	-	-	71,164,800.00
20	Inspektorat Daerah	-	-	-	-
21	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan	-	-	-	-
22	Badan Pengelola Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah	-	-	-	-
23	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	43,835,631.00	-	-	43,835,631.00
24	Sekretariat Daerah	87,047,002.00	15,625,280.00	-	102,672,282.00
25	Sekretariat DPRD	-	-	-	-
26	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	-	-	-	-
27	Kecamatan Koto IX Tarusan	-	-	-	-
28	Kecamatan Bayang	-	-	-	-
29	Kecamatan Bayang Utara	-	-	-	-
30	Kecamatan IV Jurai	-	-	-	-
31	Kecamatan Batang Kapas	-	-	-	-
32	Kecamatan Sutera	-	-	-	-
33	Kecamatan Lengayang	-	-	-	-
34	Kecamatan Ranah Pesisir	-	-	-	-
35	Kecamatan Linggo Sari Baganti	-	-	-	-
36	Kecamatan Pancung Soal	-	-	-	-
37	Kecamatan Air Pura	-	-	-	-
38	Kecamatan Basa IV Balai Tapan	-	-	-	-
39	Kecamatan Ranah Ampek Hulu Tapan	-	-	-	-
40	Kecamatan Lunang	-	-	-	-
41	Kecamatan Silaut	-	-	-	-
42	Pengelola Barang Milik Daerah	-	-	-	-
Total		2,913,565,973.54	170,679,521,361.40	-	173,593,087,334.94

PEMERINTAH KABUPATEN PESISIR SELATAN
ASET LAINNYA - AKUMULASI AMORTISASI
PER 31 DESEMBER 2024

No	SKPD	Saldo per 31 Desember 2023	Mutasi		Saldo per 31 Desember 2024
			Tambah	Kurang	
1	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	(321,488,219.90)	-		(321,488,219.90)
2	Dinas Kesehatan	(43,864,000.00)	(642,570,518.07)		(686,434,518.07)
3	Rumah Sakit Umum Daerah	-			-
4	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	(288,258,506.30)	(20,857,468,876.85)		(21,145,727,383.15)
5	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman, Pertanahan dan Lingkungan Hidup	-	(26,849,544,575.00)	(24,577,168,712.95)	(2,272,375,862.05)
6	Dinas Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran	(70,000,000.00)			(70,000,000.00)
7	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	-			-
8	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	-			-
9	Dinas Koperasi, UMKM, dan Tenaga Kerja	-			-
10	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	-			-
11	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	-			-
12	Dinas Perhubungan	-			-
13	Dinas Komunikasi dan Informatika	-			-
14	Dinas Perdagangan dan Transmigrasi	-			-
15	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu	-			-
16	Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga	(229,636,200.00)			(229,636,200.00)
17	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan	-			-
18	Dinas Perikanan dan Pangan	(16,543,079.00)			(16,543,079.00)
19	Dinas Pertanian	(71,164,800.00)			(71,164,800.00)
20	Inspektorat Daerah	-			-
21	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan	-			-
22	Badan Pengelola Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah	-			-
23	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	(43,835,631.00)			(43,835,631.00)
24	Sekretariat Daerah	(87,047,002.00)			(87,047,002.00)
25	Sekretariat DPRD	-			-
26	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	-			-
27	Kecamatan Koto IX Tarusan	-			-
28	Kecamatan Bayang	-			-
29	Kecamatan Bayang Utara	-			-
30	Kecamatan IV Jurai	-			-
31	Kecamatan Batang Kapas	-			-
32	Kecamatan Sutura	-			-
33	Kecamatan Lengayang	-			-
34	Kecamatan Ranah Pesisir	-			-
35	Kecamatan Linggo Sari Baganti	-			-
36	Kecamatan Pancung Soal	-			-
37	Kecamatan Air Pura	-			-
38	Kecamatan Basa IV Balai Tapan	-			-
39	Kecamatan Ranah Ampek Hulu Tapan	-			-
40	Kecamatan Lunang	-			-
41	Kecamatan Silaut	-			-
42	Pengelola Barang Milik Daerah	-	-	-	-
Total		(1,171,837,438.20)	(48,349,583,969.92)	(24,577,168,712.95)	(24,944,252,695.17)

**KABUPATEN PESISIR SELATAN
KEWAJIBAN JANGKA PENDEK
PER 31 DESEMBER 2024**

NO	JENIS	SALDO PER 31 DESEMBER 2023	SALDO PER 31 DESEMBER 2024
		(Rp)	(Rp)
1	Utang Perhitungan Pihak Ketiga	-	-
2	Utang Bunga Denda dan <i>Commitment Fee</i>	-	-
3	Bagian Lancar Utang kepada Pemerintah Pusat	-	-
4	Pendapatan Diterima Dimuka	109,224,788.00	108,001,108.30
5	Utang Belanja dan Transfer	53,915,720,900.10	69,463,198,286.33
6	Utang Jangka Pendek Lainnya	3,497,867,262.00	4,591,637,629.45
	JUMLAH	57,522,812,950.10	74,162,837,024.08

KABUPATEN PESISIR SELATAN
UTANG PERHITUNGAN FIAK KETIGA
PER 31 DESEMBER 2024

NO	SKPD	Jumlah	Keterangan
		NIHIL	
	Total	-	-

KABUPATEN PESISIR SELATAN
UTANG BUNGA DENDA DAN COMMITMENT FEE
PER 31 DESEMBER 2024

No	SKPD	Rincian	Jumlah
		NIHIL	
	Jumlah		-

KABUPATEN PESISIR SELATAN
Bagian Lancar Utang kepada Pemerintah Pusat
PER 31 DESEMBER 2024

No	SKPD	Rincian	Jumlah
		NIHIL	
	Jumlah		-

**KABUPATEN PESISIR SELATAN
PENDAPATAN DITERIMA DIMUKA
PER 31 DESEMBER 2024**

No	SKPD	Rincian	Jumlah
1	BPKPAD	Pajak Reklame	91,334,441.30
2	RSUD	Pendapatan Diterima Dimuka Sewa Booth ATM RSUD	16,666,667.00
	Jumlah		108,001,108.30

RINCIAN PENDAPATAN DITERIMA DI MUKA PAJAK REKLAME TAHUN 2024

NO	NAMA WP	NO SKP	JENIS REKLAME	JUDUL	LOKASI	PERIODE	KETETAPAN	PENDAPATAN DITERIMA DIMUKA
1	CV. Projeka	24.01.9919	Papan/Bilboard	Gudang Garam	Jl. Padang Pessel Tapan	16 jan 2024 s.d 15 jan 2025	4,200,000	172,131
2	CV. Projeka	24.01.9920	Papan/Bilboard	Gudang Garam	Jl. Padang Pessel sago-salido	16 jan 2024 s.d 15 jan 2025	1,200,000	49,180
3	CV. Projeka	24.01.9921	Papan/Bilboard	Gudang Garam	Jl. Padang Pessel air haji	16 jan 2024 s.d 15 jan 2025	600,000	24,590
4	CV. Projeka	24.02.9928	Papan/Bilboard	Gudang Garam	Kambang, Kec. Lengayang	06 Feb 2024 s.d 05 feb 2025	3,000,000	295,082
5	PT. BAF	24.01.9916	Papan/Bilboard	BAF	Jl. Jenderal Sudirman Sago	17 jan 2024 s.d 16 jan 2025	600,000	26,230
6	CV. Logo Cipta Prosindo	24.02.9943	Papan/Bilboard	IM3	Bayang, Kab pessel	23 feb 2024 s.d 22 feb 2025	900,000	130,328
7	PT. Jon Trapolta	24.02.9933	Papan/Bilboard	SPBU	Taratak Sutera	12 Jan 2024 s.d 11 Jan 2025	3,060,000	91,967
8	PT. SPBU H.M Yatim Nurdin	24.02.9932	Papan/Bilboard	SPBU	Sindang Silaut	12 Jan 2024 s.d 11 Jan 2025	1,950,000	58,607
9	PT. Zalera Derycor	24.02.9931	Papan/Bilboard	SPBU	Jl. Raya Sago	12 Jan 2024 s.d 11 Jan 2025	3,618,000	108,738
10	S. Budi Syukur , SH	24.02.9935	Papan/Bilboard	SPBU	Kapuah Tarusan	12 Jan 2024 s.d 11 Jan 2025	3,600,000	108,197
11	PT. Firman Dalil	24.02.9936	Papan/Bilboard	SPBU	Ujung Air Amping Parak Sutera	12 Jan 2024 s.d 11 Jan 2025	2,700,000	81,148
12	CV. Projeka	24.04.9996	Papan/Bilboard	Gudang Garam	Tersebar di Wil. Kab. Pessel	16 april 2024 s.d 15 april 2025	8,400,000	2,416,438
13	PT. Citra Media Nusantara	24.04.9998	Baliho	Produk Sampoerna	Jl. Raya kambang	01 april 2024 s.d 31 maret 2025	4,200,000	1,035,616
14	PT. Citra Media Nusantara	24.04.9999	Baliho	Produk Sampoerna	Jl. Sutan syahril lampu merah painan	01 april 2024 s.d 31 maret 2025	4,200,000	1,035,616
15	PT. Citra Media Nusantara	24.04.0000	Papan/Bilboard	Produk Sampoerna	Pasar air haji	01 april 2024 s.d 31 maret 2025	1,200,000	295,890
16	CV. Projeka	24.04.0002	Papan/Bilboard	Gudang Garam	Tersebar di Wil. Kab. Pessel	27 apr 2024 s.d 26 april 2025	1,800,000	572,055
17	PT. Citra Media Nusantara	24.05.0009	Papan/Bilboard	Produk Sampoerna	Tersebar di Wil. Kab. Pessel	1 april 2024 s.d 31 maret 2025	2,400,000	591,781
18	PT. Citra Media Nusantara	24.05.0010	Papan/Bilboard	Produk Sampoerna	Tersebar di Wil. Kab. Pessel	1 april 2024 s.d 31 maret 2025	900,000	221,918
19	PT. Citra Media Nusantara	24.05.0011	Papan/Bilboard	Produk Sampoerna	Tersebar di Wil. Kab. Pessel	1 april 2024 s.d 31 maret 2025	567,000	139,808
20	PT. Citra Media Nusantara	24.05.0012	Papan/Bilboard	Produk Sampoerna	Tersebar di Wil. Kab. Pessel	1 april 2024 s.d 31 maret 2025	5,100,000	1,257,534
21	PT. Citra Media Nusantara	24.05.0013	Papan/Bilboard	Produk Sampoerna	Tersebar di Wil. Kab. Pessel	1 april 2024 s.d 31 maret 2025	12,000,000	2,958,904
22	PT. Citra Media Nusantara	24.05.0014	Papan/Bilboard	Produk Sampoerna	Tersebar di Wil. Kab. Pessel	1 april 2024 s.d 31 maret 2025	1,650,000	406,849
23	CV. Sonic Advertising	24.03.9962	Papan/Bilboard	Dalkin Toko Putri Bungsu Elektron	Pasar Inpres Nagari Pasar Baru	11 feb 2024 s.d 10 feb 2025	1,575,000	176,434
24	CV. Sonic Advertising	24.05.0016	Papan/Bilboard	Nippon Paint Toko Satria	Jl. Ilyas Yacub simp. Bundaran Painan	1 mei 2024 s.d 30 april 2025	1,200,000	394,521
25	CV. Sonic Advertising	24.05.0017	Papan/Bilboard	Nippon Paint Toko Simpang Tanjung	Jl. Raya padang painan kenag. Nanggalo kec. Koto XI Tarusan	1 mei 2024 s.d 30 april 2025	1,200,000	394,521
26	PT. Andalas Multimedia Promosindo	24.05.0026	Baliho	Produk Sampoerna	Jl. Lintas Padang Painan pasar Tarusan	1 mei 2024 s.d 30 april 2025	4,200,000	1,380,822
27	PT. Andalas Multimedia Promosindo	24.05.0027	Baliho	Produk Sampoerna	Jl. Lintas Padang Pessel setelah tugu batas kota	1 mei 2024 s.d 30 april 2025	8,400,000	2,761,644
28	CV. Emil Printing	24.05.0030	Papan/Bilboard	Tri	Basa Ampek Balai Tapan	14 mei 2024 s.d 13 mei 2025	525,000	191,301
29	CV. Emil Printing	24.05.0031	Papan/Bilboard	Tri	Basa Ampek Balai Tapan	14 mei 2024 s.d 13 mei 2025	225,000	81,986
30	CV. NY Media	24.05.0032	Bersinar/Neonbo	Classmild	MM Azza Tanjung Beringin Lunang	25 juli 2024 s.d 24 juli 2025	625,000	351,027
31	SYAFRIZAL	24.02.9940	Papan/Bilboard	SPBU	Riak Danau Sungai Rumbai BAB Tapan	12 Jan 2024 s.d 11 Jan 2025	1,950,000	58,607
32	PT. Citra Media Nusantara	24.05.0028	Papan/Bilboard	Produk Sampoerna	Tersebar di Wil. Kab. Pessel	1 april 2024 s.d 31 maret 2025	18,000,000	4,438,356
33	PT. Punggasan Linggo Sari Baganti	24.02.9939	Papan/Bilboard	SPBU	Kenag. Punggasan Utara	12 januari 2024 s.d 11 januari 2025	3,618,000	108,738
34	Hj. Drg Leyli Yasmi	24.02.9937	Papan/Bilboard	SPBU	Limau Sundai Batang Kapas	12 januari 2024 s.d 11 januari 2025	2,250,000	67,623
35	J&T EXPRESS	24.05.0018	Bersinar/Neonbo	Neonbox j&t express	Painan, Kec. IV Jurai	31 Maret 2024 s.d 30 Maret 2025	500,000	121,918
36	J&T EXPRESS	24.05.0019	Papan/Bilboard	j&t express	Painan, Kec. IV Jurai	31 Maret 2024 s.d 30 Maret 2025	1,200,000	292,603
37	J&T EXPRESS	24.05.0020	Bersinar/Neonbo	Neonbox j&t express	Kambang, Lengayang	31 Maret 2024 s.d 30 Maret 2025	500,000	121,918
38	J&T EXPRESS	24.05.0021	Papan/Bilboard	j&t express	Kambang, Lengayang	31 Maret 2024 s.d 30 Maret 2025	600,000	146,301
39	J&T EXPRESS	24.05.0022	Bersinar/Neonbo	Neonbox j&t express	BAB Tapan	31 Maret 2024 s.d 30 Maret 2025	500,000	121,918
40	J&T EXPRESS	24.05.0023	Papan/Bilboard	j&t express	BAB Tapan	31 Maret 2024 s.d 30 Maret 2025	1,200,000	292,603
41	J&T EXPRESS	24.05.0024	Bersinar/Neonbo	Neonbox j&t express	Punggasan, Linggo Sari baganti	31 Maret 2024 s.d 30 Maret 2025	262,500	64,007
42	J&T EXPRESS	24.05.0025	Papan/Bilboard	j&t express	Punggasan, Linggo Sari baganti	31 Maret 2024 s.d 30 Maret 2025	600,000	146,301
43	SPBU Inderapura	24.02.9934	Papan/Bilboard	SPBU	Kudo-Kudo Inderapura	12 Jan 2024 s.d 11 Jan 2025	2,700,000	81,148
44	PT. Firman Dalil	24.02.9938	Papan/Bilboard	SPBU	Ranah pesisir, Kena. Koto VIII Pelanggai	12 Jan 2024 s.d 11 Jan 2025	2,700,000	81,148
45	PT. Arvindo Bangun Mulia	24.03.9957	Papan/Bilboard	Gudang Garam Merah	Tersebar di Wil. Kab. Pessel	20 Maret 2024 s.d 19 Maret 2025	9,000,000	1,923,288
46	PT. Arvindo Bangun Mulia	24.05.0040	Baliho	Gudang Garam	Jl. Padang - Muko muk (Pasar Kambang) Kab. Pessel	05 Jan 2024 s.d 04 Jan 2025	8,400,000	91,803
47	CV. Projeka	24.06.0046	Papan/Bilboard	Gudang Garam	Air Haji, Kab. Pessel	11 juni 2024 s.d 10 juni 2025	600,000	264,658
48	CV. Projeka	24.06.0047	Papan/Bilboard	Gudang Garam	Jl. Balah Rambahan, Kab. Pessel	11 juni 2024 s.d 10 juni 2025	600,000	264,658
49	CV. Projeka	24.06.0048	Papan/Bilboard	Gudang Garam	Jl. Padang - Pessel Air Haji, Kel. Air Haji, Kec. Linggo Sari Baganti	11 juni 2024 s.d 10 juni 2025	600,000	264,658
50	CV. Haris Motor	24.03.9958	Papan/Bilboard	HONDA	Tarusan	24 februari 2024 s.d 23 februari 2025	1,200,000	177,049
51	CV. Haris Motor	24.03.9959	Papan/Bilboard	HONDA	Surantih, Kec. Sutera	24 februari 2024 s.d 23 februari 2025	1,200,000	177,049
52	CV. Haris Motor	24.03.9960	Papan/Bilboard	HONDA	Bukit Putus Painan	24 februari 2024 s.d 23 februari 2025	1,200,000	177,049
53	CV. Haris Motor	24.03.9961	Papan/Bilboard	HONDA	Pasar Painan	24 februari 2024 s.d 23 februari 2025	4,800,000	708,197

54	PT. Alumada Karya Pratama	24.05.0039	Baliho	Produk Rokok PT. Djarum Group	Jl. Raya padang painan kenag. Nanggalo kec. Koto XI Tarusan	01 mei 2024 .d 30 april 2025	4,200,000	1,380,822
55	CV. Kade Advertising	24.07.0089	Papan/Bilboard	Dunlop	Frans Madani Motor Tower Sign	07 agustus 2024 s.d 06 agustus 2025	972,000	580,537
56	CV. Kade Advertising	24.07.0089	Papan/Bilboard	Dunlop	Frans Madani Motor Shop Sign	07 agustus 2024 s.d 06 agustus 2025	4,860,000	2,902,685
57	CV. Nikotama	24.06.0065	Baliho	Djarum	Jl. Koto punai, Air haji, linggo sari baganti	01 juli 2024 s.d 30 juni 2025	4,200,000	2,082,740
58	PT. World Innovative Telecommunicat	23.06.0066	Bersinar/Neonbo	Oppo Bilqis Cell Kambang	pasar kambang	17 januari 2024 s.d 16 januari 2025	500,000	21,858
59	PT. World Innovative Telecommunicat	23.06.0067	Bersinar/Neonbo	Oppo Faiqah Cell	Painan	17 januari 2024 s.d 16 januari 2025	500,000	21,858
60	PT. World Innovative Telecommunicat	23.06.0068	Bersinar/Neonbo	Oppo Habibi Cell	Surantih	17 januari 2024 s.d 16 januari 2025	500,000	21,858
61	PT. World Innovative Telecommunicat	23.06.0069	Bersinar/Neonbo	Oppo Pedra Cell	Surantih	17 januari 2024 s.d 16 januari 2025	500,000	21,858
62	PT. World Innovative Telecommunicat	23.06.0070	Bersinar/Neonbo	Oppo Repi Cell	Air Haji	17 januari 2024 s.d 16 januari 2025	500,000	21,858
63	PT. World Innovative Telecommunicat	23.06.0071	Bersinar/Neonbo	Oppo Rindo Cell	Surantih	17 januari 2024 s.d 16 januari 2025	937,500	40,984
64	PT. World Innovative Telecommunicat	23.06.0072	Bersinar/Neonbo	Oppo Rindo Cell Kambang	Kambang	17 januari 2024 s.d 16 januari 2025	500,000	21,858
65	PT. World Innovative Telecommunicat	23.06.0073	Bersinar/Neonbo	Oppo Hendry Cell	Jl. Lintas Silaut	17 januari 2024 s.d 16 januari 2025	500,000	21,858
66	PT. World Innovative Telecommunicat	23.06.0074	Bersinar/Neonbo	Oppo Irfan Cell	Air Pura	17 januari 2024 s.d 16 januari 2025	500,000	21,858
67	PT. World Innovative Telecommunicat	23.06.0075	Bersinar/Neonbo	Oppo Nofry Galery	Pasar Raya Tapan	17 januari 2024 s.d 16 januari 2025	500,000	21,858
68	PT. World Innovative Telecommunicat	23.06.0076	Papan/Bilboard	Oppo Bilqis Cell	pasar kambang	17 januari 2024 s.d 16 januari 2025	675,000	29,508
69	PT. World Innovative Telecommunicat	23.06.0077	Papan/Bilboard	Oppo Bilqis Cell Kambang	pasar kambang	17 januari 2024 s.d 16 januari 2025	1,200,000	52,459
70	PT. World Innovative Telecommunicat	23.06.0078	Papan/Bilboard	Oppo Faiqah Cell	Painan	17 januari 2024 s.d 16 januari 2025	787,500	34,426
71	PT. World Innovative Telecommunicat	23.06.0079	Papan/Bilboard	Oppo Habibi Cell	Painan	17 januari 2024 s.d 16 januari 2025	450,000	19,672
72	PT. World Innovative Telecommunicat	23.06.0080	Papan/Bilboard	Oppo Pedra Cell	Surantih	17 januari 2024 s.d 16 januari 2025	450,000	19,672
73	PT. World Innovative Telecommunicat	23.06.0081	Papan/Bilboard	Oppo Hendry Cell	Jl. Lintas Silaut	17 januari 2024 s.d 16 januari 2025	900,000	39,344
74	PT. World Innovative Telecommunicat	23.06.0082	Papan/Bilboard	Oppo Hidayah Cell	Air Pura	17 januari 2024 s.d 16 januari 2025	492,000	21,508
75	PT. World Innovative Telecommunicat	23.06.0083	Papan/Bilboard	Oppo Nofry Galery	Pasar Raya Tapan	17 januari 2024 s.d 16 januari 2025	1,200,000	52,459
76	PT. World Innovative Telecommunicat	23.06.0084	Papan/Bilboard	Oppo Axel Celuler	Jl. M. Hatta Painan	17 januari 2024 s.d 16 januari 2025	1,125,000	49,180
77	PT. World Innovative Telecommunicat	23.06.0085	Papan/Bilboard	Oppo (King Cell)	Jl. Jend sudirman terminal sago	17 januari 2024 s.d 16 januari 2025	900,000	39,344
78	CV. NJ Advertising	24.07.0103	Papan/Bilboard	G Force Toko Sumber Motor	Labuan, Kec. Ranah Pesisir	29 juli 2024 s.d 28 juli 2025	3,162,000	1,810,570
79	CV. NJ Advertising	24.07.0102	Papan/Bilboard	G Force Fran Madani Motor	Jl. Raya Padang - S. Penuh, Kp. Karang Tengah, Kel. Lakitan, Kec. Le	29 juli 2024 s.d 28 juli 2025	1,800,000	1,030,685
80	PT. Kreasi Giri Kusalo	24.08.0106	Papan/Bilboard	Djarum Super (PNT)	Tersebar di Wil. Kab. Pessel	23 juni 2024 s.d 22 juni 2025	2,400,000	1,137,534
81	PT. Kreasi Giri Kusalo	24.08.0107	Papan/Bilboard	Djarum Super (Shopsign)	Tersebar di Wil. Kab. Pessel	23 juni 2024 s.d 22 juni 2025	40,200,000	19,053,699
82	CV. NY Media	24.08.0115	Bersinar/Neonbo	Clasmild	Haha mart (Jl. Sago salido, kec. IV jurai)	25 juli 2024 s.d 24 juli 2025	750,000	421,233
83	CV. NY Media	24.08.0114	Bersinar/Neonbo	Clasmild	Haha mart (Jl. Sago salido, kec. IV jurai)	25 juli 2024 s.d 24 juli 2025	625,000	351,027
84	CV. Sonic Advertising	24.08.0119	Papan/Bilboard	Miyako Toko Melati Elektronik	Jl. Pasar Kambang	03 Januari 2024 s.d 02 Januari 2025	450,000	2,459
85	CV. Sonic Advertising	24.08.0120	Papan/Bilboard	Miyako Toko BE Elektronik	Jl. Pasar Pangasan	03 Januari 2024 s.d 02 Januari 2025	450,000	2,459
86	CV. Sonic Advertising	24.08.0121	Papan/Bilboard	Miyako Toko Iril	Jl. Lintas Air Haji	03 Januari 2024 s.d 02 Januari 2025	450,000	2,459
87	CV. Sonic Advertising	24.08.0122	Papan/Bilboard	Rinnai Toko Iril	Jl. Lintas Air Haji	03 Januari 2024 s.d 02 Januari 2025	450,000	2,459
88	CV. Sonic Advertising	24.08.0123	Papan/Bilboard	Shimizu Toko Rimila	Jl. Pasar Baru	03 Januari 2024 s.d 02 Januari 2025	300,000	1,639
89	CV. Sonic Advertising	24.08.0124	Papan/Bilboard	Miyako Toko Irma	Jl. Raya Pasar Kuok Bt. Kapas	03 Januari 2024 s.d 02 Januari 2025	450,000	2,459
90	CV. Sonic Advertising	24.08.0125	Papan/Bilboard	Miyako Toko Wirda Elektronik	Jl. Pasar Baru Bayang	03 Januari 2024 s.d 02 Januari 2025	262,500	1,434
91	CV. Sonic Advertising	24.08.0126	Papan/Bilboard	Rinnai Toko Wirda Elektronik	Jl. Pasar Baru Bayang	03 Januari 2024 s.d 02 Januari 2025	262,500	1,434
92	CV. Sonic Advertising	24.08.0127	Papan/Bilboard	Miyako Toko Dua Putri	Komp. Ruko Ps. Sago	03 Januari 2024 s.d 02 Januari 2025	450,000	2,459
93	CV. Sonic Advertising	24.08.0128	Papan/Bilboard	Miyako Toko Abim Elektronik	Jl. Raya Pasar Kuok Bt. Kapas	03 Januari 2024 s.d 02 Januari 2025	450,000	2,459
94	CV. Sonic Advertising	24.08.0129	Papan/Bilboard	Miyako Toko Hafiza	Jl. Koto Panai Air Haji	03 Januari 2024 s.d 02 Januari 2025	450,000	2,459
95	CV. Sonic Advertising	24.08.0130	Papan/Bilboard	Rinnai Toko Hafiza	Jl. Koto Panai Air Haji	03 Januari 2024 s.d 02 Januari 2025	450,000	2,459
96	CV. Sonic Advertising	24.08.0131	Papan/Bilboard	Miyako Toko Bunda Elektronik	Jl. Balai Selasa	03 Januari 2024 s.d 02 Januari 2025	450,000	2,459
97	CV. Sonic Advertising	24.08.0132	Papan/Bilboard	Miyako Toko Nova Elektronik	Jl. Raya Pasar Kambang	03 Januari 2024 s.d 02 Januari 2025	450,000	2,459
98	CV. Sonic Advertising	24.08.0133	Papan/Bilboard	Shimizu Toko Yunus	Komp. Ruko Ps. Sago	03 Januari 2024 s.d 02 Januari 2025	300,000	1,639
99	CV. Nikotama	24.09.0138	Baliho	Djarum	Jl. Padang Muko muko, pasar kambang, kec. Lengayang kab. Pessel	18 sept 2024 s.d 17 sept 2025	4,200,000	2,991,781
100	CV. Projeka	24.09.0141	Papan/Bilboard	Shopsign Gudang Garam	Tersebar di Wil. Kab. Pessel	23 sept 2024 s.d 22 sept 2025	3,000,000	2,178,082
101	PT. Imperia Media Kreasi	24.09.0135	Papan/Bilboard	Bridgstone Sumber Ban	Surantih, Kec. Sutura	01 Sept 2024 s.d 31 agustus 2025	4,500,000	2,995,890
102	PT. Imperia Media Kreasi	24.09.0136	Papan/Bilboard	Bridgstone Sumber Ban	Surantih, Kec. Sutura	01 Sept 2024 s.d 31 agustus 2025	1,200,000	798,904
103	CV. Nikotama	24.10.0165	Baliho	Djarum	Jl. Padang-Bengkulu Simpang terminal pasar silaut Pessel	18 sept 2024 s.d 17 sept 2025	4,200,000	2,991,781
104	CV. Tjahaja Baru	24.06.0049	Papan/Bilboard	Yamaha Painan	Painan, Kec. IV Jurai	09 sept 2024 s.d 08 maret 2025	150,000	55,525
105	PT. BRI cab painan	24.10.0147	Bersinar/NeonBo	atm bri	unit rs zein painan	16 september 2024 s.d 15 september 20	400,000	282,740
106	PT. BRI cab painan	24.10.0148	Bersinar/NeonBo	atm bri	unit lakitan	16 september 2024 s.d 15 september 20	400,000	282,740
107	PT. BRI cab painan	24.10.0149	Bersinar/NeonBo	atm bri	unit silaut	16 september 2024 s.d 15 september 20	400,000	282,740
108	PT. BRI cab painan	24.10.0150	Bersinar/NeonBo	atm bri	unit surantih	16 september 2024 s.d 15 september 20	400,000	282,740
109	PT. BRI cab painan	24.10.0151	Bersinar/NeonBo	atm bri	unit kambang	16 september 2024 s.d 15 september 20	400,000	282,740
110	PT. BRI cab painan	24.10.0152	Bersinar/NeonBo	atm bri	unit sago	16 september 2024 s.d 15 september 20	400,000	282,740
111	PT. BRI cab painan	24.10.0153	Bersinar/NeonBo	atm bri	unit lunang	16 september 2024 s.d 15 september 20	400,000	282,740
112	PT. BRI cab painan	24.10.0154	Bersinar/NeonBo	atm bri	unit tapan	16 september 2024 s.d 15 september 20	400,000	282,740

113	PT. BRI cab painan	24.10.0155	Bersinar/NeonBo	atm bri	unit inderapura	16 september 2024 s.d 15 september 20	400,000	282,740
114	PT. BRI cab painan	24.10.0156	Bersinar/NeonBo	atm bri	unit air haji	16 september 2024 s.d 15 september 20	400,000	282,740
115	PT. BRI cab painan	24.10.0157	Bersinar/NeonBo	atm bri	unit balai selasa	16 september 2024 s.d 15 september 20	400,000	282,740
116	PT. BRI cab painan	24.10.0158	Bersinar/NeonBo	atm bri	unit tarusan	16 september 2024 s.d 15 september 20	400,000	282,740
117	PT. BRI cab painan	24.10.0159	Bersinar/NeonBo	atm bri	unit pasar baru	16 september 2024 s.d 15 september 20	400,000	282,740
118	PT. BRI cab painan	24.10.0160	Bersinar/NeonBo	atm bri	cabang painan	16 september 2024 s.d 15 september 20	400,000	282,740
119	PT. BRI cab painan	24.10.0161	Bersinar/NeonBo	atm bri	unit painan kota	16 september 2024 s.d 15 september 20	400,000	282,740
120	PT. BRI cab painan	24.10.0162	Bersinar/NeonBo	atm bri	unit batang kapas	16 september 2024 s.d 15 september 20	400,000	282,740
121	PT. BRI cab painan	24.10.0163	Bersinar/NeonBo	atm bri	RSU BKM Sago	16 september 2024 s.d 15 september 20	400,000	282,740
122	PT. BRI cab painan	24.10.0164	Bersinar/NeonBo	atm bri	SPBU PT. Zalerna Dericore Sago	16 september 2024 s.d 15 september 20	400,000	282,740
123	CV. NJ Advertising	24.09.0139	Papan/Bilboard	G Force Toko DNIJY Motor	Tapan. Pesisir Selatan	18 sept 2024 s.d 17 sept 2025	900,000	641,096
124	CV. Cakrawala Advertising	24.10.0173	Papan/Bilboard	Dunlop	Toko Ban Sahabat Motor Air Haji, Kab. Pessel	05 des 2024 s.d 04 des 2025	1,530,000	1,416,822
125	CV. Kade Advertising	24.10.0171	Baliho	Iklan Rokok	Jl. Ilyas Yacub Painan	15 okt 2024 s.d 14 okt 2025	4,200,000	3,302,466
126	CV. Kade Advertising	24.10.0172	Baliho	Iklan Rokok	Pasar Tapan	15 okt 2024 s.d 14 okt 2025	4,200,000	3,302,466
127	CV. Projeka	24.12.0189	Papan/Bilboard	gudang garam toko farras	pasar kambang petak 1 samping	03 des 2024 s.d 02 des 2025	600,000	552,329
128	CV. NY Media	24.12.0190	Papan/Bilboard	Click to change	Painan, Kec. IV Jurai	01 des 2024 s.d 30 nov 2025	750,000	686,301
129	PT. Citra Media Nusantara	24.12.0191	Baliho	Produk Esse	Painan, Kec. IV Jurai	29 juli 2024 s.d 28 juli 2025	4,200,000	2,404,932
130	PT. Citra Media Nusantara	24.12.0192	Baliho	Produk Esse	Balai Salasa	29 juli 2024 s.d 28 juli 2025	4,200,000	2,404,932
131	PT. Kreasi Giri Kusalo	24.12.0195	Kain/Spanduk	Djarum super (espresso gold)	Tersebar di Wil. Kab. Pessel	09 des 2024 s.d 08 jan 2025	540,000	139,355
				TOTAL			278,406,500	91,334,441

Lampiran 12.4.2

**KABUPATEN PESISIR SELATAN
RSUD DR. MUHAMMAD ZEIN PAINAN
RINCIAN PENDAPATAN DI TERIMA DIMUKA SEWA BOOTH ATM RSUD**

NO	URAIAN	JUMLAH	KETERANGAN
1	Pendapatan Diterima Dimuka Sewa Booth ATM RSUD - BRI	15,000,000.00	Penerimaan Pendapatan Sewa pada Tahun 2023 untuk 3 thn Rp45.000.000
2	Pendapatan Diterima Dimuka Sewa Booth ATM RSUD - Bank Nagari	1,666,667.00	Feb 2024 s/d jan 2023 Rp20.000.000
TOTAL		16,666,667.00	

KABUPATEN PESISIR SELATAN
REKAPITULASI UTANG BELANJA DAN TRANSFER OPD
PER 31 DESEMBER 2024

NO	OPD	Utang Belanja Pegawai	Utang Belanja Barang dan Jasa	Utang Belanja Modal	Utang Belanja
1	2	3	4	5	6 = (3 + 4 + 5)
1	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	23,501,470,300.00	-	-	23,501,470,300
2	Dinas Kesehatan	-	15,349,530,430.23	-	15,349,530,430
3	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	-	-	30,459,432,756.10	30,459,432,756
4	Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman, Pertanahan dan Lingkungan Hidup	-	-	-	-
5	Dinas Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran	-	-	-	-
6	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	-	-	-	-
7	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	-	-	-	-
8	Dinas Koperasi, UKM, dan Tenaga Kerja	-	-	-	-
9	Dinas Perikanan dan Pangan	-	-	-	-
10	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	-	-	-	-
11	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	-	-	-	-
12	Dinas Perhubungan	-	-	-	-
13	Dinas Komunikasi dan Informatika	-	-	-	-
14	Dinas Perdagangan dan Transmigrasi	-	-	-	-
15	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu	-	-	-	-
16	Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga	-	-	-	-
17	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan	-	-	-	-
18	Dinas Pertanian	-	-	-	-
19	Inspektorat Daerah	-	-	-	-
20	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan	-	-	152,764,800	152,764,800
21	Badan Pengelola Keuangan Pendapatan dan Aset Daerah	-	-	-	-
22	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	-	-	-	-
23	Sekretariat Daerah	-	-	-	-
24	Sekretariat DPRD	-	-	-	-
25	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	-	-	-	-
26	Kecamatan Koto IX Tarusan	-	-	-	-
27	Kecamatan Bayang	-	-	-	-
28	Kecamatan Bayang Utara	-	-	-	-
29	Kecamatan IV Jurai	-	-	-	-
30	Kecamatan Batang Kapas	-	-	-	-
31	Kecamatan Sutera	-	-	-	-
32	Kecamatan Lengayang	-	-	-	-
33	Kecamatan Ranah Pesisir	-	-	-	-
34	Kecamatan Linggo Sari Baganti	-	-	-	-
35	Kecamatan Pancung Soal	-	-	-	-
36	Kecamatan Air Pura	-	-	-	-
37	Kecamatan Basa IV Balai Tapan	-	-	-	-
38	Kecamatan Ranah Ampek Hulu Tapan	-	-	-	-
39	Kecamatan Lunang	-	-	-	-
40	Kecamatan Silaut	-	-	-	-
Jumlah		23,501,470,300.00	15,349,530,430.23	30,612,197,556.10	69,463,198,286.33

KABUPATEN PESISIR SELATAN
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
RINCIAN UTANG BELANJA DAN TRANSFER PER 31 DESEMBER 2024

NO	URAIAN	JUMLAH
1	Utang TPG THR dan TPG Gaji 13 Guru PNS dan PPPK (TK, SD, SMP dan Pengawas Sekolah)	23,081,085,800.00
2	Tunjangan Profesi Guru Tw 3 dan 4 Tahun 2024	282,408,600.00
3	Utang Belanja Pegawai - Belanja TKG PNSD	137,975,900.00
TOTAL		23,501,470,300.00

KABUPATEN PESISIR SELATAN
DINAS KESEHATAN
RINCIAN UTANG BELANJA DAN TRANSFER PER 31 DESEMBER 2024

Rumah Sakit Umum Daerah dr. M. Zein Painan

NO	URAIAN	JUMLAH
1	Utang Obat	5,871,840,214.53
2	Utang BMHP dan Reagensia Labor	4,276,929,771.70
3	Utang Jasa Pelayanan BPJS	5,016,722,418.00
4	Utang Jasa Kerja Sama Pihak Ketiga	162,108,166.00
5	Utang Kegiatan Ambulance Rujukan (Jasa Supir-Perawat Merujuk)	21,929,860.00
TOTAL		15,349,530,430.23

KABUPATEN PESIR SELATAN
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
RINCIAN UTANG BELANJA DAN TRANSFER PER 31 DESEMBER 2024

No	Kreditur (Kontraktor)	Nama Barang (Paket Pekerjaan)	Hutang (per 31/12/2023) (Rp)	Mutasi Tambah (Rp)	Mutasi Kurang (Rp)	Hutang (per 31/12/2024) (Rp)	Keterangan
1	PT. Waskita Karya	Relokasi RSUD Dr. M. Zein Painan	30,256,453,168.00			30,256,453,168.00	
2	CV. Abil Nefila Group	Jembatan Bukit Kaciak - Koto Luar Tarusan	4,817,038.10			4,817,038.10	Pemutusan Kontrak Tgl. 9 Feb 2018
3	CV. Bumi Rekaserasi	Dokumen Evaluasi Lingkungan Hidup Pembangunan RSUD Baru	49,847,000.00			49,847,000.00	Hutang 2017 yang belum dibayar di 2018
4		Keg. Pelaksanaan Normalisasi saluran sungai, Paket Pekerjaan Normalisasi Sungai Taratak Tangah Lumpo (Tahun Anggaran 2019)	9,381,300.00			9,381,300.00	
5		Keg. Pelaksanaan Normalisasi saluran sungai, Paket Pekerjaan Normalisasi Sungai Taluak Batuang Batang Kapas (Tahun Anggaran 2019)	8,915,100.00			8,915,100.00	
6		Keg. Perencanaan Embung dan Bangunan Penampungan Air Lainnya, Paket Pekerjaan Konsultan Pengadaan Tanah Untuk Pembangunan Embung Tanah Kareh	18,000,000.00			18,000,000.00	
7		Keg. Rehabilitasi dan Pemeliharaan Bantaran dan Tanggul Sungai, Paket Pekerjaan Pengamanan Tebing Sungai Surau Pasir Lubuk Nyiur (Luncuran Tahun Anggaran 2018)	7,005,300.00			7,005,300.00	
8		Keg. Rehabilitasi dan Pemeliharaan Bantaran dan Tanggul Sungai, Paket Pekerjaan Pengamanan Tebing Sungai Tuik (Luncuran Tahun Anggaran 2018)	6,992,100.00			6,992,100.00	
9		Keg. Pengembangan Pengelolaan Daerah Rawa Dalam Rangka Pengendalian Banjir, Paket Pekerjaan Pengerangan Rawa Anakan Taluak Kasai (Luncuran Tahun Anggaran 2018)	9,395,250.00			9,395,250.00	
10		Keg. Pengembangan Pengelolaan Daerah Rawa Dalam Rangka Pengendalian Banjir, Paket Pekerjaan Pengerangan Rawa Lagan Gadang Hilir (Luncuran Tahun Anggaran 2018)	6,995,000.00			6,995,000.00	
11		Keg. Pelaksanaan Normalisasi Saluran Sungai, Paket Pekerjaan Cuci parit kp. Talaut Nag. Muaro Kec. Pancung Soal (Tahun Anggaran 2020)	2,231,500.00			2,231,500.00	
12		Keg. Peningkatan dan Rehabilitasi Jaringan Irigasi (DAK Penugasan), Paket Pekerjaan Rehabilitasi Jaringan Irigasi Di. Lubuak Aua (Tahun Anggaran 2020)	79,400,000.00			79,400,000.00	Tidak di urus oleh pihak ke - tiga
JUMLAH			30,459,432,756.10	-	-	30,459,432,756.10	

KABUPATEN PESISIR SELATAN
BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
RINCIAN UTANG BELANJA DAN TRANSFER PER 31 DESEMBER 2024

No	Kegiatan/Paket	Nilai Kontrak	Realisasi		Sisa Pembayaran	Keterangan
			Keuangan	Fisik (%)		
1	2	3	4	5	6	7
1	Kelanjutan Jalan Evakuasi Tsunami Pincuran Boga	190,956,000		80%	152,764,800	Kontrak nomor 03/SPK-RR/BPBD-PS/VIII/2018

KABUPATEN PESISIR SELATAN
REKAPITULASI UTANG JANGKA PENDEK LAINNYA OPD
PER 31 DESEMBER 2024

No.	OPD	Belanja Pegawai	Tagihan BPJS Non ASN	Barang dan Jasa	Listrik	Air PDAM	Telepon	Total Utang Jangka Pendek Lainnya
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	-	-	-	-	3,931,500.00	-	3,931,500.00
2	Dinas Kesehatan	716,556,250.00	-	3,657,201,151.45	4,294,313.00	7,260,000.00	-	4,385,311,714.45
3	RSUD	-	-	-	-	29,306,000.00	-	29,306,000.00
4	Dinas Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran	-	-	-	-	2,183,500.00	-	2,183,500.00
5	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	-	-	-	-	162,000.00	-	162,000.00
6	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	-	-	-	-	744,000.00	-	744,000.00
7	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	-	-	-	-	414,400.00	-	414,400.00
8	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	-	-	-	-	462,600.00	-	462,600.00
9	Dinas Perhubungan	-	-	-	-	-	-	-
10	Dinas Komunikasi dan Informatika	-	-	-	13,278,533.00	355,000.00	69,100.00	13,702,633.00
11	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	-	-	-	-	445,500.00	-	445,500.00
12	Dinas Pariwisata, Pemuda, dan Olahraga	-	-	-	-	-	-	-
13	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan	-	-	-	-	512,500.00	-	512,500.00
14	Inspektorat Daerah	-	-	-	-	799,500.00	-	799,500.00
15	Badan Perencanaan Daerah, Penelitian dan Pengembangan	-	-	-	-	-	-	-
16	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	-	-	-	-	207,500.00	-	207,500.00
17	Sekretariat Daerah	-	-	-	-	16,447,800.00	-	16,447,800.00
18	Sekretariat DPRD	52,551,450.00	-	-	-	3,867,800.00	-	56,419,250.00
19	Badan Pengelolaan Keuangan Pendapatan dan Aset Daerah	-	-	-	-	473,500.00	-	473,500.00
20	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	-	-	51,704,076.00	-	-	-	51,704,076.00
21	Dinas Perumahan, Kawasan Pemukiman, Petahanan dan Lingkungan Hidup	-	-	-	-	1,188,000.00	-	1,188,000.00
22	Dinas Pertanian	-	-	-	-	1,976,000.00	-	1,976,000.00
23	Dinas Koperasi Usaha Kecil Mikro dan Tenaga Kerja	-	-	-	4,581,336.00	711,000.00	-	5,292,336.00
24	Dinas Perikanan dan Pangan	-	-	-	5,480,946.00	469,500.00	-	5,950,446.00
25	Dinas Perdagangan dan Transmigrasi	-	-	-	-	8,406,150.00	-	8,406,150.00
26	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	-	-	-	3,284,550.00	27,000.00	-	3,311,550.00
27	Kecamatan Koto XI Tarusan	-	-	-	-	-	-	-
28	Kecamatan Bayang	-	-	-	-	-	-	-
29	Kecamatan Bayang Utara	-	-	-	-	-	-	-
30	Kecamatan IV Jurai	-	-	-	-	-	-	-
31	Kecamatan Batang Kapas	-	-	-	-	-	-	-
32	Kecamatan Sutera	-	-	-	-	-	-	-
33	Kecamatan Lengayang	-	-	-	-	-	-	-
34	Kecamatan Ranah Pesisir	-	-	-	-	-	-	-
35	Kecamatan Linggo Sari Baganti	-	-	-	-	-	-	-
36	Kecamatan Pancung Soal	-	-	-	-	-	-	-
37	Kecamatan Air Pura	-	165,480.00	-	803,294.00	91,000.00	-	1,059,774.00
38	Kecamatan Basa Ampek Balai Tapan	-	-	-	-	-	-	-
39	Kecamatan Ranah Ampek Hulu Tapan	-	449,832.00	-	775,568.00	-	-	1,225,400.00
40	Kecamatan Lunang	-	-	-	-	-	-	-
41	Kecamatan Silaut	-	-	-	-	-	-	-
	Jumlah	769,107,700.00	615,312.00	3,708,905,227.45	32,498,540.00	80,441,750.00	69,100.00	4,591,637,629.45

KABUPATEN PESISIR SELATAN
REKAPITULASI SK PENGHAPUSAN BMD PER SKPD TA 2024

NO	NAMA SKPD	PENGHAPUSAN PERALATAN (KIB A)				PENGHAPUSAN PERALATAN (KIB B)				PENGHAPUSAN GEDUNG (KIB C)				PENGHAPUSAN ASET TETAP LAINNYA (KIB E)			
		NILAI (Rp)	No. SK	Tanggal SK	Total KIB A	NILAI (Rp)	No. SK	Tanggal SK	Total KIB B	NILAI (Rp)	No. SK	Tanggal SK	Total KIB C	NILAI (Rp)	No. SK	Tanggal SK	Total KIB E
1	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan					387,955,825	000.2.3.2/1006/Kpts/Setda-PS/24	25/11/24	387,955,825								
2	Dinas Kesehatan																
3	RSUD																
4	Dinas Pekerjaan Umum					529,405,486	953/793/Kpts/Setda-PS/2024	7/10/24	529,405,486					150,194,052	953/793/Kpts/Setda-PS/2024	7/10/24	150,194,052
5	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Dan LH																
6	Dinas Satuan Polisi, Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran																
7	Badan Penanggulangan Bencana Daerah																
8	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak																
9	Dinas Perdagangan dan Transmigrasi																
10	Dinas Perikanan dan Pangan	654,945	953/723/Kpts/Setda-Ps/2024	12/8/24	654,945	519,173,362	000.2.3.2/1079/Kpts/Setda-Ps/2024	27/12/24	519,173,362					39,850,000	953/778/Kpts/Setda-Ps/2024	30/09/24	39,850,000
11	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil																
12	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, PP & KB																
13	Dinas Perhubungan									28,725,000	000.2.3.2/1003/Kpts/Setda-ps/2024	14/11/24	28,725,000				
14	Dinas Komunikasi dan Informatika																
15	Dinas Koperasi dan Tenaga Kerja																
16	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu																
17	Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga																
18	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan					352,898,280	000.2.3.2/1005/Kpts/Setda-Ps/2024	25/11/24	352,898,280								
19	Dinas Pertanian					192,800,137	000.2.3.2/1078/Kpts/Setda-Ps/2024	27/12/24	192,800,137								
20	Inspektorat Daerah																
21	Badan Perencanaan Daerah, Penelitian dan Pengembangan																
22	Badan Pengelola Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah																
23	Badan Kepegawaian Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia																
24	Sekretariat Daerah					359,668,210	953/794/Kpts/Setda-Ps/2024	7/10/24	1,621,132,802								
						657,201,448	000.2.3.2/1077/Kpts/Setda-Ps/2024	27/12/24									
						604,263,144	953/724/Kpts/Setda-Ps/2024	12/8/24									
25	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik																
26	Sekretariat DPRD					536,717,900	000.2.3.2/1004/Setda-Ps2024	14/11/24	536,717,900								
27	Pengelola Barang Milik Daerah																
28	Kecamatan Koto XI Tarusan																
29	Kecamatan Bayang																
30	Kecamatan Bayang Utara					156,066,080	953/795/Kpts/Setda-Ps/2024	7/10/24	156,066,080								
31	Kecamatan IV Jurai																
32	Kecamatan Batang Kapas																
33	Kecamatan Sutura																
34	Kecamatan Lengayang																
35	Kecamatan Ranah Pesisir																
36	Kecamatan Linggo Sari Baganti																
37	Kecamatan Pancung Soal																
38	Kecamatan Air Pura																
39	Kecamatan Basa Ampek Balai Tapan																
40	Kecamatan Ranah Ampek Hulu Tapan																
41	Kecamatan Lunang																
42	Kecamatan Silaut																
	TOTAL				654,945				4,296,149,872				28,725,000				190,044,052

PEMKAB PESISIR SELATAN
REKAPITULASI PENYUSUTAN EKSTRAKOMTABEL PER SKPD
PER 31 DES 2024

NO	SKPD	JUMLAH
1	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	-
2	Dinas Kesehatan	-
3	Dinas Pekerjaan Umum	-
4	Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman, Pertanahan dan Lingkungan Hidup	-
5	Dinas Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran	-
6	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	-
7	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	-
8	Dinas Koperasi, Usaha Kecil Dan Menengah Dan Tenaga Kerja	-
9	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	-
10	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	-
11	Dinas Perhubungan	-
12	Dinas Komunikasi dan Informatika	-
13	Dinas Perdagangan dan Transmigrasi	-
14	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu	-
15	Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga	-
16	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan	-
17	Dinas Perikanan dan Pangan	-
18	Dinas Pertanian	-
19	Inspektorat Daerah	-

20	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan	-
21	Badan Pengelolaan Keuangan Pendapatan dan Aset Daerah	-
22	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	-
23	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	-
24	Sekretariat Daerah	-
25	Sekretariat DPRD	-
26	Kecamatan Koto IX Tarusan	-
27	Kecamatan Bayang	-
28	Kecamatan Bayang Utara	-
29	Kecamatan IV Jurai	-
30	Kecamatan Batang Kapas	-
31	Kecamatan Sutera	-
32	Kecamatan Lengayang	-
33	Kecamatan Ranah Pesisir	-
34	Kecamatan Linggo Sari Baganti	-
35	Kecamatan Pancung Soal	-
36	Kecamatan Air Pura	-
37	Kecamatan Basa IV Balai Tapan	-
38	Kecamatan Ranah Ampek Hulu Tapan	-
39	Kecamatan Lunang	-
40	Kecamatan Silaut	-
	JUMLAH	-

PEMKAB PESISIR SELATAN
REKAP PENYUSUTAN ASET TETAP EKSTRAKOMTABEL
PER31 DES 2023

NO	SKPD	JUMLAH
1	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	-
2	Dinas Kesehatan	-
3	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	-
4	Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman, Pertanahan Dan LH	-
5	Dinas Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran	-
6	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	-
7	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	-
8	Dinas Koperasi, Usaha Kecil Dan Menengah Dan Tenaga Kerja	-
9	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	-
10	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan KB	-
11	Dinas Perhubungan	-
12	Dinas Komunikasi dan Informatika	-
13	Dinas Perdagangan dan Transmigrasi	-
14	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu	-
15	Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga	-
16	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan	-
17	Dinas Perikanan dan Pangan	-
18	Dinas Pertanian	-
19	Inspektorat Daerah	-
20	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan	-
21	Badan Pengelolaan Keuangan Pendapatan Dan Aset Daerah	-
22	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	-
23	Sekretariat Daerah	-
24	Sekretariat DPRD	-
25	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	-
26	Kecamatan Koto IX Tarusan	-
27	Kecamatan Bayang	-
28	Kecamatan Bayang Utara	-
29	Kecamatan IV Jurai	-
30	Kecamatan Batang Kapas	-
31	Kecamatan Sutera	-
32	Kecamatan Lengayang	-
33	Kecamatan Ranah Pesisir	-
34	Kecamatan Linggo Sari Baganti	-
35	Kecamatan Pancung Soal	-
36	Kecamatan Air Pura	-
37	Kecamatan Basa IV Balai Tapan	-
38	Kecamatan Ranah Ampek Hulu Tapan	-
39	Kecamatan Lunang	-
40	Kecamatan Silaut	-
	JUMLAH	-

KABUPATEN PESISIR SELATAN
LAPORAN REALISASI ANGGARAN
BERDASARKAN RINCIAN OBJEK PENDAPATAN DAN BELANJA

Kode Rekening	URAIAN	ANGGARAN	REALISASI	%
1	2	3	4	5 = (4 / 3)*100
4	PENDAPATAN DAERAH	1,781,262,184,153.00	1,690,884,513,877.88	94.93
4.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	208,403,292,963.00	161,576,001,454.88	77.53
4.1.01	Pajak Daerah	31,807,541,550.00	27,736,938,804.00	87.20
4.1.01.06	Pajak Hotel	350,000,000.00	595,152,781.00	170.04
4.1.01.06.01	Pajak Hotel	350,000,000.00	595,152,781.00	170.04
4.1.01.06.01.0001	Pajak Hotel	350,000,000.00	595,152,781.00	170.04
4.1.01.07	Pajak Restoran	2,250,000,000.00	2,272,514,814.00	101.00
4.1.01.07.01	Pajak Restoran dan Sejenisnya	2,250,000,000.00	2,272,514,814.00	101.00
4.1.01.07.01.0001	Pajak Restoran dan Sejenisnya	2,250,000,000.00	2,272,514,814.00	101.00
4.1.01.08	Pajak Hiburan	50,000,000.00	38,048,000.00	76.10
4.1.01.08.02	Pajak Pagelaran Kesenian/Musik/Tari/ Busana	50,000,000.00	38,048,000.00	76.10
4.1.01.08.02.0001	Pajak Pagelaran Kesenian/Musik/Tari/ Busana	50,000,000.00	38,048,000.00	76.10
4.1.01.09	Pajak Reklame	550,000,000.00	395,453,950.00	71.90
4.1.01.09.01	Pajak Reklame Papan/Billboard/Videotron/ Megatron	550,000,000.00	395,453,950.00	71.90
4.1.01.09.01.0001	Pajak Reklame Papan/Billboard/Videotron/ Megatron	550,000,000.00	395,453,950.00	71.90
4.1.01.10	Pajak Penerangan Jalan	21,180,000,000.00	18,192,726,590.00	85.90
4.1.01.10.01	Pajak Penerangan Jalan Dihasilkan Sendiri	180,000,000.00	1,730,840,081.00	961.58
4.1.01.10.01.0001	Pajak Penerangan Jalan Dihasilkan Sendiri	180,000,000.00	1,730,840,081.00	961.58
4.1.01.10.02	Pajak Penerangan Jalan Sumber Lain	21,000,000,000.00	16,461,886,509.00	78.39
4.1.01.10.02.0001	Pajak Penerangan Jalan Sumber Lain	21,000,000,000.00	16,461,886,509.00	78.39
4.1.01.12	Pajak Air Tanah	18,000,000.00	29,975,383.00	166.53
4.1.01.12.01	Pajak Air Tanah	18,000,000.00	29,975,383.00	166.53
4.1.01.12.01.0001	Pajak Air Tanah	18,000,000.00	29,975,383.00	166.53
4.1.01.13	Pajak Sarang Burung Walet	2,500,000.00	500,000.00	20.00
4.1.01.13.01	Pajak Sarang Burung Walet	2,500,000.00	500,000.00	20.00
4.1.01.13.01.0001	Pajak Sarang Burung Walet	2,500,000.00	500,000.00	20.00
4.1.01.14	Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan	1,500,000,000.00	1,140,627,055.00	76.04
4.1.01.14.37	Pajak Mineral bukan Logam dan Batuan Lainnya	1,500,000,000.00	1,140,627,055.00	76.04
4.1.01.14.37.0001	Pajak Mineral bukan Logam dan Batuan Lainnya	1,500,000,000.00	1,140,627,055.00	76.04
4.1.01.15	Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2)	2,607,041,550.00	1,900,108,426.00	72.88
4.1.01.15.01	PBBP2	2,607,041,550.00	1,900,108,426.00	72.88
4.1.01.15.01.0001	PBBP2	2,607,041,550.00	1,900,108,426.00	72.88
4.1.01.16	Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)	3,300,000,000.00	3,171,831,805.00	96.12
4.1.01.16.01	BPHTB-Pemindahan Hak	3,000,000,000.00	3,171,831,805.00	105.73
4.1.01.16.01.0001	BPHTB-Pemindahan Hak	3,000,000,000.00	3,171,831,805.00	105.73
4.1.01.16.02	BPHTB-Pemberian Hak Baru	300,000,000.00	0.00	0.00
4.1.01.16.02.0001	BPHTB-Pemberian Hak Baru	300,000,000.00	0.00	0.00
4.1.02	Retribusi Daerah	128,115,046,825.00	108,172,064,157.26	84.43
4.1.02.01	Retribusi Jasa Umum	124,148,655,325.00	106,556,875,312.00	85.83
4.1.02.01.01	Retribusi Pelayanan Kesehatan	123,084,095,325.00	106,464,767,812.00	86.50
4.1.02.01.01.0001	Retribusi Pelayanan Kesehatan di Puskesmas	40,482,020,355.00	30,491,662,879.00	75.32
4.1.02.01.01.0005	Retribusi Pelayanan Kesehatan di Rumah Sakit Umum Daerah	82,602,074,970.00	75,973,104,933.00	91.97
4.1.02.01.02	Retribusi Pelayanan Persampahan/ Kebersihan	604,560,000.00	92,107,500.00	15.24
4.1.02.01.02.0001	Retribusi Pelayanan Persampahan/ Kebersihan	604,560,000.00	92,107,500.00	15.24
4.1.02.01.04	Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum	420,000,000.00	0.00	0.00
4.1.02.01.04.0001	Retribusi Penyediaan Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum	420,000,000.00	0.00	0.00
4.1.02.01.06	Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor	0.00	0.00	0.00
4.1.02.01.06.0001	Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor	0.00	0.00	0.00
4.1.02.01.09	Retribusi Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus	40,000,000.00	0.00	0.00
4.1.02.01.09.0001	Retribusi Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus	40,000,000.00	0.00	0.00
4.1.02.01.13	Retribusi Pengawasan dan Pengendalian Menara Telekomunikasi	0.00	0.00	0.00
4.1.02.01.13.0001	Retribusi Pengawasan dan Pengendalian Menara Telekomunikasi	0.00	0.00	0.00
4.1.02.02	Retribusi Jasa Usaha	3,466,391,500.00	1,136,378,955.26	32.78
4.1.02.02.01	Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah	250,000,000.00	429,423,955.26	171.77
4.1.02.02.01.0001	Retribusi Penyewaan Tanah dan Bangunan	140,032,000.00	368,802,155.26	263.37
4.1.02.02.01.0003	Retribusi Penyewaan Bangunan	0.00	0.00	0.00
4.1.02.02.01.0004	Retribusi Pemakaian Laboratorium	65,568,000.00	48,101,800.00	73.36
4.1.02.02.01.0006	Retribusi Pemakaian Kendaraan Bermotor	19,400,000.00	7,500,000.00	38.66
4.1.02.02.01.0007	Retribusi Pemakaian Alat	25,000,000.00	5,020,000.00	20.08

4.1.02.02.02	Retribusi Pasar Grosir dan/atau Pertokoan	586,391,500.00	226,907,000.00	38.70
4.1.02.02.02.0001	Retribusi Penyediaan Fasilitas Pasar Grosir Berbagai Jenis Barang yang Dikontrakkan	531,391,500.00	195,897,000.00	36.86
4.1.02.02.02.0002	Retribusi Penyediaan Fasilitas Pasar/Pertokoan yang Dikontrakkan	55,000,000.00	31,010,000.00	56.38
4.1.02.02.05	Retribusi Tempat Khusus Parkir	120,000,000.00	46,688,000.00	38.91
4.1.02.02.05.0001	Retribusi Pelayanan Tempat Khusus Parkir	120,000,000.00	46,688,000.00	38.91
4.1.02.02.07	Retribusi Rumah Potong Hewan	0.00	0.00	0.00
4.1.02.02.07.0001	Retribusi Pelayanan Rumah Potong Hewan	0.00	0.00	0.00
4.1.02.02.09	Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga	2,500,000,000.00	429,860,000.00	17.19
4.1.02.02.09.0001	Retribusi Pelayanan Tempat Rekreasi dan Olahraga	2,500,000,000.00	429,860,000.00	17.19
4.1.02.02.11	Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah	10,000,000.00	3,500,000.00	35.00
4.1.02.02.11.0003	Retribusi Penjualan Produksi hasil Usaha Daerah berupa Bibit atau Benih Ikan	10,000,000.00	3,500,000.00	35.00
4.1.02.03	Retribusi Perizinan Tertentu	500,000,000.00	478,809,890.00	95.76
4.1.02.03.07	Retribusi Persetujuan Bangunan Gedung	500,000,000.00	478,809,890.00	95.76
4.1.02.03.07.0001	Retribusi Persetujuan Bangunan Gedung	500,000,000.00	478,809,890.00	95.76
4.1.03	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	41,785,995,944.00	11,899,367,428.00	28.48
4.1.03.02	Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMD	41,785,995,944.00	11,899,367,428.00	28.48
4.1.03.02.01	Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMD (Lembaga Keuangan)	41,785,995,944.00	11,899,367,428.00	28.48
4.1.03.02.01.0001	Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMD (Lembaga Keuangan)	41,785,995,944.00	11,899,367,428.00	28.48
4.1.04	Lain-lain PAD yang Sah	6,694,708,644.00	13,767,631,065.62	205.65
4.1.04.01	Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan	110,000,000.00	243,352,536.86	221.23
4.1.04.01.06	Hasil Penjualan Aset Lainnya	0.00	0.00	0.00
4.1.04.01.06.0002	Hasil Penjualan Aset Lainnya-Aset Lain-Lain	0.00	0.00	0.00
4.1.04.01.08	Hasil Penjualan Aset Lain-Lain	110,000,000.00	243,352,536.86	221.23
4.1.04.01.08.0001	Hasil Penjualan Aset Lain-Lain-Aset Lain-Lain-Aset Rusak Berat/Usang	110,000,000.00	243,352,536.86	221.23
4.1.04.03	Hasil Pemanfaatan BMD yang Tidak Dipisahkan	550,796.00	3,070,532.25	557.47
4.1.04.03.01	Hasil Sewa BMD	0.00	0.00	0.00
4.1.04.03.01.0001	Hasil Sewa BMD	0.00	0.00	0.00
4.1.04.03.02	Hasil Kerja Sama Pemanfaatan BMD	550,796.00	3,070,532.25	557.47
4.1.04.03.02.0001	Hasil Kerja Sama Pemanfaatan BMD	550,796.00	3,070,532.25	557.47
4.1.04.05	Jasa Giro	650,000,000.00	1,009,714,288.00	155.34
4.1.04.05.01	Jasa Giro pada Kas Daerah	650,000,000.00	1,009,714,288.00	155.34
4.1.04.05.01.0001	Jasa Giro pada Kas Daerah	650,000,000.00	1,009,714,288.00	155.34
4.1.04.07	Pendapatan Bunga	2,500,000,000.00	3,552,893,601.00	142.12
4.1.04.07.01	Pendapatan Bunga atas Penempatan Uang Pemerintah Daerah	2,500,000,000.00	3,552,893,601.00	142.12
4.1.04.07.01.0001	Pendapatan Bunga atas Penempatan Uang Pemerintah Daerah	2,500,000,000.00	3,552,893,601.00	142.12
4.1.04.08	Penerimaan atas Tuntutan Ganti Kerugian Keuangan Daerah	3,432,844,682.00	7,650,738,891.69	222.87
4.1.04.08.02	Tuntutan Ganti Kerugian Daerah terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain	3,432,844,682.00	7,650,738,891.69	222.87
4.1.04.08.02.0001	Tuntutan Ganti Kerugian Daerah terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain	3,432,844,682.00	7,650,738,891.69	222.87
4.1.04.11	Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan	873,166.00	574,412,836.82	65,785.07
4.1.04.11.01	Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan	873,166.00	574,412,836.82	65,785.07
4.1.04.11.01.0001	Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan	873,166.00	574,412,836.82	65,785.07
4.1.04.15	Pendapatan dari Pengembalian	0.00	733,008,379.00	0.00
4.1.04.15.03	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Gaji dan Tunjangan	0.00	43,335,033.00	0.00
4.1.04.15.03.0001	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Gaji dan Tunjangan	0.00	43,335,033.00	0.00
4.1.04.15.04	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Perjalanan Dinas	0.00	0.00	0.00
4.1.04.15.04.0001	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Perjalanan Dinas Dalam Negeri- Perjalanan Dinas Biasa	0.00	0.00	0.00
4.1.04.15.07	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Jaminan Kesehatan Nasional (JKN)	0.00	566,689,636.00	0.00
4.1.04.15.07.0001	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Jaminan Kesehatan Nasional (JKN)	0.00	566,689,636.00	0.00
4.1.04.15.15	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Barang	0.00	248,100.00	0.00

4.1.04.15.15.0024	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Barang Pakai Habis-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	0.00	248,100.00	0.00
4.1.04.15.34	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Hibah kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia	0.00	122,735,610.00	0.00
4.1.04.15.34.0004	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Hibah Uang kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Telah Memiliki Surat Keterangan Terdaftar	0.00	122,735,610.00	0.00
4.1.04.16	Pendapatan BLUD	0.00	0.00	0.00
4.1.04.16.02	Pendapatan BLUD dari Jasa Layanan	0.00	0.00	0.00
4.1.04.16.02.0001	Pendapatan BLUD dari Jasa Layanan	0.00	0.00	0.00
4.1.04.19	Pendapatan Hasil Pengelolaan Dana Bergulir	440,000.00	440,000.00	100.00
4.1.04.19.01	Pendapatan Hasil Pengelolaan Dana Bergulir	440,000.00	440,000.00	100.00
4.1.04.19.01.0001	Pendapatan Hasil Pengelolaan Dana Bergulir	440,000.00	440,000.00	100.00
	JUMLAH PENDAPATAN ASLI DAERAH	208,403,292,963.00	161,576,001,454.88	77.53
4.2	PENDAPATAN TRANSFER	1,562,806,865,776.00	1,518,538,134,126.00	97.17
4.2.01	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	1,458,490,109,000.00	1,427,643,629,192.00	97.89
4.2.01.01	Dana Perimbangan	1,290,840,183,000.00	1,259,993,703,192.00	97.61
4.2.01.01.01	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil (DBH)	26,271,033,000.00	30,510,938,710.00	116.14
4.2.01.01.01.0001	DBH Pajak Bumi dan Bangunan	6,766,525,000.00	8,159,447,000.00	120.59
4.2.01.01.01.0002	DBH PPh Pasal 21	5,490,658,000.00	6,672,589,000.00	121.53
4.2.01.01.01.0003	DBH PPh Pasal 25 dan Pasal 29/WOPDN	0.00	0.00	0.00
4.2.01.01.01.0004	DBH Cukai Hasil Tembakau (CHT)	35,943,000.00	35,144,710.00	97.78
4.2.01.01.01.0007	DBH Sumber Daya Alam (SDA) Pengusahaan Panas Bumi	825,045,000.00	1,339,539,000.00	162.36
4.2.01.01.01.0008	DBH Sumber Daya Alam (SDA) Mineral dan Batubara-Landrent	727,830,000.00	1,879,187,000.00	258.19
4.2.01.01.01.0009	Dana Bagi Hasil (DBH) Sumber Daya Alam (SDA) Mineral dan Batubara-Royalty	0.00	0.00	0.00
4.2.01.01.01.0010	DBH Sumber Daya Alam (SDA) Kehutanan- Provisi Sumber Daya Hutan (PSDH)	74,069,000.00	74,069,000.00	100.00
4.2.01.01.01.0011	DBH Sumber Daya Alam (SDA) Kehutanan-Iuran Izin Usaha Pemanfaatan Hutan (IUHP)	0.00	0.00	0.00
4.2.01.01.01.0013	DBH Sumber Daya Alam (SDA) Perikanan	3,101,006,000.00	3,101,006,000.00	100.00
4.2.01.01.01.0014	DBH Sawit	9,249,957,000.00	9,249,957,000.00	100.00
4.2.01.01.02	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum (DAU)	912,330,440,000.00	905,022,519,052.00	99.20
4.2.01.01.02.0001	DAU	912,330,440,000.00	905,022,519,052.00	99.20
4.2.01.01.03	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik	80,109,482,000.00	77,657,368,138.00	96.94
4.2.01.01.03.0001	DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-PAUD	1,376,104,000.00	1,369,428,200.00	99.51
4.2.01.01.03.0002	DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-SD	2,777,579,000.00	2,609,949,250.00	93.96
4.2.01.01.03.0003	DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-SMP	2,416,353,000.00	2,264,631,800.00	93.72
4.2.01.01.03.0006	DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-SKB	0.00	0.00	0.00
4.2.01.01.03.0011	DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-Perpustakaan Daerah	0.00	0.00	0.00
4.2.01.01.03.0026	DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Penugasan-Penurunan Stunting (KB)	2,984,456,000.00	2,693,925,000.00	90.27
4.2.01.01.03.0030	DAK Fisik-Bidang Industri Kecil dan Menengah-Penugasan-Pembangunan Sentra IKM dan Revitalisasi Sentra IKM	9,533,261,000.00	9,297,620,269.00	97.53
4.2.01.01.03.0031	DAK Fisik-Bidang Pertanian-Penugasan-Pembangunan/Renovasi Sarana dan Prasarana Fisik Dasar Pembangunan Pertanian	0.00	0.00	0.00
4.2.01.01.03.0032	DAK Fisik-Bidang Kelautan dan Perikanan-Penugasan	0.00	0.00	0.00
4.2.01.01.03.0033	DAK Fisik-Bidang Pariwisata-Penugasan	11,485,144,000.00	12,245,555,198.00	106.62
4.2.01.01.03.0034	DAK Fisik-Bidang Jalan-Reguler-Jalan	13,291,164,000.00	12,333,463,779.00	92.79
4.2.01.01.03.0043	DAK Fisik-Bidang Irigasi-Penugasan	0.00	0.00	0.00
4.2.01.01.03.0045	DAK Fisik-Bidang Lingkungan Hidup dan Kehutanan-Penugasan-Lingkungan Hidup	1,994,251,000.00	1,888,042,000.00	94.67
4.2.01.01.03.0059	DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Reguler-Pengendalian Penyakit	0.00	0.00	0.00
4.2.01.01.03.0060	DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Reguler-Penguatan Sistem Kesehatan	34,251,170,000.00	32,954,752,642.00	96.21
4.2.01.01.03.0062	DAK Fisik-Bidang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah-Penugasan	0.00	0.00	0.00
4.2.01.01.04	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik	272,129,228,000.00	246,802,877,292.00	90.69
4.2.01.01.04.0001	DAK Non Fisik-BOS Reguler	67,348,000,000.00	63,891,050,537.00	94.87
4.2.01.01.04.0003	DAK Non Fisik-BOS Kinerja	2,912,500,000.00	2,855,000,000.00	98.03
4.2.01.01.04.0004	DAK Non Fisik-TPG PNSD	143,607,771,000.00	133,439,377,900.00	92.92
4.2.01.01.04.0005	DAK Non Fisik-Tamsil Guru PNSD	4,109,887,000.00	4,109,887,000.00	100.00
4.2.01.01.04.0006	DAK Non Fisik-TKG PNSD	1,313,032,000.00	1,520,801,000.00	115.82

4.2.01.01.04.0007	DAK Non Fisik-BOP PAUD	7,099,800,000.00	7,041,111,000.00	99.17
4.2.01.01.04.0008	DAK Non Fisik-BOP Pendidikan Kesetaraan	7,198,700,000.00	7,047,020,000.00	97.89
4.2.01.01.04.0011	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK	0.00	0.00	0.00
4.2.01.01.04.0012	DAK Non Fisik-BOKKB-Pengawasan Obat dan Makanan	372,331,000.00	0.00	0.00
4.2.01.01.04.0015	DAK Non Fisik-BOKKB-BOKB	26,122,310,000.00	15,839,187,294.00	60.63
4.2.01.01.04.0016	DAK Non Fisik-PK2UKM	619,615,000.00	607,138,000.00	97.99
4.2.01.01.04.0018	DAK Non Fisik-Dana Pelayanan Kepariwisataaan	1,123,000,000.00	1,059,931,650.00	94.38
4.2.01.01.04.0020	DAK Non Fisik-Fasilitasi Penanaman Modal	830,945,000.00	646,304,950.00	77.78
4.2.01.01.04.0021	DAK Non Fisik-BOKB-KB	6,779,196,000.00	6,114,922,427.00	90.20
4.2.01.01.04.0022	DAK NonFisik-Dana Pelayanan Perlindungan Perempuan dan Anak	406,000,000.00	406,000,000.00	100.00
4.2.01.01.04.0023	DAK Non Fisik-Dana Ketahanan Pangan Dan Pertanian	0.00	0.00	0.00
4.2.01.01.04.0024	DAK Non Fisik-Dana Penguatan Kapasitas Kelembagaan Sentra IKM	2,286,141,000.00	2,225,145,534.00	97.33
	JUMLAH PENDAPATAN TRANSFER DANA PERIMBANGAN	1,290,840,183,000.00	1,259,993,703,192.00	97.61
4.2.01.02	Dana Insentif Daerah (DID)	0.00	0.00	0.00
4.2.01.02.01	DID	0.00	0.00	0.00
4.2.01.02.01.0001	DID	0.00	0.00	0.00
4.2.01.05	Dana Desa	167,649,926,000.00	167,649,926,000.00	100.00
4.2.01.05.01	Dana Desa	167,649,926,000.00	167,649,926,000.00	100.00
4.2.01.05.01.0001	Dana Desa	167,649,926,000.00	167,649,926,000.00	100.00
	JUMLAH PENDAPATAN TRANSFER PEMERINTAH PUSAT - LAINNYA	167,649,926,000.00	167,649,926,000.00	100.00
4.2.02	Pendapatan Transfer Antar Daerah	104,316,756,776.00	90,894,504,934.00	87.13
4.2.02.01	Pendapatan Bagi Hasil	104,316,756,776.00	90,894,504,934.00	87.13
4.2.02.01.01	Pendapatan Bagi Hasil Pajak	104,316,756,776.00	90,894,504,934.00	87.13
4.2.02.01.01.0001	Pendapatan Bagi Hasil Pajak Kendaraan Bermotor	20,356,511,745.00	20,874,197,761.00	102.54
4.2.02.01.01.0002	Pendapatan Bagi Hasil Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor	9,845,875,274.00	10,862,157,652.00	110.32
4.2.02.01.01.0003	Pendapatan Bagi Hasil Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor	49,892,586,333.00	36,460,264,049.00	73.08
4.2.02.01.01.0004	Pendapatan Bagi Hasil Pajak Air Permukaan	528,184,195.00	352,381,857.00	66.72
4.2.02.01.01.0005	Pendapatan Bagi Hasil Pajak Rokok	23,693,599,229.00	22,345,503,615.00	94.31
4.2.02.02	Bantuan Keuangan	0.00	0.00	0.00
4.2.02.02.02	Bantuan Keuangan Khusus dari Pemerintah Provinsi	0.00	0.00	0.00
4.2.02.02.02.0001	Bantuan Keuangan Khusus dari Pemerintah Daerah Provinsi	0.00	0.00	0.00
	JUMLAH PENDAPATAN TRANSFER ANTAR DAERAH	104,316,756,776.00	90,894,504,934.00	87.13
	TOTAL PENDAPATAN TRANSFER	1,562,806,865,776.00	1,518,538,134,126.00	97.17
4.3	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	10,052,025,414.00	10,770,378,297.00	107.15
4.3.01	Pendapatan Hibah	9,260,695,297.00	9,260,695,297.00	100.00
4.3.01.01	Pendapatan Hibah dari Pemerintah Pusat	9,260,695,297.00	9,260,695,297.00	100.00
4.3.01.01.01	Pendapatan Hibah dari Pemerintah Pusat	9,260,695,297.00	9,260,695,297.00	100.00
4.3.01.01.01.0001	Pendapatan Hibah dari Pemerintah Pusat	9,260,695,297.00	9,260,695,297.00	100.00
4.3.03	Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	791,330,117.00	1,509,683,000.00	190.78
4.3.03.02	Pendapatan Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP)	791,330,117.00	1,509,683,000.00	190.78
4.3.03.02.01	Pendapatan Dana Kapitasi JKN pada FKTP	791,330,117.00	1,509,683,000.00	190.78
4.3.03.02.01.0001	Pendapatan Dana Kapitasi JKN pada Rumah Sakit Non BLUD	791,330,117.00	1,509,683,000.00	190.78
	JUMLAH LAIN LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	10,052,025,414.00	10,770,378,297.00	107.15
	JUMLAH PENDAPATAN	1,781,262,184,153.00	1,690,884,513,877.88	94.93
5	BELANJA DAERAH	1,903,284,139,168.00	1,741,084,667,241.16	91.48
5.1	BELANJA OPERASI	1,445,720,868,068.80	1,304,348,788,865.16	90.22
5.1.01	Belanja Pegawai	922,792,472,735.00	822,241,704,070.00	89.10
5.1.01.01	Belanja Gaji dan Tunjangan ASN	638,485,048,780.00	555,216,687,450.00	86.96
5.1.01.01.01	Belanja Gaji Pokok ASN	462,330,860,218.00	420,986,996,367.00	91.06
5.1.01.01.01.0001	Belanja Gaji Pokok PNS	331,825,246,233.00	313,083,796,659.00	94.35
5.1.01.01.01.0002	Belanja Gaji Pokok PPPK	130,505,613,985.00	107,903,199,708.00	82.68
5.1.01.01.02	Belanja Tunjangan Keluarga ASN	44,982,793,700.00	39,986,734,889.00	88.89
5.1.01.01.02.0001	Belanja Tunjangan Keluarga PNS	31,450,375,420.00	30,077,116,639.00	95.63

5.1.01.01.02.0002	Belanja Tunjangan Keluarga PPPK	13,532,418,280.00	9,909,618,250.00	73.23
5.1.01.01.03	Belanja Tunjangan Jabatan ASN	7,162,354,091.00	5,800,654,892.00	80.99
5.1.01.01.03.0001	Belanja Tunjangan Jabatan PNS	7,162,354,091.00	5,800,654,892.00	80.99
5.1.01.01.04	Belanja Tunjangan Fungsional ASN	50,163,805,987.00	33,852,005,931.00	67.48
5.1.01.01.04.0001	Belanja Tunjangan Fungsional PNS	37,783,811,537.00	23,316,472,421.00	61.71
5.1.01.01.04.0002	Belanja Tunjangan Fungsional PPPK	12,379,994,450.00	10,535,533,510.00	85.10
5.1.01.01.05	Belanja Tunjangan Fungsional Umum ASN	2,637,893,566.00	2,274,007,666.00	86.21
5.1.01.01.05.0001	Belanja Tunjangan Fungsional Umum PNS	2,227,748,566.00	1,903,767,666.00	85.46
5.1.01.01.05.0002	Belanja Tunjangan Fungsional Umum PPPK	410,145,000.00	370,240,000.00	90.27
5.1.01.01.06	Belanja Tunjangan Beras ASN	26,923,244,587.00	22,478,676,953.00	83.49
5.1.01.01.06.0001	Belanja Tunjangan Beras PNS	16,507,461,758.00	15,631,422,480.00	94.69
5.1.01.01.06.0002	Belanja Tunjangan Beras PPPK	10,415,782,829.00	6,847,254,473.00	65.74
5.1.01.01.07	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus ASN	5,925,219,832.00	1,132,830,906.00	19.12
5.1.01.01.07.0001	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PNS	5,925,219,832.00	1,132,830,906.00	19.12
5.1.01.01.08	Belanja Pembulatan Gaji ASN	7,964,183.00	5,387,032.00	67.64
5.1.01.01.08.0001	Belanja Pembulatan Gaji PNS	5,351,594.00	4,015,175.00	75.03
5.1.01.01.08.0002	Belanja Pembulatan Gaji PPPK	2,612,589.00	1,371,857.00	52.51
5.1.01.01.09	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan ASN	32,497,414,163.00	25,184,037,504.00	77.50
5.1.01.01.09.0001	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PNS	25,498,611,237.00	19,837,460,145.00	77.80
5.1.01.01.09.0002	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PPPK	6,998,802,926.00	5,346,577,359.00	76.39
5.1.01.01.10	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja ASN	988,519,248.00	876,397,533.00	88.66
5.1.01.01.10.0001	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PNS	701,553,212.00	643,681,585.00	91.75
5.1.01.01.10.0002	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PPPK	286,966,036.00	232,715,948.00	81.10
5.1.01.01.11	Belanja Iuran Jaminan Kematian ASN	2,980,402,468.00	2,638,957,777.00	88.54
5.1.01.01.11.0001	Belanja Iuran Jaminan Kematian PNS	2,119,524,210.00	1,940,836,774.00	91.57
5.1.01.01.11.0002	Belanja Iuran Jaminan Kematian PPPK	860,878,258.00	698,121,003.00	81.09
5.1.01.01.12	Belanja Iuran Simpanan Peserta Tabungan Perumahan Rakyat ASN	1,884,576,737.00	0.00	0.00
5.1.01.01.12.0001	Belanja Iuran Simpanan Peserta Tabungan Perumahan Rakyat PNS	1,884,576,737.00	0.00	0.00
5.1.01.02	Belanja Tambahan Penghasilan ASN	73,800,571,107.00	66,946,122,489.00	90.71
5.1.01.02.01	Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja ASN	71,300,571,107.00	64,562,922,489.00	90.55
5.1.01.02.01.0001	Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS	67,509,141,125.00	61,146,899,374.00	90.58
5.1.01.02.01.0002	Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PPPK	3,791,429,982.00	3,416,023,115.00	90.10
5.1.01.02.04	Tambahan Penghasilan berdasarkan Kelangkaan Profesi ASN	2,500,000,000.00	2,383,200,000.00	95.33
5.1.01.02.04.0001	Tambahan Penghasilan berdasarkan Kelangkaan Profesi PNS	2,500,000,000.00	2,383,200,000.00	95.33
5.1.01.03	Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN	171,604,260,731.00	162,785,626,111.00	94.86
5.1.01.03.01	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Daerah	1,229,846,129.00	1,023,061,819.00	83.19
5.1.01.03.01.0006	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Hotel	12,000,000.00	12,000,000.00	100.00
5.1.01.03.01.0007	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Restoran	90,000,000.00	84,650,128.00	94.06
5.1.01.03.01.0008	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Hiburan	1,440,000.00	1,440,000.00	100.00
5.1.01.03.01.0009	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Reklame	22,000,000.00	8,800,000.00	40.00
5.1.01.03.01.0010	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Penerangan Jalan	727,200,000.00	725,994,895.00	99.83
5.1.01.03.01.0012	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Air Tanah	720,000.00	720,000.00	100.00
5.1.01.03.01.0013	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Sarang Burung Walet	100,000.00	15,000.00	15.00
5.1.01.03.01.0014	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan	120,000,000.00	24,000,000.00	20.00
5.1.01.03.01.0015	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Bumi Dan Bangunan Pedesaan Dan Perkotaan	124,386,129.00	41,712,664.00	33.53
5.1.01.03.01.0016	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan	132,000,000.00	123,729,132.00	93.73
5.1.01.03.02	Belanja bagi ASN atas Insentif Pemungutan Retribusi Daerah	209,398,593.00	29,260,000.00	13.97
5.1.01.03.02.0001	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Umum-Pelayanan Kesehatan	52,160,533.00	0.00	0.00
5.1.01.03.02.0002	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Umum-Pelayanan Persampahan/Kebersihan	20,182,400.00	0.00	0.00
5.1.01.03.02.0004	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Umum-Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum	16,800,000.00	0.00	0.00
5.1.01.03.02.0006	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Umum-Pengujian Kendaraan Bermotor	0.00	0.00	0.00
5.1.01.03.02.0009	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Umum-Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus yang Dilakukan oleh Pemerintah Daerah	1,600,000.00	0.00	0.00

5.1.01.03.02.0013	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Umum-Pengawasan dan Pengendalian Menara Telekomunikasi	0.00	0.00	0.00
5.1.01.03.02.0014	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Usaha-Pemakaian Kekayaan Daerah	10,000,000.00	0.00	0.00
5.1.01.03.02.0015	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Usaha-Pasar Grosir dan/atau Pertokoan	19,455,660.00	0.00	0.00
5.1.01.03.02.0018	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Usaha-Tempat Khusus Parkir	4,800,000.00	0.00	0.00
5.1.01.03.02.0022	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Usaha-Tempat Rekreasi dan Olahraga	70,000,000.00	15,260,000.00	21.80
5.1.01.03.02.0024	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Usaha-Penjualan Produksi Usaha Daerah	400,000.00	0.00	0.00
5.1.01.03.02.0031	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Perizinan Tertentu-Persetujuan Bangunan Gedung	14,000,000.00	14,000,000.00	100.00
5.1.01.03.03	Belanja Tunjangan Profesi Guru (TPG) PNSD	154,299,352,000.00	148,635,929,000.00	96.33
5.1.01.03.03.0001	Belanja TPG PNSD	154,299,352,000.00	148,635,929,000.00	96.33
5.1.01.03.04	Belanja Tunjangan Khusus Guru (TKG) PNSD	1,313,032,000.00	1,304,978,100.00	99.39
5.1.01.03.04.0001	Belanja TKG PNSD	1,313,032,000.00	1,304,978,100.00	99.39
5.1.01.03.05	Belanja Tambahan Penghasilan (Tamsil) Guru PNSD	4,109,887,000.00	2,792,575,500.00	67.95
5.1.01.03.05.0001	Belanja Tamsil Guru PNSD	4,109,887,000.00	2,792,575,500.00	67.95
5.1.01.03.06	Belanja Jasa Pelayanan Kesehatan bagi ASN	2,094,610,509.00	1,449,343,912.00	69.19
5.1.01.03.06.0001	Belanja Jasa Pelayanan Kesehatan bagi ASN	2,094,610,509.00	1,449,343,912.00	69.19
5.1.01.03.07	Belanja Honorarium	7,874,734,500.00	7,550,477,780.00	95.88
5.1.01.03.07.0001	Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan	7,307,177,000.00	7,147,710,280.00	97.82
5.1.01.03.07.0002	Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa	567,557,500.00	402,767,500.00	70.97
5.1.01.03.07.0003	Belanja Honorarium Perangkat Unit Kerja Pengadaan Barang dan Jasa (UKPBJ)	0.00	0.00	0.00
5.1.01.03.08	Belanja Jasa Pengelolaan BMD	473,400,000.00	0.00	0.00
5.1.01.03.08.0002	Belanja Jasa Pengelolaan BMD yang Tidak Menghasilkan Pendapatan	473,400,000.00	0.00	0.00
5.1.01.04	Belanja Gaji dan Tunjangan DPRD	18,249,340,000.00	18,112,420,461.00	99.25
5.1.01.04.01	Belanja Uang Representasi DPRD	994,560,000.00	993,405,000.00	99.88
5.1.01.04.01.0001	Belanja Uang Representasi DPRD	994,560,000.00	993,405,000.00	99.88
5.1.01.04.02	Belanja Tunjangan Keluarga DPRD	75,000,000.00	74,854,500.00	99.81
5.1.01.04.02.0001	Belanja Tunjangan Keluarga DPRD	75,000,000.00	74,854,500.00	99.81
5.1.01.04.03	Belanja Tunjangan Beras DPRD	87,000,000.00	86,971,140.00	99.97
5.1.01.04.03.0001	Belanja Tunjangan Beras DPRD	87,000,000.00	86,971,140.00	99.97
5.1.01.04.04	Belanja Uang Paket DPRD	89,000,000.00	85,312,500.00	95.86
5.1.01.04.04.0001	Belanja Uang Paket DPRD	89,000,000.00	85,312,500.00	95.86
5.1.01.04.05	Belanja Tunjangan Jabatan DPRD	1,440,000,000.00	1,438,153,500.00	99.87
5.1.01.04.05.0001	Belanja Tunjangan Jabatan DPRD	1,440,000,000.00	1,438,153,500.00	99.87
5.1.01.04.06	Belanja Tunjangan Alat Kelengkapan DPRD	145,090,000.00	125,301,750.00	86.36
5.1.01.04.06.0001	Belanja Tunjangan Alat Kelengkapan DPRD	145,090,000.00	125,301,750.00	86.36
5.1.01.04.07	Belanja Tunjangan Alat Kelengkapan Lainnya DPRD	2,000,000.00	0.00	0.00
5.1.01.04.07.0001	Belanja Tunjangan Alat Kelengkapan Lainnya DPRD	2,000,000.00	0.00	0.00
5.1.01.04.08	Belanja Tunjangan Komunikasi Intensif Pimpinan dan Anggota DPRD	5,617,500,000.00	5,617,500,000.00	100.00
5.1.01.04.08.0001	Belanja Tunjangan Komunikasi Intensif Pimpinan dan Anggota DPRD	5,617,500,000.00	5,617,500,000.00	100.00
5.1.01.04.09	Belanja Tunjangan Reses DPRD	946,000,000.00	945,000,000.00	99.89
5.1.01.04.09.0001	Belanja Tunjangan Reses DPRD	946,000,000.00	945,000,000.00	99.89
5.1.01.04.10	Belanja Pembebanan PPh kepada Pimpinan dan Anggota DPRD	11,000,000.00	9,313,349.00	84.67
5.1.01.04.10.0001	Belanja Pembebanan PPh kepada Pimpinan dan Anggota DPRD	11,000,000.00	9,313,349.00	84.67
5.1.01.04.12	Belanja Tunjangan Kesejahteraan Pimpinan dan Anggota DPRD	3,103,300,000.00	3,054,843,722.00	98.44
5.1.01.04.12.0001	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi DPRD	86,000,000.00	79,920,834.00	92.93
5.1.01.04.12.0002	Belanja Jaminan Kecelakaan Kerja DPRD	5,000,000.00	2,055,312.00	41.11
5.1.01.04.12.0003	Belanja Jaminan Kematian DPRD	7,000,000.00	6,167,576.00	88.11
5.1.01.04.12.0004	Belanja Tunjangan Perumahan DPRD	3,005,300,000.00	2,966,700,000.00	98.72
5.1.01.04.13	Belanja Tunjangan Transportasi DPRD	5,308,600,000.00	5,287,700,000.00	99.61
5.1.01.04.13.0001	Belanja Tunjangan Transportasi DPRD	5,308,600,000.00	5,287,700,000.00	99.61
5.1.01.04.14	Belanja Uang Jasa Pengabdian DPRD	430,290,000.00	394,065,000.00	91.58
5.1.01.04.14.0001	Belanja Uang Jasa Pengabdian DPRD	430,290,000.00	394,065,000.00	91.58
5.1.01.05	Belanja Gaji dan Tunjangan KDH/WKDH	564,954,860.00	348,082,068.00	61.61
5.1.01.05.01	Belanja Gaji Pokok KDH/WKDH	54,600,000.00	29,400,000.00	53.85
5.1.01.05.01.0001	Belanja Gaji Pokok KDH/WKDH	54,600,000.00	29,400,000.00	53.85
5.1.01.05.02	Belanja Tunjangan Keluarga KDH/WKDH	8,232,000.00	3,528,000.00	42.86
5.1.01.05.02.0001	Belanja Tunjangan Keluarga KDH/WKDH	8,232,000.00	3,528,000.00	42.86
5.1.01.05.03	Belanja Tunjangan Jabatan KDH/WKDH	98,280,000.00	52,920,000.00	53.85
5.1.01.05.03.0001	Belanja Tunjangan Jabatan KDH/WKDH	98,280,000.00	52,920,000.00	53.85
5.1.01.05.04	Belanja Tunjangan Beras KDH/WKDH	8,111,040.00	3,041,640.00	37.50

5.1.01.05.04.0001	Belanja Tunjangan Beras KDH/WKDH	8,111,040.00	3,041,640.00	37.50
5.1.01.05.05	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus KDH/WKDH	28,948,920.00	241,373.00	0.83
5.1.01.05.05.0001	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus KDH/WKDH	28,948,920.00	241,373.00	0.83
5.1.01.05.06	Belanja Pembulatan Gaji KDH/WKDH	3,080.00	320.00	10.39
5.1.01.05.06.0001	Belanja Pembulatan Gaji KDH/WKDH	3,080.00	320.00	10.39
5.1.01.05.07	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi KDH/WKDH	6,444,480.00	2,943,360.00	45.67
5.1.01.05.07.0001	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi KDH/WKDH	6,444,480.00	2,943,360.00	45.67
5.1.01.05.08	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja KDH/WKDH	131,040.00	60,480.00	46.15
5.1.01.05.08.0001	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja KDH/WKDH	131,040.00	60,480.00	46.15
5.1.01.05.09	Belanja Iuran Jaminan Kematian KDH/WKDH	393,120.00	181,440.00	46.15
5.1.01.05.09.0001	Belanja Iuran Jaminan Kematian KDH/WKDH	393,120.00	181,440.00	46.15
5.1.01.05.10	Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Pajak Daerah	307,461,532.00	255,765,455.00	83.19
5.1.01.05.10.0006	Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Pajak Hotel	3,000,000.00	3,000,000.00	100.00
5.1.01.05.10.0007	Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Pajak Restoran	22,500,000.00	21,162,532.00	94.06
5.1.01.05.10.0008	Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Pajak Hiburan	360,000.00	360,000.00	100.00
5.1.01.05.10.0009	Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Pajak Reklame	5,500,000.00	2,200,000.00	40.00
5.1.01.05.10.0010	Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Pajak Penerangan Jalan	181,800,000.00	181,498,724.00	99.83
5.1.01.05.10.0012	Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Pajak Air Tanah	180,000.00	180,000.00	100.00
5.1.01.05.10.0013	Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Pajak Sarang Burung Walet	25,000.00	3,750.00	15.00
5.1.01.05.10.0014	Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan	30,000,000.00	6,000,000.00	20.00
5.1.01.05.10.0015	Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan	31,096,532.00	10,428,166.00	33.53
5.1.01.05.10.0016	Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan	33,000,000.00	30,932,283.00	93.73
5.1.01.05.11	Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Retribusi Daerah bagi KDH/WKDH	52,349,648.00	0.00	0.00
5.1.01.05.11.0001	Belanja Insentif Pemungutan bagi KDH/WKDH atas Retribusi Jasa Umum-Pelayanan Kesehatan	13,040,133.00	0.00	0.00
5.1.01.05.11.0002	Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Retribusi Jasa Umum-Pelayanan Persampahan/Kebersihan	5,045,600.00	0.00	0.00
5.1.01.05.11.0004	Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Retribusi Jasa Umum-Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum	4,200,000.00	0.00	0.00
5.1.01.05.11.0009	Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Retribusi Jasa Umum-Penyediaan dan/atau Penyedotan Kaku	400,000.00	0.00	0.00
5.1.01.05.11.0014	Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Retribusi Jasa Usaha-Pemakaian Kekayaan Daerah	2,500,000.00	0.00	0.00
5.1.01.05.11.0015	Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Retribusi Jasa Usaha-Pasar Grosir dan/atau Pertokoan	4,863,915.00	0.00	0.00
5.1.01.05.11.0018	Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Retribusi Jasa Usaha-Tempat Khusus Parkir	1,200,000.00	0.00	0.00
5.1.01.05.11.0022	Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Retribusi Jasa Usaha-Tempat Rekreasi dan Olahraga	17,500,000.00	0.00	0.00
5.1.01.05.11.0024	Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Retribusi Jasa Usaha-Penjualan Produksi Usaha Daerah	100,000.00	0.00	0.00
5.1.01.05.11.0031	Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Retribusi Perizinan Tertentu-Persetujuan Bangunan Gedung	3,500,000.00	0.00	0.00
5.1.01.06	Belanja Penerimaan Lainnya Pimpinan DPRD serta KDH/WKDH	820,001,050.00	773,265,000.00	94.30
5.1.01.06.01	Belanja Dana Operasional Pimpinan DPRD	260,000,000.00	213,280,000.00	82.03
5.1.01.06.01.0001	Belanja Dana Operasional Pimpinan DPRD	260,000,000.00	213,280,000.00	82.03
5.1.01.06.02	Belanja Dana Operasional KDH/WKDH	560,001,050.00	559,985,000.00	100.00
5.1.01.06.02.0001	Belanja Dana Operasional KDH/WKDH	560,001,050.00	559,985,000.00	100.00
5.1.01.88	Belanja Pegawai BOS	382,154,000.00	0.00	0.00
5.1.01.88.88	Belanja Pegawai BOS	382,154,000.00	0.00	0.00
5.1.01.88.88.8888	Belanja Pegawai BOS	382,154,000.00	0.00	0.00
5.1.01.99	Belanja Pegawai BLUD	18,886,142,207.00	18,059,500,491.00	95.62
5.1.01.99.99	Belanja Pegawai BLUD	18,886,142,207.00	18,059,500,491.00	95.62
5.1.01.99.99.9999	Belanja Pegawai BLUD	18,886,142,207.00	18,059,500,491.00	95.62
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	434,776,541,551.80	395,247,028,648.16	90.91
5.1.02.01	Belanja Barang	48,998,217,493.80	43,290,128,317.00	88.35

5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis	48,646,588,332.80	42,942,912,167.00	88.28
5.1.02.01.01.0001	Belanja Bahan-Bahan Bangunan dan Konstruksi	162,361,698.00	146,509,005.00	90.24
5.1.02.01.01.0002	Belanja Bahan-Bahan Kimia	509,235,766.00	426,994,044.00	83.85
5.1.02.01.01.0004	Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas	2,206,179,674.00	1,923,284,889.00	87.18
5.1.02.01.01.0005	Belanja Bahan-Bahan Baku	473,089,875.00	345,517,050.00	73.03
5.1.02.01.01.0008	Belanja Bahan-Bahan/Bibit Tanaman	1,285,173,510.00	1,144,260,000.00	89.04
5.1.02.01.01.0010	Belanja Bahan-Isi Tabung Gas	0.00	0.00	0.00
5.1.02.01.01.0011	Belanja Bahan-Bahan/Bibit Ternak/Bibit Ikan	356,676,300.00	356,241,100.00	99.88
5.1.02.01.01.0012	Belanja Bahan-Bahan Lainnya	154,484,978.00	126,611,100.00	81.96
5.1.02.01.01.0013	Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Alat Angkutan	147,875,905.00	97,734,120.00	66.09
5.1.02.01.01.0015	Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Alat Kedokteran	0.00	0.00	0.00
5.1.02.01.01.0016	Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Alat Laboratorium	5,720,000.00	5,720,000.00	100.00
5.1.02.01.01.0020	Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Alat Bengkel	0.00	0.00	0.00
5.1.02.01.01.0023	Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Lainnya	334,550,030.00	307,420,000.00	91.89
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	4,832,381,982.00	4,534,143,364.00	93.83
5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover	70,019,600.00	57,335,500.00	81.88
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	3,759,605,875.80	3,409,797,072.00	90.70
5.1.02.01.01.0027	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos	93,830,000.00	84,389,000.00	89.94
5.1.02.01.01.0028	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Persediaan Dokumen/Administrasi Tender	5,510,000.00	5,506,000.00	99.93
5.1.02.01.01.0029	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer	4,272,800.00	4,106,000.00	96.10
5.1.02.01.01.0030	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabot Kantor	176,370,120.00	175,182,103.00	99.33
5.1.02.01.01.0031	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik	574,754,124.00	518,566,274.00	90.22
5.1.02.01.01.0032	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perlengkapan Dinas	890,782,580.00	842,914,644.00	94.63
5.1.02.01.01.0034	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Perlengkapan Pendukung Olahraga	125,930,550.00	119,622,250.00	94.99
5.1.02.01.01.0035	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Suvenir/Cendera Mata	50,200,000.00	50,200,000.00	100.00
5.1.02.01.01.0036	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya	1,174,253,357.00	1,102,006,015.00	93.85
5.1.02.01.01.0037	Belanja Obat-Obatan-Obat	5,133,827,955.00	5,024,610,186.00	97.87
5.1.02.01.01.0038	Belanja Obat-Obatan-Obat-Obatan Lainnya	4,858,084,756.00	4,564,073,577.00	93.95
5.1.02.01.01.0039	Belanja Persediaan untuk Dijual/Diserahkan-Persediaan untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat	0.00	0.00	0.00
5.1.02.01.01.0041	Belanja Persediaan untuk Tujuan Strategis/Berjaga-jaga-Persediaan untuk Tujuan Strategis/Berjaga-jaga	0.00	0.00	0.00
5.1.02.01.01.0042	Belanja Persediaan untuk Tujuan Strategis/Berjaga-jaga-Persediaan untuk Tujuan Strategis/Berjaga-jaga Lainnya	200,022,000.00	196,418,000.00	98.20
5.1.02.01.01.0043	Belanja Natura dan Pakan-Natura	618,319,460.00	578,945,400.00	93.63
5.1.02.01.01.0044	Belanja Natura dan Pakan-Pakan	211,609,200.00	211,299,200.00	99.85
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	8,118,892,420.00	6,521,152,551.00	80.32
5.1.02.01.01.0053	Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu	1,748,155,100.00	1,614,802,693.00	92.37
5.1.02.01.01.0054	Belanja Penambah Daya Tahan Tubuh	3,592,407,192.00	2,146,308,642.00	59.75
5.1.02.01.01.0055	Belanja Makanan dan Minuman pada Fasilitas Pelayanan Urusan Pendidikan	2,542,375,000.00	2,339,744,550.00	92.03
5.1.02.01.01.0056	Belanja Makanan dan Minuman pada Fasilitas Pelayanan Urusan Kesehatan	155,553,900.00	145,538,550.00	93.56
5.1.02.01.01.0058	Belanja Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan	2,464,384,780.00	2,364,366,949.00	95.94
5.1.02.01.01.0059	Belanja Pakaian Dinas KDH dan WKDH	110,000,000.00	74,326,915.00	67.57
5.1.02.01.01.0060	Belanja Pakaian Dinas dan Atribut Pimpinan dan Anggota DPRD	66,300,000.00	66,000,000.00	99.55
5.1.02.01.01.0061	Belanja Pakaian Sipil Harian (PSH)	252,000,000.00	212,040,000.00	84.14
5.1.02.01.01.0062	Belanja Pakaian Sipil Lengkap (PSL)	0.00	0.00	0.00
5.1.02.01.01.0063	Belanja Pakaian Dinas Harian (PDH)	166,500,000.00	136,991,250.00	82.28
5.1.02.01.01.0064	Belanja Pakaian Dinas Lapangan (PDL)	191,200,000.00	186,050,000.00	97.31
5.1.02.01.01.0065	Belanja Pakaian Sipil Resmi (PSR)	141,750,000.00	102,998,750.00	72.66
5.1.02.01.01.0070	Belanja Pakaian Pelatihan Kerja	76,500,000.00	76,500,000.00	100.00
5.1.02.01.01.0074	Belanja Pakaian Adat Daerah	462,250,000.00	453,679,951.00	98.15
5.1.02.01.01.0075	Belanja Pakaian Batik Tradisional	0.00	0.00	0.00
5.1.02.01.01.0076	Belanja Pakaian Olahraga	143,197,845.00	143,005,473.00	99.87
5.1.02.01.02	Belanja Barang Tak Habis Pakai	42,636,577.00	41,574,500.00	97.51
5.1.02.01.02.0003	Belanja Komponen-Komponen Peralatan	26,322,077.00	25,324,500.00	96.21
5.1.02.01.02.0004	Belanja Komponen-Komponen Rambu-Rambu	16,314,500.00	16,250,000.00	99.60
5.1.02.01.04	Belanja Aset Tetap yang Tidak Memenuhi Kriteria Kapitalisasi	308,992,584.00	305,641,650.00	98.92
5.1.02.01.04.0117	Belanja Peralatan dan Mesin-Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Kantor-Alat Kantor Lainnya	195,637,500.00	194,400,000.00	99.37
5.1.02.01.04.0122	Belanja Peralatan dan Mesin-Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Dapur	35,000,000.00	34,997,000.00	99.99

5.1.02.01.04.0405	Belanja Peralatan dan Mesin-Komputer-Komputer Unit- Personal Computer	61,855,084.00	59,744,650.00	96.59
5.1.02.01.04.0409	Belanja Peralatan dan Mesin-Komputer-Peralatan Komputer- Peralatan Personal Computer	16,500,000.00	16,500,000.00	100.00
5.1.02.02	Belanja Jasa	120,572,689,075.00	108,491,959,154.00	89.98
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor	76,529,314,673.00	67,306,431,925.00	87.95
5.1.02.02.01.0002	Belanja Jasa Pengelolaan BMD yang Menghasilkan Pendapatan	129,425,000.00	129,425,000.00	100.00
5.1.02.02.01.0003	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia	2,794,700,000.00	2,099,450,000.00	75.12
5.1.02.02.01.0004	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan	1,075,200,000.00	1,006,660,000.00	93.63
5.1.02.02.01.0005	Honorarium Pemberi Keterangan Ahli, Saksi Ahli, dan Beracara	145,200,000.00	110,400,000.00	76.03
5.1.02.02.01.0007	Honorarium Rohaniwan	282,400,000.00	276,800,000.00	98.02
5.1.02.02.01.0008	Honorarium Tim Penyusunan Jurnal, Buletin, Majalah, Pengelola Teknologi Informasi dan Pengelola Website	723,700,000.00	636,000,000.00	87.88
5.1.02.02.01.0009	Honorarium Penyelenggara Ujian	0.00	0.00	0.00
5.1.02.02.01.0010	Honorarium Penulisan Butir Soal Tingkat Provinsi, Kabupaten atau Kota	3,000,000.00	0.00	0.00
5.1.02.02.01.0011	Honorarium Penyelenggaraan Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan	157,985,000.00	130,850,000.00	82.82
5.1.02.02.01.0012	Honorarium Tim Anggaran Pemerintah Daerah	739,800,000.00	726,400,000.00	98.19
5.1.02.02.01.0013	Belanja Jasa Tenaga Pendidikan	7,683,975,000.00	4,934,482,342.00	64.22
5.1.02.02.01.0014	Belanja Jasa Tenaga Kesehatan	6,191,564,455.00	5,226,207,611.00	84.41
5.1.02.02.01.0015	Belanja Jasa Tenaga Laboratorium	326,458,000.00	228,602,600.00	70.03
5.1.02.02.01.0016	Belanja Jasa Tenaga Penanganan Prasarana dan Sarana Umum	1,203,288,000.00	1,080,924,500.00	89.83
5.1.02.02.01.0017	Belanja Jasa Tenaga Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat	998,000,000.00	994,000,000.00	99.60
5.1.02.02.01.0018	Belanja Jasa Tenaga Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan	2,068,800,000.00	2,048,200,000.00	99.00
5.1.02.02.01.0019	Belanja Jasa Tenaga Penanganan Bencana	119,250,000.00	118,440,000.00	99.32
5.1.02.02.01.0020	Belanja Jasa Tenaga Penanganan Sosial	1,158,000,000.00	1,142,100,000.00	98.63
5.1.02.02.01.0022	Belanja Jasa Tenaga Perhubungan	0.00	0.00	0.00
5.1.02.02.01.0023	Belanja Jasa Tenaga Teknis Pertanian dan Pangan	704,010,000.00	646,210,000.00	91.79
5.1.02.02.01.0024	Belanja Jasa Tenaga Arsip dan Perpustakaan	12,000,000.00	12,000,000.00	100.00
5.1.02.02.01.0025	Belanja Jasa Tenaga Kesenian dan Kebudayaan	63,000,000.00	63,000,000.00	100.00
5.1.02.02.01.0026	Belanja Jasa Tenaga Administrasi	3,843,000,000.00	3,382,488,250.00	88.02
5.1.02.02.01.0027	Belanja Jasa Tenaga Operator Komputer	4,547,620,000.00	4,236,400,000.00	93.16
5.1.02.02.01.0028	Belanja Jasa Tenaga Pelayanan Umum	1,902,250,000.00	1,884,000,000.00	99.04
5.1.02.02.01.0029	Belanja Jasa Tenaga Ahli	1,695,680,816.00	1,483,701,572.00	87.50
5.1.02.02.01.0030	Belanja Jasa Tenaga Kebersihan	8,235,608,000.00	8,160,819,000.00	99.09
5.1.02.02.01.0031	Belanja Jasa Tenaga Keamanan	703,350,000.00	692,250,000.00	98.42
5.1.02.02.01.0033	Belanja Jasa Tenaga Supir	1,689,380,000.00	1,619,991,500.00	95.89
5.1.02.02.01.0034	Belanja Jasa Tenaga Juru Masak	36,000,000.00	36,000,000.00	100.00
5.1.02.02.01.0035	Belanja Jasa Tenaga Teknisi Mekanik dan Listrik	46,000,000.00	43,485,000.00	94.53
5.1.02.02.01.0036	Belanja Jasa Audit/Surveillance ISO	22,000,000.00	22,000,000.00	100.00
5.1.02.02.01.0037	Belanja Jasa Juri Perlombaan/Pertandingan	294,600,000.00	262,960,000.00	89.26
5.1.02.02.01.0039	Belanja Jasa Tenaga Informasi dan Teknologi	781,000,000.00	279,000,000.00	35.72
5.1.02.02.01.0041	Belanja Jasa Pemasangan Instalasi Telepon, Air, dan Listrik	94,493,000.00	40,666,408.00	43.04
5.1.02.02.01.0046	Belanja Jasa Konversi Aplikasi/Sistem Informasi	391,928,150.00	0.00	0.00
5.1.02.02.01.0047	Belanja Jasa Penyelenggaraan Acara	4,942,749,874.00	4,659,991,158.00	94.28
5.1.02.02.01.0048	Belanja Jasa Kontribusi Asosiasi	659,425,000.00	526,825,000.00	79.89
5.1.02.02.01.0049	Belanja Jasa Pencucian Pakaian, Alat Kesenian dan Kebudayaan, serta Alat Rumah Tangga	66,000,000.00	65,970,760.00	99.96
5.1.02.02.01.0050	Belanja Jasa Kalibrasi	103,267,000.00	77,927,057.00	75.46
5.1.02.02.01.0051	Belanja Jasa Pengolahan Sampah	6,072,000.00	4,838,000.00	79.68
5.1.02.02.01.0052	Belanja Jasa Pembersihan, Pengendalian Hama, dan Fumigasi	0.00	0.00	0.00
5.1.02.02.01.0053	Belanja Jasa Pengukuran Tanah	1,500,000.00	1,470,000.00	98.00
5.1.02.02.01.0055	Belanja Jasa Iklan/Reklame, Film, dan Pemotretan	62,250,000.00	14,000,000.00	22.49
5.1.02.02.01.0057	Belanja Jasa Operator Kapal	21,000,000.00	21,000,000.00	100.00
5.1.02.02.01.0059	Belanja Tagihan Telepon	230,749,425.00	172,293,968.00	74.67
5.1.02.02.01.0060	Belanja Tagihan Air	906,887,543.00	667,679,859.00	73.62
5.1.02.02.01.0061	Belanja Tagihan Listrik	13,570,551,021.00	12,636,084,769.00	93.11
5.1.02.02.01.0062	Belanja Langganan Jurnal/Surat Kabar/Majalah	492,680,986.00	458,169,000.00	93.00
5.1.02.02.01.0063	Belanja Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan	2,656,816,204.00	2,541,154,175.00	95.65
5.1.02.02.01.0064	Belanja Paket/Pengiriman	27,500,000.00	6,219,262.00	22.62
5.1.02.02.01.0065	Belanja Penambahan Daya	22,439,000.00	3,825,750.00	17.05
5.1.02.02.01.0067	Belanja Pembayaran Pajak, Bea, dan Perizinan	318,399,199.00	217,510,650.00	68.31
5.1.02.02.01.0071	Belanja Lembur	1,438,362,000.00	1,433,366,000.00	99.65
5.1.02.02.01.0073	Belanja Medical Check Up	60,000,000.00	0.00	0.00
5.1.02.02.01.0077	Belanja Jasa Pelayanan Kesehatan bagi Non ASN	80,000,000.00	44,192,734.00	55.24

5.1.02.02.02	Belanja Iuran Jaminan/Asuransi	37,119,796,999.00	35,469,702,879.00	95.55
5.1.02.02.02.0001	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa	0.00	0.00	0.00
5.1.02.02.02.0002	Belanja Kontribusi Jaminan Kesehatan bagi PBI	34,019,353,600.00	33,332,770,000.00	97.98
5.1.02.02.02.0004	Belanja Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan bagi Peserta PBPU dan BP Kelas 3	879,054,999.00	453,202,799.00	51.56
5.1.02.02.02.0005	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN	1,295,936,652.00	1,070,288,897.00	82.59
5.1.02.02.02.0006	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN	295,819,460.00	234,819,649.00	79.38
5.1.02.02.02.0007	Belanja Iuran Jaminan Kematian bagi Non ASN	111,024,308.00	84,505,114.00	76.11
5.1.02.02.02.0008	Belanja Asuransi Barang Milik Daerah	91,215,980.00	63,183,620.00	69.27
5.1.02.02.02.0012	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Pekerja Rentan	254,400,000.00	137,460,000.00	54.03
5.1.02.02.02.0013	Belanja Iuran Jaminan Kematian bagi Pekerja Rentan	172,992,000.00	93,472,800.00	54.03
5.1.02.02.04	Belanja Sewa Peralatan dan Mesin	256,000,000.00	245,565,000.00	95.92
5.1.02.02.04.0031	Belanja Sewa Peralatan Selam	0.00	0.00	0.00
5.1.02.02.04.0036	Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Penumpang	99,500,000.00	89,900,000.00	90.35
5.1.02.02.04.0037	Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Angkutan Barang	0.00	0.00	0.00
5.1.02.02.04.0410	Belanja Sewa Peralatan Jaringan	156,500,000.00	155,665,000.00	99.47
5.1.02.02.04.0507	Belanja Sewa Peralatan Olahraga Air	0.00	0.00	0.00
5.1.02.02.05	Belanja Sewa Gedung dan Bangunan	148,100,410.00	136,100,000.00	91.90
5.1.02.02.05.0009	Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Pertemuan	112,000,000.00	100,000,000.00	89.29
5.1.02.02.05.0038	Belanja Sewa Rumah Negara Golongan I	12,000,000.00	12,000,000.00	100.00
5.1.02.02.05.0049	Belanja Sewa Rumah Tidak Bersusun	24,100,410.00	24,100,000.00	100.00
5.1.02.02.07	Belanja Sewa Aset Tetap Lainnya	132,750,000.00	105,125,000.00	79.19
5.1.02.02.07.0028	Belanja Sewa Alat Musik	132,750,000.00	105,125,000.00	79.19
5.1.02.02.08	Belanja Jasa Konsultansi Konstruksi	6,146,957,943.00	5,006,004,977.00	81.44
5.1.02.02.08.0001	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Arsitektur-Jasa Nasihat dan Pra Desain Arsitektural	0.00	0.00	0.00
5.1.02.02.08.0002	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Arsitektur-Jasa Desain Arsitektural	3,159,634,593.00	2,362,928,686.00	74.78
5.1.02.02.08.0003	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Arsitektur-Jasa Penilai Perawatan dan Kelayakan Bangunan Gedung	45,000,000.00	44,824,575.00	99.61
5.1.02.02.08.0005	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Arsitektur-Jasa Arsitektur Lainnya	254,875,000.00	148,635,000.00	58.32
5.1.02.02.08.0006	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Rekayasa-Jasa Nasihat dan Konsultansi Rekayasa Teknik	1,295,430,000.00	1,185,335,000.00	91.50
5.1.02.02.08.0007	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Rekayasa-Jasa Desain Rekayasa untuk Konstruksi Pondasi serta Struktur Bangunan	1,800,000.00	600,000.00	33.33
5.1.02.02.08.0008	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Rekayasa-Jasa Desain Rekayasa untuk Pekerjaan Teknik Sipil Air	852,986,900.00	731,440,500.00	85.75
5.1.02.02.08.0009	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Rekayasa-Jasa Desain Rekayasa untuk Pekerjaan Teknik Sipil Transportasi	0.00	0.00	0.00
5.1.02.02.08.0017	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Penataan Ruang-Pengembangan Pemanfaatan Ruang	28,038,000.00	27,866,661.00	99.39
5.1.02.02.08.0018	Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan Arsitektur	50,001,450.00	49,822,355.00	99.64
5.1.02.02.08.0019	Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan Rekayasa-Jasa Pengawas Pekerjaan Konstruksi Bangunan Gedung	440,500,000.00	436,137,300.00	99.01
5.1.02.02.08.0020	Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan Rekayasa-Jasa Pengawas Pekerjaan Konstruksi Teknik Sipil Transportasi	0.00	0.00	0.00
5.1.02.02.08.0023	Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan Penataan Ruang	18,692,000.00	18,414,900.00	98.52
5.1.02.02.08.0034	Belanja Jasa Konsultansi Lainnya-Jasa Manajemen Proyek Terkait Konstruksi Bangunan	0.00	0.00	0.00
5.1.02.02.08.0040	Belanja Jasa Konsultansi Lainnya-Jasa Rekayasa (Engineering) Terpadu	0.00	0.00	0.00
5.1.02.02.09	Belanja Jasa Konsultansi Non Konstruksi	100,000,000.00	99,295,000.00	99.30
5.1.02.02.09.0011	Belanja Jasa Konsultansi Berorientasi Layanan-Jasa Survei	100,000,000.00	99,295,000.00	99.30
5.1.02.02.09.0012	Belanja Jasa Konsultansi Berorientasi Layanan-Jasa Studi Penelitian dan Bantuan Teknik	0.00	0.00	0.00
5.1.02.02.10	Belanja Jasa Ketersediaan Layanan (Availability Payment)	5,000,000.00	2,479,858.00	49.60
5.1.02.02.10.0008	Belanja Jasa Ketersediaan Layanan (Availability Payment) Infrastruktur Telekomunikasi dan Informatika	5,000,000.00	2,479,858.00	49.60
5.1.02.02.11	Belanja Beasiswa Pendidikan PNS	0.00	0.00	0.00
5.1.02.02.11.0002	Belanja Beasiswa Tugas Belajar S2	0.00	0.00	0.00
5.1.02.02.12	Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan	134,769,050.00	121,254,515.00	89.97
5.1.02.02.12.0001	Belanja Kursus Singkat/Pelatihan	70,519,050.00	69,704,515.00	98.84
5.1.02.02.12.0002	Belanja Sosialisasi	30,000,000.00	22,500,000.00	75.00
5.1.02.02.12.0003	Belanja Bimbingan Teknis	28,200,000.00	23,000,000.00	81.56
5.1.02.02.12.0004	Belanja Diklat Kepemimpinan	6,050,000.00	6,050,000.00	100.00

5.1.02.03	Belanja Pemeliharaan	24,066,797,954.00	21,406,429,242.00	88.95
5.1.02.03.02	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	6,864,746,610.00	6,073,987,514.00	88.48
5.1.02.03.02.0012	Belanja Pemeliharaan Alat Besar-Alat Besar Darat-Alat Besar Darat Lainnya	275,000,000.00	271,423,650.00	98.70
5.1.02.03.02.0016	Belanja Pemeliharaan Alat Besar-Alat Besar Apung-Kapal Tarik	35,000,000.00	34,637,000.00	98.96
5.1.02.03.02.0017	Belanja Pemeliharaan Alat Besar-Alat Besar Apung-Mesin Proses Apung	1,600,000.00	0.00	0.00
5.1.02.03.02.0035	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan	1,460,120,000.00	1,305,875,141.00	89.44
5.1.02.03.02.0036	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Penumpang	2,988,530,000.00	2,681,392,607.00	89.72
5.1.02.03.02.0037	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Angkutan Barang	667,980,000.00	637,229,480.00	95.40
5.1.02.03.02.0038	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Beroda Dua	293,900,000.00	250,945,510.00	85.38
5.1.02.03.02.0039	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Beroda Tiga	45,500,000.00	45,305,740.00	99.57
5.1.02.03.02.0049	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Apung Bermotor-Alat Angkutan Apung Bermotor untuk Penumpang	0.00	0.00	0.00
5.1.02.03.02.0056	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Apung Tak Bermotor-Alat Angkutan Apung Tak Bermotor Lainnya	4,000,000.00	0.00	0.00
5.1.02.03.02.0103	Belanja Pemeliharaan Alat Pertanian-Alat Pengolahan-Alat Pengolahan Tanah dan Tanaman	70,450,000.00	70,195,000.00	99.64
5.1.02.03.02.0117	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Kantor-Alat Kantor Lainnya	205,960,785.00	55,644,851.00	27.02
5.1.02.03.02.0118	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Mebel	0.00	0.00	0.00
5.1.02.03.02.0120	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Pembersih	0.00	0.00	0.00
5.1.02.03.02.0121	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Pendingin	306,285,825.00	291,385,000.00	95.13
5.1.02.03.02.0123	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)	56,420,000.00	35,330,000.00	62.62
5.1.02.03.02.0140	Belanja Pemeliharaan Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Alat Komunikasi-Alat Komunikasi Radio HF/FM	10,000,000.00	8,353,315.00	83.53
5.1.02.03.02.0148	Belanja Pemeliharaan Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Alat Komunikasi-Alat Komunikasi Lainnya	0.00	0.00	0.00
5.1.02.03.02.0204	Belanja Pemeliharaan Alat Kedokteran dan Kesehatan-Alat Kedokteran-Alat Kedokteran Umum	0.00	0.00	0.00
5.1.02.03.02.0367	Belanja Pemeliharaan Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Standarisasi Kalibrasi dan Instrumentasi-Alat Laboratorium Standar dan Kalibrator	1,500,000.00	750,000.00	50.00
5.1.02.03.02.0405	Belanja Pemeliharaan Komputer-Komputer Unit-Personal Computer	172,900,000.00	166,894,000.00	96.53
5.1.02.03.02.0406	Belanja Pemeliharaan Komputer-Komputer Unit-Komputer Unit Lainnya	58,000,000.00	53,725,000.00	92.63
5.1.02.03.02.0409	Belanja Pemeliharaan Komputer-Peralatan Komputer-Peralatan Personal Computer	75,100,000.00	74,467,400.00	99.16
5.1.02.03.02.0410	Belanja Pemeliharaan Komputer-Peralatan Komputer-Peralatan Jaringan	136,500,000.00	90,433,820.00	66.25
5.1.02.03.03	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	8,376,651,971.00	7,777,325,763.00	92.85
5.1.02.03.03.0001	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor	2,034,164,206.00	1,642,562,121.00	80.75
5.1.02.03.03.0002	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gudang	20,886,024.00	20,794,350.00	99.56
5.1.02.03.03.0006	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Kesehatan	0.00	0.00	0.00
5.1.02.03.03.0010	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Tempat Pendidikan	6,176,784,946.00	5,969,203,292.00	96.64
5.1.02.03.03.0025	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Terbuka	0.00	0.00	0.00
5.1.02.03.03.0029	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Peternakan/Perikanan	0.00	0.00	0.00
5.1.02.03.03.0032	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Fasilitas Umum	0.00	0.00	0.00
5.1.02.03.03.0036	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Taman	61,000,000.00	60,975,000.00	99.96

5.1.02.03.03.0037	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Tempat Kerja Lainnya	19,016,795.00	18,991,000.00	99.86
5.1.02.03.03.0040	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Tinggal-Rumah Negara Golongan III	0.00	0.00	0.00
5.1.02.03.03.0054	Belanja Pemeliharaan Monumen-Candi/Tugu Peringatan/Prasasti-Candi/Tugu Peringatan/ Prasasti Lainnya	64,800,000.00	64,800,000.00	100.00
5.1.02.03.04	Belanja Pemeliharaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi	8,825,399,373.00	7,555,115,965.00	85.61
5.1.02.03.04.0003	Belanja Pemeliharaan Jalan dan Jembatan-Jalan-Jalan Kabupaten	1,242,012,421.00	1,241,732,595.00	99.98
5.1.02.03.04.0013	Belanja Pemeliharaan Jalan dan Jembatan-Jembatan-Jembatan pada Jalan Kabupaten	1,387,445,604.00	1,387,443,300.00	100.00
5.1.02.03.04.0015	Belanja Pemeliharaan Jalan dan Jembatan-Jembatan-Jembatan pada Jalan Desa	0.00	0.00	0.00
5.1.02.03.04.0031	Belanja Pemeliharaan Bangunan Air-Bangunan Air Irigasi-Bangunan Air Irigasi Lainnya	1,759,210,121.00	1,698,158,884.00	96.53
5.1.02.03.04.0048	Belanja Pemeliharaan Bangunan Air-Bangunan Pengaman Sungai/Pantai dan Penanggulangan Bencana Alam-Bangunan Pengaman Sungai/Pantai dan Penanggulangan Bencana Alam	3,902,110,000.00	2,752,845,426.00	70.55
5.1.02.03.04.0052	Belanja Pemeliharaan Bangunan Air-Bangunan Pengaman Sungai/Pantai dan Penanggulangan Bencana Alam-Bangunan Pengaman Pengamanan Sungai/Pantai	0.00	0.00	0.00
5.1.02.03.04.0069	Belanja Pemeliharaan Bangunan Air-Bangunan Air Kotor-Bangunan Pembawa Air Kotor	157,745,007.00	137,929,940.00	87.44
5.1.02.03.04.0080	Belanja Pemeliharaan Instalasi-Instalasi Air Kotor-Instalasi Air Buangan Domestik	127,376,220.00	96,664,820.00	75.89
5.1.02.03.04.0087	Belanja Pemeliharaan Instalasi-Instalasi Pengolahan Sampah-Instalasi Pengolahan Sampah Lainnya	0.00	0.00	0.00
5.1.02.03.04.0118	Belanja Pemeliharaan Instalasi-Instalasi Lain-Instalasi Lain	0.00	0.00	0.00
5.1.02.03.04.0122	Belanja Pemeliharaan Jaringan-Jaringan Air Minum-Jaringan Sambungan ke Rumah	187,000,000.00	186,750,000.00	99.87
5.1.02.03.04.0123	Belanja Pemeliharaan Jaringan-Jaringan Air Minum-Jaringan Air Minum Lainnya	16,000,000.00	9,895,000.00	61.84
5.1.02.03.04.0126	Belanja Pemeliharaan Jaringan-Jaringan Listrik-Jaringan Listrik Lainnya	46,500,000.00	43,696,000.00	93.97
5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas	76,339,653,003.00	69,702,986,303.00	91.31
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	76,339,653,003.00	69,702,986,303.00	91.31
5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	39,152,839,932.00	37,727,317,639.00	96.36
5.1.02.04.01.0002	Belanja Perjalanan Dinas Tetap	38,916,500.00	28,437,000.00	73.07
5.1.02.04.01.0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	28,393,989,463.00	24,116,863,426.00	84.94
5.1.02.04.01.0004	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota	7,867,468,830.00	6,977,245,850.00	88.68
5.1.02.04.01.0005	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota	886,438,278.00	853,122,388.00	96.24
5.1.02.05	Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	15,988,475,368.00	7,819,386,826.00	48.91
5.1.02.05.01	Belanja Uang yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	13,453,429,968.00	5,494,116,980.00	40.84
5.1.02.05.01.0001	Belanja Hadiah yang Bersifat Perlombaan	875,500,000.00	835,850,000.00	95.47
5.1.02.05.01.0003	Belanja Beasiswa	7,879,500,000.00	0.00	0.00
5.1.02.05.01.0004	Belanja Penanganan Dampak Sosial Kemasyarakatan	4,687,269,968.00	4,647,226,980.00	99.15
5.1.02.05.01.0005	Belanja Transfer Keuangan Daerah dan Desa (TKDD)	0.00	0.00	0.00
5.1.02.05.01.0006	Belanja Bantuan Fasilitas Premi Asuransi Pertanian	11,160,000.00	11,040,000.00	98.92
5.1.02.05.02	Belanja Jasa yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	2,535,045,400.00	2,325,269,846.00	91.72
5.1.02.05.02.0001	Belanja Jasa yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain	2,535,045,400.00	2,325,269,846.00	91.72
5.1.02.88	Belanja Barang dan Jasa BOS	55,508,539,856.00	54,451,967,647.00	98.10
5.1.02.88.88	Belanja Barang dan Jasa BOS	55,508,539,856.00	54,451,967,647.00	98.10
5.1.02.88.88.8888	Belanja Barang dan Jasa BOS	55,508,539,856.00	54,451,967,647.00	98.10
5.1.02.99	Belanja Barang dan Jasa BLUD	93,302,168,802.00	90,084,171,159.16	96.55
5.1.02.99.99	Belanja Barang dan Jasa BLUD	93,302,168,802.00	90,084,171,159.16	96.55
5.1.02.99.99.9999	Belanja Barang dan Jasa BLUD	93,302,168,802.00	90,084,171,159.16	96.55
5.1.05	Belanja Hibah	87,989,353,782.00	86,701,606,147.00	98.54
5.1.05.01	Belanja Hibah kepada Pemerintah Pusat	49,706,263,085.00	49,706,263,085.00	100.00
5.1.05.01.01	Belanja Hibah Uang kepada Pemerintah Pusat	49,706,263,085.00	49,706,263,085.00	100.00
5.1.05.01.01.0001	Belanja Hibah Uang kepada Pemerintah Pusat	49,706,263,085.00	49,706,263,085.00	100.00
5.1.05.01.02	Belanja Hibah Barang kepada Pemerintah Pusat	0.00	0.00	0.00
5.1.05.01.02.0001	Belanja Hibah Barang kepada Pemerintah Pusat	0.00	0.00	0.00
5.1.05.05	Belanja Hibah kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia	23,463,510,036.00	22,415,655,401.00	95.53
5.1.05.05.01	Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan	5,567,024,000.00	5,301,684,000.00	95.23

5.1.05.05.01.0001	Belanja Hibah Uang kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan	2,531,030,000.00	2,380,000,000.00	94.03
5.1.05.05.01.0002	Belanja Hibah Barang kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan	3,035,994,000.00	2,921,684,000.00	96.23
5.1.05.05.02	Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Telah Memiliki Surat Keterangan Terdaftar	1,216,500,000.00	1,207,500,000.00	99.26
5.1.05.05.02.0001	Belanja Hibah Uang kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Telah Memiliki Surat Keterangan Terdaftar	1,216,500,000.00	1,207,500,000.00	99.26
5.1.05.05.02.0002	Belanja Hibah Barang kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Telah Memiliki Surat Keterangan Terdaftar	0.00	0.00	0.00
5.1.05.05.03	Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela Bersifat Sosial Kemasyarakatan	16,369,986,036.00	15,666,471,401.00	95.70
5.1.05.05.03.0001	Belanja Hibah Uang kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela Bersifat Sosial Kemasyarakatan	4,244,045,272.00	4,046,300,000.00	95.34
5.1.05.05.03.0002	Belanja Hibah Barang kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela Bersifat Sosial Kemasyarakatan	12,125,940,764.00	11,620,171,401.00	95.83
5.1.05.05.03.0003	Belanja Hibah Jasa kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela Bersifat Sosial Kemasyarakatan	0.00	0.00	0.00
5.1.05.05.04	Belanja Hibah kepada Koperasi	170,000,000.00	100,000,000.00	58.82
5.1.05.05.04.0001	Belanja Hibah Uang kepada Koperasi	170,000,000.00	100,000,000.00	58.82
5.1.05.05.04.0002	Belanja Hibah Barang kepada Koperasi	0.00	0.00	0.00
5.1.05.05.05	Belanja Hibah kepada Usaha Mikro dan Usaha Kecil	140,000,000.00	140,000,000.00	100.00
5.1.05.05.05.0001	Belanja Hibah Uang kepada Usaha Mikro dan Usaha Kecil	140,000,000.00	140,000,000.00	100.00
5.1.05.07	Belanja Hibah Bantuan Keuangan kepada Partai Politik	1,058,080,661.00	1,058,080,661.00	100.00
5.1.05.07.01	Belanja Hibah Bantuan Keuangan kepada Partai Politik	1,058,080,661.00	1,058,080,661.00	100.00
5.1.05.07.01.0001	Belanja Hibah berupa Bantuan Keuangan kepada Partai Politik	1,058,080,661.00	1,058,080,661.00	100.00
5.1.05.08	Belanja Hibah Dana BOSP	13,761,500,000.00	13,521,607,000.00	98.26
5.1.05.08.02	Belanja Hibah Dana BOSP-BOP PAUD	6,562,800,000.00	6,474,587,000.00	98.66
5.1.05.08.02.0001	Belanja Hibah Dana BOSP-BOP PAUD	6,562,800,000.00	6,474,587,000.00	98.66
5.1.05.08.03	Belanja Hibah Dana BOSP-BOP Kesetaraan	7,198,700,000.00	7,047,020,000.00	97.89
5.1.05.08.03.0001	Belanja Hibah Dana BOSP-BOP Kesetaraan	7,198,700,000.00	7,047,020,000.00	97.89
5.1.06	Belanja Bantuan Sosial	162,500,000.00	158,450,000.00	97.51
5.1.06.01	Belanja Bantuan Sosial kepada Individu	162,500,000.00	158,450,000.00	97.51
5.1.06.01.01	Belanja Bantuan Sosial Uang yang direncanakan kepada Individu	108,500,000.00	108,500,000.00	100.00
5.1.06.01.01.0001	Belanja Bantuan Sosial Uang yang Direncanakan kepada Individu	108,500,000.00	108,500,000.00	100.00
5.1.06.01.02	Belanja Bantuan Sosial Barang yang Direncanakan kepada Individu	54,000,000.00	49,950,000.00	92.50
5.1.06.01.02.0001	Belanja Bantuan Sosial Barang yang Direncanakan kepada Individu	54,000,000.00	49,950,000.00	92.50
5.1.06.02	Belanja Bantuan Sosial kepada Keluarga	0.00	0.00	0.00
5.1.06.02.02	Belanja Bantuan Sosial Barang yang Direncanakan kepada Keluarga	0.00	0.00	0.00
5.1.06.02.02.0001	Belanja Bantuan Sosial Barang yang Direncanakan kepada Keluarga	0.00	0.00	0.00
	JUMLAH BELANJA OPERASI	1,445,720,868,068.80	1,304,348,788,865.16	90.22
5.2	BELANJA MODAL	186,007,938,466.20	172,078,546,250.00	92.51
5.2.01	Belanja Modal Tanah	1,785,114,920.00	722,013,920.00	40.45
5.2.01.01	Belanja Modal Tanah	1,785,114,920.00	722,013,920.00	40.45
5.2.01.01.01	Belanja Modal Tanah Persil	1,785,114,920.00	722,013,920.00	40.45
5.2.01.01.01.0004	Belanja Modal Tanah untuk Bangunan Tempat Kerja	1,316,264,920.00	722,013,920.00	54.85
5.2.01.01.01.0007	Belanja Modal Tanah Persil Lainnya	468,850,000.00	0.00	0.00
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	37,066,108,812.20	33,851,079,267.00	91.33
5.2.02.01	Belanja Modal Alat Besar	5,145,810,000.00	5,091,891,000.00	98.95
5.2.02.01.01	Belanja Modal Alat Besar Darat	5,145,810,000.00	5,091,891,000.00	98.95
5.2.02.01.01.0011	Belanja Modal Mesin Proses	5,145,810,000.00	5,091,891,000.00	98.95
5.2.02.01.03	Belanja Modal Alat Bantu	0.00	0.00	0.00
5.2.02.01.03.0005	Belanja Modal Pompa	0.00	0.00	0.00
5.2.02.02	Belanja Modal Alat Angkutan	8,514,740,450.00	8,327,674,400.00	97.80
5.2.02.02.01	Belanja Modal Alat Angkutan Darat Bermotor	8,202,889,450.00	8,016,574,400.00	97.73
5.2.02.02.01.0001	Belanja Modal Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan	10,000,000.00	10,000,000.00	100.00
5.2.02.02.01.0004	Belanja Modal Kendaraan Bermotor Beroda Dua	1,660,189,450.00	1,605,674,400.00	96.72
5.2.02.02.01.0005	Belanja Modal Kendaraan Bermotor Beroda Tiga	180,000,000.00	162,900,000.00	90.50
5.2.02.02.01.0006	Belanja Modal Kendaraan Bermotor Khusus	5,565,300,000.00	5,523,000,000.00	99.24
5.2.02.02.01.0009	Belanja Modal Alat Angkutan Darat Bermotor Lainnya	787,400,000.00	715,000,000.00	90.81
5.2.02.02.02	Belanja Modal Alat Angkutan Darat Tak Bermotor	311,851,000.00	311,100,000.00	99.76

5.2.02.02.02.0004	Belanja Modal Alat Angkutan Darat Tak Bemotor Lainnya	311,851,000.00	311,100,000.00	99.76
5.2.02.04	Belanja Modal Alat Pertanian	3,552,000.00	0.00	0.00
5.2.02.04.01	Belanja Modal Alat Pengolahan	3,552,000.00	0.00	0.00
5.2.02.04.01.0007	Belanja Modal Alat Pasca Panen	3,552,000.00	0.00	0.00
5.2.02.05	Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga	4,366,665,156.00	4,202,868,487.00	96.25
5.2.02.05.01	Belanja Modal Alat Kantor	581,223,554.00	552,879,000.00	95.12
5.2.02.05.01.0005	Belanja Modal Alat Kantor Lainnya	581,223,554.00	552,879,000.00	95.12
5.2.02.05.02	Belanja Modal Alat Rumah Tangga	3,785,441,602.00	3,649,989,487.00	96.42
5.2.02.05.02.0001	Belanja Modal Mebel	3,573,940,203.00	3,531,282,000.00	98.81
5.2.02.05.02.0004	Belanja Modal Alat Pendingin	90,235,000.00	13,750,000.00	15.24
5.2.02.05.02.0005	Belanja Modal Alat Dapur	0.00	0.00	0.00
5.2.02.05.02.0006	Belanja Modal Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)	114,686,399.00	98,457,487.00	85.85
5.2.02.05.02.0007	Belanja Modal Alat Pemadam Kebakaran	6,580,000.00	6,500,000.00	98.78
5.2.02.05.03	Belanja Modal Meja dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat	0.00	0.00	0.00
5.2.02.05.03.0003	Belanja Modal Kursi Kerja Pejabat	0.00	0.00	0.00
5.2.02.06	Belanja Modal Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar	53,132,012.00	40,059,500.00	75.40
5.2.02.06.01	Belanja Modal Alat Studio	40,146,455.00	40,059,500.00	99.78
5.2.02.06.01.0001	Belanja Modal Peralatan Studio Audio	9,146,455.00	9,100,000.00	99.49
5.2.02.06.01.0002	Belanja Modal Peralatan Studio Video dan Film	31,000,000.00	30,959,500.00	99.87
5.2.02.06.01.0004	Belanja Modal Peralatan Cetak	0.00	0.00	0.00
5.2.02.06.02	Belanja Modal Alat Komunikasi	12,985,557.00	0.00	0.00
5.2.02.06.02.0001	Belanja Modal Alat Komunikasi Telephone	12,985,557.00	0.00	0.00
5.2.02.06.02.0011	Belanja Modal Alat Komunikasi Lainnya	0.00	0.00	0.00
5.2.02.07	Belanja Modal Alat Kedokteran dan Kesehatan	3,489,791,971.00	3,354,395,052.00	96.12
5.2.02.07.01	Belanja Modal Alat Kedokteran	3,460,709,971.00	3,354,395,052.00	96.93
5.2.02.07.01.0001	Belanja Modal Alat Kedokteran Umum	360,709,971.00	352,788,000.00	97.80
5.2.02.07.01.0005	Belanja Modal Alat Kesehatan Kebidanan dan Penyakit Kandungan	100,000,000.00	88,192,000.00	88.19
5.2.02.07.01.0011	Belanja Modal Alat Kedokteran Poliklinik	376,074,483.00	358,661,000.00	95.37
5.2.02.07.01.0012	Belanja Modal Alat Kesehatan Rehabilitasi Medis	255,193,900.00	253,195,000.00	99.22
5.2.02.07.01.0017	Belanja Modal Alat Kedokteran Transfusi Darah	234,623,547.00	229,611,800.00	97.86
5.2.02.07.01.0024	Belanja Modal Alat Kedokteran ICU	1,173,706,100.00	1,139,510,076.00	97.09
5.2.02.07.01.0029	Belanja Modal Alat Kedokteran Lainnya	960,401,970.00	932,437,176.00	97.09
5.2.02.07.02	Belanja Modal Alat Kesehatan Umum	29,082,000.00	0.00	0.00
5.2.02.07.02.0005	Belanja Modal Alat Kesehatan Umum Lainnya	29,082,000.00	0.00	0.00
5.2.02.08	Belanja Modal Alat Laboratorium	4,557,651,318.00	4,480,465,890.00	98.31
5.2.02.08.01	Belanja Modal Unit Alat Laboratorium	45,888,638.00	42,791,890.00	93.25
5.2.02.08.01.0013	Belanja Modal Alat Laboratorium Kimia	45,888,638.00	42,791,890.00	93.25
5.2.02.08.03	Belanja Modal Alat Peraga Praktek Sekolah	3,736,100,000.00	3,724,049,000.00	99.68
5.2.02.08.03.0010	Belanja Modal Alat Peraga Praktek Sekolah Bidang Studi:Kesenian	0.00	0.00	0.00
5.2.02.08.03.0015	Belanja Modal Alat Peraga PAUD/TK	865,000,000.00	861,660,000.00	99.61
5.2.02.08.03.0016	Belanja Modal Alat Peraga Praktik Sekolah Lainnya	2,871,100,000.00	2,862,389,000.00	99.70
5.2.02.08.07	Belanja Modal Alat Laboratorium Lingkungan Hidup	725,007,760.00	708,797,000.00	97.76
5.2.02.08.07.0001	Belanja Modal Alat Laboratorium Kualitas Air dan Tanah	0.00	0.00	0.00
5.2.02.08.07.0004	Belanja Modal Laboratorium Lingkungan	725,007,760.00	708,797,000.00	97.76
5.2.02.08.09	Belanja Modal Alat Laboratorium Standarisasi Kalibrasi dan Instrumentasi	50,654,920.00	4,828,000.00	9.53
5.2.02.08.09.0005	Belanja Modal Alat Laboratorium Tekanan dan Suhu	50,654,920.00	4,828,000.00	9.53
5.2.02.10	Belanja Modal Komputer	2,144,916,143.20	1,970,397,489.00	91.86
5.2.02.10.01	Belanja Modal Komputer Unit	1,509,084,117.00	1,421,393,228.00	94.19
5.2.02.10.01.0001	Belanja Modal Komputer Jaringan	0.00	0.00	0.00
5.2.02.10.01.0002	Belanja Modal Personal Computer	1,330,170,802.00	1,264,893,228.00	95.09
5.2.02.10.01.0003	Belanja Modal Komputer Unit Lainnya	178,913,315.00	156,500,000.00	87.47
5.2.02.10.02	Belanja Modal Peralatan Komputer	635,832,026.20	549,004,261.00	86.34
5.2.02.10.02.0002	Belanja Modal Peralatan Mini Computer	0.00	0.00	0.00
5.2.02.10.02.0003	Belanja Modal Peralatan Personal Computer	457,048,097.20	399,883,491.00	87.49
5.2.02.10.02.0004	Belanja Modal Peralatan Jaringan	9,200,000.00	9,196,350.00	99.96
5.2.02.10.02.0005	Belanja Modal Peralatan Komputer Lainnya	169,583,929.00	139,924,420.00	82.51
5.2.02.11	Belanja Modal Alat Eksplorasi	181,220,116.00	167,317,324.00	92.33
5.2.02.11.02	Belanja Modal Alat Eksplorasi Geofisika	181,220,116.00	167,317,324.00	92.33
5.2.02.11.02.0002	Belanja Modal Elektronik/Electric	181,220,116.00	167,317,324.00	92.33
5.2.02.12	Belanja Modal Alat Pengeboran	0.00	0.00	0.00
5.2.02.12.02	Belanja Modal Alat Pengeboran Non Mesin	0.00	0.00	0.00
5.2.02.12.02.0004	Belanja Modal Peralatan Bantu	0.00	0.00	0.00
5.2.02.13	Belanja Modal Alat Produksi, Pengolahan, dan Pemurnian	636,637,238.00	636,600,000.00	99.99
5.2.02.13.03	Belanja Modal Pengolahan dan Pemurnian	636,637,238.00	636,600,000.00	99.99
5.2.02.13.03.0002	Belanja Modal Alat Pengolahan Air	636,637,238.00	636,600,000.00	99.99
5.2.02.16	Belanja Modal Alat Peraga	0.00	0.00	0.00
5.2.02.16.01	Belanja Modal Alat Peraga Pelatihan dan Percontohan	0.00	0.00	0.00

5.2.02.16.01.0003	Belanja Modal Alat Peraga Pelatihan dan Percontohan Lainnya	0.00	0.00	0.00
5.2.02.18	Belanja Modal Rambu-Rambu	257,379,348.00	256,924,000.00	99.82
5.2.02.18.01	Belanja Modal Rambu-Rambu Lalu Lintas Darat	257,379,348.00	256,924,000.00	99.82
5.2.02.18.01.0001	Belanja Modal Rambu Bersuar	58,500,000.00	58,400,000.00	99.83
5.2.02.18.01.0002	Belanja Modal Rambu Tidak Bersuar	27,000,000.00	27,000,000.00	100.00
5.2.02.18.01.0003	Belanja Modal Rambu-Rambu Lalu Lintas Darat Lainnya	171,879,348.00	171,524,000.00	99.79
5.2.02.19	Belanja Modal Peralatan Olahraga	0.00	0.00	0.00
5.2.02.19.01	Belanja Modal Peralatan Olahraga	0.00	0.00	0.00
5.2.02.19.01.0002	Belanja Modal Peralatan Permainan	0.00	0.00	0.00
5.2.02.88	Belanja Modal Peralatan dan Mesin BOS	5,910,646,388.00	4,106,241,208.00	69.47
5.2.02.88.88	Belanja Modal Peralatan dan Mesin BOS	5,910,646,388.00	4,106,241,208.00	69.47
5.2.02.88.88.8888	Belanja Modal Peralatan dan Mesin BOS	5,910,646,388.00	4,106,241,208.00	69.47
5.2.02.99	Belanja Modal Peralatan dan Mesin BLUD	1,803,966,672.00	1,216,244,917.00	67.42
5.2.02.99.99	Belanja Modal Peralatan dan Mesin BLUD	1,803,966,672.00	1,216,244,917.00	67.42
5.2.02.99.99.9999	Belanja Modal Peralatan dan Mesin BLUD	1,803,966,672.00	1,216,244,917.00	67.42
5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	50,695,911,189.00	48,036,104,682.00	94.75
5.2.03.01	Belanja Modal Bangunan Gedung	50,555,827,339.00	48,036,104,682.00	95.02
5.2.03.01.01	Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja	50,555,827,339.00	48,036,104,682.00	95.02
5.2.03.01.01.0001	Belanja Modal Bangunan Gedung Kantor	1,752,733,602.00	1,726,998,100.00	98.53
5.2.03.01.01.0004	Belanja Modal Bangunan Gedung Instalasi	986,790,000.00	985,500,000.00	99.87
5.2.03.01.01.0006	Belanja Modal Bangunan Kesehatan	23,023,871,800.00	21,833,489,401.00	94.83
5.2.03.01.01.0009	Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Pertemuan	102,675,000.00	74,000,000.00	72.07
5.2.03.01.01.0010	Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Pendidikan	15,568,449,471.00	14,802,175,110.00	95.08
5.2.03.01.01.0012	Belanja Modal Bangunan Gedung Pertokoan/Koperasi/Pasar	204,574,844.00	203,054,100.00	99.26
5.2.03.01.01.0025	Belanja Modal Bangunan Terbuka	191,583,900.00	4,650,000.00	2.43
5.2.03.01.01.0030	Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja Lainnya	0.00	0.00	0.00
5.2.03.01.01.0032	Belanja Modal Bangunan Fasilitas Umum	3,836,287,722.00	3,801,325,721.00	99.09
5.2.03.01.01.0034	Belanja Modal Bangunan Gedung Pabrik	4,387,451,000.00	4,192,065,250.00	95.55
5.2.03.01.01.0036	Belanja Modal Taman	0.00	0.00	0.00
5.2.03.01.01.0037	Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja Lainnya	501,410,000.00	412,847,000.00	82.34
5.2.03.04	Belanja Modal Tugu Titik Kontrol/Pasti	140,083,850.00	0.00	0.00
5.2.03.04.01	Belanja Modal Tugu/Tanda Batas	140,083,850.00	0.00	0.00
5.2.03.04.01.0003	Belanja Modal Pilar/Tugu/Tanda Lainnya	0.00	0.00	0.00
5.2.03.04.01.0004	Belanja Modal Pagar	140,083,850.00	0.00	0.00
5.2.03.99	Belanja Modal Gedung dan Bangunan BLUD	0.00	0.00	0.00
5.2.03.99.99	Belanja Modal Gedung dan Bangunan BLUD	0.00	0.00	0.00
5.2.03.99.99.9999	Belanja Modal Gedung dan Bangunan BLUD	0.00	0.00	0.00
5.2.04	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	87,410,593,789.00	80,657,217,781.00	92.27
5.2.04.01	Belanja Modal Jalan dan Jembatan	71,252,895,734.00	68,179,938,771.00	95.69
5.2.04.01.01	Belanja Modal Jalan	59,782,448,243.00	58,864,979,714.00	98.47
5.2.04.01.01.0003	Belanja Modal Jalan Kabupaten	59,782,448,243.00	58,864,979,714.00	98.47
5.2.04.01.01.0010	Belanja Modal Jalan Lainnya	0.00	0.00	0.00
5.2.04.01.02	Belanja Modal Jembatan	11,470,447,491.00	9,314,959,057.00	81.21
5.2.04.01.02.0003	Belanja Modal Jembatan pada Jalan Kabupaten	11,470,447,491.00	9,314,959,057.00	81.21
5.2.04.02	Belanja Modal Bangunan Air	14,968,391,555.00	11,288,539,510.00	75.42
5.2.04.02.01	Belanja Modal Bangunan Air Irigasi	10,445,311,425.00	6,858,640,011.00	65.66
5.2.04.02.01.0003	Belanja Modal Bangunan Pembawa Irigasi	10,445,311,425.00	6,858,640,011.00	65.66
5.2.04.02.04	Belanja Modal Bangunan Pengaman Sungai/Pantai dan Penanggulangan Bencana Alam	1,834,500,000.00	1,830,708,000.00	99.79
5.2.04.02.04.0001	Belanja Modal Bangunan Pengaman Sungai/Pantai dan Penanggulangan Bencana Alam	706,500,000.00	705,192,000.00	99.81
5.2.04.02.04.0007	Belanja Modal Bangunan Pengaman Sungai/Pantai dan Penanggulangan Bencana Alam Lainnya	1,128,000,000.00	1,125,516,000.00	99.78
5.2.04.02.07	Belanja Modal Bangunan Air Kotor	2,688,580,130.00	2,599,191,499.00	96.68
5.2.04.02.07.0001	Belanja Modal Bangunan Pembawa Air Kotor	2,688,580,130.00	2,599,191,499.00	96.68
5.2.04.03	Belanja Modal Instalasi	1,066,306,500.00	1,066,306,500.00	100.00
5.2.04.03.01	Belanja Modal Instalasi Air Bersih/Air Baku	87,523,500.00	87,523,500.00	100.00
5.2.04.03.01.0005	Belanja Modal Instalasi Air Bersih/Air Baku Lainnya	87,523,500.00	87,523,500.00	100.00
5.2.04.03.05	Belanja Modal Instalasi Pembangkit Listrik	978,783,000.00	978,783,000.00	100.00
5.2.04.03.05.0009	Belanja Modal Instalasi Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS)	978,783,000.00	978,783,000.00	100.00
5.2.04.04	Belanja Modal Jaringan	0.00	0.00	0.00
5.2.04.04.02	Belanja Modal Jaringan Listrik	0.00	0.00	0.00
5.2.04.04.02.0003	Belanja Modal Jaringan Listrik Lainnya	0.00	0.00	0.00
5.2.04.99	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi BLUD	123,000,000.00	122,433,000.00	99.54
5.2.04.99.99	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi BLUD	123,000,000.00	122,433,000.00	99.54
5.2.04.99.99.9999	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi BLUD	123,000,000.00	122,433,000.00	99.54
5.2.05	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	9,050,209,756.00	8,812,130,600.00	97.37
5.2.05.01	Belanja Modal Bahan Perpustakaan	52,250,000.00	52,125,000.00	99.76
5.2.05.01.01	Belanja Modal Bahan Perpustakaan Tercetak	30,000,000.00	30,000,000.00	100.00

5.2.05.01.01.0001	Belanja Modal Buku Umum	30,000,000.00	30,000,000.00	100.00
5.2.05.01.02	Belanja Modal Bahan Perpustakaan Terekam dan Bentuk Mikro	22,250,000.00	22,125,000.00	99.44
5.2.05.01.02.0001	Belanja Modal Audio Visual	22,250,000.00	22,125,000.00	99.44
5.2.05.04	Belanja Modal Biota Perairan	0.00	0.00	0.00
5.2.05.04.01	Belanja Modal Ikan Bersirip (Pisces/Ikan Bersirip)	0.00	0.00	0.00
5.2.05.04.01.0001	Belanja Modal Ikan Budidaya	0.00	0.00	0.00
5.2.05.88	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BOS	8,717,669,020.00	8,480,442,700.00	97.28
5.2.05.88.88	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BOS	8,717,669,020.00	8,480,442,700.00	97.28
5.2.05.88.88.8888	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BOS	8,717,669,020.00	8,480,442,700.00	97.28
5.2.05.89	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BOSP	278,490,736.00	277,762,900.00	99.74
5.2.05.89.01	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BOSP-BOS	278,490,736.00	277,762,900.00	99.74
5.2.05.89.01.0002	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BOSP-BOS Kinerja	278,490,736.00	277,762,900.00	99.74
5.2.05.99	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BLUD	1,800,000.00	1,800,000.00	100.00
5.2.05.99.99	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BLUD	1,800,000.00	1,800,000.00	100.00
5.2.05.99.99.9999	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BLUD	1,800,000.00	1,800,000.00	100.00
	JUMLAH BELANJA MODAL	186,007,938,466.20	172,078,546,250.00	92.51
5.3	BELANJA TIDAK TERDUGA	6,500,000,000.00	2,135,045,328.00	32.85
5.3.01	Belanja Tidak Terduga	6,500,000,000.00	2,135,045,328.00	32.85
5.3.01.01	Belanja Tidak Terduga	6,500,000,000.00	2,135,045,328.00	32.85
5.3.01.01.01	Belanja Tidak Terduga	6,500,000,000.00	2,135,045,328.00	32.85
5.3.01.01.01.0001	Belanja Tidak Terduga	6,500,000,000.00	2,135,045,328.00	32.85
	JUMLAH BELANJA TAK TERDUGA	6,500,000,000.00	2,135,045,328.00	32.85
5.4	BELANJA TRANSFER	265,055,332,633.00	262,522,286,798.00	99.04
5.4.01	Belanja Bagi Hasil	3,683,849,305.00	1,264,203,498.00	34.32
5.4.01.01	Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintahan Kabupaten/Kota dan Desa	3,180,754,155.00	1,195,762,581.00	37.59
5.4.01.01.03	Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintahan Desa	3,180,754,155.00	1,195,762,581.00	37.59
5.4.01.01.03.0001	Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintahan Desa	3,180,754,155.00	1,195,762,581.00	37.59
5.4.01.02	Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah Kabupaten/Kota Kepada Pemerintah Desa	503,095,150.00	68,440,917.00	13.60
5.4.01.02.01	Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah Kabupaten/Kota Kepada Pemerintah Desa	503,095,150.00	68,440,917.00	13.60
5.4.01.02.01.0001	Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah Kabupaten/Kota Kepada Pemerintah Desa	503,095,150.00	68,440,917.00	13.60
5.4.02	Belanja Bantuan Keuangan	261,371,483,328.00	261,258,083,300.00	99.96
5.4.02.05	Belanja Bantuan Keuangan Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota kepada Desa	261,371,483,328.00	261,258,083,300.00	99.96
5.4.02.05.01	Belanja Bantuan Keuangan Umum Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota kepada Desa	260,581,483,328.00	177,241,980,500.00	68.02
5.4.02.05.01.0001	Belanja Bantuan Keuangan Umum Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota kepada Desa	0.00	0.00	0.00
5.4.02.05.01.0003	Belanja Bantuan Keuangan Umum Kabupaten/Kota kepada Desa	260,581,483,328.00	177,241,980,500.00	68.02
5.4.02.05.02	Belanja Bantuan Keuangan Khusus Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota kepada Desa	790,000,000.00	84,016,102,800.00	10,634.95
5.4.02.05.02.0001	Belanja Bantuan Keuangan Khusus Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota kepada Desa	0.00	0.00	0.00
5.4.02.05.02.0003	Belanja Bantuan Keuangan Khusus Kabupaten/Kota kepada Desa	790,000,000.00	84,016,102,800.00	10,634.95
	JUMLAH BELANJA TRANSFER	265,055,332,633.00	262,522,286,798.00	99.04
	JUMLAH BELANJA	1,903,284,139,168.00	1,741,084,667,241.16	91.48
	SURPLUS/DEFISIT	(122,021,955,015.00)	(50,200,153,363.28)	41.14
6	PEMBIAYAAN DAERAH	122,021,955,015.00	122,246,955,015.36	100.18
6.1	PENERIMAAN PEMBIAYAAN	129,310,022,062.00	129,310,022,062.36	100.00
6.1.01	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	129,310,022,062.00	129,310,022,062.36	100.00
6.1.01.07	Sisa Dana Akibat Tidak Tercapainya Capaian Target Kinerja dan Sisa Dana Pengeluaran Pembiayaan	129,310,022,062.00	129,310,022,062.36	100.00
6.1.01.07.01	Sisa Dana Akibat Tidak Tercapainya Capaian Target Kinerja	129,310,022,062.00	129,310,022,062.36	100.00
6.1.01.07.01.0001	Sisa Dana Akibat Tidak Tercapainya Capaian Target Kinerja	129,310,022,062.00	129,310,022,062.36	100.00
	JUMLAH PENERIMAAN PEMBIAYAAN	129,310,022,062.00	129,310,022,062.36	100.00
6.2	PENGELUARAN PEMBIAYAAN	7,288,067,047.00	7,063,067,047.00	96.91
6.2.02	Penyertaan Modal Daerah	7,288,067,047.00	7,063,067,047.00	96.91
6.2.02.02	Penyertaan Modal Daerah pada Badan Usaha Milik Daerah (BUMD)	7,288,067,047.00	7,063,067,047.00	96.91

6.2.02.02.01	Penyertaan Modal Daerah pada BUMD	7,288,067,047.00	7,063,067,047.00	96.91
6.2.02.02.01.0001	Penyertaan Modal Daerah pada BUMD	7,288,067,047.00	7,063,067,047.00	96.91
	JUMLAH PENGELUARAN PEMBIAYAAN	7,288,067,047.00	7,063,067,047.00	96.91
	PEMBIAYAAN NETTO	122,021,955,015.00	122,246,955,015.36	100.18
	SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN	0.00	72,046,801,652.08	0.00

Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan
Ringkasan Anggaran dan Realisasi Pendapatan per SKPD
Tahun Anggaran 2024

NO	SKPD	ANGGARAN PENDAPATAN	REALISASI PENDAPATAN
1	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	-	-
2	Dinas Kesehatan	123,927,657,442.00	108,088,150,812.00
3	Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran	-	-
4	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan	-	-
5	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	-	-
6	Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil	-	-
7	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendali	-	-
8	Dinas Perhubungan	545,000,000.00	49,688,000.00
9	Dinas Komunikasi dan Informatika	1,200,000.00	-
10	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu P	-	-
11	Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga	2,500,000,000.00	429,860,000.00
12	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan	-	-
13	Inspektorat Daerah	-	-
14	Badan Perencanaan Daerah, Penelitian dan Pengembang	-	-
15	Badan Kepegawaian Dan Pengembangan Sumber Daya M	1,200,000.00	-
16	Sekretariat Daerah	3,600,000.00	-
17	Sekretariat DPRD	-	-
18	Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Dae	1,652,403,407,211.00	1,581,451,368,875.88
19	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PU)	606,800,000.00	486,550,690.00
20	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan dan Lingkungan Hidup	630,128,000.00	139,788,500.00
21	Dinas Pertanian	24,200,000.00	8,700,000.00
22	Dinas Koperasi, Usaha Kecil Mikro dan Tenaga Kerja	13,200,000.00	-
23	Dinas Perikanan dan Pangan	10,000,000.00	3,500,000.00
24	Dinas Perdagangan dan Transmigrasi	581,391,500.00	226,907,000.00
25	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	-	-
26	Kecamatan Koto XI Tarusan	2,400,000.00	-
27	Kecamatan Bayang	-	-
28	Kecamatan Bayang Utara	1,200,000.00	-
29	Kecamatan IV Jurai	-	-
30	Kecamatan Batang Kapas	1,200,000.00	-
31	Kecamatan Sutera	1,200,000.00	-
32	Kecamatan Lengayang	1,200,000.00	-
33	Kecamatan Ranah Pesisir	1,200,000.00	-
34	Kecamatan Linggo Sari Baganti	1,200,000.00	-
35	Kecamatan Pancung Soal	1,200,000.00	-
36	Kecamatan Air Pura	1,200,000.00	-
37	Kecamatan Basa Ampek Balai Tapan	1,200,000.00	-
38	Kecamatan Ranah Ampek Hulu Tapan	-	-
39	Kecamatan Lunang	1,200,000.00	-
40	Kecamatan Silaut	-	-
TOTAL		1,781,262,184,153.00	1,690,884,513,877.88

Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan
Rekapitulasi - Belanja per SKPD
Tahun Anggaran 2024

NO	SKPD	ANGGARAN BELANJA	REALISASI BELANJA
1	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	697,040,995,348.00	638,277,862,824.00
2	Dinas Kesehatan	335,591,670,577.00	312,699,177,394.16
3	Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran	8,785,266,423.00	8,334,528,970.00
4	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	8,624,917,810.00	7,925,280,425.00
5	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	5,918,275,394.00	5,529,437,010.00
6	Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil	4,910,773,617.00	4,519,933,798.00
7	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan	13,357,074,145.00	12,060,667,517.00
8	Dinas Perhubungan	16,016,351,962.00	15,334,923,967.00
9	Dinas Komunikasi dan Informatika	8,230,341,487.00	7,602,420,051.00
10	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	4,718,392,580.00	4,143,310,584.00
11	Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga	14,347,682,036.00	13,665,800,204.00
12	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan	4,053,671,953.00	3,922,499,375.00
13	Inspektorat Daerah	9,238,547,647.00	8,434,877,591.00
14	Badan Perencanaan Daerah, Penelitian dan Pengembangan	7,180,816,750.00	6,220,136,572.00
15	Badan Kepegawaian Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	5,846,945,390.00	5,635,374,890.00
16	Sekretariat Daerah	29,067,728,420.00	27,502,777,913.00
17	Sekretariat DPRD	54,257,909,500.00	52,639,762,048.00
18	Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah	365,016,408,644.00	319,800,487,632.00
19	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	124,415,476,667.00	112,903,170,986.00
20	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan dan Lingkungan Hidup	23,977,306,228.00	22,694,687,308.00
21	Dinas Pertanian	35,104,880,696.00	30,070,325,143.00
22	Dinas Koperasi, Usaha Kecil Mikro dan Tenaga Kerja	6,791,000,515.00	6,119,986,725.00
23	Dinas Perikanan dan Pangan	11,072,645,124.00	10,437,978,315.00
24	Dinas Perdagangan dan Transmigrasi	18,443,210,960.00	17,714,964,499.00
25	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	55,211,386,181.00	54,884,675,279.00
26	Kecamatan Koto XI Tarusan	2,656,917,207.00	2,382,256,921.00
27	Kecamatan Bayang	3,032,126,365.00	2,903,131,881.00
28	Kecamatan Bayang Utara	2,137,961,419.00	1,957,593,157.00
29	Kecamatan IV Jurai	2,960,404,913.00	2,299,717,821.00
30	Kecamatan Batang Kapas	2,310,967,934.00	2,080,861,847.00
31	Kecamatan Sutera	3,259,283,636.00	2,871,511,371.00
32	Kecamatan Lengayang	2,387,996,470.00	2,155,529,289.00
33	Kecamatan Ranah Pesisir	2,312,006,413.00	2,122,941,679.00
34	Kecamatan Linggo Sari Baganti	2,172,148,340.00	1,950,225,467.00
35	Kecamatan Pancung Soal	2,216,452,858.00	2,000,192,294.00
36	Kecamatan Air Pura	1,928,663,897.00	1,719,074,107.00
37	Kecamatan Basa Ampek Balai Tapan	2,338,387,175.00	1,955,134,073.00
38	Kecamatan Ranah Ampek Hulu Tapan	2,075,968,135.00	1,762,476,039.00
39	Kecamatan Lunang	1,992,737,013.00	1,785,904,611.00
40	Kecamatan Silaut	2,282,441,339.00	2,063,069,664.00
TOTAL		1,903,284,139,168.00	1,741,084,667,241.16

Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan
Rekapitulasi - Belanja Operasi per SKPD
Tahun Anggaran 2024

NO	SKPD	ANGGARAN BELANJA OPERASI	REALISASI BELANJA OPERASI
1	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	659,883,563,088.00	603,991,799,906.00
2	Dinas Kesehatan	295,588,315,066.00	274,886,614,604.16
3	Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran	8,785,266,423.00	8,334,528,970.00
4	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	8,235,604,923.00	7,545,251,025.00
5	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	5,918,275,394.00	5,529,437,010.00
6	Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil	4,835,819,817.00	4,452,841,798.00
7	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan KB	13,266,697,931.00	11,976,447,517.00
8	Dinas Perhubungan	15,758,972,614.00	15,077,999,967.00
9	Dinas Komunikasi dan Informatika	8,146,126,564.00	7,518,350,051.00
10	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	4,684,982,245.00	4,110,794,234.00
11	Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga	10,384,863,154.00	9,834,109,483.00
12	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan	4,053,671,953.00	3,922,499,375.00
13	Inspektorat Daerah	9,222,386,047.00	8,419,077,591.00
14	Badan Perencanaan Daerah, Penelitian dan Pengembangan	7,114,310,158.00	6,160,919,792.00
15	Badan Kepegawaian Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	5,832,073,155.00	5,624,421,890.00
16	Sekretariat Daerah	28,962,151,947.00	27,401,871,311.00
17	Sekretariat DPRD	53,980,160,045.00	52,382,274,561.00
18	Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah	93,227,200,404.00	54,917,730,506.00
19	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	34,850,404,249.80	31,073,361,105.00
20	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan dan Lingkungan Hidup	21,539,894,773.00	20,742,598,418.00
21	Dinas Pertanian	34,464,453,075.00	29,537,338,143.00
22	Dinas Koperasi, Usaha Kecil Mikro dan Tenaga Kerja	6,649,536,444.00	5,996,341,725.00
23	Dinas Perikanan dan Pangan	11,047,609,074.00	10,415,178,315.00
24	Dinas Perdagangan dan Transmigrasi	8,679,675,116.00	8,202,254,149.00
25	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	55,064,760,496.00	54,743,020,688.00
26	Kecamatan Koto XI Tarusan	2,611,321,227.00	2,341,229,421.00
27	Kecamatan Bayang	3,014,953,965.00	2,885,959,481.00
28	Kecamatan Bayang Utara	2,128,115,983.00	1,948,133,157.00
29	Kecamatan IV Jurai	2,927,218,799.00	2,269,335,173.00
30	Kecamatan Batang Kapas	2,283,741,727.00	2,058,061,847.00
31	Kecamatan Sutera	3,192,683,636.00	2,807,861,371.00
32	Kecamatan Lengayang	2,387,996,470.00	2,155,529,289.00
33	Kecamatan Ranah Pesisir	2,257,437,113.00	2,068,719,141.00
34	Kecamatan Linggo Sari Baganti	2,164,788,340.00	1,942,865,467.00
35	Kecamatan Pancung Soal	2,192,593,867.00	1,978,234,185.00
36	Kecamatan Air Pura	1,890,078,064.00	1,687,524,107.00
37	Kecamatan Basa Ampek Balai Tapan	2,319,156,758.00	1,936,334,073.00
38	Kecamatan Ranah Ampek Hulu Tapan	2,009,852,992.00	1,727,686,039.00
39	Kecamatan Lunang	1,950,892,899.00	1,745,604,611.00
40	Kecamatan Silaut	2,213,262,073.00	1,998,649,369.00
TOTAL		1,445,720,868,068.80	1,304,348,788,865.16

Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan
Rekapitulasi - Belanja Modal per SKPD
Tahun Anggaran 2024

NO	SKPD	ANGGARAN BELANJA MODAL	REALISASI BELANJA MODAL
1	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	37,157,432,260.00	34,286,062,918.00
2	Dinas Kesehatan	40,003,355,511.00	37,812,562,790.00
3	Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran	-	-
4	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	389,312,887.00	380,029,400.00
5	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	-	-
6	Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil	74,953,800.00	67,092,000.00
7	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan KB	90,376,214.00	84,220,000.00
8	Dinas Perhubungan	257,379,348.00	256,924,000.00
9	Dinas Komunikasi dan Informatika	84,214,923.00	84,070,000.00
10	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	33,410,335.00	32,516,350.00
11	Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga	3,962,818,882.00	3,831,690,721.00
12	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan	-	-
13	Inspektorat Daerah	16,161,600.00	15,800,000.00
14	Badan Perencanaan Daerah, Penelitian dan Pengembangan	66,506,592.00	59,216,780.00
15	Badan Kepegawaian Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	14,872,235.00	10,953,000.00
16	Sekretariat Daerah	105,576,473.00	100,906,602.00
17	Sekretariat DPRD	277,749,455.00	257,487,487.00
18	Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah	233,875,607.00	225,425,000.00
19	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	89,565,072,417.20	81,829,809,881.00
20	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan dan Lingkungan Hidup	2,437,411,455.00	1,952,088,890.00
21	Dinas Pertanian	640,427,621.00	532,987,000.00
22	Dinas Koperasi, Usaha Kecil Mikro dan Tenaga Kerja	141,464,071.00	123,645,000.00
23	Dinas Perikanan dan Pangan	25,036,050.00	22,800,000.00
24	Dinas Perdagangan dan Transmigrasi	9,763,535,844.00	9,512,710,350.00
25	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	146,625,685.00	141,654,591.00
26	Kecamatan Koto XI Tarusan	45,595,980.00	41,027,500.00
27	Kecamatan Bayang	17,172,400.00	17,172,400.00
28	Kecamatan Bayang Utara	9,845,436.00	9,460,000.00
29	Kecamatan IV Jurai	33,186,114.00	30,382,648.00
30	Kecamatan Batang Kapas	27,226,207.00	22,800,000.00
31	Kecamatan Sutera	66,600,000.00	63,650,000.00
32	Kecamatan Lengayang	-	-
33	Kecamatan Ranah Pesisir	54,569,300.00	54,222,538.00
34	Kecamatan Linggo Sari Baganti	7,360,000.00	7,360,000.00
35	Kecamatan Pancung Soal	23,858,991.00	21,958,109.00
36	Kecamatan Air Pura	38,585,833.00	31,550,000.00
37	Kecamatan Basa Ampek Balai Tapan	19,230,417.00	18,800,000.00
38	Kecamatan Ranah Ampek Hulu Tapan	66,115,143.00	34,790,000.00
39	Kecamatan Lunang	41,844,114.00	40,300,000.00
40	Kecamatan Silaut	69,179,266.00	64,420,295.00
TOTAL		186,007,938,466	172,078,546,250

LAPORAN FUNSIONAL BLUD PUSKESMAS PER 31 DESEMBER 2024

NO	PUSKESMAS	PENDAPATAN TA 2024	SILPA 2023	TOTAL	BELANJA				TOTAL BELANJA	SALDO KAS
					PEGAWAI	BARJAS	MODAL			
							Peralatan Mesin	Modal Lainnya		
1	2	3	4	5	6	7	8		9	10
1	Puskesmas Air Haji	3,037,135,688.00	326,902,720.00	3,364,038,408.00	1,650,605,760.00	1,136,313,305.00	18,503,700		2,805,422,765.00	558,615,643.00
2	Puskesmas Air Pura	827,524,143.00	142,664,485.00	970,188,628.00	492,390,729.00	374,926,406.00	10,984,000		878,301,135.00	91,887,493.00
3	Puskesmas Asam Kumbang	623,798,725.00	127,440,882.00	751,239,607.00	429,262,122.00	238,975,394.00	28,957,207		697,194,723.00	54,044,884.00
4	Puskesmas Balai Selasa	2,552,107,270.00	459,972,639.00	3,012,079,909.00	1,525,729,088.00	1,093,990,854.00	39,000,000		2,658,719,942.00	353,359,967.00
5	Puskesmas Barung Barung Belantai	745,695,334.00	42,558,463.00	788,253,797.00	459,998,673.00	285,150,484.00			745,149,157.00	43,104,640.00
6	Puskesmas Inderapura	1,744,825,100.00	215,303,565.00	1,960,128,665.00	1,045,309,819.00	746,619,886.00	49,850,000		1,841,779,705.00	118,348,960.00
7	Puskesmas Kambang	3,010,910,192.00	346,961,615.00	3,357,871,807.00	1,812,688,463.00	1,299,435,866.00	55,655,000		3,167,779,329.00	190,092,478.00
8	Puskesmas Koto Baru	928,708,498.00	31,252,300.00	959,960,798.00	587,382,918.00	268,621,092.00	23,150,000		879,154,010.00	80,806,788.00
9	Puskesmas Koto Berapak	1,282,241,672.00	110,695,603.00	1,392,937,275.00	753,123,598.00	509,917,997.00	61,360,600		1,324,402,195.00	68,535,080.00
10	Puskesmas IV Koto Mudik	604,091,814.00	115,878,767.00	719,970,581.00	400,685,281.00	295,563,478.00		1,800,000.00	698,048,759.00	21,921,822.00
11	Puskesmas Lumpo	741,281,623.00	85,965,969.00	827,247,592.00	559,805,311.00	198,810,679.00	34,900,000		793,515,990.00	33,731,602.00
12	Puskesmas Pasar Baru	1,456,562,890.00	148,914,851.00	1,605,477,741.00	835,483,887.00	497,833,472.00	58,442,074		1,391,759,433.00	213,718,308.00
13	Puskesmas Pasar Kuok	1,572,387,050.00	232,562,105.00	1,804,949,155.00	1,027,682,503.00	583,416,008.00	48,992,250		1,660,090,761.00	144,858,394.00
14	Puskesmas Ranah Ampek Hulu	647,840,195.00	131,396,815.00	779,237,010.00	382,401,028.00	240,809,547.00			623,210,575.00	156,026,435.00
15	Puskesmas Salido	1,843,359,673.00	30,419,667.00	1,873,779,340.00	1,158,522,779.00	554,183,539.00	21,747,000		1,734,453,318.00	139,326,022.00
16	Puskesmas Surantih	2,877,153,150.00	316,219,432.40	3,193,372,582.40	1,607,020,701.00	1,423,375,531.16	31,006,100		3,061,402,332.16	131,970,250.24
17	Puskesmas Tanjung Beringin	1,325,731,370.00	44,980,176.00	1,370,711,546.00	612,413,754.00	473,232,578.00			1,085,646,332.00	285,065,214.00
18	Puskesmas Tanjung Makmur	1,204,207,903.00	97,237,518.40	1,301,445,421.40	626,959,324.00	525,876,717.00	43,700,000		1,196,536,041.00	104,909,380.40
19	Puskesmas Tapan	1,103,272,167.00	125,450,292.00	1,228,722,459.00	718,169,973.00	406,853,880.00			1,125,023,853.00	103,698,606.00
20	Puskesmas Tarusan	1,928,432,255.00	186,302,682.55	2,114,734,937.55	1,166,774,773.00	828,374,885.00	49,270,000		2,044,419,658.00	70,315,279.55
JUMLAH		30,057,266,712.00	3,319,080,547.35	33,376,347,259.35	17,852,410,484.00	11,982,281,598.16	575,517,931.00	1,800,000.00	30,412,010,013.16	2,964,337,246.19

KABUPATEN PESISIR SELATAN
REKAPITULASI BEBAN - LO
TAHUN ANGGARAN 2024

NO	SKPD	2024	2023
1	2	3	4
1	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	35,774,840,468	21,379,603,154
2	Dinas Kesehatan	12,458,124,701	10,522,262,220
3	Rumah Sakit Umum Daerah	14,066,069,477	13,669,847,800
4	Dinas Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran	122,829,142	165,726,098
5	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	164,223,195	47,366,245
6	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	1,305,547,313	1,259,081,196
7	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	181,537,492	447,313,280
8	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	393,389,574	522,767,321
9	Dinas Perhubungan	1,245,407,351	2,995,730,665
10	Dinas Komunikasi dan Informatika	368,315,632	727,616,313
11	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	345,746,442	366,019,669
12	Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga	1,888,651,399	1,746,143,127
13	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan	559,321,217	557,462,849
14	Inspektorat Daerah	69,971,749	91,718,311
15	Badan Perencanaan Daerah, Penelitian dan Pengembangan	275,609,999	321,622,910
16	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	73,299,202	107,769,529
17	Sekretariat Daerah	1,104,290,568	2,047,762,188
18	Sekretariat DPRD	529,174,303	817,374,553
19	Badan Pengelola Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah	- 166,157,065,007	- 162,593,180,058
20	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	101,835,918,380	96,512,877,667
21	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan dan Lingkungan Hidup	6,094,225,800	4,062,337,350
22	Dinas Pertanian	2,121,091,755	2,363,348,795
23	Dinas Koperasi, Usaha Kecil Mikro dan Tenaga Kerja	1,301,397,967	228,949,224
24	Dinas Perikanan dan Pangan	858,712,713	430,660,913
25	Dinas Perdagangan dan Transmigrasi	10,207,383,053	10,032,569,040
26	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	103,124,381	48,711,262
27	Kecamatan Koto IX Tarusan	- 108,807,077	39,617,949
28	Kecamatan Bayang	86,652,067	105,191,325
29	Kecamatan Bayang Utara	19,628,697	- 55,548,703
30	Kecamatan IV Jurai	41,588,719	46,486,985

31	Kecamatan Batang Kapas	58,539,270	93,562,384
32	Kecamatan Sutera	61,204,449	36,221,639
33	Kecamatan Lengayang	58,447,899	76,301,537
34	Kecamatan Ranah Pesisir	57,844,995	64,783,796
35	Kecamatan Linggo Sari Baganti	11,918,378	35,301,373
36	Kecamatan Pancung Soal	59,888,159	72,261,886
37	Kecamatan Air Pura	40,982,377	65,823,280
38	Kecamatan Basa IV Balai Tapan	8,768,304	39,726,562
39	Kecamatan Ranah Ampek Hulu Tapan	95,027,846	114,789,927
40	Kecamatan Lunang	45,373,649	44,412,867
41	Kecamatan Silaut	58,164,538	88,408,716
42	Pengelola Barang Milik Daerah	130,487,281	242,302,381
Jumlah		28,016,847,817	9,989,105,523.83

KABUPATEN PESISIR SELATAN
RINCIAN BEBAN - LO
TAHUN ANGGARAN 2024

No	SKPD	Beban Pegawai			
		+	-	SUM	Keterangan
1	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	23,501,470,300.00	10,691,581,000.00	12,809,889,300.00	
2	Dinas Kesehatan	345,556,250.00	314,123,434.00	31,432,816.00	
3	Rumah Sakit Umum Daerah	-	-	-	
4	Dinas Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran	-	-	-	
5	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan	-	-	-	
6	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	-	-	-	
7	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	-	-	-	
8	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian	-	-	-	
9	Dinas Perhubungan	-	-	-	
10	Dinas Komunikasi dan Informatika	-	-	-	
11	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	-	-	-	
12	Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga	2,812,500.00	-	2,812,500.00	
13	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan	-	-	-	
14	Inspektorat Daerah	-	-	-	
15	Badan Perencanaan Daerah, Penelitian dan Pengembangan	-	-	-	
16	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	-	-	-	
17	Sekretariat Daerah	-	-	-	
18	Sekretariat DPRD	52,551,450.00	-	52,551,450.00	Kekurangan honor DPRD bulan des 2024 + kekurangan tunjangan komunikasi insentif DPRD bln des 2024
19	Badan Pengelola Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah	-	-	-	
20	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	-	-	-	
21	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan	-	-	-	
22	Dinas Pertanian	-	2,550,000.00	- 2,550,000.00	Reklas+ Barjas
23	Dinas Koperasi, Usaha Kecil Mikro dan Tenaga Kerja	-	-	-	
24	Dinas Perikanan dan Pangan	-	-	-	
25	Dinas Perdagangan dan Transmigrasi	4,125,000.00	9,900,000.00	- 5,775,000.00	
26	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	-	-	-	
27	Kecamatan Koto IX Tarusan	-	-	-	
28	Kecamatan Bavang	-	-	-	
29	Kecamatan Bavang Utara	-	-	-	
30	Kecamatan IV Jurai	-	-	-	
31	Kecamatan Batang Kapas	-	-	-	
32	Kecamatan Sutera	-	-	-	
33	Kecamatan Lengavang	-	-	-	
34	Kecamatan Ranah Pesisir	-	-	-	
35	Kecamatan Linggo Sari Baganti	-	-	-	
36	Kecamatan Pancung Soal	-	-	-	
37	Kecamatan Air Pura	-	-	-	
38	Kecamatan Basa IV Balai Tapan	-	-	-	
39	Kecamatan Ranah Ampek Hulu Tapan	-	-	-	
40	Kecamatan Lunang	-	-	-	
41	Kecamatan Silaut	-	-	-	
42	PPKD	-	-	-	
Jumlah		23,906,515,500.00	11,018,154,434.00	12,888,361,066.00	

No	SKPD	Beban Persediaan			
		+	-	SUM	Keterangan
1	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	1,610,441,650.00	932,000.00	1,609,509,650.00	Persediaan 2024 dan 2023
2	Dinas Kesehatan	10,312,346,556.40	20,807,060,491.16	10,494,713,934.76	Persediaan 2024 dan 2023
3	Rumah Sakit Umum Daerah	5,176,212,956.00	51,530,017,038.00	46,353,804,082.00	
4	Dinas Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran	13,357,500.00	13,357,500.00	-	
5	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan	6,840,000.00	-	6,840,000.00	-
6	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	-	-	-	-
7	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	201,253,000.00	136,450,000.00	64,803,000.00	
8	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian	23,532,887.00	54,332,386.00	30,799,499.00	
9	Dinas Perhubungan	603,853,000.00	351,091,249.00	252,761,751.00	
10	Dinas Komunikasi dan Informatika	16,156,206.00	16,156,206.00	-	
11	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	-	-	-	
12	Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga	-	-	-	
13	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan	-	-	-	
14	Inspektorat Daerah	-	-	-	
15	Badan Perencanaan Daerah, Penelitian dan Pengembangan	2,698,200.00	1,394,000.00	1,304,200.00	
16	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	8,299,445.00	8,299,445.00	-	
17	Sekretariat Daerah	23,914,952.00	42,099,000.00	18,184,048.00	
18	Sekretariat DPRD	28,679,712.00	-	28,679,712.00	
19	Badan Pengelola Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah	129,099,175.00	149,213,319.00	20,114,144.00	
20	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	11,746,822,935.00	9,464,726,106.00	2,282,096,829.00	
21	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan	220,261,425.00	97,390,664.00	122,870,761.00	
22	Dinas Pertanian	175,412,402.00	194,107,453.90	18,695,051.90	
23	Dinas Koperasi, Usaha Kecil Mikro dan Tenaga Kerja	31,126,240.00	1,889,999.00	29,236,241.00	
24	Dinas Perikanan dan Pangan	590,882,835.00	178,071,249.00	412,811,586.00	
25	Dinas Perdagangan dan Transmigrasi	42,692,863.00	-	42,692,863.00	
26	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	-	-	-	
27	Kecamatan Koto IX Tarusan	131,889,208.00	-	131,889,208.00	
28	Kecamatan Bayang	-	-	-	
29	Kecamatan Bayang Utara	-	52,270,000.00	52,270,000.00	
30	Kecamatan IV Jurai	-	-	-	
31	Kecamatan Batang Kapas	148,086,687.00	-	148,086,687.00	
32	Kecamatan Sutera	20,102,000.00	8,543,000.00	11,559,000.00	
33	Kecamatan Lengayang	-	-	-	
34	Kecamatan Ranah Pesisir	3,000.00	20,462,188.00	20,459,188.00	
35	Kecamatan Linggo Sari Baganti	-	25,360,650.00	25,360,650.00	
36	Kecamatan Pancung Soal	-	12,739,415.00	12,739,415.00	
37	Kecamatan Air Pura	-	-	-	
38	Kecamatan Basa IV Balai Tapan	-	15,950,000.00	15,950,000.00	
39	Kecamatan Ranah Ampek Hulu Tapan	13,290,000.00	-	13,290,000.00	
40	Kecamatan Lunang	-	8,214,000.00	8,214,000.00	
41	Kecamatan Silaut	-	14,430,000.00	14,430,000.00	
42	PPKD	-	-	-	
Jumlah		31,277,254,834.40	83,204,557,359.06	51,927,302,524.66	

No	SKPD	Beban Jasa			
		+	-	SUM	Keterangan
1	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	3,931,500.00	7,528,500,188.00	- 7,524,568,688.00	
2	Dinas Kesehatan	9,768,998,941.61	3,555,135,082.00	- 6,213,863,859.61	
3	Rumah Sakit Umum Daerah	59,165,590,481.00	13,639,140,389.00	- 45,526,450,092.00	
4	Dinas Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran	2,183,500.00	5,436,802.00	- 3,253,302.00	
5	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan	162,000.00	-	- 162,000.00	
6	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	744,000.00	1,114,000.00	- 370,000.00	
7	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	414,400.00	6,389,491.00	- 5,975,091.00	
8	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian	462,600.00	273,800.00	- 188,800.00	
9	Dinas Perhubungan	27,000,000.00	10,000,000.00	- 17,000,000.00	
10	Dinas Komunikasi dan Informatika	-	2,453,573.00	- 2,453,573.00	
11	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	445,500.00	-	- 445,500.00	
12	Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga	-	103,960,000.00	- 103,960,000.00	
13	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan	18,512,500.00	1,676,000.00	- 16,836,500.00	
14	Inspektorat Daerah	799,500.00	-	- 799,500.00	
15	Badan Perencanaan Daerah, Penelitian dan Pengembangan	-	-	- -	
16	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	-	8,091,945.00	- 8,091,945.00	
17	Sekretariat Daerah	16,447,800.00	41,632,000.00	- 25,184,200.00	
18	Sekretariat DPRD	3,867,800.00	12,878,834.00	- 9,011,034.00	
19	Badan Pengelola Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah	10,473,500.00	476,000.00	- 9,997,500.00	
20	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	34,364,676.00	1,674,109,303.00	- 1,639,744,627.00	
21	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan	4,401,997,230.00	1,324,500.00	- 4,400,672,730.00	Koreksi Pencatatan Beban Hibah dari
22	Dinas Pertanian	1,976,000.00	219,502.00	- 1,756,498.00	
23	Dinas Koperasi, Usaha Kecil Mikro dan Tenaga Kerja	5,292,336.00	2,579,450.00	- 2,712,886.00	
24	Dinas Perikanan dan Pangan	5,950,446.00	8,135,349.00	- 2,184,903.00	
25	Dinas Perdagangan dan Transmigrasi	8,406,150.00	1,279,000.00	- 7,127,150.00	
26	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	3,311,550.00	2,175,382.00	- 1,136,168.00	
27	Kecamatan Koto IX Tarusan	-	131,862,208.00	- 131,862,208.00	
28	Kecamatan Bavang	-	-	- -	
29	Kecamatan Bavang Utara	-	43,500.00	- 43,500.00	
30	Kecamatan IV Jurai	-	-	- -	
31	Kecamatan Batang Kapas	-	148,086,687.00	- 148,086,687.00	
32	Kecamatan Sutera	-	-	- -	
33	Kecamatan Lengayang	-	-	- -	
34	Kecamatan Ranah Pesisir	-	-	- -	
35	Kecamatan Linggo Sari Baganti	-	-	- -	
36	Kecamatan Pancung Soal	-	686,010.00	- 686,010.00	
37	Kecamatan Air Pura	1,059,774.00	43,500.00	- 1,016,274.00	
38	Kecamatan Basa IV Balai Tapan	-	676,326.00	- 676,326.00	
39	Kecamatan Ranah Ampek Hulu Tapan	1,225,400.00	830,520.00	- 394,880.00	
40	Kecamatan Lunang	-	-	- -	
41	Kecamatan Silaut	-	-	- -	
42	PPKD	-	-	- -	
Jumlah		73,483,617,584.61	26,889,209,341.00	- 46,594,408,243.61	

No	SKPD	Beban Pemeliharaan			
		+	-	SUM	Keterangan
1	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	212,028,515.00		212,028,515.00	
2	Dinas Kesehatan	204,349,834.00	20,670,000.00	183,679,834.00	
3	Rumah Sakit Umum Daerah	2,398,719,258.00		2,398,719,258.00	
4	Dinas Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran	-	-	-	
5	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan	-	-	-	
6	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	-	-	-	
7	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	-	-	-	
8	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian	-	-	-	
9	Dinas Perhubungan	-	-	-	
10	Dinas Komunikasi dan Informatika		58,526,550.00	58,526,550.00	Riklas Barias Gedung dan Bangunan (membuat
11	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	-	-	-	
12	Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga	-	14,800,000.00	14,800,000.00	
13	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan	-	-	-	
14	Inspektorat Daerah	-	-	-	
15	Badan Perencanaan Daerah, Penelitian dan Pengembangan	-	-	-	
16	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	-	13,600,000.00	13,600,000.00	Rikles Barang dan jasa ke belanja modal aset tetap Pemasangan Praktisi (Sekat Ruangan)
17	Sekretariat Daerah	-	102,397,000.00	102,397,000.00	rehab rumah dinas bupati
18	Sekretariat DPRD	-	-	-	
19	Badan Pengelola Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah	-	-	-	
20	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	-	102,397,000.00	102,397,000.00	
21	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan	-	31,083,750.00	31,083,750.00	
22	Dinas Pertanian	-	-	-	
23	Dinas Koperasi, Usaha Kecil Mikro dan Tenaga Kerja	-	-	-	
24	Dinas Perikanan dan Pangan	-	-	-	
25	Dinas Perdagangan dan Transmigrasi	-	-	-	
26	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	-	-	-	
27	Kecamatan Koto IX Tarusan	-	149,886,863.00	149,886,863.00	
28	Kecamatan Bayang	-	-	-	
29	Kecamatan Bayang Utara	-	-	-	
30	Kecamatan IV Jurai	-	18,490,000.00	18,490,000.00	
31	Kecamatan Batang Kapas	-	-	-	
32	Kecamatan Sutera	-	-	-	
33	Kecamatan Lengayang	-	-	-	
34	Kecamatan Ranah Pesisir	-	-	-	
35	Kecamatan Linggo Sari Baganti	-	-	-	
36	Kecamatan Pancung Soal	-	-	-	
37	Kecamatan Air Pura	-	-	-	
38	Kecamatan Basa IV Balai Tapan		17,500,000.00	17,500,000.00	
39	Kecamatan Ranah Ampek Hulu Tapan	-	-	-	
40	Kecamatan Lunang	-	-	-	
41	Kecamatan Silaut	-	-	-	
42	PPKD	-	-	-	
Jumlah		2,815,097,607.00	529,351,163.00	2,490,540,444.00	

No	SKPD	Beban Perjalanan Dinas			
		+	-	SUM	Keterangan
1	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	-	-	-	
2	Dinas Kesehatan	1,241,488,929.00	-	1,241,488,929.00	Koreksi Pencatatan Belanja Barang dan Jasa BLUD yang dic
3	Rumah Sakit Umum Daerah	286,131,951.00	-	286,131,951.00	-
4	Dinas Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran	-	-	-	
5	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan	-	-	-	
6	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	-	-	-	
7	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	-	-	-	
8	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian	-	-	-	
9	Dinas Perhubungan	-	-	-	
10	Dinas Komunikasi dan Informatika	-	-	-	
11	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	-	-	-	
12	Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga	-	-	-	
13	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan	-	-	-	
14	Inspektorat Daerah	-	-	-	
15	Badan Perencanaan Daerah, Penelitian dan Pengembangan	-	-	-	
16	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	-	-	-	
17	Sekretariat Daerah	-	-	-	
18	Sekretariat DPRD	-	-	-	
19	Badan Pengelola Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah	-	-	-	
20	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	454,058,614.00	-	454,058,614.00	
21	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan	-	-	-	
22	Dinas Pertanian	-	-	-	
23	Dinas Koperasi, Usaha Kecil Mikro dan Tenaga Kerja	-	-	-	
24	Dinas Perikanan dan Pangan	-	-	-	
25	Dinas Perdagangan dan Transmigrasi	-	-	-	
26	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	-	-	-	
27	Kecamatan Koto IX Tarusan	-	-	-	
28	Kecamatan Bayang	-	-	-	
29	Kecamatan Bayang Utara	-	-	-	
30	Kecamatan IV Jurai	-	-	-	
31	Kecamatan Batang Kapas	-	-	-	
32	Kecamatan Sutura	-	-	-	
33	Kecamatan Lengayang	-	-	-	
34	Kecamatan Ranah Pesisir	-	-	-	
35	Kecamatan Linggo Sari Baganti	-	-	-	
36	Kecamatan Pancung Soal	-	-	-	
37	Kecamatan Air Pura	-	-	-	
38	Kecamatan Basa IV Balai Tapan	-	-	-	
39	Kecamatan Ranah Ampek Hulu Tapan	-	-	-	
40	Kecamatan Lunang	-	-	-	
41	Kecamatan Silaut	-	-	-	
42	PPKD	-	-	-	
Jumlah		1,981,679,494.00	-	1,981,679,494.00	

No	SKPD	Beban Hibah			
		+	-	SUM	Keterangan
1	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	-	-	-	
2	Dinas Kesehatan	-	-	-	
3	Rumah Sakit Umum Daerah	-	-	-	
4	Dinas Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran	-	-	-	
5	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan	-	-	-	
6	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	-	-	-	
7	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	-	-	-	
8	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian	-	-	-	
9	Dinas Perhubungan	-	-	-	
10	Dinas Komunikasi dan Informatika	-	-	-	
11	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	-	-	-	
12	Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga	-	-	-	
13	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan	-	18,000,000.00	- 18,000,000.00	Koreksi Pencatatan Beban Hibah dari
14	Inspektorat Daerah	-	-	-	
15	Badan Perencanaan Daerah, Penelitian dan Pengembangan	-	-	-	
16	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	-	-	-	
17	Sekretariat Daerah	-	-	-	
18	Sekretariat DPRD	-	-	-	
19	Badan Pengelola Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah	-	10,000,000.00	- 10,000,000.00	Koreksi Pencatatan Beban Hibah dari
20	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	654,045,536.00	-	654,045,536.00	Hibah Ke Kejaksaan Negeri Painan (Bangunan
21	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan	-	4,400,809,230.00	- 4,400,809,230.00	-
22	Dinas Pertanian	-	-	-	
23	Dinas Koperasi, Usaha Kecil Mikro dan Tenaga Kerja	-	-	-	
24	Dinas Perikanan dan Pangan	654,945.00	-	654,945.00	Hibah ke masyarakat (Tanah Pangkalan Pendaratan ikan) Tarusan
25	Dinas Perdagangan dan Transmigrasi	-	-	-	
26	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	-	-	-	
27	Kecamatan Koto IX Tarusan	-	-	-	
28	Kecamatan Bayang	-	-	-	
29	Kecamatan Bayang Utara	-	-	-	
30	Kecamatan IV Jurai	-	-	-	
31	Kecamatan Batang Kapas	-	-	-	
32	Kecamatan Sutera	-	-	-	
33	Kecamatan Lengayang	-	-	-	
34	Kecamatan Ranah Pesisir	-	-	-	
35	Kecamatan Linggo Sari Baganti	-	-	-	
36	Kecamatan Pancung Soal	-	-	-	
37	Kecamatan Air Pura	-	-	-	
38	Kecamatan Basa IV Balai Tapan	-	-	-	
39	Kecamatan Ranah Ampek Hulu Tapan	-	-	-	
40	Kecamatan Lunang	-	-	-	
41	Kecamatan Silaut	-	-	-	
42	PPKD	-	-	-	
Jumlah		654,700,481.00	4,428,809,230.00	- 3,774,108,749.00	

No	SKPD	Beban Penyisihan Piutang			
		+	-	SUM	Keterangan
1	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	-	-	-	
2	Dinas Kesehatan	285,417,381.60	-	285,417,381.60	
3	Rumah Sakit Umum Daerah	2,650,425,803.00	161,500,278.00	2,488,925,525.00	Penyisihan Piutang TA 2024 dan 2023
4	Dinas Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran	-	-	-	
5	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan	-	-	-	
6	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	-	-	-	
7	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	-	-	-	
8	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian	-	-	-	
9	Dinas Perhubungan	-	-	-	
10	Dinas Komunikasi dan Informatika	-	-	-	
11	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	-	-	-	
12	Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga	-	-	-	
13	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan	-	-	-	
14	Inspektorat Daerah	-	-	-	
15	Badan Perencanaan Daerah, Penelitian dan Pengembangan	-	-	-	
16	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	-	-	-	
17	Sekretariat Daerah	-	-	-	
18	Sekretariat DPRD	-	-	-	
19	Badan Pengelola Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah	932,313,748.00	449,810,968.00	482,502,780.00	Penyisihan Piutang Pajak
20	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	-	-	-	
21	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan	-	-	-	
22	Dinas Pertanian	-	-	-	
23	Dinas Koperasi, Usaha Kecil Mikro dan Tenaga Kerja	-	-	-	
24	Dinas Perikanan dan Pangan	-	-	-	
25	Dinas Perdagangan dan Transmigrasi	521,649,471.00	-	521,649,471.00	
26	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	-	-	-	
27	Kecamatan Koto IX Tarusan	-	-	-	
28	Kecamatan Bayang	-	-	-	
29	Kecamatan Bayang Utara	-	-	-	
30	Kecamatan IV Jurai	-	-	-	
31	Kecamatan Batang Kapas	-	-	-	
32	Kecamatan Sutera	-	-	-	
33	Kecamatan Lengayang	-	-	-	
34	Kecamatan Ranah Pesisir	-	-	-	
35	Kecamatan Linggo Sari Baganti	-	-	-	
36	Kecamatan Pancung Soal	-	-	-	
37	Kecamatan Air Pura	-	-	-	
38	Kecamatan Basa IV Balai Tapan	-	-	-	
39	Kecamatan Ranah Ampek Hulu Tapan	-	-	-	
40	Kecamatan Lunang	-	-	-	
41	Kecamatan Silaut	-	-	-	
42	PPKD	-	-	-	
Jumlah		4,389,806,403.60	611,311,246.00	3,778,495,157.60	-

No	SKPD	Beban Penyusutan			
		+	-	SUM	Keterangan
1	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	30,293,478,841.00	1,625,497,150.00	28,667,981,691.00	Beban Penyusutan 2024
2	Dinas Kesehatan	14,972,653,752.34		14,972,653,752.34	Beban Penyusutan 2024
3	Rumah Sakit Umum Daerah	9,719,646,733.00	-	9,719,646,733.00	Beban Penyusutan 2024
4	Dinas Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran	126,082,443.55	-	126,082,443.55	Beban Penyusutan 2024
5	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan	157,221,195.00	-	157,221,195.00	Beban Penyusutan 2024
6	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	1,305,917,313.00	-	1,305,917,313.00	Beban Penyusutan 2024
7	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	122,709,583.00		122,709,583.00	Beban Penyusutan 2024
8	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian	424,000,273.00		424,000,273.00	Beban Penyusutan 2024
9	Dinas Perhubungan	975,645,600.00		975,645,600.00	Beban Penyusutan 2024
10	Dinas Komunikasi dan Informatika	429,295,755.00	-	429,295,755.00	Beban Penyusutan 2024
11	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	345,300,942.00	-	345,300,942.00	Beban Penyusutan 2024
12	Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga	2,004,598,899.00	-	2,004,598,899.00	Beban Penyusutan 2024
13	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan	560,484,717.00		560,484,717.00	Beban Penyusutan 2024
14	Inspektorat Daerah	69,172,249.00	-	69,172,249.00	Beban Penyusutan 2024
15	Badan Perencanaan Daerah, Penelitian dan Pengembangan	274,305,799.00	-	274,305,799.00	Beban Penyusutan 2024
16	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	94,991,147.00	-	94,991,147.00	Beban Penyusutan 2024
17	Sekretariat Daerah	1,250,055,816.00	-	1,250,055,816.00	Beban Penyusutan 2024
18	Sekretariat DPRD	456,954,175.00	-	456,954,175.00	Beban Penyusutan 2024
19	Badan Pengelola Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah	1,030,474,857.00	-	1,030,474,857.00	Beban Penyusutan 2024
20	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	100,187,859,028.00	-	100,187,859,028.00	Beban Penyusutan 2024
21	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan	6,002,575,289.00	-	6,002,575,289.00	Beban Penyusutan 2024
22	Dinas Pertanian	2,140,580,309.00	-	2,140,580,309.00	Beban Penyusutan 2024
23	Dinas Koperasi, Usaha Kecil Mikro dan Tenaga Kerja	1,269,921,340.00	472,500.00	1,269,448,840.00	Beban Penyusutan 2024
24	Dinas Perikanan dan Pangan	447,431,085.00	-	447,431,085.00	Beban Penyusutan 2024
25	Dinas Perdagangan dan Transmigrasi	9,641,688,569.00	-	9,641,688,569.00	Beban Penyusutan 2024
26	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	101,988,213.00	-	101,988,213.00	Beban Penyusutan 2024
27	Kecamatan Koto IX Tarusan	41,052,786.00	-	41,052,786.00	Beban Penyusutan 2024
28	Kecamatan Bayang	86,652,067.00	-	86,652,067.00	Beban Penyusutan 2024
29	Kecamatan Bayang Utara	71,942,197.00	-	71,942,197.00	Beban Penyusutan 2024
30	Kecamatan IV Jurai	60,078,719.00	-	60,078,719.00	Beban Penyusutan 2024
31	Kecamatan Batang Kapas	58,539,270.00	-	58,539,270.00	Beban Penyusutan 2024
32	Kecamatan Sutera	49,645,449.21	-	49,645,449.21	Beban Penyusutan 2024
33	Kecamatan Lengayang	58,447,899.00	-	58,447,899.00	Beban Penyusutan 2024
34	Kecamatan Ranah Pesisir	78,304,183.00	-	62,541,745.40	Beban Penyusutan 2024
35	Kecamatan Linggo Sari Baganti	37,279,028.00		37,279,028.00	Beban Penyusutan 2024
36	Kecamatan Pancung Soal	73,313,584.00	-	73,313,584.00	Beban Penyusutan 2024
37	Kecamatan Air Pura	39,966,103.00	-	39,966,103.00	Beban Penyusutan 2024
38	Kecamatan Basa IV Balai Tapan	42,894,630.00		42,894,630.00	Beban Penyusutan 2024
39	Kecamatan Ranah Ampek Hulu Tapan	81,342,966.00	-	81,342,966.00	Beban Penyusutan 2024
40	Kecamatan Lunang	53,587,649.00	-	53,587,649.00	Beban Penyusutan 2024
41	Kecamatan Silaut	72,594,538.00	-	89,730,387.48	Beban Penyusutan 2024
42	PPKD	130,487,281.38	-	130,487,281.38	Beban Penyusutan 2024
Jumlah		185,441,162,272.48	1,625,969,650.00	183,816,566,034.36	-

No	SKPD	Beban Amortisasi			
		+	-	SUM	Keterangan
1	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan			-	
2	Dinas Kesehatan	24,302,063.00	-	24,302,063.00	
3	Rumah Sakit Umum Daerah			-	
4	Dinas Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran			-	
5	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan			-	
6	Badan Penanggulangan Bencana Daerah			-	
7	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil			-	
8	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian			-	
9	Dinas Perhubungan			-	
10	Dinas Komunikasi dan Informatika			-	
11	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu			-	
12	Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga			-	
13	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan			-	
14	Inspektorat Daerah			-	
15	Badan Perencanaan Daerah, Penelitian dan Pengembangan			-	
16	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia			-	
17	Sekretariat Daerah	-	-	-	
18	Sekretariat DPRD			-	
19	Badan Pengelola Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah			-	
20	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang			-	
21	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan			-	
22	Dinas Pertanian			-	
23	Dinas Koperasi, Usaha Kecil Mikro dan Tenaga Kerja			-	
24	Dinas Perikanan dan Pangan			-	
25	Dinas Perdagangan dan Transmigrasi			-	
26	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik			-	
27	Kecamatan Koto IX Tarusan			-	
28	Kecamatan Bayang			-	
29	Kecamatan Bayang Utara			-	
30	Kecamatan IV Jurai			-	
31	Kecamatan Batang Kapas			-	
32	Kecamatan Sutera			-	
33	Kecamatan Lengayang			-	
34	Kecamatan Ranah Pesisir			-	
35	Kecamatan Linggo Sari Baganti			-	
36	Kecamatan Pancung Soal			-	
37	Kecamatan Air Pura			-	
38	Kecamatan Basa IV Balai Tapan			-	
39	Kecamatan Ranah Ampek Hulu Tapan			-	
40	Kecamatan Lunang			-	
41	Kecamatan Silaut			-	
42	PPKD			-	
	Jumlah				

No	SKPD	Beban Transfer			
		+	-	SUM	Keterangan
1	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	-	-	-	
2	Dinas Kesehatan	-	-	-	
3	Rumah Sakit Umum Daerah	-	-	-	
4	Dinas Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran	-	-	-	
5	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan	-	-	-	
6	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	-	-	-	
7	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	-	-	-	
8	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian	-	-	-	
9	Dinas Perhubungan	-	-	-	
10	Dinas Komunikasi dan Informatika	-	-	-	
11	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	-	-	-	
12	Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga	-	-	-	
13	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan	-	-	-	
14	Inspektorat Daerah	-	-	-	
15	Badan Perencanaan Daerah, Penelitian dan Pengembangan	-	-	-	
16	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	-	-	-	
17	Sekretariat Daerah	-	-	-	
18	Sekretariat DPRD	-	-	-	
19	Badan Pengelola Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah	-	167,649,926,000.00	- 167,649,926,000.00	
20	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	-	-	-	
21	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan	-	-	-	
22	Dinas Pertanian	-	-	-	
23	Dinas Koperasi, Usaha Kecil Mikro dan Tenaga Kerja	-	-	-	
24	Dinas Perikanan dan Pangan	-	-	-	
25	Dinas Perdagangan dan Transmigrasi	-	-	-	
26	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	-	-	-	
27	Kecamatan Koto IX Tarusan	-	-	-	
28	Kecamatan Bayang	-	-	-	
29	Kecamatan Bayang Utara	-	-	-	
30	Kecamatan IV Jurai	-	-	-	
31	Kecamatan Batang Kapas	-	-	-	
32	Kecamatan Sutera	-	-	-	
33	Kecamatan Lengayang	-	-	-	
34	Kecamatan Ranah Pesisir	-	-	-	
35	Kecamatan Linggo Sari Baganti	-	-	-	
36	Kecamatan Pancung Soal	-	-	-	
37	Kecamatan Air Pura	-	-	-	
38	Kecamatan Basa IV Balai Tapan	-	-	-	
39	Kecamatan Ranah Ampek Hulu Tapan	-	-	-	
40	Kecamatan Lunang	-	-	-	
41	Kecamatan Silaut	-	-	-	
42	PPKD	-	-	-	
Jumlah		-	167,649,926,000.00	- 167,649,926,000.00	-

No	SKPD	Total Selisih Beban-belanja		
		+	-	SUM
1	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	55,621,350,806.00	19,846,510,338.00	35,774,840,468.00
2	Dinas Kesehatan	37,155,113,707.95	24,696,989,007.16	12,458,124,700.79
3	Rumah Sakit Umum Daerah	79,396,727,182.00	65,330,657,705.00	14,066,069,477.00
4	Dinas Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran	141,623,443.55	18,794,302.00	122,829,141.55
5	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan	164,223,195.00	-	164,223,195.00
6	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	1,306,661,313.00	1,114,000.00	1,305,547,313.00
7	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	324,376,983.00	142,839,491.00	181,537,492.00
8	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian	447,995,760.00	54,606,186.00	393,389,574.00
9	Dinas Perhubungan	1,606,498,600.00	361,091,249.00	1,245,407,351.00
10	Dinas Komunikasi dan Informatika	445,451,961.00	77,136,329.00	368,315,632.00
11	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	345,746,442.00	-	345,746,442.00
12	Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga	2,007,411,399.00	118,760,000.00	1,888,651,399.00
13	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan	578,997,217.00	19,676,000.00	559,321,217.00
14	Inspektorat Daerah	69,971,749.00	-	69,971,749.00
15	Badan Perencanaan Daerah, Penelitian dan Pengembangan	277,003,999.00	1,394,000.00	275,609,999.00
16	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	103,290,592.00	29,991,390.00	73,299,202.00
17	Sekretariat Daerah	1,290,418,568.00	186,128,000.00	1,104,290,568.00
18	Sekretariat DPRD	542,053,137.00	12,878,834.00	529,174,303.00
19	Badan Pengelola Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah	2,102,361,280.00	168,259,426,287.00	-
20	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	113,077,150,789.00	11,241,232,409.00	101,835,918,380.00
21	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan	10,624,833,944.00	4,530,608,144.00	6,094,225,800.00
22	Dinas Pertanian	2,317,968,711.00	196,876,955.90	2,121,091,755.10
23	Dinas Koperasi, Usaha Kecil Mikro dan Tenaga Kerja	1,306,339,916.00	4,941,949.00	1,301,397,967.00
24	Dinas Perikanan dan Pangan	1,044,919,311.00	186,206,598.00	858,712,713.00
25	Dinas Perdagangan dan Transmigrasi	10,218,562,053.00	11,179,000.00	10,207,383,053.00
26	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	105,299,763.00	2,175,382.00	103,124,381.00
27	Kecamatan Koto IX Tarusan	172,941,994.00	281,749,071.00	-
28	Kecamatan Bayang	86,652,067.00	-	86,652,067.00
29	Kecamatan Bayang Utara	71,942,197.00	52,313,500.00	19,628,697.00
30	Kecamatan IV Jurai	60,078,719.00	18,490,000.00	41,588,719.00
31	Kecamatan Batang Kapas	206,625,957.00	148,086,687.00	58,539,270.00
32	Kecamatan Sutera	69,747,449.21	8,543,000.00	61,204,449.21
33	Kecamatan Lengayang	58,447,899.00	-	58,447,899.00
34	Kecamatan Ranah Pesisir	78,307,183.00	20,462,188.00	57,844,995.00
35	Kecamatan Linggo Sari Baganti	37,279,028.00	25,360,650.00	11,918,378.00
36	Kecamatan Pancung Soal	73,313,584.00	13,425,425.00	59,888,159.00
37	Kecamatan Air Pura	41,025,877.00	43,500.00	40,982,377.00
38	Kecamatan Basa IV Balai Tapan	42,894,630.00	34,126,326.00	8,768,304.00
39	Kecamatan Ranah Ampek Hulu Tapan	95,858,366.00	830,520.00	95,027,846.00
40	Kecamatan Lunang	53,587,649.00	8,214,000.00	45,373,649.00
41	Kecamatan Silaut	72,594,538.00	14,430,000.00	58,164,538.00
42	PPKD	130,487,281.38	-	130,487,281.38
Jumlah		323,974,136,240.09	295,957,288,423.06	28,016,847,817.03

LAPORAN KEUANGAN
PT. BANK PEMBANGUNAN DAERAH
SUMATERA BARAT
(BANK NAGARI)

Nomor : SR/009/TRS/FD/02-2025
 Lampiran : 1 (satu) rangkap
 Perihal : Penyampaian Laporan Keuangan
 PT Bank Nagari Tahun Buku 2024

Padang, 11 Februari 2025

Kepada Yth.
 Sekretaris Daerah Kabupaten Pesisir Selatan
 Cq. Subbid Akuntansi dan Pembukuan
 Bidang Akuntansi dan Bina Keuangan BPKPAD
 Jl. H Agus Salim
 PAINAN

Dengan hormat,

Memenuhi maksud surat Sekretariat Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 000/12/BPKPAD/2025 tanggal 23 Januari 2025 perihal Permintaan Laporan Keuangan Tahun 2024 dan dalam rangka penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Pesisir Selatan TA 2024, maka dengan ini kami sampaikan data-data sebagai berikut: (data terlampir) :

1. Laporan Keuangan Tahun Buku 2024 (Un Audited) PT. Bank Nagari.
2. Data Investasi Pemerintah Daerah Kabupaten Pesisir Selatan s.d 31 Desember 2024 dengan rincian sebagai berikut :

a. Jumlah penyertaan modal jumlah saham :

- Jumlah Sertifikat Saham yang telah diterbitkan	: 58,608 Lembar
- Jumlah Sertifikat Saham yang belum diterbitkan	: 0 Lembar
Jumlah Total Sertifikat Saham	: 58,608 Lembar
- Share/Porsi cari total Saham Bank Nagari	: 3.08% ←
- Jumlah Modal Disetor	: Rp. 58,608,000,000,-
- Jumlah Dana Setoran Modal di Rekening Antara	: Rp. 0,-
Total Setoran Modal	: Rp. 58,608,000,000,- ←

b. Data Surat Kolektif Sertifikat Saham Seri A atas nama Pemerintah Daerah Kabupaten Pesisir Selatan s.d 31 Desember 2024 sebagai berikut :

No	Tahun Penyertaan	Setoran Modal	Nomor Seri Saham
1.	2007	3.484.000.000,-	184,093 s/d 187,576
2.	2009	343.000.000,-	352,984 s/d 353,326
3.	2010	4.656.000.000,-	392,445 s/d 397,100
4.	2012	2.396.000.000,-	511,416 s/d 513,811
5.	2012	100.000.000,-	573,557 s/d 573,656
6.	2013	3.316.000.000,-	683,948 s/d 687,263
7.	2013	825.000.000,-	739,672 s/d 740,496
8.	2014	4.826.000.000,-	858,921 s/d 863,746



Lanjutan Surat No.SR/009/TRS/PD/02-2025 tanggal 11 Februari 2025
Perihal Penyampaian Laporan Keuangan PT Bank Nagari Tahun Buku 2024

No	Tahun Penyertaan	Setoran Modal	Nomor Seri Saham
9.	2015	6.489.000.000,-	998,701 s/d 1,005,189
10.	2016	9.084.000.000,-	1,241,829 s/d 1,250,912
11.	2016	701.000.000,-	1,294,393 s/d 1,295,093
12.	2017	10.588.000.000,-	1,449,715 s/d 1,460,102
13.	2018	12.000.000.000,-	1,562,986 s/d 1,574,985
	Jumlah	58.608.000.000,-	

Demikianlah kami sampaikan, kiranya dapat diterima dengan baik dan atas kerjasamanya kami ucapkan terima kasih.

DIVISI DANA DAN TREASURY

 Bank Nagari
 KANTOR PUSAT
 HENRI BUDIMAN
 Pemimpin

Tembusan : - Yth. Bapak Sekretaris Daerah Kabupaten Pesisir Selatan
 - Bank Nagari Cabang Painan

LAPORAN POSISI KEUANGAN
PT. BANK NAGARI
TANGGAL 31 DESEMBER 2024 DAN 31 DESEMBER 2023

		(dalam jutaan rupiah)	
No.	POS - POS	31 Desember 2024 (Unaudited)	31 Desember 2023 (Audited)
ASET			
1.	Kas	523,298	542,255
2.	Penempatan pada Bank Indonesia	1,727,972	3,941,948
3.	Penempatan pada bank lain	14,353	214,084
4.	Tagihan spot dan derivatif <i>(forward)</i>	0	0
5.	Surat berharga yang dimiliki	4,003,649	2,544,990
6.	Surat berharga yang dijual dengan janji dibeli kembali <i>(repo)</i>	0	0
7.	Tagihan atas surat berharga yang dibeli dengan janji dijual kembali <i>(reverse repo)</i>	575,650	255,200
8.	Tagihan akseptasi	0	0
9.	Kredit yang diberikan	21,510,972	20,625,430
10.	Pembiayaan syariah ⁽¹⁾	4,039,852	3,465,591
11.	Penyertaan modal	2,632	2,632
12.	Aset keuangan lainnya	134,033	152,190
13.	Cadangan kerugian penurunan nilai aset keuangan <i>-/-</i>		
a.	Surat berharga	0	0
b.	Kredit yang diberikan dan pembiayaan syariah ⁽¹⁾	505,011	606,339
c.	Lainnya	2	8
14.	Aset tidak berwujud	22,375	21,925
	Akumulasi amortisasi aset tidak berwujud <i>-/-</i>	21,125	20,407
15.	Aset tetap dan inventaris	610,329	606,648
	Akumulasi penyusutan aset tetap dan inventaris <i>-/-</i>	197,803	182,094
16.	Aset non produktif		
a.	Properti terbengkalai	0	0
b.	Agunan yang diambil alih	0	0
c.	Rekening tunda	0	0
d.	Aset antarbank ⁽²⁾	0	0
17.	Aset lainnya	667,887	347,654
TOTAL ASET		33,109,061	31,914,699
LIABILITAS DAN EKUITAS			
LIABILITAS			
1.	Giro	1,983,420	2,747,201
2.	Tabungan	8,949,458	8,510,023
3.	Deposito	15,750,483	14,618,420
4.	Uang Elektronik	0	0
5.	Liabilitas kepada Bank Indonesia	0	0
6.	Liabilitas kepada bank lain	185,594	140,556
7.	Liabilitas spot dan derivatif <i>(forward)</i>	0	0
8.	Liabilitas atas surat berharga yang dijual dengan janji dibeli kembali <i>(repo)</i>	0	0
9.	Liabilitas akseptasi	0	0
10.	Surat berharga yang diterbitkan	0	0
11.	Pinjaman/pembiayaan yang diterima	780,608	550,164
12.	Setoran jaminan	2,377	2,397
13.	Liabilitas antarbank ⁽²⁾	0	0
14.	Liabilitas lainnya	1,270,574	1,255,268
15.	Kepentingan minoritas <i>(in minority interest)</i>		
TOTAL LIABILITAS		28,922,514	27,954,029
EKUITAS			
16.	Modal disetor		
a.	Modal dasar	5,000,000	5,000,000
b.	Modal yang belum disetor <i>-/-</i>	3,095,427	3,150,933
c.	Saham yang dibeli kembali <i>(treasury stock)</i> <i>-/-</i>	0	0
17.	Tambahan modal disetor		
a.	Agio	0	0
b.	Disagio <i>-/-</i>	0	0
c.	Dana setoran modal	2	6,002
d.	Lainnya	4,883	4,883
18.	Penghasilan komprehensif lain		
a.	Keuntungan	189,768	192,392
b.	Kerugian <i>-/-</i>	0	0
19.	Cadangan		
a.	Cadangan umum	1,531,202	1,274,071
b.	Cadangan khusus	0	0
20.	Laba/rugi		
a.	Tahun-tahun lalu	15,652	10,487
b.	Tahun berjalan	540,467	523,768
c.	Dividen yang dibayarkan <i>-/-</i>		
TOTAL EKUITAS YANG DAPAT DIATRIBUSIKAN KEPADA PEMILIK		4,186,547	3,550,670
TOTAL EKUITAS		4,186,547	3,550,670
TOTAL LIABILITAS DAN EKUITAS		33,109,061	31,914,699

LAPORAN LABA RUGI DAN PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN
PT. BANK NAGARI
PERIODE 31 DESEMBER 2024 DAN 31 DESEMBER 2023

(dalam jutaan rupiah)

No.	POS-POS	31 Desember 2024 (Unaudited)	31 Desember 2023 (Audited)
PENDAPATAN DAN BEBAN OPERASIONAL			
A. Pendapatan dan Beban Bunga			
1.	Pendapatan Bunga	2,982,767	2,823,567
2.	Beban Bunga	1,161,262	980,377
	Pendapatan (Beban) Bunga Bersih	1,821,505	1,843,190
B. Pendapatan dan Beban Operasional Lainnya			
1.	Keuntungan (kerugian) dari peningkatan (penurunan) nilai wajar aset keuangan	C	0
2.	Keuntungan (kerugian) dari penurunan (peningkatan) nilai wajar liabilitas keuangan	C	0
3.	Keuntungan (kerugian) dari penjualan aset keuangan	C	0
4.	Keuntungan (kerugian) dari transaksi spot dan derivatif (<i>realised</i>)	C	0
5.	Keuntungan (kerugian) dari penyertaan dengan <i>equity method</i>	C	0
6.	Keuntungan (kerugian) dari penjabaran transaksi valuta asing	148	112
7.	Pendapatan dividen	295	85
8.	Pendapatan komisi/provisi/fee dan administrasi	20,816	22,377
9.	Pendapatan lainnya	189,346	180,340
10.	Beban (Pemulihan) kerugian penurunan nilai aset keuangan (<i>impairment</i>)	60,683	82,491
11.	Kerugian terkait risiko operasional	39	5,013
12.	Beban tenaga kerja	795,025	787,411
13.	Beban promosi	38,804	32,146
14.	Beban lainnya	516,756	505,752
	Pendapatan (Beban) Operasional Lainnya	(1,200,702)	(1,209,899)
	LABA (RUGI) OPERASIONAL	620,803	633,291
PENDAPATAN (BEBAN) NON OPERASIONAL			
1.	Keuntungan (kerugian) penjualan aset tetap dan inventaris	(79)	(292)
2.	Pendapatan (beban) non operasional lainnya	72,183	49,125
	LABA (RUGI) NON OPERASIONAL	72,104	48,833
	LABA (RUGI) TAHUN BERJALAN SEBELUM PAJAK	692,907	682,124
	Pajak penghasilan		
a.	Taksiran pajak tahun berjalan +/-	152,440	157,398
b.	Pendapatan (beban) pajak tangguhan	0	(958)
	LABA (RUGI) BERSIH TAHUN BERJALAN	540,467	523,768
PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN			
1.	Pos-pos yang Tidak Akan Direklasifikasi ke Laba Rugi		
a.	Keuntungan yang berasal dari revaluasi aset tetap	0	43,645
b.	Keuntungan (kerugian) yang berasal dari pengukuran kembali atas program pensiun manfaat pasti	0	747
c.	Lainnya	0	(2,312)
2.	Pos-pos yang Akan Direklasifikasi ke Laba Rugi		
a.	Keuntungan (kerugian) yang berasal dari penyesuaian akibat penjabaran laporan keuangan dalam mata uang asing	0	0
b.	Keuntungan (kerugian) dari perubahan nilai wajar aset keuangan instrumen hutang yang diukur pada nilai wajar penghasilan komprehensif lain	0	0
c.	Lainnya	0	0
	PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN TAHUN BERJALAN SETELAH PAJAK	0	42,080
	TOTAL LABA (RUGI) KOMPREHENSIF TAHUN BERJALAN	540,467	565,848
	Labas (Rugi) Bersih Tahun Berjalan yang dapat diatribusikan kepada :		
-	Pemilik	540,467	523,768
-	Kepentingan Non Pengendali		
	TOTAL LABA (RUGI) BERSIH TAHUN BERJALAN	540,467	523,768
	Total Laba (Rugi) Komprehensif Tahun Berjalan yang dapat diatribusikan kepada :		
-	Pemilik	540,467	565,848
-	Kepentingan Non Pengendali		
	TOTAL LABA (RUGI) KOMPREHENSIF TAHUN BERJALAN	540,467	565,848
	TRANSFER LABA (RUGI) KE KANTOR PUSAT ¹⁾	-	-
	LABA BERSIH PER SAHAM (dalam satuan rupiah 2)	-	287,284

LAPORAN KOMITMEN DAN KONTINJENSI
PT. BANK NAGARI
TANGGAL 31 DESEMBER 2024 DAN 31 DESEMBER 2023

(dalam jutaan rupiah)

No.	POS-POS	31 Desember 2024 (Unaudited)	31 Desember 2023 (Audited)
I	TAGIHAN KOMITMEN		
1	Fasilitas pinjaman/pembiayaan yang belum ditarik	-	-
2	Posisi valas yang akan diterima dari transaksi pembelian spot dan derivatif/forward	-	-
3	Lainnya	-	-
II	KEWAJIBAN KOMITMEN		
1	Fasilitas kredit kepada nasabah yang belum ditarik		
a	<i>Committed</i>	456,369	512,034
b	<i>Uncommitted</i>	-	-
2	<i>Irrevocable L/C</i> yang masih berjalan	-	-
3	Posisi valas yang akan diserahkan untuk transaksi spot dan derivatif/forward	-	-
4	Lainnya	-	-
III	TAGIHAN KONTINJENSI		
1	Garansi yang diterima	-	-
2	Lainnya	-	-
IV	KEWAJIBAN KONTINJENSI		
1	Garansi yang diberikan	71,697	114,812
2	Lainnya	-	-

PERHITUNGAN RASIO KEUANGAN
PT. BANK NAGARI
TANGGAL 31 DESEMBER 2024 DAN 31 DESEMBER 2023

(Dalam %)

No.	RASIO %	POSISI	
		31 DESEMBER 2024 Unaudited	31 DESEMBER 2023 Audited
Rasio Kinerja			
1	Kewajiban Penyediaan Modal Minimum (KPMM)	23.09	21.78
2	Aset Produktif bermasalah dan aset non produktif bermasalah Terhadap Total aset produktif dan aset non produktif	1.53	1.61
3	Aset produktif bermasalah terhadap total aset produktif	1.50	1.58
4	Cadangan Kerugian Penurunan Nilai (CKPN) aset keuangan terhadap aset produktif	1.60	2.01
5	NPL Gross	1.85	1.98
6	NPL Net	0.41	0.26
7	Return On Assets (ROA)	2.12	2.18
8	Return On Equity (ROE)	14.61	15.08
9	Net Interest Margin (NIM)	5.99	6.46
10	Beban Operasional terhadap Pendapatan Operasional (BOPC)	80.56	79.08
11	Cost to Income Ratio (CIR)	71.53	67.63
12	Loan to Deposit Ratio (LDR)	95.76	92.62
13	Posisi Devisa Netto (PDN) secara keseluruhan	0.08	0.09

LAPORAN PERHITUNGAN KEWAJIBAN PENYEDIAAN MODAL MINIMUM
PT. BANK NAGARI

(dalam jutaan rupiah)

		31 Desember 2024 (Unaudited)	31 Desember 2023 (Audited)
I	Modal Inti (Tier 1) ¹⁾	3,917,189	3,691,844
	1 Modal Inti Utama/Common Equity Tier 1 (CET 1)	3,917,189	3,691,844
	1.1 Modal disetor (Setelah dikurangi Treasury Stock)	1,904,578	1,849,067
	1.2 Cadangan Tambahan Modal ²⁾	2,258,176	2,087,805
	1.2.1 Faktor Penambah	2,258,176	2,087,805
	1.2.1.1 Pendapatan komprehensif lainnya	170,853	173,477
	1.2.1.1.1 Selisih lebih penjabaran laporan keuangan		
	1.2.1.1.2 Potensi keuntungan dari peningkatan nilai wajar aset keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain		
	1.2.1.1.3 Saldo surplus revaluasi aset tetap	170,853	173,477
	1.2.1.2 Cadangan tambahan modal lainnya (Other disclosed reserves)	2,087,323	1,914,328
	1.2.1.2.1 Agio		
	1.2.1.2.2 Cadangan Umum	1,531,202	1,374,071
	1.2.1.2.3 Laba tahun-tahun lalu setelah diperhitungkan pajak	15,652	10,487
	1.2.1.2.4 Laba tahun berjalan setelah diperhitungkan pajak	540,467	523,768
	1.2.1.2.5 Dana setoran modal	2	6,002
	1.2.1.2.6 Lainnya		
	1.2.2 Faktor Pengurang	0	0
	1.2.2.1 Pendapatan komprehensif lainnya	0	0
	1.2.2.1.1 Selisih kurang penjabaran laporan keuangan		
	1.2.2.1.2 Potensi kerugian dari penurunan nilai wajar aset keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain		
	1.2.2.2 Cadangan tambahan modal lainnya (Other disclosed reserves)	0	0
	1.2.2.2.1 Disagio		
	1.2.2.2.2 Rugi tahun-tahun lalu		
	1.2.2.2.3 Rugi tahun berjalan		
	1.2.2.2.4 Selisih kurang antara Penyesuaian Penilaian Kualitas Aset (PPKA) dan Cadangan Kerugian Penurunan Nilai (CKPN) atas aset produktif	0	0
	1.2.2.2.5 Selisih kurang jumlah penyesuaian nilai wajar dari instrumen keuangan dalam Trading Book		
	1.2.2.2.6 PPKA non produktif		
	1.2.2.2.7 Lainnya		
	1.3 Kepentingan Non Pengendali yang dapat diperhitungkan	0	0
	1.4 Faktor Pengurang Modal Inti Utama ³⁾	245,560	245,828
	1.4.1 Pihak tanggungan	244,008	244,008
	1.4.2 Goodwill		
	1.4.3 Aset tidak berwujud	1,250	1,518
	1.4.4 Pembayaran yang diperhitungkan sebagai faktor pengurang	302	302
	1.4.5 Keisiran modal pada penutupan anak asuransi		
	1.4.6 Eksposur sekuritisasi		
	1.4.7 Faktor Pengurang modal inti utama lainnya		
	1.4.7.1 Penempatan dana pada instrumen AT 1 dan/atau Tier 2 pada bank lain		
	1.4.7.2 Kepemilikan silang pada entitas lain yang diperoleh berdasarkan peralihan karena hukum, hibah atau hibah wasiat		
	1.4.7.3 Eksposur yang menimbulkan Risiko Kredit akibat kegagalan settlement (settlement risk) - non Delivery Versus Payment		
	1.4.7.4 Eksposur di Perusahaan Anak yang melakukan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah (apabila ada)		
	2 Modal Inti Tambahan/Additional Tier 1 (AT 1) ⁴⁾	0	0
	2.1 Instrumen yang memenuhi persyaratan AT 1		
	2.2 Agio / Disagio		
	2 Faktor Pengurang Modal Inti Tambahan ⁵⁾		
	2.1.1 Penempatan dana pada instrumen AT 1 dan/atau Tier 2 pada bank lain		
	2.1.2 Kepemilikan silang pada entitas lain yang diperoleh berdasarkan peralihan karena hukum, hibah atau hibah wasiat		
		174,860	177,781
II	Modal Pelengkap	0	0
	1 Instrumen modal dalam bentuk saham atau lainnya yang memenuhi persyaratan Tier 2		
	2 Agio / Disagio		
	3 Cadangan umum PPKA atas aset produktif yang wajib dibentuk (paling tinggi 1,25% x TMR Risiko Kredit)	174,860	177,781
	4 Faktor Pengurang Modal Pelengkap ⁶⁾		
	4.1 Sinking Fund		
	4.2 Penempatan dana pada instrumen Tier 2 pada bank lain		
	4.3 Kepemilikan silang pada entitas lain yang diperoleh berdasarkan peralihan karena hukum, hibah atau hibah wasiat		
		4,092,049	3,869,625
TOTAL MODAL			
		31 Desember 2024 (Unaudited)	31 Desember 2023 (Audited)
ASET TERTIMBANG MENURUT RISIKO			
ATMR RISIKO KREDIT		13,988,781	14,222,416
ATMR RISIKO PASAR		3,264	3,249
ATMR RISIKO OPERASIONAL		3,734,885	3,534,242
TOTAL ATMR		17,726,928	17,760,237
RASIO KPMM SESUAI PROFIL RISIKO %		9,00%	9,00%
ALOKASI PEMENUHAN KPMM			
SESUAI PROFIL RISIKO			
Dari CET 1 (%)		8,01%	8,00%
Dari AT 1 (%)		0,00%	0,00%
Dari Tier 2 (%)		0,99%	1,00%
RASIO KPMM			
Rasio CET 1 (%)			23,09%
Rasio Tier 1 (%)			22,10%
Rasio Tier 2 (%)			0,99%
Rasio KPMM			23,09%
CET 1 UNTUK BUFFER (%)			14,09%
PERSENTASE BUFFER YANG WAJIB DIPENUHI OLEH BANK %			
Capital Conservation Buffer (%)			0,00%
Countercyclical Buffer (%)			0,00%
Capital Surcharge untuk Bank Sistemik (%)			0,00%

LAPORAN TRANSAKSI SPOT DAN DERIVATIF/FORWARD TRIWULANAN

PT. BANK NAGARI

TANGGAL 31 DESEMBER 2024 (Unaudited)

Dalam jutaan rupiah

No.	Transaksi	BANK				
		Nilai <i>National</i>	Tujuan		Tagihan dan Liabilitas Derivatif	
			<i>Trading</i>	<i>Hedging</i>	Tagihan	Liabilitas
A.	Terkait Nilai Tukar					
1	Spot	-	-	-	-	-
2	Forward	-	-	-	-	-
3	Option					
	a. Jual	-	-	-	-	-
	b. Beli	-	-	-	-	-
4	Future	-	-	-	-	-
5	Swap	-	-	-	-	-
6	Lainnya	-	-	-	-	-
B	Terkait dengan Suku Bunga					
1	Forward	-	-	-	-	-
2	Option					
	a. Jual	-	-	-	-	-
	b. Beli	-	-	-	-	-
3	Future	-	-	-	-	-
4	Swap	-	-	-	-	-
5	Lainnya	-	-	-	-	-
C	Lainnya					
		-	-	-	-	-
JUMLAH		-	-	-	-	-

**PERUBAHAN POSISI SETORAN MODAL MENJADI MODAL DISETOR BANK NAGARI
OLEH PEMEGANG SAHAM TAHUN 2024**

No.	Pemegang Saham	Posisi Desember 2023		Sisa Dana di Rekening Antara	Kebutuhan Modal tahun 2024 sesuai RUPS	TOTAL Konversi Dana Setoran Modal di Rekening Antara	Posisi 31 Des 2024		Sisa Dana di Rekening Antara
		Modal Disetor	Porsi				Modal Disetor	Porsi	
I	Pemerintah Propinsi	601,224,000,000	32.51%	0	30,889,000,000	20,000,000,000	621,224,000,000	32.62%	0
II	Pemerintah Kabupaten	723,832,000,000	39.15%	1,000,920,000	37,189,000,000	6,206,000,000	730,038,000,000	38.33%	920,000
1	Kab. Lima Puluh Kota	23,584,000,000	1.28%	0	1,212,000,000	0	23,584,000,000	1.24%	0
2	Kab. Agam	68,243,000,000	3.69%	0	3,506,000,000	1,000,000,000	69,243,000,000	3.64%	0
3	Kab. Tanah Datar	133,279,000,000	7.21%	0	6,847,000,000	0	133,279,000,000	7.00%	0
4	Kab. Pesisir Selatan	58,608,000,000	3.17%	0	3,011,000,000	0	58,608,000,000	3.08%	0
5	Kab. Padang Pariaman	42,941,000,000	2.32%	1,000,000,000	2,206,000,000	3,206,000,000	46,147,000,000	2.42%	0
6	Kab. Solok	44,997,000,000	2.43%	0	2,312,000,000	0	44,997,000,000	2.36%	0
7	Kab. Sijunjung	104,145,000,000	5.63%	0	5,351,000,000	1,000,000,000	105,145,000,000	5.52%	0
8	Kab. Pasaman	72,755,000,000	3.93%	0	3,738,000,000	0	72,755,000,000	3.82%	0.18
9	Kab. Kepulauan Mentawai	80,578,000,000	4.36%	920,000	4,140,000,000	0	80,578,000,000	4.23%	920,000
10	Kab. Pasaman Barat	51,125,000,000	2.76%	0	2,627,000,000	0	51,125,000,000	2.68%	0
11	Kab. Solok Selatan	16,225,000,000	0.88%	0	834,000,000	1,000,000,000	17,225,000,000	0.90%	0
12	Kab. Dharmasraya	27,352,000,000	1.48%	0	1,405,000,000	0	27,352,000,000	1.44%	0
III	Pemerintah Kota	467,311,000,000	25.27%	5,000,602,746	24,009,000,000	17,000,000,000	484,311,000,000	25.43%	602,746
1	Kota Padang	84,321,000,000	4.56%	5,000,000,000	4,332,000,000	5,000,000,000	89,321,000,000	4.69%	0
2	Kota Bukittinggi	44,524,000,000	2.41%	0	2,288,000,000	0	44,524,000,000	2.34%	0
3	Kota Payakumbuh	54,110,000,000	2.93%	0	2,780,000,000	7,500,000,000	61,610,000,000	3.23%	0
4	Kota Solok	103,009,000,000	5.57%	0	5,292,000,000	2,500,000,000	105,509,000,000	5.54%	0
5	Kota Sawahlunto	85,601,000,000	4.63%	0	4,398,000,000	0	85,601,000,000	4.49%	0
6	Kota Padang Panjang	39,398,000,000	2.13%	602,746	2,024,000,000	1,000,000,000	40,398,000,000	2.12%	602,746
7	Kota Pariaman	56,348,000,000	3.05%	0	2,895,000,000	1,000,000,000	57,348,000,000	3.01%	0
IV	Koperasi Konsumen Keluarga Besar BN	56,700,000,000	3.07%	0	2,913,000,000	12,300,000,000	69,000,000,000	3.62%	0
	JUMLAH	1,849,067,000,000	100.00%	6,001,522,746	95,000,000,000	55,506,000,000	1,904,573,000,000	100.00%	1,522,747

**LAPORAN KEUANGAN
PERUSAHAAN UMUM DAERAH
(PERUMDA) AIR MINUM
TIRTA LANGKISAU**

**PERUSAHAAN UMUM DAERAH AIR MINUM
TIRTA LANGKISAU KAB. PESISIR SELATAN
LAPORAN KEUANGAN 31 DESEMBER 2024**

Dengan angka perbandingan Tahun 2023
(Audited) Serta untuk tahun yang berakhir
Pada tanggal tersebut

Dan
LAPORAN AUDITOR INDEPENDEN

**PERUSAHAAN UMUM DAERAH AIR MINUM
TIRTA LANGKISAU KAB. PESISIR SELATAN
LAPORAN KEUANGAN 31 DESEMBER 2024**
Dengan angka perbandingan Tahun 2023
(Audited) Serta untuk tahun yang berakhir
Pada tanggal tersebut
Dan
LAPORAN AUDITOR INDEPENDEN

**PERUSAHAAN UMUM DAERAH AIR MINUM
TIRTA LANGKISAU KAB. PESISIR SELATAN
DAFTAR ISI**

31 Desember 2024 dan 2023 (Audited)
(Dinyatakan dalam Rupiah Penuh)

	Halaman
Surat Pernyataan Pengurus	i
Laporan Auditor Independen	ii
Laporan Posisi Keuangan (Neraca)	1
Laporan Laba (Rugi)	2
Laporan Perubahan Ekuitas	3
Laporan Arus Kas	4
Catatan Atas Laporan Keuangan	5 -



PERUSAHAAN UMUM DAERAH AIR MINUM

TIRTA LANGKISAU

Jalan Perintis Kemerdekaan No. 25 – Painan 25651 Telp. 0756-21607
Website : www.tirtalangkisau.id E-mail : pdampessel@gmail.com



SURAT PERNYATAAN
TENTANG
TANGGUNG JAWAB ATAS LAPORAN KEUANGAN
PERUSAHAAN UMUM DAERAH AIR MINUM TIRTA LANGKISAU KABUPATEN PESIR SELATAN
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR PADA 31 DESEMBER 2024

Yang bertandatangan di bawah ini :

1. Nama : Ir.H. Herman Budiarto
Alamat Kantor : Jl. Perintis Kemerdekaan No.25 Painan
Jabatan : Direktur
2. Nama : Rini Ismalina, SP
Alamat Kantor : Perintis Kemerdekaan No.25 Painan
Jabatan : Kepala Bagian Umum dan Keuangan

Menyatakan Bahwa :

1. Bertanggung jawab atas penyusunan dan penyajian Laporan Keuangan Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Langkisau Kabupaten Pesisir Selatan.
2. Laporan Keuangan Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Langkisau Kabupaten Pesisir Selatan telah disusun dan disajikan sesuai dengan Standar Akuntansi Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik (SAK - ETAP).
3. Semua informasi dalam Laporan Keuangan Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Langkisau Kabupaten Pesisir Selatan telah dimuat secara lengkap dan benar.
4. Laporan Keuangan Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Langkisau Kabupaten Pesisir Selatan tidak mengandung informasi atau fakta material yang tidak benar, dan tidak menghilangkan informasi atau fakta material.
5. Bertanggung jawab atas sistem pengendalian intern yang diterapkan di Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Langkisau Kabupaten Pesisir Selatan.

Demikian pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya.

Perusahaan Umum Daerah Air Minum
Tirta Langkisau Kab. Pesisir Selatan
Kepala Bagian Umum dan Keuangan

Painan, 20 Februari 2025
Perusahaan Umum Daerah Air Minum
Tirta Langkisau Kab. Pesisir Selatan
DIREKTUR

Rini Ismalina, SP

NIK. 19850704 20160120 121



Ir.H. Herman Budiarto

NIP. 19670103 199203 1 010



KANTOR AKUNTAN PUBLIK
SUPARMAN BAMBANG GHANIS
NIUKAP.1107/KM.1/2016, Tanggal 10 Oktober 2016
CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS

Jl. Pisangan Baru Tengah No. 5 RT. 08 / RW. 15, Pisangan Baru, Matraman,
Jakarta Timur - 13110. Telp : 021-22899954

LAPORAN AUDITOR INDEPENDEN

Nomor : 00090/2.1081/AU.2/11/1224-2/1/III/2025

**Dewan Direksi dan Pengawas
PERUSAHAAN UMUM DAERAH AIR MINUM TIRTA LANGKISAU
KABUPATEN PESISIR SELATAN**

Laporan Audit atas Laporan Keuangan

Opini

Kami telah mengaudit Laporan Keuangan **PERUSAHAAN UMUM DAERAH AIR MINUM TIRTA LANGKISAU KABUPATEN PESISIR SELATAN** terlampir, yang terdiri dari Neraca tanggal 31 Desember 2024, serta Laporan Laba Rugi, Laporan Perubahan Ekuitas, dan Laporan Arus Kas untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut, serta catatan atas laporan keuangan, termasuk ikhtisar kebijakan akuntansi signifikan.

Menurut opini kami, laporan keuangan terlampir menyajikan secara **wajar dalam semua hal yang material**, posisi keuangan **PERUSAHAAN UMUM DAERAH AIR MINUM TIRTA LANGKISAU KABUPATEN PESISIR SELATAN** tanggal 31 Desember 2024, serta kinerja keuangan, dan arus kasnya untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut, sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik (SAK ETAP) di Indonesia.

Basis Opini

Kami melaksanakan audit kami berdasarkan Standar Audit yang ditetapkan oleh Institut Akuntan Publik Indonesia. Tanggung jawab kami menurut standar tersebut diuraikan lebih lanjut dalam paragraph Tanggung Jawab Auditor terhadap Audit atas laporan Keuangan pada laporan kami. Kami independen terhadap **PERUSAHAAN UMUM DAERAH AIR MINUM TIRTA LANGKISAU KABUPATEN PESISIR SELATAN** berdasarkan ketentuan etika yang relevan dalam audit kami atas laporan keuangan di Indonesia, dan kami telah memenuhi tanggung jawab etika lainnya berdasarkan ketentuan tersebut. Kami yakin bahwa bukti audit yang telah kami peroleh adalah cukup dan tepat untuk menyediakan suatu basis bagi opini audit kami.

Tanggung Jawab Manajemen dan Pihak yang Bertanggung Jawab atas Tata Kelola terhadap Laporan Keuangan

Manajemen bertanggung jawab atas penyusunan dan penyajian wajar laporan keuangan tersebut sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik (ETAP) di Indonesia, dan atas pengendalian internal yang dianggap perlu oleh manajemen untuk memungkinkan penyusunan laporan keuangan yang bebas dari kesalahan penyajian material, baik yang disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan.

Dalam penyusunan laporan keuangan, manajemen bertanggung jawab untuk menilai kemampuan Perusahaan dalam mempertahankan kelangsungan usahanya, mengungkapkan, sesuai dengan kondisinya, hal-hal yang berkaitan dengan kelangsungan usaha, dan menggunakan basis akuntansi kelangsungan usaha, kecuali manajemen memiliki intensi untuk melikuidasi Perusahaan atau menghentikan operasi, atau tidak memiliki alternatif yang realistis selain melaksanakannya.

Pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola bertanggung jawab untuk mengawasi proses pelaporan keuangan Perusahaan.



KANTOR AKUNTAN PUBLIK
SUPARMAN BAMBANG GHANIS
NIUKAP.1107/KM.1/2016, Tanggal 10 Oktober 2016
CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS

Jl. Pisangan Baru Tengah No. 5 RT. 08 / RW. 15, Pisangan Baru, Matraman,
Jakarta Timur - 13110. Telp : 021-22899954

Tanggung Jawab Auditor terhadap Audit atas Laporan Keuangan

Tujuan kami adalah untuk memperoleh keyakinan memadai tentang apakah laporan keuangan secara keseluruhan bebas dari kesalahan penyajian material, baik yang disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan, dan untuk menerbitkan laporan auditor yang mencakup opini kami. Keyakinan memadai merupakan suatu tingkat keyakinan tinggi, namun bukan merupakan suatu jaminan bahwa audit yang dilaksanakan berdasarkan Standar Audit akan selalu mendeteksi kesalahan penyajian material ketika hal tersebut ada. Kesalahan penyajian dapat disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan dan dianggap material jika, baik secara individual maupun secara agregat, dapat diekspektasikan secara wajar akan memengaruhi keputusan ekonomi yang diambil oleh pengguna berdasarkan laporan keuangan tersebut.

Sebagai bagian dari suatu audit berdasarkan Standar Audit, kami menerapkan pertimbangan profesional dan mempertahankan skeptisisme profesional selama audit, kami juga :

- Mengidentifikasi dan menilai risiko kesalahan penyajian material dalam laporan keuangan, baik yang disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan, mendesain dan melaksanakan prosedur audit yang responsif terhadap risiko tersebut, serta memperoleh bukti audit yang cukup dan tepat untuk menyediakan basis bagi opini kami. Risiko tidak terdeteksinya kesalahan penyajian material yang disebabkan oleh kecurangan lebih tinggi dari yang disebabkan oleh kesalahan, karena kecurangan dapat melibatkan kolusi, pemalsuan, penghilangan secara sengaja, pernyataan salah, atau pengabaian pengendalian internal.
- Memperoleh suatu pemahaman tentang pengendalian internal yang relevan dengan audit untuk mendesain prosedur audit yang tepat sesuai dengan kondisinya, tetapi bukan untuk tujuan menyatakan opini atas keefektifitasan pengendalian internal Perusahaan.
- Mengevaluasi ketepatan kebijakan akuntansi yang digunakan serta kewajaran estimasi akuntansi dan pengungkapan terkait yang dibuat oleh manajemen.
- Menyimpulkan ketepatan penggunaan basis akuntansi kelangsungan usaha oleh manajemen dan, berdasarkan bukti audit yang diperoleh, apakah terdapat suatu ketidakpastian material yang terkait dengan peristiwa atau kondisi yang dapat menyebabkan keraguan signifikan atas kemampuan Perusahaan untuk mempertahankan kelangsungan usahanya. Ketika kami menyimpulkan bahwa terdapat suatu ketidakpastian material, kami diharuskan untuk menarik perhatian dalam laporan auditor kami ke pengungkapan terkait dalam laporan keuangan atau, jika pengungkapan tersebut tidak memadai, harus menentukan apakah perlu untuk memodifikasi opini kami. Kesimpulan kami didasarkan pada bukti audit yang diperoleh hingga tanggal laporan auditor kami. Namun, peristiwa atau kondisi masa depan dapat menyebabkan Perusahaan tidak dapat mempertahankan kelangsungan usaha.
- Mengevaluasi penyajian, struktur, dan isi laporan keuangan secara keseluruhan, termasuk pengungkapannya, dan apakah laporan keuangan mencerminkan transaksi dan peristiwa yang mendasarinya dengan suatu cara yang mencapai penyajian wajar.

Kami mengomunikasikan kepada pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola mengenai, antara lain, ruang lingkup dan saat yang direncanakan atas audit, serta temuan audit signifikan, termasuk setiap defisiensi signifikan dalam pengendalian internal yang teridentifikasi oleh kami selama audit.



KANTOR AKUNTAN PUBLIK
SUPARMAN BAMBANG GHANIS

NIUKAP.1107/KM.1/2016, Tanggal 10 Oktober 2016

CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS

Jl. Pisangan Baru Tengah No. 5 RT. 08 / RW. 15, Pisangan Baru, Matraman,
Jakarta Timur - 13110. Telp : 021-22899954

Kantor Akuntan Publik
Suparman Bambang Ghanis



Ghanis Fitri Noer Anggraini , SE., Ak, CA., CPA, ASEAN CPA

NIAP : AP. 1.224

Jakarta, 28 Maret 2025



PERUSAHAAN UMUM DAERAH AIR MINUM TIRTA LANGKISAU
KABUPATEN PESISIR SELATAN
NERACA
Per 31 Desember 2024 dan 2023

ASET	Cat	2024	2023
ASET LANCAR			
Kas dan Setara Kas	1	1.239.549.921	4.550.217.241
Deposito	2	10.332.000.000	1.732.000.000
Piutang Usaha	3	12.781.435.964	11.384.683.654
Akumulasi Penyisihan Piutang		(1.050.814.396)	(940.451.357)
Piutang Lain-lain	4	196.213.825	304.623.240
Persediaan	5	623.072.121	255.530.703
Biaya Dibayar Dimuka	6	33.402.356	37.952.897
Jumlah Aset Lancar		24.154.859.791	17.324.556.379
ASET TIDAK LANCAR			
Aset Tetap	7		
Nilai Perolehan Aset Tetap		125.480.533.487	119.887.803.327
Akumulasi Penyusutan Aset Tetap		(65.893.259.783)	(59.705.214.903)
Nilai Buku Aset Tetap		59.587.273.704	60.182.588.423
Aset Tidak Lancar Lainnya	8		
Aset Tidak Berfungsi		386.500.000	386.500.000
Jumlah Aset Tidak Lancar Lainnya		386.500.000	386.500.000
JUMLAH ASET		84.128.633.495	77.893.644.802
KEWAJIBAN DAN EKUITAS			
KEWAJIBAN JANGKA PENDEK			
Hutang Usaha	9	260.595.986	260.595.986
Biaya Yang Masih Hrs Dibayar		-	64.613.508
HJP yg telah jatuh tempo	10	20.055.026	173.973.684
Jumlah Kewajiban Jangka Pendek		280.651.012	499.183.178
KEWAJIBAN JANGKA PANJANG			
HJP yg belum jatuh tempo		-	544.573.440,00
EKUITAS			
Penyertaan Pem Yg Belum Ditetapkan Statusnya	11	52.233.883.381	52.233.883.381
Penyertaan Pemkab Yg Sudah Ditetapkan Statusnya	12	70.144.069.957	63.081.002.910
Modal Hibah	13	785.867.900	785.867.900
Laba (Rugi) Ditahan	14	(39.336.775.326)	(39.403.812.666)
Laba (Rugi) Tahun Berjalan		20.936.570	152.946.659
Jumlah Ekuitas		83.847.982.482	76.849.888.184
JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS		84.128.633.495	77.893.644.802

Lihat catatan atas laporan keuangan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan secara keseluruhan

PERUSAHAAN UMUM DAERAH AIR MINUM TIRTA LANGKISAU
KABUPATEN PESISIR SELATAN
LAPORAN LABA RUGI
Untuk Tahun Yang Berakhir 2024 dan 2023

URAIAN	Cat	2024	2023
PENDAPATAN			
Pendapatan Air			
Pendapatan Air	12	20.207.858.824	19.387.932.036
Pendapatan Non Air	13	1.411.992.184	1.610.806.942
Jumlah Pendapatan Usaha		21.619.851.008	20.998.738.978
 Beban Operasional	14		
Beban Operasional		15.735.172.212	14.369.481.164
Beban Penyusutan	14	6.188.044.880	5.845.417.433
 Jumlah Beban		21.923.217.092	20.214.898.597
 PENDAPATAN (BEBAN) LAIN-LAIN	15		
Pendapatan Lain-Lain		376.073.003	129.201.039
Beban Lain-Lain		(51.770.349)	(760.094.760)
Jumlah Pendapatan dan Beban Lain-Lain		324.302.654	(630.893.721)
 LABA / RUGI OPERASIONAL		20.936.570	152.946.660
TAKSIRAN PAJAK AKHIR TAHUN			
LABA / RUGI BERSIH		20.936.570	152.946.660

Lihat catatan atas laporan keuangan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan secara keseluruhan

PERUSAHAAN UMUM DAERAH AIR MINUM TIRTA LANGKISAU
KABUPATEN PESISIR SELATAN
LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS
Per 31 Desember 2024

NO	Uraian	Penyertaan Pem. Pusat yg Blm Ditetapkan Statusnya	Penyeretaan Pemkab yg Blm Ditetapkan Statusnya	Penyertaan Pemkab yg Sudah Ditetapkan Statusnya	Hibah	Laba(Rugi) Ditahan	Jumlah Ekuitas
1	Saldo Per 01 Januari 2023	29.943.269.258	22.290.614.123	59.555.497.910	785.867.900,00	(39.403.812.666)	73.171.436.525
	Penambahan Modal tahun 2023			3.525.505.000		-	3.525.505.000
	Laba Rugi Tahun Berjalan 2023					152.946.659,30	152.946.659,30
2	Saldo per 31 Desember 2023	29.943.269.258	22.290.614.123	63.081.002.910	785.867.900	(39.250.866.007)	76.849.888.184
	Penyesuaian					(85.909.319)	(85.909.319)
	Penambahan Modal			7.063.067.047			7.063.067.047
	Laba Rugi Tahun Berjalan 2024					20.936.570	20.936.570
3	Saldo Akhir Per 31 Desember 2024	29.943.269.258	22.290.614.123	70.144.069.957	785.867.900	(39.315.838.756)	83.847.982.482

Notes

Penyesuaian RL thn YII (Ekuitas thn 2024) merupakan beban Pajak thn 2016 sebesar 85.909.318,99

Lihat catatan atas lporan keuangan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan
keuasngan secara keseluruhan

PERUSAHAAN UMUM DAERAH AIR MINUM TIRTA LANGKISAU
KABUPATEN PESISIR SELATAN
LAPORAN ARUS KAS
Untuk Tahun Yang Berakhir 2024 dan 2023

	2024	2023
ARUS KAS AKTIVITAS OPERASI		
Laba (Rugi) Bersih	20.936.570	152.946.659
Ditambah (Dikurangi) Transaksi Non Kas		
Beban Penyusutan Aktiva Tetap	6.188.044.880	5.845.417.433
Biaya Penyisihan Piutang Air	110.363.039	209.173.393
Penyesuaian Laba	(85.909.319)	
Laba (Rugi) Operasi Perubahan Modal Kerja	6.233.435.170	6.207.537.486
(Kenaikan) / Penurunan Aset Lancar		
Penurunan (Kenaikan) Deposito	(8.600.000.000)	(200.000.000)
Penurunan (Kenaikan) Piutang Usaha	(1.396.752.310)	(1.425.991.381)
Penurunan (Kenaikan) Piutang Lain lain	108.409.415	(152.179.214)
Persediaan	(367.541.418)	(137.329.869)
Penurunan (Kenaikan) Pembayaran Dimuka	4.550.542	5.159.874
Kenaikan (Penurunan) Utang Jk Pendek	-	(15.711.629)
Jumlah (Kenaikan) / Penurunan Aset Lancar	(10.251.333.771)	(1.926.052.219)
Kenaikan / Penurunan Kewajiban Jk. Pendek		
Utang Usaha	(64.613.508)	
Utang Non Usaha	(153.918.658)	
Jumlah Kenaikan / Penurunan Kewajiban Jk. Pendek	(218.532.166)	-
Jumlah Arus Kas Bersih Aktivitas Operasi	(4.236.430.767)	4.281.485.267
Arus Kas Bersih Aktivitas Investasi		
(Kenaikan)/ Penurunan Aset Tetap	(5.592.730.160)	(5.656.431.433)
(Kenaikan)/ Penurunan HJP yang telah JT		706.644.162
Jumlah Arus Kas Bersih Aktivitas Investasi	(5.592.730.160)	(4.949.787.271)
Arus Kas Bersih Aktivitas Pendanaan		
Kenaikan (Penurunan) Utang Jangka Panjang	(544.573.440)	(153.918.658)
Kenaikan (Penurunan) Modal Pemerintah	7.063.067.047	3.525.505.000
Kenaikan (Penurunan) Laba Ditahan		
Jumlah Arus Kas Bersih Aktivitas Pendanaan	6.518.493.607	3.371.586.342
Kenaikan Bersih Kas dan Setara Kas	(3.310.667.320)	2.703.284.338
Kas dan Setara Kas pada Awal Periode	4.550.217.241	1.846.932.903
Kas dan Setara Kas pada Akhir Periode	1.239.549.921	4.550.217.241

Lihat catatan atas laporan keuangan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan secara keseluruhan

PERUSAHAAN UMUM DAERAH AIR MINUM
TIRTA LANGKISAU
KABUPATEN PESIR SELATAN
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk Tahun yang berakhir 31 Desember 2024 dan 2023

A UMUM

1 Pendirian Perusahaan

Perusahaan Umum Daerah Air Minum (Perumda) Tirta Langkisau Kabupaten Pesir Selatan merupakan Badan Usaha Milik Pemerintah Daerah yang bergerak dalam bidang pelayanan air minum dan berkedudukan di kabupaten Pesir Selatan, Propinsi Sumatera Barat. Perumda Tirta Langkisau Kabupaten Pesir Selatan didirikan berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Pesir Selatan No. 7 Tahun 2023 tanggal 29 November 2023. Perumda Tirta Langkisau Kabupaten Pesir Selatan merupakan kelanjutan Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Kabupaten Pesir Selatan yang didirikan berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Pesir Selatan No. 2 Tahun 1993 tanggal 6 Januari 1993.

Sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Pesir Selatan No. 7 Tahun 2023 tanggal 29 November 2023. tersebut, maksud dan tujuan dari pendirian Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Langkisau Kabupaten Pesir Selatan adalah bergerak dalam bidang pelayanan penyediaan air minum yang memenuhi syarat-syarat kesehatan bagi masyarakat.

2 Penyertaan Modal

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Pesir Selatan No. 7 Tahun 2023 tanggal 29 November 2023, modal Perumda Tirta Langkisau

Kabupaten Pesir Selatan terdiri dari atas semua aktiva dan pasiva pada saat pendirian.

3 Susunan Pengurus

Susunan kepengurusan Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Langkisau Kabupaten Pesir Selatan diatur dalam Peraturan Bupati Pesir Selatan Nomor 01/PDAM-PS/2022, tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Langkisau Kabupaten Pesir Selatan. Pengangkatan Direksi berdasarkan Keputusan Bupati Pesir Selatan No:500/682/Kpts/BPT-PS/2021, Tanggal 19 November 2021, tentang Pengangkatan Direktur Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Langkisau Kabupaten Pesir Selatan. Susunan Pengurus Perusahaan

Umum Daerah Air Minum Tirta Langkisau Kabupaten Pesir Selatan adalah sebagai berikut:

Direktur	: Ir. H. Herman Budiarto
Kabag Teknik	: Hendra Azmi
Kabag Administrasi dan Keuangan	: Rini Ismalina, S.P
Kabag Hubungan Langganan	: Riyan Saputra, A.Md

Dewan Pengawas Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Langkisau Kabupaten Pesir Selatan ditetapkan dengan Surat Keputusan Bupati Pesir Selatan No. 500/227/Kpts/BPT-PS/2022 tanggal 19 April 2022 tentang Penetapan Dewan Pengawas Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Langkisau Kabupaten Pesir Selatan Periode 2022-2026 dengan susunan sebagai berikut:

Dewan Pengawas	: Ir. Rosdi, M.Si
----------------	-------------------

B IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI

1 Pernyataan kepatuhan

Perusahaan menerapkan Standar Akuntansi Keuangan Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik (SAK ETAP) yang berlaku secara retrospektif. Terkait dengan hal tersebut, Perusahaan menyajikan laporan posisi keuangan awal periode komparatif dan melakukan reklasifikasi saldo dalam laporan keuangan periode komparasi untuk tujuan peningkatan daya banding informasi antar periode.

Manajemen Perusahaan berpendapat bahwa laporan keuangan tahun 2024 dengan angka komparatif 2023 telah disajikan sesuai dengan SAK ETAP dan telah memenuhi semua persyaratan.

B IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI-Lanjutan

2 Dasar Penyusunan Laporan Keuangan

Laporan Keuangan ini disusun sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik (SAK ETAP). Penyusunan laporan keuangan ini berdasarkan prinsip harga perolehan (historical cost) dan akrual, kecuali untuk investasi pada efek dinyatakan sebesar nilai wajar. Angka - angka dalam laporan keuangan disajikan dalam angka rupiah penuh.

SAK ETAP yang telah dipergunakan adalah :

- a Bab 3 tentang Penyajian Laporan Keuangan
- b Bab 4 tentang Neraca
- c Bab 5 tentang Laporan Laba Rugi
- d Bab 6 tentang Laporan Perubahan Ekuitas
- e Bab 7 tentang Laporan Arus Kas
- f Bab 8 tentang Catatan atas Laporan Keuangan
- g Bab 9 tentang Kebijakan Akuntansi, Estimasi, dan Kesalahan
- h Bab 15 tentang Aset Tetap
- i Bab 17 tentang Sewa
- j Bab 20 tentang Pendapatan
- k Bab 21 tentang Biaya Pinjaman
- l Bab 23 tentang Imbalan Kerja
- m Bab 24 tentang Pajak Penghasilan
- n Bab 25 tentang Mata Uang Pelaporan
- o Bab 26 tentang Transaksi dalam Mata Uang Asing
- p Bab 27 tentang Peristiwa setelah Akhir Periode Laporan
- q Bab 28 tentang Pengungkapan Pihak pihak yang mempunyai hubungan istimewa

3 Auditor Pendahulu (Sebelumnya)

Laporan Keuangan Perumda (Perumda) Tirta Langkisau Kabupaten Pesir Selatan per 31 Desember 2023, diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Suparman Bambang Ghanis dengan nomor Laporan: 00003/2.1081/AU.2/11/1224-1/1/2024 yang menyatakan opininya Wajar Tanpa Pengecualian, pada tanggal 15 Januari 2024.

4 Kas dan Setara Kas

Setara kas adalah semua investasi yang bersifat jangka pendek dan sangat likuid yang dapat segera dikonversikan menjadi kas dengan jatuh tempo

dalam waktu tiga bulan atau kurang sejak tanggal penempatannya dan yang tidak dijaminakan serta tidak dibatasi pencairannya.

Kas dan deposito berjangka yang dibatasi penggunaannya, disajikan sebagai "Aset yang dibatasi penggunaannya" yang kategorikan sebagai dimiliki hingga jatuh tempo yaitu pada saat selesai pembatasan penggunaannya.

5 Piutang Usaha dan Piutang Lain lain

Piutang disajikan sebesar jumlah neto setelah dikurangi dengan penurunan nilai yang dibentuk sebesar estimasi penyisihan piutang tak tertagih. Penurunan nilai ditentukan dengan memperhatikan antara lain pengalaman, prospek usaha dan industri, kondisi keuangan dengan penekanan pada arus kas, kemampuan membayar debitur, dan agunan yang dikuasai. Piutang usaha disajikan menurut piutang pihak yang mempunyai hubungan istimewa dan piutang pihak ketiga. Piutang disajikan dengan nilai wajar yang dapat direalisasikan. Berdasarkan pengalaman dan data historis, perusahaan menetapkan estimasi

kerugian piutang usaha tak tertagih yang berasal dari penjualan air berdasarkan SAK ETAP sebagai berikut :

B IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI-Lanjutan

5 Piutang Usaha dan Piutang Lain lain-Lanjutan

Uraian	%ase
Piutang Usaha	
Rumah Tangga	9,40%
Niaga	10,20%
Sosial	2,50%
Keran Umum	0,00%
Instansi Pemerintah	0,00%
Industri	0,00%

6 Persediaan

Persediaan dinyatakan dengan biaya atau nilai realisasi bersih mana yang lebih rendah. Penilaian biaya ditentukan berdasarkan metode masuk pertama keluar pertama (MPKP)/ First In First Out (FIFO)

Nilai realisasi bersih ditentukan sebesar harga jual dikurangi dengan biaya untuk menyelesaikan dan menjual. Entitas mengakui kerugian penurunan nilai ketika nilai realisasi bersih lebih rendah daripada biaya perolehan dengan membentuk penyisihan untuk penurunan nilai persediaan.

Persediaan entitas dikelompokkan kedalam dua jenis:

- 1 Persediaan bahan instalasi
- 2 Persediaan bahan operasi

Persediaan Bahan Instalasi meliputi perpipaan, water meter dan accessories lainnya. Persediaan Bahan Instalasi ini dikelompokkan sebagai bagian dari Aset lancar. Metode pencatatan untuk persediaan Bahan Instalasi menggunakan Perpetual Inventory Method yaitu pencatatan administrasi persediaan atas mutasi penerimaan dan pengeluaran, sehingga saldo nilai persediaan dapat diketahui setiap saat dari administrasi yang diselenggarakan.

Persediaan Bahan Operasi meliputi bahan kimia, pelumas, bahan bakar, alat tulis kantor (ATK) dan bahan operasi lainnya. Metode pencatatan untuk persediaan Bahan Operasi menggunakan Physical Inventory Method.

Persediaan bahan operasi ini merupakan persediaan yang apabila telah digunakan akan dianggap habis terpakai, sehingga layak dikelompokkan kedalam aset lancar.

7 Beban dibayar dimuka

Beban dibayar di muka dibebankan pada operasi sesuai masa manfaat biaya yang bersangkutan dengan menggunakan metode garis lurus ("straight-line method").

8 Aset Tetap

Berdasarkan SAK ETAP Bab 15 "Aset Tetap", aset tetap dinyatakan berdasarkan biaya perolehan dikurangi akumulasi penyusutan serta akumulasi penurunan nilai aset, jika ada. Biaya perolehan awal aset tetap meliputi harga perolehan, termasuk pajak pembelian yang tidak boleh dikreditkan dan biaya-biaya yang dapat diatribusikan secara langsung untuk membawa aset ke lokasi dan kondisi yang diinginkan sesuai dengan tujuan penggunaan yang ditetapkan. Penilaian kembali atau revaluasi aset tetap tidak diperkenankan, kecuali berdasarkan ketentuan pemerintah Indonesia yang berlaku. Peningkatan nilai aset karena penilaian kembali dikreditkan pada " Surplus Revaluasi Aset Tetap " di akun Ekuitas.

Beban pemeliharaan dan perbaikan dibebankan pada laporan laba rugi pada saat terjadinya. Biaya-biaya lain yang terjadi selanjutnya yang timbul untuk menambah, mengganti atau memperbaiki aset tetap dicatat sebagai biaya perolehan aset jika dan hanya jika besar kemungkinan manfaat ekonomis di masa depan berkenaan dengan aset tersebut akan mengalir ke entitas dan biaya perolehan aset dapat diukur secara andal.

B IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI-Lanjutan

8 Aset Tetap-Lanjutan

Apabila aset tetap tidak digunakan lagi, maka nilai buku terakhir akan dicatat sebagai nilai buku aset tetap tersebut, karena depresiasi atas aset tetap tersebut dihentikan.

Apabila aset tetap tersebut dijual, hilang, rusak, dan dianggap tidak bisa digunakan lagi, maka nilai tercatat pada aset tetap tersebut harus

dikeluarkan dari laporan keuangan dan keuntungan atau kerugian yang dihasilkan diakui dalam laporan laba rugi.

Aset tetap dicatat berdasarkan harga perolehannya, perhitungan penyusutan dilakukan dengan menggunakan metode penyusutan garis lurus ("straight line method"), sesuai dengan metode penyusutan berdasarkan undang undang nomor 7 tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan yang diperbaharui dengan undang undang nomor 10 tahun 1994 serta peraturan pajak lainnya (SE Dirjen Pajak nomor: SE-07/PJ.42/2002, tanggal 8 Mei 2002 dan Keputusan Menteri Keuangan nomor: 138/KMK.03 tanggal 18 April 2002) sebagai berikut:

a) Kelompok harta berwujud bukan bangunan

- Kelompok 1, tarif penyusutannya 25% dari nilai buku
Harta yang dapat disusutkan dan tidak termasuk golongan bangunan yang mempunyai masa manfaat tidak lebih dari 4 tahun.
- Kelompok 2, tarif penyusutannya 25% dari nilai buku
Harta yang dapat disusutkan dan tidak termasuk golongan bangunan yang mempunyai masa manfaat lebih dari 4 tahun dan tidak lebih dari 8 tahun.
- Kelompok 3, tarif penyusutannya 6,25% dari nilai buku
Harta yang dapat disusutkan dan tidak termasuk golongan bangunan yang mempunyai masa manfaat lebih dari 8 tahun dan tidak lebih dari 16 tahun.
- Kelompok 4, tarif penyusutannya 5% dari nilai buku
Harta yang dapat disusutkan dan tidak termasuk golongan bangunan yang mempunyai masa manfaat lebih dari 16 tahun dan tidak lebih dari 20 tahun.

b) Kelompok harta berwujud bangunan

- Permanen dengan masa manfaat 20 tahun, tarif penyusutannya 5% dari nilai perolehan.
- Tidak permanen dengan masa manfaat 10 tahun, tarif penyusutannya 10% dari nilai perolehan.

Pengeluaran untuk perbaikan atau pemeliharaan aset tetap untuk menjaga manfaat ekonomis dimasa yang akan datang dibebankan pada laporan laba rugi pada saat terjadinya. Penyempurnaan yang menambah nilai (kegunaan) dan masa manfaat, dan penambahan dalam jumlah besar dikapitalisasi. Apabila suatu aset tetap tidak lagi digunakan atau dijual, nilai tercatat dan akumulasi penyusutan aset tersebut dikeluarkan dari pencatatannya sebagai aset tetap dan keuntungan atau kerugian yang terjadi diperhitungkan dalam laporan laba rugi tahun bersangkutan.

10 Aset sewa pembiayaan

Untuk transaksi sewa pembiayaan yang memenuhi kriteria sewa pembiayaan modal (*capital lease*), aset dan kewajiban yang bersangkutan disajikan di laporan posisi keuangan dengan nilai sekarang (*present value*) dari nilai pelunasan sewa pembiayaan tersebut yang jumlahnya ditentukan pada saat mulai berlakunya sewa pembiayaan yang bersangkutan. Utang sewa pembiayaan akan berkurang sesuai dengan jumlah pembayaran angsuran pokoknya, sedangkan komponen bunga yang terkandung dalam angsuran sewa pembiayaan dibebankan ke laporan laba rugi tahun berjalan.

B IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI-Lanjutan

11 Penurunan nilai aset

SAK ETAP Bab 22 tentang "Penurunan Nilai Aset" mensyaratkan manajemen Perusahaan melakukan penelaahan untuk menentukan adanya indikasi terjadinya penurunan nilai aset pada akhir tahun. Bila terdapat indikasi penurunan nilai aset, Perusahaan menentukan taksiran jumlah yang dapat diperoleh kembali (*recoverable value*) atas nilai aset dan mengakui rugi penurunan nilai aset tersebut dalam laporan laba rugi.

12 Sewa

Suatu sewa diklasifikasikan sebagai sewa pembiayaan jika sewa mengalihkan secara substansial seluruh manfaat dan risiko kepemilikan aset. Suatu sewa diklasifikasikan sebagai sewa operasi jika sewa tidak mengalihkan secara substansial seluruh manfaat dan risiko kepemilikan aset. Pembayaran sewa operasi diakui sebagai beban dengan dasar garis lurus selama masa sewa.

13 Transaksi dengan pihak-pihak yang mempunyai hubungan istimewa

SAK ETAP Bab 28 mensyaratkan entitas untuk memberikan pengungkapan yang diperlukan dalam laporan keuangannya dan memberi perhatian pada kemungkinan posisi keuangan dan laba atau rugi entitas telah terpengaruh oleh adanya pihak-pihak yang mempunyai hubungan istimewa serta transaksi dan saldo dengan pihak-pihak tersebut.

Suatu pihak mempunyai hubungan istimewa dengan entitas jika:

- a Secara langsung, atau tidak langsung melalui satu atau lebih perantara, pihak tersebut:
 - i Mengendalikan, dikendalikan oleh, atau berada dibawah pengendalian bersama dengan entitas (termasuk entitas induk, entitas anak, dan fellow subsidiaries);
 - ii Memiliki kepemilikan di entitas yang memberikan pengaruh signifikan atas entitas; atau
 - iii Memiliki pengendalian bersama atas entitas
- b Pihak tersebut adalah entitas asosiasi dari entitas;
- c Pihak tersebut adalah joint ventures dimana entitas tersebut merupakan venture;
- d Pihak tersebut adalah personel manajemen kunci entitas atau entitas induknya;
- e Pihak tersebut adalah keluarga dekat dari setiap orang yang diuraikan dalam (a) atau (d);
- f Pihak tersebut adalah entitas yang dikendalikan, dikendalikan bersama atau dipengaruhi secara signifikan oleh, atau memiliki hak suara secara signifikan, secara langsung atau tidak langsung, setiap orang yang diuraikan dalam (d) atau (e); atau

- g Pihak tersebut adalah program imbalan kerja untuk imbalan pekerja entitas, atau setiap entitas yang mempunyai hubungan istimewa dengan entitas tersebut.

Dalam tahun 2022 entitas tidak melakukan transaksi dengan pihak-pihak yang mempunyai hubungan istimewa.

14 Pengakuan Pendapatan dan beban

Pendapatan dicatat sebesar nilai wajar atas pembayaran yang diterima atau masih harus diterima secara bruto, tidak termasuk diskon penjualan dan potongan volume. Jumlah yang menjadi bagian pihak ketiga seperti pajak pertambahan nilai dikeluarkan dari pendapatan. Jika terjadi pembayaran tangguh, maka entitas mengakui pendapatan sebesar nilai wajar yaitu sebagai nilai kini dari seluruh penerimaan masa depan yang ditentukan berdasarkan tingkat bunga terkait (*imputed interest rate*).

B IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI-Lanjutan

14 Pengakuan Pendapatan dan beban-Lanjutan

Pendapatan terdiri dari penjualan barang dan jasa. Pendapatan diakui sebagai :

- i Penjualan Air
Penjualan barang diakui ketika semua kondisi berikut telah terpenuhi, yaitu:
 - a Risiko dan manfaat signifikan terkait dengan barang tersebut telah dialihkan kepada pembeli;
 - b Perusahaan tidak mempertahankan atau meneruskan keterlibatan manajerial sampai kepada tingkat dimana biasanya diasosiasikan dengan kepemilikan maupun *control* efektif atas barang yang terjual;
 - c Jumlah pendapatan dapat diukur dengan handal;
 - d Besar kemungkinan manfaat ekonomi yang berhubungan dengan transaksi akan mengalir masuk ke Perusahaan, dan

- e Biaya yang telah terjadi atau akan terjadi sehubungan dengan transaksi dapat diukur secara andal.

- ii Penjualan jasa diakui dengan metode penyelesaian dalam periode akuntansi ketika semua kondisi berikut terpenuhi :

- a Jumlah pendapatan dapat diukur dengan handal;
- b Besar kemungkinan manfaat ekonomi yang berhubungan dengan transaksi akan mengalir masuk ke Perusahaan;

- c Tingkat penyelesaian transaksi pada akhir periode pelaporan dapat diukur secara andal; dan

- d Biaya yang telah terjadi atau akan terjadi sehubungan dengan transaksi dapat diukur secara andal.

Beban diakui pada saat terjadinya (basis akrual)

15 Imbalan kerja, dan DAPENMA PAMSI

a Imbalan Kerja

Entitas mengakui kewajiban imbalan kerja sebagaimana diatur dalam SAK ETAP Bab 23 "imbalan kerja" Pengakuan kewajiban tersebut didasarkan pada ketentuan Undang - Undang Republik Indonesia nomor 13 tahun 2003 tentang ketenagakerjaan. Dalam ketentuan tersebut entitas diwajibkan untuk membayarkan imbalan kerja kepada karyawannya pada saat berhenti bekerja dalam hal mengundurkan diri, pensiun normal, meninggal dunia dan cacat tetap. Besarnya imbalan kerja tersebut terutama berdasarkan lamanya masa kerja dan besarnya kompetensi karyawan pada saat penyelesaian hitungan kerja. Pada dasarnya imbalan kerja berdasarkan UU RI No. 13 tahun 2003 tentang ketenagakerjaan adalah program imbalan pasti

Imbalan Kerja tersebut adalah seluruh bentuk imbalan yang diberikan oleh entitas sebagai pertukaran atas jasa yang diberikan oleh pekerja, termasuk direktur dan manajemen.

Imbalan kerja terdiri

Imbalan kerja jangka pendek

Imbalan pasca kerja

Imbalan kerja jangka panjang lainnya

Pesangon pemutusan kerja

Imbalan kerja terdiri dari iuran pasti dan imbalan pasti. Iuran pasti adalah imbalan kerja dimana entitas membayar secara tetap kepada lembaga pengelola dana imbalan kerja dan tidak memiliki kewajiban hukum atau konstruktif untuk membayar iuran berikutnya atau melakukan pembayaran langsung ke pekerja jika dana yang ada tidak mencukupi untuk membayar seluruh imbalan kerja terkait jasa mereka periode kini dan periode lalu. Imbalan pasti adalah imbalan kerja, dimana kewajiban entitas adalah menyediakan imbalan yang telah disepakati kepada pekerja dan mantan pekerja dan risiko akturia (dimana imbalan lebih besar daripada yang diperkirakan) dan resiko investasi secara substantif

berada pada entitas.

B IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI-Lanjutan

15 Imbalan kerja, dan DAPENMA PAMSI-Lanjutan

Dalam hal ini entitas, sudah melaksanakan program imbalan kerja bagi para karyawannya, antara lain : Jaminan Hari Tua, dan Jaminan Pensiun, untuk tunjangan pensiun diberikan kepada karyawan dengan masa kerja mencapai 56 tahun.

Program imbalan kerja sebagaimana diatur dalam SAK ETAP Bab 23, bisa dilakukan dengan 2 cara yaitu:

Jika dana imbalan kerja ini dikelola sendiri oleh perusahaan maka setiap memperhitungkan beban imbalan kerja akan dicatat sebagai berikut:

beban imbalan kerja (debit) dan kewajiban imbalan kerja (kredit). Kemudian pada saat membayar dana pensiun, dana kematian, dan dana sakit, maka kewajiban imbalan kerja (debit) dan kas dan setara kas (kredit).

Jika dana imbalan kerja ini dikelola oleh institusi diluar perusahaan (perusahaan asuransi atau bank), maka setiap memperhitungkan imbalan kerja akan dicatat sebagai berikut: beban imbalan kerja (debit) dan kas dan setara kas (kredit). Kemudian pada saat membayar dana pensiun, dana kematian, dan dana sakit, maka perusahaan sudah tidak perlu mencatat transaksi atas pembayaran tersebut karena yang melakukan transaksi pembayaran adalah bukan dari perusahaan.

16 Pajak penghasilan

Taksiran pajak penghasilan Perusahaan ditentukan berdasarkan laba kena pajak dalam tahun yang bersangkutan yang dihitung berdasarkan tarif pajak yang berlaku. Sesuai dengan SAK ETAP Bab 24 " Pajak Penghasilan", Perusahaan mencatat kewajiban atas seluruh pajak penghasilan periode berjalan dan periode sebelumnya yang belum dibayar (*tax payable concept*). Jika jumlah yang telah dibayar untuk periode berjalan dan periode sebelumnya melebihi jumlah yang terutang untuk periode tersebut, entitas harus mengakui kelebihan tersebut sebagai aset.

Perusahaan tidak mengakui adanya pajak tangguhan (deferred tax) atas perbedaan waktu pengakuan pendapatan dan beban antar laporan keuangan untuk tujuan akuntansi dan pajak.

Pajak penghasilan final

Sesuai dengan peraturan perundangan perpajakan, pendapatan yang telah dikenakan pajak penghasilan final tidak lagi dilaporkan sebagai pendapatan kena pajak, dan semua beban sehubungan dengan pendapatan yang telah dikenakan pajak penghasilan final tidak boleh dikurangkan. Selisih antara jumlah pajak penghasilan final terutang dengan jumlah yang dibebankan pada perhitungan laba rugi diakui sebagai pajak dibayar dimuka atau pajak yang masih harus dibayar.

Kebijakan pajak penghasilan Perusahaan dikenakan pajak penghasilan final pasal 15 sebagai kewajiban pajak atas jasa pelayaran dalam negeri.

Pajak penghasilan tidak final

Menurut ketentuan perpajakan yang berlaku, utang pajak penghasilan dihitung oleh wajib pajak sendiri (*self assessment system*). Pajak penghasilan yang dibebankan pada laporan laba rugi ditentukan berdasarkan penghasilan kena pajak dalam tahun yang bersangkutan dengan menggunakan tarif pajak yang berlaku.

17 Kewajiban Kontijensi

Kewajiban kontinjensi merupakan kewajiban potensial yang belum pasti, Perusahaan tidak mengakui kewajiban kontinjensi sebagai kewajiban. Kewajiban kontinjensi diungkapkan pada tanggal pelaporan jika ada, uraian dan sifat kewajiban kontinjensi jika praktis dilakukan.

C INFORMASI YANG MENDUKUNG POS-POS LAPORAN KEUANGAN

	2024	2023
1 Kas dan Setara Kas	1.239.549.921	4.550.217.241
Jumlah tersebut merupakan saldo kas/ bank Perumda per 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023 dengan rincian sebagai berikut :		
Kas Kecil	63.300.000	74.800.000
Bank	1.176.249.921	4.475.417.241
Total	1.239.549.921	4.550.217.241
a. Kas Kecil		
Kas Kecil Pusat dan masing-masing Unit	13.300.000	21.800.000
Kas Kantor Pusat	50.000.000	-
Uang persediaan pada Bagian Teknik	-	10.000.000
Uang persediaan pada Bagian Hubungan Langganan	-	3.000.000
Uang persediaan Kantor Pusat (Tambahan)	-	40.000.000
Jumlah	63.300.000	74.800.000
b. Bank		
BRI Cabang Painan - No. Rek: 0270.01.000062.30.6	282.166.616	1.577.301.455
BPD I Cabang Painan - No. Rek: 0400.0202.00272-1	245.127.233	2.005.712.476
BPD II Cabang Painan - No. Rek: 0400.0101.00279-9	349.655.431	788.126.046
BPD III Cabang Painan - No. Rek: 0400.0101.00678-8	11.757.673	11.684.723
Bank Nagari Cabang Painan - No. Rek: 0400.0210.07595-4	16.456.577	10.857.176
Bank Syariah Indonesia - No. Rek: IDR 1993199393	507.035	687.035
BPR Samudera I - No. Rek: 3300100003759	207.393.922	81.028.329
BPR Samudera II - No. Rek: 3300100003760	10.000	10.000
BPR Samudera III - No. Rek: 3300100003761	10.000	10.000
BPR Lengayang , No Rek: 3301000004209	63.165.433	-
Jumlah	1.176.249.921	4.475.417.241
2 Deposito	10.332.000.000	1.732.000.000
Jumlah tersebut merupakan saldo Deposito Perumda per 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023 dengan rincian sebagai berikut :		
Deposito BPR Samudera No: 000641, masa satu bulan, bunga 6,00%	532.000.000	532.000.000
Deposito Bank Nagari No: 174511, masa satu bulan, bunga 3,50%	400.000.000	400.000.000
Deposito Bank Nagari No: 174512, masa satu bulan, bunga 3,50%	400.000.000	400.000.000
Deposito Bank Nagari No: 174513, masa satu bulan, bunga 3,50%	-	400.000.000
Deposito BPR Samudera No: 000718, masa satu bulan, bunga 6,50%	500.000.000	-
Deposito BPR Samudera No: 000719, masa satu bulan, bunga 6,50%	500.000.000	-
Deposito BPR Lengayang No: 004831, masa satu bulan, bunga 6,75%	500.000.000	-
Deposito BPR Lengayang No: 004832, masa satu bulan, bunga 6,75%	500.000.000	-
Deposito BPR Lengayang No: 004833, masa satu bulan, bunga 6,75%	500.000.000	-
Deposito BPR Lengayang No: 004834, masa satu bulan, bunga 6,75%	500.000.000	-
Deposito Bank Nagari No: 174933, masa satu bulan, bunga 5,00%	500.000.000	-
Deposito Bank Nagari No: 174934, masa satu bulan, bunga 5,00%	500.000.000	-
Deposito Bank Nagari No: 174935, masa satu bulan, bunga 5,00%	500.000.000	-
Deposito Bank Nagari No: 174936, masa satu bulan, bunga 5,00%	500.000.000	-
Deposito BPR Samudera No: 000732, masa satu bulan, bunga 6,75%	500.000.000	-
Deposito BPR Samudera No: 000733, masa satu bulan, bunga 6,75%	500.000.000	-

Deposito BPR Samudera No: 000734, masa satu bulan, bunga 6,75%	500.000.000	-
Deposito BPR Samudera No: 000735, masa satu bulan, bunga 6,75%	500.000.000	-
Deposito BRI No: 7965323, masa tiga bulan, bunga 5,25%	500.000.000	-
Deposito BRI No: 7965324, masa tiga bulan, bunga 5,25%	500.000.000	-
Deposito BRI No: 7965325, masa tiga bulan, bunga 5,25%	500.000.000	-
Deposito BRI No: 7965326, masa tiga bulan, bunga 5,25%	500.000.000	-
Jumlah	10.332.000.000	1.732.000.000

C INFORMASI YANG MENDUKUNG POS-POS LAPORAN KEUANGAN-Lanjutan

	2024	2023
3 Piutang Usaha	12.781.435.964	11.384.683.654
Jumlah tersebut merupakan saldo piutang air per 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023, dengan rincian sebagai berikut :		
A Piutang Air	11.624.078.964	10.227.326.654
B Piutang Non Air	1.157.357.000	1.157.357.000
Jumlah Piutang Usaha	12.781.435.964	11.384.683.654
C Akumulasi Penyisihan Piutang	(1.050.814.396)	(940.451.357)
A Piutang Air		
Rincian Piutang Air Berdasarkan Kelompok :		
Rumah Tangga	10.519.293.614	9.354.585.354
Niaga	586.903.700	379.953.700
Sosial Khusus	85.464.750	61.129.050
Sosial Umum	15.603.150	16.673.500
Instansi Pemerintah	416.813.750	414.985.050
Jumlah	11.624.078.964	10.227.326.654
Rincian Piutang Air Berdasarkan Unit Usaha :		
Unit Barung Barung Belantai	74.357.064	67.509.564
Unit Tarusan	234.879.650	190.306.250
Unit Asam Kumbang	259.785.100	254.642.600
Unit Pasar Baru	899.767.580	828.630.840
Unit Lumpo	248.314.850	249.633.300
Unit Painan	3.106.465.094	2.979.833.624
Unit Pasar Kuok	618.772.982	484.518.832
Unit Surantih	2.463.873.900	1.906.838.150
Unit Kambang	1.270.503.300	1.137.089.750
Unit Balai Selasa	226.035.630	224.304.380
Unit Air Haji	849.521.150	751.768.500
Unit Indrapura	1.048.014.863	860.720.463
Unit Tapan	323.787.800	291.530.400
Jumlah	11.624.078.964	10.227.326.654
B. Piutang Non Air		
Unit Tarusan	56.450.000	56.450.000
Unit Asam Kumbang	10.500.000	10.500.000
Unit Pasar Baru	102.850.000	102.850.000
Unit Lumpo	41.700.000	41.700.000
Unit Painan	103.057.000	103.057.000
Unit Batang Kapas	118.200.000	118.200.000
Unit Surantih	285.250.000	285.250.000
Unit Kambang	205.340.000	205.340.000
Unit Balai Selasa	58.200.000	58.200.000
Unit Air Haji	10.760.000	10.760.000
Unit Indrapura	99.350.000	99.350.000
Unit Tapan	65.700.000	65.700.000
Jumlah Seluruhnya	1.157.357.000	1.157.357.000

C INFORMASI YANG MENDUKUNG POS-POS LAPORAN KEUANGAN-Lanjutan

3 Piutang Air-Lanjutan

C. Penyisihan Piutang	Saldo Piutang 2023	Tarif Penyisihan	2024	2023
Rumah Tangga	10.519.293.614	9%	988.813.600	889.632.785
Niaga	586.903.700	10%	59.864.177	42.276.393
Sosial	85.464.750	3%	2.136.619	8.542.180
Akumulasi Penyisihan Piutang 2024			1.050.814.396	940.451.358
Jumlah	11.191.662.064		1.050.814.396	940.451.358

	2024	2023
4 Piutang Lain Lain	196.213.825	304.623.240
Jumlah tersebut merupakan saldo piutang Karyawan per 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023, dengan rincian ;		
Piutang Pegawai	10.588.832	10.588.832
Piutang Pegawai-Penyelewengan Tagihan dan Sambungan Liar	272.685.393	294.034.408
Akumulasi Penyisihan Piutang lain-Lain	87.060.400	
Jumlah	196.213.825	304.623.240

Piutang Pegawai sebesar Rp. 10.588.832,- merupakan Piutang pegawai Sdr. Fahmijan atas Peminjaman ke BPD Cabang Painan dimana hutang pribadi kepada bank tersebut, pelunasannya telah dilakukan oleh perusahaan.

Piutang pegawai sebesar Rp 272.685.393, merupakan pinjaman pegawai yang dibebankan perusahaan akibat penggunaan uang tagihan rekening air yang tidak disetorkan kepada Perusahaan. Dengan rincian sebagai berikut ;

Yuli Hendra	7.797.600	7.797.600
Nofriyanti	1.661.970	1.661.970
Ratna Ningsih	-	3.571.510
Parulian Sinambela	7.401.538	7.401.538
Jaltani	3.980.000	3.980.000
Rinaldi	44.419.460	44.419.460
Alba Arif	54.300.000	59.480.650

Dian Husni Fitri	45.023.800	45.023.800
Syafrin	-	-
Midun	1.211.000	1.211.000
Satria Toni	22.264.400	22.264.400
Rahmadani	-	6.858.000
Itin	18.464.300	18.464.300
Yusmiati	-	2.829.500
Mici Sofia Wulandari	-	1.486.925
M. Iqbal	2.748.225	2.748.225
Dipindahkan	209.272.293	229.198.878

C INFORMASI YANG MENDUKUNG POS-POS LAPORAN KEUANGAN-Lanjutan

4 Piutang Lain Lain - Lanjutan

Jumlah Pindahan	209.272.293	229.198.878
Dameria	34.700.000	39.151.750
Wahyu	2.996.700	2.996.700
Jipo	2.021.000	2.021.000
Devy Rizaldy	3.577.700	3.577.700
Muhammad Azizun Hakim	-	1.619.756
Tiwi	208.500	208.500
Arledion	473.700	473.700
Pernia	135.500	135.500
Yaswarni	-	922.500
Alfiaden Junaidi	9.300.000	13.728.424
Robenson	10.000.000	
Jumlah	272.685.393	294.034.408

Atas tagihan pegawai tersebut diatas manajemen berupaya melakukan kontrol pengawasan yang lebih baik agar dikemudian hari tidak kembali terulang kejadian tersebut diatas. Manajemen telah melakukan sanksi sanksi berupa Pemutusan Hubungan Kerja, Skorsing dengan tetap menagih atas piutang pegawai tersebut diatas.

Penyisihan piutang lain sebesar Rp. 87.060.400 merupakan penyisihan piutang yang sudah lama dan tidak mungkin tertagih. Atas piutang tersebut untuk sementara manajemen melakukan penyisihan secara bertahap sebelum dikeluarkannya keputusan dari Pemerintah untuk dihapuskan. Dengan rincian sebagai

-Piutang Pegawai (Fahmijan)	10.588.832,00
-Yuli Hendra	7.797.600,00
-Nofriyanti	1.661.970,00
-Parulian Sinambela	7.401.538,00
-Jaltani	3.980.000,00
-Rinaldi	44.419.460,00
Midun	1.211.000,00
Robenson	10.000.000
Total	87.060.400,00

5 Persediaan	2024	2023
Jumlah tersebut merupakan saldo persediaan Bahan Instalasi per 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023, dengan rincian sebagai berikut :	623.072.121	255.530.703
Persediaan Bahan Instalasi - Water Meter	305.358.000	330.000
Persediaan Bahan Instalasi - Pipa PVC	27.788.989	64.949.262
Persediaan Bahan Instalasi - Pipa HDPE	171.578.480	9.884.700
Persediaan Bahan Instalasi - Pipa GI	2.839.500	2.839.500
Persediaan Bahan Instalasi - Male Thread Adaptor	17.760	71.040
Persediaan Bahan Instalasi - Klem Sadle	304.140	3.728.490
Persediaan Bahan Instalasi - Stop Kran	4.430.010	23.031.390
Persediaan Bahan Instalasi - Tee	9.944.208	14.343.338
Persediaan Bahan Instalasi - Lem Kaleng	-	854.700
Persediaan Bahan Instalasi - Kenie	5.582.540	2.718.720
Persediaan Bahan Instalasi - SDD	1.313.796	
Persediaan Bahan Instalasi - SDL	4.784.655	3.094.680
Persediaan Bahan Instalasi - Gate Valve	1.998.000	
Persediaan Bahan Instalasi - Elbow	235.000	235.000
Persediaan Bahan Instalasi - Reducer	2.746.350	2.418.900
Persediaan Bahan Instalasi - Box Meter	3.608.610	2.025.750
Persediaan Bahan Instalasi - Double Neple	1.235.874	921.300
Persediaan Bahan Instalasi - Flange	19.185.450	43.026.750
Persediaan Bahan Instalasi - DOP	4.288.485	3.292.260
Persediaan Bahan Instalasi - Baut	4.815.180	3.565.320
Persediaan Bahan Instalasi - Bend	6.879.060	10.597.560
Persediaan Bahan Instalasi - Air Valve	12.760.000	16.386.000
Persediaan Bahan Instalasi - Selang Benang ø ½"	1.387.500	
Persediaan Bahan Instalasi - Selang Spiral	2.664.000	2.664.000
Dipindahkan	595.745.586	210.978.660

C INFORMASI YANG MENDUKUNG POS-POS LAPORAN KEUANGAN-Lanjutan

5 Persediaan - Lanjutan	2024	2023
Jumlah Pindahan	595.745.586	210.978.660
Persediaan Bahan Instalasi - Manometer	499.500	832.500
Persediaan Bahan Instalasi - Kawat Segel Meter	2.386.500	2.386.500
Persediaan Bahan Instalasi - Clean Out ND	-	72.150
Persediaan Bahan Instalasi - Giboult Join	11.100.000	19.015.500
Persediaan Bahan Instalasi - Karet Giboult Join	266.400	266.400
Persediaan Bahan Instalasi - Stub End	1.998.000	5.544.000
Persediaan Bahan Instalasi - Socket	1.452.435	3.055.053
Persediaan Bahan Instalasi - Karet Packing	2.808.300	2.002.440
Persediaan Bahan Instalasi - Karet Kopleng Meteran	266.400	-
Persediaan Bahan Instalasi - Butterfly Valve ND	4.107.000	7.381.500
Persediaan Bahan Instalasi - Check Valve Onda ND 50 mm	965.700	-
Persediaan Bahan Instalasi - Katup Searah	832.500	3.996.000
Persediaan Bahan Kimia - Kaporit	643.800	-

Jumlah	623.072.121	255.530.703
6 Biaya Dibayar Dimuka	2024	2023
Jumlah tersebut merupakan saldo biaya dibayar dimuka per 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023, dengan rincian sebagai berikut :	33.402.356	37.952.897
Sewa Rumah Dinas dan Kantor	33.402.356	37.952.897
Jumlah	33.402.356	37.952.897
Sewa Rumah Dinas dan Kantor		
Sewa Rumah Dinas dan Kantor Unit Surantih	7.776.849	190.730
Sewa Rumah Dinas dan Kantor Unit Pasar Kuok	4.294.199	12.847.397
Sewa Rumah Dinas dan Kantor Unit Pasar Baru	3.632.952	9.643.836
Sewa Rumah Dinas dan Kantor Unit Air Haji	4.746.575	4.716.438
Sewa Rumah Dinas dan Kantor Unit Inderapura	12.675.616	5.834.256
Sewa Rumah Dinas dan Kantor Unit Tarusan	276.164	4.720.240
Jumlah	33.402.356	37.952.897

C INFORMASI YANG MENDUKUNG POS-POS LAPORAN KEUANGAN-Lanjutan

7 Aset Tetap	2024	2023
Jumlah tersebut merupakan nilai buku aset tetap yang dikuasai Perumda per 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023, dengan rincian sebagai berikut :	59.587.273.704	60.182.588.423
31 Desember 2024		
Harga Perolehan	Saldo	Mutasi
	Per 31 Des 2023	Tambah
Tanah	333.141.315	-
Instalasi Sumber	5.082.067.759	19.595.028
Instalasi Perpompaan	430.798.299	-
Instalasi Pengolahan Air	13.337.610.002	2.670.711.770
Instalasi Transmisi dan Distribusi	95.612.152.660	2.247.195.002
Bangunan dan Perbaikan	2.261.887.801	508.622.060
Peralatan dan Perlengkapan	388.462.800	-
Kendaraan dan Alat Angkut	1.429.687.744	-
Inventaris dan Peralatan Kantor	1.011.994.947	146.606.300
Jumlah	119.887.803.327	5.592.730.160
		-
Saldo	Per 31 Des 2024	
Tanah	333.141.315	
Instalasi Sumber	5.101.662.787	
Instalasi Perpompaan	430.798.299	
Instalasi Pengolahan Air	16.008.321.772	
Instalasi Transmisi dan Distribusi	97.859.347.662	
Bangunan dan Perbaikan	2.770.509.861	
Peralatan dan Perlengkapan	388.462.800	
Kendaraan dan Alat Angkut	1.429.687.744	
Inventaris dan Peralatan Kantor	1.158.601.247	
Jumlah	125.480.533.487	
Akumulasi Penyusutan	Saldo	Mutasi
	Per 31 Des 2023	Tambah
Tanah	-	-
Instalasi Sumber	4.017.569.049	269.983.666
Instalasi Perpompaan	376.690.502	20.512.414
Instalasi Pengolahan Air	7.842.777.092	715.462.253
Instalasi Transmisi dan Distribusi	44.232.023.106	4.892.804.008
Bangunan dan Perbaikan	708.965.656	138.525.493
Peralatan dan Perlengkapan	323.907.800	22.760.000
Kendaraan dan Alat Angkut	1.371.609.890	14.811.122
Inventaris dan Peralatan Kantor	831.671.808	113.185.923
Jumlah	59.705.214.903	6.188.044.880
Nilai Buku	60.182.588.423	-
		65.893.259.783
		59.587.273.704

C INFORMASI YANG MENDUKUNG POS-POS LAPORAN KEUANGAN-Lanjutan

7 Aset Tetap - Lanjutan

31 Desember 2023					
Harga Perolehan	Saldo	Mutasi	Saldo	Per	
	Per 31 Des 2022	Tambah	Kurang	31 Des 2023	
Tanah	333.141.315	-		333.141.315	
Instalasi Sumber	5.046.143.759	35.924.000		5.082.067.759	
Instalasi Perpompaan	430.798.299	-		430.798.299	
Instalasi Pengolahan Air	12.600.058.702	737.551.300		13.337.610.002	
Instalasi Transmisi dan Distribusi	91.570.423.259	4.041.729.401		95.612.152.660	
Bangunan dan Perbaikan	1.764.517.626	497.370.175		2.261.887.801	
Peralatan dan Perlengkapan	304.872.800	83.590.000		388.462.800	
Kendaraan dan Alat Angkut	1.376.998.768	52.688.976		1.429.687.744	
Inventaris dan Peralatan Kantor	804.417.366	207.577.581		1.011.994.947	
Jumlah	114.231.371.894	5.656.431.433	-	119.887.803.327	
Akumulasi Penyusutan	Saldo	Mutasi	Saldo	Per	
	Per 31 Des 2022	Tambah	Kurang	31 Des 2023	
Tanah	-	-		-	
Instalasi Sumber	3.748.810.072	268.758.977		4.017.569.049	
Instalasi Perpompaan	356.178.087	20.512.414		376.690.502	
Instalasi Pengolahan Air	7.294.438.543	548.338.549		7.842.777.092	
Instalasi Transmisi dan Distribusi	39.451.415.473	4.780.607.633		44.232.023.106	
Bangunan dan Perbaikan	595.871.266	113.094.390		708.965.656	
Peralatan dan Perlengkapan	301.147.800	22.760.000		323.907.800	
Kendaraan dan Alat Angkut	1.356.798.768	14.811.122		1.371.609.890	
Inventaris dan Peralatan Kantor	755.137.461	76.534.348		831.671.808	
Jumlah	53.859.797.470	5.845.417.433	-	59.705.214.903	
Nilai Buku	60.371.574.424			60.182.588.423	

8 Aset Tidak Lancar Lainnya	2024	2023
Jumlah tersebut merupakan saldo aset tidak lancar lainnya per 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023, dengan rincian berikut :	386.500.000	386.500.000
- Biaya Ditangguhkan	386.500.000	386.500.000
Jumlah	386.500.000	386.500.000
9 Utang Usaha	2024	2023
Jumlah tersebut merupakan saldo utang usaha per 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023, dengan rincian berikut :	260.595.986	260.595.986

Utang Kendaraan	-	-
Utang Asesoris dan Instalasi SR	126.107.137	126.107.137
Utang Pihak Ke-3	59.488.849	59.488.849
Utang Bangunan Kantor	75.000.000	75.000.000
Jumlah	260.595.986	260.595.986
C INFORMASI YANG MENDUKUNG POS-POS LAPORAN KEUANGAN-Lanjutan		
9 Utang Usaha-Lanjutan		
<i>Rincian utang bangunan kantor :</i>		
- Pembelian Bangunan Kantor	175.000.000	
Pembayaran Uang Muka / Tahap I - Pembelian Rumah untuk Kantor PDAM Unit Kambang, tanggal 16 Februari 2023	25.000.000	
- Pembayaran Tahap II Pembelian Rumah untuk Kantor PDAM Unit Kambang, tanggal 28 Juli 2023	75.000.000	
Jumlah	75.000.000	
<i>Selama tahun 2024 perusahaan belum melakukan pembayaran</i>		
	2024	2023
10 Biaya Yang Masih Dibayar	-	64.613.508
Jumlah tersebut merupakan saldo biaya yang masih harus dibayar per 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023, dengan rincian berikut :		
Utang Gaji	-	-
Utang Lainnya	-	64.613.509
Jumlah	-	64.613.509
	2024	2023
11 Utang Jangka Panjang Yang Telah Jatuh Tempo	20.055.026	173.973.684
Jumlah tersebut merupakan utang jangka pendek perusahaan kepada karyawan per 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023		
Utang kepada PT Karsa Tirta Dharma Persada	20.055.026	20.055.026
Utang kepada Pegawai PDAM Kab Pesisir Selatan	-	153.918.658
Jumlah	20.055.026	173.973.684
Utang kepada PT Karsa Tirta Dharma Persada merupakan kredit pengadaan kendaraan bermotor roda dua sesuai dengan Surat Perjanjian Nomor 01.02-SP/PDAM-PS/IV.03 dan Nomor 10.00-PK/KKTDP/04.03 tanggal 1 April 2003.		
Saldo Utang Kepada Pegawai PDAM Kabupaten Pesisir Selatan merupakan bagian hutang pegawai kepada BPD Sumbar dan BPR Samudera secara kolektif dengan jaminan SK Pegawai yang dananya dipergunakan oleh perusahaan untuk menutup kekurangan biaya operasional.		
	2024	2023
12 Utang Jangka Panjang Yang Belum Jatuh Tempo	-	544.573.440
Saldo Utang Jangka Panjang yang belum jatuh tempo merupakan utang PDAM Kabupaten Pesisir Selatan kepada BPD (Bank Nagari) Cabang Painan dan BPR Samudera melalui pinjaman atas nama karyawan dengan jaminan SK Pegawai, yang harus dilunasi dalam jangka waktu lima tahun. Dana hasil pinjaman a.n. karyawan tersebut diterima perusahaan untuk menutupi kekurangan biaya operasional. Kewajiban angsuran/ pelunasan pinjaman ke BPD (Bank Nagari) dipotong langsung dari rekening perusahaan.		
	2024	2023
13 Penyertaan Modal Pempus Yang Belum Ditetapkan	52.233.883.381	52.233.883.381
Jumlah tersebut merupakan penyertaan modal pemerintah pusat yang belum ditetapkan statusnya per 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023, terdiri dari :		
Penyertaan Pemerintah Yang Belum Diserah-terimakan	29.943.269.258	29.943.269.258
Penyertaan Pemkab Pesisir Selatan Yang Belum Diserah-terimakan	22.290.614.123	22.290.614.123
Jumlah	52.233.883.381	52.233.883.381
C INFORMASI YANG MENDUKUNG POS-POS LAPORAN KEUANGAN-Lanjutan		
	2024	2023
14 Penyertaan Modal Pemda Yang Telah Ditetapkan	70.144.069.957	63.081.002.910
Jumlah tersebut merupakan penyertaan modal Pemda yang telah ditetapkan per 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023, terdiri dari :		
Penyertaan Modal Pemda 2022	59.555.497.910	59.555.497.910
Program Hibah Air Minum Berbasis Kinerja Bantuan Pemerintah Australia, Nomor : PPH-6/MK.7/DTK.03/AMBK-DFAT/2021, Tanggal 15 Februari 2021	1.725.505.000	1.725.505.000
Hibah Air Minum Perkotaan Yang Bersumber Dari Penerimaan Dalam Negeri APBN TA 2023, Nomor : S-2/MK.7/2023	1.800.000.000	1.800.000.000
Program Hibah Air Minum Berbasis Kinerja Bantuan Pemerintah Australia, Nomor : PPH-6/MK.7/DTK.03/AMBK-DFAT/2021, Tanggal 15 Februari 2021	7.063.067.047	-
Jumlah	70.144.069.957	63.081.002.910
	2024	2023
15 Hibah	785.867.900	785.867.900
Jumlah tersebut merupakan hibah Pemerintah Daerah per 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023		
Hibah	785.867.900	785.867.900
Jumlah	785.867.900	785.867.900
	2024	2023
15 Laba (Rugi) Ditahan	(39.336.775.326)	(39.403.812.666)
Jumlah tersebut merupakan akumulasi laba (rugi) ditahan sampai dengan 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023, terdiri dari :		
Laba (Rugi) Ditahan	(39.403.812.666)	(39.403.812.666)
Penyesuaian	67.037.340	-
Jumlah	(39.336.775.325)	(39.403.812.666)
	2024	2023
16 Pendapatan Penjualan Air	20.207.858.824	19.387.932.036
Jumlah tersebut merupakan pendapatan penjualan air 31 Desember 2023 dan 2022, dengan rincian sebagai berikut :		

Jenis Pendapatan

Harga Air	20.184.308.824	19.334.057.036
Tanki Air	23.550.000	53.875.000
Jumlah	20.207.858.824	19.387.932.036

Rincian berdasarkan per Unit Usaha :

B. B. Belantai	28.396.000	29.698.500
Tarusan	306.119.700	269.985.350
Pasar Baru	1.771.214.850	1.818.478.810
Asam Kumbang	8.731.600	27.357.600
Lumpo	244.010.240	282.066.850
Painan	6.767.578.204	6.871.829.736
Dipindahkan	9.126.050.594	9.299.416.846

C INFORMASI YANG Mendukung pos-pos Laporan Keuangan-Lanjutan

16 Pendapatan Penjualan Air-Lanjutan

Jumlah Pindahan	9.126.050.594	9.299.416.846
Pasar Kuok	895.708.710	750.057.700
Tuik	646.386.750	636.710.550
Surantih	3.184.774.840	2.862.775.340
Kambang	1.930.468.750	2.008.742.350
Balai Selasa	879.916.580	848.605.350
Air Haji	1.560.855.700	1.277.393.350
Indrapura	1.806.893.700	1.536.669.150
Tapan	153.253.200	113.686.400
Jumlah	20.184.308.824	19.334.057.036
Tanki Air	23.550.000	53.875.000
Jumlah Seluruhnya	20.207.858.824	19.387.932.036

Rincian berdasarkan per Kelompok Pelanggan :

a. Rumah Tangga		
1. Rumah Tangga 1	234.547.850	262.186.800
2. Rumah Tangga 2	942.276.850	911.828.600
3. Rumah Tangga 3	15.164.476.279	14.497.744.686
4. Rumah Tangga 4	665.584.000	668.412.400
5. Rumah Tangga 5	121.884.800	141.545.550
Jumlah	17.128.769.779	16.481.718.036
b. Niaga		
1. Niaga Kecil	1.030.891.305	823.226.450
2. Niaga Menengah	20.920.600	14.140.600
3. Niaga Besar	136.397.140	126.951.750
Jumlah	1.188.209.045	964.318.800
c. Sosial		
1. Sosial Khusus	543.854.850	528.860.900
2. Sosial/ Hidran Um	34.727.700	29.920.100
Jumlah	578.582.550	558.781.000
d. Instansi Pemerintah dan Sekolah		
1. Sekolah Neg Swasta	277.275.400	307.998.900
2. Instansi Pemerintah	1.008.940.950	998.343.700
Jumlah	1.286.216.350	1.306.342.600
e. Industri		
1. Industri Menengah	1.303.500	21.726.600
2. Industri Kecil	1.227.600	1.170.000
Jumlah	2.531.100	22.896.600
f. Air Tangki	23.550.000	53.875.000
Total	20.207.858.824	19.387.932.036

C INFORMASI YANG Mendukung pos-pos Laporan Keuangan-Lanjutan

17 Pendapatan Penjualan Non Air

Jumlah tersebut merupakan pendapatan penjualan non air 31 Desember 2024 dan 2023, dengan rincian sebagai berikut :

	2024	2023
Jumlah	1.411.992.184	1.610.806.942
Pendapatan Denda	818.784.000	877.536.200
Pendapatan Sambungan Baru	562.410.000	638.967.500
Pendapatan Penyambungan Kembali	5.490.000	4.065.000
Pendapatan Balik Nama	910.000	890.000
Pendapatan Non Air Lainnya	24.398.184	89.348.242
Jumlah	1.411.992.184	1.610.806.942

18 Beban Operasional

Jumlah tersebut merupakan beban operasional Perumda 31 Desember 2024 dan 2023, dengan rincian sebagai berikut :

	2024	2023
Jumlah	21.923.217.092	20.214.898.598
Beban Pegawai	11.572.879.991	10.134.927.588
Beban Bahan Bakar	46.718.491	50.898.200
Beban Penyisihan Piutang	197.423.450	209.173.393
Beban Pemeliharaan	480.308.860	392.746.560
Beban Administrasi dan Umum Lainnya	3.437.841.421	3.581.735.423
Jumlah	15.735.172.213	14.369.481.165
Beban Penyusutan Aset Tetap	6.188.044.880	5.845.417.433
Jumlah Seluruhnya	21.923.217.092	20.214.898.598

C INFORMASI YANG Mendukung pos-pos Laporan Keuangan-Lanjutan

Rincian Beban Pegawai

Biaya Pegawai Bagian Sumber	906.433.745	829.828.391
Biaya Pegawai Bagian Pengolahan	163.219.520	146.403.548
Biaya Pegawai Bagian Transmisi & Distribusi	3.586.724.152	3.151.609.869
Biaya Pegawai Bagian Adm & Umum	6.916.502.574	6.007.085.780
Jumlah	11.572.879.991	10.134.927.588

Rincian Bahan Bakar

Beban Bahan Bakar	46.718.491	50.898.200
Jumlah	46.718.491	50.898.200
Beban Penyisihan Piutang	197.423.450	209.173.393
Rincian Beban Pemeliharaan	2024	2023
Pemeliharaan Bangunan Instalasi & Penyempurnaan Tanah	-	-
Pemeliharaan Pengumpul & Reservoir	-	-
Pemeliharaan Saluran (Sumber)	9.316.000	7.124.000
Pemeliharaan Instalasi Pompa	-	573.000
Pemeliharaan Instalasi pengolahan Air	13.715.000	-
Pemakaian Bahan / Perlengkapan	38.007.000	40.201.900
Pemeliharaan Pipa Transdist	251.350.000	177.552.000
Pemeliharaan Pipa Dinas		15.555.000
Pemeliharaan Water Meter		-
Biaya Pemeliharaan & Inventaris Kantor	11.015.250	11.880.000
Pemeliharaan Taman & Lapangan	303.000	600.000
Pemeliharaan Kendaraan	148.785.610	126.837.660
Pemeliharaan Bangunan	7.817.000	12.423.000
Jumlah	480.308.860	392.746.560
Beban Penyusutan Aktiva Tetap dan Amortisasi		
Beban Penyusutan Instalasi Sumber Air	269.983.666	268.758.977
Beban Penyusutan Instalasi Perpompaan	20.512.414	20.512.414
Beban Penyusutan Instalasi Pengolahan Air	715.462.253	548.338.549
Beban Penyusutan Instalasi Transmisi dan Distribusi	4.892.804.008	4.780.607.633
Beban Penyusutan Instalasi Bangunan	138.525.493	113.094.390
Beban Penyusutan Instalasi Peralatan dan Perlengkapan Kantor	22.760.000	22.760.000
Beban Penyusutan Instalasi Kendaraan	14.811.122	14.811.122
Beban Penyusutan Instalasi Inventaris Kantor	113.185.923	76.534.348
Jumlah	6.188.044.880	5.845.417.433

C INFORMASI YANG MENDUKUNG POS-POS LAPORAN KEUANGAN-Lanjutan
Beban Operasional-Lanjutan

Rincian Beban Operasi Lainnya	2024	2023
Rupa-rupa Biaya Operasi Sumber	108.781.250	121.523.750
Pajak Air	73.709.854	74.129.850
Rupa-rupa Biaya Pengolahan Air	39.954.600	35.058.700
Biaya Listrik (Pengolahan Air)	67.364.138	39.779.374
Rupa-rupa Biaya Operasi Trandist	397.653.500	306.643.750
Biaya Kantor	200.980.351	194.215.179
Biaya Hubungan Langganan	943.818.266	1.066.722.048
Biaya Penelitian dan Pengembangan	3.535.000	4.644.000
Biaya Keuangan	145.032.000	242.640.565
Biaya Iuran / Berlangganan	22.641.896	26.983.339
Biaya Perjalanan Dinas	213.752.360	216.883.612
Biaya Jasa Profesional	28.800.000	26.300.000
Biaya Sewa	92.899.222	88.557.432
Biaya Audit	80.365.000	38.850.000
Biaya Pajak Bumi dan Bangunan	25.000	-
Biaya Retribusi	636.000	650.000
Biaya Bank	-	14.614.553
Rupa-rupa Biaya Umum Lainnya	1.017.892.984	1.083.539.271
Jumlah	3.437.841.421	3.581.735.423

19 Pendapatan (Beban) Non Operasional	2024	2023
Jumlah tersebut merupakan beban non operasional Perumda 31 Desember 2024 dan 2023, dengan rincian sebagai berikut :	324.302.654	(630.893.721)
Pendapatan Non Operasional		
Pendapatan Non Operasional Lainnya	376.073.003	129.201.039
Jumlah	376.073.003	129.201.039
Beban Non Operasional		
Beban Bank	(51.770.349)	-
Penyesuaian Pendapatan Non Operasional	-	(53.450.598)
Penyesuaian Aset Lainnya	-	(706.644.162)
Jumlah	(51.770.349)	(760.094.760)
Jumlah seluruhnya	324.302.654	(630.893.721)

20 Kejadian Penting Setelah Tanggal Neraca
Tidak terdapat kejadian penting setelah tanggal neraca.

21 Tanggung Jawab Atas Laporan Keuangan
Manajemen Perumda Tirta Langkisau Kabupaten Pesisir Selatan bertanggung jawab atas laporan keuangan yang penyusunannya diselesaikan pada tanggal ... Maret 2025

LAPORAN KEUANGAN

BPR SAMUDERA

**PT. BANK PERKREDITAN RAKYAT
S A M U D E R A**

**LAPORAN KEUANGAN
TAHUN BUKU YANG BERAKHIR PADA TANGGAL
31 DESEMBER 2024 DAN 2023**

**DAN
LAPORAN AUDITOR INDEPENDEN**

PT. BANK PERKREDITAN RAKYAT SAMUDERA
LAPORAN KEUANGAN
TANGGAL 31 DESEMBER 2024 DAN 2023

DAFTAR ISI

Halaman

SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB DIREKSI

LAPORAN AUDITOR INDEPENDEN

LAPORAN POSISI KEUANGAN 1

LAPORAN LABA RUGI 2

LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS 3

LAPORAN ARUS KAS 4

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN 5 – 24

LAMPIRAN : Rincian Beban Administrasi dan Umum

**SURAT PERNYATAAN
TANGGUNG JAWAB DIREKSI**



**SURAT PERNYATAAN
TANGGUNG JAWAB DIREKSI
T E N T A N G
TANGGUNG JAWAB ATAS LAPORAN KEUANGAN
UNTUK TAHUN-TAHUN YANG BERAKHIR
31 DESEMBER 2024 DAN 2023
PT. BANK PERKREDITAN RAKYAT SAMUDERA**

Memenuhi ketentuan dalam Undang-Undang Republik Indonesia No. 8 Tahun 1997 tentang Dokumen Perusahaan dan Undang-Undang Republik Indonesia No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

1. Nama : **Algusriandi, SE**
Alamat kantor : Jl. Trikora No. 25 Painan Selatan Kecamatan IV Jurai Kabupaten Pesisir Selatan
Telepon : 0756 21816
Jabatan : Direktur Utama
2. Nama : **Jon Kenedy, S.Ag**
Alamat kantor : Jl. Trikora No. 25 Painan Selatan Kecamatan IV Jurai Kabupaten Pesisir Selatan
Telepon : 0756 21816
Jabatan : Direktur

menyatakan bahwa :

1. PT. Bank Perkreditan Rakyat Samudera adalah entitas yang memenuhi kriteria sebagai entitas yang tidak memiliki akuntabilitas publik signifikan sebagaimana didefinisikan dalam Standar Akuntansi Keuangan Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik.
2. Dengan persetujuan pemegang saham dan Dewan Komisaris, Direksi PT. Bank Perkreditan Rakyat Samudera telah memutuskan untuk menyusun laporan keuangan dengan menggunakan basis Standar Akuntansi Keuangan Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik dan ketentuan yang ditetapkan otoritas perbankan.
3. Direksi telah menyusun dan menyajikan laporan keuangan PT. Bank Perkreditan Rakyat Samudera untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 yang terdiri atas neraca, laporan laba rugi, laporan perubahan ekuitas, laporan arus kas dan catatan atas laporan keuangan sebagaimana disajikan dalam laporan keuangan terlampir.
4. Laporan keuangan PT. Bank Perkreditan Rakyat Samudera untuk tahun yang berakhir 31 Desember 2024 tersebut telah disusun dan disajikan sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik dan ketentuan yang ditetapkan otoritas perbankan.
5. Semua informasi dalam laporan keuangan PT. Bank Perkreditan Rakyat Samudera telah dimuat secara lengkap dan benar. Laporan keuangan tersebut tidak mengandung informasi atau fakta material yang tidak benar, dan tidak menghilangkan informasi atau fakta material.

Kantor Pusat :
Jl. Trikora No. 25 Painan Selatan
Kec IV Jurai Kab Pesisir Selatan 25612
Telp. (0756) 21816
Whatsapp. 0821 6991 1397

Kantor Kas :
Simp Paleh Jalan Raya Balaiselasa Kec. Ranah Pesisir
Jl. Pasar Lakitan Kec Lengayang



PT. BANK PEKREDITAN RAKYAT

BSA

SAMUDERA

6. PT. Bank Perkreditan Rakyat Samudera telah membuat catatan, bukti pembukuan, dan data pendukung administrasi keuangan, yang merupakan bukti adanya hak dan kewajiban serta kegiatan usaha perusahaan, termasuk catatan yang terdiri dari neraca tahunan, perhitungan laba rugi tahunan, rekening, jurnal transaksi harian atau setiap tulisan yang berisi keterangan mengenai hak dan kewajiban serta hal-hal lain yang berkaitan dengan kegiatan usaha suatu perusahaan dan dokumen-dokumen tersebut disimpan oleh perusahaan sesuai ketentuan Undang-Undang yang berlaku.
7. Direksi dan Dewan Komisaris PT. Bank Perkreditan Rakyat Samudera bertanggung jawab atas penyusunan dan penyajian laporan keuangan PT. Bank Perkreditan Rakyat Samudera, serta sistem pengendalian internal dalam PT. Bank Perkreditan Rakyat Samudera.

Demikian pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya.

B S Agusriandi, SE
Direktur Utama

Jon Kenedy, S.Ag
Direktur

10 Januari 2025

Kantor Pusat :
Jl. Trikora No. 25 Painan Selatan
Kec IV Jurai Kab Pesisir Selatan 25612
Telp. (0756) 21816
Whatsapp. 0821 6991 1397

Kantor Kas :
Simp Paleh Jalan Raya Balaiselasa Kec. Ranah Pesisir
Jl. Pasar Lakitan Kec Lengayang

LAPORAN AUDITOR INDEPENDEN



Kantor Akuntan Publik
Bustaman, Ezeddin & Putranto
Akuntan Publik Terdaftar dan Konsultan Manajemen
Izin Usaha No. : 1287/KM.1/2017

Kantor Cabang :
Jl. Bhakti No. 61, Asrama Haji Tabling, Padang 25171
Telp. 0751-7055101 • E-mail : herryputranto@kapbep.com
herryakuntan@yahoo.co.id

LAPORAN AUDITOR INDEPENDEN

Nomor : 00007/3.0361/AU.2/07/0329-3/1A/2025

Kepada Yth.
Dewan Komisaris dan Direksi
PT. BPR SAMUDERA

Opini Wajar

Kami telah mengaudit laporan keuangan PT. BPR Samudera ("Perusahaan") terlampir, yang terdiri dari laporan neraca tanggal 31 Desember 2024, laporan laba rugi, laporan perubahan ekuitas, dan laporan arus kas untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut, serta catatan atas laporan keuangan, termasuk ikhtisar kebijakan akuntansi signifikan.

Menurut opini kami, laporan keuangan terlampir menyajikan secara wajar dalam semua hal yang material, posisi keuangan Perusahaan tanggal 31 Desember 2024, serta kinerja keuangan dan arus kasnya untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut, sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik.

Basis Opini

Kami melaksanakan audit berdasarkan Standar Audit yang ditetapkan oleh Institut Akuntan Publik Indonesia. Tanggung jawab kami menurut standar tersebut diuraikan lebih lanjut dalam paragraf Tanggung Jawab Auditor terhadap Audit atas Laporan Keuangan pada laporan kami. Kami independen terhadap Perusahaan berdasarkan ketentuan etika yang relevan dalam audit kami atas laporan keuangan di Indonesia, dan kami telah memenuhi tanggung jawab etika lainnya berdasarkan ketentuan tersebut. Kami yakin bahwa bukti audit yang telah kami peroleh adalah cukup dan tepat untuk menyediakan suatu basis bagi opini audit kami.

Hal Audit Utama

Hal audit utama adalah hal-hal yang, menurut pertimbangan professional kami, merupakan hal yang paling signifikan dalam audit kami atas laporan keuangan periode kini. Hal-hal tersebut disampaikan dalam konteks audit kami atas laporan keuangan secara keseluruhan, dan dalam merumuskan opini kami atas laporan keuangan terkait, kami tidak menyatakan suatu opini terpisah atas hal audit utama tersebut.

Kualitas Aset Produktif dan Pembentukan Penyisihan Penghapusan Aset Produktif BPR.
Berdasarkan POJK Nomor 1 Tahun 2024, BPR wajib menentukan Kualitas Aset Produktif untuk Kredit yang diberikan, Kualitas Aset Produktif pada Sertifikat Bank Indonesia, Kualitas Aset Produktif untuk Penempatan Pada Bank Lain dan Penyisihan Penghapusan Aset Produktif.

Tanggung Jawab Manajemen atas Laporan Keuangan dan Pihak yang Bertanggung Jawab atas Tata Kelola terhadap Laporan Keuangan

Manajemen bertanggung jawab atas penyusunan dan penyajian wajar laporan keuangan tersebut sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik, dan atas pengendalian internal yang dianggap perlu oleh manajemen untuk memungkinkan penyusunan laporan keuangan yang bebas dari kesalahan penyajian material, baik yang disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan.



Kantor Pusat :
Gedung Sentra Kramat Blok B No.18, Jl. Kramat Raya No.7-9
Telp. 021-3156131 • Fax. 021-3148966, Jakarta Pusat 10450
www.kapbep.com • E-mail : infokap@kapbep.com

Dalam penyusunan laporan keuangan, manajemen bertanggung jawab untuk menilai kemampuan Perusahaan dalam mempertahankan kelangsungan usahanya, mengungkapkan sesuai dengan kondisinya, hal-hal yang berkaitan dengan kelangsungan usaha, dan menggunakan basis akuntansi kelangsungan usaha, kecuali manajemen memiliki intensi untuk melikuidasi Perusahaan atau menghentikan operasi, atau tidak memiliki alternatif yang realistis selain melaksanakannya.

Pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola bertanggung jawab untuk mengawasi proses pelaporan keuangan Perusahaan.

Tanggung Jawab Auditor terhadap Audit atas Laporan Keuangan

Tujuan kami adalah untuk memperoleh keyakinan memadai tentang apakah laporan keuangan secara keseluruhan bebas dari kesalahan penyajian material, baik yang disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan, dan untuk menerbitkan laporan auditor yang mencakup opini kami. Keyakinan memadai merupakan suatu tingkat keyakinan tinggi, namun bukan merupakan suatu jaminan bahwa audit yang dilaksanakan berdasarkan Standar Audit akan selalu mendeteksi kesalahan penyajian material ketika hal tersebut ada. Kesalahan penyajian dapat disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan dan dianggap material jika, baik secara individual maupun secara agregat, dapat diekspektasikan secara wajar akan memengaruhi keputusan ekonomi yang diambil oleh pengguna berdasarkan laporan keuangan tersebut.

Sebagai bagian dari suatu audit berdasarkan Standar Audit, kami menerapkan pertimbangan profesional dan mempertahankan skeptisisme profesional selama audit. Kami juga:

- 1. Mengidentifikasi dan menilai risiko kesalahan penyajian material dalam laporan keuangan, baik yang disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan, mendesain dan melaksanakan prosedur audit yang responsif terhadap risiko tersebut, serta memperoleh bukti audit yang cukup dan tepat untuk menyediakan basis bagi opini kami. Risiko tidak terdeteksinya kesalahan penyajian material yang disebabkan oleh kecurangan lebih tinggi dari yang disebabkan oleh kesalahan, karena kecurangan dapat melibatkan kolusi, pemalsuan, penghilangan secara sengaja, pernyataan salah, atau pengabaian pengendalian internal.*
- 2. Memperoleh suatu pemahaman tentang pengendalian internal yang relevan dengan audit untuk mendesain prosedur audit yang tepat sesuai dengan kondisinya, tetapi bukan untuk tujuan menyatakan opini atas keefektifitasan pengendalian internal Perusahaan.*
- 3. Mengevaluasi ketepatan kebijakan akuntansi yang digunakan serta kewajaran estimasi akuntansi dan pengungkapan terkait yang dibuat oleh manajemen.*
- 4. Menyimpulkan ketepatan penggunaan basis akuntansi kelangsungan usaha oleh manajemen dan, berdasarkan bukti audit yang diperoleh, apakah terdapat suatu ketidakpastian material yang terkait dengan peristiwa atau kondisi yang dapat menyebabkan keraguan signifikan atas kemampuan Perusahaan untuk mempertahankan kelangsungan usahanya. Ketika kami menyimpulkan bahwa terdapat suatu ketidakpastian material, kami diharuskan untuk menarik perhatian dalam laporan auditor kami ke pengungkapan terkait dalam laporan keuangan atau, jika pengungkapan tersebut tidak memadai, harus menentukan apakah perlu untuk memodifikasi opini kami. Kesimpulan kami didasarkan pada bukti audit yang diperoleh hingga tanggal laporan auditor kami. Namun, peristiwa atau kondisi masa depan dapat menyebabkan Perusahaan tidak dapat mempertahankan kelangsungan usaha.*
- 5. Mengevaluasi penyajian, struktur, dan isi laporan keuangan secara keseluruhan, termasuk pengungkapannya, dan apakah laporan keuangan mencerminkan transaksi dan peristiwa yang mendasarinya dengan suatu cara yang mencapai penyajian wajar.*



Kantor Akuntan Publik

Bustaman, Ezeddin & Putranto

Kami mengomunikasikan kepada pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola mengenai, antara lain, ruang lingkup dan saat yang direncanakan atas audit, serta temuan audit signifikan, termasuk setiap defisiensi signifikan dalam pengendalian internal yang teridentifikasi oleh kami selama audit.

Penekanan suatu hal

Seperti diungkapkan pada catatan 30 atas laporan keuangan, NPL kredit 31 Desember 2024 sebesar 10,13% dan 31 Desember 2023 sebesar 10,37 %. Tingginya persentase NPL akan berpengaruh terhadap kelancaran usaha bank.

**KANTOR AKUNTAN PUBLIK
BUSTAMAN, EZEDDIN & PUTRANTO**



Herry Putranto, CPA
Izin Akuntan Publik AP 0329

Padang, 10 Januari 2025



LAPORAN KEUANGAN POKOK

**LAPORAN POSISI KEUANGAN
LAPORAN LABA RUGI
LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS
LAPORAN ARUS KAS**

PT. BANK PERKREDITAN RAKYAT SAMUDERA

LAPORAN POSISI KEUANGAN

31 Desember 2024

Dengan Angka Perbandingan Untuk Tahun 2023

(Jumlah Dinyatakan Dalam Rupiah)

Uraian	Catatan	2024	2023
ASET			
Kas	3	224.165.200	185.188.600
Pendapatan Bunga Yang Akan Diterima	4	280.741.830	266.376.288
Penempatan Pada Bank Lain	5	5.610.232.412	3.948.374.439
Penyisihan Kerugian		(3.551.162)	-
Total		5.306.681.250	3.948.374.439
Kredit Yang Diberikan	6	25.069.764.636	24.426.344.756
Penyisihan Kerugian		(538.254.559)	(643.315.706)
Total		25.531.510.077	23.783.029.050
Aset Tetap dan Inventaris	7	2.145.655.776	2.125.570.776
Akumulasi Penyusutan		(897.596.524)	(824.129.659)
Total		1.248.059.252	1.301.441.117
Aset Lain-Lain	8	68.763.216	76.883.570
Jumlah Aset		32.959.920.825	29.561.293.064
KEWAJIBAN DAN EKUITAS			
KEWAJIBAN			
Kewajiban Segera	9	36.647.181	37.308.309
Hutang Bunga	10	35.412.221	34.610.234
Hutang Pajak	11	21.257.677	28.336.694
Simpanan	12		
Tabungan		7.881.877.850	5.035.161.985
Deposito		11.232.000.000	11.495.500.000
Simpanan dari Bank Lain	13	3.754.351.462	1.950.221.918
Pinjaman Diterima	14	3.673.734.994	4.651.944.998
Kewajiban Lain-Lain	15	1.158.300	1.102.868
Jumlah Kewajiban		26.636.439.685	23.234.187.006
EKUITAS			
Modal			
Modal Disetor	1b	6.000.000.000	6.000.000.000
Saldo Laba	16		
Cadangan umum		98.042.000	88.626.000
Belum Ditentukan Tujuannya		225.439.140	238.480.058
Total		323.481.140	327.106.058
Jumlah Ekuitas		6.323.481.140	6.327.106.058
Jumlah Kewajiban dan Ekuitas		32.959.920.825	29.561.293.064

10 Januari 2025



Agusriandi, SE
Direktur Utama



Jon Kenedy, S.Ag
Direktur

Catatan atas Laporan Keuangan merupakan bagian tak terpisahkan dari Laporan Keuangan secara keseluruhan

PT. BANK PERKREDITAN RAKYAT SAMUDERA
LAPORAN LABA-RUGI

Untuk Tahun Yang Berakhir 31 Desember 2024
 Dengan Angka Perbandingan Untuk Tahun 2023
 (Jumlah Dinyatakan Dalam Rupiah)

Uraian	Catatan	2024	2023
Pendapatan Operasional			
Pendapatan bunga	17		
Penempatan pada bank lain		277.184.556	120.463.816
Kredit yang diberikan		3.012.083.383	2.920.522.321
Provisi kredit		184.038.469	155.123.828
Pendapatan lainnya	18	82.400.393	151.842.740
Jumlah Pendapatan Operasional		3.555.706.801	3.347.952.705
Beban Operasional			
Beban bunga	19	1.345.457.795	1.172.808.864
Beban penyisihan penghapusan aset produktif	20	241.576.894	205.622.518
Beban pemasaran	21	20.414.352	14.245.020
Beban penelitian dan pengembangan	22	1.650.000	2.511.400
Beban administrasi dan umum	23	1.668.980.290	1.665.446.854
Beban lainnya	24	26.550.074	21.710.444
Jumlah Beban Operasional		3.304.629.405	3.082.345.100
Laba (Rugi) Operasional		251.077.396	265.607.605
Pendapatan dan Beban Non Operasional	25		
Pendapatan Non Operasional		27.326	39.431
Beban Non Operasional		-	-
Jumlah Pendapatan (Beban) Non Operasional		27.326	39.431
Laba (Rugi) Sebelum Pajak		251.104.722	265.647.036
Taksiran Pajak Penghasilan		(28.745.640)	(30.236.694)
Laba (Rugi) Netto		222.359.082	235.410.342

10 Januari 2025



Alqusriandi, SE
Direktur Utama



Jon Kenedy, S.Ag
Direktur

Catatan atas Laporan Keuangan merupakan bagian tak terpisahkan dari Laporan Keuangan secara keseluruhan

PT. BANK PERKREDITAN RAKYAT SAMUDERA
LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS
 Untuk Tahun Yang Berakhir 31 Desember 2024
 Dengan Angka Perbandingan Untuk Tahun 2023
 (Jumlah Dinyatakan Dalam Rupiah)

Uraian	Modal Disetor	Saldo Laba		Jumlah
		Cadangan Umum	Belum Ditentukan	
Saldo per 31 Desember 2022	6.000.000.000	81.260.000	187.219.717	6.268.479.717
Dividen	-	-	(184.150.000)	(184.150.000)
Modal	-	-	-	-
Pembentukan cadangan	-	7.366.000	-	7.366.000
Laba (Rugi) Periode Berjalan	-	-	235.410.342	235.410.342
Saldo per 31 Desember 2023	6.000.000.000	88.626.000	238.480.058	6.327.106.058
Dividen	-	-	(235.400.000)	(235.400.000)
Modal	-	-	-	-
Pembentukan cadangan	-	9.416.000 ✓	-	9.416.000
Laba (Rugi) Periode Berjalan	-	-	222.359.082	222.359.082
Saldo per 31 Desember 2024	6.000.000.000	98.042.000	225.439.140	6.323.481.140

Catatan atas Laporan Keuangan merupakan bagian tak terpisahkan dari Laporan Keuangan secara keseluruhan

PT. BANK PERKREDITAN RAKYAT SAMUDERA
LAPORAN ARUS KAS

Untuk Tahun Yang Berakhir 31 Desember 2024
 Dengan Angka Perbandingan Untuk Tahun 2023
 (Jumlah Dinyatakan Dalam Rupiah)

No	Uraian	Catatan	2024	2023
I	ARUS KAS DARI AKTIVITAS OPERASI			
	Laba (Rugi) Setelah Pajak		222.359.082	235.410.342
	Penyesuaian Untuk :			
	Penyisihan Penempatan Pada Bank Lain (net)		3.551.162	-
	Amortisasi Propisi/Biaya Transaksi		9.103.389	70.386.537
	Penyisihan Kredit (net)		(105.061.147)	(177.850.011)
	Penyusutan Aset Tetap (net)		73.466.865	68.696.280
	Laba Operasi Sebelum Perubahan Modal Kerja		203.419.351	196.643.148
	Penurunan (Kenaikan) Pendapatan Bunga Yang Akan Diterima		(14.365.542)	(41.936.110)
	Penurunan (Kenaikan) Penempatan Pada Bank Lain (deposito diatas jangka waktu 3 bulan)		(1.150.000.000)	(750.000.000)
	Penurunan (Kenaikan) Kredit Yang Diberikan		(1.652.523.269)	(3.649.579.651)
	Penurunan (Kenaikan) Agunan Yang Diambil Alih		-	-
	Penurunan (Kenaikan) Aset Lain-Lain		8.120.354	(19.473.318)
	Kenaikan (Penurunan) Kewajiban Segera		(661.128)	(3.207.786)
	Kenaikan (Penurunan) Hutang Bunga		801.987	(395.949)
	Kenaikan (Penurunan) Hutang Pajak		(7.079.017)	8.924.884
	Kenaikan (Penurunan) Tabungan		2.846.715.865	543.704.875
	Kenaikan (Penurunan) Deposito		(263.500.000)	282.000.000
	Kenaikan (Penurunan) Simpanan dari Bank Lain		1.804.129.544	(349.778.082)
	Kenaikan (Penurunan) Pinjaman Diterima		(978.210.004)	4.210.194.981
	Kenaikan (Penurunan) Kewajiban Lain-Lain		55.432	(82.132)
	Arus Kas Bersih dari Aktivitas Operasi		796.903.573	427.014.860
II	ARUS KAS DARI AKTIVITAS INVESTASI			
	Pembelian (Penjualan) Aset Tetap dan Inventaris		(20.085.000)	(55.143.000)
III	ARUS KAS DARI AKTIVITAS PENDANAAN			
	Kenaikan (Penurunan) Cadangan		9.416.000	7.366.000
	Pembagian Laba Tahun Lalu (koreksi)		(235.400.000)	(184.150.000)
	Arus Kas dari Aktivitas Pendanaan		(225.984.000)	(176.784.000)
	Kenaikan Bersih Kas dan Setara Kas		550.834.573	195.087.860
	Kas dan Setara Kas Pada Awal Periode	d, 3	3.133.563.039	2.938.475.180
	Kas dan Setara Kas Pada Akhir Periode	d, 3	3.684.397.612	3.133.563.039
	Kas dan Setara Kas terdiri dari :			
	Kas		224.165.200	185.188.600
	Giro Pada Bank Lain		-	-
	Tabungan		2.710.232.412	1.948.374.439
	Deposito Berjangka 1 s/d 3 bulan		750.000.000	1.000.000.000
	Jumlah		3.684.397.612	3.133.563.039

Catatan atas Laporan Keuangan merupakan bagian tak terpisahkan dari Laporan Keuangan secara keseluruhan

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

PT. BANK PERKREDITAN RAKYAT SAMUDERA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk Tahun Yang Berakhir 31 Desember 2024
 Dengan Angka Perbandingan Untuk Tahun 2023
 (Jumlah Dinyatakan Dalam Rupiah)

1 U M U M**a. Pendirian Perusahaan**

PT. Bank Perekonomian Rakyat Samudera yang sebelumnya bernama PT. Bank Perkreditan Rakyat Samudera, berkedudukan di Jl. Trikora No. 25 Painan Selatan Kecamatan IV Jurai Kabupaten Pesisir Selatan, didirikan berdasarkan Akta No. 10 tanggal 14 September 2006 oleh Notaris Dra. Butet, SH di Padang. Akta tersebut telah mendapat pengesahan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia dengan Nomor W3-00030.HT.01.01.TH 2006 tanggal 17 Oktober 2006. Perubahan Akta terakhir berdasarkan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa No. 149 tanggal 123 Juli 2021 oleh Notaris Markhalina Satrianita di Painan. Persetujuan perubahan Akta Anggaran Dasar dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia dengan Nomor AHU-0041341.AH.01.02.Tahun 2021 tanggal 21 Juli 2021

PT. Bank Perekonomian Rakyat Samudera mempunyai 2 kantor kas yang beralamat sebagai berikut :

Kantor Kas : Jl. Pasar Balai Selasa Kecamatan Ranah Pesisir Kabupaten Pesisir Selatan
 Kantor Kas : Jl. Raya Pasar Kambang Kecamatan Lengayang Kabupaten Pesisir Selatan

Maksud dan tujuan didirikannya perseroan ini adalah berusaha dalam bidang Bank Perkreditan Rakyat. Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut, perseroan dapat melaksanakan kegiatan usaha sebagai berikut :

- Memasarkan produk-produk perbankan dan memobilisasi dana masyarakat melalui Tabungan, Deposito serta Pembiayaan (Kredit) bagi masyarakat disekitarnya.
- Menunjang perekonomian daerah dengan menyalurkan kredit bagi kegiatan usaha yang bersifat produktif.

b. Modal Dasar Serta Modal Ditempatkan Dan Disetor

Berdasarkan Akta No. 131 tanggal 22 Nopember 2017 oleh Markhalina Satrianita Notaris di Kabupaten Pesisir Selatan modal dasar perseroan sebesar Rp 10.000.000.000 (sepuluh milyar rupiah) terbagi atas 200.000 (dua ratus ribu) lembar saham bernilai nominal Rp 50.000 (lima puluh ribu rupiah).

Dari modal dasar tersebut telah ditempatkan dan disetor penuh tahun 2024 dan 2023 dengan pemegang saham sebagai berikut

Tahun 2024

Pemegang Saham	Jumlah lembar saham	Prosentase kepemilikan	Jumlah (Rupiah)
Pemerintah Daerah Kabupaten Pesisir Selatan	88.913	74,09%	4.445.650.000
Koperasi Lembaga Ekonomi Pengembangan Pesisir - Mikro Mitra Mina	31.087	25,91%	1.554.350.000
Jumlah	120.000	100,00%	6.000.000.000

Tahun 2023

Pemegang Saham	Jumlah lembar saham	Prosentase kepemilikan	Jumlah (Rupiah)
Pemerintah Daerah Kabupaten Pesisir Selatan	88.913	74,09%	4.445.650.000
Koperasi Lembaga Ekonomi Pengembangan Pesisir - Mikro Mitra Mina	31.087	25,91%	1.554.350.000
Jumlah	120.000	100,00%	6.000.000.000

c. Susunan Pengurus

PT. Bank Perekonomian Rakyat Samudera pada saat ini memiliki karyawan 17 orang dan dikelola oleh suatu Badan Pengurus dengan susunan sebagai berikut :

Komisaris :

Komisaris Utama : -
 Komisaris : H. Sumardi, SE

Direksi :

Direktur Utama : Alagusriandi, SE
 Direktur : Jon Kenedy, S.Ag

d. Tanggungjawab Atas Laporan Keuangan

Manajemen PT. Bank Perekonomian Rakyat Samudera bertanggungjawab atas laporan keuangan yang penyusunannya diselesaikan pada tanggal 10 Januari 2025.

PT. BANK PERKREDITAN RAKYAT SAMUDERA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk Tahun Yang Berakhir 31 Desember 2024
 Dengan Angka Perbandingan Untuk Tahun 2023
 (Jumlah Dinyatakan Dalam Rupiah)

2 IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI

Laporan keuangan PT. Bank Perkreditan Rakyat Samudera (Persero) disajikan sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik (SAK ETAP) yang diterbitkan Ikatan Akuntan Indonesia (IAI) dan Pedoman Akuntansi Bank Perkreditan Rakyat yang diterbitkan IAI dengan Bank Indonesia, serta pedoman akuntansi yang ditetapkan otoritas perbankan.

a. Dasar Penyusunan Laporan Keuangan

- ① Laporan keuangan ini disajikan sesuai dengan Pedoman Akuntansi Bank Perkreditan Rakyat (PA-BPR). Laporan keuangan disusun berdasarkan prinsip berkesinambungan (*going concern*) serta mengikuti konvensi harga historis (*historical cost*). Kebijakan akuntansi ini diterapkan secara konsisten kecuali apabila dinyatakan adanya perubahan dalam kebijakan.
- ② Laporan keuangan disusun dengan metode akrual kecuali laporan arus kas. Laporan arus kas disajikan dengan metode tidak langsung (*indirect method*) dengan mengelompokkan arus kas dalam aktivitas operasi, investasi dan pendanaan.
- ③ Periode akuntansi adalah menurut tahun takwim atau tahun kalender, yaitu dari tanggal 1 Januari sampai dengan tanggal 31 Desember tahun yang bersangkutan.
- ④ Laporan keuangan disajikan dalam satuan mata uang Rupiah.

b. Konsep Dasar Pengukuran

Pengukuran adalah proses penetapan jumlah uang yang digunakan entitas untuk mengukur aset, kewajiban, penghasilan dan beban dalam laporan keuangan.

Dasar pengukuran adalah biaya historis dan nilai wajar. Aset dicatat sebesar kas atau setara kas yang dibayarkan atau nilai wajar dari pembayaran yang diberikan untuk memperoleh aset pada saat perolehan. Kewajiban dicatat sebesar kas atau setara kas yang diterima atau sebesar nilai wajar dari aset non-kas yang diterima sebagai penukar dari kewajiban pada saat terjadinya kewajiban. Penghasilan dan beban merupakan akibat langsung dari pengakuan aset dan kewajiban.

Nilai wajar adalah jumlah yang dipakai untuk mempertukarkan suatu aset atau untuk menyelesaikan suatu kewajiban, antara pihak-pihak yang berkeinginan dan memiliki pengetahuan memadai dalam suatu transaksi dengan wajar.

c. Transaksi dengan pihak-pihak yang mempunyai hubungan istimewa (pihak terkait)

Sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik (SAK ETAP), yang dimaksud dengan pihak-pihak yang mempunyai hubungan istimewa (pihak terkait) adalah sebagai berikut :

Suatu pihak mempunyai hubungan istimewa (pihak terkait) dengan entitas, jika :

- ① secara langsung atau tidak langsung melalui satu atau lebih perantara, pihak tersebut :
 - ↳ mengendalikan, dikendalikan oleh, atau berada dibawah pengendalian bersama dengan entitas (termasuk entitas induk, entitas anak dan fellow subsidiaries);
 - ↳ memiliki kepemilikan di entitas yang memberikan pengaruh signifikan; atau
 - ↳ memiliki pengendalian bersama dari entitas;
- ② pihak tersebut adalah entitas asosiasi dari entitas;
- ③ pihak tersebut adalah joint venture dimana entitas tersebut merupakan venturer;
- ④ pihak tersebut adalah personel manajemen kunci entitas atau entitas induknya;
- ⑤ pihak tersebut adalah keluarga dekat dari setiap orang yang diuraikan dalam ① atau ②;
- ⑥ pihak tersebut adalah entitas yang dikendalikan, dikendalikan bersama atau dipengaruhi secara signifikan oleh, atau memiliki hak suara secara signifikan, secara langsung atau tidak langsung, setiap orang yang diuraikan dalam ① atau ②; atau
- ⑦ pihak tersebut adalah program imbalan pasca kerja untuk imbalan pekerja entitas, atau setiap entitas yang mempunyai hubungan istimewa dengan entitas tersebut.

Hubungan istimewa (pihak terkait) terutama berkenaan dengan akun penempatan pada bank lain, kredit yang diberikan dan simpanan dalam laporan keuangan. Tidak terdapat perlakuan yang berbeda atas transaksi dengan pihak yang mempunyai hubungan istimewa (pihak terkait).

Seluruh transaksi dengan pihak yang mempunyai hubungan istimewa (pihak terkait) baik yang dilakukan dengan atau tidak dengan kondisi dan persyaratan normal sebagaimana dilakukan dengan pihak ketiga, diungkapkan dalam catatan atas laporan

d. Kas dan Setara Kas

Kas dan setara kas meliputi kas, giro pada bank lain, penempatan pada bank-bank lain, sertifikat Bank Indonesia yang jatuh tempo dalam waktu tiga bulan sejak tanggal perolehan, sepanjang tidak digunakan sebagai jaminan atas pinjaman yang diterima serta tidak dibatasi penggunaannya.

PT. BANK PERKREDITAN RAKYAT SAMUDERA

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk Tahun Yang Berakhir 31 Desember 2024

Dengan Angka Perbandingan Untuk Tahun 2023

(Jumlah Dinyatakan Dalam Rupiah)

e. Penempatan pada Bank Lain

Penempatan pada bank lain dinyatakan sebesar saldo penempatan dikurangi dengan penyisihan penilaian kualitas aset /penyisihan penghapusan aset produktif. Penyisihan penilaian kualitas aset/penyisihan penghapusan aset produktif ditetapkan berdasarkan penelaahan terhadap kolektibilitas masing-masing saldo penempatan akhir tahun yang besarnya sebagaimana diatur dalam Peraturan OJK No. 1 tanggal 11 Januari 2024 dan No. 33/POJK.03/2018 tanggal 27 Desember 2018.

Kualitas aset produktif dalam bentuk penempatan pada bank lain ditetapkan dalam 3 (tiga) golongan yaitu Lancar, Kurang Lancar dan Macet dengan klasifikasi sebagai berikut :

- ① Lancar
 - ↳ Tidak terdapat tunggakan angsuran pokok dan/atau bunga
- ② Kurang Lancar
 - ↳ Terdapat tunggakan angsuran pokok dan atau bunga paling lama 5 (lima) hari kerja
- ③ Macet
 - ↳ Terdapat tunggakan angsuran pokok dan atau bunga lebih dari 5 (lima) hari kerja
 - ↳ Bank yang menerima penempatan dana antar bank telah ditetapkan dalam status Pengawasan Khusus
 - ↳ Bank yang menerima penempatan dana antar bank telah dilikuidasi

Pembentukan penyisihan penilaian kualitas aset/penyisihan penghapusan aset produktif lihat catatan 2g.

f. Kredit Yang Diberikan

Kredit yang diberikan dinyatakan sebesar saldo kredit yang diberikan dikurangi dengan saldo provisi yang belum diamortisasi dan penyisihan penilaian kualitas aset/penyisihan penghapusan aset produktif. Penyisihan penilaian kualitas aset/penyisihan penghapusan aset produktif berdasarkan penelaahan terhadap kolektibilitas masing-masing saldo kredit yang diberikan akhir tahun yang besarnya sebagaimana diatur dalam Peraturan OJK No 1 tanggal 11 Januari 2024 dan No. 33/POJK.03/2018 tanggal 27 Desember 2018.

Kredit diklasifikasikan sebagai berikut :

- Kredit dengan angsuran
 - ↳ kurang dari 1 (satu) bulan
 - ↳ 1 (satu) bulan atau lebih

Kualitas aset produktif dalam bentuk kredit ditetapkan dalam 5 (lima) golongan yaitu Lancar, Dalam Perhatian Khusus, Kurang Lancar, Diragukan dan Macet.

Kualitas kredit dengan masa angsuran kurang dari 1 (satu) bulan

- a. Lancar
 - ↳ Tidak terdapat tunggakan angsuran pokok dan/atau bunga
 - ↳ Terdapat tunggakan angsuran pokok dan/atau bunga tidak lebih dari 15 (lima belas) hari sejak tanggal jatuh tempo angsuran dan kredit belum jatuh tempo
- b. Dalam Perhatian Khusus
 - ↳ Terdapat tunggakan angsuran pokok dan/atau bunga lebih dari 15 (lima belas) hari sejak tanggal jatuh tempo angsuran tetapi tidak lebih dari 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal jatuh tempo angsuran
 - ↳ Kredit telah jatuh tempo tidak lebih dari 15 (lima belas) hari.
- c. Kurang Lancar
 - ↳ Terdapat tunggakan angsuran pokok dan/atau bunga lebih dari 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal jatuh tempo angsuran tetapi tidak lebih dari 90 (sembilan puluh) hari
 - ↳ Kredit telah jatuh tempo lebih dari 15 (lima belas) hari tetapi tidak lebih dari 30 (tiga puluh) hari.
- d. Diragukan
 - ↳ Terdapat tunggakan angsuran pokok dan/atau bunga lebih dari 90 (sembilan puluh) hari sejak tanggal jatuh tempo angsuran tetapi tidak lebih dari 180 (seratus delapan puluh) hari
 - ↳ Kredit telah jatuh tempo lebih dari 30 (tiga puluh) hari tetapi tidak lebih dari 60 (enam puluh) hari.
- e. Macet
 - ↳ Terdapat tunggakan angsuran pokok dan/atau bunga lebih dari 180 (seratus delapan puluh) hari sejak tanggal jatuh tempo angsuran
 - ↳ Kredit telah jatuh tempo lebih dari 60 (enam puluh) hari;
 - ↳ Kredit telah diserahkan kepada Direktorat Jenderal Kekayaan Negara (DJKN) dan/atau
 - ↳ Kredit telah diajukan penggantian ganti rugi kepada perusahaan asuransi Kredit.

PT. BANK PERKREDITAN RAKYAT SAMUDERA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk Tahun Yang Berakhir 31 Desember 2024
 Dengan Angka Perbandingan Untuk Tahun 2023
 (Jumlah Dinyatakan Dalam Rupiah)

Kualitas kredit dengan masa angsuran 1 (satu) bulan atau lebih

a. Lancar

- ↳ Tidak terdapat tunggakan angsuran pokok dan/atau bunga; atau
- ↳ Terdapat tunggakan angsuran pokok dan/atau bunga tidak lebih dari 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal jatuh tempo angsuran dan kredit belum jatuh tempo

b. Dalam Perhatian Khusus

- ↳ Terdapat tunggakan angsuran pokok dan/atau bunga lebih dari 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal jatuh tempo angsuran tetapi tidak lebih dari 90 (tiga puluh) hari sejak tanggal jatuh tempo angsuran
- ↳ Kredit telah jatuh tempo tidak lebih dari 15 (lima belas) hari.

c. Kurang Lancar

- ↳ Terdapat tunggakan angsuran pokok dan/atau bunga lebih dari 90 (sembilan puluh) hari sejak tanggal jatuh tempo angsuran tetapi tidak lebih dari 180 (seratus delapan puluh) hari
- ↳ Kredit telah jatuh tempo lebih dari 15 (lima belas) hari tetapi tidak lebih dari 30 (tiga puluh) hari.

d. Diragukan

- ↳ Terdapat tunggakan angsuran pokok dan/atau bunga lebih dari 180 (seratus delapan puluh) hari sejak tanggal jatuh tempo angsuran tetapi tidak lebih dari 360 (tiga ratus enam puluh) hari
- ↳ Kredit telah jatuh tempo lebih dari 30 (tiga puluh) hari tetapi tidak lebih dari 60 (enam puluh) hari.

e. Macet

- ↳ Terdapat tunggakan angsuran pokok dan/atau bunga lebih dari 360 (tiga ratus enam puluh) hari sejak tanggal jatuh tempo angsuran
- ↳ Kredit telah jatuh tempo lebih dari 60 (enam puluh) hari;
- ↳ Kredit telah diserahkan kepada Direktorat Jenderal Kekayaan Negara (DJKN) dan/atau
- ↳ Kredit telah diajukan penggantian ganti rugi kepada perusahaan asuransi Kredit.

Pembentukan penyisihan penilaian kualitas aset/penyisihan penghapusan aset produktif lihat catatan 2g.

Pendapatan bunga atas kredit lancar diakui secara akrual dan pendapatan bunga terhadap kredit yang diklasifikasikan sebagai "non-performing" diakui sebagai pendapatan pada saat diterima.

g. Penyisihan Penilaian Kualitas Aset/penyisihan Penghapusan Aset Produktif

Aset yang digolongkan sebagai aset produktif sebagaimana diatur dalam Peraturan OJK No. 1 tanggal 11 Januari 2024 dan No. 33/POJK.03/2018 tanggal 27 Desember 2018 adalah penyediaan dana BPR dalam bentuk rupiah untuk memperoleh penghasilan dalam bentuk Penempatan Pada Bank Lain dan Kredit yang diberikan.

Pembentukan penyisihan penilaian kualitas aset/penyisihan penghapusan aset produktif tersebut sebagaimana diatur dalam Peraturan OJK No. 1 tanggal 11 Januari 2024 dan No. 33/POJK.03/2018 tanggal 27 Desember 2018 berdasarkan prosentase tetap dari saldo akhir aset produktif setelah dikurangi dengan agunan, kecuali untuk aset produktif yang diklasifikasikan lancar yang diterapkan terhadap saldo aset produktif tersebut. Besarnya prosentase penyisihan penilaian kualitas aset adalah sebagai

Kolektibilitas Kredit Yang Diberikan

Lancar	0,50%
Dalam Perhatian Khusus	3,00%
Kurang Lancar	10,00%
Diragukan	50,00%
Macet	100,00%

Penyisihan penilaian kualitas aset atas aset produktif/penyisihan penghapusan aset produktif terdiri dari penyisihan penilaian kualitas aset umum dan khusus. Aset produktif dengan kolektibilitas lancar digolongkan dalam penyisihan penilaian kualitas aset/penyisihan penghapusan aset produktif umum, sedang untuk yang kolektibilitasnya dalam perhatian khusus, kurang lancar, diragukan dan macet digolongkan dalam penyisihan penilaian kualitas aset/penyisihan penghapusan aset produktif khusus.

PT. BANK PERKREDITAN RAKYAT SAMUDERA

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk Tahun Yang Berakhir 31 Desember 2024

Dengan Angka Perbandingan Untuk Tahun 2023

(Jumlah Dinyatakan Dalam Rupiah)

h. Cadangan Kerugian Penurunan Nilai

- ↳ Dalam menghitung rasio KPMM, BPR wajib memperhitungkan Cadangan Kerugian Penurunan Nilai yang dibentuk dan penyisihan penilaian kualitas aset atas aset produktif.
- ↳ Dalam hal hasil perhitungan cadangan kerugian penurunan nilai yang dibentuk lebih kecil dan penyisihan penilaian kualitas aset atas aset produktif, BPR wajib memperhitungkan selisih perhitungan cadangan kerugian penurunan nilai yang dibentuk dengan penyisihan penilaian kualitas aset atas aset produktif menjadi pengurang modal dalam perhitungan rasio KPMM.
- ↳ Dalam hal hasil perhitungan cadangan kerugian penurunan nilai yang dibentuk sama atau lebih besar dan penyisihan penilaian kualitas aset atas aset produktif, BPR tidak perlu memperhitungkan selisih perhitungan cadangan kerugian penurunan nilai yang dibentuk dengan penyisihan penilaian kualitas aset atas aset produktif menjadi pengurang modal dalam perhitungan rasio KPMM.

i. Agunan Yang Diambil Alih

Agunan yang diambil alih yang dicatat dalam neraca hanya yang berasal dari penyelesaian kredit yang diberikan. Pada saat pengakuan awal, agunan yang diambil alih sehubungan dengan penyelesaian kredit yang diberikan dicatat sebesar nilai wajar setelah dikurangi biaya untuk menjualnya tetapi tidak melebihi nilai tercatat kredit yang diberikan. Bank tidak mengakui keuntungan pada saat pengambilalihan aset. Setelah pengakuan awal, agunan yang diambil alih dicatat sebesar nilai yang lebih rendah antara nilai tercatat dengan nilai wajar setelah dikurangi biaya untuk menjualnya. Selisih lebih antara nilai tercatat dengan nilai wajar agunan yang diambil alih setelah dikurangi biaya untuk menjualnya diakui sebagai kerugian penurunan nilai.

Agunan yang diambil alih tidak disusutkan dan beban-beban sehubungan dengan perolehan dan pemeliharaan aset tersebut dibebankan pada saat terjadinya transaksi.

Selisih antara nilai tercatat dan hasil penjualan dari agunan yang diambil alih diakui sebagai laba atau rugi pada saat penjualan agunan yang diambil alih dan diakui sebagai pendapatan atau beban non-operasional dalam laporan laba rugi.

Apabila agunan yang diambil alih tidak dapat diselesaikan dalam waktu 1 (satu) tahun, nilai agunan yang dicatat pada laporan keuangan wajib dipermitungkan sebagai faktor pengurang modal inti dalam perhitungan KPMM.

Adapun agunan yang diambil alih sebagai pengurang modal inti sebagai berikut :

- a. Agunan dalam bentuk Tanah dan Bangunan yang memiliki sertifikat yang dibebani dengan hak tanggungan, Tanah dan Bangunan yang memiliki sertifikat berdasarkan Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) yang tidak dibebani dengan hak tanggungan, Tanah dan Bangunan dari NJOP berdasarkan Surat Pemberitahuan Pajak Terutang (SPPT) terakhir dari instansi berwenang, yang tidak dibebani dengan hak tanggungan dan harga pasar, harga sewa atau harga pengalihan berupa tempat usaha yang disertai bukti pemilikan disertai dengan surat kuasa menjual atau pengalihan hak yang dibuat oleh notaris.
 - ↳ 15% (lima belas persen) dari nilai AYDA untuk AYDA yang dimiliki lebih dari 1 (satu) tahun sampai dengan 3 (tiga) tahun
 - ↳ 50% (lima puluh persen) dari nilai AYDA untuk AYDA yang dimiliki lebih dari 3 (tiga) tahun sampai dengan 5 (lima) tahun
 - ↳ 100% (seratus persen) dari nilai AYDA untuk AYDA yang dimiliki lebih dari 5 (lima) tahun
- b. Kendaraan bermotor, kapal, perahu bermotor, alat berat dan/atau mesin yang menjadi satu kesatuan dengan tanah yang disertai dengan bukti kepemilikan dan telah dilakukan pengikatan
 - ↳ 50% (lima puluh persen) dari nilai AYDA untuk AYDA yang dimiliki lebih dari 1 (satu) tahun sampai dengan 2 (dua) tahun
 - ↳ 100% (seratus persen) dari nilai AYDA untuk AYDA yang dimiliki lebih dari 2 (dua) tahun

j. Aset Tetap dan Inventaris

Aset tetap dinyatakan sebesar harga perolehan dikurangi dengan akumulasi penyusutan. Penyusutan dihitung dengan menggunakan metode garis lurus (straight-line method) berdasarkan taksiran masa manfaat ekonomis aset tetap sebagai

Jenis	Masa Manfaat (tahun)
Bangunan	20 - 25
Kendaraan bermotor	4 - 8
Perlengkapan kantor	4 - 8

Pengeluaran untuk pemeliharaan dan perbaikan rutin dibebankan sebagai beban pada laporan laba rugi pada saat terjadinya. Sedangkan pengeluaran yang memperpanjang masa manfaat atau yang kemungkinan besar memberi manfaat keekonomian dimasa yang akan datang dalam bentuk peningkatan kapasitas ditambahkan pada jumlah tercatat aset yang bersangkutan (kapitalisasi).

Apabila suatu aset tetap tidak lagi digunakan atau dijual, nilai tercatat dan akumulasi penyusutan aset tersebut dikeluarkan dari pencatatannya sebagai aset tetap dan keuntungan atau kerugian yang terjadi diperhitungkan dalam laporan laba rugi tahun bersangkutan.

PT. BANK PERKREDITAN RAKYAT SAMUDERA**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**

Untuk Tahun Yang Berakhir 31 Desember 2024
 Dengan Angka Perbandingan Untuk Tahun 2023
 (Jumlah Dinyatakan Dalam Rupiah)

k. Simpanan

Simpanan merupakan dana yang dipercayakan masyarakat berdasarkan perjanjian penyimpanan dana terdiri dari tabungan dan deposito. Simpanan dinyatakan sebesar nilai kewajiban bank kepada nasabah.

l. Simpanan dari Bank Lain

Simpanan dari bank lain merupakan dana yang dipercayakan bank lain berdasarkan perjanjian penyimpanan dana terdiri dari tabungan dan deposito. Simpanan dari bank lain dinyatakan sebesar nilai kewajiban bank kepada bank lain.

m. Pinjaman Diterima

Pinjaman diterima merupakan dana yang diterima dari Bank Umum dan BPR lain, Bank Indonesia atau pihak lain dengan kewajiban pembayaran kembali sesuai dengan persyaratan perjanjian pinjaman.

n. Pengakuan Pendapatan Bunga

Pendapatan bunga terdiri dari pendapatan bunga kontraktual, amortisasi provisi dan amortisasi biaya transaksi. Pendapatan bunga atas aset produktif yang digolongkan sebagai performing diakui secara akrual. Pendapatan bunga atas aset produktif yang digolongkan sebagai non performing (kurang lancar, diragukan dan macet) diakui sebagai pendapatan pada saat diterima secara tunai (cash basis).

Penerimaan setoran dari debitur untuk kredit performing digunakan terlebih dahulu untuk melunasi tagihan bunga. Penerimaan setoran dari debitur untuk kredit non-performing digunakan terlebih dahulu untuk melunasi tunggakan pokok yang telah jatuh.

Provisi dan biaya transaksi diamortisasi selama masa kredit secara garis lurus tanpa memperhatikan kredit yang diberikan termasuk performing atau non-performing. Amortisasi provisi diakui sebagai penambah pendapatan bunga dan amortisasi biaya transaksi diakui sebagai pengurang pendapatan bunga.

o. Pengakuan Beban Bunga

Beban bunga merupakan beban yang dibayarkan kepada nasabah atau pihak lain yang berkaitan dengan kegiatan penghimpunan dana dan penerimaan pinjaman. Beban bunga diakui secara akrual.

p. Taksiran Pajak Penghasilan

Perusahaan mengakui kewajiban atas seluruh pajak penghasilan periode berjalan dan periode sebelumnya yang belum dibayar. Jika jumlah yang telah dibayar untuk periode berjalan dan periode sebelumnya melebihi jumlah yang terhutang pada periode tersebut, perusahaan harus mengakui kelebihan tersebut sebagai aset. Perusahaan tidak mengakui adanya pajak tangguhan.

Berdasarkan peraturan perpajakan yang berlaku, perusahaan menghitung, menetapkan dan membayar sendiri pajak yang terhutang. Petugas pajak dapat melakukan pemeriksaan, menetapkan dan mengubah kewajiban pajak dalam batas waktu 10 (sepuluh) tahun sejak tanggal terhutangnya pajak, sehingga tidak tertutup kemungkinan hasil pemeriksaan berbeda dengan saldo hutang pajak tersebut.

q. Imbalan Kerja

Imbalan Kerja kepada karyawan terbatas pada imbalan kerja jangka pendek, meliputi :

- a. upah, gaji dan iuran pensiun
- b. jasa produksi terutang dalam waktu 12 bulan setelah akhir periode pelaporan saat pekerja memberikan jasa terkait. Jasa produksi terutang dalam waktu 12 bulan dibayarkan setelah ditetapkan dalam Rapat Umum Pemegang Saham, dan diperlakukan sebagai bagian dari pembagian laba, kecuali ditetapkan lain dalam RUPS.

Lihat catatan 27.

PT. BANK PERKREDITAN RAKYAT SAMUDERA

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk Tahun Yang Berakhir 31 Desember 2024

Dengan Angka Perbandingan Untuk Tahun 2023

(Jumlah Dinyatakan Dalam Rupiah)

Berikut ini penjelasan atas pos-pos neraca dan laba/rugi tahun 2024 dan 2023 (angka-angka disajikan dalam rupiah).

3 KAS

Akun ini merupakan

	2024	2023
Kas	224.165.200	185.188.600

4 PENDAPATAN BUNGA YANG AKAN DITERIMA

Pendapatan bunga yang akan diterima terdiri dari :

	2024	2023
Bunga accrual deposito penempatan pada bank lain	8.205.822	2.986.986
Bunga accrual kredit yang diberikan	272.536.008	263.389.302
Jumlah	280.741.830	266.376.288

5 PENEMPATAN PADA BANK LAIN

Klasifikasi penempatan pada Bank lain berdasarkan jenis dan kualitas, sebagai berikut :

Tahun 2024

Jenis	Lancar	Kurang Lancar	Macet
Giro			
Terkait	-	-	-
Tidak Terkait	-	-	-
Penyisihan Penilaian Kualitas Aset	-	-	-
Sub Jumlah	-	-	-
Tabungan			
Terkait	-	-	-
Tidak Terkait	2.710.232.412	-	-
Penyisihan Penilaian Kualitas Aset	(3.551.162)	-	-
Sub Jumlah	2.706.681.250	-	-
Deposito Berjangka			
Terkait			
Jangka waktu 1 bulan	-	-	-
Jangka waktu 3 bulan	-	-	-
Jangka waktu 6 bulan	-	-	-
Jangka waktu 12 bulan	-	-	-
Jangka waktu > 12 bulan	-	-	-
Tidak terkait			
Jangka waktu 1 bulan	-	-	-
Jangka waktu 3 bulan	750.000.000	-	-
Jangka waktu 6 bulan	2.150.000.000	-	-
Jangka waktu 12 bulan	-	-	-
Jangka waktu > 12 bulan	-	-	-
Penyisihan Penilaian Kualitas Aset	-	-	-
Sub Jumlah	2.900.000.000	-	-
Jumlah Penempatan Pada Bank Lain	5.610.232.412	-	-
Jumlah Penyisihan Penilaian Kualitas Aset	(3.551.162)	-	-
Jumlah Penempatan Pada Bank Lain Setelah Penyisihan	5.606.681.250	-	-

PT. BANK PERKREDITAN RAKYAT SAMUDERA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk Tahun Yang Berakhir 31 Desember 2024
 Dengan Angka Perbandingan Untuk Tahun 2023
 (Jumlah Dinyatakan Dalam Rupiah)

Tahun 2023

Jenis	Lancar	Kurang Lancar	Macet
Giro			
Terkait	-	-	-
Tidak Terkait	-	-	-
Penyisihan Penghapusan	-	-	-
Sub Jumlah	-	-	-
Tabungan			
Terkait	-	-	-
Tidak Terkait	1.948.374.439	-	-
Penyisihan Penghapusan	-	-	-
Sub Jumlah	1.948.374.439	-	-
Deposito Berjangka			
Terkait			
Jangka waktu 1 bulan	-	-	-
Jangka waktu 3 bulan	-	-	-
Jangka waktu 6 bulan	-	-	-
Jangka waktu 12 bulan	-	-	-
Jangka waktu > 12 bulan	-	-	-
Tidak terkait			
Jangka waktu 1 bulan	250.000.000	-	-
Jangka waktu 3 bulan	750.000.000	-	-
Jangka waktu 6 bulan	1.000.000.000	-	-
Jangka waktu 12 bulan	-	-	-
Jangka waktu > 12 bulan	-	-	-
Penyisihan Penghapusan	-	-	-
Sub Jumlah	2.000.000.000	-	-
Jumlah Penempatan Pada Bank Lain	3.948.374.439	-	-
Jumlah Penyisihan Penghapusan Aset Produktif	-	-	-
Jumlah Penempatan Pada Bank Lain Setelah Penyisihan	3.948.374.439	-	-

Tingkat bunga rata-rata pertahun untuk penempatan dalam rupiah adalah sebesar 4,79% tahun 2024 dan 3,55% tahun 2023.

Perubahan penyisihan penilaian kualitas aset/penyisihan penghapusan aset produktif adalah sebagai berikut :

Urutan	2024	2023
Saldo awal tahun	-	-
Penyisihan penghapusan aset produktif yang dibentuk	3.551.162	-
Pembalikan penyisihan	-	-
Saldo akhir tahun	3.551.162	-

Manajemen berpendapat bahwa jumlah penyisihan penilaian kualitas aset/penyisihan penghapusan aset produktif yang dibentuk adalah cukup untuk menutupi kemungkinan kerugian atas tidak tertagihnya penempatan dana antar bank serta telah dihitung berdasarkan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.

PT. BANK PERKREDITAN RAKYAT SAMUDERA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk Tahun Yang Berakhir 31 Desember 2024
 Dengan Angka Perbandingan Untuk Tahun 2023
 (Jumlah Dinyatakan Dalam Rupiah)

6 KREDIT

Kredit yang diberikan berdasarkan jenis, sektor ekonomi, jangka waktu dan kualitas terdiri dari :

● **Jenis**

Tahun 2024						
Jenis	Baki Debet	Lancar	DPK	Kurang Lancar	Diragukan	Macet
Modal Kerja						
Terkait	-	-	-	-	-	-
Tidak Terkait	23.282.847.229	16.041.725.683	5.161.149.124	436.323.008	283.959.523	1.359.689.891
Jumlah Kredit	23.282.847.229	16.041.725.683	5.161.149.124	436.323.008	283.959.523	1.359.689.891
Provisi	(277.770.794)	(201.558.316)	(55.497.827)	(6.135.673)	(3.183.458)	(11.385.522)
Jumlah Kredit (-) Provisi	23.005.076.435	15.840.167.367	5.105.651.297	430.187.335	280.766.067	1.348.304.369
Penyisihan Penghapusan Kualitas Aset	(399.308.458)	(80.208.634)	(32.073.904)	(16.084.220)	(9.801.292)	(261.140.406)
Sub Jumlah	22.605.767.977	15.759.958.733	5.073.577.393	414.103.115	270.964.775	1.087.163.961
Investasi						
Terkait	-	-	-	-	-	-
Tidak Terkait	-	-	-	-	-	-
Jumlah Kredit	-	-	-	-	-	-
Provisi	-	-	-	-	-	-
Jumlah Kredit (-) Provisi	-	-	-	-	-	-
Penyisihan Penghapusan Kualitas Aset	-	-	-	-	-	-
Sub Jumlah	-	-	-	-	-	-
Konsumsi						
Terkait	-	-	-	-	-	-
Tidak Terkait	3.088.697.282	2.366.906.808	109.379.037	305.249.118	41.863.500	245.298.819
Jumlah Kredit	3.088.697.282	2.366.906.808	109.379.037	305.249.118	41.863.500	245.298.819
Provisi	(24.009.061)	(18.299.404)	(1.801.921)	(3.142.861)	(456.808)	(308.087)
Jumlah Kredit (-) Provisi	3.064.688.201	2.368.607.404	107.577.116	302.106.257	41.406.692	244.990.732
Penyisihan Penghapusan Kualitas Aset	(138.946.101)	(11.834.534)	(2.656.996)	(29.658.162)	(19.006.750)	(75.689.669)
Sub Jumlah	2.925.742.100	2.356.872.870	104.920.120	272.448.095	22.399.942	169.301.073
Jumlah Kredit (Baki Debet)	26.371.544.511	18.428.632.491	5.270.528.161	741.572.126	325.823.023	1.604.988.710
Jumlah Provisi	(301.779.875)	(219.857.720)	(57.299.748)	(9.278.534)	(3.660.264)	(11.683.609)
Jumlah Kredit (-) Provisi	26.069.764.636	18.208.774.771	5.213.228.413	732.293.592	322.172.759	1.593.295.101
Jumlah Penyisihan Penilaian Kualitas Aset	(538.254.559)	(92.143.168)	(34.730.900)	(45.742.382)	(28.808.042)	(336.830.067)
Jumlah Kredit Setelah Penyisihan	25.531.510.077	18.116.631.603	5.178.497.513	686.551.210	293.364.717	1.256.465.034

PT. BANK PERKREDITAN RAKYAT SAMUDERA

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk Tahun Yang Berakhir 31 Desember 2024

Dengan Angka Perbandingan Untuk Tahun 2023

(Jumlah Dinyatakan Dalam Rupiah)

Tahun 2023						
Jenis	Baki Debet	Lancar	DPK	Kurang Lancar	Diragukan	Macet
Modal Kerja						
Terkait	-	-	-	-	-	-
Tidak Terkait	20.947.501.458	15.059.573.537	3.941.181.590	230.891.164	909.035.771	806.819.396
Jumlah Kredit	20.947.501.458	15.059.573.537	3.941.181.590	230.891.164	909.035.771	806.819.396
Provisi	(262.571.759)	(202.085.136)	(41.420.057)	(2.484.515)	(9.513.609)	(7.108.442)
Jumlah Kredit (-) Provisi	20.684.929.699	14.857.508.401	3.899.761.533	228.426.649	899.522.162	799.710.954
Penyisihan Penghapusan Kualitas Aset	(426.622.846)	(75.297.868)	(19.852.268)	(9.465.333)	(39.277.163)	(282.930.214)
Sub Jumlah	20.258.106.853	14.782.210.533	3.879.909.265	218.961.316	860.244.999	516.780.740
Investasi						
Terkait	-	-	-	-	-	-
Tidak Terkait	-	-	-	-	-	-
Jumlah Kredit	-	-	-	-	-	-
Provisi	-	-	-	-	-	-
Jumlah Kredit (-) Provisi	-	-	-	-	-	-
Penyisihan Penghapusan Kualitas Aset	-	-	-	-	-	-
Sub Jumlah	-	-	-	-	-	-
Konsumsi						
Terkait	-	-	-	-	-	-
Tidak Terkait	3.771.519.784	2.776.064.743	380.041.416	255.293.424	189.149.509	170.970.892
Jumlah Kredit	3.771.519.784	2.776.064.743	380.041.416	255.293.424	189.149.509	170.970.892
Provisi	(30.104.727)	(18.607.036)	(6.781.318)	(2.553.104)	(319.274)	(1.843.995)
Jumlah Kredit (-) Provisi	3.741.415.057	2.757.457.707	373.260.098	252.740.320	188.830.235	169.126.897
Penyisihan Penghapusan Kualitas Aset	(216.492.860)	(13.880.324)	(8.764.896)	(25.010.593)	(12.976.355)	(155.890.892)
Sub Jumlah	3.524.922.197	2.743.577.383	364.495.202	227.729.727	175.853.880	13.266.005
Jumlah Kredit (Baki Debet)	24.719.021.242	17.835.638.280	4.321.223.006	486.184.588	1.068.185.280	977.790.088
Jumlah Provisi	(292.678.486)	(220.672.172)	(48.201.375)	(5.017.619)	(9.832.683)	(8.962.437)
Jumlah Kredit (-) Provisi	24.426.344.756	17.614.966.108	4.273.021.631	481.166.969	1.068.352.397	968.837.651
Jumlah Penyisihan Penghapusan Aset Produktif	(643.315.706)	(69.178.182)	(28.617.164)	(34.475.926)	(52.253.518)	(438.790.906)
Jumlah Kredit Setelah Penyisihan	23.783.029.050	17.545.787.916	4.244.404.467	446.691.043	1.016.098.879	530.046.745

PT. BANK PERKREDITAN RAKYAT SAMUDERA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk Tahun Yang Berakhir 31 Desember 2024
 Dengan Angka Perbandingan Untuk Tahun 2023
 (Jumlah Dinyatakan Dalam Rupiah)

● Sektor Ekonomi

Tahun 2024

Jenis	Baki Debet	Lancar	DPK	Kurang Lancar	Diragukan	Macet
Pertanian, perburuan dan kehutanan	1.975.861.585	1.232.628.079	465.886.668	-	18.791.669	258.555.171
Perikanan	2.170.900.526	1.479.465.850	585.101.333	5.000.003	101.333.340	-
Pertambangan dan penggalian	-	-	-	-	-	-
Industri pengolahan	133.284.593	-	106.894.187	-	-	26.370.406
Listrik, gas dan air	335.058.335	89.475.001	245.583.334	-	-	-
Konstruksi	-	-	-	-	-	-
Perdagangan besar dan eceran	9.945.625.281	7.060.739.050	2.030.398.568	411.573.016	122.317.845	330.598.802
Penyediaan akomodasi dan makan minum	176.050.965	176.050.965	-	-	-	-
Pengangkutan, pergudangan dan komunikasi	7.273.647.431	5.513.497.856	1.617.975.405	-	41.516.889	100.657.501
Perantara Keuangan	-	-	-	-	-	-
Real Estate	-	-	-	-	-	-
Administrasi pemerintahan, pertanahan dan jaminan sosial wajib	-	-	-	-	-	-
Jasa pendidikan	-	-	-	-	-	-
Jasa kesehatan dan kegiatan sosial	-	-	-	-	-	-
Jasa kemasyarakatan, sosial budaya, hiburan dan perorangan lainnya	1.272.438.513	499.868.882	109.309.631	19.749.989	-	643.510.011
Jasa perorangan yang melayani rumah tangga	-	-	-	-	-	-
Kegiatan usaha yang belum jelas batasannya	-	-	-	-	-	-
Bukan lapangan usaha rumah tangga	-	-	-	-	-	-
Bukan lapangan usaha lainnya	3.088.697.282	2.388.906.808	109.379.037	305.249.118	41.863.500	245.298.819
Jumlah Kredit (Baki Debet)	26.371.544.511	18.428.632.491	5.270.528.181	741.572.126	325.823.023	1.604.988.710
Jumlah Provisi	(301.779.875)	(219.857.720)	(57.299.748)	(9.278.534)	(3.650.264)	(11.693.609)
Jumlah Kredit (-) Provisi	26.069.764.636	18.208.774.771	5.213.228.413	732.293.592	322.172.759	1.593.295.101
Jumlah Penyisihan Penilaian Kualitas Aset	(538.254.559)	(92.143.168)	(34.730.900)	(45.742.382)	(28.808.042)	(336.830.067)
Jumlah Kredit Setelah Penyisihan	25.531.510.077	18.116.631.603	5.178.497.513	686.551.210	293.364.717	1.256.465.034

PT. BANK PERKREDITAN RAKYAT SAMUDERA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
 Untuk Tahun Yang Berakhir 31 Desember 2024
 Dengan Angka Perbandingan Untuk Tahun 2023
 (Jumlah Dinyatakan Dalam Rupiah)

Tahun 2023

Jenis	Baki Debet	Lancar	DPK	Kurang Lancar	Diragukan	Macet
Pertanian, perburuan dan kehutanan	2.099.607.258	1.411.880.455	569.475.968	-	96.250.835	22.000.000
Perikanan	2.712.793.001	2.656.960.213	55.832.788	-	-	-
Pertambangan dan penggalian	-	-	-	-	-	-
Industri pengolahan	183.379.561	-	140.656.228	-	22.723.333	-
Listrik, gas dan air	447.870.502	447.870.502	-	-	-	-
Konstruksi	-	-	-	-	-	-
Perdagangan besar dan eceran	8.668.402.691	5.763.485.879	2.339.942.327	150.217.431	350.088.456	64.668.598
Penyediaan akomodasi dan makan minum	90.378.031	90.378.031	-	-	-	-
Pengangkutan, pergudangan dan komunikasi	4.574.678.156	4.234.855.679	235.928.143	44.894.334	59.000.000	-
Perantara Keuangan	-	-	-	-	-	-
Real Estate	-	-	-	-	-	-
Administrasi pemerintahan, pertanahan dan jaminan sosial wajib	-	-	-	-	-	-
Jasa pendidikan	-	-	-	-	-	-
Jasa kesehatan dan kegiatan sosial	-	-	-	-	-	-
Jasa kemasyarakatan, sosial budaya, hiburan dan perorangan lainnya	2.190.392.258	454.142.778	599.346.136	35.779.399	380.973.147	720.150.798
Jasa perorangan yang melayani rumah tangga	-	-	-	-	-	-
Kegiatan usaha yang belum jelas batasannya	-	-	-	-	-	-
Bukan lapangan usaha rumah tangga	-	-	-	-	-	-
Bukan lapangan usaha lainnya	3.771.519.784	2.776.084.743	380.041.416	265.293.424	189.149.509	170.970.692
Jumlah Kredit (Baki Debet)	24.719.021.242	17.835.638.280	4.321.223.008	486.184.688	1.088.185.280	977.790.088
Jumlah Provisi	(282.676.486)	(220.672.172)	(48.201.375)	(5.017.619)	(9.832.883)	(8.952.437)
Jumlah Kredit (-) Provisi	24.426.344.756	17.614.966.108	4.273.021.631	481.166.969	1.088.352.397	968.837.651
Jumlah Penyisihan Penghapusan Aset Produktif	(643.315.706)	(89.178.192)	(28.617.164)	(34.475.926)	(52.253.518)	(438.790.906)
Jumlah Kredit Setelah Penyisihan	23.783.029.050	17.525.787.916	4.244.404.467	446.691.043	1.036.098.879	530.046.745

● **Jangka Waktu**

Klasifikasi kredit dilakukan berdasarkan perjanjian kredit dan sisa umur sampai dengan saat jatuh tempornya sebagai berikut :

a. Berdasarkan perjanjian kredit

Jangka Waktu	2024	2023
<= 1 tahun	113.832.802	93.332.168
1 < X <= 2 tahun	897.665.712	1.089.154.713
2 < X <= 5 tahun	19.671.863.654	16.348.968.190
> 5 tahun	5.688.182.343	7.207.546.171
Jumlah Kredit (Baki Debet)	26.371.544.511	24.719.021.242
Jumlah Provisi	(301.779.875)	(282.676.486)
Jumlah Kredit (-) Provisi	26.069.764.636	24.426.344.756
Jumlah Penyisihan Penilaian Kualitas Aset/ Penyisihan Penghapusan Aset Produktif	(538.254.559)	(643.315.706)
Jumlah Kredit Setelah Penyisihan	25.531.510.077	23.783.029.050

PT. BANK PERKREDITAN RAKYAT SAMUDERA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk Tahun Yang Berakhir 31 Desember 2024
 Dengan Angka Perbandingan Untuk Tahun 2023
 (Jumlah Dinyatakan Dalam Rupiah)

b. Berdasarkan sisa umur jatuh tempo

Jangka Waktu	2024	2023
<= 1 tahun	745.880.443	546.194.484
1 < X <= 2 tahun	1.570.228.857	1.647.202.926
2 < X <= 5 tahun	18.322.839.474	16.236.850.857
> 5 tahun	5.732.595.737	6.288.772.975
Jumlah Kredit (Baki Debet)	26.371.544.511	24.719.021.242
Jumlah Provisi	(301.779.875)	(292.676.486)
Jumlah Kredit (-) Provisi	26.069.764.636	24.426.344.756
Jumlah Penyisihan Penilaian Kualitas Aset/Penyisihan Penghapusan Aset Produktif	(538.264.569)	(643.315.706)
Jumlah Kredit Setelah Penyisihan	25.531.500.067	23.783.029.050

• Perubahan penyisihan penilaian kualitas aset/penyisihan penghapusan aset produktif adalah sebagai berikut :

Uraian	2024	2023
Saldo awal tahun	643.315.706	821.165.717
Penyisihan penghapusan aset produktif yang dibentuk	224.459.322	205.622.518
Pembalikan penyisihan	13.566.410	-
Penghapusbukuan yang telah dilakukan	(343.086.679)	(383.472.529)
Saldo akhir tahun	538.264.569	643.315.706

Manajemen berpendapat bahwa jumlah penyisihan penilaian kualitas aset/penyisihan penghapusan aset produktif yang dibentuk adalah cukup untuk menutupi kemungkinan kerugian atas tidak tertagihnya kredit yang diberikan serta telah dihitung berdasarkan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.

Berikut ini adalah informasi pokok lainnya sehubungan dengan kredit yang diberikan :

1. Tingkat bunga rata-rata pertahun dalam rupiah sebesar 12,30% tahun 2024 dan 12,96% tahun 2023.
2. Kredit yang diberikan dijamin dengan deposito, agunan yang diikat dengan hak tanggungan atau surat kuasa untuk menjual dan jaminan lain yang umumnya dapat diterima oleh perbankan.
3. Kredit modal kerja dan investasi diberikan kepada debitur untuk kepentingan modal kerja dan barang-barang modalnya.
4. Kredit konsumsi terdiri atas kredit kepemilikan rumah, kredit kendaraan bermotor dan kredit perorangan lainnya.
5. Kredit yang diberikan kepada karyawan bank merupakan kredit untuk membeli kendaraan, rumah dan keperluan lainnya yang dibebani bunga dengan jangka waktu 1 (satu) sampai dengan 10 (sepuluh) tahun dan dibayar kembali melalui pemotongan gaji setiap bulan.
6. Ikhtisar kredit yang dihapus buku adalah sebagai berikut :

Uraian	2024	2023
Saldo awal tahun	1.353.078.147	1.080.988.325
Penyisihan penghapusan aset produktif yang dibentuk	-	-
Pembalikan penyisihan	-	-
Penghapusbukuan yang telah dilakukan	343.086.879	383.472.529
Penerimaan kembali yang telah dihapus buku	(24.950.000)	(91.362.707)
Saldo akhir tahun	1.671.215.026	1.353.078.147

PT. BANK PERKREDITAN RAKYAT SAMUDERA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
 Untuk Tahun Yang Berakhir 31 Desember 2024
 Dengan Angka Perbandingan Untuk Tahun 2023
 (Jumlah Dinyatakan Dalam Rupiah)

7 ASET TETAP DAN INVENTARIS

Aset tetap terdiri dari :

Tahun 2024

Keterangan	Saldo Awal	Penambahan	Pengurangan	Saldo Akhir
Biaya Perolehan				
Tanah	657.500.000	-	-	657.500.000
Bangunan	644.016.776	12.000.000	-	656.016.776
Kendaraan bermotor & Inventaris	824.054.000	8.065.000	-	832.139.000
Jumlah	2.126.570.776	20.065.000	-	2.146.655.776
Akumulasi Penyusutan	(824.129.659)	(73.466.865)	-	(897.596.524)
Nilai Buku	1.301.441.117			1.248.059.252

Tahun 2023

Keterangan	Saldo Awal	Penambahan	Pengurangan	Saldo Akhir
Biaya Perolehan				
Tanah	657.500.000	-	-	657.500.000
Bangunan	644.016.776	-	-	644.016.776
Kendaraan bermotor & Inventaris	768.911.000	55.143.000	-	824.054.000
Jumlah	2.070.427.776	55.143.000	-	2.125.570.776
Akumulasi Penyusutan	(755.433.379)	(68.696.280)	-	(824.129.659)
Nilai Buku	1.314.994.397			1.301.441.117

Jumlah penyusutan aset tetap dan inventaris sebesar Rp 73.466.865 dan Rp 68.696.280 masing-masing untuk tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal 31 Desember 2024 dan 2023.

8 ASET LAIN-LAIN

Aset lain-lain terdiri dari :

	2024	2023
Sewa dibayar dimuka	28.233.258	44.233.264
Asuransi dibayar dimuka	2.429.848	2.386.606
Persediaan alat tulis & perlengkapan kantor	37.141.781	30.283.700
Jaringan VPN	958.331	-
Jumlah	68.763.216	76.883.570

9 KEWAJIBAN SEGERA

Kewajiban segera terdiri dari :

	2024	2023
Pajak PPh pasal 21	7.019.177	8.065.444
Titipan PPh - tabungan	2.336.085	1.814.863
Titipan PPh - deposito	12.568.251	12.704.334
Titipan notaris	4.966.450	4.966.450
Titipan bonus karyawan	1.819	1.819
Titipan lainnya	9.735.399	9.735.399
Jumlah	36.647.161	37.308.309

PT. BANK PERKREDITAN RAKYAT SAMUDERA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk Tahun Yang Berakhir 31 Desember 2024
 Dengan Angka Perbandingan Untuk Tahun 2023
 (Jumlah Dinyatakan Dalam Rupiah)

10 HUTANG BUNGA

Hutang bunga terdiri dari :

	2024	2023
Bunga deposito - umum	27.229.344	29.556.810
Bunga deposito - ABP	8.182.877	5.053.424
Jumlah	35.412.221	34.610.234

11 HUTANG PAJAK

Hutang pajak terdiri dari :

	2024	2023
Hutang pajak PPh pasal 29	21.257.677	28.336.694
Pendapatan operasional	3.473.306.408	3.196.109.995
Pendapatan operasional lainnya	82.400.383	151.842.740
Pendapatan non operasional	27.326	39.431
Jumlah pendapatan	3.555.734.127	3.347.992.136
Laba sebelum pajak sebelum koreksi fiskal	251.104.722	265.647.036
Koreksi fiskal	10.220.000	9.232.000
Sumbangan	261.324.722	274.879.036
Laba sebelum pajak setelah koreksi fiskal	261.324.722	274.879.036
Laba sebelum pajak setelah koreksi fiskal (pembulatan)	261.324.000	274.879.036
Perhitungan Pajak Penghasilan yang terhutang : 11,00%	261.324.000	274.879.036
Pajak yang sudah dibayar	28.745.640 (7.487.963)	30.236.694 (1.900.000)
Pajak kurang (lebih) bayar	21.257.677	28.336.694

12 SIMPANAN**a. Tabungan**

Jenis Tabungan	2024		2023	
	Pihak terkait	Pihak tdk terkait	Pihak terkait	Pihak tdk terkait
Tabungan Tamare	648.812.775	6.472.757.461	620.759.881	3.744.333.007
Tabungan Tuna	-	65.492.984	-	41.163.503
Tabungan Tahira	-	258.000	-	258.000
Tabungan Pelajar	258.804	625.170.336	2.417.044	568.234.062
Tabungan Qurban	6.835.000	62.292.488	7.335.000	50.561.488
Jumlah	655.906.579	7.225.971.271	630.511.925	4.404.650.060

Tingkat suku bunga per tahun adalah sebesar 2,73% tahun 2024 dan 2,80% tahun 2023.

b. Deposito

Jangka Waktu	2024		2023	
	Pihak terkait	Pihak tdk terkait	Pihak terkait	Pihak tdk terkait
Jangka waktu 1 bulan	255.000.000	7.072.000.000	255.000.000	5.298.000.000
Jangka waktu 3 bulan	-	2.185.000.000	-	2.002.500.000
Jangka waktu 6 bulan	-	1.540.000.000	-	3.840.000.000
Jangka waktu 12 bulan	-	180.000.000	-	100.000.000
Jangka waktu > 12 bulan	-	-	-	-
Jumlah	255.000.000	10.977.000.000	255.000.000	11.240.500.000

Tingkat suku bunga per tahun adalah sebesar 6,56% tahun 2024 dan 6,73% tahun 2023.

PT. BANK PERKREDITAN RAKYAT SAMUDERA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk Tahun Yang Berakhir 31 Desember 2024
 Dengan Angka Perbandingan Untuk Tahun 2023
 (Jumlah Dinyatakan Dalam Rupiah)

13 SIMPANAN DARI BANK LAIN

Keterangan	2024		2023	
	Pihak terkait	Pihak tdk terkait	Pihak terkait	Pihak tdk terkait
Tabungan	-	504.351.462	-	300.221.918
Deposito				
Jangka waktu 1 bulan	-	150.000.000	-	150.000.000
Jangka waktu 3 bulan	-	450.000.000	-	450.000.000
Jangka waktu 6 bulan	-	2.650.000.000	-	1.050.000.000
Jangka waktu 12 bulan	-	-	-	-
Jangka waktu > 12 bulan	-	-	-	-
Jumlah	-	3.754.351.462	-	1.960.221.918

Tingkat suku bunga per tahun adalah sebesar 6,26% tahun 2024 dan 6,54% tahun 2023.

14 PINJAMAN DITERIMA

Pinjaman yang diterima terdiri dari :

	2024	2023
Pinjaman LPMUKP	3.760.000.000	4.651.944.998
Propisi pinjaman	(76.285.006)	-
Jumlah	3.673.734.994	4.651.944.998

Lembaga Pengelola Modal Usaha Kelautan dan Perikanan

- a. Pinjaman yang diterima dari Lembaga Pengelola Modal Usaha Kelautan dan Perikanan merupakan Kredit Modal Kerja. Pinjaman tersebut direalisasi berdasarkan Perjanjian Pinjaman Nomor 35 tanggal 14 Juli 2023 dengan plafond sebesar Rp 5.000.000.000 (lima milyar rupiah) dengan jangka waktu kredit 5 tahun (60 bulan), dengan tingkat bunga 3,00% flat pertahun.

Agunan kredit berupa :

- ↳ Sebidang tanah seluas 526 m2 beserta bangunan dan segala sesuatu yang tertanam diatasnya dengan bukti kepemilikan berupa SHGB Nomor 00001, Surat Ukur Nomor 00299/2020 tanggal 19 Juli 2011 atas nama PT. Bank Perkreditan Rakyat Samudera. Terhadap SHGB ini akan diikat Hak Tanggungan I senilai Rp. 1.278.800.000,-
- ↳ Piutang/tagihan yang dimiliki dengan bukti berupa daftar piutang dan/atau tagihan dengan kategori lancar dengan nilai minimal sebesar Rp 3.000.000.000 dan diikat secara Fidusia Notaril dan didaftarkan..

15 KEWAJIBAN LAIN-LAIN

Kewajiban lain-lain terdiri dari :

	2024	2023
Titipan tunjangan teller	1.158.300	1.102.868

16 SALDO LABA

Berdasarkan Rapat Umum Pemegang Saham tanggal 29 April 2024 diputuskan laba tahun buku 2023 untuk mengurangi rugi tahun sebelumnya.

Laba bersih tahun 2023	235.410.342
Sisa laba yang tidak dibagi tahun 2022	3.069.717
Sisa laba yang tidak dibagi tahun 2023	(3.080.058)
	235.400.000
Pembagian laba :	
65,00% Dividen	153.010.000
4,00% Cadangan Umum	9.416.000
14,00% Pengurus (Direksi dan Komisaris)	32.956.000
17,00% Karyawan	40.018.000
Jumlah	235.400.000

PT. BANK PERKREDITAN RAKYAT SAMUDERA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
 Untuk Tahun Yang Berakhir 31 Desember 2024
 Dengan Angka Perbandingan Untuk Tahun 2023
 (Jumlah Dinyatakan Dalam Rupiah)

	2024	2023
Cadangan Umum	88.626.000	81.260.000
Saldo awal	9.416.000	7.366.000
Penambahan dan laba		
Saldo akhir	98.042.000	88.626.000
Saldo Laba	238.480.058	187.219.717
Laba Tahun Lalu	(236.400.000)	(184.150.000)
Pembagian laba	222.359.082	235.410.342
Laba Tahun Berjalan		
Jumlah Saldo Laba	225.439.140	238.480.058

17 PENDAPATAN BUNGA

Pendapatan bunga dan propisi terdiri dari :

	2024	2023
Bunga Kontraktual		
Penempatan pada bank lain		3.270.295
Giro	41.767.805	27.105.687
Tabungan	235.416.751	90.087.834
Deposito		
Kredit yang diberikan	3.012.083.383	2.920.522.321
Kepada pihak ketiga bukan bank		
Provisi Kredit	184.038.489	155.123.828
Kepada pihak ketiga bukan bank		
Jumlah	3.473.306.408	3.196.109.965

18 PENDAPATAN LAINNYA

Akun ini merupakan pendapatan lainnya terdiri dari :

	2024	2023
Pendapatan jasa transaksi	263.100	147.500
Penerimaan kredit yang dihapus buku	24.950.000	91.362.707
Pemulihan penyisihan penghapusan aset produktif	57.187.283	60.332.533
Lainnya		
Jumlah	82.400.383	161.842.740

19 BEBAN BUNGA

Akun ini merupakan beban bunga terdiri dari :

	2024	2023
Beban Bunga Kontraktual	152.377.613	131.557.006
Tabungan	853.980.388	744.237.635
Deposito	128.957.248	140.986.089
Simpanan dari bank lain		
Pinjaman yang diterima	21.789.996	19.144.981
Dari bank lain	150.000.000	100.000.000
Dari pihak ketiga bukan bank	38.372.550	36.883.153
Lainnya		
Jumlah	1.345.457.795	1.172.808.884

PT. BANK PERKREDITAN RAKYAT SAMUDERA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
 Untuk Tahun Yang Berakhir 31 Desember 2024
 Dengan Angka Perbandingan Untuk Tahun 2023
 (Jumlah Dinyatakan Dalam Rupiah)

20 BEBAN PENYISIHAN PENGHAPUSAN ASET PRODUKTIF

Akun ini merupakan beban penyisihan penghapusan aset produktif terdiri dari :

	2024	2023
Penempatan pada bank lain	17.117.572	-
Kredit yang diberikan		
Kepada pihak ketiga bukan bank	224.459.322	205.622.518
Jumlah	241.576.894	205.622.518

21 BEBAN PEMASARAN

Akun ini merupakan beban pemasaran terdiri dari :

	2024	2023
Beban promosi	20.414.352	14.245.020

22 BEBAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN

Akun ini merupakan beban penelitian dan pengembangan terdiri dari :

	2024	2023
Beban penelitian dan pengembangan	1.850.000	2.511.400

23 BEBAN ADMINISTRASI DAN UMUM

Akun ini merupakan beban administrasi dan umum terdiri dari :

	2024	2023
Beban tenaga kerja	1.251.005.757	1.241.620.934
Beban pendidikan dan pelatihan	57.287.000	60.094.794
Beban sewa	16.000.008	14.666.672
Beban penyusutan/penghapusan aset tetap dan inventaris	73.466.865	68.696.280
Beban premi asuransi	104.416.648	104.733.635
Beban pemeliharaan dan perbaikan	11.122.500	13.165.000
Beban barang dan jasa	155.643.812	162.424.450
Pajak-pajak (selain PPh)	37.700	45.089
Jumlah	1.668.980.290	1.665.446.854

(rincian selengkapnya lihat lampiran)

24 BEBAN LAINNYA

Akun ini merupakan beban lainnya terdiri dari :

	2024	2023
Beban edukasi	590.000	-
Iuran OJK	15.440.074	11.818.444
Sanksi OJK	300.000	660.000
Lainnya	10.220.000	9.232.000
Jumlah	26.550.074	21.710.444

PT. BANK PERKREDITAN RAKYAT SAMUDERA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
 Untuk Tahun Yang Berakhir 31 Desember 2024
 Dengan Angka Perbandingan Untuk Tahun 2023
 (Jumlah Dinyatakan Dalam Rupiah)

25 PENDAPATAN DAN BEBAN NON OPERASIONAL

Rincian akun ini terdiri dari :

	2024	2023
Pendapatan Non Operasional		
Lainnya	27.326	39.431
Sub jumlah	27.326	39.431
Beban Non Operasional		
Lainnya	-	-
Sub jumlah	-	-
Jumlah	27.326	39.431

26 KEWAJIBAN KOMITMEN DAN KONTINJENSI

Bank memiliki kewajiban komitmen dan kontinjensi sebagai berikut :

Uraian	2024		2023	
	Pihak terkait	Pihak tidak terkait	Pihak terkait	Pihak tidak terkait
Tagihan Komitmen				
Fasilitas pinjaman yang diterima yang belum ditarik	-	-	-	-
Tagihan komitmen lainnya	-	-	-	-
Kewajiban Komitmen				
Fasilitas kredit kepada nasabah yang belum ditarik	-	-	-	-
Penerusan kredit (channeling)	-	-	-	-
Kewajiban komitmen lainnya	-	-	-	-
Tagihan Kontinjensi				
Pendapatan bunga dalam penyelesaian				
Bunga kredit yang diberikan	-	461.956.189	-	497.276.639
Bunga penempatan pada bank lain	-	-	-	-
Aset produktif yang dihapusbuku				
Kredit yang diberikan	-	1.671.215.028	-	1.353.078.147
Penempatan pada bank lain	-	-	-	-
Pendapatan bunga atas kredit yang dihapusbuku	-	1.000.896.769	-	822.538.469
Pendapatan bunga atas penempatan pada bank lain yang dihapusbuku	-	-	-	-
Agunan dalam proses penyelesaian kredit	-	-	-	-
Tagihan kontinjensi lainnya	-	-	-	-
Kewajiban Kontinjensi				
Rekening Administratif Lainnya	-	-	-	-

27 PENERAPAN IMBALAN PASCA KERJA

Bank belum membentuk cadangan imbalan kerja sebagaimana dimaksud dengan Standar Akuntansi Keuangan Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik Bab 23, namun para karyawan telah disertakan dalam program Jamsostek dan iuran pensiun.

Jumlah iuran BPJS ketenagakerjaan dan BPJS kesehatan yang dibayarkan pada tahun 2024 sebesar Rp 97.563.295 dan tahun 2023 sebesar Rp 98.385.552.

PT. BANK PERKREDITAN RAKYAT SAMUDERA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk Tahun Yang Berakhir 31 Desember 2024
 Dengan Angka Perbandingan Untuk Tahun 2023
 (Jumlah Dinyatakan Dalam Rupiah)

28 TRANSAKSI DENGAN PIHAK YANG MEMPUNYAI HUBUNGAN ISTIMEWA (PIHAK TERKAIT)

Bank melakukan transaksi usaha dengan pihak yang mempunyai hubungan istimewa (pihak terkait). Transaksi dengan pihak yang mempunyai hubungan istimewa (pihak terkait) terutama berhubungan dengan pemberian pinjaman dalam kegiatan normal perbankan. Tidak terdapat pertakukan yang berbeda atas transaksi dengan pihak yang mempunyai hubungan istimewa (pihak

Uraian	2024		2023	
	Jumlah	%	Jumlah	%
Aset				
Penempatan Pada Bank Lain	-	0,00%	-	0,00%
Kredit yang diberikan	-	0,00%	-	0,00%
Jumlah	-	0,00%	-	0,00%
Jumlah Aset	32.959.920.825		29.661.293.064	
Kewajiban				
Simpanan	910.906.579	3,42%	886.511.925	3,81%
Simpanan dari Bank Lain	-	0,00%	-	0,00%
Pinjaman diterima	-	0,00%	-	0,00%
Jumlah	910.906.579	3,42%	886.511.925	3,81%
Jumlah Kewajiban	26.636.439.685		23.234.187.006	

29 PERISTIWA SETELAH TANGGAL NERACA

SAK Entitas Privat (SAK EP) bagi BPR berlaku efektif mulai tanggal 1 Januari 2025. Penerapan SAK EP oleh BPR akan menggantikan SAK Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik (SAK ETAP) yang selama ini diterapkan.

Pada saat ini BPR masih mempelajari dan belum menghitung dampak yang mungkin timbul dari penerapan SAK EP pada laporan keuangan, terutama pada perhitungan Cadangan Kerugian Penurunan Nilai (CKPN) terhadap Pinjaman Yang Diberikan (Kredit). Selisih lebih atau kurang dibandingkan dengan PPAP Pinjaman Yang Diberikan (Kredit) per 31 Desember 2024 yang telah dihitung atas Nilai Wajar penerapan CKPN per 1 Januari 2025 akan berdampak terhadap penyesuaian Laba Ditahan (Saldo Laba) pada Laporan Keuangan.

30 INFORMASI PENTING LAINNYA

- Rasio kecukupan modal (CAR) bank tanggal 31 Desember 2024 dan 2023 sebesar 35,49% dan 40,08%
- Rasio kredit yang diberikan terhadap dana pihak ketiga (LDR) tanggal 31 Desember 2024 dan 2023 sebesar 137,97% dan 149,53%
- Rasio kredit yang tergolong Non Performing Loan (NPL) Gross tanggal 31 Desember 2024 dan 2023 sebesar 10,13% dan 10,37%
- Rasio kredit yang tergolong Non Performing Loan (NPL) Netto tanggal 31 Desember 2024 dan 2023 sebesar 8,57% dan 8,24%
- Rasio PPAP terhadap PPAP yang wajib dibentuk tanggal 31 Desember 2024 dan 2023 sebesar 100,00% dan 100,00%
- Rasio aset produktif bermasalah terhadap jumlah aset produktif (KAP) tanggal 31 Desember 2024 dan 2023 sebesar 6,94% dan 7,13%
- Rasio aset likud terhadap kewajiban lancar dan dana pihak ketiga (CR) tanggal 31 Desember 2024 dan 2023 sebesar 12,69% dan 11,07%
- Rasio beban operasional terhadap pendapatan operasional (BOPO) tanggal 31 Desember 2024 dan 2023 sebesar 92,94% dan 92,07%
- Rasio laba sebelum pajak terhadap rata-rata aset (ROA) tanggal 31 Desember 2024 dan 2023 sebesar 0,81% dan 1,00%
- Rasio laba setelah pajak terhadap ekuitas (ROE) tanggal 31 Desember 2024 dan 2023 sebesar 3,71% dan 3,92%

LAMPIRAN

PT. BANK PERKREDITAN RAKYAT SAMUDERA
RINCIAN BEBAN ADMINISTRASI DAN UMUM
Untuk Tahun Yang Berakhir 31 Desember 2024
Dengan Angka Perbandingan Untuk Tahun 2023
(Jumlah Dinyatakan Dalam Rupiah)

Uraian	2024	2023
Beban tenaga kerja		
Beban gaji dan upah	649.507.724	657.138.389
Honor komisaris	72.900.000	72.900.000
Tunjangan pajak	15.529.838	16.437.500
Tunjangan jabatan	88.180.000	87.495.000
Tunjangan transportasi	78.800.000	85.280.000
Tunjangan keluarga	6.550.220	7.361.005
Tunjangan kesehatan	23.097.200	23.927.000
Tunjangan lembur	13.772.500	13.217.750
Tunjangan penghargaan	24.291.450	21.109.200
Tunjangan hari raya	76.715.732	80.090.020
Tunjangan kinerja	842.500	1.065.500
Tunjangan pangan	176.805.000	137.060.000
Tunjangan sandang	4.750.000	-
Lainnya	19.483.593	38.539.570
Sub Jumlah	1.251.005.757	1.241.620.934
Beban pendidikan dan pelatihan	57.287.000	60.094.794
Beban sewa		
Gedung kantor	16.000.008	14.666.672
Lainnya	-	-
Sub Jumlah	16.000.008	14.666.672
Beban penyusutan/penghapusan aset tetap dan inventaris	73.466.865	68.696.280
Beban premi asuransi	104.416.648	104.733.635
Beban pemeliharaan dan perbaikan	11.122.500	13.165.000
Beban barang dan jasa		
Beban majalah dan harian	1.680.000	1.680.000
Beban air, listrik dan telepon	43.636.866	45.501.100
Beban cetakan dan alat tulis	17.460.819	17.405.800
Beban alat-alat rumah tangga kantor	7.385.884	7.578.500
Beban BBM kendaraan	23.928.558	23.901.000
Beban perjalanan dinas	2.490.000	9.185.000
Beban fotocopy	966.725	1.251.050
Beban ekspedisi, transfer dan materai	2.697.700	1.688.000
Beban RUPS/Rapat Intern	2.150.000	2.500.000
Beban tamu	422.000	641.000
Beban iuran	3.300.000	6.000.000
Beban program	14.300.000	11.550.000
Beban jasa pihak ketiga	23.310.000	22.200.000
Beban collection fee	2.040.500	1.883.500
Beban pemeliharaan	1.490.000	790.000
Lainnya	8.384.760	8.669.500
Sub Jumlah	155.643.812	162.424.450
Pajak-pajak (selain PPh)	37.700	45.089
JUMLAH BEBAN ADMINISTRASI DAN UMUM	1.668.980.290	1.665.446.854

LAPORAN KEUANGAN
PT. BALAIRUNG CITRAJAYA SUMBAR



**LAPORAN KEUANGAN
UN AUDIT**

**PT BALAIRUNG CITRAJAYA SUMBAR
PER 31 DESEMBER 2024**



PT BALAIRUNG CITRAJAYA SUMBAR

PT BALAIRUNG CITRAJAYA SUMBAR
DAFTAR ISI

	<u>Halaman</u>
Halaman Judul.....	i
Daftar Isi.....	ii
Neraca.....	1
Laporan Laba/Rugi.....	2
Laporan Perubahan Modal.....	3
Laporan Arus Kas.....	4
Catatan atas Laporan Keuangan.....	5-21

PT BALAIRUNG CITRAJAYA SUMBAR
LAPORAN POSISI KEUANGAN
 PER 31 DESEMBER 2024
 (Dinyatakan dalam Rupiah)

KETERANGAN	CAT	2024
ASET		
<u>Aset Lancar</u>		
Kas dan Setara Kas	2c.,3	1.214.047.914
Piutang Usaha	2k.,4	252.259.598
Persediaan	2d.,5.	200.795.676
Perlengkapan Operasional Hotel	6.	160.897.302
Uang Muka	7.	15.493.436
Jumlah Aset Lancar		1.843.493.927
<u>Aset Tidak Lancar</u>		
Aset Tetap (Setelah dikurangi depresiasi)	2e.,2g.,9.	161.447.482.859
Aset Tidak Berwujud (Setelah dikurangi amortisasi)	2f.,10.	-
Aset Pajak Tangguhan	8.c	131.080.508
Jumlah Aset Tidak Lancar		161.578.563.367
Aset Lain-lain	11	1.198.918.819
TOTAL ASET		164.620.976.113
LIABILITAS DAN EKUITAS		
<u>Liabilitas Lancar</u>		
Utang Usaha	2k.,12.	838.617.929
Beban Akrua	2k.,13.	682.810.277
Utang Pajak	2h.,8.a.	8.328.323.740
Pendapatan Sewa Diterima di Muka	2j.,14.	1.139.987.516
Peny Penggantian Perlengkapan Hotel	2i.,	-
Utang Dividen	15.	-
Utang Lain-lain	2k.,16.	170.778.737
Jumlah Liabilitas Lancar		11.160.518.200
<u>Liabilitas Jangka Panjang</u>		
Liabilitas Pajak Tangguhan	2h.,8.c.	3.034.899.797
Utang Imbalan Pasca Kerja		354.250.000
Jumlah Liabilitas		14.549.667.997
<u>Ekuitas</u>		
Modal Dasar Rp.308.078.000.000 terdiri dari 184.848 Saham Seri A Nilai Nominal		
Rp.1000.000 per Saham dan 123.230.000 Saham Seri B Nilai Nominal Rp.1.000 per		
Saham.		
Modal Ditempatkan dan Disetor terdiri dari 98.405 Saham Seri A dan 65.620.990		
Saham Seri B	16	164.025.990.000
Tambahan Modal Disetor - TA		2.030.287.790
Selisih Revaluasi Aset Tetap		33.329.979.575
Defisit		(49.314.949.249)
Jumlah Modal		150.071.308.116
TOTAL KEWAJIBAN DAN EKUITAS		164.620.976.113

Jakarta, 30 Januari 2024



Oktofrida Wisnu Pamung
Direktur

PT BALAIRUNG CITRAJAYA SUMBAR
LAPORAN LABA RUGI DAN PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN
UNTUK TAHUN-TAHUN YANG BERAKHIR TANGGAL 31 DESEMBER 2024
(Dinyatakan dalam Rupiah)

K E T E R A N G A N	CAT	2024
Pendapatan Usaha	3j.,17	15.256.322.662
Beban Pokok Penjualan	3j.,18	5.950.957.367
LABA (RUGI) KOTOR		9.305.365.295
Pendapatan (Beban) Lain-Lain	21	4.511.047
Jumlah Laba Kotor & Pendapatan Lainnya		9.309.876.341
<u>Beban Usaha</u>		
Beban Pemasaran	3j.,19	1.069.855.189
Beban Administrasi dan Umum	3j.,20	6.456.241.118
Jumlah Beban Usaha		7.526.096.307
LABA (RUGI) USAHA SEBELUM PENYUSUTAN & AMORTISASI		1.783.780.034
Beban Penyusutan & Amortisasi		2.974.781.892
LABA (RUGI) SEBELUM PAJAK PENGHASILAN		(1.191.001.858)
Beban (Manfaat) Pajak Penghasilan		
Pajak Kini	8b	-
Pajak Tangguhan	8c	-
Jumlah Beban Pajak Penghasilan		-
LABA (RUGI) BERSIH SETELAH PAJAK PENGHASILAN		(1.191.001.858)

Jakarta, 30 Januari 2024



Oktofrida Wisnu Pamungka
Direktur

PT BALAIRUNG CITRAJAYA SUMBAR
LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS
 UNTUK TAHUN-TAHUN YANG BERAKHIR TANGGAL 31 DESEMBER 2024
 (Dinyatakan dalam Rupiah)

K E T E R A N G A N	Cat	Modal Saham	Selisih Revaluasi	Tambahan Modal Disetor- TA	Saldo Laba (Defisit)	Jumlah Ekuitas
EKUITAS AWAL						
Saldo per 1 Januari 2023		164.025.990.000	33.329.979.575	2.030.287.790	(45.015.622.288)	154.370.635.077
Tambahan Modal Disetor		-	-	-	-	-
Koreksi Uang Muka Pembagian Dividen		-	-	-	-	-
Selisih Revaluasi Aset Tetap		-	-	-	-	-
Rugi Bersih		-	-	-	(3.108.325.102)	(3.108.325.102)
Saldo per 31 Desember 2023		164.025.990.000	33.329.979.575	2.030.287.790	(48.123.947.390)	151.262.309.975
Tambahan Modal Disetor						
Pembagian Dividen						-
Tambahan Modal Disetor - TA						-
Koreksi Laba Ditahan						-
Selisih Revaluasi Aset Tetap						-
Rugi Bersih					(1.191.001.858)	(1.191.001.858)
EKUITAS AKHIR TAHUN 2024		164.025.990.000	33.329.979.575	2.030.287.790	(49.314.949.249)	150.071.308.116

Catatan atas laporan keuangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan
 dari laporan keuangan secara keseluruhan

PT BALAIRUNG CITRAJAYA SUMBAR
LAPORAN ARUS KAS
 UNTUK TAHUN-TAHUN YANG BERAKHIR TANGGAL 31 DESEMBER 2024
 (Dinyatakan dalam Rupiah)

K E T E R A N G A N	2024
Arus Kas dari Aktivitas Operasi	
Penerimaan Kas dari Pelanggan	18.910.381.569
Pembayaran kepada karyawan	(6.684.024.623)
Pembayaran beban operasional	(8.779.254.373)
Pembayaran PBB dan pajak pembangunan daerah	(1.669.358.418)
	1.777.744.155
Jumlah Arus Kas Bersih Diperoleh Dari Aktivitas Operasi	
Arus Kas dari Aktivitas Investasi	
Pembelian aset tetap	(322.320.313)
Pekerjaan dalam Penyelesaian	(801.957.944)
	(1.124.278.257)
Jumlah arus kas dari aktivitas investasi	
Arus Kas dari Aktivitas Pendanaan	
Penerimaan Pinjaman	-
Pengembalian Pinjaman	-
	-
Jumlah arus kas dari aktivitas pendanaan	
Kenaikan (penurunan) kas dan setara kas	653.465.898
Kas dan setara kas awal tahun	560.582.016
Kas dan setara kas akhir tahun	1.214.047.914

PT BALAIRUNG CITRAJAYA SUMBAR
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
UNTUK TAHUN-TAHUN YANG BERAKHIR TANGGAL 31 DESEMBER 2024
(Dinyatakan dalam Rupiah)

1. Umum

PT. Balairung Citrajaya Sumbar, (selanjutnya disebut "Perusahaan") didirikan dengan akta Notaris Catur Virgo, SH, Notaris di Jakarta dengan akta nomor 15 tanggal 10 Nopember 2009 dan telah mendapat pengesahan dari Menteri Kehakiman Reepublik Indonesia dengan surat keputusannya nomor : AHU-59384.AH.01.01.Tahun 2009 tanggal 4 Desember 2009. anggaran dasar Perusahaan tersebut telah beberapa kali mengalami perubahan. Akta perubahan terakhir adalah akta yang dibuat di hadapan Notaris Catur Virgo, SH, nomor 88 tanggal 30 April 2014 yaitu akta "Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan PT Balairung Citrajaya Sumbar" mengenai tambahan penyetoran modal dan perubahan susunan pengurus Perusahaan

Maksud dan tujuan Perusahaan berdasarkan pasal 3 akta pendirian nomor 15 tanggal 10 Nopember 2009 adalah berusaha dalam bidang pembangunan, perdagangan dan jasa dengan melaksanakan kegiatan usaha sebagai berikut:

- 1) Menjalankan usaha-usaha dibidang pembangunan, bertindak sebagai pengembang, pemborongan pada umumnya (*general contractor*), dan pembangunan lapangan golf.
- 2) Menjalankan usaha-usaha dibidang perdagangan, distributor, agen dan sebagai perwakilan dari badan-badan Perusahaan.
- 3) Menjalankan usaha-usaha dibidang jasa, jasa pengelolaan hotel, jasa rumah makan/restoran, jasa penyewaan dan pengelolaan property, dan jasa konsultasi bidang perhotelan.

Ruang lingkup kegiatan Perusahaan saat ini terutama bergerak di bidang industri perhotelan dan jasa akomodasi atau penyewaan ruangan yang berhubungan dengan kegiatan perhotelan serta melakukan dan mengerjakan segala sesuatu yang berhubungan dengan bidang tersebut baik secara langsung maupun tidak langsung.

Perusahaan berdomisili di Jl. Matraman Raya No. 19, Jakarta Timur. Perusahaan memulai kegiatan operasionalnya pada tahun 2012.

Berdasarkan akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Perseroan No. 15 dari Notaris Catur Virgo, SH, tanggal 14 Agustus 2024, susunan Dewan Komisaris dan Direksi pada tanggal 31 Desember 2024 adalah sebagai berikut:

Pengurus

Komisaris : Ria Wijayanti

Direktur : Oktofrida Wisnu Pamungkas

Jumlah karyawan kontrak Perusahaan pada 31 Desember tahun 2024 sebanyak 38 orang.

2. Ikhtisar Kebijakan Akuntansi

a. Dasar Akuntansi

Berdasarkan Surat Persetujuan Perubahan Penyajian Laporan Keuangan Perusahaan No. 430/BCS/DIR/V/2015 tanggal 18 Mei 2015, manajemen Perusahaan merubah Standar Akuntansi Keuangan (SAK) yang diterapkannya untuk tahun 2015 dari SAK ETAP menjadi PSAK.

Sebelum 1 Januari 2015

Laporan keuangan Perusahaan telah disusun dan disajikan sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia yang meliputi Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan-Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik (PSAK-ETAP) yang diterbitkan oleh Dewan Standar Akuntansi Keuangan-Ikatan Akuntan Indonesia (IAI).

Setelah 1 Januari 2015

Laporan Keuangan telah disusun dan disajikan sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia yang meliputi Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) dan Interpretasi Standar Akuntansi Keuangan (ISAK) yang diterbitkan oleh DSAK-IAI.

b. Dasar Pengukuran dan Penyusunan Laporan Keuangan

Laporan Keuangan disusun berdasarkan asumsi kelangsungan usaha serta atas dasar akrual, kecuali untuk laporan arus kas. Dasar pengukuran dalam penyusunan laporan keuangan adalah konsep biaya perolehan, kecuali beberapa akun tertentu yang disusun berdasarkan pengukuran lain sebagaimana dijelaskan dalam kebijakan akuntansi masing-masing akun tersebut.

Laporan arus kas disajikan dengan metode tidak langsung (*indirect method*) dengan mengelompokkan arus kas dalam aktivitas operasi, investasi, dan pendanaan.

Mata uang penyajian yang digunakan dalam penyusunan laporan keuangan ini adalah rupiah yang merupakan mata uang fungsional dan pencatatan Perusahaan.

c. Kas dan Setara Kas

Kas dan Setara Kas mencakup kas, simpanan pada bank yang sewaktu-waktu bisa dicairkan dan investasi likuid jangka pendek lainnya dengan jangka waktu jatuh tempo tiga bulan atau kurang.

d. Persediaan

Persediaan dinyatakan sebesar nilai yang lebih rendah antara biaya perolehan dan nilai realisasi neto. Biaya perolehan ditentukan dengan menggunakan metode rata-rata (*average method*). Penyisihan persediaan usang dilakukan atas dasar hasil penelaahan secara periodik terhadap kondisi persediaan.

e. Aset Tetap

Aset Tetap diakui sebesar biaya perolehannya termasuk pajak yang berlaku, bea masuk, biaya pengangkutan, biaya penanganan, biaya penyimpanan, biaya penyediaan lokasi, biaya pemasangan, biaya upah tenaga kerja internal, estimasi awal biaya pembongkaran, pemindahan aset tetap dan restorasi lokasi aset tetap.

Sebelum 1 Januari 2015

Aset tetap berupa tanah dan bangunan, setelah pengakuan awal diukur dengan menggunakan model biaya.

Setelah 1 Januari 2015

Aset tetap berupa tanah dan bangunan, setelah pengakuan awal diukur dengan menggunakan model revaluasi. Nilai wajar tanah dan bangunan biasanya ditentukan melalui penilaian berdasarkan bukti pasar yang dilakukan oleh penilai yang memiliki kualifikasi profesional.

Penyusutan aset tetap dihitung dengan menggunakan metode garis lurus (*straight-line method*) berdasarkan taksiran masa manfaat ekonomis aset tetap yang bersangkutan. Taksiran masa manfaat ekonomis untuk masing-masing aset tetap adalah sebagai berikut:

Jenis Aset tetap	Masa Manfaat (Tahun)
Bangunan	50
Kendaraan Bermotor	5
Furnitur, Peralatan dan Perlengkapan	4-8
Mesin dan Elektronik	5-8

Jumlah tercatat aset tetap dihentikan pengakuannya pada saat dilepaskan atau saat tidak ada manfaat ekonomis masa depan yang diharapkan dari penggunaan atau pelepasannya. Laba atau rugi yang timbul dari penghentian pengakuan aset (dihitung sebagai perbedaan antara jumlah neto hasil pelepasan dan nilai tercatat dari aset) dimasukkan dalam laporan laba rugi komprehensif pada tahun aset tersebut di hentikan pengakuannya.

Pada setiap akhir tahun buku, nilai residu, umur manfaat dan metode penyusutan ditelaah dan jika sesuai dengan keadaan, disesuaikan secara prospektif.

Aset dinyatakan pada nilai dapat diperoleh kembali pada saat kejadian-kejadian atau perubahan-perubahan keadaan mengindikasikan bahwa nilai tercatatnya mungkin tidak dapat diperoleh kembali. Penurunan nilai aset, jika ada, diakui sebagai rugi pada laporan laba rugi komprehensif.

f. Perangkat Lunak Komputer

Biaya Perolehan perangkat lunak komputer meliputi seluruh biaya yang dapat dikaitkan langsung dalam mempersiapkan aset tersebut hingga siap digunakan dan diamortisasikan selama 10 tahun dengan metode garis lurus.

g. Penurunan Nilai Aset Non-Kuangan

Setiap tanggal pelaporan, Perusahaan menelaah nilai tercatat aset non-keuangan untuk menentukan apakah terdapat indikasi bahwa aset tersebut telah mengalami penurunan nilai. Jika terdapat indikasi tersebut, jumlah terpulihkan dari aset diestimasi untuk menentukan tingkat kerugian penurunan nilai (jika ada). Bila tidak memungkinkan untuk mengestimasi jumlah terpulihkan atas suatu aset individu, Perusahaan mengestimasi jumlah terpulihkan dari unit penghasil kas atas aset.

Perkiraan jumlah terpulihkan adalah nilai tertinggi antara nilai wajar dikurangi biaya untuk menjual atau nilai pakai, jika jumlah terpulihkan dari aset non-keuangan (unit penghasil kas) kurang dari nilai tercatatnya, nilai tercatat aset (unit penghasil kas) dikurangi menjadi sebesar jumlah terpulihkan dan rugi penurunan nilai diakui langsung ke laporan laba rugi komprehensif.

Berdasarkan penilaian manajemen, tidak ada kejadian-kejadian atau perubahan-perubahan keadaan yang mengindikasikan penurunan nilai aset non-keuangan pada 31 Desember 2016 dan 2015.

h. Perpajakan

Seluruh Perbedaan temporer antara jumlah tercatat aset dan liabilitas dengan dasar pengenaan pajaknya diakui sebagai pajak tangguhan dengan menggunakan *balance sheet liability method*. Pajak tangguhan diukur dengan tarif pajak yang berlaku saat ini.

Pajak tangguhan diukur dengan menggunakan tarif pajak yang berlaku atau yang telah secara substantif berlaku pada tanggal laporan posisi keuangan dan yang akan digunakan pada saat aset dipulihkan atau liabilitas dilunasi.

Saldo rugi fiskal yang dapat dikompensasi diakui sebagai aset pajak tangguhan apabila besar kemungkinan bahwa jumlah laba fiskal pada masa mendatang akan memadai untuk dikompensasi.

Koreksi terhadap liabilitas perpajakan diakui saat surat ketetapan pajak diterima atau jika mengajukan keberatan, pada saat keputusan atas keberatan tersebut telah ditetapkan, atau jika mengajukan banding pada saat keputusan atas banding tersebut telah ditetapkan.

Penghasilan yang telah dikenakan pajak penghasilan final, beban pajaknya diakui proporsional dengan jumlah pendapatan menurut akuntansi yang diakui pada tahun berjalan. Selisih antara jumlah pajak penghasilan final yang dibayar dengan jumlah yang dibebankan pada laporan laba rugi komprehensif, diakui sebagai pajak dibayar di muka atau pajak yang masih harus dibayar.

Aset dan liabilitas pajak tangguhan saling hapus jika dan hanya jika (a) entitas memiliki hak yang dapat dipaksakan secara hukum untuk melakukan saling hapus aset pajak kini terhadap liabilitas pajak kini; dan (b) aset pajak tangguhan dan liabilitas pajak tangguhan terkait dengan pajak penghasilan yang dikenakan oleh otoritas perpajakan yang sama atas entitas kena pajak yang sama atau entitas kena pajak yang berbeda untuk memulihkan aset dan liabilitas pajak kini dengan dasar neto, atau merealisasikan aset dan menyelesaikan liabilitas secara bersamaan pada setiap periode mendatang dimana jumlah signifikan atas aset atau liabilitas pajak tangguhan diperkirakan untuk diselesaikan atau dipulihkan.

Pajak kini atas penghasilan non final diakui berdasarkan laba kena pajak untuk tahun yang bersangkutan, yaitu laba yang dihitung sesuai dengan peraturan perpajakan yang berlaku.

Aset dan liabilitas pajak kini saling hapus jika dan hanya jika entitas (a) memiliki hak yang dapat dipaksakan secara hukum untuk melakukan saling hapus aset pajak kini terhadap liabilitas pajak kini; dan (b) bermaksud untuk menyelesaikan dengan dasar neto, atau merealisasikan aset dan menyelesaikan liabilitas secara bersamaan.

i. Perlengkapan Operasional Hotel dan Penyisihan untuk Penggantian

Perlengkapan operasional hotel terdiri dari barang-barang porselen, pecah belah, *linen*, *hollowware*, seragam, *utensils*, dan perlengkapan lainnya dinyatakan sebesar harga perolehan.

Penyisihan untuk penggantian peralatan operasi hotel ditetapkan berdasarkan taksiran nilai ganti dari peralatan operasi hotel yang hilang atau rusak dicatat sebagai pengurangan akun penyisihan tersebut.

j. Pengakuan Pendapatan dan Beban

Pendapatan sewa diterima di muka diamortisasikan selama masa sewa dengan menggunakan metode garis lurus (*straight-line method*)

Pendapatan hotel dan hunian kamar diakui pada tanggal terhuninya sedangkan pendapatan hotel lainnya diakui pada saat barang atau jasa diserahkan kepada pelanggan.

Beban diakui pada saat terjadinya dengan basis akrual.

k. Aset dan Liabilitas Keuangan

i. Aset Keuangan

Aset keuangan dalam ruang lingkup PSAK No. 55 (Revisi 2014) diklasifikasikan sebagai aset keuangan yang dinilai pada nilai wajar melalui laba rugi, pinjaman yang diberikan dan piutang, investasi yang dimiliki hingga tanggal jatuh tempo dan aset keuangan tersedia untuk dijual.

Perusahaan mengklasifikasikan aset keuangannya menjadi pinjaman yang diberikan dan piutang. Klasifikasi ini tergantung dari tujuan perolehan aset keuangan tersebut. Manajemen menentukan klasifikasi aset keuangan tersebut pada saat awal pengakuannya dan jika diperbolehkan dengan sesuai, akan dievaluasi kembali setiap akhir periode keuangan.

Aset keuangan Perusahaan terdiri dari kas dan setara kas, piutang usaha dan piutang lain-lain, diklasifikasikan dan dicatat sebagai pinjaman yang diberikan dan piutang sesuai PSAK no.55 (Revisi 2014)

Pinjaman yang diberikan dan piutang

Pinjaman yang diberikan dan piutang adalah aset keuangan non derivatif dengan pembayaran tetap atau telah ditentukan dan tidak mempunyai kuotasi di pasar aktif.

Pada saat pengakuan awal, aset keuangan ini diakui pada nilai wajarnya ditambah biaya transaksi dan selanjutnya dinyatakan sebesar biaya perolehan yang diamortisasi dengan menggunakan metode suku bunga efektif. Pendapatan dari aset keuangan dalam kelompok ini disajikan sebagai pendapatan bunga dalam laporan laba rugi komprehensif.

Dalam hal terjadi penurunan nilai, kerugian penurunan nilai dilaporkan sebagai pengurang dari nilai tercatat dari aset keuangan dalam kelompok pinjaman yang diberikan dan piutang dan diakui di dalam laporan laba rugi komprehensif.

Penurunan nilai dari aset keuangan Perusahaan melakukan penilaian pada setiap tanggal laporan posisi keuangan apakah terdapat bukti objektif bahwa aset keuangan mengalami penurunan nilai.

Aset keuangan diturunkan nilainya dan kerugian penurunan nilai telah terjadi, jika dan hanya jika, terdapat bukti yang objektif mengenai penurunan nilai tersebut sebagai akibat dari satu atau lebih peristiwa yang terjadi setelah pengakuan awal aset tersebut (peristiwa yang merugikan) dan peristiwa yang merugikan tersebut berdampak pada estimasi arus kas masa depan atas aset keuangan yang dapat diestimasi secara handal.

Untuk menentukan adanya bukti objektif bahwa rugi penurunan nilai telah terjadi atas aset keuangan, Perusahaan mempertimbangkan faktor-faktor seperti kemungkinan adanya insolvabilitas atau kesulitan keuangan signifikan yang dialami debitur dan kelalaian atau penundaan signifikan pembayaran.

ii Penurunan Nilai dari Aset Keuangan

Perusahaan pertama kali menentukan apakah terdapat bukti objektif penurunan nilai secara individual atas aset keuangan yang secara individual signifikan atau secara kolektif untuk aset keuangan yang jumlahnya tidak signifikan secara individual.

Jika Perusahaan menentukan tidak terdapat bukti objektif mengenai penurunan nilai atas aset keuangan yang dinilai secara individual, terlepas aset keuangan tersebut signifikan atau tidak, maka Perusahaan memasukkan aset tersebut ke dalam kelompok aset keuangan yang memiliki karakteristik risiko kredit yang serupa dan menilai penurunan nilai kelompok tersebut secara kolektif. Aset yang penurunan nilainya dinilai secara individual dan untuk itu kerugian penurunan nilai diakui atau terus diakui, tidak termasuk dalam penilaian penurunan nilai secara kolektif.

Jumlah kerugian penurunan nilai diukur berdasarkan selisih antara nilai tercatat aset keuangan dengan nilai kini dari estimasi arus kas masa depan (tidak termasuk kerugian kredit di masa depan yang belum terjadi) yang didiskontokan menggunakan tingkat suku bunga efektif awal dari aset keuangan tersebut.

Nilai tercatat aset tersebut dikurangi melalui akun cadangan penurunan nilai dan jumlah kerugian diakui pada laporan laba rugi komprehensif. Jika pinjaman yang diberikan memiliki suku bunga variabel, maka tingkat diskonto yang digunakan adalah suku bunga efektif awal dari aset keuangan tersebut.

Estimasi periode antara terjadinya peristiwa dan teridentifikasinya kerugian ditentukan oleh manajemen untuk setiap portofolio yang diidentifikasi.

Untuk tujuan evaluasi penurunan nilai secara kolektif, aset keuangan dikelompokkan berdasarkan kesamaan karakteristik risiko kredit yaitu berdasarkan jenis pelanggan.

Arus kas masa datang dari aset keuangan Perusahaan yang penurunan nilainya dievaluasi secara kolektif, diestimasi berdasarkan arus kas kontraktual atas aset-aset di dalam kelompok tersebut dan kerugian historis yang pernah dialami atas aset-aset yang memiliki karakteristik risiko kredit yang serupa dengan karakteristik risiko kredit kelompok tersebut. Kerugian historis yang pernah dialami kemudian disesuaikan berdasarkan data terkini yang dapat diobservasi untuk mencerminkan kondisi saat ini yang tidak berpengaruh pada periode terjadinya kerugian historis tersebut, dan untuk menghilangkan pengaruh kondisi yang ada pada periode historis namun sudah tidak ada lagi saat ini.

Ketika piutang tidak tertagih, piutang tersebut dihapusbukukan dengan menjurnal balik cadangan penurunan nilai. Piutang tersebut dapat dihapus buku setelah semua prosedur yang diperlukan telah dilakukan dan jumlah kerugian telah ditentukan. Beban penurunan nilai yang terkait dengan piutang diklasifikasikan ke dalam "Cadangan Penurunan Nilai".

Jika pada periode berikutnya, jumlah kerugian penurunan nilai berkurang dan pengurangan tersebut dapat dikaitkan secara objektif pada peristiwa yang terjadi setelah penurunan nilai diakui maka kerugian penurunan nilai yang, sebelumnya diakui dipulihkan, dengan menyesuaikan cadangan penurunan nilai. Jumlah pemulihan aset keuangan diakui pada laporan laba rugi komprehensif.

Penerimaan kemudian atas piutang yang telah dihapusbukukan sebelumnya, jika pada periode berjalan dikreditkan pada cadangan penurunan nilai, sedangkan jika setelah tanggal laporan posisi keuangan, dikreditkan sebagai pendapatan operasional lainnya.

ii Liabilitas Keuangan

Liabilitas Keuangan dalam ruang lingkup PSAK No.55 (Revisi 2014) diklasifikasikan sebagai liabilitas keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui laporan laba rugi, utang dan pinjaman. Pada tanggal laporan posisi keuangan, Perusahaan hanya, memiliki jenis liabilitas keuangan utang dan pinjaman yang diukur dengan biaya perolehan diamortisasi. Perusahaan menetapkan klasifikasi atas liabilitas keuangan pada saat pengakuan awal.

Setelah pengakuan awal, Perusahaan mengukur seluruh liabilitas keuangan yang diukur dengan biaya perolehan diamortisasi dengan menggunakan metode suku bunga efektif. Liabilitas keuangan yang dikategorikan sebagai liabilitas keuangan yang diukur dengan biaya perolehan diamortisasi adalah utang usaha, utang lain-lain, beban akrual dan utang pembelian kendaraan.

iv Penentuan Nilai Wajar

Nilai wajar untuk instrumen keuangan yang diperdagangkan di pasar aktif ditentukan berdasarkan nilai pasar yang berlaku pada tanggal laporan posisi keuangan.

Instrumen keuangan dianggap memiliki kuotasi di pasar aktif, jika harga kuotasi tersedia sewaktu-waktu dan dapat diperoleh secara rutin dari bursa, pedagang efek (*dealer*), perantara efek (*broker*), kelompok industri, badan pengawas (*pricing service or regulatory agency*) dan harga tersebut mencerminkan transaksi pasar yang aktual dan rutin dalam suatu transaksi yang wajar. Jika kriteria di atas tidak terpenuhi, maka pasar aktif dinyatakan tidak tersedia.

Indikasi-indikasi dari pasar tidak aktif adalah terdapat selisih yang besar antara harga penawaran dan permintaan atau kenaikan signifikan dalam selisih harga penawaran dan permintaan dan hanya terdapat beberapa transaksi terkini.

Nilai wajar untuk semua instrumen keuangan lainnya yang tidak memiliki kuotasi di pasar aktif ditentukan dengan menggunakan teknik penilaian. Dengan teknik ini, nilai wajar merupakan suatu estimasi yang dihasilkan dari data yang dapat diobservasi dari instrumen keuangan yang sejenis, menggunakan model-model untuk mendapatkan estimasi nilai kini dari arus kas masa depan yang diharapkan.

v Pengakuan dan Pengukuran Awal

Penghentian pengakuan aset keuangan dilakukan ketika hak kontraktual untuk menerima arus kas yang berasal dari aset keuangan tersebut berakhir, atau ketika aset keuangan tersebut telah dialihkan dan secara substansial seluruh risiko dan manfaat atas kepemilikan aset telah ditransfer (jika, secara substansial seluruh risiko dan manfaat tidak ditransfer, maka Perusahaan melakukan evaluasi untuk memastikan keterlibatan berkelanjutan atas kontrol yang masih dimiliki tidak mencegah penghentian pengakuan). Liabilitas keuangan dihentikan pengakuannya ketika liabilitas yang telah ditetapkan dalam kontrak dihentikan atau dibatalkan atau kadaluwarsa.

v Klasifikasi Instrumen Keuangan

Perusahaan mengklasifikasikan instrumen keuangan ke dalam klasifikasi tertentu yang mencerminkan sifat dari informasi dan mempertimbangkan karakteristik dari instrumen keuangan tersebut.

v Saling Hapus Instrumen Keuangan

Aset keuangan dan liabilitas keuangan saling hapus buku dan nilai netonya disajikan dalam laporan posisi keuangan jika memiliki hak yang berkekuatan hukum untuk melakukan saling hapus buku atas jumlah yang telah diakui tersebut dan berniat untuk menyelesaikan secara neto atau untuk merealisasikan aset dan menyelesaikan liabilitasnya secara simultan.

l. Sumber Estimasi Ketidakpastian dan Penggunaan Pertimbangan

Penyusunan laporan keuangan Perusahaan mengharuskan manajemen untuk membuat pertimbangan, estimasi dan asumsi yang mempengaruhi jumlah yang dilaporkan dari pendapatan, beban, aset dan liabilitas, dan pengungkapan atas liabilitas kontinjensi, pada akhir periode pelaporan. Ketidakpastian mengenai asumsi dan estimasi tersebut dapat mengakibatkan penyesuaian material terhadap nilai tercatat pada aset dan liabilitas dalam periode pelaporan berikutnya.

Estimasi dan Asumsi Akuntansi yang Penting

Asumsi utama masa depan dan sumber utama estimasi ketidakpastian lain pada tanggal pelaporan yang memiliki risiko signifikan bagi penyesuaian yang material terhadap nilai tercatat aset dan liabilitas untuk periode/tahun berikutnya diungkapkan di bawah ini. Perusahaan mendasarkan asumsi dan estimasi pada parameter yang tersedia pada saat laporan keuangan disusun. Asumsi dan situasi mengenai perkembangan masa depan mungkin berubah akibat perubahan pasar atau situasi di luar kendali Perusahaan. Perubahan tersebut dicerminkan dalam asumsi terkait pada saat terjadinya.

Estimasi Masa Manfaat Aset Tetap

Perusahaan melakukan penelaahan berkala atas masa depan manfaat ekonomis aset tetap berdasarkan faktor-faktor seperti kondisi teknis dan perkembangan teknologi di masa depan. Hasil operasi di masa depan akan dipengaruhi secara material atas perubahan estimasi ini yang diakibatkan oleh perubahan faktor yang telah disebutkan di atas.

Perusahaan menentukan tingkat diskonto yang sesuai pada akhir periode pelaporan, yakni tingkat suku bunga yang harus digunakan untuk menentukan nilai kini arus kas keluar masa depan estimasian yang diharapkan untuk menyelesaikan liabilitas. Dalam menentukan tingkat suku bunga yang sesuai, Perusahaan mempertimbangkan tingkat suku bunga obligasi pemerintah yang didenominasikan dalam mata uang imbalan akan dibayar dan memiliki jangka waktu yang serupa dengan jangka waktu kewajiban yang terkait.

Penvisihan untuk penggantian peralatan operasi hotel

Penvisihan untuk penggantian peralatan operasi hotel ditetapkan berdasarkan taksiran nilai ganti dari peralatan operasi hotel yang hilang atau rusak.

PT BALAIRUNG CITRAJAYA SUMBAR
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
 UNTUK TAHUN-TAHUN YANG BERAKHIR TANGGAL 31 DESEMBER 2024
 (Dinyatakan dalam Rupiah)

3. KAS DAN SETARA KAS

	2024	#
Kas	47.578.720	
Bank		
PT BPD Sumatera Barat	149.236.677	
PT Bank Cental Asia, Tbk	34.345.009	
PT Bank Cental Asia Syariah	37.680.000	
PT Bank Mandiri (Persero) Tbk	216.559.281	
PT Bank BRI (Persero) Tbk	2.871.570	
PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk	25.023.207	
PT CIMB NIAGA Tbk	753.450	
Deposito	700.000.000	
Jumlah Bank	1.166.469.194	
Jumlah Kas dan Setara Kas	1.214.047.914	

4. Piutang Usaha

a. Berdasarkan Pelanggan

	2024
Jumlah Piutang Usaha	252.236.074
Jumlah Piutang Other	23.524
Jumlah Piutang	252.259.598

b. Berdasarkan Umur

	2024
Belum Jatuh Tempo	
Sudah Jatuh Tempo	67.906.290
● 1 bulan - 2 bulan	37.696.798
● 2 bulan - 3 bulan	28.049.832
● > 3 bulan	2.159.660
Guest Ledger	177.150.871
Piutang Lain-Lain	23.524
Jumlah Piutang Us	245.080.685
Cadangan Penyisihan Piutang	7.178.912
Jumlah Piutang Usaha	252.259.598

Manajemen Perusahaan melakukan pencadangan penurunan nilai piutang usaha untuk mengantisipasi piutang tak tertagih

5. Persediaan

	2024
Persediaan Bahan Baku Makanan	46.166.905
Persediaan Bahan Baku Minuman	2.500.442
Persediaan Merchandise	128.508
Persediaan Peralatan Kebersihan	10.780.908
Persediaan Perlengkapan Tamu	56.550.594
Persediaan Peralatan Operasi	2.763.597
Persediaan Cetakan	27.243.986
Persediaan ATK	5.215.039
Persediaan Peralatan Engineering	265.810
Persediaan Lampu	4.350.086
Persediaan Gas	3.130.000
Persediaan Solar	40.171.135
Persediaan Peralatan Kitchen	253.846
Persediaan Peralatan Komputer	605.903
Persediaan Lain-lain	668.917
Jumlah Persediaan	200.795.676

PT BALAIRUNG CITRAJAYA SUMBAR
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
 UNTUK TAHUN-TAHUN YANG BERAKHIR TANGGAL 31 DESEMBER 2024
 (Dinyatakan dalam Rupiah)

6. Perlengkapan Operasional Hotel

	2024
<i>Linen Room, Food dan Beverage</i>	122.597.630
<i>Chinaware, Glassware dan Silverware</i>	23.830.791
<i>Utensil</i>	1.205.000
<i>Administrasi dan Umum</i>	13.263.881
Jumlah Perlengkapan Operasional Hotel	160.897.302

7. Uang Muka

	2024
Uang Muka Pembelian	5.000.000
Lain-Lain	10.493.436
Jumlah Uang Muka	15.493.436

8. Perpajakan

a. Utang Pajak	2024
Pajak Penghasilan - Pasal 21	107.335.534
Pajak Penghasilan - Pasal 23	4.584.595
Pajak Penghasilan - Pasal 25	-
Pajak Pembangunan 1	1.843.203.611
Bea Perolehan Hak atas Tanah Bangunan	6.373.200.000
Jumlah Utang Pajak	8.328.323.740

\
 Bea Perolehan Hak atas Tanah Bangunan terutang atas transaksi pembelian lahan untuk hotel.

b. Pajak Kini

Rekonsiliasi antara rugi sebelum pajak menurut laporan laba rugi komprehensif dengan laba kena pajak adalah sebagai berikut:

	2024
Rugi Sebelum Pajak Penghasilan	(1.191.001.858)
Koreksi Fiskal Positif (Negatif)	
Penyusutan Aset	-
Amortisasi	-
Beban Entertain	-
Beban Donasi	-
Pendapatan Sewa	-
Imbalan Paca Kerja	-
Jasa Giro	-
Kompensasi Rugi Fiskal	
Tahun 2020-2023	-
Akumulasi Rugi Fiskal	(1.191.001.858)
PPh Terhutang	NIHIL

c. Pajak Tangguhan

	2023	(Dibebankan) Dikreditkan ke Laporan Laba	2024
Penyusutan Aset Tetap	-	-	-
Rugi Fiskal	-	-	-
Penyisihan Pajak Tangguhan	-	-	-
Aset /Liabilitas Pajak Tangguhan	-	-	-

PT BALAIRUNG CITRAJAYA SUMBAR
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
 UNTUK TAHUN-TAHUN YANG BERAKHIR TANGGAL 31 DESEMBER 2024
 (Dinyatakan dalam Rupiah)

d. Pengampunan Pajak (Tax Amnesty)

Tahun 2016 Perusahaan mengikuti program Pengampunan Pajak (Tax Amnesty). Program Pengampunan pajak dilakukan Perusahaan berdasarkan Surat Keterangan Pengampunan Pajak dari Kementerian Keuangan Republik Indonesia Nomor: KET-11831/PP/WPJ.20/2016, tanggal 23 September 2016.

Daftar rincian harta yang diberikan fasilitas Pengampunan Pajak berdasarkan Surat Keterangan adalah sebagai berikut :

	Uraian	Dalam Negeri (Rupiah)	Luar Negeri yang Dialihkan Ke Dalam Negeri (Rupiah)	Luar Negeri yang Tidak Dialihkan Ke Dalam Negeri (Rupiah)
1	Nilai Harta Bersih per Akhir Tahun	Rp 2.030.287.790	-	-
2	Uang Tebusan	Rp	40.605.756	
	a. Berdasarkan Surat Pernyataan Harta I			
	b. Berdasarkan Surat Pernyataan Harta II			
	c. Berdasarkan Surat Pernyataan Harta III			

Harta yang diampuni adalah senilai Rp.2.030.287.790.- sehingga total rincian harta yang diberikan fasilitas pengampunan pajak adalah sebagai berikut :

No	Kode Harta	Nama Harta	Tahun Perolehan	Nilai Harta yang Berada di Dalam Negeri	Keterangan
	019	Setara Kas Lainnya	2015	1.782.529.284	
	021	Piutang	2015	300.919.274	
	023	Persediaan Usaha	2015	456.635.414	
	059	Harta Bergerak Lainnya	2015	443.572.389	
	079	Harta Tidak Berwujud Lainnya	2015	311.428.117	
	069	Harta Tidak Bergerak Lainnya	2015	1.068.373.034	
	062	Tanah dan/atau Bangunan tempat Usaha	2015	31.307.163.476	
	062	Bangunan	2012	113.687.000.000	
	062	Bangunan Renovasi	2013	18.922.633.563	
	042	Kendaraan Motor	2013	15.575.000	
	042	Kendaraan Motor	2013	195.000.000	
	043	Kendaraan Mobil	2013	178.456.560	
	043	Kendaraan Mobil	2013	178.456.560	
	043	Kendaraan Mobil	2013	178.456.560	
	055	Peralatan Hotel	2012	6.527.451.968	
	055	Peralatan Kantor	2012	5.574.738.218	
	055	Perangkat Lunak	2012	346.025.685	
	059	Harta Bergerak Lainnya	2015	2.030.287.790	Overhaul Mesin Genset & Fire Alarm System

PT BALAIRUNG CITRAJAYA SUMBAR
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
 UNTUK TAHUN-TAHUN YANG BERAKHIR TANGGAL 31 DESEMBER 2024
 (Dinyatakan dalam Rupiah)

9. ASET TETAP

	01-Jan-24	Penambahan	Pengurangan	31-Des-24
Harga Perolehan				
Tanah	55.510.000.000	-	-	55.510.000.000
Bangunan	138.219.198.621	1.547.210	783.660	138.219.962.171
Kendaraan Bermotor	15.575.000	-	-	15.575.000
Perlengkapan	11.149.586.257	23.991.700	-	11.173.577.957
Mesin dan Elektronik	3.203.882.506	296.781.403	3.570.000	3.497.093.909
Jumlah	208.098.242.383	322.320.313	4.353.660	208.416.209.036
	01-Jan-24	Penambahan	Pengurangan	31-Des-24
Akumulasi Penyusutan				
Bangunan	30.277.662.302	2.762.609.304	-	33.040.271.606
Kendaraan Bermotor	15.575.000	-	-	15.575.000
Perlengkapan	10.940.457.039	49.776.550	-	10.990.233.589
Mesin dan Elektronik	2.768.463.682	154.182.300	-	2.922.645.982
Jumlah	44.002.158.024	2.966.568.154	-	46.968.726.178
Nilai Buku	164.096.084.360			161.447.482.859

10. Aset Tetap Tidak Berwujud

	2024
Perangkat Lunak Komputer	357.025.685
Akumulasi Amortisasi	(357.025.685)
Jumlah Aset Tetap Tidak Berwujud	-

11. Aset Lain-lain

	2024
Aset- Tax Amnesty	2.030.287.800
Akumulasi Penyusutan Aset- Tax Amnesty	(2.030.287.800)
Jumlah Aset Lain-lain	-
Invesment On Project	1.209.398.294
Beban Tangguhan	594.382.198
Amortisasi Beban Tangguhan dan Invesment On Project	(604.861.673)
	1.198.918.819

12. Utang Usaha

	2024
M T F Berkah,	266.457.590
Koperasi Garudayaksa Nusantara,	214.962.400
CV. Seasoft Makmur Sentosa,	49.619.000
Cikarang Primatex,	44.764.300
Mennotani Tunggul Wulung,	32.775.000
PT. Adriea Suma Jaya,	32.000.000
PT. Efishery Aquaculture Indonesia	30.522.000
PT. Sinar Horeca Sukses,	29.950.000
CV. Arga Buana,	17.622.500
PT. Mandiri Sejahtera Alami,	16.625.000
PT. Sahabat Baru Niaga,	14.300.000
PT. Panfila Indosari,	9.206.000

PT BALAIRUNG CITRAJAYA SUMBAR
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
 UNTUK TAHUN-TAHUN YANG BERAKHIR TANGGAL 31 DESEMBER 2024
 (Dinyatakan dalam Rupiah)

PT. Samudra Montaz,	8.932.100
PT Langgeng Makmur Kencana	7.460.000
PT Buyung Putra Sembada,	7.450.000
Utang Usaha Lainnya Dibawah 7.000.000	55.972.039
Jumlah Utang usaha	838.617.929

13. Beban Akruai

	2024
A/E - Telephone	119.540.164
A/E - Water	1.079.506
A/E - Payroll	18.220.276
A/E - Jamsostek	169.050.000
A/E - Medical	2.931.069
A/E - Meal	11.980.600
A/E - Music & Entertainment	11.949.500
A/E - Commision	6.485.000
A/E - Pest Control	143.490.685
A/E - Garbage Removal	9.000.000
A/E - S & M Fee	13.400.000
A/E - Incentive Fee	7.000.000
A/E - Management Fee (Security)	138.879.177
A/E - Sales & Marketing Department	25.304.300
A/E - Petty Cash	4.500.000
Jumlah Beban Akruai	682.810.277

14. Pendapatan Sewa Diterima di Muka

	2024
Sewa Ruangan	614.790.000
Deposit Hotel	525.197.516
Jumlah Pendapatan Sewa Diterima di Muka	1.139.987.516

Perusahaan menyewakan ruangan kepada beberapa pengguna jasa yaitu:

- PT Bank Pembangunan Daerah Sumatera Barat (Bank Nagari) berdasarkan surat perjanjian sewa ruangan No. 237/BCS/PKSM/VII-2024 dan Nomor 007/JK/UM/07-2024 untuk jangka waktu 2 tahun, terhitung sejak tanggal 18 Juni 2024 sampai dengan 18 Juni 2026.
- Kantor Penghubung Provinsi Sumatera Barat berdasarkan surat Perjanjian sewa Gedung Kantor nomor 020/003/PL-Kont/BPHB/II/2024 telah melakukan penandatanganan sewa gedung kantor penghubung Sumatera Barat untuk periode 1 Januari 2024 sampai dengan 31 Desember 2024

15. Utang Dividen

	2024
Pemerintah Provinsi Sumatera Barat & 9 Pemkab & Pemko	-
Jumlah Utang Dividen	-

16. Utang Lain-lain

	2024
Utang Biaya Service Hotel	132.783.062
Lain-lain	37.995.675
Jumlah Utang Lain-lain	170.778.737

PT BALAIRUNG CITRAJAYA SUMBAR
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
 UNTUK TAHUN-TAHUN YANG BERAKHIR TANGGAL 31 DESEMBER 2024
 (Dinyatakan dalam Rupiah)

17. Utang Imbalan Pasca Kerja

	2024
Imbalan Pasca Kerja	354.250.000
Jumlah Utang Imbalan Pasca Kerja	354.250.000

18. Ekuitas

Modal Saham

Pada tahun 2016, berdasarkan akta pernyataan keputusan Rapat Umum Pemegang Saham tahunan PT Balairung Citrajaya Sumbar Nomor 33 dari Notaris Catur Virgo, SH. MH., tanggal 29 Februari 2016 telah disetujui penambahan penyeteran modal yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Pasaman Barat sebesar Rp 624.899.000 (enam ratus dua puluh empat ribu delapan ratus sembilan puluh sembilan ribu rupiah) dengan demikian maka modal ditempatkan dan disetor penuh per 31 Desember 2015 menjadi sebesar Rp 164.025.990.000, yang terdiri dari 98.405 Susunan pemegang saham Perusahaan pada tanggal 31 Desember 2024 adalah sebagai berikut:

	2024		
	Saham Seri A	Saham Seri B	Jumlah
Pemerintah Provinsi	78.459	52.308.000	130.767.000.000
Pemerintah Kabupaten Pasaman	1.694	1.130.899	2.824.899.000
Pemerintah Kabupaten Pasaman Barat	1.694	1.130.899	2.824.899.000
Pemerintah Kabupaten Agam	1.694	1.130.899	2.824.899.000
Pemerintah Kabupaten Limapuluh Kota	600	400.000	1.000.000.000
Pemerintah Kota Pariaman	1.694	1.130.899	2.824.899.000
Pemerintah Kota Padang Panjang	1.694	1.130.899	2.824.899.000
Pemerintah Kota Solok	1.694	1.130.899	2.824.899.000
Pemerintah Kabupaten Solok Selatan	1.694	1.130.899	2.824.899.000
Pemerintah Kabupaten Sijunjung	900	600.000	1.500.000.000
Pemerintah Kabupaten Dharmasraya	1.694	1.130.899	2.824.899.000
Pemerintah Kota Padang	900	600.000	1.500.000.000
Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan	1.694	1.130.899	2.824.899.000
Pemerintah Kabupaten Padang Pariaman	600	400.000	1.000.000.000
Pemerintah Kabupaten Solok	1.694	1.130.899	2.824.899.000
PT Dinamika Sumbar Jaya	6	4.000	10.000.000
Jumlah Modal Sah	98.405	65.620.990	164.025.990.000

PT BALAIRUNG CITRAJAYA SUMBAR
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
 UNTUK TAHUN-TAHUN YANG BERAKHIR TANGGAL 31 DESEMBER 2024
 (Dinyatakan dalam Rupiah)

19. Pendapatan Usaha

	2024
Pendapatan Kamar	6.493.604.059
Pendapatan Makan dan Minuman	7.286.688.958
Pendapatan Sewa Ruangan	1.419.660.000
Pendapatan Hotel Lainnya	56.369.645
Jumlah Pendapatan Usaha	15.256.322.662

20. Beban Pokok Penjualan

	2024
Kamar	
Tenaga Kerja Langsung	1.137.878.692
Beban Overhead:	
Supplies Kamar	515.802.799
Cetakan dan Alat tulis	27.167.198
Transportasi	4.307.500
Entertain	150.920
Cable & TV Satellite	35.600.000
System Support/ Internet	24.737.136
Contract Service	19.800.000
Compliment (Welcome Drink)	14.160.168
Commision	37.526.509
Lain-lain (di bawah Rp 15.000.000)	12.914.286
	1.830.045.208
Makanan dan Minuman	
Beban Makanan dan Minuman	2.586.946.405
Tenaga Kerja Langsung	1.014.521.712
Beban Overhead:	
Supplies Restaurant	467.714.161
Sewa Peralatan	3.117.692
Contract Service	12.368.568
Music & Entertain	9.914.397
Lain-lain (di bawah Rp 15.000.000)	26.329.224
	4.120.912.159
Jumlah Beban Pokok Penjualan	5.950.957.367

21. Beban Pemasaran

	2024
Tenaga kerja langsung	403.645.688
Promosi, Komisi dan Ik	366.638.547
Cetakan dan Alat Tulis	23.809.917
Contract Service	19.028.568
Transportasi	205.603.600
Entertain	34.442.057
Lain-lain (di bawah Rp 20.000.000)	16.686.812
Jumlah Beban Pemasaran	1.069.855.189

PT BALAIRUNG CITRAJAYA SUMBAR
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
 UNTUK TAHUN-TAHUN YANG BERAKHIR TANGGAL 31 DESEMBER 2024
 (Dinyatakan dalam Rupiah)

22. Beban Administrasi dan Umum

	2024
Beban Pegawai	3.067.528.358
Beban Energy dan Telepon	1.610.584.113
Beban Imbalan Pasca Kerja	99.000.000
Cost Of Other	2.125.000
Manajemen Fee	181.368.429
Beban Konsultan	184.035.351
Sewa Program VHP dan Contract Service lainnya	91.424.724
Perbaikan dan Pemeliharaan	280.536.182
Lisensi dan Keanggotaan	-
Perjalanan Dinas	73.949.171
Asuransi Gedung dan Kendaraan	84.000.000
Beban Pajak Reklame & PBB	477.565.940
Entertaint	81.325.136
Cetakan dan Alat tulis	42.045.483
BBM Parkir & Transport	10.398.532
Keamanan dan Kebersihan	20.350.000
Lain-lain	150.004.699
Jumlah Beban Administrasi dan Umum	<u>6.456.241.118</u>

-

23. Penyusutan & Amortisasi

Beban Penyusutan Gedung	2.762.609.304
Beban Penyusutan Elektronik	154.182.300
Beban Penyusutan Perlengkapan	49.776.550
Amortisasi Tax Amnesty	-
Amortisasi Aset Tak Berwujud	11.000.025
Amortisasi Beban Ditangguhkan	(2.786.287)
Total Beban Penyusutan & Amortisasi	<u>2.974.781.892</u>

24. Manajemen Risiko Keuangan dan Pengelolaan Modal

Perusahaan memiliki risiko keuangan yang timbul dari operasi yang dilakukannya. Kebijakan manajemen risiko keuangan ditetapkan terutama untuk meyakini bahwa sumber daya yang memadai tersedia bagi pengembangan bisnis Perusahaan serta untuk mengelola risiko suku bunga, risiko kredit dan risiko likuiditas. Perusahaan menjalankan operasinya berdasarkan kebijakan dan prosedur yang ditetapkan oleh Direksi untuk meyakini efektivitas proses

Risiko keuangan utama yang dihadapi oleh Perusahaan dan kebijakan yang terkait dengan aktivitas keuangan Perusahaan diuraikan di bawah ini:

Risiko Kredit

Risiko kredit adalah risiko kerugian keuangan yang dialami Perusahaan jika pelanggan atau pihak lain yang terkait dengan instrumen keuangan gagal memenuhi liabilitasnya. Perusahaan menghadapi risiko kredit yang berasal dari kredit yang diberikan kepada pelanggan, namun demikian Perusahaan memiliki kebijakan kredit yang memastikan bahwa penjualan barang dagangan dilakukan hanya kepada pelanggan yang dapat dipercaya, dan risiko kredit dipantau secara berkesinambungan.

Risiko kredit dikendalikan melalui penerapan prosedur persetujuan kredit, pembatasan jumlah kredit dan aktivitas pemantauan. Perusahaan tidak meminta jaminan untuk piutang yang diberikan.

Pada tanggal pelaporan, eksposur maksimum Perusahaan terhadap risiko kredit yang berasal dari piutang adalah sebatas nilai tercatat piutang yang disajikan di laporan posisi keuangan.

Risiko Likuiditas

Risiko likuiditas adalah risiko bahwa Perusahaan tidak dapat memenuhi liabilitas keuangannya pada saat jatuh tempo akibat tidak tersedianya dana.

Perusahaan mengelola eksposurnya terhadap likuiditas agar dapat membiayai pengeluaran untuk barang modal dan aktivitas operasinya serta melunasi liabilitas pada saat jatuh tempo dengan memelihara tingkat saldo kas dan bank yang memadai (catatan 3)

Pada tanggal pelaporan, eksposur maksimum Perusahaan terhadap risiko likuiditas berasal dari utang usaha dan utang lain-lain, dan biaya masih harus dibayar sejumlah nilai tercatatnya.

Manajemen Modal

Perusahaan bertujuan mencapai struktur modal yang optimal untuk memenuhi tujuan usaha, diantaranya dengan mempertahankan rasio modal yang sehat dan maksimalisasi nilai pemegang saham. Manajemen memantau modal dengan menggunakan beberapa ukuran *leverage* keuangan.

23. Tanggung Jawab Manajemen atas Laporan Keuangan

Manajemen Perusahaan bertanggung jawab atas penyusunan Laporan Keuangan un Audit 2024

24. Peristiwa Periode neraca

Pada tanggal 26 September 2024, Manajemen PT.BCS telah menindaklanjuti salah satu keputusan RUPSLB yang tertuang pada Akta Notaris Catur Virgo, SH No. 15 tanggal 14 Agustus 2024 yakni PT BCS telah melakukan penandatanganan Kerjasama Operasi dengan PT. Metropolitan Golden Management (Horison Group) dengan nomor 241/BCS/PKSM/IX/2024 dan nomor 010/PKS-OPS/Balairung-MGM/IX/2024, dimana kerjasama tersebut akan berlangsung selama 10 tahun mulai 1 Januari 2025 s.d 31 Desember 2034 dan disertai INvestasi oleh Horison Group

**IKHTISAR LAPORAN DANA DESA
TAHUN 2024**



PEMERINTAH KABUPATEN PESISIR SELATAN
SEKRETARIAT DAERAH

Jln. H. Agus Salim No. 1 Painan, Kabupaten Pesisir Selatan, Sumatera Barat 25651
Telepon 21000-21414 Fax. 21414-22169,
Laman Setdapessel.go.id, Pos-el Setda@pessel.go.id

Pesisir Selatan, 23 Januari 2025

Nomor : 000/14/BPKPAD/2025
Sifat : Biasa
Lampiran : -
Perihal : **Permintaan Data Ikhtisar
Dana Desa TA 2024**

Yth. Kepala DPM dan Desa
Pengendalian Penduduk dan KB
Kabupaten Pesisir Selatan
di-
Tempat

Dalam rangka penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Pesisir Selatan TA 2024, dengan ini disampaikan hal-hal sebagai berikut:

1. Laporan Keuangan Pemerintah Daerah disusun dengan melakukan konsolidasi seluruh laporan keuangan SKPD dengan melampirkan data dan laporan terkait, termasuk laporan Ikhtisar Dana.
2. Agar menyampaikan Laporan Ikhtisar Dana Desa TA 2024 *hardcopy dan softcopy* kepada Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD) selaku entitas pelaporan Pemerintah Daerah, melalui Subbid Akuntansi dan Pembukuan pada Bidang Akuntansi dan Bina Keuangan BPKPAD paling lambat tanggal 30 Januari 2025.

Demikian disampaikan untuk dapat dilaksanakan dengan baik. Terima kasih.

Sekretaris Daerah



MAWARDI ROSKA, S.IP.

31/1-25
Tun.



PEMERINTAH KABUPATEN PESISIR SELATAN
**DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA,
PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA
BERENCANA**

Jl. Setia Budi NO. 200, Painan Kode Pos : 25611
Telp. (0756) 21293 email : dpmdppkbpeasel@gmail.com

IKHTISAR LAPORAN DANA DESA TAHUN ANGGARAN 2024
Nomor : 400.10.2.4/014/DPMDPPKB/PS/1/2025

Dengan ditetapkannya Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa, telah memberi ruang gerak yang luas bagi Desa untuk mengelola pemerintahannya sendiri. Hal ini terlihat pada pasal 1 (1) UU tentang Desa, menjelaskan bahwa Desa adalah Desa dan Desa Adat atau yang disebut dengan nama lain merupakan kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Republik Indonesia

Didalam UU Desa pasal 4 disebutkan bahwa pengaturan Desa bertujuan untuk:

- a. memberikan pengakuan dan penghormatan atas Desa yang sudah ada dengan keberagamannya sebelum dan sesudah terbentuknya Negara Kesatuan Republik Indonesia,
- b. memberikan kejelasan kedudukan Desa dalam system ketatanegaraan Republik Indonesia dalam mengatur dan mengurus urusan pemerintahan Desa dan kepentingan masyarakat setempat demi mewujudkan keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia.
- c. melestarikan dan memajukan adat, tradisi, dan budaya masyarakat Desa,
- d. mendorong prakarsa, gerakan, dan partisipasi masyarakat Desa untuk pengembangan potensi dan Aset Desa guna kesejahteraan bersama,
- e. membentuk pemerintahan Desa yang profesional, efisien dan efektif, terbuka, serta bertanggung jawab,
- f. meningkatkan pelayanan publik bagi warga masyarakat Desa guna mempercepat perwujudan kesejahteraan umum,
- g. meningkatkan ketahanan sosial budaya masyarakat Desa guna mewujudkan masyarakat Desa yang mampu memelihara kesatuan sosial sebagai bagian dari ketahanan nasional,
- h. memajukan perekonomian masyarakat Desa serta mengatasi kesenjangan pembangunan nasional, dan
- i. memperkuat masyarakat Desa sebagai subjek pembangunan.

UU Desa tersebut mengakui kewenangan bagi Desa dan memberdayakan Desa agar menjadi kuat, maju, mandiri, dan demokratis sehingga dapat menciptakan landasan dalam melaksanakan pemerintahan dan pembangunan menuju masyarakat yang adil, makmur, dan sejahtera. UU Desa juga memberikan kewenangan luas kepada Desa di bidang penyelenggaraan pemerintahan desa, pelaksanaan pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan desa, dan pemberdayaan masyarakat desa berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan adat istiadat desa.

Peran besar yang diterima Desa tentunya disertai dengan kewajiban dan tanggungjawab yang besar juga, hal ini dapat terlihat pada penyelenggaraan pemerintahan Desa khususnya dalam pengelolaan keuangan Desa harus dikelola berdasarkan asas-asas transparansi, akuntabel, partisipatif serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran. Pengelolaan keuangan Desa mulai dari perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban keuangan Desa

Sebagai pedoman dalam pengelolaan keuangan Desa di Kabupaten Pesisir Selatan, berpedoman pada mekanisme dan peraturan yang jelas :

- A. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa
- B. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 7 Tahun 2023 tentang Rincian Prioritas Penggunaan Dana Desa
- C. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 13 Tahun 2023 tentang Petunjuk Operasional atas Fokus Penggunaan Dana Desa Tahun 2024.
- D. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 145 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Dana Desa
- E. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 146 Tahun 2023 tentang Pengalokasian Dana Desa Setiap Desa, Penyaluran dan Penggunaan Dana desa Tahun Anggaran 2024.

Dengan adanya berbagai aturan yang dikeluarkan oleh pemerintah sebagai pedoman dalam pengelolaan keuangan Desa, maka diharapkan pengelolaan keuangan Desa dapat dilaksanakan secara akuntabel sesuai dengan prinsip-prinsip pengelolaan keuangan Desa. Pada pasal 72 Undang Undang 3 tahun 2024 tentang Perubahan kedua Atas Undang Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, bahwa sumber keuangan desa berasal dari:

- Pendapatan Asli Desa,
- Alokasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara,
- Bagian hasil pajak daerah dan retribusi daerah Kabupaten/Kota,
- Alokasi Dana Desa,
- Bantuan keuangan dari APBD Provinsi dan APBD Kabupaten/Kota,
- Hibah dan sumbangan yang tidak mengikat dari pihak ketiga,
- Dan lain-lain pendapatan desa yang sah.

A. Berdasarkan hal tersebut pemerintah pusat telah memenuhi amanat UU Desa, dengan telah mengalokasikan Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan Belanja Negara dalam rangka mendanai pelaksanaan urusan yang telah diserahkan kepada Daerah dan Desa. Sesuai dengan PMK Nomor 146/2023 Tentang Pengalokasian Dana Desa setiap tahun, Penyaluran dan Penggunaan Dana Desa TA 2024 dengan ketentuan:

1. Besaran pagu Dana Desa sebagaimana dimaksud terdiri atas :
 - a. Pagu Dana Desa yang ditentukan penggunaannya Desa
 - b. Pagu Dana Desa yang tidak ditentukan penggunaannya
2. Pagu Dana Desa yang ditentukan penggunaannya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan anggaran Dana Desa yang diperuntukkan untuk :
 - a. Program pemulihan ekonomi, berupa perlindungan social dan penanganan kemiskinan ekstrem dalam bentuk BLT Desa
 - b. Program ketahanan pangan
 - c. Program pencegahan dan penurunan stunting
1. Penyaluran Dana Desa yang ditentukan penggunaannya dilakukan dalam 2 (dua) tahap dengan ketentuan sebagai berikut :
 - a. Tahap I sebesar 60% (enam puluh persen) dari pagu dana desa yang ditentukan penggunaannya setiap Desa, dilakukan paling lambat Bulan Juni
 - b. Tahap II sebesar 40% (empat puluh persen) dari pagu dana desa yang ditentukan penggunaannya setiap desa dilakukan paling cepat Bulan April
2. Penyaluran Dana Desa yang ditentukan penggunaannya dilaksanakan setelah Kuasa Pengguna Anggaran, Bendahara Umum Negara penyaluran Dana Desa, insentif, Otonomi Khusus, dan Keistimewaan menerima dokumen persyaratan penyaluran dari bupati/walikota secara lengkap dan benar.

Penyaluran Dana Desa dilaksanakan setelah KPPN menerima dokumen persyaratan penyaluran dari Kabupaten secara lengkap dan benar, dengan ketentuan;

1. Tahap I (satu) berupa :
 - a. Peraturan Desa Tentang APBDesa.
 - b. Surat kuasa pemindahbukuan Dana Desa:
 - c. Peraturan Kepala Desa atau keputusan kepala Desa mengenai penetapan keluarga penerima manfaat BLT Desa dalam hal Desa menganggarkan BLT Desa : dan
2. Tahap 2 (dua) berupa :
 - a. Laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran Dana Desa tahun anggaran sebelumnya;
 - b. Laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran Dana Desa tahap I menunjukan rata-rata realisasi penyerapan paling sedikit 60% (enam puluh persen) dan rata-rata capaian keluaran menunjukan paling sedikit 40% (empat puluh persen).

Jumlah Dana Desa sesuai Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 146 Tahun 2023 ttg pengalokasian dana desa setiap desa, penyaluran, dan penggunaan dana desa tahun anggaran 2024 dan keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia nomor 352 tahun 2024 tentang rincian insentif desa setiap desa tahun anggaran 2024 yang diterima Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan dari RKUN ke RKDesa adalah sebesar **Rp, 167.649.926.000,- (Seratus enam puluh tujuh milyar enam ratus empat puluh Sembilan juta Sembilan ratus dua puluh enam ribu rupiah),- terlampir**

Peraturan Menteri Desa, PDT, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2023 tentang rincian Prioritas Penggunaan Dana Desa menjelaskan prioritas penggunaan Dana Desa digunakan untuk membiayai pelaksanaan program dan kegiatan di bidang Pemerintahan Desa, Pembangunan Desa, Pembinaan Desa, Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Bidang penanggulangan Bencana (Belanja tidak terduga), Pemerintah Desa/Nagari di Kabupaten Pesisir Selatan dalam Pemanfaatan Dana Desa tahun anggaran 2024 sebagai berikut :

Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2024 adalah :

A. Untuk mengoperasionalkan tujuan pembangunan Desa yang dimandatkan oleh Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa, maka penggunaan Dana Desa diprioritaskan untuk mewujudkan 8 (delapan) tipologi desa dan 17 (tujuh belas) tujuan SDGs Desa (Sustainable Development Goals Desa adalah perencanaan pembangunan berkelanjutan di tingkat desa yang terintegrasi dengan tujuan pembangunan berkelanjutan (SDGs) PBB, program ini diluncurkan oleh pemerintah tahun 2015) sebagai berikut :

1. Desa tanpa kemiskinan dan kelaparan
SDGs Desa 1 ; Desa tanpa kemiskinan dan
SDGs Desa 2 ; Desa tanpa kelaparan
2. Desa ekonomi tumbuh merata
SDGs Desa 8 ; Pertumbuhan ekonomi dan desa merata
SDGs Desa 9 ; Infrastruktur dan inovasi desa sesuai kebutuhan
SDGs Desa 10 ; Desa tanpa kesenjangan
SDGs Desa 12 ; Konsumsi dan produksi desa sadar lingkungan
3. Desa peduli kesehatan
SDGs Desa 3 ; Desa sehat dan sejahtera
SDGs Desa 6 ; Desa dengan air minum dan sanitasi aman dan
SDGs Desa 11 ; Kawasan permukiman desa aman dan nyaman
4. Desa peduli lingkungan
SDGs Desa 7 ; Desa berenergi bersih dan terbarukan
SDGs Desa 13 ; Desa tanggap perubahan iklim
SDGs Desa 14 ; Desa peduli lingkungan laut dan
SDGs Desa 15 ; Desa peduli lingkungan darat
5. Desa peduli pendidikan
SDGs Desa 4 ; Pendidikan desa berkualitas
6. Desa ramah perempuan
SDGs Desa 5 ; Keterlibatan perempuan desa
7. Desa berjejaring
SDGs Desa 17 ; Kemitraan untuk pembangunan desa
8. Desa tanggap budaya
SDGs Desa 16 ; Desa damai berkeadilan

B. Pemulihan Ekonomi Nasional Sesuai Kewenangan Desa.

Dana Desa untuk pemulihan ekonomi nasional sesuai kewenangan Desa meliputi:

1. Pembentukan, pengembangan, dan revitalisasi badan usaha milik Desa/badan usaha milik Desa bersama dan meliputi:
 - a. pendirian badan usaha milik Desa dan/atau badan usaha milik Desa bersama;
 - b. penyertaan modal badan usaha milik Desa dan/atau badan usaha milik Desa bersama;
 - c. penguatan permodalan badan usaha milik Desa dan/atau badan usaha milik Desa bersama; dan
 - d. pengembangan usaha badan usaha milik Desa dan/atau badan usaha milik Desa bersama yang difokuskan kepada pembentukan dan pengembangan produk unggulan Desa dan/atau produk unggulan kawasan perdesaan, antara lain:
 1. Pengelolaan hutan Desa;
 2. Pengelolaan hutan adat;
 3. Pengelolaan air minum;

4. Pengelolaan pariwisata Desa;
 5. Pengolahan ikan (pengasapan, penggaraman, dan perebusan);
 6. Pengelolaan wisata hutan mangrove (tracking, jelajah mangrove dan wisata edukasi);
 7. Pelatihan sentra pembenihan mangrove dan vegetasi pantai;
 8. Pelatihan pembenihan ikan;
 9. Pelatihan usaha pemasaran dan distribusi produk perikanan; dan
 10. Pengolahan sampah.
- C. kegiatan lainnya untuk mewujudkan pembentukan, pengembangan, dan revitalisasi badan usaha milik Desa dan/atau badan usaha milik Desa bersama yang sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam Musyawarah Desa.
1. Penyediaan listrik Desa
 - A. pembangkit listrik tenaga mikrohidro;
 - B. pembangkit listrik tenaga biodiesel;
 - C. pembangkit listrik tenaga matahari;
 - D. pembangkit listrik tenaga angin;
 - E. instalasi biogas;
 - F. jaringan distribusi tenaga listrik (bukan dari Perusahaan Listrik Negara); dan
 - G. kegiatan lainnya untuk mewujudkan penyediaan listrik Desa yang sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam Musyawarah Desa.
 2. Pengembangan usaha ekonomi produktif :
 - A. pembangunan usaha berskala produktif di bidang pertanian, perkebunan, peternakan dan/atau perikanan yang difokuskan pada pembentukan dan pengembangan produk unggulan Desa dan/atau perdesaan;
 - B. pengembangan jasa serta usaha industri kecil dan/atau industri rumahan yang difokuskan kepada pembentukan dan pengembangan produk unggulan Desa dan/atau perdesaan;
 - C. penyediaan dan pengelolaan sarana/prasarana pemasaran produk unggulan Desa dan/atau perdesaan;
 - D. pendayagunaan perhutanan sosial;
 - E. pendayagunaan teknologi tepat guna yang ramah lingkungan;
 - F. investasi usaha ekonomi produktif yang ramah lingkungan; dan
 - G. kegiatan lainnya untuk mewujudkan pengembangan usaha ekonomi produktif ramah lingkungan yang sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam Musyawarah Desa.
- D. Program Prioritas Nasional Sesuai Kewenangan Desa Prioritas Penggunaan Dana Desa untuk program prioritas nasional sesuai kewenangan Desa meliputi:
1. Pendataan Desa .
 - A. pendataan potensi dan sumberdaya pembangunan Desa;
 - B. pendataan pada tingkat rukun tetangga;
 - C. pendataan pada tingkat keluarga;
 - D. pemutakhiran data Desa termasuk data kemiskinan; dan
 - E. kegiatan pendataan Desa lainnya yang sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam Musyawarah Desa.
 2. Pemetaan potensi dan sumber daya pembangunan Desa
 - A. penyusunan peta potensi dan sumber daya pembangunan Desa;
 - B. pemutakhiran peta potensi dan sumber daya pembangunan Desa;
 - C. kegiatan pemetaan potensi dan sumber daya pembangunan Desa lainnya yang sesuai kewenangan Desa dan diputuskan dalam Musyawarah Desa.
 3. Pengembangan teknologi informasi dan komunikasi .
 - A. pengembangan, pengelolaan dan pengintegrasian sistem administrasi keuangan dan aset Desa dengan aplikasi digital yang disediakan Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi;
 - B. pengembangan, pengelolaan dan pengintegrasian sistem informasi Desa yang berbasis aplikasi digital yang disediakan Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi;
 - C. pengembangan keterbukaan informasi pembangunan Desa berbasis aplikasi digital; dan
 - D. pengadaan sarana/prasarana teknologi informasi dan komunikasi berbasis aplikasi digital meliputi:
 1. tower untuk jaringan internet;
 2. pengadaan komputer;
 3. Smartphone; dan
 4. langganan internet.

- E kegiatan pengembangan, pengelolaan dan pengintegrasian teknologi informasi dan komunikasi lainnya yang sesuai dengan kewenangan Desa yang diputuskan dalam Musyawarah Desa.
4. Pengembangan Desa wisata;
- A. pengadaan, pembangunan, pemanfaatan dan pemeliharaan sarana dan prasarana Desa wisata;
 - B. promosi Desa wisata diutamakan melalui gelar budaya dan berbasis digital;
 - C. pelatihan pengelolaan Desa wisata;
 - D. pengelolaan Desa wisata;
 - E. kerjasama dengan pihak ketiga untuk investasi Desa wisata; dan
 - F. kegiatan pengembangan Desa wisata lainnya yang sesuai dengan kewenangan Desa yang diputuskan dalam Musyawarah Desa.
5. Penguatan ketahanan pangan ;
- A. pengembangan usaha pertanian, perkebunan, perhutanan, peternakan dan/atau perikanan untuk ketahanan pangan;
 - B. pembangunan lumbung pangan Desa;
 - C. pengolahan pasca panen; dan
 - D. kegiatan penguatan ketahanan pangan lainnya yang sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam Musyawarah Desa.
6. Pencegahan stunting di Desa;
- A. pengelolaan advokasi konvergensi pencegahan stunting di Desa dengan menggunakan aplikasi digital electronic-Human Development Worker (e-HDW);
 - B. pemberian insentif untuk Kader Pembangunan Manusia (KPM), kader posyandu dan pendidik Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD);
 - C. tindakan promotif dan preventif untuk pencegahan stunting melalui rumah Desa sehat;
 - D. memberikan layanan peningkatan layanan kesehatan, peningkatan gizi dan pengasuhan anak melalui kegiatan:
 - 1. kesehatan ibu dan anak;
 - 2. konseling gizi;
 - 3. air bersih dan sanitasi;
 - 4. perlindungan sosial untuk peningkatan akses ibu hamil dan menyusui serta balita terhadap jaminan kesehatan dan administrasi kependudukan;
 - 5. pendidikan tentang pengasuhan anak melalui Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD); 6) pengasuhan anak di keluarga termasuk pencegahan perkawinan anak; dan
 - 6. pendayagunaan lahan pekarangan keluarga dan tanah kas Desa untuk pembangunan Kandang, Kolam dan Kebun (3K) dalam rangka penyediaan makanan yang sehat dan bergizi untuk ibu hamil, balita dan anak sekolah.
7. Pengembangan Desa inklusif
- A. kegiatan pelayanan dasar untuk kelompok marginal dan rentan yaitu: perempuan, anak, lanjut usia, suku dan masyarakat adat terpencil, penghayat kepercayaan, disabilitas, kelompok masyarakat miskin, dan kelompok rentan lainnya;
 - B. penyelenggaraan forum warga untuk penyusunan usulan kelompok marginal dan rentan;
 - C. pemberian bantuan hukum bagi kelompok marginal dan rentan;
 - D. penguatan nilai-nilai keagamaan dan kearifan lokal untuk membentuk kesalehan sosial di Desa; dan
 - E. kegiatan lainnya untuk mewujudkan Desa inklusif yang sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam Musyawarah Desa.

ahun 2024 ditemui berbagai kendala permasalahan dalam pengelolaan Dana Desa yaitu :

1. Belum disiplinnya pemerintah nagari dalam pembuatan pertanggungjawaban penggunaan Dana Desa/Nagari sehingga nagari selalu terlambat dalam penyampaian laporan nagari.
2. Adanya kegiatan wajib dari pusat seperti pendataan SDGS desa yang harus dilaksanakan di tahun berjalan, nagari harus mengurangi kegiatan yg sudah di anggarkan untuk di hilangkan, agar bisa membiayai kegiatan pendataan SDGS Desa, dan membuat nagari terlambat dalam pelaporan.
3. Susahnya jaringan Internet di beberapa Nagari.
4. Sarana prasarana yang tidak memadai di nagari
4. Masih kurangnya pembinaan dan peningkatan kapasitas SDM aparatur di nagari terhadap pengelolaan keuangan nagari.

Palinan, 30 Januari 2025

Kepala Dinas

SALMAN ALFARISI BRUTU,S,STP.M.Si
NIP. 19780215 199802 1 002

**IKHTISAR
LAPORAN KINERJA PEMERINTAH
TAHUN 2024**



LKjIP 2024

LAPORAN
KINERJA

PEMERINTAH KABUPATEN
PESISIR SELATAN
TAHUN 2024

TAHUN ANGGARAN 2025

IKHTISAR EKSEKUTIF

Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan terus berupaya menyelenggarakan pemerintahan dengan berprinsip pada tata kelola pemerintahan yang baik dan berorientasi pada hasil sesuai dengan kewenangannya. Dalam mewujudkan good governance, akuntabilitas merupakan salah satu aspek penting yang harus diimplementasikan dalam manajemen pemerintahan. Akuntabilitas kinerja harus memuat visi, misi, tujuan dan sasaran, serta memiliki arah dan tolok ukur yang jelas atas perumusan perencanaan strategis organisasi sehingga menggambarkan hasil yang ingin dicapai dalam bentuk sasaran yang dapat diukur, diuji dan dipertanggungjawabkan.

Hasil analisis dan evaluasi dari capaian indikator kinerja terhadap 9 (sembilan) sasaran strategis dan 12 (dua belas) indikator kinerja, sebanyak 10 (sepuluh) indikator nilainya termasuk kategori **Sangat Baik** dan sebanyak 2 (dua) indikator nilainya termasuk kategori **Baik** yang telah diukur dalam Bab III, keberhasilan/kegagalan Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan dalam melaksanakan misi yang diemban dapat dilihat dari capaian indikator kinerja tahun 2024 sebagai berikut :

MISI 1 : Memperkuat Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih, Efektif, Demokratif dan Transparan.

Pencapaian Kinerja untuk 1 (satu) sasaran strategis dan 1 (satu) indikator kinerja yang terdapat pada Misi 1 sebesar 109,88%. Berdasarkan klasifikasi penilaian keberhasilan/kegagalan yang ditetapkan termasuk kategori **Sangat Baik**. Rincian capaian indikator kinerja per sasaran strategis dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel. 1
Capaian Indikator Kinerja Sasaran Strategis Misi 1

NO.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	2023		
				TARGET	REALISASI	CAPAIAN (%)
1.1.1	Terwujudnya Reformasi Birokrasi yang Berkinerja Tinggi	1. Indek Reformasi Birokrasi	tanpa satuan	BB (72,00)	BB (79,11) *	109,88 *

Catatan : *) Hasil Evaluasi Sementara Tahun 2024

Sumber : KemenPANRB

MISI 2 : Meningkatkan Kualitas Hidup Manusia dan Masyarakat

Pencapaian Kinerja untuk 3 (tiga) sasaran strategis dan 4 (empat) indikator kinerja yang terdapat pada Misi 2 sebesar 97,55%. Berdasarkan klasifikasi penilaian keberhasilan/kegagalan yang ditetapkan termasuk kategori **Sangat Baik** dengan rincian capaian indikator kinerja per sasaran strategis dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel. 2
Capaian Indikator Kinerja Sasaran Strategis Misi 2

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA		SATUAN	2023		
					TARGET	REALISASI	CAPAIAN (%)
2.1.1	Meningkatnya kualitas hidup manusia dan masyarakat	1.	Indek Pembangunan Manusia	tanpa satuan	72,74	72,87	100,18
2.1.2	Meningkatnya Derajat Kesehatan Masyarakat	1.	Usia Harapan Hidup	tahun	73,4	73,44	100,05
2.1.3	Meningkatnya Tingkat Kesejahteraan Masyarakat	1.	Tingkat Kemiskinan	Persen	6,65	7,49	87,37
		2.	Pengeluaran per Kapita	Rp./orang/tahun	9.953.500	10.211.000	102,59
Rata-rata Capaian Kinerja Misi 2							97,55

MISI 3 : Memperkuat Kemandirian Ekonomi dengan Mendorong Sektor Potensi dan Unggulan Daerah

Pencapaian Kinerja untuk 1 (satu) sasaran strategis dan 3 (tiga) indikator kinerja yang terdapat pada Misi 3 sebesar 95,40%. Berdasarkan klasifikasi penilaian keberhasilan/kegagalan yang ditetapkan termasuk kategori **Sangat Baik** dengan rincian capaian indikator kinerja per sasaran strategis dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel. 3
Capaian Indikator Kinerja Sasaran Strategis Misi 3

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA		SATUAN	2023		
					TARGET	REALISASI	CAPAIAN (%)
3.1.1	Meningkatnya Pertumbuhan dan Pemerataan Ekonomi secara Berkelanjutan	1.	Pertumbuhan Ekonomi	Persen	5,15	3,84	74,56
		2.	Nilai PDRB	Triliyun Rupiah	10,879	11,015	101,25
		3.	Indek Gini	Tanpa Satuan	0,25	0,224	110,4
Rata-rata Capaian Kinerja Misi 3							95,40

MISI 4 : Mewujudkan Kabupaten Pesisir Selatan sebagai Daerah Tujuan Wisata yang Nyaman dan Berkesan

Pencapaian Kinerja untuk 1 (satu) sasaran strategis dan 1 (satu) indikator kinerja yang terdapat pada Misi 4 sebesar 76,30%. Berdasarkan klasifikasi penilaian keberhasilan/kegagalan yang ditetapkan termasuk kategori **Baik** dengan rincian capaian indikator kinerja per sasaran strategis dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel. 4
Capaian Indikator Kinerja Sasaran Strategis Misi 4

NO.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	2023		
				TARGET	REALISASI	CAPAIAN (%)
4.1.1	Meningkatnya Kontribusi Pariwisata dan Ekonomi Kreatif bagi Kesejahteraan Masyarakat	1. Kontribusi Sektor Pariwisata terhadap PAD Kabupaten Pesisir Selatan	persen	2,7	2,06	76,30

MISI 5 : Mewujudkan Pendidikan yang Berkualitas untuk Menghasilkan Sumber Daya Manusia yang Beriman, Kreatif dan Berdaya Saing

Pencapaian Kinerja untuk 2 (dua) sasaran strategis dan 2 (dua) indikator kinerja yang terdapat pada Misi 5 sebesar 115,34%. Berdasarkan klasifikasi penilaian keberhasilan/kegagalan yang ditetapkan termasuk kategori **Sangat Baik** Rincian capaian indikator kinerja per sasaran strategis dapat dilihat pada tabel berikut

Tabel. 5
Capaian Indikator Kinerja Sasaran Strategis Misi 5

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	2023		
				TARGET	REALISASI	CAPAIAN (%)
5.1.1	Terwujudnya Pendidikan yang berkualitas	1. Persentase Pemenuhan 8 Standar Pendidikan - Indek Pencapaian SPM	tanpa satuan	70,00	91,57	130,81
5.1.2	Terwujudnya SDM yang Beriman, Kreatif dan Berdaya Saing	1. Indek Daya Saing Daerah Bidang SDM	tanpa satuan	Tinggi (3,775)	Tinggi (3,770)*	99,87*
Rata-rata Capaian Kinerja Misi 5						115,34

Catatan : *) Data Realisasi Tahun 2023

Sumber : Badan Riset dan Inovasi Nasional

MISI 6 : Mewujudkan Kondisi Masyarakat yang Aman, Tentram dan Dinamis

Pencapaian Kinerja untuk 1 (satu) sasaran strategis dan 1 (satu) indikator kinerja yang terdapat pada Misi 6 sebesar 97,83%. Berdasarkan klasifikasi penilaian keberhasilan/kegagalan yang ditetapkan termasuk kategori ***Sangat Baik***. Rincian capaian indikator kinerja per sasaran strategis dapat dilihat pada tabel berikut

Tabel. 6
Capaian Indikator Kinerja Sasaran Strategis Misi 6

NO.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA		SATUAN	2023		
					TARGET	REALISASI	CAPAIAN (%)
6.1.1	Terciptanya kondisi Masyarakat Pesisir Selatan yang Aman, Tentram dan Dinamis	1.	Indek Kebahagiaan Masyarakat	tanpa satuan	72,92	71,34*	97,83*

Catatan : *) Data Realisasi Tahun 2021

Sumber : Badan Pusat Statistik